

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJENE NOMOR...TAHUN.....
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
8. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.

9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan
10. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu
11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
16. Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
17. Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. LRA Tahun Anggaran 2025;

- b. LP-SAL Tahun Anggaran 2025;
 - c. Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025;
 - d. LO Tahun Anggaran 2025;
 - e. LAK Tahun Anggaran 2025;
 - f. LPE Tahun Anggaran 2025; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 3

LRA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, memberikan informasi keuangan:

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp881.015.994.509,59 (delapan ratus delapan puluh satu miliar lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan rupiah koma lima puluh sembilan sen) atau sebesar 97,21% (sembilan puluh tujuh koma dua puluh satu perseratus) dari anggaran senilai Rp906.226.956.217,00 (sembilan ratus enam miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp25.210.961.707,41 (dua puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah koma empat puluh satu sen);
- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp863.664.601.041,78 (delapan ratus enam puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus satu ribu empat puluh satu rupiah koma tujuh puluh delapan sen) atau sebesar 94,84% (sembilan puluh empat koma delapan puluh Empat perseratus) dari anggaran senilai Rp910.562.452.913,69 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah koma enam puluh sembilan sen) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp46.897.851.871,91 (empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah koma

- sembilan puluh satu sen);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17.351.393.467,81 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah koma delapan puluh satu sen) atau (400,21)% (minus empat ratus koma dua puluh satu perseratus) dari anggaran defisit sebesar Rp4.335.496.696,69 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah koma enam puluh sembilan sen);
 - d. jumlah pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp4.335.526.092,69 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah koma enam puluh sembilan sen); dan
 - e. berdasarkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SILPA sebesar Rp21.686.919.560,50 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah koma lima puluh sen).

Pasal 4

LP-SAL Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, menyajikan informasi saldo anggaran lebih awal sebesar Rp4.835.496.696,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah koma enam puluh sembilan sen) dan penggunaan SiLPA sebesar Rp4.835.526.092,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah koma enam puluh sembilan sen) dan Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp29.396,00 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga saldo anggaran lebih akhir untuk tahun 2025 yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebesar Rp21.686.919.560,50 (dua puluh satu miliar

enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah koma lima puluh sen). Terjadi kenaikan saldo anggaran lebih sebesar Rp16.851.422.863,81 (enam belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah koma delapan puluh satu sen).

Pasal 5

Neraca per 31 Desember 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah aset senilai Rp1.615.327.299.951,19 (satu triliun enam ratus lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah koma sembilan belas sen);
- b. jumlah kewajiban senilai Rp50.294.367.073,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah); dan
- c. jumlah ekuitas senilai Rp1.565.032.932.878,19 (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah koma sembilan belas sen).

Pasal 6

LO Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, memberikan informasi sebagai berikut:

- a. pendapatan sebesar Rp847.706.615.831,17 (delapan ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah satu koma tujuh belas sen);
- b. beban operasi sebesar Rp880.695.215.211,42 (delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus sebelas rupiah koma empat puluh dua sen);
- c. beban transfer sebesar Rp48.051.945.661,00 (empat puluh delapan miliar lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
- d. surplus non operasional sebesar Rp1,00 (satu

- rupiah)
- e. defisit non operasional sebesar Rp2.306.566.438,57 (dua miliar tiga ratus enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma lima puluh tujuh sen);
 - f. pos luar biasa mengalami defisit senilai Rp2.499.579.085,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah); dan
 - g. berdasarkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, beban operasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, beban transfer sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, defisit non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf e, dan pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf f di dapatkan Defisit LO senilai Rp37.794.744.902,82 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah koma delapan puluh dua sen).

Pasal 7

LAK Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, menyajikan informasi kas sebagai berikut:

- a. saldo awal kas senilai Rp4.849.337.935,69 (empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah koma enam puluh sembilan sen);
- b. arus kas dari aktifitas operasi yang merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi mengalami surplus sebesar Rp55.134.672.208,81 (lima puluh lima miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah koma delapan puluh satu sen);
- c. arus kas dari aktifitas investasi merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset serta investasi lainnya yang

- tidak termasuk dalam setara kas mengalami defisit sebesar Rp38.283.278.741,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
- d. arus kas dari aktifitas transitoris merupakan aktifitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan mengalami Defisit sebesar Rp26.843.710,00 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah); dan
 - e. berdasarkan informasi kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diperoleh saldo akhir kas sebesar Rp21.727.604.509,50 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat ribu lima ratus sembilan rupiah koma lima puluh sen).

Pasal 8

LPE Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf, menyajikan informasi kenaikan ekuitas sampai dengan 31 Desember tahun 2025 dibandingkan dengan ekuitas awal sebesar Rp1.602.237.782.484,35 (satu triliun enam ratus dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen) dari Defisit LO sebesar Rp37.794.744.902,82 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah koma delapan puluh dua sen) dan dari dampak kumulatif perubahan Ekuitas sebesar Rp589.895.296,66 (lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah koma enam puluh enam sen) sehingga diperoleh Ekuitas akhir sebesar Rp1.565.032.932.878,19 (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah koma sembilan belas sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, Tahun

Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. lampiran I (satu) LRA:
 1. lampiran I.1 (satu titik satu) ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. lampiran I.2 (satu titik dua) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. lampiran I.3 (satu titik tiga) rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 4. lampiran I.4 (satu titik empat) rekapitulasi realisasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
- b. lampiran II (dua) LP-SAL;
- c. lampiran III (tiga) LO;
- d. lampiran IV (empat) LPE;
- e. lampiran V (lima) Neraca;
- f. lampiran VI (enam) LAK;
- g. lampiran VII (tujuh) catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII (delapan) daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX (sembilan) daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X (sepuluh) daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI (sebelas) daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- l. lampiran XII (dua belas) daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. lampiran XIII (tiga belas) daftar rekapitulasi aset tetap;

- n. lampiran XIV (empat belas) daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. lampiran XV (lima belas) daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI (enam belas) daftar dana cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII (tujuh belas) daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII (delapan belas) daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX (sembilan belas) daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX (dua puluh) ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah:
 - 1. Lampiran XX.1 (dua puluh titik satu) ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - 2. Lampiran XX.2 (dua puluh titik dua) ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di
Majene
Pada tanggal ...

BUPATI MAJENE,

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di
Majene Padatanggal
...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN... NOMOR

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR...TAHUN.....
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 197 ayat (1) dan ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan daerah maupun tata kelola keuangan daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasan antara DPRD bersama Kepala Daerah, pengambilan keputusan, dan penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Pasal 190 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah bahwa Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan oleh SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup

Jelas Pasal 2

Cukup

Jelas Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas Pasal 6
Cukup Jelas Pasal 7
Cukup Jelas Pasal 8
Cukup Jelas Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN...NOMOR...

DAFTAR ISI

Halaman

Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :

Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Lampiran I.2 : Ringkasan LRA yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Lampiran I.3 : Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.....	1
- Dinas Kesehatan.....	11
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	25
- Satuan Polisi Pamong Praja	29
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32
- Dinas Sosial	35
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	39
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43
- Dinas Ketahanan Pangan.....	46
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	49
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	52
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	56
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	59
- Dinas Perhubungan	62
- Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik.....	65
- Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.....	68

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	76
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82
- Dinas Kelautan dan Perikanan	87
- Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	90
- Sekretariat Daerah	95
- Sekretariat DPRD	102
- Badan Perencanaan Daerah	108
- Badan Keuangan dan Aset Daerah	113
- Badan Pendapatan Daerah	119
- Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	123
- Badan Riset dan Inovasi Daerah	199
- Inspektorat	128
- Kecamatan Banggae	131
- Kecamatan Banggae Timur	135
- Kecamatan Pamboang	141
- Kecamatan Sendana	144
- Kecamatan Tammeroddo Sendana.....	147
- Kecamatan Tubo Sendana	149
- Kecamatan Ulumanda	151
- Kecamatan Malunda	153
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	155

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Lampiran III : Laporan Operasional (LO)

Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Lampiran V	: NERACA
Lampiran VI	: Laporan Arus Kas (LAK)
Lampiran VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
Lampiran XI	: Daftar Pernyataan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Lampiran XII	: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran XVI	: Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Lampiran XIX	: Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya
Lampiran XX	: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

LAMPIRAN I.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025

KABUPATEN MAJENE
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan	906.226.956.217,00	881.015.994.509,59	(25.210.961.707,41)	97,22
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	78.541.114.754,00	72.461.370.365,00	(6.079.744.389,00)	92,26
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,25
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,25
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,25
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,25
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 4.1.02	Retribusi Daerah	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,25
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	76.741.114.754,00	71.509.780.372,00	(5.231.334.382,00)	93,18
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	20.521.114.754,00	19.712.140.359,00	(808.974.395,00)	96,06
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	20.521.114.754,00	19.712.140.359,00	(808.974.395,00)	96,06
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.521.114.754,00	19.712.140.359,00	(808.974.395,00)	96,06
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.02	Retribusi Daerah	20.521.114.754,00	19.712.140.359,00	(808.974.395,00)	96,06
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0001	Rumah Sakit Umum Daerah	56.220.000.000,00	51.797.640.013,00	(4.422.359.987,00)	92,13
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0001 4	PENDAPATAN DAERAH	56.220.000.000,00	51.797.640.013,00	(4.422.359.987,00)	92,13
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0001 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.220.000.000,00	51.797.640.013,00	(4.422.359.987,00)	92,13
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0001 4.1.02	Retribusi Daerah	56.220.000.000,00	51.797.640.013,00	(4.422.359.987,00)	92,13
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.500.000.000,00	848.849.993,00	(651.150.007,00)	56,59
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000.000,00	848.849.993,00	(651.150.007,00)	56,59
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000.000,00	848.849.993,00	(651.150.007,00)	56,59
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000.000,00	848.849.993,00	(651.150.007,00)	56,59
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	848.849.993,00	(651.150.007,00)	56,59
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.949.661.000,00	2.678.135.900,00	(1.271.525.100,00)	67,81
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	575.000.000,00	352.819.000,00	(222.181.000,00)	61,36
2.11 2.11.3.28.0.00.11.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	575.000.000,00	352.819.000,00	(222.181.000,00)	61,36
2.11 2.11.3.28.0.00.11.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	575.000.000,00	352.819.000,00	(222.181.000,00)	61,36
2.11 2.11.3.28.0.00.11.0000 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	575.000.000,00	352.819.000,00	(222.181.000,00)	61,36
2.11 2.11.3.28.0.00.11.0000 4.1.02	Retribusi Daerah	575.000.000,00	352.819.000,00	(222.181.000,00)	61,36
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.200.000.000,00	950.184.000,00	(249.816.000,00)	79,18
2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000	Dinas Perhubungan	1.200.000.000,00	950.184.000,00	(249.816.000,00)	79,18

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000.000,00	950.184.000,00	(249.816.000,00)	79,18
2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000.000,00	950.184.000,00	(249.816.000,00)	79,18
2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 4.1.02	Retribusi Daerah	1.200.000.000,00	950.184.000,00	(249.816.000,00)	79,18
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,12
2.17 2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,12
2.17 2.17.3.30.3.31.17.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,12
2.17 2.17.3.30.3.31.17.0000 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,12
2.17 2.17.3.30.3.31.17.0000 4.1.02	Retribusi Daerah	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,12
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,28
2.22 2.22.3.26.0.00.19.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,28
2.22 2.22.3.26.0.00.19.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,28
2.22 2.22.3.26.0.00.19.0000 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,28
2.22 2.22.3.26.0.00.19.0000 4.1.02	Retribusi Daerah	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,28
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	10,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	10,00
3.25 3.25.0.00.0.00.21.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	10,00
3.25 3.25.0.00.0.00.21.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	10,00
3.25 3.25.0.00.0.00.21.0000 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	10,00
3.25 3.25.0.00.0.00.21.0000 4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	10,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	172.100.000,00	183.900.000,00	11.800.000,00	106,86
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	172.100.000,00	183.900.000,00	11.800.000,00	106,86
4.01 4.01.0.00.0.00.23.0000	Sekretariat Daerah	172.100.000,00	183.900.000,00	11.800.000,00	106,86
4.01 4.01.0.00.0.00.23.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	172.100.000,00	183.900.000,00	11.800.000,00	106,86
4.01 4.01.0.00.0.00.23.0000 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172.100.000,00	183.900.000,00	11.800.000,00	106,86
4.01 4.01.0.00.0.00.23.0000 4.1.02	Retribusi Daerah	172.100.000,00	183.900.000,00	11.800.000,00	106,86
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	823.464.080.463,00	805.682.588.244,59	(17.781.492.218,41)	97,84
5.02	KEUANGAN	823.464.080.463,00	805.682.588.244,59	(17.781.492.218,41)	97,84
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	798.971.906.893,00	789.091.010.445,34	(9.880.896.447,66)	98,76
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	798.971.906.893,00	789.091.010.445,34	(9.880.896.447,66)	98,76
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.703.176.719,00	9.865.995.461,34	162.818.742,34	101,68
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.534.611.072,00	-	100,00
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.168.565.647,00	6.331.384.389,34	162.818.742,34	102,64
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2	PENDAPATAN TRANSFER	789.268.730.174,00	779.225.014.984,00	(10.043.715.190,00)	98,73
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	768.344.427.000,00	760.123.684.301,00	(8.220.742.699,00)	98,93
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	(1.822.972.491,00)	91,29
5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000	Badan Pendapatan Daerah	24.492.173.570,00	16.591.577.799,25	(7.900.595.770,75)	67,74

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 4	PENDAPATAN DAERAH	24.492.173.570,00	16.591.577.799,25	(7.900.595.770,75)	67,74
5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.492.173.570,00	16.591.577.799,25	(7.900.595.770,75)	67,74
5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.01	Pajak Daerah	24.265.113.570,00	16.467.968.514,25	(7.797.145.055,75)	67,87
5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.02	Retribusi Daerah	226.560.000,00	87.820.000,00	(138.740.000,00)	38,76
5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000,00	35.789.285,00	35.289.285,00	7.157,86
	JUMLAH PENDAPATAN	906.226.956.217,00	881.015.994.509,59	(25.210.961.707,41)	97,22
	BELANJA	910.562.452.913,69	863.664.601.041,78	(46.897.851.871,91)	94,85
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	615.794.145.813,69	586.372.871.924,78	(29.421.273.888,91)	95,22
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	335.139.538.654,00	323.313.296.621,00	(11.826.242.033,00)	96,47
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	335.139.538.654,00	323.313.296.621,00	(11.826.242.033,00)	96,47
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5	BELANJA DAERAH	335.139.538.654,00	323.313.296.621,00	(11.826.242.033,00)	96,47
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.1	BELANJA OPERASI	324.619.746.796,00	313.278.172.290,00	(11.341.574.506,00)	96,51
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	279.583.976.121,00	269.305.994.825,00	(10.277.981.296,00)	96,32
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.850.634.675,00	35.294.858.565,00	(555.776.110,00)	98,45
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.1.05	Belanja Hibah	9.185.136.000,00	8.677.318.900,00	(507.817.100,00)	94,47
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.2	BELANJA MODAL	10.519.791.858,00	10.035.124.331,00	(484.667.527,00)	95,39
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.670.878.000,00	1.666.113.000,00	(4.765.000,00)	99,71
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.525.628.858,00	8.046.106.331,00	(479.522.527,00)	94,38
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	
1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	323.285.000,00	322.905.000,00	(380.000,00)	99,88
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	202.436.037.036,69	189.548.988.256,00	(12.887.048.780,69)	93,63
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	135.685.570.113,69	130.691.204.588,00	(4.994.365.525,69)	96,32
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5	BELANJA DAERAH	135.685.570.113,69	130.691.204.588,00	(4.994.365.525,69)	96,32
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.1	BELANJA OPERASI	129.048.148.463,69	124.822.739.401,00	(4.225.409.062,69)	96,73
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	65.055.203.467,00	63.994.942.899,00	(1.060.260.568,00)	98,37
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.992.944.996,69	60.827.796.502,00	(3.165.148.494,69)	95,05
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.2	BELANJA MODAL	6.637.421.650,00	5.868.465.187,00	(768.956.463,00)	88,41
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.320.832.787,00	838.977.298,00	(481.855.489,00)	63,52
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.114.733.863,00	4.827.965.889,00	(286.767.974,00)	94,39
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	201.855.000,00	201.522.000,00	(333.000,00)	99,84
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0001	Rumah Sakit Umum Daerah	66.750.466.923,00	58.857.783.668,00	(7.892.683.255,00)	88,18
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0001 5	BELANJA DAERAH	66.750.466.923,00	58.857.783.668,00	(7.892.683.255,00)	88,18
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0001 5.1	BELANJA OPERASI	57.083.641.386,00	51.971.611.407,00	(5.112.029.979,00)	91,04
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0001 5.1.01	Belanja Pegawai	2.069.624.160,00	1.525.778.976,00	(543.845.184,00)	73,72
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0001 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.014.017.226,00	50.445.832.431,00	(4.568.184.795,00)	91,70
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0001 5.2	BELANJA MODAL	9.666.825.537,00	6.886.172.261,00	(2.780.653.276,00)	71,24
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0001 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.124.292.964,00	372.014.600,00	(2.752.278.364,00)	11,91

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1.02 1.02.0.00.0.00.02.0001 5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.542.532.573,00	6.514.157.661,00	(28.374.912,00)	99,57
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	55.820.007.296,00	52.990.097.302,78	(2.829.909.993,22)	94,93
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.820.007.296,00	52.990.097.302,78	(2.829.909.993,22)	94,93
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 5	BELANJA DAERAH	55.820.007.296,00	52.990.097.302,78	(2.829.909.993,22)	94,93
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 5.1	BELANJA OPERASI	47.509.980.370,00	45.696.657.705,78	(1.813.322.664,22)	96,18
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	4.370.345.783,00	4.169.856.380,00	(200.489.403,00)	95,41
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.139.634.587,00	41.526.801.325,78	(1.612.833.261,22)	96,26
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 5.2	BELANJA MODAL	8.310.026.926,00	7.293.439.597,00	(1.016.587.329,00)	87,77
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	371.054.244,00	358.031.652,00	(13.022.592,00)	96,49
1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.929.872.682,00	6.926.307.945,00	(1.003.564.737,00)	87,34
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.253.472.421,00	8.103.666.417,00	(149.806.004,00)	98,18
1.04 1.04.2.10.0.00.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8.253.472.421,00	8.103.666.417,00	(149.806.004,00)	98,18
1.04 1.04.2.10.0.00.03.0000 5	BELANJA DAERAH	8.253.472.421,00	8.103.666.417,00	(149.806.004,00)	98,18
1.04 1.04.2.10.0.00.03.0000 5.1	BELANJA OPERASI	7.468.369.530,00	7.331.391.526,00	(136.978.004,00)	98,17
1.04 1.04.2.10.0.00.03.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	2.243.996.725,00	2.210.377.110,00	(33.619.615,00)	98,50
1.04 1.04.2.10.0.00.03.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.224.372.805,00	5.121.014.416,00	(103.358.389,00)	98,02
1.04 1.04.2.10.0.00.03.0000 5.2	BELANJA MODAL	785.102.891,00	772.274.891,00	(12.828.000,00)	98,37
1.04 1.04.2.10.0.00.03.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	
1.04 1.04.2.10.0.00.03.0000 5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	785.102.891,00	772.274.891,00	(12.828.000,00)	98,37
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.393.655.004,00	10.898.807.251,00	(1.494.847.753,00)	87,94
1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	5.058.520.298,00	4.749.551.938,00	(308.968.360,00)	93,89
1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 5	BELANJA DAERAH	5.058.520.298,00	4.749.551.938,00	(308.968.360,00)	93,89
1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 5.1	BELANJA OPERASI	5.058.520.298,00	4.749.551.938,00	(308.968.360,00)	93,89
1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	4.414.670.398,00	4.214.983.819,00	(199.686.579,00)	95,48
1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.849.900,00	534.568.119,00	(109.281.781,00)	83,03
1.05 1.05.0.00.0.00.06.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.335.134.706,00	6.149.255.313,00	(1.185.879.393,00)	83,83
1.05 1.05.0.00.0.00.06.0000 5	BELANJA DAERAH	7.335.134.706,00	6.149.255.313,00	(1.185.879.393,00)	83,83
1.05 1.05.0.00.0.00.06.0000 5.1	BELANJA OPERASI	6.556.134.706,00	5.370.256.283,00	(1.185.878.423,00)	81,91
1.05 1.05.0.00.0.00.06.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	4.347.548.254,00	4.214.042.499,00	(133.505.755,00)	96,93
1.05 1.05.0.00.0.00.06.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.208.586.452,00	1.156.213.784,00	(1.052.372.668,00)	52,35
1.05 1.05.0.00.0.00.06.0000 5.2	BELANJA MODAL	779.000.000,00	778.999.030,00	(970,00)	100,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
1.05 1.05.0.00.0.00.06.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	773.000.000,00	772.999.030,00	(970,00)	100,00
1.05 1.05.0.00.0.00.06.0000 5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.751.435.402,00	1.518.016.077,00	(233.419.325,00)	86,67
1.06 1.06.0.00.0.00.07.0000	Dinas Sosial	1.751.435.402,00	1.518.016.077,00	(233.419.325,00)	86,67
1.06 1.06.0.00.0.00.07.0000 5	BELANJA DAERAH	1.751.435.402,00	1.518.016.077,00	(233.419.325,00)	86,67
1.06 1.06.0.00.0.00.07.0000 5.1	BELANJA OPERASI	1.751.435.402,00	1.518.016.077,00	(233.419.325,00)	86,67
1.06 1.06.0.00.0.00.07.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	1.158.938.316,00	1.102.263.156,00	(56.675.160,00)	95,11
1.06 1.06.0.00.0.00.07.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.137.086,00	356.712.921,00	(172.424.165,00)	67,41
1.06 1.06.0.00.0.00.07.0000 5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	63.360.000,00	59.040.000,00	(4.320.000,00)	93,18
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	58.475.272.959,00	55.423.981.602,00	(3.051.291.357,00)	94,78
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.083.478.034,00	2.851.229.351,00	(232.248.683,00)	92,47
2.07 2.07.3.32.0.00.08.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.083.478.034,00	2.851.229.351,00	(232.248.683,00)	92,47
2.07 2.07.3.32.0.00.08.0000 5	BELANJA DAERAH	3.083.478.034,00	2.851.229.351,00	(232.248.683,00)	92,47
2.07 2.07.3.32.0.00.08.0000 5.1	BELANJA OPERASI	3.078.578.034,00	2.851.229.351,00	(227.348.683,00)	92,62
2.07 2.07.3.32.0.00.08.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	2.315.085.626,00	2.237.627.115,00	(77.458.511,00)	96,65
2.07 2.07.3.32.0.00.08.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	763.492.408,00	613.602.236,00	(149.890.172,00)	80,37
2.07 2.07.3.32.0.00.08.0000 5.2	BELANJA MODAL	4.900.000,00	-	(4.900.000,00)	-
2.07 2.07.3.32.0.00.08.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.900.000,00	-	(4.900.000,00)	-
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.947.792.451,00	2.784.636.863,00	(163.155.588,00)	94,47
2.08 2.08.0.00.0.00.09.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.947.792.451,00	2.784.636.863,00	(163.155.588,00)	94,47
2.08 2.08.0.00.0.00.09.0000 5	BELANJA DAERAH	2.947.792.451,00	2.784.636.863,00	(163.155.588,00)	94,47
2.08 2.08.0.00.0.00.09.0000 5.1	BELANJA OPERASI	2.897.958.451,00	2.734.802.863,00	(163.155.588,00)	94,37
2.08 2.08.0.00.0.00.09.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	1.418.388.856,00	1.360.717.310,00	(57.671.546,00)	95,93
2.08 2.08.0.00.0.00.09.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.479.569.595,00	1.374.085.553,00	(105.484.042,00)	92,87
2.08 2.08.0.00.0.00.09.0000 5.2	BELANJA MODAL	49.834.000,00	49.834.000,00	-	100,00
2.08 2.08.0.00.0.00.09.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.834.000,00	49.834.000,00	-	100,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.937.960.791,00	1.837.549.510,00	(100.411.281,00)	94,82
2.09 2.09.0.00.0.00.10.0000	Dinas Ketahanan Pangan	1.937.960.791,00	1.837.549.510,00	(100.411.281,00)	94,82
2.09 2.09.0.00.0.00.10.0000 5	BELANJA DAERAH	1.937.960.791,00	1.837.549.510,00	(100.411.281,00)	94,82
2.09 2.09.0.00.0.00.10.0000 5.1	BELANJA OPERASI	1.937.960.791,00	1.837.549.510,00	(100.411.281,00)	94,82
2.09 2.09.0.00.0.00.10.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	1.494.836.599,00	1.396.984.695,00	(97.851.904,00)	93,45

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
2.09 2.09.0.00.0.00.10.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.124.192,00	440.564.815,00	(2.559.377,00)	99,42
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3.375.381.749,00	2.928.757.781,00	(446.623.968,00)	86,77
2.10 1.04.2.10.0.00.03.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.375.381.749,00	2.928.757.781,00	(446.623.968,00)	86,77
2.10 1.04.2.10.0.00.03.0000 5	BELANJA DAERAH	3.375.381.749,00	2.928.757.781,00	(446.623.968,00)	86,77
2.10 1.04.2.10.0.00.03.0000 5.1	BELANJA OPERASI	2.513.910.049,00	2.196.386.681,00	(317.523.368,00)	87,37
2.10 1.04.2.10.0.00.03.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.513.910.049,00	2.196.386.681,00	(317.523.368,00)	87,37
2.10 1.04.2.10.0.00.03.0000 5.2	BELANJA MODAL	861.471.700,00	732.371.100,00	(129.100.600,00)	85,01
2.10 1.04.2.10.0.00.03.0000 5.2.01	Belanja Modal Tanah	861.471.700,00	732.371.100,00	(129.100.600,00)	85,01
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.797.938.727,00	6.476.724.883,00	(321.213.844,00)	95,27
2.11 2.11.3.28.0.00.11.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.797.938.727,00	6.476.724.883,00	(321.213.844,00)	95,27
2.11 2.11.3.28.0.00.11.0000 5	BELANJA DAERAH	6.797.938.727,00	6.476.724.883,00	(321.213.844,00)	95,27
2.11 2.11.3.28.0.00.11.0000 5.1	BELANJA OPERASI	6.617.286.879,00	6.336.685.783,00	(280.601.096,00)	95,76
2.11 2.11.3.28.0.00.11.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	4.043.452.529,00	3.929.462.318,00	(113.990.211,00)	97,18
2.11 2.11.3.28.0.00.11.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.573.834.350,00	2.407.223.465,00	(166.610.885,00)	93,53
2.11 2.11.3.28.0.00.11.0000 5.2	BELANJA MODAL	180.651.848,00	140.039.100,00	(40.612.748,00)	77,52
2.11 2.11.3.28.0.00.11.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.406.000,00	140.039.100,00	(366.900,00)	99,74
2.11 2.11.3.28.0.00.11.0000 5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.245.848,00	-	(40.245.848,00)	-
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.189.674.710,00	2.926.368.305,00	(263.306.405,00)	91,75
2.12 2.12.0.00.0.00.12.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.189.674.710,00	2.926.368.305,00	(263.306.405,00)	91,75
2.12 2.12.0.00.0.00.12.0000 5	BELANJA DAERAH	3.189.674.710,00	2.926.368.305,00	(263.306.405,00)	91,75
2.12 2.12.0.00.0.00.12.0000 5.1	BELANJA OPERASI	3.145.374.710,00	2.882.068.305,00	(263.306.405,00)	91,63
2.12 2.12.0.00.0.00.12.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	2.263.890.348,00	2.088.148.253,00	(175.742.095,00)	92,24
2.12 2.12.0.00.0.00.12.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	881.484.362,00	793.920.052,00	(87.564.310,00)	90,07
2.12 2.12.0.00.0.00.12.0000 5.2	BELANJA MODAL	44.300.000,00	44.300.000,00	-	100,00
2.12 2.12.0.00.0.00.12.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.300.000,00	44.300.000,00	-	100,00
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.364.102.338,00	2.087.806.776,00	(276.295.562,00)	88,31
2.13 2.13.0.00.0.00.13.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.364.102.338,00	2.087.806.776,00	(276.295.562,00)	88,31
2.13 2.13.0.00.0.00.13.0000 5	BELANJA DAERAH	2.364.102.338,00	2.087.806.776,00	(276.295.562,00)	88,31
2.13 2.13.0.00.0.00.13.0000 5.1	BELANJA OPERASI	2.364.102.338,00	2.087.806.776,00	(276.295.562,00)	88,31
2.13 2.13.0.00.0.00.13.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	1.803.108.416,00	1.719.985.570,00	(83.122.846,00)	95,39
2.13 2.13.0.00.0.00.13.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.993.922,00	367.821.206,00	(193.172.716,00)	65,57

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.229.388.401,00	6.971.234.576,00	(258.153.825,00)	96,43
2.14 2.14.0.00.0.00.14.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.229.388.401,00	6.971.234.576,00	(258.153.825,00)	96,43
2.14 2.14.0.00.0.00.14.0000 5	BELANJA DAERAH	7.229.388.401,00	6.971.234.576,00	(258.153.825,00)	96,43
2.14 2.14.0.00.0.00.14.0000 5.1	BELANJA OPERASI	7.229.388.401,00	6.971.234.576,00	(258.153.825,00)	96,43
2.14 2.14.0.00.0.00.14.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	3.194.396.754,00	3.140.172.743,00	(54.224.011,00)	98,30
2.14 2.14.0.00.0.00.14.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.034.991.647,00	3.831.061.833,00	(203.929.814,00)	94,95
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.503.317.872,00	3.274.163.177,00	(229.154.695,00)	93,46
2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000	Dinas Perhubungan	3.503.317.872,00	3.274.163.177,00	(229.154.695,00)	93,46
2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 5	BELANJA DAERAH	3.503.317.872,00	3.274.163.177,00	(229.154.695,00)	93,46
2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 5.1	BELANJA OPERASI	3.503.317.872,00	3.274.163.177,00	(229.154.695,00)	93,46
2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	3.024.492.985,00	2.870.905.718,00	(153.587.267,00)	94,92
2.15 2.15.0.00.0.00.15.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.824.887,00	403.257.459,00	(75.567.428,00)	84,22
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.283.096.474,00	3.183.881.948,00	(99.214.526,00)	96,98
2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	3.283.096.474,00	3.183.881.948,00	(99.214.526,00)	96,98
2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 5	BELANJA DAERAH	3.283.096.474,00	3.183.881.948,00	(99.214.526,00)	96,98
2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 5.1	BELANJA OPERASI	3.241.271.474,00	3.150.332.778,00	(90.938.696,00)	97,19
2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	1.799.428.262,00	1.745.926.546,00	(53.501.716,00)	97,03
2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.441.843.212,00	1.404.406.232,00	(37.436.980,00)	97,40
2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 5.2	BELANJA MODAL	41.825.000,00	33.549.170,00	(8.275.830,00)	80,21
2.16 2.16.2.20.2.21.16.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.825.000,00	33.549.170,00	(8.275.830,00)	80,21
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.907.644.558,00	3.709.864.125,00	(197.780.433,00)	94,94
2.17 2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.907.644.558,00	3.709.864.125,00	(197.780.433,00)	94,94
2.17 2.17.3.30.3.31.17.0000 5	BELANJA DAERAH	3.907.644.558,00	3.709.864.125,00	(197.780.433,00)	94,94
2.17 2.17.3.30.3.31.17.0000 5.1	BELANJA OPERASI	3.843.534.558,00	3.645.754.125,00	(197.780.433,00)	94,85
2.17 2.17.3.30.3.31.17.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	2.788.847.305,00	2.614.732.715,00	(174.114.590,00)	93,76
2.17 2.17.3.30.3.31.17.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.054.687.253,00	1.031.021.410,00	(23.665.843,00)	97,76
2.17 2.17.3.30.3.31.17.0000 5.2	BELANJA MODAL	64.110.000,00	64.110.000,00	-	100,00
2.17 2.17.3.30.3.31.17.0000 5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.110.000,00	64.110.000,00	-	100,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.215.666.967,00	2.114.547.858,00	(101.119.109,00)	95,44
2.18 2.18.0.00.0.00.18.0000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.215.666.967,00	2.114.547.858,00	(101.119.109,00)	95,44
2.18 2.18.0.00.0.00.18.0000 5	BELANJA DAERAH	2.215.666.967,00	2.114.547.858,00	(101.119.109,00)	95,44
2.18 2.18.0.00.0.00.18.0000 5.1	BELANJA OPERASI	2.215.666.967,00	2.114.547.858,00	(101.119.109,00)	95,44

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
2.18 2.18.0.00.0.00.18.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	1.867.544.757,00	1.796.356.334,00	(71.188.423,00)	96,19
2.18 2.18.0.00.0.00.18.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.122.210,00	318.191.524,00	(29.930.686,00)	91,40
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.992.877.669,00	4.962.249.502,00	(30.628.167,00)	99,39
2.19 1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	4.992.877.669,00	4.962.249.502,00	(30.628.167,00)	99,39
2.19 1.01.2.19.0.00.01.0000 5	BELANJA DAERAH	4.992.877.669,00	4.962.249.502,00	(30.628.167,00)	99,39
2.19 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.1	BELANJA OPERASI	2.261.545.320,00	2.259.321.348,00	(2.223.972,00)	99,90
2.19 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.261.545.320,00	2.259.321.348,00	(2.223.972,00)	99,90
2.19 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.2	BELANJA MODAL	2.731.332.349,00	2.702.928.154,00	(28.404.195,00)	98,96
2.19 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.838.500,00	134.584.950,00	(253.550,00)	99,81
2.19 1.01.2.19.0.00.01.0000 5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.596.493.849,00	2.568.343.204,00	(28.150.645,00)	98,92
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	-	-
2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	-	-	-	-
2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 5	BELANJA DAERAH	-	-	-	-
2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 5.1	BELANJA OPERASI	-	-	-	-
2.20 2.16.2.20.2.21.16.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
					-
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-	-	-	-
2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	-	-	-	-
2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 5	BELANJA DAERAH	-	-	-	-
2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 5.1	BELANJA OPERASI	-	-	-	-
2.21 2.16.2.20.2.21.16.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6.653.077.312,00	6.427.331.494,00	(225.745.818,00)	96,61
2.22 2.22.3.26.0.00.19.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.653.077.312,00	6.427.331.494,00	(225.745.818,00)	96,61
2.22 2.22.3.26.0.00.19.0000 5	BELANJA DAERAH	6.653.077.312,00	6.427.331.494,00	(225.745.818,00)	96,61
2.22 2.22.3.26.0.00.19.0000 5.1	BELANJA OPERASI	5.577.008.812,00	5.353.830.089,00	(223.178.723,00)	96,00
2.22 2.22.3.26.0.00.19.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.578.763,00	3.152.850.038,00	(147.728.725,00)	95,52
2.22 2.22.3.26.0.00.19.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.276.430.049,00	2.200.980.051,00	(75.449.998,00)	96,69
2.22 2.22.3.26.0.00.19.0000 5.2	BELANJA MODAL	1.076.068.500,00	1.073.501.405,00	(2.567.095,00)	99,76
2.22 2.22.3.26.0.00.19.0000 5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.076.068.500,00	1.073.501.405,00	(2.567.095,00)	99,76
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.990.457.406,00	2.884.235.453,00	(106.221.953,00)	96,45
2.23 2.23.2.24.0.00.20.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.990.457.406,00	2.884.235.453,00	(106.221.953,00)	96,45
2.23 2.23.2.24.0.00.20.0000 5	BELANJA DAERAH	2.990.457.406,00	2.884.235.453,00	(106.221.953,00)	96,45

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
2.23 2.23.2.24.0.00.20.0000 5.1	BELANJA OPERASI	2.987.707.406,00	2.881.485.453,00	(106.221.953,00)	96,44
2.23 2.23.2.24.0.00.20.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	2.118.691.734,00	2.052.173.255,00	(66.518.479,00)	96,86
2.23 2.23.2.24.0.00.20.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869.015.672,00	829.312.198,00	(39.703.474,00)	95,43
2.23 2.23.2.24.0.00.20.0000 5.2	BELANJA MODAL	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00
2.23 2.23.2.24.0.00.20.0000 5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.417.500,00	3.400.000,00	(17.500,00)	99,49
2.24 2.23.2.24.0.00.20.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.417.500,00	3.400.000,00	(17.500,00)	99,49
2.24 2.23.2.24.0.00.20.0000 5	BELANJA DAERAH	3.417.500,00	3.400.000,00	(17.500,00)	99,49
2.24 2.23.2.24.0.00.20.0000 5.1	BELANJA OPERASI	3.417.500,00	3.400.000,00	(17.500,00)	99,49
2.24 2.23.2.24.0.00.20.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.417.500,00	3.400.000,00	(17.500,00)	99,49
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.061.439.689,00	20.123.470.649,00	(937.969.040,00)	95,55
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.299.035.801,00	6.099.901.993,00	(199.133.808,00)	96,84
3.25 3.25.0.00.0.00.21.0000	Dinas Kelautan Dan Perikanan	6.299.035.801,00	6.099.901.993,00	(199.133.808,00)	96,84
3.25 3.25.0.00.0.00.21.0000 5	BELANJA DAERAH	6.299.035.801,00	6.099.901.993,00	(199.133.808,00)	96,84
3.25 3.25.0.00.0.00.21.0000 5.1	BELANJA OPERASI	6.275.600.801,00	6.076.466.993,00	(199.133.808,00)	96,83
3.25 3.25.0.00.0.00.21.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	2.272.024.871,00	2.148.992.619,00	(123.032.252,00)	94,58
3.25 3.25.0.00.0.00.21.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.003.575.930,00	3.927.474.374,00	(76.101.556,00)	98,10
3.25 3.25.0.00.0.00.21.0000 5.2	BELANJA MODAL	23.435.000,00	23.435.000,00	-	100,00
3.25 3.25.0.00.0.00.21.0000 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.435.000,00	23.435.000,00	-	100,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	195.769.000,00	195.769.000,00	-	100,00
3.26 2.22.3.26.0.00.19.0000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	195.769.000,00	195.769.000,00	-	100,00
3.26 2.22.3.26.0.00.19.0000 5	BELANJA DAERAH	195.769.000,00	195.769.000,00	-	100,00
3.26 2.22.3.26.0.00.19.0000 5.1	BELANJA OPERASI	195.769.000,00	195.769.000,00	-	100,00
3.26 2.22.3.26.0.00.19.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.769.000,00	195.769.000,00	-	100,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	13.991.773.388,00	13.349.639.156,00	(642.134.232,00)	95,41
3.27 3.27.0.00.0.00.22.0000	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	13.991.773.388,00	13.349.639.156,00	(642.134.232,00)	95,41
3.27 3.27.0.00.0.00.22.0000 5	BELANJA DAERAH	13.991.773.388,00	13.349.639.156,00	(642.134.232,00)	95,41
3.27 3.27.0.00.0.00.22.0000 5.1	BELANJA OPERASI	13.983.552.764,00	13.345.559.156,00	(637.993.608,00)	95,44
3.27 3.27.0.00.0.00.22.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	10.290.212.586,00	10.094.112.791,00	(196.099.795,00)	98,09
3.27 3.27.0.00.0.00.22.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.693.340.178,00	3.251.446.365,00	(441.893.813,00)	88,04
3.27 3.27.0.00.0.00.22.0000 5.2	BELANJA MODAL	8.220.624,00	4.080.000,00	(4.140.624,00)	49,63
3.27 3.27.0.00.0.00.22.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.220.624,00	4.080.000,00	(4.140.624,00)	49,63

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	349.975.500,00	328.274.500,00	(21.701.000,00)	93,80
3.30 2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	349.975.500,00	328.274.500,00	(21.701.000,00)	93,80
3.30 2.17.3.30.3.31.17.0000 5	BELANJA DAERAH	349.975.500,00	328.274.500,00	(21.701.000,00)	93,80
3.30 2.17.3.30.3.31.17.0000 5.1	BELANJA OPERASI	349.975.500,00	328.274.500,00	(21.701.000,00)	93,80
3.30 2.17.3.30.3.31.17.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.975.500,00	328.274.500,00	(21.701.000,00)	93,80
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	74.886.000,00	74.886.000,00	-	100,00
3.31 2.17.3.30.3.31.17.0000	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	74.886.000,00	74.886.000,00	-	100,00
3.31 2.17.3.30.3.31.17.0000 5	BELANJA DAERAH	74.886.000,00	74.886.000,00	-	100,00
3.31 2.17.3.30.3.31.17.0000 5.1	BELANJA OPERASI	70.936.000,00	70.936.000,00	-	100,00
3.31 2.17.3.30.3.31.17.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.936.000,00	70.936.000,00	-	100,00
3.31 2.17.3.30.3.31.17.0000 5.2	BELANJA MODAL	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00
3.31 2.17.3.30.3.31.17.0000 5.2.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	50,00
3.32 2.07.3.32.0.00.08.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	50,00
3.32 2.07.3.32.0.00.08.0000 5	BELANJA DAERAH	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	50,00
3.32 2.07.3.32.0.00.08.0000 5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	50,00
3.32 2.07.3.32.0.00.08.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	50,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	43.369.349.565,00	40.872.766.841,00	(2.496.582.724,00)	94,24
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	24.578.162.699,00	23.050.668.762,00	(1.527.493.937,00)	93,79
4.01 4.01.0.00.0.00.23.0000	Sekretariat Daerah	24.578.162.699,00	23.050.668.762,00	(1.527.493.937,00)	93,79
4.01 4.01.0.00.0.00.23.0000 5	BELANJA DAERAH	24.578.162.699,00	23.050.668.762,00	(1.527.493.937,00)	93,79
4.01 4.01.0.00.0.00.23.0000 5.1	BELANJA OPERASI	23.707.245.657,00	22.273.036.347,00	(1.434.209.310,00)	93,95
4.01 4.01.0.00.0.00.23.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	9.304.847.862,00	9.141.510.251,00	(163.337.611,00)	98,24
4.01 4.01.0.00.0.00.23.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.142.397.795,00	12.871.526.096,00	(1.270.871.699,00)	91,01
4.01 4.01.0.00.0.00.23.0000 5.1.05	Belanja Hibah	260.000.000,00	260.000.000,00	-	100,00
4.01 4.01.0.00.0.00.23.0000 5.2	BELANJA MODAL	870.917.042,00	777.632.415,00	(93.284.627,00)	89,29
4.01 4.01.0.00.0.00.23.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	546.177.042,00	459.185.300,00	(86.991.742,00)	84,07
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	324.740.000,00	318.447.115,00	(6.292.885,00)	98,06
4.02	SEKRETARIAT DPRD	18.791.186.866,00	17.822.098.079,00	(969.088.787,00)	94,84
4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000	Sekretariat DPRD	18.791.186.866,00	17.822.098.079,00	(969.088.787,00)	94,84
4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 5	BELANJA DAERAH	18.791.186.866,00	17.822.098.079,00	(969.088.787,00)	94,84
4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 5.1	BELANJA OPERASI	18.547.886.866,00	17.596.448.079,00	(951.438.787,00)	94,87

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	10.963.222.176,00	10.654.235.891,00	(308.986.285,00)	97,18
4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.584.664.690,00	6.942.212.188,00	(642.452.502,00)	91,53
4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 5.2	BELANJA MODAL	243.300.000,00	225.650.000,00	(17.650.000,00)	92,75
4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.300.000,00	185.650.000,00	(17.650.000,00)	91,32
4.02 4.02.0.00.0.00.24.0000 5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	133.120.910.929,00	124.508.248.552,00	(8.612.662.377,00)	93,53
5.01	PERENCANAAN	3.535.558.094,00	3.176.432.372,00	(359.125.722,00)	89,84
5.01 5.01.0.00.0.00.25.0000	Badan Perencanaan Daerah	3.535.558.094,00	3.176.432.372,00	(359.125.722,00)	89,84
5.01 5.01.0.00.0.00.25.0000 5	BELANJA DAERAH	3.535.558.094,00	3.176.432.372,00	(359.125.722,00)	89,84
5.01 5.01.0.00.0.00.25.0000 5.1	BELANJA OPERASI	3.504.708.094,00	3.145.582.372,00	(359.125.722,00)	89,75
5.01 5.01.0.00.0.00.25.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	2.333.042.172,00	2.275.274.633,00	(57.767.539,00)	97,52
5.01 5.01.0.00.0.00.25.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.171.665.922,00	870.307.739,00	(301.358.183,00)	74,28
5.01 5.01.0.00.0.00.25.0000 5.2	BELANJA MODAL	30.850.000,00	30.850.000,00	-	100,00
5.01 5.01.0.00.0.00.25.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.850.000,00	30.850.000,00	-	100,00
5.02	KEUANGAN	124.143.784.773,00	116.229.772.195,00	(7.914.012.578,00)	93,63
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	119.835.673.948,00	112.258.011.302,00	(7.577.662.646,00)	93,68
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 5	BELANJA DAERAH	119.835.673.948,00	112.258.011.302,00	(7.577.662.646,00)	93,68
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 5.1	BELANJA OPERASI	7.387.208.987,00	6.986.553.403,00	(400.655.584,00)	94,58
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	4.098.947.432,00	4.018.578.669,00	(80.368.763,00)	98,04
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.288.261.555,00	2.967.974.734,00	(320.286.821,00)	90,26
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 5.2	BELANJA MODAL	39.670.000,00	34.862.000,00	(4.808.000,00)	87,88
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.670.000,00	34.862.000,00	(4.808.000,00)	87,88
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	(400.420.915,00)	86,19
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	(400.420.915,00)	86,19
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 5.4	BELANJA TRANSFER	109.508.794.961,00	102.737.016.814,00	(6.771.778.147,00)	93,82
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.696.704.257,00	853.100.342,00	(1.843.603.915,00)	31,63
5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.812.090.704,00	101.883.916.472,00	(4.928.174.232,00)	95,39
5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000	Badan Pendapatan Daerah	4.308.110.825,00	3.971.760.893,00	(336.349.932,00)	92,19
5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 5	BELANJA DAERAH	4.308.110.825,00	3.971.760.893,00	(336.349.932,00)	92,19
5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 5.1	BELANJA OPERASI	4.308.110.825,00	3.971.760.893,00	(336.349.932,00)	92,19
5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.182.259,00	3.030.707.704,00	(189.474.555,00)	94,12
5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.928.566,00	941.053.189,00	(146.875.377,00)	86,50
5.03	KEPEGAWAIAN	3.965.372.023,00	3.822.037.903,00	(143.334.120,00)	96,39
5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	3.965.372.023,00	3.822.037.903,00	(143.334.120,00)	96,39
5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 5	BELANJA DAERAH	3.965.372.023,00	3.822.037.903,00	(143.334.120,00)	96,39

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 5.1	BELANJA OPERASI	3.965.372.023,00	3.822.037.903,00	(143.334.120,00)	96,39
5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	3.015.893.637,00	2.904.426.478,00	(111.467.159,00)	96,30
5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	949.478.386,00	917.611.425,00	(31.866.961,00)	96,64
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	226.133.000,00	90.079.000,00	(136.054.000,00)	39,83
5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	226.133.000,00	90.079.000,00	(136.054.000,00)	39,83
5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 5	BELANJA DAERAH	226.133.000,00	90.079.000,00	(136.054.000,00)	39,83
5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 5.1	BELANJA OPERASI	226.133.000,00	90.079.000,00	(136.054.000,00)	39,83
5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	226.133.000,00	90.079.000,00	(136.054.000,00)	39,83
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.250.063.039,00	1.189.927.082,00	(60.135.957,00)	95,19
5.05 5.05.0.00.0.00.29.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.250.063.039,00	1.189.927.082,00	(60.135.957,00)	95,19
5.05 5.05.0.00.0.00.29.0000 5	BELANJA DAERAH	1.250.063.039,00	1.189.927.082,00	(60.135.957,00)	95,19
5.05 5.05.0.00.0.00.29.0000 5.1	BELANJA OPERASI	1.250.063.039,00	1.189.927.082,00	(60.135.957,00)	95,19
5.05 5.05.0.00.0.00.29.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	1.059.319.674,00	1.021.483.212,00	(37.836.462,00)	96,43
5.05 5.05.0.00.0.00.29.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.743.365,00	168.443.870,00	(22.299.495,00)	88,31
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.236.513.580,00	5.716.178.643,00	(520.334.937,00)	91,66
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.236.513.580,00	5.716.178.643,00	(520.334.937,00)	91,66
6.01 6.01.0.00.0.00.30.0000	Inspektorat	6.236.513.580,00	5.716.178.643,00	(520.334.937,00)	91,66
6.01 6.01.0.00.0.00.30.0000 5	BELANJA DAERAH	6.236.513.580,00	5.716.178.643,00	(520.334.937,00)	91,66
6.01 6.01.0.00.0.00.30.0000 5.1	BELANJA OPERASI	6.216.338.580,00	5.696.003.643,00	(520.334.937,00)	91,63
6.01 6.01.0.00.0.00.30.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	3.778.760.898,00	3.686.849.345,00	(91.911.553,00)	97,57
6.01 6.01.0.00.0.00.30.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.437.577.682,00	2.009.154.298,00	(428.423.384,00)	82,42
6.01 6.01.0.00.0.00.30.0000 5.2	BELANJA MODAL	20.175.000,00	20.175.000,00	-	100,00
6.01 6.01.0.00.0.00.30.0000 5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.175.000,00	20.175.000,00	-	100,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	29.230.649.693,00	27.701.233.154,00	(1.529.416.539,00)	94,77
7.01	KECAMATAN	29.230.649.693,00	27.701.233.154,00	(1.529.416.539,00)	94,77
7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Banggae	6.781.820.671,00	6.622.868.169,00	(158.952.502,00)	97,66
7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 5	BELANJA DAERAH	6.781.820.671,00	6.622.868.169,00	(158.952.502,00)	97,66
7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 5.1	BELANJA OPERASI	6.611.962.907,00	6.454.602.269,00	(157.360.638,00)	97,62
7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	4.573.157.331,00	4.491.949.302,00	(81.208.029,00)	98,22
7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.038.805.576,00	1.962.652.967,00	(76.152.609,00)	96,26
7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 5.2	BELANJA MODAL	169.857.764,00	168.265.900,00	(1.591.864,00)	99,06
7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.857.764,00	168.265.900,00	(1.591.864,00)	99,06
7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Banggae Timur	7.854.008.117,00	7.507.427.418,00	(346.580.699,00)	95,59

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 5	BELANJA DAERAH	7.854.008.117,00	7.507.427.418,00	(346.580.699,00)	95,59
7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 5.1	BELANJA OPERASI	7.854.008.117,00	7.507.427.418,00	(346.580.699,00)	95,59
7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	5.166.976.789,00	5.033.762.948,00	(133.213.841,00)	97,42
7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.687.031.328,00	2.473.664.470,00	(213.366.858,00)	92,06
7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Pamboang	3.100.721.952,00	2.975.979.305,00	(124.742.647,00)	95,98
7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 5	BELANJA DAERAH	3.100.721.952,00	2.975.979.305,00	(124.742.647,00)	95,98
7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 5.1	BELANJA OPERASI	3.100.721.952,00	2.975.979.305,00	(124.742.647,00)	95,98
7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	2.444.729.540,00	2.356.752.165,00	(87.977.375,00)	96,40
7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.992.412,00	619.227.140,00	(36.765.272,00)	94,40
7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Sendana	3.600.831.614,00	3.378.036.061,00	(222.795.553,00)	93,81
7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 5	BELANJA DAERAH	3.600.831.614,00	3.378.036.061,00	(222.795.553,00)	93,81
7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 5.1	BELANJA OPERASI	3.591.631.614,00	3.368.836.061,00	(222.795.553,00)	93,80
7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	2.734.596.109,00	2.615.976.861,00	(118.619.248,00)	95,66
7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	857.035.505,00	752.859.200,00	(104.176.305,00)	87,84
7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 5.2	BELANJA MODAL	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00
7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 5.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.200.000,00	9.200.000,00		100,00
7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Tammerodo	1.118.245.335,00	1.000.839.035,00	(117.406.300,00)	89,50
7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 5	BELANJA DAERAH	1.118.245.335,00	1.000.839.035,00	(117.406.300,00)	89,50
7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 5.1	BELANJA OPERASI	1.118.245.335,00	1.000.839.035,00	(117.406.300,00)	89,50
7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	939.119.735,00	857.234.535,00	(81.885.200,00)	91,28
7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.125.600,00	143.604.500,00	(35.521.100,00)	80,17
7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Tubo Sendana	1.770.677.541,00	1.623.036.894,00	(147.640.647,00)	91,66
7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 5	BELANJA DAERAH	1.770.677.541,00	1.623.036.894,00	(147.640.647,00)	91,66
7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 5.1	BELANJA OPERASI	1.770.677.541,00	1.623.036.894,00	(147.640.647,00)	91,66
7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	1.596.584.080,00	1.519.345.894,00	(77.238.186,00)	95,16
7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.093.461,00	103.691.000,00	(70.402.461,00)	59,56
7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Ulumanda	1.473.188.096,00	1.290.084.132,00	(183.103.964,00)	87,57
7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 5	BELANJA DAERAH	1.473.188.096,00	1.290.084.132,00	(183.103.964,00)	87,57
7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 5.1	BELANJA OPERASI	1.473.188.096,00	1.290.084.132,00	(183.103.964,00)	87,57
7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	1.330.910.996,00	1.193.650.132,00	(137.260.864,00)	89,69
7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.277.100,00	96.434.000,00	(45.843.100,00)	67,78
7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Malunda	3.531.156.367,00	3.302.962.140,00	(228.194.227,00)	93,54
7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 5	BELANJA DAERAH	3.531.156.367,00	3.302.962.140,00	(228.194.227,00)	93,54
7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 5.1	BELANJA OPERASI	3.492.891.367,00	3.275.192.140,00	(217.699.227,00)	93,77
7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	2.573.621.035,00	2.487.421.740,00	(86.199.295,00)	96,65
7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	919.270.332,00	787.770.400,00	(131.499.932,00)	85,70

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1	2	3	4	5	6
7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 5.2	BELANJA MODAL	38.265.000,00	27.770.000,00	(10.495.000,00)	72,57
7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.265.000,00	27.770.000,00	(10.495.000,00)	72,57
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.274.170.685,00	2.945.849.676,00	(328.321.009,00)	89,97
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.274.170.685,00	2.945.849.676,00	(328.321.009,00)	89,97
8.01 8.01.0.00.0.00.39.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.274.170.685,00	2.945.849.676,00	(328.321.009,00)	89,97
8.01 8.01.0.00.0.00.39.0000 5	BELANJA DAERAH	3.274.170.685,00	2.945.849.676,00	(328.321.009,00)	89,97
8.01 8.01.0.00.0.00.39.0000 5.1	BELANJA OPERASI	3.274.170.685,00	2.945.849.676,00	(328.321.009,00)	89,97
8.01 8.01.0.00.0.00.39.0000 5.1.01	Belanja Pegawai	1.502.161.614,00	1.377.072.660,00	(125.088.954,00)	91,67
8.01 8.01.0.00.0.00.39.0000 5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.060.797.071,00	857.565.016,00	(203.232.055,00)	80,84
8.01 8.01.0.00.0.00.39.0000 5.1.05	Belanja Hibah	711.212.000,00	711.212.000,00	-	100,00
	JUMLAH	910.562.452.913,69	863.664.601.041,78	(46.897.851.871,91)	(34,63)



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		REALISASI 2024
		ANGGARAN	REALISASI	Rp	%	
1	2	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN - LRA					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	24.265.113.570,00	16.467.904.514,25	(7.797.209.055,75)	67,87	11.783.885.632,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	82.889.435.754,00	75.411.226.265,00	(7.478.209.489,00)	90,98	75.254.820.161,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.534.611.072,00	3.534.611.072,00	-	100,00	3.327.191.183,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	6.269.065.647,00	6.377.237.674,34	108.172.027,34	101,73	2.102.364.233,07
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LRA	116.958.226.043,00	101.790.979.525,59	(15.167.246.517,41)	87,03	92.468.261.209,07
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER - LRA					
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LRA					
11	DANA PERIMBANGAN - LRA					
12	Dana Bagi Hasil - LRA	5.826.710.000,00	5.634.568.300,00	(192.141.700,00)	96,70	6.639.074.000,00
13	DBH Pajak	3.853.907.000,00	3.519.130.300,00	(334.776.700,00)	91,31	
14	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.464.728.000,00	1.607.363.000,00	142.635.000,00	109,74	
15	DBH Lainnya	508.075.000,00	508.075.000,00	-	100,00	
16	Dana Alokasi Umum - LRA	535.243.742.000,00	544.376.636.960,00	9.132.894.960,00	101,71	548.935.022.195,00
17	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	399.410.099.000,00	415.300.422.500,00	15.890.323.500,00	103,98	
18	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	135.833.643.000,00	129.076.214.460,00	(6.757.428.540,00)	95,03	
19	Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA	24.453.962.000,00	24.111.344.842,00	(342.617.158,00)	98,60	41.802.623.094,00
20	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA	150.164.160.000,00	138.273.455.431,00	(11.890.704.569,00)	92,08	130.583.017.821,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	715.688.574.000,00	712.396.005.533,00	(3.292.568.467,00)	99,54	727.959.737.110,00
22						
23	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA					

NO		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		REALISASI
24	Dana Insentif Daerah - LRA	-	-	-	-	-
25	Dana Desa - LRA	52.655.853.000,00	47.727.678.768,00	(4.928.174.232,00)	90,64	55.820.851.000,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	52.655.853.000,00	47.727.678.768,00	(4.928.174.232,00)	90,64	55.820.851.000,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	768.344.427.000,00	760.123.684.301,00	(8.220.742.699,00)	98,93	783.780.588.110,00
28						
29	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LRA					
30	Pendapatan Bagi Hasil - LRA	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	(1.822.972.491,00)	91,29	24.527.029.863,00
31	Bantuan Keuangan - LRA	-	-	-	-	-
32	Jumlah Transfer Antar Daerah - LRA	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	(1.822.972.491,00)	91,29	24.527.029.863,00
33	Total Pendapatan Transfer - LRA	789.268.730.174,00	779.225.014.984,00	(10.043.715.190,00)	98,73	808.307.617.973,00
34						
35	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA					
36	Pendapatan Hibah - LRA		-	-	-	-
37	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	-	-	-	-	-
38	JUMLAH PENDAPATAN - LRA	906.226.956.217,00	881.015.994.509,59	(25.210.961.707,41)	97,22	900.775.879.182,07
39						
40	BELANJA					
41	BELANJA OPERASI					
42	Belanja Pegawai	467.875.356.954,00	451.753.620.104,00	(16.121.736.850,00)	96,55	424.459.751.438,00
43	Belanja Barang dan Jasa	276.845.340.309,69	259.163.085.597,78	(17.682.254.711,91)	93,61	267.189.138.109,60
44	Belanja Hibah	10.156.348.000,00	9.648.530.900,00	(507.817.100,00)	95,00	38.275.918.405,00
45	Belanja Bantuan Sosial	63.360.000,00	59.040.000,00	(4.320.000,00)	93,18	63.360.000,00
46	Jumlah Belanja Operasi	754.940.405.263,69	720.624.276.601,78	(34.316.128.661,91)	95,45	729.988.167.952,60
47						
48	BELANJA MODAL					
49	Belanja Modal Tanah	861.471.700,00	732.371.100,00	(129.100.600,00)	85,01	1.053.059.242,00
50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.383.182.681,00	5.004.809.348,00	(3.378.373.333,00)	59,70	11.393.369.748,00
51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.642.236.887,00	23.797.538.257,00	(844.698.630,00)	96,57	33.605.479.353,00
52	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.963.076.421,00	7.906.104.836,00	(1.056.971.585,00)	88,21	23.121.034.250,18
53	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	323.285.000,00	322.905.000,00	(380.000,00)	99,88	56.000.000,00
54	Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	-
55	Jumlah Belanja Modal	43.213.252.689,00	37.803.728.541,00	(5.409.524.148,00)	87,48	69.228.942.593,18
56						
57	BELANJA TAK TERDUGA					
58	Belanja Tak Terduga	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	(400.420.915,00)	86,19	1.330.046.402,00
59	Jumlah Belanja Tak Terduga	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	(400.420.915,00)	86,19	1.330.046.402,00
60	JUMLAH BELANJA	801.053.657.952,69	760.927.584.227,78	(40.126.073.724,91)	94,99	800.547.156.947,78

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		REALISASI
61						
62	TRANSFER					
63	TRANSFER BAGI HASIL					
64	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	2.048.029.357,00	679.215.030,00	(1.368.814.327,00)	33,16	-
65	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	648.674.900,00	173.885.312,00	(474.789.588,00)	26,81	-
66	Jumlah Transfer Bagi Hasil	2.696.704.257,00	853.100.342,00	(1.843.603.915,00)	31,63	-
67						
68	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
69	Bantuan Keuangan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	-
70	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	106.712.090.704,00	101.783.916.472,00	(4.928.174.232,00)	95,38	103.764.358.365,00
71	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	106.812.090.704,00	101.883.916.472,00	(4.928.174.232,00)	95,39	103.764.358.365,00
72	JUMLAH TRANSFER	109.508.794.961,00	102.737.016.814,00	(6.771.778.147,00)	93,82	103.764.358.365,00
73	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	910.562.452.913,69	863.664.601.041,78	(46.897.851.871,91)	94,85	904.311.515.312,78
74	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.335.496.696,69)	17.351.393.467,81	21.686.890.164,50	(400,22)	(3.535.636.130,71)
75						
76	PEMBIAYAAN					
77	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
78	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	29.396,00	100,00	8.371.132.827,40
79	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-				-
80	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	29.396,00	100,00	8.371.132.827,40
81						
82	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
83	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00	-
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-			-	-
85	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00	-
86						
87	PEMBIAYAAN NETTO	4.335.496.696,69	4.335.526.092,69	29.396,00	100,00	8.371.132.827,40
88	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0,00	21.686.919.560,50	21.686.919.560,50	-	4.835.496.696,69



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,24	Peraturan Daerah No.1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,24	
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,24	
				JUMLAH PENDAPATAN	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,24	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	335.139.538.654,00	240.895.588.158,00	(94.243.950.496,00)	71,87	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	279.822.363.656,00	186.773.205.452,00	(93.049.158.204,00)	66,74	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.205.500,00	33.205.000,00	(500,00)	99,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.089.500,00	9.089.500,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.089.500,00	9.089.500,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.089.500,00	9.089.500,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.716.500,00	7.716.500,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.716.500,00	7.716.500,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.716.500,00	7.716.500,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	7.393.500,00	7.393.500,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.393.500,00	7.393.500,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.393.500,00	7.393.500,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.006.000,00	9.005.500,00	(500,00)	99,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.006.000,00	9.005.500,00	(500,00)	99,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.006.000,00	9.005.500,00	(500,00)	99,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	279.617.193.121,00	186.571.179.362,00	(93.046.013.759,00)	66,72	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	279.583.976.121,00	186.538.055.362,00	(93.045.920.759,00)	66,71	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	279.583.976.121,00	186.538.055.362,00	(93.045.920.759,00)	66,71	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	279.583.976.121,00	186.538.055.362,00	(93.045.920.759,00)	66,71	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	9.579.000,00	9.549.000,00	(30.000,00)	99,68	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.579.000,00	9.549.000,00	(30.000,00)	99,68	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.579.000,00	9.549.000,00	(30.000,00)	99,68	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	14.059.000,00	13.999.000,00	(60.000,00)	99,57	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.059.000,00	13.999.000,00	(60.000,00)	99,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.059.000,00	13.999.000,00	(60.000,00)	99,57	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	9.579.000,00	9.576.000,00	(3.000,00)	99,96	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.579.000,00	9.576.000,00	(3.000,00)	99,96	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.579.000,00	9.576.000,00	(3.000,00)	99,96	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	13.089.500,00	13.089.300,00	(200,00)	99,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.496.000,00	3.496.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.496.000,00	3.496.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.496.000,00	3.496.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.593.500,00	2.593.500,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.593.500,00	2.593.500,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.593.500,00	2.593.500,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.500.000,00	4.499.800,00	(200,00)	99,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.499.800,00	(200,00)	99,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.499.800,00	(200,00)	99,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	121.743.115,00	121.652.290,00	(90.825,00)	99,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	116.743.115,00	116.652.290,00	(90.825,00)	99,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.743.115,00	116.652.290,00	(90.825,00)	99,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.743.115,00	116.652.290,00	(90.825,00)	99,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	32.132.420,00	29.079.500,00	(3.052.920,00)	90,49	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	30.607.420,00	27.554.500,00	(3.052.920,00)	90,02	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.607.420,00	27.554.500,00	(3.052.920,00)	90,02	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.607.420,00	27.554.500,00	(3.052.920,00)	90,02	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.525.000,00	1.525.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.525.000,00	1.525.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	1.525.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.1.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	55.058.980.398,00	53.969.759.806,00	(1.089.220.592,00)	98,02	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	27.715.808.486,00	27.191.343.534,00	(524.464.952,00)	98,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	98.460.000,00	97.997.500,00	(462.500,00)	99,53	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	98.460.000,00	97.997.500,00	(462.500,00)	99,53	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.460.000,00	97.997.500,00	(462.500,00)	99,53	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005		PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	189.032.687,00	188.287.187,00	(745.500,00)	99,60	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	189.032.687,00	188.287.187,00	(745.500,00)	99,60	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	189.032.687,00	188.287.187,00	(745.500,00)	99,60	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	1.039.618.404,00	1.022.327.954,00	(17.290.450,00)	98,33	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	1.039.618.404,00	1.022.327.954,00	(17.290.450,00)	98,33	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.450.000,00	89.442.000,00	(1.008.000,00)	98,88	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	949.168.404,00	932.885.954,00	(16.282.450,00)	98,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007		PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH	149.959.400,00	71.035.000,00	(78.924.400,00)	47,36	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	149.959.400,00	71.035.000,00	(78.924.400,00)	47,36	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.959.400,00	71.035.000,00	(78.924.400,00)	47,36	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	91.918.700,00	90.099.200,00	(1.819.500,00)	98,02	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	91.918.700,00	90.099.200,00	(1.819.500,00)	98,02	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.918.700,00	90.099.200,00	(1.819.500,00)	98,02	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011		REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	860.404.900,00	799.747.710,00	(60.657.190,00)	92,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	860.404.900,00	799.747.710,00	(60.657.190,00)	92,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	860.404.900,00	799.747.710,00	(60.657.190,00)	92,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/ PENJAGA SEKOLAH	282.823.400,00	264.602.000,00	(18.221.400,00)	93,55	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	282.823.400,00	264.602.000,00	(18.221.400,00)	93,55	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	282.823.400,00	264.602.000,00	(18.221.400,00)	93,55	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	763.747.000,00	761.517.000,00	(2.230.000,00)	99,70	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	763.747.000,00	761.517.000,00	(2.230.000,00)	99,70	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	763.747.000,00	761.517.000,00	(2.230.000,00)	99,70	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	215.198.500,00	214.848.500,00	(350.000,00)	99,83	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	215.198.500,00	214.848.500,00	(350.000,00)	99,83	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.198.500,00	214.848.500,00	(350.000,00)	99,83	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	90.063.500,00	63.763.500,00	(26.300.000,00)	70,79	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	90.063.500,00	63.763.500,00	(26.300.000,00)	70,79	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.063.500,00	63.763.500,00	(26.300.000,00)	70,79	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	19.031.612.000,00	19.018.422.000,00	(13.190.000,00)	99,93	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	19.031.612.000,00	19.018.422.000,00	(13.190.000,00)	99,93	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.623.912.000,00	18.610.722.000,00	(13.190.000,00)	99,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	407.700.000,00	407.700.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	583.400.000,00	527.940.000,00	(55.460.000,00)	90,49	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	571.400.000,00	515.940.000,00	(55.460.000,00)	90,29	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.400.000,00	515.940.000,00	(55.460.000,00)	90,29	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	48.873.500,00	33.123.500,00	(15.750.000,00)	67,77	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	5.1	BELANJA OPERASI	48.873.500,00	33.123.500,00	(15.750.000,00)	67,77	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.873.500,00	33.123.500,00	(15.750.000,00)	67,77	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	1.200.000.000,00	1.138.248.515,00	(61.751.485,00)	94,85	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000,00	1.138.248.515,00	(61.751.485,00)	94,85	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	1.138.248.515,00	(61.751.485,00)	94,85	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	721.332.055,00	678.332.000,00	(43.000.055,00)	94,03	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2	BELANJA MODAL	721.332.055,00	678.332.000,00	(43.000.055,00)	94,03	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	721.332.055,00	678.332.000,00	(43.000.055,00)	94,03	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	66.584.000,00	37.084.000,00	(29.500.000,00)	55,69	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	66.584.000,00	37.084.000,00	(29.500.000,00)	55,69	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.584.000,00	37.084.000,00	(29.500.000,00)	55,69	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	1.897.845.440,00	1.799.942.968,00	(97.902.472,00)	94,84	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	37.952.600,00	37.952.600,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.952.600,00	37.952.600,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	1.859.892.840,00	1.761.990.368,00	(97.902.472,00)	94,73	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.859.892.840,00	1.761.990.368,00	(97.902.472,00)	94,73	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	384.935.000,00	384.025.000,00	(910.000,00)	99,76	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2	BELANJA MODAL	384.935.000,00	384.025.000,00	(910.000,00)	99,76	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.000.000,00	207.360.000,00	(640.000,00)	99,69	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	176.935.000,00	176.665.000,00	(270.000,00)	99,84	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	14.249.736.392,00	13.927.428.438,00	(322.307.954,00)	97,73	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	485.096.435,00	475.273.735,00	(9.822.700,00)	97,97	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	485.096.435,00	475.273.735,00	(9.822.700,00)	97,97	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	485.096.435,00	475.273.735,00	(9.822.700,00)	97,97	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	1.055.168.057,00	1.018.075.552,00	(37.092.505,00)	96,48	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	99.991.600,00	97.214.000,00	(2.777.600,00)	97,22	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.991.600,00	97.214.000,00	(2.777.600,00)	97,22	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	955.176.457,00	920.861.552,00	(34.314.905,00)	96,40	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	955.176.457,00	920.861.552,00	(34.314.905,00)	96,40	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017		REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	598.965.000,00	577.879.000,00	(21.086.000,00)	96,47	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	99.991.600,00	94.727.000,00	(5.264.600,00)	94,73	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.991.600,00	94.727.000,00	(5.264.600,00)	94,73	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	498.973.400,00	483.152.000,00	(15.821.400,00)	96,82	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	498.973.400,00	483.152.000,00	(15.821.400,00)	96,82	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018		REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM	624.892.800,00	534.117.200,00	(90.775.600,00)	85,47	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2	BELANJA MODAL	624.892.800,00	534.117.200,00	(90.775.600,00)	85,47	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	624.892.800,00	534.117.200,00	(90.775.600,00)	85,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	523.833.600,00	501.319.545,00	(22.514.055,00)	95,70	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	120.011.800,00	113.574.000,00	(6.437.800,00)	94,63	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.011.800,00	113.574.000,00	(6.437.800,00)	94,63	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	403.821.800,00	387.745.545,00	(16.076.255,00)	96,01	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	403.821.800,00	387.745.545,00	(16.076.255,00)	96,01	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	300.000.000,00	299.173.000,00	(827.000,00)	99,72	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.173.000,00	(827.000,00)	99,72	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	299.173.000,00	(827.000,00)	99,72	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	105.802.000,00	105.802.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	105.802.000,00	105.802.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.802.000,00	105.802.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	67.747.000,00	67.747.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	54.522.000,00	54.522.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.522.000,00	54.522.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.2	BELANJA MODAL	13.225.000,00	13.225.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.225.000,00	13.225.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8.198.270.000,00	8.174.070.000,00	(24.200.000,00)	99,70	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	8.198.270.000,00	8.174.070.000,00	(24.200.000,00)	99,70	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.911.370.000,00	7.946.370.000,00	35.000.000,00	100,44	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	286.900.000,00	227.700.000,00	(59.200.000,00)	79,36	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	25.496.000,00	16.271.000,00	(9.225.000,00)	63,81	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	5.1	BELANJA OPERASI	25.496.000,00	16.271.000,00	(9.225.000,00)	63,81	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.496.000,00	16.271.000,00	(9.225.000,00)	63,81	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050		PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN	50.628.000,00	31.278.000,00	(19.350.000,00)	61,78	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	5.1	BELANJA OPERASI	50.628.000,00	31.278.000,00	(19.350.000,00)	61,78	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.628.000,00	31.278.000,00	(19.350.000,00)	61,78	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	1.200.000.000,00	1.164.845.406,00	(35.154.594,00)	97,07	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000,00	1.164.845.406,00	(35.154.594,00)	97,07	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	1.164.845.406,00	(35.154.594,00)	97,07	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	56.272.000,00	41.372.000,00	(14.900.000,00)	73,52	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1	BELANJA OPERASI	56.272.000,00	41.372.000,00	(14.900.000,00)	73,52	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.272.000,00	41.372.000,00	(14.900.000,00)	73,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	14.943.000,00	-	(14.943.000,00)	-	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060	5.1	BELANJA OPERASI	14.943.000,00	-	(14.943.000,00)	-	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.943.000,00	-	(14.943.000,00)	-	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	419.822.500,00	397.575.000,00	(22.247.500,00)	94,70	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	5.1	BELANJA OPERASI	69.961.300,00	66.308.000,00	(3.653.300,00)	94,77	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.961.300,00	66.308.000,00	(3.653.300,00)	94,77	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	5.2	BELANJA MODAL	349.861.200,00	331.267.000,00	(18.594.200,00)	94,68	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	349.861.200,00	331.267.000,00	(18.594.200,00)	94,68	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	422.800.000,00	422.630.000,00	(170.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2	BELANJA MODAL	422.800.000,00	422.630.000,00	(170.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	276.450.000,00	276.390.000,00	(60.000,00)	99,97	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	146.350.000,00	146.240.000,00	(110.000,00)	99,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	9.238.544.520,00	9.038.847.834,00	(199.696.686,00)	97,83	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	757.511.905,00	742.074.035,00	(15.437.870,00)	97,96	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	752.697.525,00	737.259.655,00	(15.437.870,00)	97,94	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	752.697.525,00	737.259.655,00	(15.437.870,00)	97,94	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.814.380,00	4.814.380,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.814.380,00	4.814.380,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD	99.155.000,00	98.805.200,00	(349.800,00)	99,64	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	99.155.000,00	98.805.200,00	(349.800,00)	99,64	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.155.000,00	98.805.200,00	(349.800,00)	99,64	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD	318.792.000,00	316.696.518,00	(2.095.482,00)	99,34	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1	BELANJA OPERASI	318.792.000,00	316.696.518,00	(2.095.482,00)	99,34	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.792.000,00	316.696.518,00	(2.095.482,00)	99,34	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	222.551.000,00	203.151.000,00	(19.400.000,00)	91,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	222.551.000,00	203.151.000,00	(19.400.000,00)	91,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.551.000,00	203.151.000,00	(19.400.000,00)	91,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	209.398.000,00	191.989.000,00	(17.409.000,00)	91,68	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	209.398.000,00	191.989.000,00	(17.409.000,00)	91,68	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.398.000,00	191.989.000,00	(17.409.000,00)	91,68	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	5.003.896.000,00	4.943.739.000,00	(60.157.000,00)	98,79	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	5.003.896.000,00	4.943.739.000,00	(60.157.000,00)	98,79	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	5.003.896.000,00	4.943.739.000,00	(60.157.000,00)	98,79	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	44.978.250,00	44.978.250,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1	BELANJA OPERASI	44.978.250,00	44.978.250,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.978.250,00	44.978.250,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	1.200.000.000,00	1.137.052.223,00	(62.947.777,00)	94,75	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000,00	1.137.052.223,00	(62.947.777,00)	94,75	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	1.137.052.223,00	(62.947.777,00)	94,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK PAUD	728.126.000,00	725.873.554,00	(2.252.446,00)	99,69	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1	BELANJA OPERASI	728.126.000,00	725.873.554,00	(2.252.446,00)	99,69	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	728.126.000,00	725.873.554,00	(2.252.446,00)	99,69	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	21.858.250,00	18.558.250,00	(3.300.000,00)	84,90	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1	BELANJA OPERASI	21.858.250,00	18.558.250,00	(3.300.000,00)	84,90	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.858.250,00	18.558.250,00	(3.300.000,00)	84,90	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0049		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	332.297.845,00	324.686.930,00	(7.610.915,00)	97,70	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0049	5.1	BELANJA OPERASI	332.297.845,00	324.686.930,00	(7.610.915,00)	97,70	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.297.845,00	324.686.930,00	(7.610.915,00)	97,70	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	299.980.270,00	291.243.874,00	(8.736.396,00)	97,08	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051	5.1	BELANJA OPERASI	299.980.270,00	291.243.874,00	(8.736.396,00)	97,08	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.980.270,00	291.243.874,00	(8.736.396,00)	97,08	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	3.854.891.000,00	3.812.140.000,00	(42.751.000,00)	98,89	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN	322.006.000,00	317.484.100,00	(4.521.900,00)	98,59	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	315.000.000,00	310.478.100,00	(4.521.900,00)	98,56	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000,00	310.478.100,00	(4.521.900,00)	98,56	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.2	BELANJA MODAL	7.006.000,00	7.006.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.006.000,00	7.006.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	3.486.640.000,00	3.448.410.900,00	(38.229.100,00)	98,90	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	3.486.640.000,00	3.448.410.900,00	(38.229.100,00)	98,90	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	3.486.640.000,00	3.448.410.900,00	(38.229.100,00)	98,90	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	46.245.000,00	46.245.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1	BELANJA OPERASI	46.245.000,00	46.245.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.245.000,00	46.245.000,00	-	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.1.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	109.162.600,00	47.419.000,00	(61.743.600,00)	43,43	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.2.01		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	109.162.600,00	47.419.000,00	(61.743.600,00)	43,43	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004		PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	109.162.600,00	47.419.000,00	(61.743.600,00)	43,43	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	109.162.600,00	47.419.000,00	(61.743.600,00)	43,43	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.162.600,00	47.419.000,00	(61.743.600,00)	43,43	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.1.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	109.321.000,00	105.203.900,00	(4.117.100,00)	96,23	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	109.321.000,00	105.203.900,00	(4.117.100,00)	96,23	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001		PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	80.447.000,00	76.697.000,00	(3.750.000,00)	95,33	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.447.000,00	76.697.000,00	(3.750.000,00)	95,33	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.447.000,00	76.697.000,00	(3.750.000,00)	95,33	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002		PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN	28.874.000,00	28.506.900,00	(367.100,00)	98,72	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.874.000,00	28.506.900,00	(367.100,00)	98,72	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.874.000,00	28.506.900,00	(367.100,00)	98,72	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.1.05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	39.711.000,00	-	(39.711.000,00)	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.05.2.02		PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	39.711.000,00	-	(39.711.000,00)	-	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0001		PENILAIAN KELAYAKAN USUL PERIZINAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	39.711.000,00	-	(39.711.000,00)	-	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.711.000,00	-	(39.711.000,00)	-	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.711.000,00	-	(39.711.000,00)	-	
				JUMLAH BELANJA	335.139.538.654,00	240.895.588.158,00	(94.243.950.496,00)	71,87	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(334.839.538.654,00)	(240.792.848.158,00)	94.046.690.496,00	71,91	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(334.839.538.654,00)	(240.792.848.158,00)	94.046.690.496,00	71,91	

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,24	Peraturan Daerah No.1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,24	
	1.01.2.19.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,24	
				JUMLAH PENDAPATAN	300.000.000,00	102.740.000,00	(197.260.000,00)	34,24	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.992.877.669,00	4.962.249.502,00	(30.628.167,00)	99,38	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	320.949.350,00	320.949.350,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	231.369.350,00	231.369.350,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN PEMUDA BAGI WIRUSAHA PEMULA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	231.369.350,00	231.369.350,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	231.369.350,00	231.369.350,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.369.350,00	231.369.350,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02		PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.580.000,00	89.580.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN BERBASIS PENEGUHAN KEMANDIRIAN EKONOMI PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	89.580.000,00	89.580.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.580.000,00	89.580.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.580.000,00	89.580.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.671.928.319,00	4.641.300.152,00	(30.628.167,00)	99,34	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.343.330.919,00	3.312.702.752,00	(30.628.167,00)	99,08	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	3.343.330.919,00	3.312.702.752,00	(30.628.167,00)	99,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	611.998.570,00	609.774.598,00	(2.223.972,00)	99,63	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	611.998.570,00	609.774.598,00	(2.223.972,00)	99,63	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	2.731.332.349,00	2.702.928.154,00	(28.404.195,00)	98,96	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.838.500,00	134.584.950,00	(253.550,00)	99,81	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.596.493.849,00	2.568.343.204,00	(28.150.645,00)	98,91	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	548.740.000,00	548.740.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	548.740.000,00	548.740.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	548.740.000,00	548.740.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.740.000,00	548.740.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	665.195.000,00	665.195.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0005		PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL PENGELOLAAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN DI	665.195.000,00	665.195.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	665.195.000,00	665.195.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.195.000,00	665.195.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	114.662.400,00	114.662.400,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0007		PENGEMBANGAN OLAHRAGA WISATA, TANTANGAN DAN PETUALANGAN	69.872.400,00	69.872.400,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	69.872.400,00	69.872.400,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.872.400,00	69.872.400,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0008		PEMANFAATAN OLAHRAGA TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT	44.790.000,00	44.790.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0008	5.1	BELANJA OPERASI	44.790.000,00	44.790.000,00	-	100,00	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.790.000,00	44.790.000,00	-	100,00	
				JUMLAH BELANJA	4.992.877.669,00	4.962.249.502,00	(30.628.167,00)	99,38	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.692.877.669,00)	(4.859.509.502,00)	(166.631.833,00)	103,55	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.692.877.669,00)	(4.859.509.502,00)	(166.631.833,00)	103,55	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	20.521.114.754,00	19.712.140.359,00	(808.974.395,00)	96,05	Peraturan Daerah No.1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.521.114.754,00	19.712.140.359,00	(808.974.395,00)	96,05	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	20.521.114.754,00	19.712.140.359,00	(808.974.395,00)	96,05	
				JUMLAH PENDAPATAN	20.521.114.754,00	19.712.140.359,00	(808.974.395,00)	96,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	135.685.570.113,69	130.691.204.588,00	(4.994.365.525,69)	96,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.418.408.873,10	84.417.098.653,00	(3.001.310.220,10)	96,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	36.115.000,00	36.114.500,00	(500,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.156.500,00	4.156.000,00	(500,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.156.500,00	4.156.000,00	(500,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.156.500,00	4.156.000,00	(500,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	16.502.000,00	16.502.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.502.000,00	16.502.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.502.000,00	16.502.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.999.500,00	6.999.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.999.500,00	6.999.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.999.500,00	6.999.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA	8.457.000,00	8.457.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.457.000,00	8.457.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.457.000,00	8.457.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	65.829.582.279,00	64.748.097.795,00	(1.081.484.484,00)	98,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	64.882.692.279,00	63.855.257.795,00	(1.027.434.484,00)	98,41	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.882.692.279,00	63.855.257.795,00	(1.027.434.484,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	64.882.692.279,00	63.855.257.795,00	(1.027.434.484,00)	98,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	943.950.000,00	889.900.000,00	(54.050.000,00)	94,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	943.950.000,00	889.900.000,00	(54.050.000,00)	94,27	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	943.950.000,00	889.900.000,00	(54.050.000,00)	94,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.940.000,00	2.940.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.940.000,00	2.940.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	2.940.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	75.020.500,00	50.646.721,00	(24.373.779,00)	67,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.480.500,00	2.480.000,00	(500,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.480.500,00	2.480.000,00	(500,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.480.500,00	2.480.000,00	(500,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.450.000,00	1.450.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.450.000,00	1.450.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	36.090.000,00	11.716.721,00	(24.373.279,00)	32,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	36.090.000,00	11.716.721,00	(24.373.279,00)	32,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.090.000,00	11.716.721,00	(24.373.279,00)	32,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	217.800.000,00	176.072.219,00	(41.727.781,00)	80,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	217.200.000,00	175.472.219,00	(41.727.781,00)	80,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	217.200.000,00	175.472.219,00	(41.727.781,00)	80,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.200.000,00	175.472.219,00	(41.727.781,00)	80,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	49.018.380,00	31.156.779,00	(17.861.601,00)	63,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	44.018.380,00	26.452.479,00	(17.565.901,00)	60,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.018.380,00	26.452.479,00	(17.565.901,00)	60,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.018.380,00	26.452.479,00	(17.565.901,00)	60,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.000.000,00	4.704.300,00	(295.700,00)	94,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.704.300,00	(295.700,00)	94,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.704.300,00	(295.700,00)	94,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	21.210.872.714,10	19.375.010.639,00	(1.835.862.075,10)	91,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	21.210.872.714,10	19.375.010.639,00	(1.835.862.075,10)	91,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.923.006.927,10	18.569.000.341,00	(1.354.006.586,10)	93,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	172.511.188,00	139.685.104,00	(32.826.084,00)	80,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.750.495.739,10	18.429.315.237,00	(1.321.180.502,10)	93,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.287.865.787,00	806.010.298,00	(481.855.489,00)	62,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.287.865.787,00	806.010.298,00	(481.855.489,00)	62,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	44.932.586.578,59	43.021.020.835,00	(1.911.565.743,59)	95,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.382.612.462,59	9.003.782.313,00	(378.830.149,59)	95,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007		PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	4.735.178.534,00	4.642.230.634,00	(92.947.900,00)	98,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	78.572.500,00	76.572.500,00	(2.000.000,00)	97,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.572.500,00	76.572.500,00	(2.000.000,00)	97,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	4.656.606.034,00	4.565.658.134,00	(90.947.900,00)	98,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.461.606.034,00	4.370.991.134,00	(90.614.900,00)	97,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	195.000.000,00	194.667.000,00	(333.000,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	629.909.200,00	433.625.226,00	(196.283.974,00)	68,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.869.100,00	(130.900,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.869.100,00	(130.900,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	499.909.200,00	303.756.126,00	(196.153.074,00)	60,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.909.200,00	303.756.126,00	(196.153.074,00)	60,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	396.354.777,00	342.354.777,00	(54.000.000,00)	86,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	324.000.000,00	270.000.000,00	(54.000.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.000.000,00	270.000.000,00	(54.000.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	72.354.777,00	72.354.777,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.499.777,00	65.499.777,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.855.000,00	6.855.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	87.718.852,00	87.718.852,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	87.718.852,00	87.718.852,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.718.852,00	87.718.852,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	69.999.999,59	69.999.000,00	(999,59)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	69.999.999,59	69.999.000,00	(999,59)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.999.999,59	69.999.000,00	(999,59)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	3.463.451.100,00	3.427.853.824,00	(35.597.276,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	3.430.484.100,00	3.394.886.824,00	(35.597.276,00)	98,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.430.484.100,00	3.394.886.824,00	(35.597.276,00)	98,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	32.967.000,00	32.967.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.967.000,00	32.967.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.126.102.116,00	33.593.366.522,00	(1.532.735.594,00)	95,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	1.688.518.800,00	1.626.631.020,00	(61.887.780,00)	96,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.688.518.800,00	1.626.631.020,00	(61.887.780,00)	96,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.688.518.800,00	1.626.631.020,00	(61.887.780,00)	96,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	210.033.000,00	209.998.000,00	(35.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	210.033.000,00	209.998.000,00	(35.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.033.000,00	209.998.000,00	(35.000,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	503.918.067,00	552.212.550,00	48.294.483,00	109,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	503.918.067,00	552.212.550,00	48.294.483,00	109,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.918.067,00	552.212.550,00	48.294.483,00	109,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	1.158.931.600,00	1.116.192.500,00	(42.739.100,00)	96,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.158.931.600,00	1.116.192.500,00	(42.739.100,00)	96,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.158.931.600,00	1.116.192.500,00	(42.739.100,00)	96,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	166.501.450,00	107.340.500,00	(59.160.950,00)	64,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	166.501.450,00	107.340.500,00	(59.160.950,00)	64,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.501.450,00	107.340.500,00	(59.160.950,00)	64,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	132.348.000,00	127.448.000,00	(4.900.000,00)	96,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	132.348.000,00	127.448.000,00	(4.900.000,00)	96,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.348.000,00	127.448.000,00	(4.900.000,00)	96,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	51.006.000,00	50.776.000,00	(230.000,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	51.006.000,00	50.776.000,00	(230.000,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.006.000,00	50.776.000,00	(230.000,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	52.184.000,00	37.157.000,00	(15.027.000,00)	71,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	52.184.000,00	37.157.000,00	(15.027.000,00)	71,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.184.000,00	37.157.000,00	(15.027.000,00)	71,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	290.094.000,00	277.854.000,00	(12.240.000,00)	95,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	290.094.000,00	277.854.000,00	(12.240.000,00)	95,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.094.000,00	277.854.000,00	(12.240.000,00)	95,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	264.895.300,00	253.695.000,00	(11.200.300,00)	95,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	264.895.300,00	253.695.000,00	(11.200.300,00)	95,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.895.300,00	253.695.000,00	(11.200.300,00)	95,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	59.449.300,00	59.689.000,00	239.700,00	100,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	59.449.300,00	59.689.000,00	239.700,00	100,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.449.300,00	59.689.000,00	239.700,00	100,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	3.727.046.000,00	3.035.262.540,00	(691.783.460,00)	81,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	3.727.046.000,00	3.035.262.540,00	(691.783.460,00)	81,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.727.046.000,00	3.035.262.540,00	(691.783.460,00)	81,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	57.710.000,00	56.927.000,00	(783.000,00)	98,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	57.710.000,00	56.927.000,00	(783.000,00)	98,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.710.000,00	56.927.000,00	(783.000,00)	98,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	274.366.200,00	273.262.038,00	(1.104.162,00)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	274.366.200,00	273.262.038,00	(1.104.162,00)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.366.200,00	273.262.038,00	(1.104.162,00)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	226.589.000,00	226.589.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	226.589.000,00	226.589.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.589.000,00	226.589.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	810.405.800,00	780.744.000,00	(29.661.800,00)	96,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	810.405.800,00	780.744.000,00	(29.661.800,00)	96,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.405.800,00	780.744.000,00	(29.661.800,00)	96,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0021		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	101.800.000,00	97.360.000,00	(4.440.000,00)	95,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	101.800.000,00	97.360.000,00	(4.440.000,00)	95,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.800.000,00	97.360.000,00	(4.440.000,00)	95,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	816.924.000,00	801.824.000,00	(15.100.000,00)	98,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	816.924.000,00	801.824.000,00	(15.100.000,00)	98,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	816.924.000,00	801.824.000,00	(15.100.000,00)	98,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	11.212.725.500,00	11.212.725.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	11.212.725.500,00	11.212.725.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.212.725.500,00	11.212.725.500,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	7.500.000,00	1.085.000,00	(6.415.000,00)	14,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	1.085.000,00	(6.415.000,00)	14,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	1.085.000,00	(6.415.000,00)	14,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0029		PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT	8.617.583.324,00	8.473.043.039,00	(144.540.285,00)	98,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1	BELANJA OPERASI	8.617.583.324,00	8.473.043.039,00	(144.540.285,00)	98,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.617.583.324,00	8.473.043.039,00	(144.540.285,00)	98,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	442.964.500,00	300.562.840,00	(142.401.660,00)	67,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	442.964.500,00	300.562.840,00	(142.401.660,00)	67,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.964.500,00	300.562.840,00	(142.401.660,00)	67,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	2.438.978.000,00	2.217.991.581,00	(220.986.419,00)	90,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.438.978.000,00	2.217.991.581,00	(220.986.419,00)	90,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.438.978.000,00	2.217.991.581,00	(220.986.419,00)	90,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	336.958.275,00	273.878.414,00	(63.079.861,00)	81,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	336.958.275,00	273.878.414,00	(63.079.861,00)	81,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.958.275,00	273.878.414,00	(63.079.861,00)	81,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0037		PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH	49.920.000,00	49.920.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1	BELANJA OPERASI	49.920.000,00	49.920.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.920.000,00	49.920.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0038		PENYEDIAAN DAN PENGLOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)	299.942.000,00	290.692.000,00	(9.250.000,00)	96,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	299.942.000,00	290.692.000,00	(9.250.000,00)	96,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.942.000,00	290.692.000,00	(9.250.000,00)	96,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0044		PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	207.910.000,00	207.670.000,00	(240.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	207.910.000,00	207.670.000,00	(240.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.910.000,00	207.670.000,00	(240.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0046		PENGLOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	357.755.000,00	331.116.000,00	(26.639.000,00)	92,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	357.755.000,00	331.116.000,00	(26.639.000,00)	92,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.755.000,00	331.116.000,00	(26.639.000,00)	92,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	114.830.000,00	113.330.000,00	(1.500.000,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	114.830.000,00	113.330.000,00	(1.500.000,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.830.000,00	113.330.000,00	(1.500.000,00)	98,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0048		PENGELOLAAN LAYANAN IMUNISASI	443.115.000,00	427.190.000,00	(15.925.000,00)	96,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0048	5.1	BELANJA OPERASI	443.115.000,00	427.190.000,00	(15.925.000,00)	96,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.115.000,00	427.190.000,00	(15.925.000,00)	96,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	423.872.000,00	423.872.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	423.872.000,00	423.872.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	423.872.000,00	423.872.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.872.000,00	423.872.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.160.712.000,00	2.104.712.000,00	(56.000.000,00)	97,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01		PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	96.128.000,00	96.128.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01.0002		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	96.128.000,00	96.128.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	96.128.000,00	96.128.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.128.000,00	96.128.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	1.250.000.000,00	1.194.000.000,00	(56.000.000,00)	95,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0001		PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	1.200.000.000,00	1.144.000.000,00	(56.000.000,00)	95,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000.000,00	1.144.000.000,00	(56.000.000,00)	95,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000.000,00	1.144.000.000,00	(56.000.000,00)	95,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	814.584.000,00	814.584.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	814.584.000,00	814.584.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	814.584.000,00	814.584.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.584.000,00	814.584.000,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.2.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	354.629.000,00	354.627.800,00	(1.200,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	163.097.600,00	163.096.800,00	(800,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	163.097.600,00	163.096.800,00	(800,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	163.097.600,00	163.096.800,00	(800,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.097.600,00	163.096.800,00	(800,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06		PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	191.531.400,00	191.531.000,00	(400,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06.0001		PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	191.531.400,00	191.531.000,00	(400,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	191.531.400,00	191.531.000,00	(400,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.531.400,00	191.531.000,00	(400,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	819.233.662,00	793.745.300,00	(25.488.362,00)	96,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	220.983.800,00	220.983.800,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02.0001		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	220.983.800,00	220.983.800,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	220.983.800,00	220.983.800,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.983.800,00	220.983.800,00	-	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	598.249.862,00	572.761.500,00	(25.488.362,00)	95,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	598.249.862,00	572.761.500,00	(25.488.362,00)	95,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	598.249.862,00	572.761.500,00	(25.488.362,00)	95,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.249.862,00	572.761.500,00	(25.488.362,00)	95,73	
				JUMLAH BELANJA	135.685.570.113,69	130.691.204.588,00	(4.994.365.525,69)	96,31	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(115.164.455.359,69)	(110.979.064.229,00)	4.185.391.130,69	96,36	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(115.164.455.359,69)	(110.979.034.833,00)	4.185.420.526,69	96,36	

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.0.00.0.00.03.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000.000,00	848.849.993,00	(651.150.007,00)	56,58	Peraturan Daerah No.1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
	1.03.0.00.0.00.03.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000.000,00	848.849.993,00	(651.150.007,00)	56,58	
	1.03.0.00.0.00.03.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	848.849.993,00	(651.150.007,00)	56,58	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.500.000.000,00	848.849.993,00	(651.150.007,00)	56,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	55.820.007.296,00	52.990.097.302,78	(2.829.909.993,22)	94,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.071.585.093,00	4.751.623.013,00	(319.962.080,00)	93,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.342.000,00	7.296.250,00	(45.750,00)	99,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.420.000,00	1.413.500,00	(6.500,00)	99,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.420.000,00	1.413.500,00	(6.500,00)	99,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	1.413.500,00	(6.500,00)	99,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	930.000,00	930.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	930.000,00	930.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	930.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.070.500,00	2.032.500,00	(38.000,00)	98,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.070.500,00	2.032.500,00	(38.000,00)	98,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.070.500,00	2.032.500,00	(38.000,00)	98,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.567.000,00	1.567.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.567.000,00	1.567.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.567.000,00	1.567.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	754.500,00	753.250,00	(1.250,00)	99,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	754.500,00	753.250,00	(1.250,00)	99,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	754.500,00	753.250,00	(1.250,00)	99,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.731.239.283,00	4.480.567.072,00	(250.672.211,00)	94,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.370.345.783,00	4.169.856.380,00	(200.489.403,00)	95,41	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.370.345.783,00	4.169.856.380,00	(200.489.403,00)	95,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.370.345.783,00	4.169.856.380,00	(200.489.403,00)	95,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	352.698.000,00	302.553.692,00	(50.144.308,00)	85,78	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	352.698.000,00	302.553.692,00	(50.144.308,00)	85,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.698.000,00	302.553.692,00	(50.144.308,00)	85,78	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	2.378.500,00	2.360.000,00	(18.500,00)	99,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.378.500,00	2.360.000,00	(18.500,00)	99,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.378.500,00	2.360.000,00	(18.500,00)	99,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.763.500,00	2.757.000,00	(6.500,00)	99,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.763.500,00	2.757.000,00	(6.500,00)	99,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.763.500,00	2.757.000,00	(6.500,00)	99,76	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0006		PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	1.703.500,00	1.695.000,00	(8.500,00)	99,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.703.500,00	1.695.000,00	(8.500,00)	99,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.703.500,00	1.695.000,00	(8.500,00)	99,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	1.350.000,00	1.345.000,00	(5.000,00)	99,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000,00	1.345.000,00	(5.000,00)	99,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.345.000,00	(5.000,00)	99,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.615.000,00	1.069.500,00	(545.500,00)	66,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	913.500,00	913.500,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	913.500,00	913.500,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	913.500,00	913.500,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	701.500,00	156.000,00	(545.500,00)	22,23	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	701.500,00	156.000,00	(545.500,00)	22,23	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.500,00	156.000,00	(545.500,00)	22,23	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	65.896.000,00	54.420.000,00	(11.476.000,00)	82,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	510.000,00	500.000,00	(10.000,00)	98,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	510.000,00	500.000,00	(10.000,00)	98,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	500.000,00	(10.000,00)	98,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.219.000,00	1.215.000,00	(4.000,00)	99,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.219.000,00	1.215.000,00	(4.000,00)	99,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.219.000,00	1.215.000,00	(4.000,00)	99,67	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	19.167.000,00	18.955.000,00	(212.000,00)	98,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.167.000,00	18.955.000,00	(212.000,00)	98,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.167.000,00	18.955.000,00	(212.000,00)	98,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	45.000.000,00	33.750.000,00	(11.250.000,00)	75,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	33.750.000,00	(11.250.000,00)	75,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	33.750.000,00	(11.250.000,00)	75,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	93.881.622,00	67.435.430,00	(26.446.192,00)	71,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.154.000,00	3.154.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.154.000,00	3.154.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.154.000,00	3.154.000,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	75.727.622,00	50.781.430,00	(24.946.192,00)	67,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.727.622,00	50.781.430,00	(24.946.192,00)	67,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.727.622,00	50.781.430,00	(24.946.192,00)	67,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	90,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	90,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	90,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	171.611.188,00	140.834.761,00	(30.776.427,00)	82,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	33.254.000,00	16.733.108,00	(16.520.892,00)	50,31	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.254.000,00	16.733.108,00	(16.520.892,00)	50,31	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.254.000,00	16.733.108,00	(16.520.892,00)	50,31	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	138.357.188,00	124.101.653,00	(14.255.535,00)	89,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	138.357.188,00	124.101.653,00	(14.255.535,00)	89,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.357.188,00	124.101.653,00	(14.255.535,00)	89,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.3.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.363.045.580,00	5.996.147.510,00	(366.898.070,00)	94,23	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.895.845.580,00	4.668.000.210,00	(227.845.370,00)	95,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0074		OPERASI DAN PEMELIHARAAN BREAKWATER/SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA	925.000.000,00	901.587.200,00	(23.412.800,00)	97,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0074	5.1	BELANJA OPERASI	925.000.000,00	901.587.200,00	(23.412.800,00)	97,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0074	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.000.000,00	901.587.200,00	(23.412.800,00)	97,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0080		OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI	925.000.000,00	888.000.000,00	(37.000.000,00)	96,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0080	5.1	BELANJA OPERASI	925.000.000,00	888.000.000,00	(37.000.000,00)	96,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0080	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.000.000,00	888.000.000,00	(37.000.000,00)	96,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0105		REHABILITASI SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA	499.812.480,00	495.394.394,00	(4.418.086,00)	99,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0105	5.2	BELANJA MODAL	499.812.480,00	495.394.394,00	(4.418.086,00)	99,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0105	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	499.812.480,00	495.394.394,00	(4.418.086,00)	99,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0109		PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	397.354.140,00	332.373.627,00	(64.980.513,00)	83,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0109	5.2	BELANJA MODAL	397.354.140,00	332.373.627,00	(64.980.513,00)	83,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0109	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	397.354.140,00	332.373.627,00	(64.980.513,00)	83,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0117		PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA	1.998.705.760,00	1.916.144.989,00	(82.560.771,00)	95,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0117	5.2	BELANJA MODAL	1.998.705.760,00	1.916.144.989,00	(82.560.771,00)	95,86	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0117	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.998.705.760,00	1.916.144.989,00	(82.560.771,00)	95,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0119		PEMBANGUNAN SUMUR AIR TANAH UNTUK AIR BAKU	149.973.200,00	134.500.000,00	(15.473.200,00)	89,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0119	5.1	BELANJA OPERASI	149.973.200,00	134.500.000,00	(15.473.200,00)	89,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0119	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.973.200,00	134.500.000,00	(15.473.200,00)	89,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH	1.467.200.000,00	1.328.147.300,00	(139.052.700,00)	90,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0021		OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	1.067.200.000,00	1.031.950.000,00	(35.250.000,00)	96,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.067.200.000,00	1.031.950.000,00	(35.250.000,00)	96,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.067.200.000,00	1.031.950.000,00	(35.250.000,00)	96,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0035		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI	400.000.000,00	296.197.300,00	(103.802.700,00)	74,04	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	296.197.300,00	(103.802.700,00)	74,04	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	296.197.300,00	(103.802.700,00)	74,04	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.093.696.184,00	8.663.071.427,00	(430.624.757,00)	95,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.093.696.184,00	8.663.071.427,00	(430.624.757,00)	95,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0025		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	814.412.640,00	731.389.200,00	(83.023.440,00)	89,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	814.412.640,00	731.389.200,00	(83.023.440,00)	89,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.412.640,00	731.389.200,00	(83.023.440,00)	89,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0028		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	574.872.544,00	443.008.200,00	(131.864.344,00)	77,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	574.872.544,00	443.008.200,00	(131.864.344,00)	77,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.872.544,00	443.008.200,00	(131.864.344,00)	77,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0032		PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	7.704.411.000,00	7.488.674.027,00	(215.736.973,00)	97,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	7.704.411.000,00	7.488.674.027,00	(215.736.973,00)	97,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.704.411.000,00	7.488.674.027,00	(215.736.973,00)	97,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	16.894.611.695,00	16.560.059.830,00	(334.551.865,00)	98,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.894.611.695,00	16.560.059.830,00	(334.551.865,00)	98,01	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0033		PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA	41.565.000,00	40.065.000,00	(1.500.000,00)	96,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	41.565.000,00	40.065.000,00	(1.500.000,00)	96,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.565.000,00	40.065.000,00	(1.500.000,00)	96,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0038		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	864.797.501,00	849.499.702,00	(15.297.799,00)	98,23	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	864.797.501,00	849.499.702,00	(15.297.799,00)	98,23	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	864.797.501,00	849.499.702,00	(15.297.799,00)	98,23	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0039		PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT	15.497.009.194,00	15.382.054.728,00	(114.954.466,00)	99,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	13.760.855.635,00	13.660.024.551,00	(100.831.084,00)	99,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.760.855.635,00	13.660.024.551,00	(100.831.084,00)	99,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2	BELANJA MODAL	1.736.153.559,00	1.722.030.177,00	(14.123.382,00)	99,18	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.551.044,00	83.551.044,00	-	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.643.502.515,00	1.629.379.133,00	(14.123.382,00)	99,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0040		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	1.240.000,00	-	(1.240.000,00)	-	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	1.240.000,00	-	(1.240.000,00)	-	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	-	(1.240.000,00)	-	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0041		PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD)	490.000.000,00	288.440.400,00	(201.559.600,00)	58,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0041	5.1	BELANJA OPERASI	490.000.000,00	288.440.400,00	(201.559.600,00)	58,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.000.000,00	288.440.400,00	(201.559.600,00)	58,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.396.567.617,00	3.198.451.437,00	(198.116.180,00)	94,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.396.567.617,00	3.198.451.437,00	(198.116.180,00)	94,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0012		PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN	599.076.859,00	460.444.200,00	(138.632.659,00)	76,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	599.076.859,00	460.444.200,00	(138.632.659,00)	76,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	599.076.859,00	460.444.200,00	(138.632.659,00)	76,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0019		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN	2.797.490.758,00	2.738.007.237,00	(59.483.521,00)	97,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	2.797.490.758,00	2.738.007.237,00	(59.483.521,00)	97,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.797.490.758,00	2.738.007.237,00	(59.483.521,00)	97,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.205.415.201,00	6.954.056.576,00	(251.358.625,00)	96,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	7.205.415.201,00	6.954.056.576,00	(251.358.625,00)	96,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0015		IDENTIFIKASI, PENETAPAN, PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH	6.699.097.601,00	6.522.890.576,00	(176.207.025,00)	97,36	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	6.499.114.401,00	6.326.834.468,00	(172.279.933,00)	97,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.499.114.401,00	6.326.834.468,00	(172.279.933,00)	97,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	199.983.200,00	196.056.108,00	(3.927.092,00)	98,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0015	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.983.200,00	196.056.108,00	(3.927.092,00)	98,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0017		PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	487.166.600,00	412.036.000,00	(75.130.600,00)	84,57	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	399.646.600,00	333.611.500,00	(66.035.100,00)	83,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.646.600,00	333.611.500,00	(66.035.100,00)	83,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	87.520.000,00	78.424.500,00	(9.095.500,00)	89,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.520.000,00	78.424.500,00	(9.095.500,00)	89,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	19.151.000,00	19.130.000,00	(21.000,00)	99,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	19.151.000,00	19.130.000,00	(21.000,00)	99,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.151.000,00	19.130.000,00	(21.000,00)	99,89	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	7.708.072.426,00	6.795.693.409,78	(912.379.016,22)	88,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	7.708.072.426,00	6.795.693.409,78	(912.379.016,22)	88,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032		PEMBANGUNAN JALAN	1.059.878.085,00	830.732.750,00	(229.145.335,00)	78,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	199.933.490,00	142.163.600,00	(57.769.890,00)	71,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.933.490,00	142.163.600,00	(57.769.890,00)	71,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	859.944.595,00	688.569.150,00	(171.375.445,00)	80,07	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	859.944.595,00	688.569.150,00	(171.375.445,00)	80,07	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033		REKONSTRUKSI JALAN	1.506.305.220,00	1.118.586.830,00	(387.718.390,00)	74,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	215.610.380,00	210.323.280,00	(5.287.100,00)	97,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.610.380,00	210.323.280,00	(5.287.100,00)	97,54	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	1.290.694.840,00	908.263.550,00	(382.431.290,00)	70,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.290.694.840,00	908.263.550,00	(382.431.290,00)	70,37	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0034		PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	470.792.373,00	371.014.062,00	(99.778.311,00)	78,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2	BELANJA MODAL	470.792.373,00	371.014.062,00	(99.778.311,00)	78,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	470.792.373,00	371.014.062,00	(99.778.311,00)	78,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0038		PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	499.624.968,00	489.828.400,00	(9.796.568,00)	98,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	499.624.968,00	489.828.400,00	(9.796.568,00)	98,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.624.968,00	489.828.400,00	(9.796.568,00)	98,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0039		REHABILITASI JEMBATAN	200.000.000,00	195.015.900,00	(4.984.100,00)	97,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	195.015.900,00	(4.984.100,00)	97,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	195.015.900,00	(4.984.100,00)	97,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040		PEMBANGUNAN JEMBATAN	120.000.000,00	105.498.840,00	(14.501.160,00)	87,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	97.668.900,00	(2.331.100,00)	97,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	97.668.900,00	(2.331.100,00)	97,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	7.829.940,00	(12.170.060,00)	39,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.000.000,00	7.829.940,00	(12.170.060,00)	39,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0043		SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	102.000.000,00	97.489.000,00	(4.511.000,00)	95,57	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	102.000.000,00	97.489.000,00	(4.511.000,00)	95,57	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	97.489.000,00	(4.511.000,00)	95,57	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0044		REHABILITASI JALAN	349.953.500,00	261.935.445,00	(88.018.055,00)	74,84	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1	BELANJA OPERASI	199.964.380,00	194.535.445,00	(5.428.935,00)	97,28	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.964.380,00	194.535.445,00	(5.428.935,00)	97,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2	BELANJA MODAL	149.989.120,00	67.400.000,00	(82.589.120,00)	44,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.989.120,00	67.400.000,00	(82.589.120,00)	44,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0046		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	3.399.518.280,00	3.325.592.182,78	(73.926.097,22)	97,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	3.399.518.280,00	3.325.592.182,78	(73.926.097,22)	97,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.399.518.280,00	3.325.592.182,78	(73.926.097,22)	97,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	87.013.500,00	70.994.100,00	(16.019.400,00)	81,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.03		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.600.000,00	29.700.000,00	(9.900.000,00)	75,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.03.0004		PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG	39.600.000,00	29.700.000,00	(9.900.000,00)	75,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.600.000,00	29.700.000,00	(9.900.000,00)	75,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	29.700.000,00	(9.900.000,00)	75,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.413.500,00	41.294.100,00	(6.119.400,00)	87,09	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.04.0007		PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DALAM RTR	12.892.500,00	12.504.100,00	(388.400,00)	96,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.892.500,00	12.504.100,00	(388.400,00)	96,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.892.500,00	12.504.100,00	(388.400,00)	96,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.04.0009		OPERASIONALISASI TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENATAAN RUANG	34.521.000,00	28.790.000,00	(5.731.000,00)	83,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.521.000,00	28.790.000,00	(5.731.000,00)	83,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.521.000,00	28.790.000,00	(5.731.000,00)	83,39	
				JUMLAH BELANJA	55.820.007.296,00	52.990.097.302,78	(2.829.909.993,22)	94,93	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(54.320.007.296,00)	(52.141.247.309,78)	2.178.759.986,22	95,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(54.320.007.296,00)	(52.141.247.309,78)	2.178.759.986,22	95,98	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	8.253.472.421,00	8.103.666.417,00	(149.806.004,00)	98,18	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.4.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.675.991.431,00	2.549.216.861,00	(126.774.570,00)	95,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.270.000,00	8.270.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.470.000,00	4.470.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.470.000,00	4.470.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.470.000,00	4.470.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.507.657.925,00	2.424.647.110,00	(83.010.815,00)	96,68	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.243.996.725,00	2.210.377.110,00	(33.619.615,00)	98,50	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.243.996.725,00	2.210.377.110,00	(33.619.615,00)	98,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.243.996.725,00	2.210.377.110,00	(33.619.615,00)	98,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	261.211.200,00	211.820.000,00	(49.391.200,00)	81,09	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	261.211.200,00	211.820.000,00	(49.391.200,00)	81,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.211.200,00	211.820.000,00	(49.391.200,00)	81,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	42.336.000,00	41.799.035,00	(536.965,00)	98,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.380.000,00	1.380.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.380.000,00	1.380.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.380.000,00	1.380.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.220.000,00	2.011.900,00	(208.100,00)	90,62	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.220.000,00	2.011.900,00	(208.100,00)	90,62	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	2.011.900,00	(208.100,00)	90,62	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	777.000,00	500.000,00	(277.000,00)	64,35	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	777.000,00	500.000,00	(277.000,00)	64,35	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	777.000,00	500.000,00	(277.000,00)	64,35	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	37.959.000,00	37.907.135,00	(51.865,00)	99,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	37.959.000,00	37.907.135,00	(51.865,00)	99,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.959.000,00	37.907.135,00	(51.865,00)	99,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	76.960.216,00	49.425.516,00	(27.534.700,00)	64,22	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.491.500,00	2.400.000,00	(91.500,00)	96,32	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.491.500,00	2.400.000,00	(91.500,00)	96,32	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.491.500,00	2.400.000,00	(91.500,00)	96,32	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	38.168.716,00	13.725.516,00	(24.443.200,00)	35,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.168.716,00	13.725.516,00	(24.443.200,00)	35,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.168.716,00	13.725.516,00	(24.443.200,00)	35,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	36.300.000,00	33.300.000,00	(3.000.000,00)	91,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.300.000,00	33.300.000,00	(3.000.000,00)	91,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	33.300.000,00	(3.000.000,00)	91,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.367.290,00	23.675.200,00	(15.692.090,00)	60,13	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	34.483.290,00	19.275.200,00	(15.208.090,00)	55,89	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.483.290,00	19.275.200,00	(15.208.090,00)	55,89	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.483.290,00	19.275.200,00	(15.208.090,00)	55,89	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.884.000,00	4.400.000,00	(484.000,00)	90,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.884.000,00	4.400.000,00	(484.000,00)	90,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.884.000,00	4.400.000,00	(484.000,00)	90,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	124.625.000,00	121.505.200,00	(3.119.800,00)	97,49	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.01		PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	15.244.000,00	13.764.000,00	(1.480.000,00)	90,29	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.01.0002		IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN	9.387.000,00	7.907.000,00	(1.480.000,00)	84,23	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.387.000,00	7.907.000,00	(1.480.000,00)	84,23	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.387.000,00	7.907.000,00	(1.480.000,00)	84,23	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.01.0004		PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA	5.857.000,00	5.857.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.857.000,00	5.857.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.857.000,00	5.857.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.03.0001		REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.05		PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	235.000,00	-	(235.000,00)	-	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.05.0002		PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	235.000,00	-	(235.000,00)	-	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	235.000,00	-	(235.000,00)	-	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.000,00	-	(235.000,00)	-	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.06		PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9.146.000,00	7.741.200,00	(1.404.800,00)	84,64	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.06.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9.146.000,00	7.741.200,00	(1.404.800,00)	84,64	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.146.000,00	7.741.200,00	(1.404.800,00)	84,64	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.146.000,00	7.741.200,00	(1.404.800,00)	84,64	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.4.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.466.562.474,00	1.461.304.340,00	(5.258.134,00)	99,64	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.03.2.03		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	1.466.562.474,00	1.461.304.340,00	(5.258.134,00)	99,64	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.03.2.03.0003		KERJA SAMA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BESERTA PSU	1.466.562.474,00	1.461.304.340,00	(5.258.134,00)	99,64	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.207.140.583,00	1.201.882.449,00	(5.258.134,00)	99,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.207.140.583,00	1.201.882.449,00	(5.258.134,00)	99,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	259.421.891,00	259.421.891,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.03.2.03.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	259.421.891,00	259.421.891,00	-	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.4.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.986.293.516,00	3.971.640.016,00	(14.653.500,00)	99,63	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	3.986.293.516,00	3.971.640.016,00	(14.653.500,00)	99,63	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	3.986.293.516,00	3.971.640.016,00	(14.653.500,00)	99,63	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.460.612.516,00	3.458.787.016,00	(1.825.500,00)	99,94	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.460.612.516,00	3.458.787.016,00	(1.825.500,00)	99,94	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	525.681.000,00	512.853.000,00	(12.828.000,00)	97,55	
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.05.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	525.681.000,00	512.853.000,00	(12.828.000,00)	97,55	
				JUMLAH BELANJA	8.253.472.421,00	8.103.666.417,00	(149.806.004,00)	98,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.253.472.421,00)	(8.103.666.417,00)	149.806.004,00	98,18	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.253.472.421,00)	(8.103.666.417,00)	149.806.004,00	98,18	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.10	1.04.2.10.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	3.375.381.749,00	2.928.757.781,00	(446.623.968,00)	86,76	
2.10	1.04.2.10.0.00.03.0000	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	3.375.381.749,00	2.928.757.781,00	(446.623.968,00)	86,76	
2.10	1.04.2.10.0.00.03.0000	2.10.05.2.01		PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH	3.375.381.749,00	2.928.757.781,00	(446.623.968,00)	86,76	
2.10	1.04.2.10.0.00.03.0000	2.10.05.2.01.		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH	3.375.381.749,00	2.928.757.781,00	(446.623.968,00)	86,76	
2.10	1.04.2.10.0.00.03.0000	2.10.05.2.01.	5.1	BELANJA OPERASI	2.513.910.049,00	2.196.386.681,00	(317.523.368,00)	87,36	
2.10	1.04.2.10.0.00.03.0000	2.10.05.2.01.	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.513.910.049,00	2.196.386.681,00	(317.523.368,00)	87,36	
2.10	1.04.2.10.0.00.03.0000	2.10.05.2.01.	5.2	BELANJA MODAL	861.471.700,00	732.371.100,00	(129.100.600,00)	85,01	
2.10	1.04.2.10.0.00.03.0000	2.10.05.2.01.	5.2.01	Belanja Modal Tanah	861.471.700,00	732.371.100,00	(129.100.600,00)	85,01	
				JUMLAH BELANJA	3.375.381.749,00	2.928.757.781,00	(446.623.968,00)	86,76	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.375.381.749,00)	(2.928.757.781,00)	446.623.968,00	86,76	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.375.381.749,00)	(2.928.757.781,00)	446.623.968,00	86,76	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	5.058.520.298,00	4.749.551.938,00	(308.968.360,00)	93,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.008.885.798,00	4.716.191.938,00	(292.693.860,00)	94,15	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.567.000,00	838.800,00	(2.728.200,00)	23,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	526.500,00	-	(526.500,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	526.500,00	-	(526.500,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.500,00	-	(526.500,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	500.000,00	448.000,00	(52.000,00)	89,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	448.000,00	(52.000,00)	89,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	448.000,00	(52.000,00)	89,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	500.000,00	390.800,00	(109.200,00)	78,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	390.800,00	(109.200,00)	78,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	390.800,00	(109.200,00)	78,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	540.500,00	-	(540.500,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	540.500,00	-	(540.500,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.500,00	-	(540.500,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.902.470.398,00	4.657.483.819,00	(244.986.579,00)	95,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.414.670.398,00	4.214.983.819,00	(199.686.579,00)	95,47	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetanq Peraturan Gaji PNS
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.414.670.398,00	4.214.983.819,00	(199.686.579,00)	95,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.414.670.398,00	4.214.983.819,00	(199.686.579,00)	95,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	487.800.000,00	442.500.000,00	(45.300.000,00)	90,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	487.800.000,00	442.500.000,00	(45.300.000,00)	90,71	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.800.000,00	442.500.000,00	(45.300.000,00)	90,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	32.819.000,00	26.470.100,00	(6.348.900,00)	80,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.380.000,00	380.000,00	(5.000.000,00)	7,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.380.000,00	380.000,00	(5.000.000,00)	7,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	380.000,00	(5.000.000,00)	7,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	27.439.000,00	26.090.100,00	(1.348.900,00)	95,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.439.000,00	26.090.100,00	(1.348.900,00)	95,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.439.000,00	26.090.100,00	(1.348.900,00)	95,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	38.286.000,00	17.489.219,00	(20.796.781,00)	45,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.340.000,00	1.775.000,00	(3.565.000,00)	33,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.340.000,00	1.775.000,00	(3.565.000,00)	33,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	1.775.000,00	(3.565.000,00)	33,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	32.946.000,00	15.714.219,00	(17.231.781,00)	47,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.946.000,00	15.714.219,00	(17.231.781,00)	47,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.946.000,00	15.714.219,00	(17.231.781,00)	47,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.743.400,00	13.910.000,00	(17.833.400,00)	43,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	31.743.400,00	13.910.000,00	(17.833.400,00)	43,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.743.400,00	13.910.000,00	(17.833.400,00)	43,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.743.400,00	13.910.000,00	(17.833.400,00)	43,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.5.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.634.500,00	33.360.000,00	(16.274.500,00)	67,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.634.500,00	33.360.000,00	(16.274.500,00)	67,21	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0003		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	14.880.000,00	10.560.000,00	(4.320.000,00)	70,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.880.000,00	10.560.000,00	(4.320.000,00)	70,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	10.560.000,00	(4.320.000,00)	70,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0004		PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.552.000,00	12.960.000,00	(2.592.000,00)	83,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.552.000,00	12.960.000,00	(2.592.000,00)	83,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.552.000,00	12.960.000,00	(2.592.000,00)	83,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0016		PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	15.122.500,00	5.760.000,00	(9.362.500,00)	38,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	15.122.500,00	5.760.000,00	(9.362.500,00)	38,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.122.500,00	5.760.000,00	(9.362.500,00)	38,08	
				JUMLAH BELANJA	5.058.520.298,00	4.749.551.938,00	(308.968.360,00)	93,89	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.058.520.298,00)	(4.749.551.938,00)	308.968.360,00	93,89	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.058.520.298,00)	(4.749.551.938,00)	308.968.360,00	93,89	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	7.335.134.706,00	6.149.255.313,00	(1.185.879.393,00)	83,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.485.242.906,00	4.340.767.463,00	(144.475.443,00)	96,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.384.000,00	6.273.000,00	(2.111.000,00)	74,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.866.000,00	1.859.000,00	(7.000,00)	99,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.866.000,00	1.859.000,00	(7.000,00)	99,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.866.000,00	1.859.000,00	(7.000,00)	99,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.658.000,00	2.658.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.658.000,00	2.658.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.658.000,00	2.658.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.860.000,00	760.000,00	(2.100.000,00)	26,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.860.000,00	760.000,00	(2.100.000,00)	26,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000,00	760.000,00	(2.100.000,00)	26,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.000.000,00	996.000,00	(4.000,00)	99,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	996.000,00	(4.000,00)	99,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	996.000,00	(4.000,00)	99,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.350.888.254,00	4.217.378.499,00	(133.509.755,00)	96,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.347.548.254,00	4.214.042.499,00	(133.505.755,00)	96,92	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.347.548.254,00	4.214.042.499,00	(133.505.755,00)	96,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.347.548.254,00	4.214.042.499,00	(133.505.755,00)	96,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.662.000,00	1.658.000,00	(4.000,00)	99,75	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.662.000,00	1.658.000,00	(4.000,00)	99,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.662.000,00	1.658.000,00	(4.000,00)	99,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0006		PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	1.678.000,00	1.678.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.678.000,00	1.678.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.678.000,00	1.678.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	26.021.000,00	23.390.000,00	(2.631.000,00)	89,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.991.000,00	2.991.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.991.000,00	2.991.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.991.000,00	2.991.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	22.530.000,00	19.899.000,00	(2.631.000,00)	88,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	22.530.000,00	19.899.000,00	(2.631.000,00)	88,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.530.000,00	19.899.000,00	(2.631.000,00)	88,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.219.952,00	25.880.464,00	(5.339.488,00)	82,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.944.500,00	1.944.500,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.944.500,00	1.944.500,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.944.500,00	1.944.500,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.275.452,00	23.935.964,00	(5.339.488,00)	81,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.275.452,00	23.935.964,00	(5.339.488,00)	81,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.275.452,00	23.935.964,00	(5.339.488,00)	81,76	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.729.700,00	67.845.500,00	(884.200,00)	98,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	68.729.700,00	67.845.500,00	(884.200,00)	98,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	68.729.700,00	67.845.500,00	(884.200,00)	98,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.729.700,00	67.845.500,00	(884.200,00)	98,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	522.242.800,00	509.325.820,00	(12.916.980,00)	97,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	492.312.800,00	479.395.820,00	(12.916.980,00)	97,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.02.0028		PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	492.312.800,00	479.395.820,00	(12.916.980,00)	97,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	486.312.800,00	473.395.820,00	(12.916.980,00)	97,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.312.800,00	473.395.820,00	(12.916.980,00)	97,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.02.0028	5.2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.02.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	29.930.000,00	29.930.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.03.0009		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	29.930.000,00	29.930.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.930.000,00	29.930.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.930.000,00	29.930.000,00	-	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.327.649.000,00	1.299.162.030,00	(1.028.486.970,00)	55,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.04		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	2.327.649.000,00	1.299.162.030,00	(1.028.486.970,00)	55,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.04.0001		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT	2.327.649.000,00	1.299.162.030,00	(1.028.486.970,00)	55,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.554.649.000,00	526.163.000,00	(1.028.486.000,00)	33,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.554.649.000,00	526.163.000,00	(1.028.486.000,00)	33,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	773.000.000,00	772.999.030,00	(970,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	773.000.000,00	772.999.030,00	(970,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	7.335.134.706,00	6.149.255.313,00	(1.185.879.393,00)	83,83	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.335.134.706,00)	(6.149.255.313,00)	1.185.879.393,00	83,83	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.335.134.706,00)	(6.149.255.313,00)	1.185.879.393,00	83,83	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	1.751.435.402,00	1.518.016.077,00	(233.419.325,00)	86,67	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.6.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.367.757.814,00	1.265.489.997,00	(102.267.817,00)	92,52	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.677.500,00	4.317.500,00	(360.000,00)	92,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	885.000,00	885.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	885.000,00	885.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	885.000,00	885.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.350.000,00	990.000,00	(360.000,00)	73,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000,00	990.000,00	(360.000,00)	73,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	990.000,00	(360.000,00)	73,33	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	864.500,00	864.500,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	864.500,00	864.500,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	864.500,00	864.500,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	660.000,00	660.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	660.000,00	660.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	462.000,00	462.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	462.000,00	462.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.000,00	462.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	456.000,00	456.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	456.000,00	456.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.000,00	456.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.251.699.566,00	1.179.224.406,00	(72.475.160,00)	94,20	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.158.938.316,00	1.102.263.156,00	(56.675.160,00)	95,10	PPN0.5 Tahun 2024 tentang
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.158.938.316,00	1.102.263.156,00	(56.675.160,00)	95,10	Perubahan kesembilan Belas
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.158.938.316,00	1.102.263.156,00	(56.675.160,00)	95,10	atas PP No.7 tahun 1997
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	92.100.000,00	76.300.000,00	(15.800.000,00)	82,84	tentang Peraturan Gaji PNS
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.100.000,00	76.300.000,00	(15.800.000,00)	82,84	Peraturan Daerah Kab. Majene

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.100.000,00	76.300.000,00	(15.800.000,00)	82,84	No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	172.500,00	172.500,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	172.500,00	172.500,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.500,00	172.500,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	488.750,00	488.750,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	488.750,00	488.750,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.750,00	488.750,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.452.000,00	1.452.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.452.000,00	1.452.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.452.000,00	1.452.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.452.000,00	1.452.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	28.311.650,00	16.549.000,00	(11.762.650,00)	58,45	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	977.650,00	965.000,00	(12.650,00)	98,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	977.650,00	965.000,00	(12.650,00)	98,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	977.650,00	965.000,00	(12.650,00)	98,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	95.000,00	-	(95.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	95.000,00	-	(95.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000,00	-	(95.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.989.000,00	1.982.000,00	(7.000,00)	99,64	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.989.000,00	1.982.000,00	(7.000,00)	99,64	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.989.000,00	1.982.000,00	(7.000,00)	99,64	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	24.100.000,00	12.852.000,00	(11.248.000,00)	53,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.100.000,00	12.852.000,00	(11.248.000,00)	53,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	12.852.000,00	(11.248.000,00)	53,32	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	69.072.018,00	54.260.211,00	(14.811.807,00)	78,55	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	27.072.018,00	19.610.211,00	(7.461.807,00)	72,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.072.018,00	19.610.211,00	(7.461.807,00)	72,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.072.018,00	19.610.211,00	(7.461.807,00)	72,43	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	42.000.000,00	34.650.000,00	(7.350.000,00)	82,50	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	34.650.000,00	(7.350.000,00)	82,50	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	34.650.000,00	(7.350.000,00)	82,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.545.080,00	9.686.880,00	(2.858.200,00)	77,21	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	9.000.000,00	6.446.800,00	(2.553.200,00)	71,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	6.446.800,00	(2.553.200,00)	71,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	6.446.800,00	(2.553.200,00)	71,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.035.000,00	730.000,00	(305.000,00)	70,53	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.035.000,00	730.000,00	(305.000,00)	70,53	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.035.000,00	730.000,00	(305.000,00)	70,53	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2.510.080,00	2.510.080,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.510.080,00	2.510.080,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.510.080,00	2.510.080,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000		1.6.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.02.2.01		PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.02.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENDAMPINGAN KAT	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000		1.6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	270.317.588,00	193.486.080,00	(76.831.508,00)	71,57	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	50.437.500,00	38.760.000,00	(11.677.500,00)	76,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	4.780.000,00	-	(4.780.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.780.000,00	-	(4.780.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	-	(4.780.000,00)	-	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	4.797.500,00	1.380.000,00	(3.417.500,00)	28,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.797.500,00	1.380.000,00	(3.417.500,00)	28,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.797.500,00	1.380.000,00	(3.417.500,00)	28,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01.0008		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	40.860.000,00	37.380.000,00	(3.480.000,00)	91,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	40.860.000,00	37.380.000,00	(3.480.000,00)	91,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.860.000,00	37.380.000,00	(3.480.000,00)	91,48	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	219.880.088,00	154.726.080,00	(65.154.008,00)	70,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0007		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	38.000.000,00	34.000.000,00	(4.000.000,00)	89,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	34.000.000,00	(4.000.000,00)	89,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	34.000.000,00	(4.000.000,00)	89,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0008		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA	97.920.000,00	51.978.800,00	(45.941.200,00)	53,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	97.920.000,00	51.978.800,00	(45.941.200,00)	53,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.920.000,00	51.978.800,00	(45.941.200,00)	53,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0010		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	-	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0013		PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	61.960.088,00	46.747.280,00	(15.212.808,00)	75,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	61.960.088,00	46.747.280,00	(15.212.808,00)	75,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.960.088,00	46.747.280,00	(15.212.808,00)	75,44	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.6.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	63.360.000,00	59.040.000,00	(4.320.000,00)	93,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.360.000,00	59.040.000,00	(4.320.000,00)	93,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.05.2.02.0003		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	63.360.000,00	59.040.000,00	(4.320.000,00)	93,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	63.360.000,00	59.040.000,00	(4.320.000,00)	93,18	
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	63.360.000,00	59.040.000,00	(4.320.000,00)	93,18	
				JUMLAH BELANJA	1.751.435.402,00	1.518.016.077,00	(233.419.325,00)	86,67	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.751.435.402,00)	(1.518.016.077,00)	233.419.325,00	86,67	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.751.435.402,00)	(1.518.016.077,00)	233.419.325,00	86,67	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	3.083.478.034,00	2.851.229.351,00	(232.248.683,00)	92,46	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.7.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.468.835.450,00	2.349.980.551,00	(118.854.899,00)	95,18	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.542.500,00	4.486.000,00	(1.056.500,00)	80,93	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.000.000,00	964.000,00	(36.000,00)	96,40	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	964.000,00	(36.000,00)	96,40	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	964.000,00	(36.000,00)	96,40	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.200.000,00	1.035.000,00	(165.000,00)	86,25	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.035.000,00	(165.000,00)	86,25	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.035.000,00	(165.000,00)	86,25	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	640.000,00	640.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	640.000,00	640.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	640.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	-	(500.000,00)	-	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	719.500,00	439.000,00	(280.500,00)	61,01	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	719.500,00	439.000,00	(280.500,00)	61,01	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	719.500,00	439.000,00	(280.500,00)	61,01	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	483.000,00	408.000,00	(75.000,00)	84,47	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	483.000,00	408.000,00	(75.000,00)	84,47	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.000,00	408.000,00	(75.000,00)	84,47	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.315.085.626,00	2.237.627.115,00	(77.458.511,00)	96,65	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.315.085.626,00	2.237.627.115,00	(77.458.511,00)	96,65	PPN0.5 Tahun 2024 tentang
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.315.085.626,00	2.237.627.115,00	(77.458.511,00)	96,65	Perubahan kesembilan Belas atas PP No 7 tahun 1997

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.315.085.626,00	2.237.627.115,00	(77.458.511,00)	96,65	atas UU No.7 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji PNS
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	58.631.980,00	36.452.672,00	(22.179.308,00)	62,17	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.241.980,00	1.150.000,00	(91.980,00)	92,59	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.241.980,00	1.150.000,00	(91.980,00)	92,59	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.241.980,00	1.150.000,00	(91.980,00)	92,59	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.021.500,00	3.020.000,00	(1.500,00)	99,95	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.021.500,00	3.020.000,00	(1.500,00)	99,95	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.021.500,00	3.020.000,00	(1.500,00)	99,95	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.005.500,00	2.005.500,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.005.500,00	2.005.500,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.005.500,00	2.005.500,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	6.670.000,00	4.355.000,00	(2.315.000,00)	65,29	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.670.000,00	4.355.000,00	(2.315.000,00)	65,29	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.670.000,00	4.355.000,00	(2.315.000,00)	65,29	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	45.693.000,00	25.922.172,00	(19.770.828,00)	56,73	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.693.000,00	25.922.172,00	(19.770.828,00)	56,73	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.693.000,00	25.922.172,00	(19.770.828,00)	56,73	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.171.904,00	34.130.524,00	(5.041.380,00)	87,13	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	36.841.904,00	32.285.524,00	(4.556.380,00)	87,63	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.841.904,00	32.285.524,00	(4.556.380,00)	87,63	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.841.904,00	32.285.524,00	(4.556.380,00)	87,63	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.830.000,00	1.345.000,00	(485.000,00)	73,49	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.830.000,00	1.345.000,00	(485.000,00)	73,49	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	1.345.000,00	(485.000,00)	73,49	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	50.403.440,00	37.284.240,00	(13.119.200,00)	73,97	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.931.440,00	34.446.240,00	(6.485.200,00)	84,15	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.931.440,00	34.446.240,00	(6.485.200,00)	84,15	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.931.440,00	34.446.240,00	(6.485.200,00)	84,15	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	9.472.000,00	2.838.000,00	(6.634.000,00)	29,96	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.472.000,00	2.838.000,00	(6.634.000,00)	29,96	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.472.000,00	2.838.000,00	(6.634.000,00)	29,96	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.7.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	164.679.000,00	124.318.000,00	(40.361.000,00)	75,49	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	164.679.000,00	124.318.000,00	(40.361.000,00)	75,49	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	164.679.000,00	124.318.000,00	(40.361.000,00)	75,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	159.779.000,00	124.318.000,00	(35.461.000,00)	77,80	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.779.000,00	124.318.000,00	(35.461.000,00)	77,80	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.900.000,00	-	(4.900.000,00)	-	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.03.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.900.000,00	-	(4.900.000,00)	-	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.7.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	449.963.584,00	376.930.800,00	(73.032.784,00)	83,76	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.05.2.01		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	449.963.584,00	376.930.800,00	(73.032.784,00)	83,76	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.05.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	449.963.584,00	376.930.800,00	(73.032.784,00)	83,76	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	449.963.584,00	376.930.800,00	(73.032.784,00)	83,76	
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.963.584,00	376.930.800,00	(73.032.784,00)	83,76	
				JUMLAH BELANJA	3.083.478.034,00	2.851.229.351,00	(232.248.683,00)	92,46	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.083.478.034,00)	(2.851.229.351,00)	232.248.683,00	92,46	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.083.478.034,00)	(2.851.229.351,00)	232.248.683,00	92,46	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.32	2.07.3.32.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	50,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.08.0000	3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	50,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.08.0000	3.32.03.2.01		PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	50,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.08.0000	3.32.03.2.01.0002		PENYIAPAN LINGKUNGAN HUNIAN FISIK, SOSIAL, EKONOMI BAGI PENDUDUK SETEMPAT DAN TRANSMIGRAN	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	50,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.08.0000	3.32.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	50,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.08.0000	3.32.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	50,00	
				JUMLAH BELANJA	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	50,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(150.000.000,00)	(75.000.000,00)	75.000.000,00	50,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(150.000.000,00)	(75.000.000,00)	75.000.000,00	50,00	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000		5		BELANJA DAERAH	2.947.792.451,00	2.784.636.863,00	(163.155.588,00)	94,46	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.646.087.191,00	1.563.962.132,00	(82.125.059,00)	95,01	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.01			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.860.000,00	9.860.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.01.000			PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.930.000,00	4.930.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.01.000	5.1		BELANJA OPERASI	4.930.000,00	4.930.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.01.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	4.930.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.01.000			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.930.000,00	4.930.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.01.000	5.1		BELANJA OPERASI	4.930.000,00	4.930.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.01.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	4.930.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.526.218.856,00	1.453.147.310,00	(73.071.546,00)	95,21	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02.000			PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.418.388.856,00	1.360.717.310,00	(57.671.546,00)	95,93	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02.000	5.1		BELANJA OPERASI	1.418.388.856,00	1.360.717.310,00	(57.671.546,00)	95,93	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02.000	5.1.01		Belanja Pegawai	1.418.388.856,00	1.360.717.310,00	(57.671.546,00)	95,93	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02.000			PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	102.900.000,00	87.500.000,00	(15.400.000,00)	85,03	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02.000	5.1		BELANJA OPERASI	102.900.000,00	87.500.000,00	(15.400.000,00)	85,03	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	102.900.000,00	87.500.000,00	(15.400.000,00)	85,03	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02.000			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.930.000,00	4.930.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02.000	5.1		BELANJA OPERASI	4.930.000,00	4.930.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	4.930.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	25.700.000,00	25.686.900,00	(13.100,00)	99,94	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06.000			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06.000	5.1		BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06.000			FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06.000	5.1		BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06.000			PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	20.700.000,00	20.686.900,00	(13.100,00)	99,93	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06.000	5.1		BELANJA OPERASI	20.700.000,00	20.686.900,00	(13.100,00)	99,93	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.686.900,00	(13.100,00)	99,93	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.438.935,00	61.040.822,00	(7.398.113,00)	89,19	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08.000			PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.495.500,00	2.494.500,00	(1.000,00)	99,95	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08.000	5.1		BELANJA OPERASI	2.495.500,00	2.494.500,00	(1.000,00)	99,95	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.495.500,00	2.494.500,00	(1.000,00)	99,95	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08.000			PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	35.043.435,00	29.846.322,00	(5.197.113,00)	85,16	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08.000	5.1		BELANJA OPERASI	35.043.435,00	29.846.322,00	(5.197.113,00)	85,16	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	35.043.435,00	29.846.322,00	(5.197.113,00)	85,16	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08.000			PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	30.900.000,00	28.700.000,00	(2.200.000,00)	92,88	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08.000	5.1		BELANJA OPERASI	30.900.000,00	28.700.000,00	(2.200.000,00)	92,88	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	28.700.000,00	(2.200.000,00)	92,88	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.09			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.869.400,00	14.227.100,00	(1.642.300,00)	89,65	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.09.000	1		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	13.501.400,00	11.859.100,00	(1.642.300,00)	87,83	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.09.000	5.1		BELANJA OPERASI	13.501.400,00	11.859.100,00	(1.642.300,00)	87,83	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.09.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	13.501.400,00	11.859.100,00	(1.642.300,00)	87,83	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.09.000			PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.368.000,00	2.368.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.09.000	5.1		BELANJA OPERASI	2.368.000,00	2.368.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.09.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.368.000,00	2.368.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.02.			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	848.257.260,00	773.166.731,00	(75.090.529,00)	91,14	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.02.2.03			PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	848.257.260,00	773.166.731,00	(75.090.529,00)	91,14	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.02.2.03.000	2		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	848.257.260,00	773.166.731,00	(75.090.529,00)	91,14	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.02.2.03.000	5.1		BELANJA OPERASI	848.257.260,00	773.166.731,00	(75.090.529,00)	91,14	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.02.2.03.000	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	848.257.260,00	773.166.731,00	(75.090.529,00)	91,14	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.8.03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	234.080.000,00	228.860.000,00	(5.220.000,00)	97,76	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.03.2.01			PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.500.000,00	101.500.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.03.2.01.000	1		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBUJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.500.000,00	101.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.03.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	101.500.000,00	101.500.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.03.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	101.500.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	132.580.000,00	127.360.000,00	(5.220.000,00)	96,06	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.03.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	132.580.000,00	127.360.000,00	(5.220.000,00)	96,06	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.03.2.02.000	5.1	BELANJA OPERASI	132.580.000,00	127.360.000,00	(5.220.000,00)	96,06	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.03.2.02.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.580.000,00	127.360.000,00	(5.220.000,00)	96,06	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.06.		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	52.788.000,00	52.788.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	52.788.000,00	52.788.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.06.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	52.788.000,00	52.788.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.06.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	2.954.000,00	2.954.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.06.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.954.000,00	2.954.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.06.2.01.000	5.2	BELANJA MODAL	49.834.000,00	49.834.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.06.2.01.000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.834.000,00	49.834.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.8.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	166.580.000,00	165.860.000,00	(720.000,00)	99,56	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.560.000,00	96.840.000,00	(720.000,00)	99,26	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.2.02.000		KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK	97.560.000,00	96.840.000,00	(720.000,00)	99,26	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.2.02.000	5.1	BELANJA OPERASI	97.560.000,00	96.840.000,00	(720.000,00)	99,26	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.2.02.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.560.000,00	96.840.000,00	(720.000,00)	99,26	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.020.000,00	69.020.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.2.03.0006		PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/	69.020.000,00	69.020.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.2.03.000	5.1	BELANJA OPERASI	69.020.000,00	69.020.000,00	-	100,00	
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.2.03.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	69.020.000,00	-	100,00	
JUMLAH BELANJA					2.947.792.451,00	2.784.636.863,00	(163.155.588,00)	94,46	
SURPLUS / (DEFISIT)					(2.947.792.451,00)	(2.784.636.863,00)	163.155.588,00	94,46	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					(2.947.792.451,00)	(2.784.636.863,00)	163.155.588,00	94,46	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	1.937.960.791,00	1.837.549.510,00	(100.411.281,00)	94,81	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.9.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.603.795.001,00	1.504.579.445,00	(99.215.556,00)	93,81	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.964.498,00	9.954.000,00	(10.498,00)	99,89	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.009.998,00	3.007.500,00	(2.498,00)	99,91	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.009.998,00	3.007.500,00	(2.498,00)	99,91	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.009.998,00	3.007.500,00	(2.498,00)	99,91	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.737.000,00	2.732.500,00	(4.500,00)	99,83	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.737.000,00	2.732.500,00	(4.500,00)	99,83	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.737.000,00	2.732.500,00	(4.500,00)	99,83	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.969.000,00	1.967.500,00	(1.500,00)	99,92	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.969.000,00	1.967.500,00	(1.500,00)	99,92	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.969.000,00	1.967.500,00	(1.500,00)	99,92	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.498.500,00	1.496.500,00	(2.000,00)	99,86	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.498.500,00	1.496.500,00	(2.000,00)	99,86	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.498.500,00	1.496.500,00	(2.000,00)	99,86	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.495.996.599,00	1.398.089.195,00	(97.907.404,00)	93,45	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.494.836.599,00	1.396.984.695,00	(97.851.904,00)	93,45	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.494.836.599,00	1.396.984.695,00	(97.851.904,00)	93,45	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.494.836.599,00	1.396.984.695,00	(97.851.904,00)	93,45	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	555.000,00	525.000,00	(30.000,00)	94,59	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	555.000,00	525.000,00	(30.000,00)	94,59	Peraturan Daerah Kab. Majene
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	525.000,00	(30.000,00)	94,59	No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab Majene

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	605.000,00	579.500,00	(25.500,00)	95,78	Perubahan APBD Kabupaten Majene TA 2025
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	605.000,00	579.500,00	(25.500,00)	95,78	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.000,00	579.500,00	(25.500,00)	95,78	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	32.721.135,00	32.717.050,00	(4.085,00)	99,98	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	213.785,00	213.000,00	(785,00)	99,63	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	213.785,00	213.000,00	(785,00)	99,63	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.785,00	213.000,00	(785,00)	99,63	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.889.000,00	2.887.000,00	(2.000,00)	99,93	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.889.000,00	2.887.000,00	(2.000,00)	99,93	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.889.000,00	2.887.000,00	(2.000,00)	99,93	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.481.000,00	2.480.000,00	(1.000,00)	99,95	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.481.000,00	2.480.000,00	(1.000,00)	99,95	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.481.000,00	2.480.000,00	(1.000,00)	99,95	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	26.537.350,00	26.537.050,00	(300,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	26.537.350,00	26.537.050,00	(300,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.537.350,00	26.537.050,00	(300,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.559.719,00	41.508.000,00	(1.051.719,00)	97,52	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.259.719,00	12.258.000,00	(1.719,00)	99,98	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.259.719,00	12.258.000,00	(1.719,00)	99,98	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.259.719,00	12.258.000,00	(1.719,00)	99,98	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	30.300.000,00	29.250.000,00	(1.050.000,00)	96,53	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.300.000,00	29.250.000,00	(1.050.000,00)	96,53	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	29.250.000,00	(1.050.000,00)	96,53	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.553.050,00	22.311.200,00	(241.850,00)	98,92	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	22.309.050,00	22.067.200,00	(241.850,00)	98,91	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.309.050,00	22.067.200,00	(241.850,00)	98,91	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.309.050,00	22.067.200,00	(241.850,00)	98,91	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	244.000,00	244.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	244.000,00	244.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.000,00	244.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.9.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	251.409.150,00	250.398.805,00	(1.010.345,00)	99,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	131.323.900,00	130.832.000,00	(491.900,00)	99,62	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.01.0008		STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN DI KABUPATEN/KOTA	118.385.400,00	117.893.700,00	(491.700,00)	99,58	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	118.385.400,00	117.893.700,00	(491.700,00)	99,58	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.385.400,00	117.893.700,00	(491.700,00)	99,58	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.01.0016		PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM)	12.938.500,00	12.938.300,00	(200,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	12.938.500,00	12.938.300,00	(200,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.938.500,00	12.938.300,00	(200,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.02		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	56.144.750,00	56.128.805,00	(15.945,00)	99,97	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.02.0003		PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	56.144.750,00	56.128.805,00	(15.945,00)	99,97	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	56.144.750,00	56.128.805,00	(15.945,00)	99,97	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.144.750,00	56.128.805,00	(15.945,00)	99,97	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	63.940.500,00	63.438.000,00	(502.500,00)	99,21	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.04.0001		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	18.985.000,00	18.985.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.985.000,00	18.985.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.985.000,00	18.985.000,00	-	100,00	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	44.955.500,00	44.453.000,00	(502.500,00)	98,88	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.955.500,00	44.453.000,00	(502.500,00)	98,88	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.955.500,00	44.453.000,00	(502.500,00)	98,88	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.9.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	10.567.280,00	10.382.000,00	(185.280,00)	98,24	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.04.2.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	10.567.280,00	10.382.000,00	(185.280,00)	98,24	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.04.2.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	10.567.280,00	10.382.000,00	(185.280,00)	98,24	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.567.280,00	10.382.000,00	(185.280,00)	98,24	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.567.280,00	10.382.000,00	(185.280,00)	98,24	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.9.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	72.189.360,00	72.189.260,00	(100,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.05.2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.189.360,00	72.189.260,00	(100,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.05.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.189.360,00	72.189.260,00	(100,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	72.189.360,00	72.189.260,00	(100,00)	99,99	
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.189.360,00	72.189.260,00	(100,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	1.937.960.791,00	1.837.549.510,00	(100.411.281,00)	94,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.937.960.791,00)	(1.837.549.510,00)	100.411.281,00	94,81	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.937.960.791,00)	(1.837.549.510,00)	100.411.281,00	94,81	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.3.28.0.00.11.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	575.000.000,00	352.819.000,00	(222.181.000,00)	61,35	Peraturan Daerah No.1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
	2.11.3.28.0.00.11.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	575.000.000,00	352.819.000,00	(222.181.000,00)	61,35	
	2.11.3.28.0.00.11.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	575.000.000,00	352.819.000,00	(222.181.000,00)	61,35	
				JUMLAH PENDAPATAN	575.000.000,00	352.819.000,00	(222.181.000,00)	61,35	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	6.797.938.727,00	6.476.724.883,00	(321.213.844,00)	95,27	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.099.842.833,00	3.983.665.732,00	(116.177.101,00)	97,16	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.734.000,00	8.733.000,00	(1.000,00)	99,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.000.000,00	1.999.500,00	(500,00)	99,97	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.999.500,00	(500,00)	99,97	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.999.500,00	(500,00)	99,97	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.316.500,00	1.316.500,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.316.500,00	1.316.500,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.316.500,00	1.316.500,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.466.000,00	2.466.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.466.000,00	2.466.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.466.000,00	2.466.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.191.000,00	1.191.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.191.000,00	1.191.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.191.000,00	1.191.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.760.500,00	1.760.000,00	(500,00)	99,97	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.760.500,00	1.760.000,00	(500,00)	99,97	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.760.500,00	1.760.000,00	(500,00)	99,97	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.043.452.529,00	3.929.462.318,00	(113.990.211,00)	97,18	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.043.452.529,00	3.929.462.318,00	(113.990.211,00)	97,18	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.043.452.529,00	3.929.462.318,00	(113.990.211,00)	97,18	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.043.452.529,00	3.929.462.318,00	(113.990.211,00)	97,18	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.04		ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	1.528.000,00	1.525.500,00	(2.500,00)	99,83	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.04.0005		PENGOLAHAN DATA RETRIBUSI DAERAH	1.528.000,00	1.525.500,00	(2.500,00)	99,83	Peraturan Daerah Kab. Majene

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.528.000,00	1.525.500,00	(2.500,00)	99,83	No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.528.000,00	1.525.500,00	(2.500,00)	99,83	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	9.809.124,00	9.492.000,00	(317.124,00)	96,76	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	258.000,00	258.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	258.000,00	258.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.000,00	258.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.609.000,00	2.609.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.609.000,00	2.609.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.609.000,00	2.609.000,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	5.942.124,00	5.625.000,00	(317.124,00)	94,66	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.942.124,00	5.625.000,00	(317.124,00)	94,66	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.942.124,00	5.625.000,00	(317.124,00)	94,66	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.136.280,00	8.422.014,00	(1.714.266,00)	83,08	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.499.000,00	1.498.500,00	(500,00)	99,96	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.499.000,00	1.498.500,00	(500,00)	99,96	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.499.000,00	1.498.500,00	(500,00)	99,96	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.637.280,00	6.923.514,00	(1.713.766,00)	80,15	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.637.280,00	6.923.514,00	(1.713.766,00)	80,15	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.637.280,00	6.923.514,00	(1.713.766,00)	80,15	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26.182.900,00	26.030.900,00	(152.000,00)	99,41	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	26.182.900,00	26.030.900,00	(152.000,00)	99,41	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.182.900,00	26.030.900,00	(152.000,00)	99,41	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.182.900,00	26.030.900,00	(152.000,00)	99,41	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	113.197.900,00	112.093.500,00	(1.104.400,00)	99,02	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	113.197.900,00	112.093.500,00	(1.104.400,00)	99,02	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	25.000.000,00	24.996.000,00	(4.000,00)	99,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.996.000,00	(4.000,00)	99,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.996.000,00	(4.000,00)	99,98	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0015		PENGLOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	88.197.900,00	87.097.500,00	(1.100.400,00)	98,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	88.197.900,00	87.097.500,00	(1.100.400,00)	98,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.197.900,00	87.097.500,00	(1.100.400,00)	98,75	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.420.481.994,00	2.244.668.651,00	(175.813.343,00)	92,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.420.481.994,00	2.244.668.651,00	(175.813.343,00)	92,73	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0002		PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	2.265.015.794,00	2.089.202.451,00	(175.813.343,00)	92,23	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.087.219.946,00	1.951.960.551,00	(135.259.395,00)	93,51	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.087.219.946,00	1.951.960.551,00	(135.259.395,00)	93,51	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	177.795.848,00	137.241.900,00	(40.553.948,00)	77,19	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.550.000,00	137.241.900,00	(308.100,00)	99,77	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.245.848,00	-	(40.245.848,00)	0,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP	155.466.200,00	155.466.200,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	155.466.200,00	155.466.200,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.466.200,00	155.466.200,00	-	100,00	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	164.416.000,00	136.297.000,00	(28.119.000,00)	82,89	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	164.416.000,00	136.297.000,00	(28.119.000,00)	82,89	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0004		PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	164.416.000,00	136.297.000,00	(28.119.000,00)	82,89	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	161.560.000,00	133.499.800,00	(28.060.200,00)	82,63	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.560.000,00	133.499.800,00	(28.060.200,00)	82,63	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	2.856.000,00	2.797.200,00	(58.800,00)	97,94	
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.856.000,00	2.797.200,00	(58.800,00)	97,94	
				JUMLAH BELANJA	6.797.938.727,00	6.476.724.883,00	(321.213.844,00)	95,27	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.222.938.727,00)	(6.123.905.883,00)	99.032.844,00	98,40	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.222.938.727,00)	(6.123.905.883,00)	99.032.844,00	98,40	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000		5	BELANJA DAERAH	3.189.674.710,00	2.926.368.305,00	(263.306.405,00)	91,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.901.909.210,00	2.670.631.105,00	(231.278.105,00)	92,03	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.800.000,00	10.464.900,00	(5.335.100,00)	66,23	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.761.000,00	2.727.000,00	(34.000,00)	98,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.761.000,00	2.727.000,00	(34.000,00)	98,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.761.000,00	2.727.000,00	(34.000,00)	98,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.060.000,00	1.991.000,00	(69.000,00)	96,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.060.000,00	1.991.000,00	(69.000,00)	96,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	1.991.000,00	(69.000,00)	96,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.484.500,00	1.484.500,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.484.500,00	1.484.500,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.484.500,00	1.484.500,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	991.250,00	399.000,00	(592.250,00)	40,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	991.250,00	399.000,00	(592.250,00)	40,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	991.250,00	399.000,00	(592.250,00)	40,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.036.250,00	1.941.200,00	(1.095.050,00)	63,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.036.250,00	1.941.200,00	(1.095.050,00)	63,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.036.250,00	1.941.200,00	(1.095.050,00)	63,93	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.017.000,00	1.922.200,00	(1.094.800,00)	63,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.017.000,00	1.922.200,00	(1.094.800,00)	63,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.017.000,00	1.922.200,00	(1.094.800,00)	63,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.450.000,00	-	(2.450.000,00)	-	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.450.000,00	-	(2.450.000,00)	-	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	-	(2.450.000,00)	-	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.424.842.348,00	2.233.603.753,00	(191.238.595,00)	92,11	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.263.890.348,00	2.088.148.253,00	(175.742.095,00)	92,23	PPN0.5 Tahun 2024 tentang
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.263.890.348,00	2.088.148.253,00	(175.742.095,00)	92,23	Perubahan kesembilan Belas atas DP No 7 tahun 1007

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.263.890.348,00	2.088.148.253,00	(175.742.095,00)	92,23	Peraturan Daerah Kab. Majene No.7 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji PNS
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	159.600.000,00	144.352.000,00	(15.248.000,00)	90,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	159.600.000,00	144.352.000,00	(15.248.000,00)	90,44	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.600.000,00	144.352.000,00	(15.248.000,00)	90,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	848.500,00	600.000,00	(248.500,00)	70,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	848.500,00	600.000,00	(248.500,00)	70,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	848.500,00	600.000,00	(248.500,00)	70,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	503.500,00	503.500,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	503.500,00	503.500,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	503.500,00	503.500,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	190.617.000,00	164.059.500,00	(26.557.500,00)	86,06	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	114.511.000,00	114.510.000,00	(1.000,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	114.511.000,00	114.510.000,00	(1.000,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.511.000,00	114.510.000,00	(1.000,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	40.167.000,00	16.547.000,00	(23.620.000,00)	41,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	40.167.000,00	16.547.000,00	(23.620.000,00)	41,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.167.000,00	16.547.000,00	(23.620.000,00)	41,19	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	35.939.000,00	33.002.500,00	(2.936.500,00)	91,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.939.000,00	33.002.500,00	(2.936.500,00)	91,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.939.000,00	33.002.500,00	(2.936.500,00)	91,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	44.300.000,00	44.300.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	44.300.000,00	44.300.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	44.300.000,00	44.300.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.300.000,00	44.300.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	158.979.552,00	154.336.552,00	(4.643.000,00)	97,07	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	42.280.000,00	42.280.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.280.000,00	42.280.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.280.000,00	42.280.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	69.999.552,00	69.906.552,00	(93.000,00)	99,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.999.552,00	69.906.552,00	(93.000,00)	99,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.999.552,00	69.906.552,00	(93.000,00)	99,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	46.700.000,00	42.150.000,00	(4.550.000,00)	90,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	46.700.000,00	42.150.000,00	(4.550.000,00)	90,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.700.000,00	42.150.000,00	(4.550.000,00)	90,25	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	67.370.310,00	63.866.400,00	(3.503.910,00)	94,79	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	34.720.310,00	31.216.400,00	(3.503.910,00)	89,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.720.310,00	31.216.400,00	(3.503.910,00)	89,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.720.310,00	31.216.400,00	(3.503.910,00)	89,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.000.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	265.809.000,00	236.980.700,00	(28.828.300,00)	89,15	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	265.809.000,00	236.980.700,00	(28.828.300,00)	89,15	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0001		PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.764.000,00	4.544.000,00	(220.000,00)	95,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.764.000,00	4.544.000,00	(220.000,00)	95,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.764.000,00	4.544.000,00	(220.000,00)	95,38	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0004		PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	14.816.000,00	10.836.700,00	(3.979.300,00)	73,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.816.000,00	10.836.700,00	(3.979.300,00)	73,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.816.000,00	10.836.700,00	(3.979.300,00)	73,14	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0005		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	241.410.000,00	216.810.000,00	(24.600.000,00)	89,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	241.410.000,00	216.810.000,00	(24.600.000,00)	89,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.410.000,00	216.810.000,00	(24.600.000,00)	89,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0006		PENCATATAN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	4.819.000,00	4.790.000,00	(29.000,00)	99,39	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.819.000,00	4.790.000,00	(29.000,00)	99,39	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.819.000,00	4.790.000,00	(29.000,00)	99,39	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	10.656.500,00	7.456.500,00	(3.200.000,00)	69,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	7.456.500,00	7.456.500,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0001		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	4.694.000,00	4.694.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.694.000,00	4.694.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.694.000,00	4.694.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0002		PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	2.762.500,00	2.762.500,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.762.500,00	2.762.500,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.762.500,00	2.762.500,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.02		PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	-	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.02.0008		SOSIALISASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	-	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	-	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	-	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	11.300.000,00	11.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	11.300.000,00	11.300.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0001		PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	4.659.000,00	4.659.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.659.000,00	4.659.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.659.000,00	4.659.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0002		KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	6.641.000,00	6.641.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.641.000,00	6.641.000,00	-	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.641.000,00	6.641.000,00	-	100,00	
				JUMLAH BELANJA	3.189.674.710,00	2.926.368.305,00	(263.306.405,00)	91,74	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.189.674.710,00)	(2.926.368.305,00)	263.306.405,00	91,74	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.189.674.710,00)	(2.926.368.305,00)	263.306.405,00	91,74	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	2.364.102.338,00	2.087.806.776,00	(276.295.562,00)	88,31	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.114.225.258,00	1.936.037.776,00	(178.187.482,00)	91,57	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	42.623.000,00	20.775.000,00	(21.848.000,00)	48,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	2.373.000,00	(2.627.000,00)	47,46	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	2.373.000,00	(2.627.000,00)	47,46	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.373.000,00	(2.627.000,00)	47,46	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	9.403.000,00	4.034.000,00	(5.369.000,00)	42,90	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.403.000,00	4.034.000,00	(5.369.000,00)	42,90	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.403.000,00	4.034.000,00	(5.369.000,00)	42,90	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.000.000,00	2.750.000,00	(2.250.000,00)	55,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	2.750.000,00	(2.250.000,00)	55,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.750.000,00	(2.250.000,00)	55,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	8.914.000,00	4.145.000,00	(4.769.000,00)	46,49	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.914.000,00	4.145.000,00	(4.769.000,00)	46,49	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.914.000,00	4.145.000,00	(4.769.000,00)	46,49	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.000.000,00	750.000,00	(4.250.000,00)	15,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	750.000,00	(4.250.000,00)	15,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	750.000,00	(4.250.000,00)	15,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.306.000,00	6.723.000,00	(2.583.000,00)	72,24	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.306.000,00	6.723.000,00	(2.583.000,00)	72,24	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.306.000,00	6.723.000,00	(2.583.000,00)	72,24	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.871.694.416,00	1.777.971.570,00	(93.722.846,00)	94,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.803.108.416,00	1.719.985.570,00	(83.122.846,00)	95,39	PPN0.5 Tahun 2024 tentang
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.803.108.416,00	1.719.985.570,00	(83.122.846,00)	95,39	Perubahan kesembilan Belas
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.803.108.416,00	1.719.985.570,00	(83.122.846,00)	95,39	atas PP No.7 tahun 1997
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	58.800.000,00	53.900.000,00	(4.900.000,00)	91,66	tetang Peraturan Gaji PNS
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.800.000,00	53.900.000,00	(4.900.000,00)	91,66	Peraturan Daerah Kab. Majene
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	53.900.000,00	(4.900.000,00)	91,66	No.5 tahun 2025 tentang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	4.786.000,00	4.086.000,00	(700.000,00)	85,37	Perubahan APBD Kabupaten Majene TA 2025
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.786.000,00	4.086.000,00	(700.000,00)	85,37	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.786.000,00	4.086.000,00	(700.000,00)	85,37	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	115.967.920,00	72.096.860,00	(43.871.060,00)	62,16	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.561.920,00	9.577.500,00	(984.420,00)	90,67	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.561.920,00	9.577.500,00	(984.420,00)	90,67	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.561.920,00	9.577.500,00	(984.420,00)	90,67	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	105.406.000,00	62.519.360,00	(42.886.640,00)	59,31	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	105.406.000,00	62.519.360,00	(42.886.640,00)	59,31	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.406.000,00	62.519.360,00	(42.886.640,00)	59,31	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	70.951.922,00	60.063.346,00	(10.888.576,00)	84,65	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	11.676.500,00	6.606.800,00	(5.069.700,00)	56,58	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.676.500,00	6.606.800,00	(5.069.700,00)	56,58	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.676.500,00	6.606.800,00	(5.069.700,00)	56,58	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.275.422,00	20.406.546,00	(2.868.876,00)	87,67	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.275.422,00	20.406.546,00	(2.868.876,00)	87,67	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.275.422,00	20.406.546,00	(2.868.876,00)	87,67	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.400.000,00	7.700.000,00	(700.000,00)	91,66	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	7.700.000,00	(700.000,00)	91,66	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	7.700.000,00	(700.000,00)	91,66	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	27.600.000,00	25.350.000,00	(2.250.000,00)	91,84	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	25.350.000,00	(2.250.000,00)	91,84	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	25.350.000,00	(2.250.000,00)	91,84	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.988.000,00	5.131.000,00	(7.857.000,00)	39,50	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	12.988.000,00	5.131.000,00	(7.857.000,00)	39,50	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.988.000,00	5.131.000,00	(7.857.000,00)	39,50	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.988.000,00	5.131.000,00	(7.857.000,00)	39,50	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0001		FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	248.277.080,00	151.769.000,00	(96.508.080,00)	61,12	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	248.277.080,00	151.769.000,00	(96.508.080,00)	61,12	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	248.277.080,00	151.769.000,00	(96.508.080,00)	61,12	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	248.277.080,00	151.769.000,00	(96.508.080,00)	61,12	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.277.080,00	151.769.000,00	(96.508.080,00)	61,12	
				JUMLAH BELANJA	2.364.102.338,00	2.087.806.776,00	(276.295.562,00)	88,31	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.364.102.338,00)	(2.087.806.776,00)	276.295.562,00	88,31	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.364.102.338,00)	(2.087.806.776,00)	276.295.562,00	88,31	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	7.229.388.401,00	6.971.234.576,00	(258.153.825,00)	96,42	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.344.901.501,00	3.279.213.495,00	(65.688.006,00)	98,03	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.282.596.754,00	3.221.722.743,00	(60.874.011,00)	98,14	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.194.396.754,00	3.140.172.743,00	(54.224.011,00)	98,30	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji PNS
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.194.396.754,00	3.140.172.743,00	(54.224.011,00)	98,30	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.194.396.754,00	3.140.172.743,00	(54.224.011,00)	98,30	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	88.200.000,00	81.550.000,00	(6.650.000,00)	92,46	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.200.000,00	81.550.000,00	(6.650.000,00)	92,46	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.200.000,00	81.550.000,00	(6.650.000,00)	92,46	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	62.304.747,00	57.490.752,00	(4.813.995,00)	92,27	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.304.747,00	18.990.752,00	(1.313.995,00)	93,52	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.304.747,00	18.990.752,00	(1.313.995,00)	93,52	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.304.747,00	18.990.752,00	(1.313.995,00)	93,52	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	42.000.000,00	38.500.000,00	(3.500.000,00)	91,66	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	38.500.000,00	(3.500.000,00)	91,66	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	38.500.000,00	(3.500.000,00)	91,66	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	225.600.000,00	225.600.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	225.600.000,00	225.600.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02.0009		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02.0012		PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	69.600.000,00	69.600.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	69.600.000,00	69.600.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.600.000,00	69.600.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02.0013		PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	96.000.000,00	96.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	96.000.000,00	96.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	96.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.667.486.900,00	2.605.021.081,00	(62.465.819,00)	97,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	898.528.000,00	898.059.081,00	(468.919,00)	99,94	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	392.000.000,00	392.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	392.000.000,00	392.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.000.000,00	392.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0011		PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0012		PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	96.528.000,00	96.059.081,00	(468.919,00)	99,51	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	96.528.000,00	96.059.081,00	(468.919,00)	99,51	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.528.000,00	96.059.081,00	(468.919,00)	99,51	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0014		ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	656.000.000,00	656.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.02.0004		PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	656.000.000,00	656.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	656.000.000,00	656.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	656.000.000,00	656.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	493.872.000,00	450.812.000,00	(43.060.000,00)	91,28	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.300.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	457.422.000,00	414.362.000,00	(43.060.000,00)	90,58	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	457.422.000,00	414.362.000,00	(43.060.000,00)	90,58	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.422.000,00	414.362.000,00	(43.060.000,00)	90,58	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03.0008		PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	21.150.000,00	21.150.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	21.150.000,00	21.150.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.150.000,00	21.150.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	619.086.900,00	600.150.000,00	(18.936.900,00)	96,94	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04.0002		INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB	22.386.900,00	3.450.000,00	(18.936.900,00)	15,41	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.386.900,00	3.450.000,00	(18.936.900,00)	15,41	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.386.900,00	3.450.000,00	(18.936.900,00)	15,41	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04.0005		FASILITASI PENGELOLAAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	137.500.000,00	137.500.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	137.500.000,00	137.500.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.500.000,00	137.500.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04.0006		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA	459.200.000,00	459.200.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	459.200.000,00	459.200.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	459.200.000,00	459.200.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	991.400.000,00	861.400.000,00	(130.000.000,00)	86,88	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	206.800.000,00	76.800.000,00	(130.000.000,00)	37,13	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.01.0016		PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)	76.800.000,00	76.800.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	76.800.000,00	76.800.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	76.800.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.01.0018		PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	130.000.000,00	-	(130.000.000,00)	-	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	-	(130.000.000,00)	-	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	-	(130.000.000,00)	-	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.02		PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	784.600.000,00	784.600.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.02.0005		PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	349.000.000,00	349.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	349.000.000,00	349.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.000.000,00	349.000.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.02.0006		PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	435.600.000,00	435.600.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	435.600.000,00	435.600.000,00	-	100,00	
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.600.000,00	435.600.000,00	-	100,00	
JUMLAH BELANJA					7.229.388.401,00	6.971.234.576,00	(258.153.825,00)	96,42	
SURPLUS / (DEFISIT)					(7.229.388.401,00)	(6.971.234.576,00)	258.153.825,00	96,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.229.388.401,00)	(6.971.234.576,00)	258.153.825,00	96,42	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000.000,00	950.184.000,00	(249.816.000,00)	79,18	Peraturan Daerah No.1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000.000,00	950.184.000,00	(249.816.000,00)	79,18	
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.200.000.000,00	950.184.000,00	(249.816.000,00)	79,18	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.200.000.000,00	950.184.000,00	(249.816.000,00)	79,18	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		5	BELANJA DAERAH	3.503.317.872,00	3.274.163.177,00	(229.154.695,00)	93,45	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.478.652.372,00	3.257.018.177,00	(221.634.195,00)	93,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.115.000,00	5.115.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5.115.000,00	5.115.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.115.000,00	5.115.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.115.000,00	5.115.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.305.899.985,00	3.119.012.718,00	(186.887.267,00)	94,34	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.024.492.985,00	2.870.905.718,00	(153.587.267,00)	94,92	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.024.492.985,00	2.870.905.718,00	(153.587.267,00)	94,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.024.492.985,00	2.870.905.718,00	(153.587.267,00)	94,92	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	276.300.000,00	243.000.000,00	(33.300.000,00)	87,94	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	276.300.000,00	243.000.000,00	(33.300.000,00)	87,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.300.000,00	243.000.000,00	(33.300.000,00)	87,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.107.000,00	5.107.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.107.000,00	5.107.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.107.000,00	5.107.000,00	-	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	5.480.000,00	2.532.000,00	(2.948.000,00)	46,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	2.920.000,00	-	(2.920.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.920.000,00	-	(2.920.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	-	(2.920.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	2.560.000,00	2.532.000,00	(28.000,00)	98,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.560.000,00	2.532.000,00	(28.000,00)	98,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	2.532.000,00	(28.000,00)	98,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	52.981.000,00	37.839.000,00	(15.142.000,00)	71,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.175.000,00	6.130.000,00	(45.000,00)	99,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.175.000,00	6.130.000,00	(45.000,00)	99,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.175.000,00	6.130.000,00	(45.000,00)	99,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	3.491.000,00	3.490.000,00	(1.000,00)	99,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.491.000,00	3.490.000,00	(1.000,00)	99,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.491.000,00	3.490.000,00	(1.000,00)	99,97	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	43.315.000,00	28.219.000,00	(15.096.000,00)	65,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	43.315.000,00	28.219.000,00	(15.096.000,00)	65,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.315.000,00	28.219.000,00	(15.096.000,00)	65,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	83.598.587,00	74.309.959,00	(9.288.628,00)	88,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	13.998.587,00	12.159.959,00	(1.838.628,00)	86,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.998.587,00	12.159.959,00	(1.838.628,00)	86,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.998.587,00	12.159.959,00	(1.838.628,00)	86,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	69.600.000,00	62.150.000,00	(7.450.000,00)	89,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	69.600.000,00	62.150.000,00	(7.450.000,00)	89,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.600.000,00	62.150.000,00	(7.450.000,00)	89,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.577.800,00	18.209.500,00	(7.368.300,00)	71,19	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	23.061.800,00	16.028.000,00	(7.033.800,00)	69,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.061.800,00	16.028.000,00	(7.033.800,00)	69,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.061.800,00	16.028.000,00	(7.033.800,00)	69,50	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	2.516.000,00	2.181.500,00	(334.500,00)	86,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.516.000,00	2.181.500,00	(334.500,00)	86,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.516.000,00	2.181.500,00	(334.500,00)	86,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	22.905.500,00	16.145.000,00	(6.760.500,00)	70,48	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	5.100.000,00	5.085.000,00	(15.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	5.100.000,00	5.085.000,00	(15.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.085.000,00	(15.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.085.000,00	(15.000,00)	99,70	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03		PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	1.480.000,00	-	(1.480.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03.0007		REVITALISASI TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG)	740.000,00	-	(740.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	740.000,00	-	(740.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	-	(740.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03.0011		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG)	740.000,00	-	(740.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	740.000,00	-	(740.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	-	(740.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	3.346.500,00	3.320.000,00	(26.500,00)	99,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0004		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	3.346.500,00	3.320.000,00	(26.500,00)	99,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.346.500,00	3.320.000,00	(26.500,00)	99,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.346.500,00	3.320.000,00	(26.500,00)	99,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08		AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	2.679.000,00	-	(2.679.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0004		PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA	2.679.000,00	-	(2.679.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.679.000,00	-	(2.679.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.679.000,00	-	(2.679.000,00)	-	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09		PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.300.000,00	7.740.000,00	(2.560.000,00)	75,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	10.300.000,00	7.740.000,00	(2.560.000,00)	75,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.300.000,00	7.740.000,00	(2.560.000,00)	75,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	7.740.000,00	(2.560.000,00)	75,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.760.000,00	1.000.000,00	(760.000,00)	56,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.08		PENERBITAN IZIN USAHA JASA TERKAIT DENGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	1.760.000,00	1.000.000,00	(760.000,00)	56,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.08.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA TERKAIT DENGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL	1.760.000,00	1.000.000,00	(760.000,00)	56,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.760.000,00	1.000.000,00	(760.000,00)	56,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	1.000.000,00	(760.000,00)	56,81	
				JUMLAH BELANJA	3.503.317.872,00	3.274.163.177,00	(229.154.695,00)	93,45	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.303.317.872,00)	(2.323.979.177,00)	(20.661.305,00)	100,89	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.303.317.872,00)	(2.323.979.177,00)	(20.661.305,00)	100,89	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000		5	BELANJA DAERAH	3.283.096.474,00	3.183.881.948,00	(99.214.526,00)	96,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.014.653.262,00	1.942.892.616,00	(71.760.646,00)	96,43	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.179.000,00	8.179.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.000		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.189.000,00	2.189.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	2.189.000,00	2.189.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.189.000,00	2.189.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.000		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.000	5.1	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.990.000,00	1.990.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	1.990.000,00	1.990.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	1.990.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.000	5.1	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.000	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.912.728.262,00	1.849.776.546,00	(62.951.716,00)	96,70	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.000		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.799.428.262,00	1.745.926.546,00	(53.501.716,00)	97,02	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.000	5.1	BELANJA OPERASI	1.799.428.262,00	1.745.926.546,00	(53.501.716,00)	97,02	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.799.428.262,00	1.745.926.546,00	(53.501.716,00)	97,02	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.000		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	112.300.000,00	102.850.000,00	(9.450.000,00)	91,58	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.000	5.1	BELANJA OPERASI	112.300.000,00	102.850.000,00	(9.450.000,00)	91,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.300.000,00	102.850.000,00	(9.450.000,00)	91,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.000		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.000	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	16.600.500,00	16.600.500,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.05.000		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	16.600.500,00	16.600.500,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.05.000	5.1	BELANJA OPERASI	16.600.500,00	16.600.500,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.05.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.600.500,00	16.600.500,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	24.227.600,00	24.227.000,00	(600,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	248.600,00	248.000,00	(600,00)	99,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	248.600,00	248.000,00	(600,00)	99,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.600,00	248.000,00	(600,00)	99,75	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	230.000,00	230.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	230.000,00	230.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.000,00	230.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.460.000,00	4.460.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	4.460.000,00	4.460.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	4.460.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000		FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	16.789.000,00	16.789.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000	5.1	BELANJA OPERASI	16.789.000,00	16.789.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.789.000,00	16.789.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	41.825.000,00	33.549.170,00	(8.275.830,00)	80,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.07.000		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	41.825.000,00	33.549.170,00	(8.275.830,00)	80,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.07.000	5.2	BELANJA MODAL	41.825.000,00	33.549.170,00	(8.275.830,00)	80,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.07.000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.825.000,00	33.549.170,00	(8.275.830,00)	80,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.092.900,00	10.560.400,00	(532.500,00)	95,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.000	2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	10.097.900,00	9.565.400,00	(532.500,00)	94,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.000	5.1	BELANJA OPERASI	10.097.900,00	9.565.400,00	(532.500,00)	94,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.097.900,00	9.565.400,00	(532.500,00)	94,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.000		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	995.000,00	995.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.000	5.1	BELANJA OPERASI	995.000,00	995.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.000,00	995.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	259.200.000,00	259.193.700,00	(6.300,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01		PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	259.200.000,00	259.193.700,00	(6.300,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.001		Pelayanan Informasi Publik	19.200.000,00	19.193.700,00	(6.300,00)	99,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.001	5.1	BELANJA OPERASI	19.200.000,00	19.193.700,00	(6.300,00)	99,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.193.700,00	(6.300,00)	99,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.002		PENGLOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.002	5.1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03		PROGRAM PENGLOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.009.243.212,00	981.795.632,00	(27.447.580,00)	97,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02		PENGLOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.009.243.212,00	981.795.632,00	(27.447.580,00)	97,28	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.001		KOORDINASI PENYUSUNAN PROSES BISNIS	2.249.000,00	-	(2.249.000,00)	-	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.001	5.1	BELANJA OPERASI	2.249.000,00	-	(2.249.000,00)	-	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.249.000,00	-	(2.249.000,00)	-	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.001		FASILITASI PENYELENGGARAAN SPBE DI LINGKUNGAN PEMDA	44.955.500,00	35.056.800,00	(9.898.700,00)	77,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.001	5.1	BELANJA OPERASI	44.955.500,00	35.056.800,00	(9.898.700,00)	77,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.955.500,00	35.056.800,00	(9.898.700,00)	77,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.001	8	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN/ATAU REVU ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	7.487.000,00	-	(7.487.000,00)	-	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.001	5.1	BELANJA OPERASI	7.487.000,00	-	(7.487.000,00)	-	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.487.000,00	-	(7.487.000,00)	-	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.002	0	PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS YANG SESUI DENGAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.002	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.002	7	IMPLEMENTASI INOVASI PROGRAM KOTA CERDAS SESUI DENGAN MASTERPLAN KABUPATEN ATAU KOTA CERDAS	5.910.000,00	-	(5.910.000,00)	-	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.002	5.1	BELANJA OPERASI	5.910.000,00	-	(5.910.000,00)	-	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	-	(5.910.000,00)	-	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.002	8	KOORDINASI DAN FASILITASI PROMOSI LITERASI SPBEDAN/ATAU KOLABORASI PENYELENGGARAAN SPBE	1.000.000,00	960.900,00	(39.100,00)	96,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.002	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	960.900,00	(39.100,00)	96,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	960.900,00	(39.100,00)	96,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.003	0	PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	887.641.712,00	885.777.932,00	(1.863.780,00)	99,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.003	5.1	BELANJA OPERASI	887.641.712,00	885.777.932,00	(1.863.780,00)	99,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	887.641.712,00	885.777.932,00	(1.863.780,00)	99,79	
JUMLAH BELANJA					3.283.096.474,00	3.183.881.948,00	(99.214.526,00)	96,97	
SURPLUS / (DEFISIT)					(3.283.096.474,00)	(3.183.881.948,00)	99.214.526,00	96,97	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)					(3.283.096.474,00)	(3.183.881.948,00)	99.214.526,00	96,97	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.17.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,11	Peraturan Daerah No.1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
	2.17.3.30.3.31.17.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,11	
	2.17.3.30.3.31.17.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,11	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,11	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000		5	BELANJA DAERAH	3.907.644.558,00	3.709.864.125,00	(197.780.433,00)	94,93	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.004.704.378,00	2.810.423.945,00	(194.280.433,00)	93,53	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	978.500,00	978.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	978.500,00	978.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.500,00	978.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	490.500,00	490.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	490.500,00	490.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.500,00	490.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	493.000,00	493.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	493.000,00	493.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.000,00	493.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.028.000,00	2.028.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.791.409.805,00	2.617.294.715,00	(174.115.090,00)	93,76	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.788.847.305,00	2.614.732.715,00	(174.114.590,00)	93,75	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji PNS
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.788.847.305,00	2.614.732.715,00	(174.114.590,00)	93,75	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.788.847.305,00	2.614.732.715,00	(174.114.590,00)	93,75	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	890.000,00	890.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	890.000,00	890.000,00	0,00	100,00	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	890.000,00	890.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	696.500,00	696.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	696.500,00	696.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	696.500,00	696.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	976.000,00	975.500,00	(500,00)	99,94	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	976.000,00	975.500,00	(500,00)	99,94	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	976.000,00	975.500,00	(500,00)	99,94	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	24.388.340,00	24.388.340,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.985.700,00	2.985.700,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.985.700,00	2.985.700,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.985.700,00	2.985.700,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	735.000,00	735.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	735.000,00	735.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.000,00	735.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	19.407.640,00	19.407.640,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.407.640,00	19.407.640,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.407.640,00	19.407.640,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	82.874.683,00	69.831.390,00	(13.043.293,00)	84,26	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	955.000,00	955.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	955.000,00	955.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.000,00	955.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	32.623.683,00	25.680.390,00	(6.943.293,00)	78,71	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.623.683,00	25.680.390,00	(6.943.293,00)	78,71	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.623.683,00	25.680.390,00	(6.943.293,00)	78,71	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	49.296.000,00	43.196.000,00	(6.100.000,00)	87,62	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.296.000,00	43.196.000,00	(6.100.000,00)	87,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.296.000,00	43.196.000,00	(6.100.000,00)	87,62	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100.291.550,00	93.169.500,00	(7.122.050,00)	92,89	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	17.611.700,00	16.447.000,00	(1.164.700,00)	93,38	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.611.700,00	16.447.000,00	(1.164.700,00)	93,38	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.611.700,00	16.447.000,00	(1.164.700,00)	93,38	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	17.888.350,00	11.931.000,00	(5.957.350,00)	66,69	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.888.350,00	11.931.000,00	(5.957.350,00)	66,69	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.888.350,00	11.931.000,00	(5.957.350,00)	66,69	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	64.110.000,00	64.110.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	64.110.000,00	64.110.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.110.000,00	64.110.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	681.500,00	681.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	681.500,00	681.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	681.500,00	681.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	13.410.000,00	9.910.000,00	(3.500.000,00)	73,90	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	13.410.000,00	9.910.000,00	(3.500.000,00)	73,90	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.2.01.0004		PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.410.000,00	9.910.000,00	(3.500.000,00)	73,90	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.410.000,00	9.910.000,00	(3.500.000,00)	73,90	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.410.000,00	9.910.000,00	(3.500.000,00)	73,90	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	139.400.000,00	139.400.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.2.01		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	139.400.000,00	139.400.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.2.01.0001		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	139.400.000,00	139.400.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	139.400.000,00	139.400.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.400.000,00	139.400.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.449.000,00	3.449.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	3.449.000,00	3.449.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.07.2.01.0014		PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO	3.449.000,00	3.449.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.07.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	3.449.000,00	3.449.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.07.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.449.000,00	3.449.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	746.681.180,00	746.681.180,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	746.681.180,00	746.681.180,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01.0002		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	746.681.180,00	746.681.180,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	746.681.180,00	746.681.180,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	746.681.180,00	746.681.180,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	3.907.644.558,00	3.709.864.125,00	(197.780.433,00)	94,93	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.232.983.558,00)	(2.636.121.125,00)	(403.137.567,00)	118,05	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.232.983.558,00)	(2.636.121.125,00)	(403.137.567,00)	118,05	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.17.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,11	
	2.17.3.30.3.31.17.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,11	
	2.17.3.30.3.31.17.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,11	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,11	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000		5	BELANJA DAERAH	349.975.500,00	328.274.500,00	(21.701.000,00)	93,79	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	322.238.000,00	301.938.000,00	(20.300.000,00)	93,70	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	322.238.000,00	301.938.000,00	(20.300.000,00)	93,70	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0002		FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	277.238.000,00	256.938.000,00	(20.300.000,00)	92,67	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	277.238.000,00	256.938.000,00	(20.300.000,00)	92,67	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.238.000,00	256.938.000,00	(20.300.000,00)	92,67	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	18.633.000,00	17.233.000,00	(1.400.000,00)	92,48	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.01		MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.593.000,00	1.593.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT	1.593.000,00	1.593.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.593.000,00	1.593.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.593.000,00	1.593.000,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	17.040.000,00	15.640.000,00	(1.400.000,00)	91,78	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0002		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	17.040.000,00	15.640.000,00	(1.400.000,00)	91,78	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.040.000,00	15.640.000,00	(1.400.000,00)	91,78	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	15.640.000,00	(1.400.000,00)	91,78	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	9.104.500,00	9.103.500,00	(1.000,00)	99,98	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	9.104.500,00	9.103.500,00	(1.000,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	6.103.500,00	6.103.500,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.103.500,00	6.103.500,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.103.500,00	6.103.500,00	-	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	3.001.000,00	3.000.000,00	(1.000,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.001.000,00	3.000.000,00	(1.000,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.001.000,00	3.000.000,00	(1.000,00)	99,96	
				JUMLAH BELANJA	349.975.500,00	328.274.500,00	(21.701.000,00)	93,79	
				SURPLUS / (DEFISIT)	1.324.685.500,00	745.468.500,00	(579.217.000,00)	56,27	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.324.685.500,00	745.468.500,00	(579.217.000,00)	56,27	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.17.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,11	Peraturan Daerah No.1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
	2.17.3.30.3.31.17.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,11	
	2.17.3.30.3.31.17.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,11	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.674.661.000,00	1.073.743.000,00	(600.918.000,00)	64,11	
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000		5	BELANJA DAERAH	74.886.000,00	74.886.000,00	-	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	74.886.000,00	74.886.000,00	-	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	74.886.000,00	74.886.000,00	-	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.02.2.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.950.000,00	3.950.000,00	-	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	70.936.000,00	70.936.000,00	-	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	70.936.000,00	70.936.000,00	-	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.936.000,00	70.936.000,00	-	100,00	
				JUMLAH BELANJA	74.886.000,00	74.886.000,00	-	100,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	1.599.775.000,00	998.857.000,00	(600.918.000,00)	62,43	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.599.775.000,00	998.857.000,00	(600.918.000,00)	62,43	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000		5	BELANJA DAERAH	2.215.666.967,00	2.114.547.858,00	(101.119.109,00)	95,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.186.604.967,00	2.091.219.858,00	(95.385.109,00)	95,63	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.740.000,00	10.375.500,00	(364.500,00)	96,60	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.240.000,00	3.894.000,00	(346.000,00)	91,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.240.000,00	3.894.000,00	(346.000,00)	91,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	3.894.000,00	(346.000,00)	91,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.500.000,00	1.481.500,00	(18.500,00)	98,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.481.500,00	(18.500,00)	98,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.481.500,00	(18.500,00)	98,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.875.044.757,00	1.801.011.334,00	(74.033.423,00)	96,05	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.867.544.757,00	1.796.356.334,00	(71.188.423,00)	96,18	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.867.544.757,00	1.796.356.334,00	(71.188.423,00)	96,18	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.867.544.757,00	1.796.356.334,00	(71.188.423,00)	96,18	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	1.250.000,00	500.000,00	(750.000,00)	40,00	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	500.000,00	(750.000,00)	40,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	500.000,00	(750.000,00)	40,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	1.250.000,00	655.000,00	(595.000,00)	52,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	655.000,00	(595.000,00)	52,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	655.000,00	(595.000,00)	52,40	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	70,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	1.611.500,00	1.611.500,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	1.611.500,00	1.611.500,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.611.500,00	1.611.500,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.611.500,00	1.611.500,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.750.000,00	1.741.000,00	(9.000,00)	99,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1.750.000,00	1.741.000,00	(9.000,00)	99,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.741.000,00	(9.000,00)	99,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.741.000,00	(9.000,00)	99,48	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	86.611.000,00	85.354.900,00	(1.256.100,00)	98,54	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.790.000,00	3.790.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.790.000,00	3.790.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	3.790.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	381.000,00	381.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	381.000,00	381.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.000,00	381.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	80.640.000,00	79.833.900,00	(806.100,00)	99,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	80.640.000,00	79.833.900,00	(806.100,00)	99,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.640.000,00	79.833.900,00	(806.100,00)	99,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0011		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	1.800.000,00	1.350.000,00	(450.000,00)	75,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.350.000,00	(450.000,00)	75,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.350.000,00	(450.000,00)	75,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	188.265.510,00	170.445.824,00	(17.819.686,00)	90,53	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.208.500,00	4.737.600,00	(470.900,00)	90,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.208.500,00	4.737.600,00	(470.900,00)	90,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.208.500,00	4.737.600,00	(470.900,00)	90,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.457.010,00	10.808.224,00	(3.648.786,00)	74,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.457.010,00	10.808.224,00	(3.648.786,00)	74,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.457.010,00	10.808.224,00	(3.648.786,00)	74,76	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	168.600.000,00	154.900.000,00	(13.700.000,00)	91,87	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	168.600.000,00	154.900.000,00	(13.700.000,00)	91,87	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.600.000,00	154.900.000,00	(13.700.000,00)	91,87	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.582.200,00	20.679.800,00	(1.902.400,00)	91,57	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	20.335.000,00	19.032.000,00	(1.303.000,00)	93,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.335.000,00	19.032.000,00	(1.303.000,00)	93,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.335.000,00	19.032.000,00	(1.303.000,00)	93,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.680.000,00	1.080.600,00	(599.400,00)	64,32	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.080.600,00	(599.400,00)	64,32	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.080.600,00	(599.400,00)	64,32	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	567.200,00	567.200,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	567.200,00	567.200,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.200,00	567.200,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	18.234.000,00	12.500.000,00	(5.734.000,00)	68,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.02.2.01		PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.234.000,00	12.500.000,00	(5.734.000,00)	68,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.02.2.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	18.234.000,00	12.500.000,00	(5.734.000,00)	68,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.234.000,00	12.500.000,00	(5.734.000,00)	68,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.234.000,00	12.500.000,00	(5.734.000,00)	68,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	10.828.000,00	10.828.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.828.000,00	10.828.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	10.828.000,00	10.828.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.828.000,00	10.828.000,00	-	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.828.000,00	10.828.000,00	-	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.215.666.967,00	2.114.547.858,00	(101.119.109,00)	95,43	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.215.666.967,00)	(2.114.547.858,00)	101.119.109,00	95,43	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.215.666.967,00)	(2.114.547.858,00)	101.119.109,00	95,43	



PEMERINTAH KAB. MAJENE

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Organisasi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.22.3.26.0.00.19.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,27	Peraturan Daerah No.1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
	2.22.3.26.0.00.19.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,27	
	2.22.3.26.0.00.19.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,27	
				JUMLAH PENDAPATAN	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,27	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000		5	BELANJA DAERAH	6.653.077.312,00	6.427.331.494,00	(225.745.818,00)	96,60	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.770.958.321,00	3.549.695.470,00	(221.262.851,00)	94,13	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.522.000,00	7.521.500,00	(500,00)	99,99	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.727.500,00	3.727.000,00	(500,00)	99,98	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.727.500,00	3.727.000,00	(500,00)	99,98	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.727.500,00	3.727.000,00	(500,00)	99,98	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.186.500,00	1.186.500,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.186.500,00	1.186.500,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.186.500,00	1.186.500,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.304.066.763,00	3.156.338.038,00	(147.728.725,00)	95,52	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.300.578.763,00	3.152.850.038,00	(147.728.725,00)	95,52	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.300.578.763,00	3.152.850.038,00	(147.728.725,00)	95,52	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.300.578.763,00	3.152.850.038,00	(147.728.725,00)	95,52	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	3.488.000,00	3.488.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.488.000,00	3.488.000,00	0,00	100,00	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.488.000,00	3.488.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	24.720.000,00	21.269.999,00	(3.450.001,00)	86,04	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	19.690.000,00	16.239.999,00	(3.450.001,00)	82,47	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.690.000,00	16.239.999,00	(3.450.001,00)	82,47	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.690.000,00	16.239.999,00	(3.450.001,00)	82,47	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	409.939.558,00	340.359.933,00	(69.579.625,00)	83,02	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.960.000,00	5.958.500,00	(1.500,00)	99,97	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.960.000,00	5.958.500,00	(1.500,00)	99,97	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.960.000,00	5.958.500,00	(1.500,00)	99,97	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	55.679.558,00	30.701.433,00	(24.978.125,00)	55,13	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.679.558,00	30.701.433,00	(24.978.125,00)	55,13	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.679.558,00	30.701.433,00	(24.978.125,00)	55,13	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	348.300.000,00	303.700.000,00	(44.600.000,00)	87,19	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	348.300.000,00	303.700.000,00	(44.600.000,00)	87,19	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.300.000,00	303.700.000,00	(44.600.000,00)	87,19	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.710.000,00	24.206.000,00	(504.000,00)	97,96	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	24.710.000,00	24.206.000,00	(504.000,00)	97,96	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.710.000,00	24.206.000,00	(504.000,00)	97,96	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.710.000,00	24.206.000,00	(504.000,00)	97,96	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.366.825.626,00	1.365.263.286,00	(1.562.340,00)	99,88	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.228.619.800,00	1.227.057.460,00	(1.562.340,00)	99,87	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.01.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN	1.098.669.800,00	1.097.107.460,00	(1.562.340,00)	99,85	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	476.127.800,00	476.127.800,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	476.127.800,00	476.127.800,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	622.542.000,00	620.979.660,00	(1.562.340,00)	99,74	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	622.542.000,00	620.979.660,00	(1.562.340,00)	99,74	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.01.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	129.950.000,00	129.950.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	129.950.000,00	129.950.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.950.000,00	129.950.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.02		PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	129.355.826,00	129.355.826,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.02.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL	129.355.826,00	129.355.826,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	129.355.826,00	129.355.826,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.355.826,00	129.355.826,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.03		PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.03.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN LEMBAGA ADAT	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.03.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.03.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	766.893.765,00	765.914.621,00	(979.144,00)	99,87	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01		PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	766.893.765,00	765.914.621,00	(979.144,00)	99,87	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01.0001		PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL	450.008.600,00	449.491.728,00	(516.872,00)	99,88	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	450.008.600,00	449.491.728,00	(516.872,00)	99,88	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.008.600,00	449.491.728,00	(516.872,00)	99,88	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01.0002		STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN	111.107.565,00	111.107.565,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.107.565,00	111.107.565,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.107.565,00	111.107.565,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	205.777.600,00	205.315.328,00	(462.272,00)	99,77	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	205.777.600,00	205.315.328,00	(462.272,00)	99,77	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	205.777.600,00	205.315.328,00	(462.272,00)	99,77	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	247.379.600,00	246.837.117,00	(542.483,00)	99,78	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.2.01		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	17.415.700,00	17.415.700,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.2.01.0002		PENETAPAN CAGAR BUDAYA	17.415.700,00	17.415.700,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.415.700,00	17.415.700,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.415.700,00	17.415.700,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.2.02		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	229.963.900,00	229.421.417,00	(542.483,00)	99,76	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.2.02.0001		PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	229.963.900,00	229.421.417,00	(542.483,00)	99,76	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	229.963.900,00	229.421.417,00	(542.483,00)	99,76	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	229.963.900,00	229.421.417,00	(542.483,00)	99,76	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	501.020.000,00	499.621.000,00	(1.399.000,00)	99,72	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.06.2.01		PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	501.020.000,00	499.621.000,00	(1.399.000,00)	99,72	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.06.2.01.0004		PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	501.020.000,00	499.621.000,00	(1.399.000,00)	99,72	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	492.085.000,00	490.686.000,00	(1.399.000,00)	99,71	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.085.000,00	490.686.000,00	(1.399.000,00)	99,71	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.06.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	8.935.000,00	8.935.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.06.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.935.000,00	8.935.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	6.653.077.312,00	6.427.331.494,00	(225.745.818,00)	96,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.153.077.312,00)	(6.125.941.594,00)	27.135.718,00	99,55	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.153.077.312,00)	(6.125.941.594,00)	27.135.718,00	99,55	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.22.3.26.0.00.19.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,27	
	2.22.3.26.0.00.19.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,27	
	2.22.3.26.0.00.19.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,27	
				JUMLAH PENDAPATAN	500.000.000,00	301.389.900,00	(198.610.100,00)	60,27	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000		5	BELANJA DAERAH	195.769.000,00	195.769.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	12.619.000,00	12.619.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.02.2.01		PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	12.619.000,00	12.619.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	5.089.000,00	5.089.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.089.000,00	5.089.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.089.000,00	5.089.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.02.2.01.0008		PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/KOTA	7.530.000,00	7.530.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.530.000,00	7.530.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.530.000,00	7.530.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.03.2.01.0005		MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	179.750.000,00	179.750.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.05.2.02		PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	179.750.000,00	179.750.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.05.2.02.0001		PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF	179.750.000,00	179.750.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	179.750.000,00	179.750.000,00	-	100,00	
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.750.000,00	179.750.000,00	-	100,00	
				JUMLAH BELANJA	195.769.000,00	195.769.000,00	-	100,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	304.231.000,00	105.620.900,00	(198.610.100,00)	34,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	304.231.000,00	105.620.900,00	(198.610.100,00)	34,71	

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000		5	BELANJA DAERAH	2.990.457.406,00	2.884.235.453,00	(106.221.953,00)	96,44	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.366.994.846,00	2.265.689.653,00	(101.305.193,00)	95,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.835.000,00	8.822.000,00	(13.000,00)	99,85	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.826.500,00	4.826.500,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.826.500,00	4.826.500,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.826.500,00	4.826.500,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	494.500,00	494.500,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	494.500,00	494.500,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.500,00	494.500,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	256.500,00	254.000,00	(2.500,00)	99,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	256.500,00	254.000,00	(2.500,00)	99,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.500,00	254.000,00	(2.500,00)	99,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.198.500,00	1.198.500,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.198.500,00	1.198.500,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.198.500,00	1.198.500,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.412.500,00	1.402.500,00	(10.000,00)	99,29	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.412.500,00	1.402.500,00	(10.000,00)	99,29	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.412.500,00	1.402.500,00	(10.000,00)	99,29	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	646.500,00	646.000,00	(500,00)	99,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	646.500,00	646.000,00	(500,00)	99,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.500,00	646.000,00	(500,00)	99,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.234.631.734,00	2.164.647.255,00	(69.984.479,00)	96,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.118.691.734,00	2.052.173.255,00	(66.518.479,00)	96,86	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.118.691.734,00	2.052.173.255,00	(66.518.479,00)	96,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.118.691.734,00	2.052.173.255,00	(66.518.479,00)	96,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	109.200.000,00	105.750.000,00	(3.450.000,00)	96,84	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	109.200.000,00	105.750.000,00	(3.450.000,00)	96,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.200.000,00	105.750.000,00	(3.450.000,00)	96,84	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	1.265.500,00	1.263.000,00	(2.500,00)	99,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.265.500,00	1.263.000,00	(2.500,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.265.500,00	1.263.000,00	(2.500,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	1.536.500,00	1.530.000,00	(6.500,00)	99,57	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.536.500,00	1.530.000,00	(6.500,00)	99,57	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.536.500,00	1.530.000,00	(6.500,00)	99,57	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.538.000,00	2.531.000,00	(7.000,00)	99,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.538.000,00	2.531.000,00	(7.000,00)	99,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.538.000,00	2.531.000,00	(7.000,00)	99,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.801.500,00	1.799.900,00	(1.600,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1.801.500,00	1.799.900,00	(1.600,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.801.500,00	1.799.900,00	(1.600,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.801.500,00	1.799.900,00	(1.600,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	23.210.250,00	21.510.700,00	(1.699.550,00)	92,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.000.250,00	999.400,00	(850,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.250,00	999.400,00	(850,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.250,00	999.400,00	(850,00)	99,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	19.710.000,00	18.011.300,00	(1.698.700,00)	91,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	19.710.000,00	18.011.300,00	(1.698.700,00)	91,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.710.000,00	18.011.300,00	(1.698.700,00)	91,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	80.360.552,00	63.098.798,00	(17.261.754,00)	78,51	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.061.000,00	1.050.000,00	(11.000,00)	98,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.061.000,00	1.050.000,00	(11.000,00)	98,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.000,00	1.050.000,00	(11.000,00)	98,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	54.999.552,00	38.348.798,00	(16.650.754,00)	69,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.999.552,00	38.348.798,00	(16.650.754,00)	69,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.999.552,00	38.348.798,00	(16.650.754,00)	69,72	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	24.300.000,00	23.700.000,00	(600.000,00)	97,53	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.300.000,00	23.700.000,00	(600.000,00)	97,53	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	23.700.000,00	(600.000,00)	97,53	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.155.810,00	5.811.000,00	(12.344.810,00)	32,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	6.331.650,00	3.811.000,00	(2.520.650,00)	60,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.331.650,00	3.811.000,00	(2.520.650,00)	60,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.331.650,00	3.811.000,00	(2.520.650,00)	60,18	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	11.824.160,00	2.000.000,00	(9.824.160,00)	16,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.824.160,00	2.000.000,00	(9.824.160,00)	16,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.824.160,00	2.000.000,00	(9.824.160,00)	16,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	623.462.560,00	618.545.800,00	(4.916.760,00)	99,21	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.218.500,00	84.302.500,00	(4.916.000,00)	94,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0004		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	3.993.000,00	3.993.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.993.000,00	3.993.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.993.000,00	3.993.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0011		PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.210.000,00	36.394.000,00	(816.000,00)	97,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	37.210.000,00	36.394.000,00	(816.000,00)	97,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.210.000,00	36.394.000,00	(816.000,00)	97,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0017		PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN	10.075.000,00	9.475.000,00	(600.000,00)	94,04	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	10.075.000,00	9.475.000,00	(600.000,00)	94,04	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.075.000,00	9.475.000,00	(600.000,00)	94,04	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0018		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN	8.650.500,00	8.050.500,00	(600.000,00)	93,06	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	8.650.500,00	8.050.500,00	(600.000,00)	93,06	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.650.500,00	8.050.500,00	(600.000,00)	93,06	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0020		PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	29.290.000,00	26.390.000,00	(2.900.000,00)	90,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	29.290.000,00	26.390.000,00	(2.900.000,00)	90,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.290.000,00	26.390.000,00	(2.900.000,00)	90,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	534.244.060,00	534.243.300,00	(760,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0008		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.576.760,00	32.576.000,00	(760,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	29.826.760,00	29.826.000,00	(760,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.826.760,00	29.826.000,00	(760,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0009		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	266.090.000,00	266.090.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	266.090.000,00	266.090.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.090.000,00	266.090.000,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0010		SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT	235.577.300,00	235.577.300,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	235.577.300,00	235.577.300,00	-	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.577.300,00	235.577.300,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	2.990.457.406,00	2.884.235.453,00	(106.221.953,00)	96,44	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.990.457.406,00)	(2.884.235.453,00)	106.221.953,00	96,44	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.990.457.406,00)	(2.884.235.453,00)	106.221.953,00	96,44	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.20.0000		5	BELANJA DAERAH	3.417.500,00	3.400.000,00	(17.500,00)	99,48	
2.24	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	3.417.500,00	3.400.000,00	(17.500,00)	99,48	
2.24	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.24.02.2.03		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	3.417.500,00	3.400.000,00	(17.500,00)	99,48	
2.24	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.24.02.2.03.0002		PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.417.500,00	3.400.000,00	(17.500,00)	99,48	
2.24	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.417.500,00	3.400.000,00	(17.500,00)	99,48	
2.24	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.417.500,00	3.400.000,00	(17.500,00)	99,48	
				JUMLAH BELANJA	3.417.500,00	3.400.000,00	(17.500,00)	99,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.417.500,00)	(3.400.000,00)	17.500,00	99,48	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.417.500,00)	(3.400.000,00)	17.500,00	99,48	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Kelautan Dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.0.00.0.00.21.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	10,00	
	3.25.0.00.0.00.21.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	10,00	
	3.25.0.00.0.00.21.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	10,00	
JUMLAH PENDAPATAN					100.000.000,00	10.000.000,00	(90.000.000,00)	10,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000		5	BELANJA DAERAH	6.299.035.801,00	6.099.901.993,00	(199.133.808,00)	96,83	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.545.684.986,00	2.391.543.054,00	(154.141.932,00)	93,94	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.983.000,00	1.664.500,00	(318.500,00)	83,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	915.000,00	915.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	915.000,00	915.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.000,00	915.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	339.500,00	339.500,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	339.500,00	339.500,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.500,00	339.500,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	410.000,00	410.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	410.000,00	410.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.000,00	410.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	318.500,00	-	(318.500,00)	-	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	318.500,00	-	(318.500,00)	-	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.500,00	-	(318.500,00)	-	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.406.497.371,00	2.272.964.619,00	(133.532.752,00)	94,45	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.272.024.871,00	2.148.992.619,00	(123.032.252,00)	94,58	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.272.024.871,00	2.148.992.619,00	(123.032.252,00)	94,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.272.024.871,00	2.148.992.619,00	(123.032.252,00)	94,58	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	132.900.000,00	122.400.000,00	(10.500.000,00)	92,09	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.900.000,00	122.400.000,00	(10.500.000,00)	92,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.900.000,00	122.400.000,00	(10.500.000,00)	92,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.572.500,00	1.572.000,00	(500,00)	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.572.500,00	1.572.000,00	(500,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.572.500,00	1.572.000,00	(500,00)	99,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	517.000,00	517.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	517.000,00	517.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	517.000,00	517.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.000,00	517.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.473.500,00	860.000,00	(613.500,00)	58,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	1.473.500,00	860.000,00	(613.500,00)	58,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.473.500,00	860.000,00	(613.500,00)	58,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.473.500,00	860.000,00	(613.500,00)	58,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	29.662.900,00	26.207.485,00	(3.455.415,00)	88,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.123.400,00	150.000,00	(973.400,00)	13,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.123.400,00	150.000,00	(973.400,00)	13,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.123.400,00	150.000,00	(973.400,00)	13,35	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.172.500,00	635.000,00	(537.500,00)	54,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.172.500,00	635.000,00	(537.500,00)	54,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.172.500,00	635.000,00	(537.500,00)	54,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	700.000,00	-	(700.000,00)	-	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	-	(700.000,00)	-	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	-	(700.000,00)	-	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.490.000,00	1.250.000,00	(1.240.000,00)	50,20	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.490.000,00	1.250.000,00	(1.240.000,00)	50,20	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	1.250.000,00	(1.240.000,00)	50,20	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	24.177.000,00	24.172.485,00	(4.515,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.177.000,00	24.172.485,00	(4.515,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.177.000,00	24.172.485,00	(4.515,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	74.231.815,00	65.791.790,00	(8.440.025,00)	88,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.471.815,00	24.608.290,00	(3.863.525,00)	86,43	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.471.815,00	24.608.290,00	(3.863.525,00)	86,43	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.471.815,00	24.608.290,00	(3.863.525,00)	86,43	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.960.000,00	1.033.500,00	(926.500,00)	52,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.960.000,00	1.033.500,00	(926.500,00)	52,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	1.033.500,00	(926.500,00)	52,72	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	43.800.000,00	40.150.000,00	(3.650.000,00)	91,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	43.800.000,00	40.150.000,00	(3.650.000,00)	91,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	40.150.000,00	(3.650.000,00)	91,66	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.319.400,00	23.537.660,00	(7.781.740,00)	75,15	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	27.815.400,00	23.239.660,00	(4.575.740,00)	83,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.815.400,00	23.239.660,00	(4.575.740,00)	83,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.815.400,00	23.239.660,00	(4.575.740,00)	83,54	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEBEL	2.320.000,00	298.000,00	(2.022.000,00)	12,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.320.000,00	298.000,00	(2.022.000,00)	12,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	298.000,00	(2.022.000,00)	12,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.184.000,00	-	(1.184.000,00)	-	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.184.000,00	-	(1.184.000,00)	-	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.184.000,00	-	(1.184.000,00)	-	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.753.350.815,00	3.708.358.939,00	(44.991.876,00)	98,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.03.2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.753.350.815,00	3.708.358.939,00	(44.991.876,00)	98,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.03.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	3.753.350.815,00	3.708.358.939,00	(44.991.876,00)	98,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.729.915.815,00	3.684.923.939,00	(44.991.876,00)	98,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.729.915.815,00	3.684.923.939,00	(44.991.876,00)	98,79	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.03.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	23.435.000,00	23.435.000,00	-	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.03.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.435.000,00	23.435.000,00	-	100,00	
				JUMLAH BELANJA	6.299.035.801,00	6.099.901.993,00	(199.133.808,00)	96,83	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.199.035.801,00)	(6.089.901.993,00)	109.133.808,00	98,23	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.199.035.801,00)	(6.089.901.993,00)	109.133.808,00	98,23	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

KODE REKENING					JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000		5	BELANJA DAERAH	13.991.773.388,00	13.349.639.156,00	(642.134.232,00)	95,41	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.887.337.760,00	10.632.519.618,00	(254.818.142,00)	97,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.163.126,00	13.624.000,00	(2.539.126,00)	84,29	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.499.500,00	2.498.000,00	(1.500,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.499.500,00	2.498.000,00	(1.500,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.499.500,00	2.498.000,00	(1.500,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	912.500,00	911.500,00	(1.000,00)	99,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	912.500,00	911.500,00	(1.000,00)	99,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	912.500,00	911.500,00	(1.000,00)	99,89	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.072.000,00	-	(1.072.000,00)	-	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.072.000,00	-	(1.072.000,00)	-	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.072.000,00	-	(1.072.000,00)	-	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	940.000,00	939.500,00	(500,00)	99,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	940.000,00	939.500,00	(500,00)	99,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	939.500,00	(500,00)	99,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	10.739.126,00	9.275.000,00	(1.464.126,00)	86,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.739.126,00	9.275.000,00	(1.464.126,00)	86,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.739.126,00	9.275.000,00	(1.464.126,00)	86,36	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.349.369.086,00	10.147.712.291,00	(201.656.795,00)	98,05	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.290.212.586,00	10.094.112.791,00	(196.099.795,00)	98,09	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.290.212.586,00	10.094.112.791,00	(196.099.795,00)	98,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.290.212.586,00	10.094.112.791,00	(196.099.795,00)	98,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	46.498.500,00	42.350.000,00	(4.148.500,00)	91,07	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.498.500,00	42.350.000,00	(4.148.500,00)	91,07	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.498.500,00	42.350.000,00	(4.148.500,00)	91,07	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	6.908.000,00	6.156.500,00	(751.500,00)	89,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.908.000,00	6.156.500,00	(751.500,00)	89,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.908.000,00	6.156.500,00	(751.500,00)	89,12	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.870.500,00	1.213.500,00	(657.000,00)	64,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.870.500,00	1.213.500,00	(657.000,00)	64,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.870.500,00	1.213.500,00	(657.000,00)	64,87	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	3.879.500,00	3.879.500,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.879.500,00	3.879.500,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.879.500,00	3.879.500,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	120.390.220,00	109.806.570,00	(10.583.650,00)	91,20	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.250.000,00	750.000,00	(1.500.000,00)	33,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	750.000,00	(1.500.000,00)	33,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	750.000,00	(1.500.000,00)	33,33	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	114.060.220,00	104.976.570,00	(9.083.650,00)	92,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	114.060.220,00	104.976.570,00	(9.083.650,00)	92,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.060.220,00	104.976.570,00	(9.083.650,00)	92,03	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.140.624,00	-	(4.140.624,00)	-	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	4.140.624,00	-	(4.140.624,00)	-	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	4.140.624,00	-	(4.140.624,00)	-	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.140.624,00	-	(4.140.624,00)	-	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	338.891.624,00	318.001.157,00	(20.890.467,00)	93,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.785.800,00	380.000,00	(5.405.800,00)	6,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.785.800,00	380.000,00	(5.405.800,00)	6,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.785.800,00	380.000,00	(5.405.800,00)	6,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	69.720.824,00	69.675.407,00	(45.417,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	69.720.824,00	69.675.407,00	(45.417,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.720.824,00	69.675.407,00	(45.417,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.830.000,00	6.830.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.830.000,00	6.830.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.830.000,00	6.830.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	256.555.000,00	241.115.750,00	(15.439.250,00)	93,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	256.555.000,00	241.115.750,00	(15.439.250,00)	93,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.555.000,00	241.115.750,00	(15.439.250,00)	93,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	50.983.080,00	35.975.600,00	(15.007.480,00)	70,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	42.282.680,00	27.275.200,00	(15.007.480,00)	64,50	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.282.680,00	27.275.200,00	(15.007.480,00)	64,50	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.282.680,00	27.275.200,00	(15.007.480,00)	64,50	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	8.700.400,00	8.700.400,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.700.400,00	8.700.400,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.400,00	8.700.400,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	616.261.000,00	604.444.600,00	(11.816.400,00)	98,08	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	347.873.000,00	346.795.600,00	(1.077.400,00)	99,69	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.01.0001		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	5.720.000,00	5.720.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.720.000,00	5.720.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	5.720.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	342.153.000,00	341.075.600,00	(1.077.400,00)	99,68	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	342.153.000,00	341.075.600,00	(1.077.400,00)	99,68	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.153.000,00	341.075.600,00	(1.077.400,00)	99,68	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.02		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	4.645.000,00	4.645.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.02.0002		PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	4.645.000,00	4.645.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.645.000,00	4.645.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.645.000,00	4.645.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.05		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	159.905.000,00	149.666.000,00	(10.239.000,00)	93,59	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.05.0006		PENGAWASAN PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN HPT, BAHAN PAKAN/PAKAN	7.384.000,00	1.950.000,00	(5.434.000,00)	26,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.384.000,00	1.950.000,00	(5.434.000,00)	26,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.384.000,00	1.950.000,00	(5.434.000,00)	26,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.05.0007		PENGAWASAN PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TERNAK	152.521.000,00	147.716.000,00	(4.805.000,00)	96,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	152.521.000,00	147.716.000,00	(4.805.000,00)	96,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.521.000,00	147.716.000,00	(4.805.000,00)	96,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	103.838.000,00	103.338.000,00	(500.000,00)	99,51	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	103.838.000,00	103.338.000,00	(500.000,00)	99,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	103.838.000,00	103.338.000,00	(500.000,00)	99,51	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.838.000,00	103.338.000,00	(500.000,00)	99,51	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	700.890.900,00	606.289.200,00	(94.601.700,00)	86,50	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.01		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7.586.000,00	7.586.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	2.550.000,00	2.550.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.550.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.01.0016		PENYUSUNAN PETA KAWASAN, LAHAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN/KOTA	5.036.000,00	5.036.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	5.036.000,00	5.036.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.036.000,00	5.036.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	693.304.900,00	598.703.200,00	(94.601.700,00)	86,35	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.0003		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	577.921.300,00	484.919.600,00	(93.001.700,00)	83,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	577.921.300,00	484.919.600,00	(93.001.700,00)	83,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	577.921.300,00	484.919.600,00	(93.001.700,00)	83,90	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI	115.383.600,00	113.783.600,00	(1.600.000,00)	98,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	115.383.600,00	113.783.600,00	(1.600.000,00)	98,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.383.600,00	113.783.600,00	(1.600.000,00)	98,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	19.433.000,00	19.433.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.2.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.229.000,00	15.229.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.2.01.0005		PELAKSANAAN SURVEILANS PENYAKIT HEWAN DAN ZONOSIS PADA HEWAN	15.229.000,00	15.229.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.229.000,00	15.229.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.229.000,00	15.229.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.2.04		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	4.204.000,00	4.204.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.2.04.0005		PEMBINAAN PENERAPAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI PADA UNIT USAHA PRODUK HEWAN	4.204.000,00	4.204.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.204.000,00	4.204.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.204.000,00	4.204.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.092.813.658,00	848.223.238,00	(244.590.420,00)	77,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	1.092.813.658,00	848.223.238,00	(244.590.420,00)	77,61	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	11.018.750,00	11.018.750,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.018.750,00	11.018.750,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.018.750,00	11.018.750,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0002		PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (DPI) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	918.149.908,00	673.923.988,00	(244.225.920,00)	73,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	918.149.908,00	673.923.988,00	(244.225.920,00)	73,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	918.149.908,00	673.923.988,00	(244.225.920,00)	73,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0003		PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN, DAN GANGGUAN USAHA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	1.840.000,00	1.840.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.840.000,00	1.840.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.840.000,00	1.840.000,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0006		PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	161.805.000,00	161.440.500,00	(364.500,00)	99,77	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	161.805.000,00	161.440.500,00	(364.500,00)	99,77	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.805.000,00	161.440.500,00	(364.500,00)	99,77	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	675.037.070,00	638.729.500,00	(36.307.570,00)	94,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	675.037.070,00	638.729.500,00	(36.307.570,00)	94,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	566.671.000,00	541.053.000,00	(25.618.000,00)	95,47	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	566.671.000,00	541.053.000,00	(25.618.000,00)	95,47	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	566.671.000,00	541.053.000,00	(25.618.000,00)	95,47	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.0002		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	24.957.570,00	14.268.000,00	(10.689.570,00)	57,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.957.570,00	14.268.000,00	(10.689.570,00)	57,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.957.570,00	14.268.000,00	(10.689.570,00)	57,16	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.0005		PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	83.408.500,00	83.408.500,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	83.408.500,00	83.408.500,00	-	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.408.500,00	83.408.500,00	-	100,00	
				JUMLAH BELANJA	13.991.773.388,00	13.349.639.156,00	(642.134.232,00)	95,41	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(13.991.773.388,00)	(13.349.639.156,00)	642.134.232,00	95,41	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.991.773.388,00)	(13.349.639.156,00)	642.134.232,00	95,41	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.0.00.0.00.23.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	172.100.000,00	183.900.000,00	11.800.000,00	106,85	Peraturan Daerah No.1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
	4.01.0.00.0.00.23.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172.100.000,00	183.900.000,00	11.800.000,00	106,85	
	4.01.0.00.0.00.23.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	172.100.000,00	183.900.000,00	11.800.000,00	106,85	
				JUMLAH PENDAPATAN	172.100.000,00	183.900.000,00	11.800.000,00	106,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000		5	BELANJA DAERAH	24.578.162.699,00	23.050.668.762,00	(1.527.493.937,00)	93,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.149.071.399,00	18.807.191.533,00	(1.341.879.866,00)	93,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	44.846.250,00	44.154.800,00	(691.450,00)	98,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.451.500,00	11.058.000,00	(393.500,00)	96,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.451.500,00	11.058.000,00	(393.500,00)	96,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.451.500,00	11.058.000,00	(393.500,00)	96,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.043.000,00	3.987.000,00	(56.000,00)	98,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.043.000,00	3.987.000,00	(56.000,00)	98,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.043.000,00	3.987.000,00	(56.000,00)	98,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.343.000,00	4.335.000,00	(8.000,00)	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.343.000,00	4.335.000,00	(8.000,00)	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.343.000,00	4.335.000,00	(8.000,00)	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	15.000.000,00	14.997.000,00	(3.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.997.000,00	(3.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.997.000,00	(3.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.999.750,00	3.993.000,00	(6.750,00)	99,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.999.750,00	3.993.000,00	(6.750,00)	99,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.999.750,00	3.993.000,00	(6.750,00)	99,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.006.500,00	2.889.600,00	(116.900,00)	96,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.006.500,00	2.889.600,00	(116.900,00)	96,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.006.500,00	2.889.600,00	(116.900,00)	96,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.002.500,00	2.895.200,00	(107.300,00)	96,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.002.500,00	2.895.200,00	(107.300,00)	96,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.002.500,00	2.895.200,00	(107.300,00)	96,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.000.496.388,00	8.831.257.177,00	(169.239.211,00)	98,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	8.958.456.888,00	8.794.999.277,00	(163.457.611,00)	98,17	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.958.456.888,00	8.794.999.277,00	(163.457.611,00)	98,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.710.596.888,00	8.547.259.277,00	(163.337.611,00)	98,12	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.860.000,00	247.740.000,00	(120.000,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	12.180.500,00	8.637.000,00	(3.543.500,00)	70,90	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.180.500,00	8.637.000,00	(3.543.500,00)	70,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.180.500,00	8.637.000,00	(3.543.500,00)	70,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	10.220.500,00	9.273.000,00	(947.500,00)	90,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.220.500,00	9.273.000,00	(947.500,00)	90,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.220.500,00	9.273.000,00	(947.500,00)	90,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.407.000,00	4.374.700,00	(32.300,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.407.000,00	4.374.700,00	(32.300,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.407.000,00	4.374.700,00	(32.300,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0006		PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	4.647.500,00	3.461.500,00	(1.186.000,00)	74,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.647.500,00	3.461.500,00	(1.186.000,00)	74,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.647.500,00	3.461.500,00	(1.186.000,00)	74,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	10.584.000,00	10.511.700,00	(72.300,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.584.000,00	10.511.700,00	(72.300,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.584.000,00	10.511.700,00	(72.300,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	90.963.000,00	86.245.000,00	(4.718.000,00)	94,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	90.963.000,00	86.245.000,00	(4.718.000,00)	94,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	90.963.000,00	86.245.000,00	(4.718.000,00)	94,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.963.000,00	86.245.000,00	(4.718.000,00)	94,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	803.663.963,00	766.872.749,00	(36.791.214,00)	95,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	45.261.000,00	37.882.000,00	(7.379.000,00)	83,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.261.000,00	37.882.000,00	(7.379.000,00)	83,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.261.000,00	37.882.000,00	(7.379.000,00)	83,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	125.050.000,00	114.138.000,00	(10.912.000,00)	91,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	125.050.000,00	114.138.000,00	(10.912.000,00)	91,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.050.000,00	114.138.000,00	(10.912.000,00)	91,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.097.000,00	29.040.000,00	(1.057.000,00)	96,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.097.000,00	29.040.000,00	(1.057.000,00)	96,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.097.000,00	29.040.000,00	(1.057.000,00)	96,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	55.023.332,00	55.023.332,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	55.023.332,00	55.023.332,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.023.332,00	55.023.332,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	206.214.000,00	198.376.500,00	(7.837.500,00)	96,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	206.214.000,00	198.376.500,00	(7.837.500,00)	96,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.214.000,00	198.376.500,00	(7.837.500,00)	96,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	342.018.631,00	332.412.917,00	(9.605.714,00)	97,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	342.018.631,00	332.412.917,00	(9.605.714,00)	97,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.018.631,00	332.412.917,00	(9.605.714,00)	97,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	539.256.200,00	479.520.000,00	(59.736.200,00)	88,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	494.438.000,00	479.520.000,00	(14.918.000,00)	96,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	494.438.000,00	479.520.000,00	(14.918.000,00)	96,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.438.000,00	479.520.000,00	(14.918.000,00)	96,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	44.818.200,00	-	(44.818.200,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	44.818.200,00	-	(44.818.200,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.818.200,00	-	(44.818.200,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.311.538.979,00	1.951.933.422,00	(359.605.557,00)	84,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	15.030.000,00	12.025.000,00	(3.005.000,00)	80,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.030.000,00	12.025.000,00	(3.005.000,00)	80,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.030.000,00	12.025.000,00	(3.005.000,00)	80,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	809.917.395,00	664.708.422,00	(145.208.973,00)	82,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	809.917.395,00	664.708.422,00	(145.208.973,00)	82,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.917.395,00	664.708.422,00	(145.208.973,00)	82,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.486.591.584,00	1.275.200.000,00	(211.391.584,00)	85,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.486.591.584,00	1.275.200.000,00	(211.391.584,00)	85,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.486.591.584,00	1.275.200.000,00	(211.391.584,00)	85,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.675.832.890,00	1.282.408.290,00	(393.424.600,00)	76,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	596.503.200,00	522.828.290,00	(73.674.910,00)	87,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	596.503.200,00	522.828.290,00	(73.674.910,00)	87,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.503.200,00	522.828.290,00	(73.674.910,00)	87,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	766.735.690,00	509.850.000,00	(256.885.690,00)	66,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	766.735.690,00	509.850.000,00	(256.885.690,00)	66,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.735.690,00	509.850.000,00	(256.885.690,00)	66,49	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.950.000,00	17.800.000,00	(150.000,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.950.000,00	17.800.000,00	(150.000,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.950.000,00	17.800.000,00	(150.000,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	294.644.000,00	231.930.000,00	(62.714.000,00)	78,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	289.744.000,00	231.930.000,00	(57.814.000,00)	80,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.744.000,00	231.930.000,00	(57.814.000,00)	80,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	4.900.000,00	-	(4.900.000,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.900.000,00	-	(4.900.000,00)	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	789.250.974,00	715.486.574,00	(73.764.400,00)	90,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	594.250.974,00	594.250.974,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	594.250.974,00	594.250.974,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	594.250.974,00	594.250.974,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	75.000.000,00	69.412.500,00	(5.587.500,00)	92,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	69.412.500,00	(5.587.500,00)	92,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	69.412.500,00	(5.587.500,00)	92,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	120.000.000,00	51.823.100,00	(68.176.900,00)	43,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	51.823.100,00	(68.176.900,00)	43,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	51.823.100,00	(68.176.900,00)	43,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12		FASILITAS KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	4.453.877.755,00	4.246.188.456,00	(207.689.299,00)	95,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	2.672.630.110,00	2.576.465.245,00	(96.164.865,00)	96,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.118.235.380,00	2.062.476.745,00	(55.758.635,00)	97,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.118.235.380,00	2.062.476.745,00	(55.758.635,00)	97,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	554.394.730,00	513.988.500,00	(40.406.230,00)	92,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	354.894.730,00	315.282.900,00	(39.611.830,00)	88,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.500.000,00	198.705.600,00	(794.400,00)	99,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	1.284.594.285,00	1.236.326.297,00	(48.267.988,00)	96,24	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.040.090.173,00	994.982.382,00	(45.107.791,00)	95,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.040.090.173,00	994.982.382,00	(45.107.791,00)	95,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2	BELANJA MODAL	244.504.112,00	241.343.915,00	(3.160.197,00)	98,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.164.112,00	121.602.400,00	(2.561.712,00)	97,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	120.340.000,00	119.741.515,00	(598.485,00)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	496.653.360,00	433.396.914,00	(63.256.446,00)	87,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	474.353.360,00	411.096.914,00	(63.256.446,00)	86,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.353.360,00	411.096.914,00	(63.256.446,00)	86,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0003	5.2	BELANJA MODAL	22.300.000,00	22.300.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.300.000,00	22.300.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	91.279.000,00	83.601.900,00	(7.677.100,00)	91,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	22.659.000,00	18.912.800,00	(3.746.200,00)	83,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.659.000,00	18.912.800,00	(3.746.200,00)	83,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.659.000,00	18.912.800,00	(3.746.200,00)	83,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.0002		FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	27.336.200,00	24.043.400,00	(3.292.800,00)	87,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.336.200,00	24.043.400,00	(3.292.800,00)	87,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.336.200,00	24.043.400,00	(3.292.800,00)	87,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	41.283.800,00	40.645.700,00	(638.100,00)	98,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	41.283.800,00	40.645.700,00	(638.100,00)	98,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.283.800,00	40.645.700,00	(638.100,00)	98,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	348.066.000,00	319.523.165,00	(28.542.835,00)	91,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.0001		FASILITAS KEPROTOKOLAN	147.972.000,00	144.343.165,00	(3.628.835,00)	97,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	147.972.000,00	144.343.165,00	(3.628.835,00)	97,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.972.000,00	144.343.165,00	(3.628.835,00)	97,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.0002		FASILITAS KOMUNIKASI PIMPINAN	16.109.000,00	12.350.000,00	(3.759.000,00)	76,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.109.000,00	12.350.000,00	(3.759.000,00)	76,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.109.000,00	12.350.000,00	(3.759.000,00)	76,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	183.985.000,00	162.830.000,00	(21.155.000,00)	88,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	183.985.000,00	162.830.000,00	(21.155.000,00)	88,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.985.000,00	162.830.000,00	(21.155.000,00)	88,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.859.102.600,00	3.793.691.429,00	(65.411.171,00)	98,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	195.747.000,00	186.503.500,00	(9.243.500,00)	95,27	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	169.593.000,00	167.405.100,00	(2.187.900,00)	98,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	169.593.000,00	167.405.100,00	(2.187.900,00)	98,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.593.000,00	167.405.100,00	(2.187.900,00)	98,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	3.490.000,00	-	(3.490.000,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.490.000,00	-	(3.490.000,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.490.000,00	-	(3.490.000,00)	-	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.0003		FASILITAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	22.664.000,00	19.098.400,00	(3.565.600,00)	84,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.664.000,00	19.098.400,00	(3.565.600,00)	84,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.664.000,00	19.098.400,00	(3.565.600,00)	84,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.335.923.000,00	3.306.122.829,00	(29.800.171,00)	99,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.02.0001		FASILITAS PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	3.335.923.000,00	3.306.122.829,00	(29.800.171,00)	99,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.335.923.000,00	3.306.122.829,00	(29.800.171,00)	99,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.075.923.000,00	3.046.122.829,00	(29.800.171,00)	99,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	260.000.000,00	260.000.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03		FASILITAS DAN KOORDINASI HUKUM	296.008.900,00	279.820.400,00	(16.188.500,00)	94,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.0001		FASILITAS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	168.438.000,00	159.776.700,00	(8.661.300,00)	94,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	168.438.000,00	159.776.700,00	(8.661.300,00)	94,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.438.000,00	159.776.700,00	(8.661.300,00)	94,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.0002		FASILITAS BANTUAN HUKUM	52.373.000,00	51.416.000,00	(957.000,00)	98,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.373.000,00	51.416.000,00	(957.000,00)	98,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.373.000,00	51.416.000,00	(957.000,00)	98,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	75.197.900,00	68.627.700,00	(6.570.200,00)	91,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	75.197.900,00	68.627.700,00	(6.570.200,00)	91,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.197.900,00	68.627.700,00	(6.570.200,00)	91,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04		FASILITAS KERJA SAMA DAERAH	31.423.700,00	21.244.700,00	(10.179.000,00)	67,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.0001		FASILITAS KERJA SAMA DALAM NEGERI	15.487.700,00	5.848.200,00	(9.639.500,00)	37,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.487.700,00	5.848.200,00	(9.639.500,00)	37,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.487.700,00	5.848.200,00	(9.639.500,00)	37,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.0002		FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.0003		EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	14.436.000,00	13.896.500,00	(539.500,00)	96,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.436.000,00	13.896.500,00	(539.500,00)	96,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.436.000,00	13.896.500,00	(539.500,00)	96,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	569.988.700,00	449.785.800,00	(120.202.900,00)	78,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	78.381.300,00	74.156.300,00	(4.225.000,00)	94,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	11.614.300,00	10.579.200,00	(1.035.100,00)	91,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.614.300,00	10.579.200,00	(1.035.100,00)	91,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.614.300,00	10.579.200,00	(1.035.100,00)	91,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	48.349.000,00	46.377.200,00	(1.971.800,00)	95,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.349.000,00	46.377.200,00	(1.971.800,00)	95,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.349.000,00	46.377.200,00	(1.971.800,00)	95,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	18.418.000,00	17.199.900,00	(1.218.100,00)	93,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.418.000,00	17.199.900,00	(1.218.100,00)	93,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.418.000,00	17.199.900,00	(1.218.100,00)	93,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	129.582.400,00	118.841.800,00	(10.740.600,00)	91,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	13.285.700,00	13.246.500,00	(39.200,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.285.700,00	13.246.500,00	(39.200,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.285.700,00	13.246.500,00	(39.200,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	66.208.000,00	55.507.800,00	(10.700.200,00)	83,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	66.208.000,00	55.507.800,00	(10.700.200,00)	83,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.208.000,00	55.507.800,00	(10.700.200,00)	83,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	50.088.700,00	50.087.500,00	(1.200,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.088.700,00	50.087.500,00	(1.200,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.088.700,00	50.087.500,00	(1.200,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	257.019.000,00	152.034.800,00	(104.984.200,00)	59,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	95.250.000,00	94.816.900,00	(433.100,00)	99,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.250.000,00	94.816.900,00	(433.100,00)	99,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.250.000,00	94.816.900,00	(433.100,00)	99,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	114.649.500,00	30.170.600,00	(84.478.900,00)	26,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	114.649.500,00	30.170.600,00	(84.478.900,00)	26,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.649.500,00	30.170.600,00	(84.478.900,00)	26,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	47.119.500,00	27.047.300,00	(20.072.200,00)	57,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.119.500,00	27.047.300,00	(20.072.200,00)	57,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.119.500,00	27.047.300,00	(20.072.200,00)	57,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	105.006.000,00	104.752.900,00	(253.100,00)	99,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	54.573.800,00	54.383.500,00	(190.300,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.573.800,00	54.383.500,00	(190.300,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.573.800,00	54.383.500,00	(190.300,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10.291.200,00	10.228.400,00	(62.800,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.291.200,00	10.228.400,00	(62.800,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.291.200,00	10.228.400,00	(62.800,00)	99,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	40.141.000,00	40.141.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.141.000,00	40.141.000,00	-	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.141.000,00	40.141.000,00	-	100,00	
				JUMLAH BELANJA	24.578.162.699,00	23.050.668.762,00	(1.527.493.937,00)	93,78	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(24.406.062.699,00)	(22.866.768.762,00)	1.539.293.937,00	93,69	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.406.062.699,00)	(22.866.768.762,00)	1.539.293.937,00	93,69	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000		5	BELANJA DAERAH	18.791.186.866,00	17.822.098.079,00	(969.088.787,00)	94,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.208.875.386,00	14.587.473.959,00	(621.401.427,00)	95,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.801.500,00	6.535.700,00	(265.800,00)	96,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.528.000,00	2.262.200,00	(265.800,00)	89,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.528.000,00	2.262.200,00	(265.800,00)	89,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.528.000,00	2.262.200,00	(265.800,00)	89,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.812.591.507,00	3.721.152.000,00	(91.439.507,00)	97,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.390.262.607,00	3.333.126.750,00	(57.135.857,00)	98,31	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji PNS
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.390.262.607,00	3.333.126.750,00	(57.135.857,00)	98,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.390.262.607,00	3.333.126.750,00	(57.135.857,00)	98,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	410.482.500,00	376.290.000,00	(34.192.500,00)	91,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	410.482.500,00	376.290.000,00	(34.192.500,00)	91,67	Peraturan Daerah Kab. Majene
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.482.500,00	376.290.000,00	(34.192.500,00)	91,67	No.5 tahun 2025 tentang
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	1.426.000,00	1.425.250,00	(750,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.426.000,00	1.425.250,00	(750,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.426.000,00	1.425.250,00	(750,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.719.900,00	1.710.000,00	(9.900,00)	99,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.719.900,00	1.710.000,00	(9.900,00)	99,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.719.900,00	1.710.000,00	(9.900,00)	99,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0006		PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	965.000,00	965.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	965.000,00	965.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	965.000,00	965.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	4.885.000,00	4.785.000,00	(100.000,00)	97,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.885.000,00	4.785.000,00	(100.000,00)	97,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.885.000,00	4.785.000,00	(100.000,00)	97,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.425.500,00	1.425.000,00	(500,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.425.500,00	1.425.000,00	(500,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.425.500,00	1.425.000,00	(500,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	3.072.500,00	1.072.500,00	(2.000.000,00)	34,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	3.072.500,00	1.072.500,00	(2.000.000,00)	34,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.072.500,00	1.072.500,00	(2.000.000,00)	34,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.072.500,00	1.072.500,00	(2.000.000,00)	34,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	106.882.500,00	102.032.500,00	(4.850.000,00)	95,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5.922.500,00	1.072.500,00	(4.850.000,00)	18,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.922.500,00	1.072.500,00	(4.850.000,00)	18,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.922.500,00	1.072.500,00	(4.850.000,00)	18,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	99.960.000,00	99.960.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.960.000,00	99.960.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.960.000,00	99.960.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	755.121.810,00	741.862.010,00	(13.259.800,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.947.500,00	0,00	(1.947.500,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.947.500,00	0,00	(1.947.500,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.947.500,00	0,00	(1.947.500,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	63.543.500,00	63.543.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.543.500,00	63.543.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.543.500,00	63.543.500,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	64.200.800,00	61.700.800,00	(2.500.000,00)	96,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	64.200.800,00	61.700.800,00	(2.500.000,00)	96,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.200.800,00	61.700.800,00	(2.500.000,00)	96,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	178.600.000,00	178.600.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	178.600.000,00	178.600.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.600.000,00	178.600.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	17.491.000,00	17.462.000,00	(29.000,00)	99,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	17.491.000,00	17.462.000,00	(29.000,00)	99,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.491.000,00	17.462.000,00	(29.000,00)	99,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	426.839.010,00	418.955.710,00	(7.883.300,00)	98,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	426.839.010,00	418.955.710,00	(7.883.300,00)	98,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.839.010,00	418.955.710,00	(7.883.300,00)	98,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	76.900.000,00	59.700.000,00	(17.200.000,00)	77,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	76.900.000,00	59.700.000,00	(17.200.000,00)	77,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	76.900.000,00	59.700.000,00	(17.200.000,00)	77,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.900.000,00	59.700.000,00	(17.200.000,00)	77,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	448.695.000,00	379.980.212,00	(68.714.788,00)	84,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	180.000.000,00	172.485.212,00	(7.514.788,00)	95,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	172.485.212,00	(7.514.788,00)	95,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	172.485.212,00	(7.514.788,00)	95,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0003	5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	228.035.000,00	166.835.000,00	(61.200.000,00)	73,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	228.035.000,00	166.835.000,00	(61.200.000,00)	73,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.035.000,00	166.835.000,00	(61.200.000,00)	73,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	151.288.000,00	140.706.896,00	(10.581.104,00)	93,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN	78.842.000,00	72.180.896,00	(6.661.104,00)	91,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.842.000,00	72.180.896,00	(6.661.104,00)	91,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.842.000,00	72.180.896,00	(6.661.104,00)	91,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.630.000,00	9.630.000,00	(2.000.000,00)	82,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.630.000,00	9.630.000,00	(2.000.000,00)	82,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.630.000,00	9.630.000,00	(2.000.000,00)	82,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN	60.816.000,00	58.896.000,00	(1.920.000,00)	96,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	60.816.000,00	58.896.000,00	(1.920.000,00)	96,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.816.000,00	58.896.000,00	(1.920.000,00)	96,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	7.801.959.569,00	7.424.849.141,00	(377.110.428,00)	95,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	7.572.959.569,00	7.321.109.141,00	(251.850.428,00)	96,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.572.959.569,00	7.321.109.141,00	(251.850.428,00)	96,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.572.959.569,00	7.321.109.141,00	(251.850.428,00)	96,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	104.000.000,00	103.740.000,00	(260.000,00)	99,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	104.000.000,00	103.740.000,00	(260.000,00)	99,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.000.000,00	103.740.000,00	(260.000,00)	99,75	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	2.045.563.000,00	2.009.583.000,00	(35.980.000,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0002		FASILITASI FRAKSI DPRD	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	84.017.000,00	63.712.000,00	(20.305.000,00)	75,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	84.017.000,00	63.712.000,00	(20.305.000,00)	75,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.017.000,00	63.712.000,00	(20.305.000,00)	75,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0004		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	1.919.046.000,00	1.905.871.000,00	(13.175.000,00)	99,31	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.792.646.000,00	1.779.921.000,00	(12.725.000,00)	99,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.792.646.000,00	1.779.921.000,00	(12.725.000,00)	99,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0004	5.2	BELANJA MODAL	126.400.000,00	125.950.000,00	(450.000,00)	99,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.400.000,00	125.950.000,00	(450.000,00)	99,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.2.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	3.582.311.480,00	3.234.624.120,00	(347.687.360,00)	90,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	181.750.080,00	139.975.080,00	(41.775.000,00)	77,01	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	36.564.080,00	36.555.080,00	(9.000,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.564.080,00	36.555.080,00	(9.000,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.564.080,00	36.555.080,00	(9.000,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	21.661.000,00	21.650.000,00	(11.000,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.661.000,00	21.650.000,00	(11.000,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.661.000,00	21.650.000,00	(11.000,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0003		PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.350.000,00	850.000,00	(2.500.000,00)	25,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.350.000,00	850.000,00	(2.500.000,00)	25,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	850.000,00	(2.500.000,00)	25,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0004		FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	115.150.000,00	78.415.000,00	(36.735.000,00)	68,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	115.150.000,00	78.415.000,00	(36.735.000,00)	68,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.150.000,00	78.415.000,00	(36.735.000,00)	68,09	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0005		PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD	5.025.000,00	2.505.000,00	(2.520.000,00)	49,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.025.000,00	2.505.000,00	(2.520.000,00)	49,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	2.505.000,00	(2.520.000,00)	49,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	11.457.500,00	8.555.000,00	(2.902.500,00)	74,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	2.764.000,00	2.764.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.764.000,00	2.764.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.764.000,00	2.764.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0002		PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	244.000,00	244.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	244.000,00	244.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.000,00	244.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0003		PEMBAHASAN APBD	2.852.500,00	2.520.000,00	(332.500,00)	88,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.852.500,00	2.520.000,00	(332.500,00)	88,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.852.500,00	2.520.000,00	(332.500,00)	88,34	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0004		PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	333.000,00	333.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	333.000,00	333.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.000,00	333.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0005		PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	2.520.000,00	2.450.000,00	(70.000,00)	97,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.520.000,00	2.450.000,00	(70.000,00)	97,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.450.000,00	(70.000,00)	97,22	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0006		PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	2.744.000,00	244.000,00	(2.500.000,00)	8,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.744.000,00	244.000,00	(2.500.000,00)	8,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.744.000,00	244.000,00	(2.500.000,00)	8,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	11.851.500,00	11.607.000,00	(244.500,00)	97,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.0001		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	4.027.500,00	4.022.000,00	(5.500,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.027.500,00	4.022.000,00	(5.500,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.027.500,00	4.022.000,00	(5.500,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.0003		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.765.500,00	3.705.000,00	(60.500,00)	98,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.765.500,00	3.705.000,00	(60.500,00)	98,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.765.500,00	3.705.000,00	(60.500,00)	98,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.0004		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	4.058.500,00	3.880.000,00	(178.500,00)	95,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.058.500,00	3.880.000,00	(178.500,00)	95,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.058.500,00	3.880.000,00	(178.500,00)	95,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	750.913.000,00	500.913.000,00	(250.000.000,00)	66,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05.0002		PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	913.000,00	913.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	913.000,00	913.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	913.000,00	913.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	750.000.000,00	500.000.000,00	(250.000.000,00)	66,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	500.000.000,00	(250.000.000,00)	66,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	500.000.000,00	(250.000.000,00)	66,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.07		PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	19.500.000,00	15.500.000,00	(4.000.000,00)	79,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.07.0001		FASILITASI, VERIFIKASI, DAN KOORDINASI PERSETUJUAN KERJA SAMA DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.07.0002		PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	9.500.000,00	5.500.000,00	(4.000.000,00)	57,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	5.500.000,00	(4.000.000,00)	57,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	5.500.000,00	(4.000.000,00)	57,89	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	2.381.839.400,00	2.333.074.040,00	(48.765.360,00)	97,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	2.096.526.400,00	2.068.850.097,00	(27.676.303,00)	98,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.096.526.400,00	2.068.850.097,00	(27.676.303,00)	98,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.096.526.400,00	2.068.850.097,00	(27.676.303,00)	98,67	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0003		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	3.297.000,00	3.225.000,00	(72.000,00)	97,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.297.000,00	3.225.000,00	(72.000,00)	97,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.297.000,00	3.225.000,00	(72.000,00)	97,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0004		FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	268.442.500,00	247.431.443,00	(21.011.057,00)	92,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	268.442.500,00	247.431.443,00	(21.011.057,00)	92,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.442.500,00	247.431.443,00	(21.011.057,00)	92,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0005		FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA KHUSUS	13.573.500,00	13.567.500,00	(6.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.573.500,00	13.567.500,00	(6.000,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.573.500,00	13.567.500,00	(6.000,00)	99,95	
				JUMLAH BELANJA	18.791.186.866,00	17.822.098.079,00	(969.088.787,00)	94,84	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(18.791.186.866,00)	(17.822.098.079,00)	969.088.787,00	94,84	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(18.791.186.866,00)	(17.822.098.079,00)	969.088.787,00	94,84	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000		5	BELANJA DAERAH	3.535.558.094,00	3.176.432.372,00	(359.125.722,00)	89,84	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.866.659.067,00	2.699.598.234,00	(167.060.833,00)	94,17	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.081.795,00	20.105.600,00	(7.976.195,00)	71,59	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.687.095,00	8.374.000,00	(7.313.095,00)	53,38	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.687.095,00	8.374.000,00	(7.313.095,00)	53,38	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.687.095,00	8.374.000,00	(7.313.095,00)	53,38	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	640.000,00	-	(640.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	640.000,00	-	(640.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	-	(640.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	640.000,00	638.900,00	(1.100,00)	99,82	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	640.000,00	638.900,00	(1.100,00)	99,82	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	638.900,00	(1.100,00)	99,82	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	817.000,00	796.000,00	(21.000,00)	97,42	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	817.000,00	796.000,00	(21.000,00)	97,42	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	817.000,00	796.000,00	(21.000,00)	97,42	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.170.000,00	5.169.000,00	(1.000,00)	99,98	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.170.000,00	5.169.000,00	(1.000,00)	99,98	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.170.000,00	5.169.000,00	(1.000,00)	99,98	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.127.700,00	5.127.700,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.127.700,00	5.127.700,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.127.700,00	5.127.700,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.372.763.372,00	2.303.799.833,00	(68.963.539,00)	97,09	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.333.042.172,00	2.275.274.633,00	(57.767.539,00)	97,52	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.333.042.172,00	2.275.274.633,00	(57.767.539,00)	97,52	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.333.042.172,00	2.275.274.633,00	(57.767.539,00)	97,52	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	12.493.200,00	8.368.200,00	(4.125.000,00)	66,98	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab. Majene
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.493.200,00	8.368.200,00	(4.125.000,00)	66,98	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.493.200,00	8.368.200,00	(4.125.000,00)	66,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	632.000,00	626.000,00	(6.000,00)	99,05	Perubahan Anggaran TA 2025
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	632.000,00	626.000,00	(6.000,00)	99,05	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.000,00	626.000,00	(6.000,00)	99,05	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	26.596.000,00	19.531.000,00	(7.065.000,00)	73,43	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	26.596.000,00	19.531.000,00	(7.065.000,00)	73,43	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.596.000,00	19.531.000,00	(7.065.000,00)	73,43	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	232.937.700,00	170.050.120,00	(62.887.580,00)	73,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.795.000,00	1.190.000,00	(605.000,00)	66,29	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.795.000,00	1.190.000,00	(605.000,00)	66,29	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.795.000,00	1.190.000,00	(605.000,00)	66,29	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	221.802.700,00	159.520.120,00	(62.282.580,00)	71,91	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	221.802.700,00	159.520.120,00	(62.282.580,00)	71,91	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.802.700,00	159.520.120,00	(62.282.580,00)	71,91	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	30.850.000,00	30.850.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	30.850.000,00	30.850.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	30.850.000,00	30.850.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.850.000,00	30.850.000,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	149.614.900,00	131.022.681,00	(18.592.219,00)	87,57	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.795.500,00	3.758.000,00	(37.500,00)	99,01	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.795.500,00	3.758.000,00	(37.500,00)	99,01	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.795.500,00	3.758.000,00	(37.500,00)	99,01	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	39.019.400,00	29.014.681,00	(10.004.719,00)	74,35	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.019.400,00	29.014.681,00	(10.004.719,00)	74,35	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.019.400,00	29.014.681,00	(10.004.719,00)	74,35	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	106.800.000,00	98.250.000,00	(8.550.000,00)	91,99	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	106.800.000,00	98.250.000,00	(8.550.000,00)	91,99	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.800.000,00	98.250.000,00	(8.550.000,00)	91,99	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	52.411.300,00	43.770.000,00	(8.641.300,00)	83,51	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	33.775.100,00	31.134.100,00	(2.641.000,00)	92,18	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.775.100,00	31.134.100,00	(2.641.000,00)	92,18	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.775.100,00	31.134.100,00	(2.641.000,00)	92,18	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.639.000,00	6.635.000,00	(4.000,00)	99,93	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.639.000,00	6.635.000,00	(4.000,00)	99,93	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.639.000,00	6.635.000,00	(4.000,00)	99,93	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	11.997.200,00	6.000.900,00	(5.996.300,00)	50,01	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.997.200,00	6.000.900,00	(5.996.300,00)	50,01	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.997.200,00	6.000.900,00	(5.996.300,00)	50,01	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	443.059.000,00	298.766.211,00	(144.292.789,00)	67,43	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	409.362.000,00	280.502.211,00	(128.859.789,00)	68,52	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0001		ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	58.855.000,00	55.769.200,00	(3.085.800,00)	94,75	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.855.000,00	55.769.200,00	(3.085.800,00)	94,75	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.855.000,00	55.769.200,00	(3.085.800,00)	94,75	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	9.301.000,00	9.260.000,00	(41.000,00)	99,55	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.301.000,00	9.260.000,00	(41.000,00)	99,55	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.301.000,00	9.260.000,00	(41.000,00)	99,55	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	9.616.000,00	9.610.000,00	(6.000,00)	99,93	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.616.000,00	9.610.000,00	(6.000,00)	99,93	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.616.000,00	9.610.000,00	(6.000,00)	99,93	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	55.713.000,00	46.635.000,00	(9.078.000,00)	83,70	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	55.713.000,00	46.635.000,00	(9.078.000,00)	83,70	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.713.000,00	46.635.000,00	(9.078.000,00)	83,70	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	275.877.000,00	159.228.011,00	(116.648.989,00)	57,71	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	275.877.000,00	159.228.011,00	(116.648.989,00)	57,71	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.877.000,00	159.228.011,00	(116.648.989,00)	57,71	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.920.000,00	2.750.000,00	(2.170.000,00)	55,89	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.02.0001		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.920.000,00	2.750.000,00	(2.170.000,00)	55,89	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.920.000,00	2.750.000,00	(2.170.000,00)	55,89	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	2.750.000,00	(2.170.000,00)	55,89	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28.777.000,00	15.514.000,00	(13.263.000,00)	53,91	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28.777.000,00	15.514.000,00	(13.263.000,00)	53,91	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.777.000,00	15.514.000,00	(13.263.000,00)	53,91	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.777.000,00	15.514.000,00	(13.263.000,00)	53,91	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	225.840.027,00	178.067.927,00	(47.772.100,00)	78,84	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	168.929.137,00	146.035.037,00	(22.894.100,00)	86,44	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	12.336.637,00	12.336.637,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.336.637,00	12.336.637,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.336.637,00	12.336.637,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	1.930.000,00	930.000,00	(1.000.000,00)	48,18	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.930.000,00	930.000,00	(1.000.000,00)	48,18	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.930.000,00	930.000,00	(1.000.000,00)	48,18	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.902.000,00	5.677.000,00	(3.225.000,00)	63,77	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.902.000,00	5.677.000,00	(3.225.000,00)	63,77	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.902.000,00	5.677.000,00	(3.225.000,00)	63,77	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	47.676.600,00	35.000.000,00	(12.676.600,00)	73,41	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.676.600,00	35.000.000,00	(12.676.600,00)	73,41	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.676.600,00	35.000.000,00	(12.676.600,00)	73,41	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	2.180.000,00	-	(2.180.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.180.000,00	-	(2.180.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.180.000,00	-	(2.180.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	59.787.400,00	59.787.400,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	59.787.400,00	59.787.400,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.787.400,00	59.787.400,00	-	100,00	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	36.116.500,00	32.304.000,00	(3.812.500,00)	89,44	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	36.116.500,00	32.304.000,00	(3.812.500,00)	89,44	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.116.500,00	32.304.000,00	(3.812.500,00)	89,44	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	26.236.190,00	9.786.190,00	(16.450.000,00)	37,30	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	1.281.000,00	200.000,00	(1.081.000,00)	15,61	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.281.000,00	200.000,00	(1.081.000,00)	15,61	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.281.000,00	200.000,00	(1.081.000,00)	15,61	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	3.789.600,00	2.109.600,00	(1.680.000,00)	55,66	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.789.600,00	2.109.600,00	(1.680.000,00)	55,66	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.789.600,00	2.109.600,00	(1.680.000,00)	55,66	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	1.994.000,00	-	(1.994.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.994.000,00	-	(1.994.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.994.000,00	-	(1.994.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	7.932.090,00	5.107.590,00	(2.824.500,00)	64,39	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.932.090,00	5.107.590,00	(2.824.500,00)	64,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.932.090,00	5.107.590,00	(2.824.500,00)	64,39	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	1.144.000,00	-	(1.144.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.144.000,00	-	(1.144.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.144.000,00	-	(1.144.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	5.966.000,00	-	(5.966.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.966.000,00	-	(5.966.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.966.000,00	-	(5.966.000,00)	-	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	4.129.500,00	2.369.000,00	(1.760.500,00)	57,36	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.129.500,00	2.369.000,00	(1.760.500,00)	57,36	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.129.500,00	2.369.000,00	(1.760.500,00)	57,36	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	30.674.700,00	22.246.700,00	(8.428.000,00)	72,52	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	6.268.000,00	398.000,00	(5.870.000,00)	6,34	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.268.000,00	398.000,00	(5.870.000,00)	6,34	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.268.000,00	398.000,00	(5.870.000,00)	6,34	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	21.415.200,00	19.735.200,00	(1.680.000,00)	92,15	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.415.200,00	19.735.200,00	(1.680.000,00)	92,15	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.415.200,00	19.735.200,00	(1.680.000,00)	92,15	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	1.839.500,00	1.633.500,00	(206.000,00)	88,80	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.839.500,00	1.633.500,00	(206.000,00)	88,80	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.839.500,00	1.633.500,00	(206.000,00)	88,80	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	1.152.000,00	480.000,00	(672.000,00)	41,66	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.152.000,00	480.000,00	(672.000,00)	41,66	
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.000,00	480.000,00	(672.000,00)	41,66	
				JUMLAH BELANJA	3.535.558.094,00	3.176.432.372,00	(359.125.722,00)	89,84	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.535.558.094,00)	(3.176.432.372,00)	359.125.722,00	89,84	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.535.558.094,00)	(3.176.432.372,00)	359.125.722,00	89,84	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	798.971.906.893,00	789.091.010.445,34	(9.880.896.447,66)	98,76	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.703.176.719,00	9.865.995.461,34	162.818.742,34	101,67	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.534.611.072,00	-	100,00	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.168.565.647,00	6.331.384.389,34	162.818.742,34	102,63	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	789.268.730.174,00	779.225.014.984,00	(10.043.715.190,00)	98,72	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	768.344.427.000,00	760.123.684.301,00	(8.220.742.699,00)	98,93	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	(1.822.972.491,00)	91,28	
				JUMLAH PENDAPATAN	798.971.906.893,00	789.091.010.445,34	(9.880.896.447,66)	98,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		5	BELANJA DAERAH	119.835.673.948,00	112.258.011.302,00	(7.577.662.646,00)	93,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.974.527.117,00	4.781.781.923,00	(192.745.194,00)	96,12	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	84.273.000,00	83.829.300,00	(443.700,00)	99,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20.000.000,00	19.871.900,00	(128.100,00)	99,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.871.900,00	(128.100,00)	99,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.871.900,00	(128.100,00)	99,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.560.000,00	5.530.400,00	(29.600,00)	99,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.560.000,00	5.530.400,00	(29.600,00)	99,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	5.530.400,00	(29.600,00)	99,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	25.250.000,00	25.109.600,00	(140.400,00)	99,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.250.000,00	25.109.600,00	(140.400,00)	99,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	25.109.600,00	(140.400,00)	99,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.094.000,00	6.054.800,00	(39.200,00)	99,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.094.000,00	6.054.800,00	(39.200,00)	99,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.094.000,00	6.054.800,00	(39.200,00)	99,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	25.250.000,00	25.202.800,00	(47.200,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.250.000,00	25.202.800,00	(47.200,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	25.202.800,00	(47.200,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.119.000,00	1.089.800,00	(29.200,00)	97,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.119.000,00	1.089.800,00	(29.200,00)	97,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.119.000,00	1.089.800,00	(29.200,00)	97,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.000.000,00	970.000,00	(30.000,00)	97,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	970.000,00	(30.000,00)	97,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	970.000,00	(30.000,00)	97,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.413.317.932,00	4.308.516.419,00	(104.801.513,00)	97,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.117.667.432,00	4.037.298.669,00	(80.368.763,00)	98,04	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.117.667.432,00	4.037.298.669,00	(80.368.763,00)	98,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.098.947.432,00	4.018.578.669,00	(80.368.763,00)	98,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	18.720.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	213.900.000,00	189.750.000,00	(24.150.000,00)	88,70	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	213.900.000,00	189.750.000,00	(24.150.000,00)	88,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.900.000,00	189.750.000,00	(24.150.000,00)	88,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	24.977.000,00	24.895.800,00	(81.200,00)	99,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.977.000,00	24.895.800,00	(81.200,00)	99,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.977.000,00	24.895.800,00	(81.200,00)	99,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	9.977.000,00	9.877.250,00	(99.750,00)	99,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.977.000,00	9.877.250,00	(99.750,00)	99,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.977.000,00	9.877.250,00	(99.750,00)	99,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0006		PENGLOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	11.678.500,00	11.656.900,00	(21.600,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.678.500,00	11.656.900,00	(21.600,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.678.500,00	11.656.900,00	(21.600,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	35.118.000,00	35.037.800,00	(80.200,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	35.118.000,00	35.037.800,00	(80.200,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.118.000,00	35.037.800,00	(80.200,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	220.187.200,00	149.085.004,00	(71.102.196,00)	67,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.488.000,00	3.471.000,00	(17.000,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.488.000,00	3.471.000,00	(17.000,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.488.000,00	3.471.000,00	(17.000,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	49.705.000,00	44.850.549,00	(4.854.451,00)	90,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	49.705.000,00	44.850.549,00	(4.854.451,00)	90,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.705.000,00	44.850.549,00	(4.854.451,00)	90,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	166.994.200,00	100.763.455,00	(66.230.745,00)	60,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	166.994.200,00	100.763.455,00	(66.230.745,00)	60,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.994.200,00	100.763.455,00	(66.230.745,00)	60,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	39.670.000,00	34.862.000,00	(4.808.000,00)	87,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	39.670.000,00	34.862.000,00	(4.808.000,00)	87,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	39.670.000,00	34.862.000,00	(4.808.000,00)	87,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.670.000,00	34.862.000,00	(4.808.000,00)	87,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	159.838.985,00	148.289.100,00	(11.549.885,00)	92,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	22.586.000,00	22.129.000,00	(457.000,00)	97,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.586.000,00	22.129.000,00	(457.000,00)	97,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.586.000,00	22.129.000,00	(457.000,00)	97,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	120.452.985,00	109.360.100,00	(11.092.885,00)	90,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.452.985,00	109.360.100,00	(11.092.885,00)	90,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.452.985,00	109.360.100,00	(11.092.885,00)	90,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	57.240.000,00	57.200.100,00	(39.900,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.650.000,00	40.613.100,00	(36.900,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.650.000,00	40.613.100,00	(36.900,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.650.000,00	40.613.100,00	(36.900,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	9.150.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	7.440.000,00	7.437.000,00	(3.000,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.440.000,00	7.437.000,00	(3.000,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.440.000,00	7.437.000,00	(3.000,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	114.567.269.208,00	107.240.812.499,00	(7.326.456.709,00)	93,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	1.513.276.947,00	1.438.651.600,00	(74.625.347,00)	95,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	37.000.000,00	36.778.100,00	(221.900,00)	99,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.000.000,00	36.778.100,00	(221.900,00)	99,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	36.778.100,00	(221.900,00)	99,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	36.999.250,00	36.462.150,00	(537.100,00)	98,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.999.250,00	36.462.150,00	(537.100,00)	98,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.999.250,00	36.462.150,00	(537.100,00)	98,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0003		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	5.764.000,00	5.762.750,00	(1.250,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.764.000,00	5.762.750,00	(1.250,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.764.000,00	5.762.750,00	(1.250,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0004		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	4.477.500,00	4.394.400,00	(83.100,00)	98,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.477.500,00	4.394.400,00	(83.100,00)	98,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.477.500,00	4.394.400,00	(83.100,00)	98,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0005		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	3.555.500,00	3.102.400,00	(453.100,00)	87,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.555.500,00	3.102.400,00	(453.100,00)	87,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.555.500,00	3.102.400,00	(453.100,00)	87,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0006		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	1.041.160.000,00	973.459.950,00	(67.700.050,00)	93,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.041.160.000,00	973.459.950,00	(67.700.050,00)	93,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.041.160.000,00	973.459.950,00	(67.700.050,00)	93,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	236.424.697,00	232.880.350,00	(3.544.347,00)	98,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	236.424.697,00	232.880.350,00	(3.544.347,00)	98,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.424.697,00	232.880.350,00	(3.544.347,00)	98,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0010		KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	38.280.000,00	38.223.250,00	(56.750,00)	99,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	38.280.000,00	38.223.250,00	(56.750,00)	99,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.280.000,00	38.223.250,00	(56.750,00)	99,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0011		KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	75.446.000,00	73.423.250,00	(2.022.750,00)	97,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	75.446.000,00	73.423.250,00	(2.022.750,00)	97,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.446.000,00	73.423.250,00	(2.022.750,00)	97,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0012		KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN	27.570.000,00	27.565.000,00	(5.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	27.570.000,00	27.565.000,00	(5.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.570.000,00	27.565.000,00	(5.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	400.119.300,00	372.114.650,00	(28.004.650,00)	93,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0001		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	53.311.000,00	51.574.800,00	(1.736.200,00)	96,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.311.000,00	51.574.800,00	(1.736.200,00)	96,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.311.000,00	51.574.800,00	(1.736.200,00)	96,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0003		PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	60.275.000,00	60.270.000,00	(5.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.275.000,00	60.270.000,00	(5.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.275.000,00	60.270.000,00	(5.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0004		PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH	152.100.500,00	148.534.100,00	(3.566.400,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	152.100.500,00	148.534.100,00	(3.566.400,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.100.500,00	148.534.100,00	(3.566.400,00)	97,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	30.898.000,00	30.860.400,00	(37.600,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.898.000,00	30.860.400,00	(37.600,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.898.000,00	30.860.400,00	(37.600,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0009		REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	38.216.000,00	38.188.000,00	(28.000,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	38.216.000,00	38.188.000,00	(28.000,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.216.000,00	38.188.000,00	(28.000,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0011		PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	65.318.800,00	42.687.350,00	(22.631.450,00)	65,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	65.318.800,00	42.687.350,00	(22.631.450,00)	65,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.318.800,00	42.687.350,00	(22.631.450,00)	65,35	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	245.078.000,00	193.450.350,00	(51.627.650,00)	78,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0001		KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	11.929.500,00	11.804.000,00	(125.500,00)	98,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.929.500,00	11.804.000,00	(125.500,00)	98,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.929.500,00	11.804.000,00	(125.500,00)	98,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0002		REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	41.147.500,00	28.093.900,00	(13.053.600,00)	68,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41.147.500,00	28.093.900,00	(13.053.600,00)	68,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.147.500,00	28.093.900,00	(13.053.600,00)	68,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0003		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	19.457.000,00	18.659.400,00	(797.600,00)	95,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.457.000,00	18.659.400,00	(797.600,00)	95,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.457.000,00	18.659.400,00	(797.600,00)	95,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	41.368.000,00	28.133.500,00	(13.234.500,00)	68,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.368.000,00	28.133.500,00	(13.234.500,00)	68,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.368.000,00	28.133.500,00	(13.234.500,00)	68,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	82.351.000,00	64.125.600,00	(18.225.400,00)	77,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	82.351.000,00	64.125.600,00	(18.225.400,00)	77,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.351.000,00	64.125.600,00	(18.225.400,00)	77,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0007		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN	48.825.000,00	42.633.950,00	(6.191.050,00)	87,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	48.825.000,00	42.633.950,00	(6.191.050,00)	87,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.825.000,00	42.633.950,00	(6.191.050,00)	87,31	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	112.408.794.961,00	105.236.595.899,00	(7.172.199.062,00)	93,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	3.000.000.000,00	2.599.579.085,00	(400.420.915,00)	86,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	(400.420.915,00)	86,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	(400.420.915,00)	86,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04.0009	5.4	BELANJA TRANSFER	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04.0009	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04.0010		PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	109.408.794.961,00	102.637.016.814,00	(6.771.778.147,00)	93,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	109.408.794.961,00	102.637.016.814,00	(6.771.778.147,00)	93,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.696.704.257,00	853.100.342,00	(1.843.603.915,00)	31,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	106.712.090.704,00	101.783.916.472,00	(4.928.174.232,00)	95,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.2.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	293.877.623,00	235.416.880,00	(58.460.743,00)	80,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	293.877.623,00	235.416.880,00	(58.460.743,00)	80,10	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	54.932.000,00	51.313.300,00	(3.618.700,00)	93,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.932.000,00	51.313.300,00	(3.618.700,00)	93,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.932.000,00	51.313.300,00	(3.618.700,00)	93,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0003		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	12.393.000,00	12.270.400,00	(122.600,00)	99,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.393.000,00	12.270.400,00	(122.600,00)	99,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.393.000,00	12.270.400,00	(122.600,00)	99,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0005		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	164.471.500,00	117.593.880,00	(46.877.620,00)	71,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	164.471.500,00	117.593.880,00	(46.877.620,00)	71,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.471.500,00	117.593.880,00	(46.877.620,00)	71,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	24.539.000,00	20.490.000,00	(4.049.000,00)	83,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.539.000,00	20.490.000,00	(4.049.000,00)	83,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.539.000,00	20.490.000,00	(4.049.000,00)	83,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0010		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	6.717.500,00	4.506.500,00	(2.211.000,00)	67,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.717.500,00	4.506.500,00	(2.211.000,00)	67,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.717.500,00	4.506.500,00	(2.211.000,00)	67,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0011		REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	30.824.623,00	29.242.800,00	(1.581.823,00)	94,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	30.824.623,00	29.242.800,00	(1.581.823,00)	94,86	
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.824.623,00	29.242.800,00	(1.581.823,00)	94,86	
				JUMLAH BELANJA	119.835.673.948,00	112.258.011.302,00	(7.577.662.646,00)	93,67	
				SURPLUS / (DEFISIT)	679.136.232.945,00	676.832.999.143,34	(2.303.233.801,66)	99,66	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	4.335.496.696,69	4.335.526.092,69	29.396,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	29.396,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	29.396,00	100,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	29.396,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00	
	5.02.0.00.0.00.26.0000		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00	
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000,00	500.000.000,00	-	100,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	4.335.496.696,69	4.335.526.092,69	29.396,00	100,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	683.471.729.641,69	681.168.525.236,03	(2.303.204.405,66)	99,66	



PEMERINTAH KAB. MAJENE

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.27.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	24.492.173.570,00	16.591.577.799,25	(7.900.595.770,75)	67,74	
	5.02.0.00.0.00.27.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.492.173.570,00	16.591.577.799,25	(7.900.595.770,75)	67,74	
	5.02.0.00.0.00.27.0000		4.1.01	Pajak Daerah	24.265.113.570,00	16.467.904.514,25	(7.797.209.055,75)	67,86	Peraturan Daerah No.1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
	5.02.0.00.0.00.27.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	226.560.000,00	87.820.000,00	(138.740.000,00)	38,76	
	5.02.0.00.0.00.27.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	500.000,00	35.853.285,00	35.353.285,00	7.170,65	
				JUMLAH PENDAPATAN	24.492.173.570,00	16.591.577.799,25	(7.900.595.770,75)	67,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000		5	BELANJA DAERAH	4.308.110.825,00	3.971.760.893,00	(336.349.932,00)	92,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.047.490.325,00	3.777.223.793,00	(270.266.532,00)	93,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.304.000,00	15.872.050,00	(3.431.950,00)	82,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.490.000,00	1.790.100,00	(699.900,00)	71,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.490.000,00	1.790.100,00	(699.900,00)	71,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.490.000,00	1.790.100,00	(699.900,00)	71,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.458.000,00	6.986.000,00	(472.000,00)	93,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.458.000,00	6.986.000,00	(472.000,00)	93,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.458.000,00	6.986.000,00	(472.000,00)	93,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.990.000,00	1.445.750,00	(544.250,00)	72,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.990.000,00	1.445.750,00	(544.250,00)	72,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	1.445.750,00	(544.250,00)	72,65	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.990.000,00	1.130.800,00	(859.200,00)	56,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.990.000,00	1.130.800,00	(859.200,00)	56,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	1.130.800,00	(859.200,00)	56,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.462.000,00	2.000.000,00	(462.000,00)	81,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.462.000,00	2.000.000,00	(462.000,00)	81,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.462.000,00	2.000.000,00	(462.000,00)	81,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.462.000,00	1.251.400,00	(210.600,00)	85,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.462.000,00	1.251.400,00	(210.600,00)	85,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.462.000,00	1.251.400,00	(210.600,00)	85,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.452.000,00	1.268.000,00	(184.000,00)	87,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.452.000,00	1.268.000,00	(184.000,00)	87,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.452.000,00	1.268.000,00	(184.000,00)	87,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.614.759.259,00	3.378.372.304,00	(236.386.955,00)	93,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.220.182.259,00	3.030.707.704,00	(189.474.555,00)	94,11	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.220.182.259,00	3.030.707.704,00	(189.474.555,00)	94,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.182.259,00	3.030.707.704,00	(189.474.555,00)	94,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	385.300.000,00	344.350.000,00	(40.950.000,00)	89,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	385.300.000,00	344.350.000,00	(40.950.000,00)	89,37	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.300.000,00	344.350.000,00	(40.950.000,00)	89,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	2.160.000,00	1.175.000,00	(985.000,00)	54,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	1.175.000,00	(985.000,00)	54,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	1.175.000,00	(985.000,00)	54,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	2.695.000,00	2.139.600,00	(555.400,00)	79,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.695.000,00	2.139.600,00	(555.400,00)	79,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.695.000,00	2.139.600,00	(555.400,00)	79,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.960.000,00	-	(1.960.000,00)	-	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.960.000,00	-	(1.960.000,00)	-	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	-	(1.960.000,00)	-	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.462.000,00	-	(2.462.000,00)	-	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.462.000,00	-	(2.462.000,00)	-	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.462.000,00	-	(2.462.000,00)	-	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	181.683.800,00	168.047.315,00	(13.636.485,00)	92,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	143.775.800,00	143.396.315,00	(379.485,00)	99,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	143.775.800,00	143.396.315,00	(379.485,00)	99,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.775.800,00	143.396.315,00	(379.485,00)	99,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	7.448.000,00	6.726.200,00	(721.800,00)	90,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.448.000,00	6.726.200,00	(721.800,00)	90,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.448.000,00	6.726.200,00	(721.800,00)	90,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	28.460.000,00	17.924.800,00	(10.535.200,00)	62,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	28.460.000,00	17.924.800,00	(10.535.200,00)	62,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.460.000,00	17.924.800,00	(10.535.200,00)	62,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	180.929.726,00	167.301.932,00	(13.627.794,00)	92,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	962.000,00	662.200,00	(299.800,00)	68,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	962.000,00	662.200,00	(299.800,00)	68,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	962.000,00	662.200,00	(299.800,00)	68,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	131.997.726,00	124.258.732,00	(7.738.994,00)	94,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.997.726,00	124.258.732,00	(7.738.994,00)	94,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.997.726,00	124.258.732,00	(7.738.994,00)	94,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	47.970.000,00	42.381.000,00	(5.589.000,00)	88,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	47.970.000,00	42.381.000,00	(5.589.000,00)	88,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.970.000,00	42.381.000,00	(5.589.000,00)	88,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	50.813.540,00	47.630.192,00	(3.183.348,00)	93,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	16.096.600,00	16.043.297,00	(53.303,00)	99,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.096.600,00	16.043.297,00	(53.303,00)	99,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.096.600,00	16.043.297,00	(53.303,00)	99,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	24.544.300,00	23.229.895,00	(1.314.405,00)	94,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.544.300,00	23.229.895,00	(1.314.405,00)	94,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.544.300,00	23.229.895,00	(1.314.405,00)	94,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.670.000,00	4.043.000,00	(627.000,00)	86,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.670.000,00	4.043.000,00	(627.000,00)	86,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	4.043.000,00	(627.000,00)	86,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	5.502.640,00	4.314.000,00	(1.188.640,00)	78,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.502.640,00	4.314.000,00	(1.188.640,00)	78,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.502.640,00	4.314.000,00	(1.188.640,00)	78,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.2.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	260.620.500,00	194.537.100,00	(66.083.400,00)	74,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	260.620.500,00	194.537.100,00	(66.083.400,00)	74,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0001		PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	7.376.000,00	5.660.000,00	(1.716.000,00)	76,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.376.000,00	5.660.000,00	(1.716.000,00)	76,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.376.000,00	5.660.000,00	(1.716.000,00)	76,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0002		ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	15.285.000,00	8.995.100,00	(6.289.900,00)	58,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.285.000,00	8.995.100,00	(6.289.900,00)	58,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.285.000,00	8.995.100,00	(6.289.900,00)	58,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	14.550.000,00	6.865.400,00	(7.684.600,00)	47,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.550.000,00	6.865.400,00	(7.684.600,00)	47,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	6.865.400,00	(7.684.600,00)	47,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	15.787.500,00	11.497.000,00	(4.290.500,00)	72,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.787.500,00	11.497.000,00	(4.290.500,00)	72,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.787.500,00	11.497.000,00	(4.290.500,00)	72,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0006		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	11.847.500,00	882.000,00	(10.965.500,00)	7,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.847.500,00	882.000,00	(10.965.500,00)	7,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.847.500,00	882.000,00	(10.965.500,00)	7,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0007		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	148.921.500,00	134.240.700,00	(14.680.800,00)	90,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	148.921.500,00	134.240.700,00	(14.680.800,00)	90,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.921.500,00	134.240.700,00	(14.680.800,00)	90,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0009		PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	5.190.000,00	2.930.000,00	(2.260.000,00)	56,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.190.000,00	2.930.000,00	(2.260.000,00)	56,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	2.930.000,00	(2.260.000,00)	56,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0010		PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	10.597.500,00	9.129.200,00	(1.468.300,00)	86,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	10.597.500,00	9.129.200,00	(1.468.300,00)	86,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.597.500,00	9.129.200,00	(1.468.300,00)	86,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	6.578.000,00	5.478.000,00	(1.100.000,00)	83,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.578.000,00	5.478.000,00	(1.100.000,00)	83,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.578.000,00	5.478.000,00	(1.100.000,00)	83,27	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0012		PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	3.710.000,00	706.000,00	(3.004.000,00)	19,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	3.710.000,00	706.000,00	(3.004.000,00)	19,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	706.000,00	(3.004.000,00)	19,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	11.440.000,00	4.540.000,00	(6.900.000,00)	39,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	11.440.000,00	4.540.000,00	(6.900.000,00)	39,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.440.000,00	4.540.000,00	(6.900.000,00)	39,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0014		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	9.337.500,00	3.613.700,00	(5.723.800,00)	38,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	9.337.500,00	3.613.700,00	(5.723.800,00)	38,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.337.500,00	3.613.700,00	(5.723.800,00)	38,70	
				JUMLAH BELANJA	4.308.110.825,00	3.971.760.893,00	(336.349.932,00)	92,19	
				SURPLUS / (DEFISIT)	20.184.062.745,00	12.619.816.906,25	(7.564.245.838,75)	62,52	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	20.184.062.745,00	12.619.816.906,25	(7.564.245.838,75)	62,52	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000		5	BELANJA DAERAH	3.965.372.023,00	3.822.037.903,00	(143.334.120,00)	96,38	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.331.936.323,00	3.198.175.604,00	(133.760.719,00)	95,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.092.000,00	21.055.000,00	(37.000,00)	99,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.512.000,00	1.500.000,00	(12.000,00)	99,20	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.512.000,00	1.500.000,00	(12.000,00)	99,20	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.512.000,00	1.500.000,00	(12.000,00)	99,20	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	6.526.000,00	6.521.000,00	(5.000,00)	99,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.526.000,00	6.521.000,00	(5.000,00)	99,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.526.000,00	6.521.000,00	(5.000,00)	99,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.526.000,00	6.511.000,00	(15.000,00)	99,77	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.526.000,00	6.511.000,00	(15.000,00)	99,77	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.526.000,00	6.511.000,00	(15.000,00)	99,77	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.528.000,00	5.523.000,00	(5.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.528.000,00	5.523.000,00	(5.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.528.000,00	5.523.000,00	(5.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.136.271.637,00	3.014.638.478,00	(121.633.159,00)	96,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.015.893.637,00	2.904.426.478,00	(111.467.159,00)	96,30	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.015.893.637,00	2.904.426.478,00	(111.467.159,00)	96,30	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.015.893.637,00	2.904.426.478,00	(111.467.159,00)	96,30	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	100.800.000,00	90.650.000,00	(10.150.000,00)	89,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	100.800.000,00	90.650.000,00	(10.150.000,00)	89,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	90.650.000,00	(10.150.000,00)	89,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	6.526.000,00	6.518.000,00	(8.000,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.526.000,00	6.518.000,00	(8.000,00)	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.526.000,00	6.518.000,00	(8.000,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0006		PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	6.526.000,00	6.518.000,00	(8.000,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.526.000,00	6.518.000,00	(8.000,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.526.000,00	6.518.000,00	(8.000,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	6.526.000,00	6.526.000,00	-	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.526.000,00	6.526.000,00	-	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.526.000,00	6.526.000,00	-	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	88.178.500,00	87.147.811,00	(1.030.689,00)	98,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.663.500,00	10.640.000,00	(23.500,00)	99,77	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.663.500,00	10.640.000,00	(23.500,00)	99,77	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.663.500,00	10.640.000,00	(23.500,00)	99,77	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.287.000,00	4.283.000,00	(4.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.287.000,00	4.283.000,00	(4.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.287.000,00	4.283.000,00	(4.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	3.088.000,00	3.050.000,00	(38.000,00)	98,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.088.000,00	3.050.000,00	(38.000,00)	98,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.088.000,00	3.050.000,00	(38.000,00)	98,76	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	70.140.000,00	69.174.811,00	(965.189,00)	98,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.140.000,00	69.174.811,00	(965.189,00)	98,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.140.000,00	69.174.811,00	(965.189,00)	98,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	70.199.936,00	60.746.615,00	(9.453.321,00)	86,53	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	40.799.936,00	33.796.615,00	(7.003.321,00)	82,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.799.936,00	33.796.615,00	(7.003.321,00)	82,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.799.936,00	33.796.615,00	(7.003.321,00)	82,83	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	29.400.000,00	26.950.000,00	(2.450.000,00)	91,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29.400.000,00	26.950.000,00	(2.450.000,00)	91,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	26.950.000,00	(2.450.000,00)	91,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.194.250,00	14.587.700,00	(1.606.550,00)	90,07	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	14.974.250,00	13.387.700,00	(1.586.550,00)	89,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.974.250,00	13.387.700,00	(1.586.550,00)	89,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.974.250,00	13.387.700,00	(1.586.550,00)	89,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.220.000,00	1.200.000,00	(20.000,00)	98,36	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.220.000,00	1.200.000,00	(20.000,00)	98,36	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	1.200.000,00	(20.000,00)	98,36	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.3.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	633.435.700,00	623.862.299,00	(9.573.401,00)	98,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	89.623.000,00	86.358.900,00	(3.264.100,00)	96,35	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	51.328.000,00	51.181.600,00	(146.400,00)	99,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.328.000,00	51.181.600,00	(146.400,00)	99,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.328.000,00	51.181.600,00	(146.400,00)	99,71	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0004		EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN	19.301.000,00	16.254.600,00	(3.046.400,00)	84,21	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.301.000,00	16.254.600,00	(3.046.400,00)	84,21	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.301.000,00	16.254.600,00	(3.046.400,00)	84,21	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0005		PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN ASN	9.146.500,00	9.108.700,00	(37.800,00)	99,58	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.146.500,00	9.108.700,00	(37.800,00)	99,58	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.146.500,00	9.108.700,00	(37.800,00)	99,58	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	7.132.500,00	7.115.000,00	(17.500,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	7.132.500,00	7.115.000,00	(17.500,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.132.500,00	7.115.000,00	(17.500,00)	99,75	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0011		PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	2.715.000,00	2.699.000,00	(16.000,00)	99,41	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.715.000,00	2.699.000,00	(16.000,00)	99,41	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.715.000,00	2.699.000,00	(16.000,00)	99,41	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	280.044.700,00	279.019.800,00	(1.024.900,00)	99,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	9.362.500,00	9.274.000,00	(88.500,00)	99,05	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.362.500,00	9.274.000,00	(88.500,00)	99,05	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.362.500,00	9.274.000,00	(88.500,00)	99,05	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	18.315.200,00	17.423.000,00	(892.200,00)	95,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.315.200,00	17.423.000,00	(892.200,00)	95,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.315.200,00	17.423.000,00	(892.200,00)	95,12	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	252.367.000,00	252.322.800,00	(44.200,00)	99,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	252.367.000,00	252.322.800,00	(44.200,00)	99,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.367.000,00	252.322.800,00	(44.200,00)	99,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	238.657.000,00	238.630.999,00	(26.001,00)	99,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.03.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN	1.357.000,00	1.331.000,00	(26.000,00)	98,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.357.000,00	1.331.000,00	(26.000,00)	98,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.357.000,00	1.331.000,00	(26.000,00)	98,08	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	237.300.000,00	237.299.999,00	(1,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	237.300.000,00	237.299.999,00	(1,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.300.000,00	237.299.999,00	(1,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	25.111.000,00	19.852.600,00	(5.258.400,00)	79,05	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	4.638.000,00	4.632.000,00	(6.000,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.638.000,00	4.632.000,00	(6.000,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.638.000,00	4.632.000,00	(6.000,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0004		PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	6.468.000,00	6.274.000,00	(194.000,00)	97,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.468.000,00	6.274.000,00	(194.000,00)	97,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.468.000,00	6.274.000,00	(194.000,00)	97,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0005		PENGELOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI	10.057.000,00	5.054.200,00	(5.002.800,00)	50,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.057.000,00	5.054.200,00	(5.002.800,00)	50,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.057.000,00	5.054.200,00	(5.002.800,00)	50,25	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0007		PEMBINAAN DISIPLIN ASN	3.948.000,00	3.892.400,00	(55.600,00)	98,59	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.948.000,00	3.892.400,00	(55.600,00)	98,59	
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.948.000,00	3.892.400,00	(55.600,00)	98,59	
				JUMLAH BELANJA	3.965.372.023,00	3.822.037.903,00	(143.334.120,00)	96,38	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.965.372.023,00)	(3.822.037.903,00)	143.334.120,00	96,38	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.965.372.023,00)	(3.822.037.903,00)	143.334.120,00	96,38	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.28.0000		5	BELANJA DAERAH	226.133.000,00	90.079.000,00	(136.054.000,00)	39,83	
5.04	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	226.133.000,00	90.079.000,00	(136.054.000,00)	39,83	
5.04	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.04.02.2.02		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	226.133.000,00	90.079.000,00	(136.054.000,00)	39,83	
5.04	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.04.02.2.02.0007		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN	226.133.000,00	90.079.000,00	(136.054.000,00)	39,83	
5.04	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	226.133.000,00	90.079.000,00	(136.054.000,00)	39,83	
5.04	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.133.000,00	90.079.000,00	(136.054.000,00)	39,83	
				JUMLAH BELANJA	226.133.000,00	90.079.000,00	(136.054.000,00)	39,83	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(226.133.000,00)	(90.079.000,00)	136.054.000,00	39,83	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(226.133.000,00)	(90.079.000,00)	136.054.000,00	39,83	

LAMPIRAN I.3 :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025



PEMERINTAH KAB. MAJENE

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Organisasi : Badan Riset dan Inovasi Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000		5	BELANJA DAERAH	1.250.063.039,00	1.189.927.082,00	(60.135.957,00)	95,18	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.186.913.039,00	1.127.105.742,00	(59.807.297,00)	94,96	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.901.500,00	4.879.500,00	(22.000,00)	99,55	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.301.000,00	2.301.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.301.000,00	2.301.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.301.000,00	2.301.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	642.000,00	635.000,00	(7.000,00)	98,90	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	642.000,00	635.000,00	(7.000,00)	98,90	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.000,00	635.000,00	(7.000,00)	98,90	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	605.000,00	592.000,00	(13.000,00)	97,85	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	605.000,00	592.000,00	(13.000,00)	97,85	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	605.000,00	592.000,00	(13.000,00)	97,85	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	728.000,00	726.000,00	(2.000,00)	99,72	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	728.000,00	726.000,00	(2.000,00)	99,72	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	728.000,00	726.000,00	(2.000,00)	99,72	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	625.500,00	625.500,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	625.500,00	625.500,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.500,00	625.500,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.091.117.174,00	1.048.351.712,00	(42.765.462,00)	96,08	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.059.319.674,00	1.021.483.212,00	(37.836.462,00)	96,42	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.059.319.674,00	1.021.483.212,00	(37.836.462,00)	96,42	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.059.319.674,00	1.021.483.212,00	(37.836.462,00)	96,42	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	29.400.000,00	24.500.000,00	(4.900.000,00)	83,33	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.400.000,00	24.500.000,00	(4.900.000,00)	83,33	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	24.500.000,00	(4.900.000,00)	83,33	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	912.500,00	897.500,00	(15.000,00)	98,35	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	912.500,00	897.500,00	(15.000,00)	98,35	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	912.500,00	897.500,00	(15.000,00)	98,35	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	746.000,00	739.000,00	(7.000,00)	99,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	746.000,00	739.000,00	(7.000,00)	99,06	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	746.000,00	739.000,00	(7.000,00)	99,06	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	739.000,00	732.000,00	(7.000,00)	99,05	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	739.000,00	732.000,00	(7.000,00)	99,05	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.000,00	732.000,00	(7.000,00)	99,05	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	27.541.500,00	17.864.100,00	(9.677.400,00)	64,86	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.605.500,00	2.605.500,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.605.500,00	2.605.500,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.605.500,00	2.605.500,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.744.000,00	2.690.800,00	(53.200,00)	98,06	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.744.000,00	2.690.800,00	(53.200,00)	98,06	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.744.000,00	2.690.800,00	(53.200,00)	98,06	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	22.192.000,00	12.567.800,00	(9.624.200,00)	56,63	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	22.192.000,00	12.567.800,00	(9.624.200,00)	56,63	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.192.000,00	12.567.800,00	(9.624.200,00)	56,63	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	50.260.165,00	44.412.230,00	(5.847.935,00)	88,36	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.537.500,00	2.537.500,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.537.500,00	2.537.500,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.537.500,00	2.537.500,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.922.665,00	7.224.730,00	(2.697.935,00)	72,81	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.922.665,00	7.224.730,00	(2.697.935,00)	72,81	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.922.665,00	7.224.730,00	(2.697.935,00)	72,81	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	37.800.000,00	34.650.000,00	(3.150.000,00)	91,66	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	37.800.000,00	34.650.000,00	(3.150.000,00)	91,66	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	34.650.000,00	(3.150.000,00)	91,66	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.092.700,00	11.598.200,00	(1.494.500,00)	88,58	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	7.870.500,00	7.870.000,00	(500,00)	99,99	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.870.500,00	7.870.000,00	(500,00)	99,99	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.870.500,00	7.870.000,00	(500,00)	99,99	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	2.233.200,00	739.200,00	(1.494.000,00)	33,10	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.233.200,00	739.200,00	(1.494.000,00)	33,10	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.233.200,00	739.200,00	(1.494.000,00)	33,10	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.989.000,00	2.989.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.989.000,00	2.989.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.989.000,00	2.989.000,00	-	100,00	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.5.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	63.150.000,00	62.821.340,00	(328.660,00)	99,47	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	63.150.000,00	62.821.340,00	(328.660,00)	99,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	63.150.000,00	62.821.340,00	(328.660,00)	99,47	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.150.000,00	62.821.340,00	(328.660,00)	99,47	
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.150.000,00	62.821.340,00	(328.660,00)	99,47	
				JUMLAH BELANJA	1.250.063.039,00	1.189.927.082,00	(60.135.957,00)	95,18	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.250.063.039,00)	(1.189.927.082,00)	60.135.957,00	95,18	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.250.063.039,00)	(1.189.927.082,00)	60.135.957,00	95,18	



PEMERINTAH KAB. MAJENE

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH

Organisasi : Inspektorat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000		5	BELANJA DAERAH	6.236.513.580,00	5.716.178.643,00	(520.334.937,00)	91,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.287.785.680,00	4.119.740.443,00	(168.045.237,00)	96,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.200.000,00	11.692.000,00	(4.508.000,00)	72,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.700.000,00	11.692.000,00	(8.000,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.700.000,00	11.692.000,00	(8.000,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.692.000,00	(8.000,00)	99,93	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	-	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.868.320.898,00	3.751.681.345,00	(116.639.553,00)	96,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.778.760.898,00	3.686.849.345,00	(91.911.553,00)	97,56	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.778.760.898,00	3.686.849.345,00	(91.911.553,00)	97,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.778.760.898,00	3.686.849.345,00	(91.911.553,00)	97,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	65.700.000,00	47.600.000,00	(18.100.000,00)	72,45	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.700.000,00	47.600.000,00	(18.100.000,00)	72,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.700.000,00	47.600.000,00	(18.100.000,00)	72,45	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	-	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	-	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	-	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	9.870.000,00	9.758.000,00	(112.000,00)	98,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.870.000,00	9.758.000,00	(112.000,00)	98,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.870.000,00	9.758.000,00	(112.000,00)	98,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	7.490.000,00	7.474.000,00	(16.000,00)	99,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.490.000,00	7.474.000,00	(16.000,00)	99,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.490.000,00	7.474.000,00	(16.000,00)	99,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	81.842.490,00	79.113.890,00	(2.728.600,00)	96,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	81.842.490,00	79.113.890,00	(2.728.600,00)	96,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	81.842.490,00	79.113.890,00	(2.728.600,00)	96,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.842.490,00	79.113.890,00	(2.728.600,00)	96,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	142.388.900,00	129.581.250,00	(12.807.650,00)	91,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.940.000,00	17.477.250,00	(462.750,00)	97,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.940.000,00	17.477.250,00	(462.750,00)	97,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.940.000,00	17.477.250,00	(462.750,00)	97,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	22.927.000,00	13.145.000,00	(9.782.000,00)	57,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	22.927.000,00	13.145.000,00	(9.782.000,00)	57,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.927.000,00	13.145.000,00	(9.782.000,00)	57,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	101.221.900,00	98.659.000,00	(2.562.900,00)	97,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	101.221.900,00	98.659.000,00	(2.562.900,00)	97,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.221.900,00	98.659.000,00	(2.562.900,00)	97,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	92.675.442,00	84.557.267,00	(8.118.175,00)	91,24	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	19.977.500,00	16.225.000,00	(3.752.500,00)	81,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.977.500,00	16.225.000,00	(3.752.500,00)	81,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.977.500,00	16.225.000,00	(3.752.500,00)	81,21	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	42.497.942,00	40.587.267,00	(1.910.675,00)	95,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.497.942,00	40.587.267,00	(1.910.675,00)	95,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.497.942,00	40.587.267,00	(1.910.675,00)	95,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.250.000,00	645.000,00	(605.000,00)	51,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	645.000,00	(605.000,00)	51,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	645.000,00	(605.000,00)	51,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	28.950.000,00	27.100.000,00	(1.850.000,00)	93,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.950.000,00	27.100.000,00	(1.850.000,00)	93,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.950.000,00	27.100.000,00	(1.850.000,00)	93,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	86.357.950,00	63.114.691,00	(23.243.259,00)	73,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	61.457.350,00	41.226.691,00	(20.230.659,00)	67,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.457.350,00	41.226.691,00	(20.230.659,00)	67,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.457.350,00	41.226.691,00	(20.230.659,00)	67,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0005		PEMELIHARAAN MEDEL	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0005	5.1	BELANJA OPERASI	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	24.660.600,00	21.648.000,00	(3.012.600,00)	87,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.485.600,00	1.473.000,00	(3.012.600,00)	32,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.485.600,00	1.473.000,00	(3.012.600,00)	32,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	20.175.000,00	20.175.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.175.000,00	20.175.000,00	-	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.400.577.900,00	1.115.038.200,00	(285.539.700,00)	79,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.244.777.900,00	1.011.138.200,00	(233.639.700,00)	81,23	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	162.350.000,00	136.500.000,00	(25.850.000,00)	84,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	162.350.000,00	136.500.000,00	(25.850.000,00)	84,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.350.000,00	136.500.000,00	(25.850.000,00)	84,07	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	111.050.000,00	109.900.000,00	(1.150.000,00)	98,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	111.050.000,00	109.900.000,00	(1.150.000,00)	98,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.050.000,00	109.900.000,00	(1.150.000,00)	98,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	206.600.000,00	139.100.000,00	(67.500.000,00)	67,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	206.600.000,00	139.100.000,00	(67.500.000,00)	67,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.600.000,00	139.100.000,00	(67.500.000,00)	67,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	151.650.000,00	132.500.000,00	(19.150.000,00)	87,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	151.650.000,00	132.500.000,00	(19.150.000,00)	87,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.650.000,00	132.500.000,00	(19.150.000,00)	87,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	239.250.000,00	158.550.000,00	(80.700.000,00)	66,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	239.250.000,00	158.550.000,00	(80.700.000,00)	66,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.250.000,00	158.550.000,00	(80.700.000,00)	66,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0006		KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL	284.150.900,00	247.261.200,00	(36.889.700,00)	87,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	284.150.900,00	247.261.200,00	(36.889.700,00)	87,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.150.900,00	247.261.200,00	(36.889.700,00)	87,01	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	89.727.000,00	87.327.000,00	(2.400.000,00)	97,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	89.727.000,00	87.327.000,00	(2.400.000,00)	97,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.727.000,00	87.327.000,00	(2.400.000,00)	97,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	155.800.000,00	103.900.000,00	(51.900.000,00)	66,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	82.900.000,00	78.750.000,00	(4.150.000,00)	94,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	82.900.000,00	78.750.000,00	(4.150.000,00)	94,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.900.000,00	78.750.000,00	(4.150.000,00)	94,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	72.900.000,00	25.150.000,00	(47.750.000,00)	34,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.900.000,00	25.150.000,00	(47.750.000,00)	34,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	25.150.000,00	(47.750.000,00)	34,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.1.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	548.150.000,00	481.400.000,00	(66.750.000,00)	87,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	135.150.000,00	127.800.000,00	(7.350.000,00)	94,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.01.0001		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	90.200.000,00	88.100.000,00	(2.100.000,00)	97,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	90.200.000,00	88.100.000,00	(2.100.000,00)	97,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.200.000,00	88.100.000,00	(2.100.000,00)	97,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.01.0002		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	44.950.000,00	39.700.000,00	(5.250.000,00)	88,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.950.000,00	39.700.000,00	(5.250.000,00)	88,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.950.000,00	39.700.000,00	(5.250.000,00)	88,32	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	413.000.000,00	353.600.000,00	(59.400.000,00)	85,61	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	111.800.000,00	70.150.000,00	(41.650.000,00)	62,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	111.800.000,00	70.150.000,00	(41.650.000,00)	62,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.800.000,00	70.150.000,00	(41.650.000,00)	62,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	126.400.000,00	126.000.000,00	(400.000,00)	99,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	126.400.000,00	126.000.000,00	(400.000,00)	99,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.400.000,00	126.000.000,00	(400.000,00)	99,68	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	84.900.000,00	70.550.000,00	(14.350.000,00)	83,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	84.900.000,00	70.550.000,00	(14.350.000,00)	83,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.900.000,00	70.550.000,00	(14.350.000,00)	83,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0004		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	89.900.000,00	86.900.000,00	(3.000.000,00)	96,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.900.000,00	86.900.000,00	(3.000.000,00)	96,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.900.000,00	86.900.000,00	(3.000.000,00)	96,66	
				JUMLAH BELANJA	6.236.513.580,00	5.716.178.643,00	(520.334.937,00)	91,65	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.236.513.580,00)	(5.716.178.643,00)	520.334.937,00	91,65	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.236.513.580,00)	(5.716.178.643,00)	520.334.937,00	91,65	

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Banggae

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000		5	BELANJA DAERAH	6.781.820.671,00	6.622.868.169,00	(158.952.502,00)	97,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.172.313.671,00	5.046.939.492,00	(125.374.179,00)	97,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.342.750,00	6.126.900,00	(215.850,00)	96,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.558.000,00	2.557.000,00	(1.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.558.000,00	2.557.000,00	(1.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.558.000,00	2.557.000,00	(1.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	329.500,00	329.000,00	(500,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	329.500,00	329.000,00	(500,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.500,00	329.000,00	(500,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	440.000,00	360.000,00	(80.000,00)	81,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	440.000,00	360.000,00	(80.000,00)	81,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	360.000,00	(80.000,00)	81,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	424.750,00	401.000,00	(23.750,00)	94,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	424.750,00	401.000,00	(23.750,00)	94,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.750,00	401.000,00	(23.750,00)	94,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	296.000,00	295.900,00	(100,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	296.000,00	295.900,00	(100,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.000,00	295.900,00	(100,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.060.000,00	957.000,00	(103.000,00)	90,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.060.000,00	957.000,00	(103.000,00)	90,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000,00	957.000,00	(103.000,00)	90,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.234.500,00	1.227.000,00	(7.500,00)	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.234.500,00	1.227.000,00	(7.500,00)	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.234.500,00	1.227.000,00	(7.500,00)	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.977.307.581,00	4.860.479.202,00	(116.828.379,00)	97,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.573.157.331,00	4.491.949.302,00	(81.208.029,00)	98,22	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.573.157.331,00	4.491.949.302,00	(81.208.029,00)	98,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.573.157.331,00	4.491.949.302,00	(81.208.029,00)	98,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	400.350.000,00	365.425.000,00	(34.925.000,00)	91,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	400.350.000,00	365.425.000,00	(34.925.000,00)	91,27	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.350.000,00	365.425.000,00	(34.925.000,00)	91,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.800.250,00	3.104.900,00	(695.350,00)	81,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.800.250,00	3.104.900,00	(695.350,00)	81,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.250,00	3.104.900,00	(695.350,00)	81,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	105.298.975,00	101.270.500,00	(4.028.475,00)	96,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	481.475,00	480.000,00	(1.475,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	481.475,00	480.000,00	(1.475,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.475,00	480.000,00	(1.475,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	27.798.000,00	26.295.500,00	(1.502.500,00)	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.798.000,00	26.295.500,00	(1.502.500,00)	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.798.000,00	26.295.500,00	(1.502.500,00)	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.370.000,00	11.910.500,00	(459.500,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.370.000,00	11.910.500,00	(459.500,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.370.000,00	11.910.500,00	(459.500,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	33.576.500,00	33.226.900,00	(349.600,00)	98,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	33.576.500,00	33.226.900,00	(349.600,00)	98,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.576.500,00	33.226.900,00	(349.600,00)	98,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	31.073.000,00	29.357.600,00	(1.715.400,00)	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	31.073.000,00	29.357.600,00	(1.715.400,00)	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.073.000,00	29.357.600,00	(1.715.400,00)	94,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	21.477.499,00	20.500.000,00	(977.499,00)	95,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.977.499,00	13.000.000,00	(977.499,00)	93,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	13.977.499,00	13.000.000,00	(977.499,00)	93,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.977.499,00	13.000.000,00	(977.499,00)	93,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.099.266,00	22.367.090,00	(1.732.176,00)	92,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.423.100,00	3.415.600,00	(7.500,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.423.100,00	3.415.600,00	(7.500,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.423.100,00	3.415.600,00	(7.500,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.676.166,00	18.951.490,00	(1.724.676,00)	91,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.676.166,00	18.951.490,00	(1.724.676,00)	91,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.676.166,00	18.951.490,00	(1.724.676,00)	91,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.787.600,00	36.195.800,00	(1.591.800,00)	95,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	16.799.600,00	15.211.800,00	(1.587.800,00)	90,54	

KODE REKENING					URAIAN		JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
							ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1		BELANJA OPERASI		16.799.600,00	15.211.800,00	(1.587.800,00)	90,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		16.799.600,00	15.211.800,00	(1.587.800,00)	90,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0006			PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		5.918.000,00	5.914.000,00	(4.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1		BELANJA OPERASI		5.918.000,00	5.914.000,00	(4.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		5.918.000,00	5.914.000,00	(4.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0009			PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA		15.070.000,00	15.070.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1		BELANJA OPERASI		15.070.000,00	15.070.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		15.070.000,00	15.070.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.1.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.000,00	-	(11.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01			KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN		11.000,00	-	(11.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0001			KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT		11.000,00	-	(11.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI		11.000,00	-	(11.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		11.000,00	-	(11.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.1.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.537.496.000,00	1.509.928.677,00	(27.567.323,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.01			KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA		1.496.000,00	549.500,00	(946.500,00)	36,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.01.0003			PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN		1.496.000,00	549.500,00	(946.500,00)	36,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1		BELANJA OPERASI		1.496.000,00	549.500,00	(946.500,00)	36,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		1.496.000,00	549.500,00	(946.500,00)	36,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02			KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN		1.536.000.000,00	1.509.379.177,00	(26.620.823,00)	98,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.0002			PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN		1.016.463.640,00	1.011.849.177,00	(4.614.463,00)	99,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1		BELANJA OPERASI		904.083.375,00	900.083.277,00	(4.000.098,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		904.083.375,00	900.083.277,00	(4.000.098,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2		BELANJA MODAL		112.380.265,00	111.765.900,00	(614.365,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		112.380.265,00	111.765.900,00	(614.365,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.0003			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN		519.536.360,00	497.530.000,00	(22.006.360,00)	95,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1		BELANJA OPERASI		483.536.360,00	461.530.000,00	(22.006.360,00)	95,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		483.536.360,00	461.530.000,00	(22.006.360,00)	95,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.0003	5.2		BELANJA MODAL		36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.0003	5.2.02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.1.04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		72.000.000,00	66.000.000,00	(6.000.000,00)	91,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.01			KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		72.000.000,00	66.000.000,00	(6.000.000,00)	91,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.01.0002			HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT		72.000.000,00	66.000.000,00	(6.000.000,00)	91,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1		BELANJA OPERASI		72.000.000,00	66.000.000,00	(6.000.000,00)	91,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		72.000.000,00	66.000.000,00	(6.000.000,00)	91,66	
					JUMLAH BELANJA		6.781.820.671,00	6.622.868.169,00	(158.952.502,00)	97,65	
					SURPLUS / (DEFISIT)		(6.781.820.671,00)	(6.622.868.169,00)	158.952.502,00	97,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.781.820.671,00)	(6.622.868.169,00)	158.952.502,00	97,65	



PEMERINTAH KAB. MAJENE
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Banggae Timur

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000		5	BELANJA DAERAH	7.854.008.117,00	7.507.427.418,00	(346.580.699,00)	95,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.735.108.117,00	5.478.309.904,00	(256.798.213,00)	95,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.065.000,00	5.829.000,00	(4.236.000,00)	57,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	1.999.000,00	(1.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.999.000,00	(1.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.999.000,00	(1.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.000.000,00	1.035.000,00	(965.000,00)	51,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.035.000,00	(965.000,00)	51,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.035.000,00	(965.000,00)	51,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	799.000,00	796.000,00	(3.000,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	799.000,00	796.000,00	(3.000,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	799.000,00	796.000,00	(3.000,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.301.000,00	1.999.000,00	(2.302.000,00)	46,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.301.000,00	1.999.000,00	(2.302.000,00)	46,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.301.000,00	1.999.000,00	(2.302.000,00)	46,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	965.000,00	0,00	(965.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	965.000,00	0,00	(965.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	965.000,00	0,00	(965.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.604.976.789,00	5.383.112.948,00	(221.863.841,00)	96,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.166.976.789,00	5.033.762.948,00	(133.213.841,00)	97,42	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.166.976.789,00	5.033.762.948,00	(133.213.841,00)	97,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.166.976.789,00	5.033.762.948,00	(133.213.841,00)	97,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	433.700.000,00	347.350.000,00	(86.350.000,00)	80,08	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	433.700.000,00	347.350.000,00	(86.350.000,00)	80,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.700.000,00	347.350.000,00	(86.350.000,00)	80,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	3.300.000,00	1.000.000,00	(2.300.000,00)	30,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	1.000.000,00	(2.300.000,00)	30,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	1.000.000,00	(2.300.000,00)	30,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	61.778.750,00	46.889.924,00	(14.888.826,00)	75,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.408.750,00	2.304.500,00	(104.250,00)	95,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.408.750,00	2.304.500,00	(104.250,00)	95,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.408.750,00	2.304.500,00	(104.250,00)	95,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	6.418.000,00	5.330.500,00	(1.087.500,00)	83,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.418.000,00	5.330.500,00	(1.087.500,00)	83,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.418.000,00	5.330.500,00	(1.087.500,00)	83,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.030.000,00	7.463.924,00	(566.076,00)	92,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.030.000,00	7.463.924,00	(566.076,00)	92,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	7.463.924,00	(566.076,00)	92,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.642.000,00	4.642.000,00	(1.000.000,00)	82,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.642.000,00	4.642.000,00	(1.000.000,00)	82,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.642.000,00	4.642.000,00	(1.000.000,00)	82,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	39.280.000,00	27.149.000,00	(12.131.000,00)	69,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	39.280.000,00	27.149.000,00	(12.131.000,00)	69,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.280.000,00	27.149.000,00	(12.131.000,00)	69,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	43.927.078,00	31.697.232,00	(12.229.846,00)	72,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	19.984.530,00	17.206.584,00	(2.777.946,00)	86,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.984.530,00	17.206.584,00	(2.777.946,00)	86,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.984.530,00	17.206.584,00	(2.777.946,00)	86,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.642.048,00	7.478.448,00	(9.163.600,00)	44,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.642.048,00	7.478.448,00	(9.163.600,00)	44,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.642.048,00	7.478.448,00	(9.163.600,00)	44,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.300.500,00	7.012.200,00	(288.300,00)	96,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.300.500,00	7.012.200,00	(288.300,00)	96,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.500,00	7.012.200,00	(288.300,00)	96,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.360.500,00	9.780.800,00	(3.579.700,00)	73,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	10.270.500,00	8.290.800,00	(1.979.700,00)	80,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.270.500,00	8.290.800,00	(1.979.700,00)	80,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.270.500,00	8.290.800,00	(1.979.700,00)	80,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.610.000,00	610.000,00	(1.000.000,00)	37,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.610.000,00	610.000,00	(1.000.000,00)	37,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.000,00	610.000,00	(1.000.000,00)	37,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.480.000,00	880.000,00	(600.000,00)	59,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.480.000,00	880.000,00	(600.000,00)	59,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.000,00	880.000,00	(600.000,00)	59,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.080.500.000,00	1.999.717.514,00	(80.782.486,00)	96,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	2.080.500.000,00	1.999.717.514,00	(80.782.486,00)	96,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	1.600.000.000,00	1.577.217.514,00	(22.782.486,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000.000,00	1.577.217.514,00	(22.782.486,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000.000,00	1.577.217.514,00	(22.782.486,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	480.000.000,00	422.000.000,00	(58.000.000,00)	87,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	480.000.000,00	422.000.000,00	(58.000.000,00)	87,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	480.000.000,00	422.000.000,00	(58.000.000,00)	87,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.400.000,00	29.400.000,00	(9.000.000,00)	76,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.400.000,00	29.400.000,00	(9.000.000,00)	76,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	38.400.000,00	29.400.000,00	(9.000.000,00)	76,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.400.000,00	29.400.000,00	(9.000.000,00)	76,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	29.400.000,00	(9.000.000,00)	76,56	
				JUMLAH BELANJA	7.854.008.117,00	7.507.427.418,00	(346.580.699,00)	95,58	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.854.008.117,00)	(7.507.427.418,00)	346.580.699,00	95,58	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.854.008.117,00)	(7.507.427.418,00)	346.580.699,00	95,58	



PEMERINTAH KAB. MAJENE

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Pamboang

KODE REKENING					JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000		5	BELANJA DAERAH	2.565.031.458,00	2.451.915.205,00	(113.116.253,00)	95,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.555.048.458,00	2.447.607.205,00	(107.441.253,00)	95,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.468.129.540,00	2.378.352.165,00	(89.777.375,00)	96,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.444.729.540,00	2.356.752.165,00	(87.977.375,00)	96,40	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.444.729.540,00	2.356.752.165,00	(87.977.375,00)	96,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.444.729.540,00	2.356.752.165,00	(87.977.375,00)	96,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	23.400.000,00	21.600.000,00	(1.800.000,00)	92,30	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	21.600.000,00	(1.800.000,00)	92,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	21.600.000,00	(1.800.000,00)	92,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	12.073.000,00	5.220.000,00	(6.853.000,00)	43,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.293.000,00	2.500.000,00	(2.793.000,00)	47,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.293.000,00	2.500.000,00	(2.793.000,00)	47,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.293.000,00	2.500.000,00	(2.793.000,00)	47,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	6.780.000,00	2.720.000,00	(4.060.000,00)	40,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.780.000,00	2.720.000,00	(4.060.000,00)	40,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	2.720.000,00	(4.060.000,00)	40,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	62.569.018,00	55.575.040,00	(6.993.978,00)	88,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.069.000,00	9.422.900,00	(646.100,00)	93,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.069.000,00	9.422.900,00	(646.100,00)	93,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.069.000,00	9.422.900,00	(646.100,00)	93,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.400.018,00	5.352.140,00	(3.047.878,00)	63,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.018,00	5.352.140,00	(3.047.878,00)	63,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.018,00	5.352.140,00	(3.047.878,00)	63,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	44.100.000,00	40.800.000,00	(3.300.000,00)	92,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.100.000,00	40.800.000,00	(3.300.000,00)	92,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	40.800.000,00	(3.300.000,00)	92,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.276.900,00	8.460.000,00	(1.816.900,00)	82,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	5.350.500,00	3.684.000,00	(1.666.500,00)	68,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.350.500,00	3.684.000,00	(1.666.500,00)	68,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.350.500,00	3.684.000,00	(1.666.500,00)	68,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	1.226.400,00	1.128.000,00	(98.400,00)	91,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.226.400,00	1.128.000,00	(98.400,00)	91,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.226.400,00	1.128.000,00	(98.400,00)	91,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	3.700.000,00	3.648.000,00	(52.000,00)	98,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	3.648.000,00	(52.000,00)	98,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.648.000,00	(52.000,00)	98,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.382.000,00	1.353.000,00	(29.000,00)	97,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	1.382.000,00	1.353.000,00	(29.000,00)	97,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	1.382.000,00	1.353.000,00	(29.000,00)	97,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.382.000,00	1.353.000,00	(29.000,00)	97,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.382.000,00	1.353.000,00	(29.000,00)	97,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.101.000,00	2.955.000,00	(3.146.000,00)	48,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	6.101.000,00	2.955.000,00	(3.146.000,00)	48,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	3.140.000,00	-	(3.140.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.140.000,00	-	(3.140.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.140.000,00	-	(3.140.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL	2.961.000,00	2.955.000,00	(6.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.961.000,00	2.955.000,00	(6.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.961.000,00	2.955.000,00	(6.000,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01.0018		KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	-	
				JUMLAH BELANJA	2.565.031.458,00	2.451.915.205,00	(113.116.253,00)	95,59	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.565.031.458,00)	(2.451.915.205,00)	113.116.253,00	95,59	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.565.031.458,00)	(2.451.915.205,00)	113.116.253,00	95,59	



PEMERINTAH KAB. MAJENE

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025



Usuran Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : KECAMATAN

Organisasi : Kecamatan Sendana

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000		5		BELANJA DAERAH	3.600.831.614,00	3.378.036.061,00	(222.795.553,00)	93,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.1.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.984.164.614,00	2.813.346.461,00	(170.818.153,00)	94,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.898.000,00	8.827.000,00	(71.000,00)	99,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0001			PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.483.000,00	1.455.000,00	(28.000,00)	98,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1		BELANJA OPERASI	1.483.000,00	1.455.000,00	(28.000,00)	98,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.483.000,00	1.455.000,00	(28.000,00)	98,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0002			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.483.000,00	1.483.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1		BELANJA OPERASI	1.483.000,00	1.483.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.483.000,00	1.483.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0003			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.483.000,00	1.468.000,00	(15.000,00)	98,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1		BELANJA OPERASI	1.483.000,00	1.468.000,00	(15.000,00)	98,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.483.000,00	1.468.000,00	(15.000,00)	98,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0004			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.483.000,00	1.455.000,00	(28.000,00)	98,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1		BELANJA OPERASI	1.483.000,00	1.455.000,00	(28.000,00)	98,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.483.000,00	1.455.000,00	(28.000,00)	98,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0007			EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.966.000,00	2.966.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1		BELANJA OPERASI	2.966.000,00	2.966.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.966.000,00	2.966.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.833.896.109,00	2.689.476.861,00	(144.419.248,00)	94,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001			PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.734.596.109,00	2.615.976.861,00	(118.619.248,00)	95,66	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	2.734.596.109,00	2.615.976.861,00	(118.619.248,00)	95,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	2.734.596.109,00	2.615.976.861,00	(118.619.248,00)	95,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0002			PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	99.300.000,00	73.500.000,00	(25.800.000,00)	74,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1		BELANJA OPERASI	99.300.000,00	73.500.000,00	(25.800.000,00)	74,01	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	99.300.000,00	73.500.000,00	(25.800.000,00)	74,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.450.000,00	-	(2.450.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05.0002			PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	2.450.000,00	-	(2.450.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1		BELANJA OPERASI	2.450.000,00	-	(2.450.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	-	(2.450.000,00)	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	39.157.500,00	27.325.600,00	(11.831.900,00)	69,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	741.000,00	697.000,00	(44.000,00)	94,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	741.000,00	697.000,00	(44.000,00)	94,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.000,00	697.000,00	(44.000,00)	94,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.075.000,00	1.075.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.075.000,00	1.075.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.000,00	1.075.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.596.000,00	1.587.000,00	(9.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.596.000,00	1.587.000,00	(9.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.596.000,00	1.587.000,00	(9.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.873.000,00	3.806.600,00	(66.400,00)	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.873.000,00	3.806.600,00	(66.400,00)	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.873.000,00	3.806.600,00	(66.400,00)	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	1.740.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	30.132.500,00	18.420.000,00	(11.712.500,00)	61,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.132.500,00	18.420.000,00	(11.712.500,00)	61,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.132.500,00	18.420.000,00	(11.712.500,00)	61,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	76.481.005,00	64.435.000,00	(12.046.005,00)	84,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.194.000,00	3.194.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.194.000,00	3.194.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.194.000,00	3.194.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	11.187.005,00	9.041.000,00	(2.146.005,00)	80,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.187.005,00	9.041.000,00	(2.146.005,00)	80,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.187.005,00	9.041.000,00	(2.146.005,00)	80,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	62.100.000,00	52.200.000,00	(9.900.000,00)	84,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	62.100.000,00	52.200.000,00	(9.900.000,00)	84,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.100.000,00	52.200.000,00	(9.900.000,00)	84,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.082.000,00	14.082.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN	1.092.000,00	1.092.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.092.000,00	1.092.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.092.000,00	1.092.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN	12.990.000,00	12.990.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.990.000,00	12.990.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.990.000,00	12.990.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	588.625.000,00	541.089.600,00	(47.535.400,00)	91,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	7.680.000,00	7.280.000,00	(400.000,00)	94,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	7.680.000,00	7.280.000,00	(400.000,00)	94,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.680.000,00	7.280.000,00	(400.000,00)	94,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	7.280.000,00	(400.000,00)	94,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	580.945.000,00	533.809.600,00	(47.135.400,00)	91,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN	945.000,00	945.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	945.000,00	945.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	945.000,00	945.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	400.000.000,00	397.864.600,00	(2.135.400,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	397.864.600,00	(2.135.400,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	397.864.600,00	(2.135.400,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.02.0003		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	180.000.000,00	135.000.000,00	(45.000.000,00)	75,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	135.000.000,00	(45.000.000,00)	75,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	135.000.000,00	(45.000.000,00)	75,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.042.000,00	23.600.000,00	(4.442.000,00)	84,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	28.042.000,00	23.600.000,00	(4.442.000,00)	84,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN	14.494.000,00	12.940.000,00	(1.554.000,00)	89,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.494.000,00	12.940.000,00	(1.554.000,00)	89,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.494.000,00	12.940.000,00	(1.554.000,00)	89,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0004		PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN	7.788.000,00	7.780.000,00	(8.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.788.000,00	7.780.000,00	(8.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.788.000,00	7.780.000,00	(8.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	5.760.000,00	2.880.000,00	(2.880.000,00)	50,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.760.000,00	2.880.000,00	(2.880.000,00)	50,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	2.880.000,00	(2.880.000,00)	50,00	
				JUMLAH BELANJA	3.600.831.614,00	3.378.036.061,00	(222.795.553,00)	93,81	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.600.831.614,00)	(3.378.036.061,00)	222.795.553,00	93,81	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.600.831.614,00)	(3.378.036.061,00)	222.795.553,00	93,81	



PEMERINTAH KAB. MAJENE

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tammerodo

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
						ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000		5		BELANJA DAERAH	1.118.245.335,00	1.000.839.035,00	(117.406.300,00)	89,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.1.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.098.812.335,00	981.406.035,00	(117.406.300,00)	89,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0004			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1		BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.023.719.735,00	924.434.535,00	(99.285.200,00)	90,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001			PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	939.119.735,00	857.234.535,00	(81.885.200,00)	91,28	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1		BELANJA OPERASI	939.119.735,00	857.234.535,00	(81.885.200,00)	91,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01		Belanja Pegawai	939.119.735,00	857.234.535,00	(81.885.200,00)	91,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0002			PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	84.600.000,00	67.200.000,00	(17.400.000,00)	79,43	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1		BELANJA OPERASI	84.600.000,00	67.200.000,00	(17.400.000,00)	79,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	84.600.000,00	67.200.000,00	(17.400.000,00)	79,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	13.600.000,00	3.680.000,00	(9.920.000,00)	27,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002			PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1		BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1		BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0006			PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1		BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0008			FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	790.000,00	790.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1		BELANJA OPERASI	790.000,00	790.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	790.000,00	790.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0009			PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	11.310.000,00	1.390.000,00	(9.920.000,00)	12,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1		BELANJA OPERASI	11.310.000,00	1.390.000,00	(9.920.000,00)	12,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	11.310.000,00	1.390.000,00	(9.920.000,00)	12,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	55.879.000,00	47.678.500,00	(8.200.500,00)	85,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.188.000,00	1.188.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.188.000,00	1.188.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.188.000,00	1.188.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.451.000,00	9.440.500,00	(10.500,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.451.000,00	9.440.500,00	(10.500,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.451.000,00	9.440.500,00	(10.500,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	45.240.000,00	37.050.000,00	(8.190.000,00)	81,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	45.240.000,00	37.050.000,00	(8.190.000,00)	81,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.240.000,00	37.050.000,00	(8.190.000,00)	81,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.613.600,00	4.613.000,00	(600,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	4.613.600,00	4.613.000,00	(600,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.613.600,00	4.613.000,00	(600,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.613.600,00	4.613.000,00	(600,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.990.000,00	9.990.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	9.990.000,00	9.990.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	9.990.000,00	9.990.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.990.000,00	9.990.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.990.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.443.000,00	9.443.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	9.443.000,00	9.443.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	9.443.000,00	9.443.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.443.000,00	9.443.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.443.000,00	9.443.000,00	-	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.118.245.335,00	1.000.839.035,00	(117.406.300,00)	89,50	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.118.245.335,00)	(1.000.839.035,00)	117.406.300,00	89,50	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.118.245.335,00)	(1.000.839.035,00)	117.406.300,00	89,50	



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tubo Sendana

PEMERINTAH KAB. MAJENE

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025



KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000		5	BELANJA DAERAH	1.770.677.541,00	1.623.036.894,00	(147.640.647,00)	91,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.766.087.541,00	1.623.036.894,00	(143.050.647,00)	91,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	672.000,00	-	(672.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	-	(600.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	72.000,00	-	(72.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	72.000,00	-	(72.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000,00	-	(72.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.703.984.080,00	1.602.085.894,00	(101.898.186,00)	94,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.596.584.080,00	1.519.345.894,00	(77.238.186,00)	95,16	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.596.584.080,00	1.519.345.894,00	(77.238.186,00)	95,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.596.584.080,00	1.519.345.894,00	(77.238.186,00)	95,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	107.000.000,00	82.740.000,00	(24.260.000,00)	77,32	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	107.000.000,00	82.740.000,00	(24.260.000,00)	77,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.000.000,00	82.740.000,00	(24.260.000,00)	77,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	-	(400.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	36.168.500,00	8.320.000,00	(27.848.500,00)	23,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	161.500,00	150.000,00	(11.500,00)	92,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	161.500,00	150.000,00	(11.500,00)	92,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.500,00	150.000,00	(11.500,00)	92,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.102.000,00	2.070.000,00	(32.000,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.102.000,00	2.070.000,00	(32.000,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.102.000,00	2.070.000,00	(32.000,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	31.805.000,00	4.000.000,00	(27.805.000,00)	12,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	31.805.000,00	4.000.000,00	(27.805.000,00)	12,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.805.000,00	4.000.000,00	(27.805.000,00)	12,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.987.136,00	12.631.000,00	(9.356.136,00)	57,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.987.136,00	12.631.000,00	(9.356.136,00)	57,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.987.136,00	12.631.000,00	(9.356.136,00)	57,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.987.136,00	12.631.000,00	(9.356.136,00)	57,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.275.825,00	-	(3.275.825,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.900.000,00	-	(1.900.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	-	(1.900.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	-	(1.900.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.375.825,00	-	(1.375.825,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.375.825,00	-	(1.375.825,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.375.825,00	-	(1.375.825,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.010.000,00	-	(2.010.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	2.010.000,00	-	(2.010.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	2.010.000,00	-	(2.010.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.010.000,00	-	(2.010.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	-	(2.010.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.020.000,00	-	(2.020.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	2.020.000,00	-	(2.020.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	2.020.000,00	-	(2.020.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.020.000,00	-	(2.020.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.020.000,00	-	(2.020.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	560.000,00	-	(560.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	560.000,00	-	(560.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	560.000,00	-	(560.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	560.000,00	-	(560.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.000,00	-	(560.000,00)	-	
				JUMLAH BELANJA	1.770.677.541,00	1.623.036.894,00	(147.640.647,00)	91,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.770.677.541,00)	(1.623.036.894,00)	147.640.647,00	91,66	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.770.677.541,00)	(1.623.036.894,00)	147.640.647,00	91,66	



PEMERINTAH KAB. MAJENE

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : KECAMATAN

Organisasi : Kecamatan Ulumanda

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000		5	BELANJA DAERAH	1.473.188.096,00	1.290.084.132,00	(183.103.964,00)	87,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.473.188.096,00	1.290.084.132,00	(183.103.964,00)	87,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.196.000,00	1.196.000,00	(1.000.000,00)	54,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.196.000,00	1.196.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.196.000,00	1.196.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.196.000,00	1.196.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.425.015.996,00	1.266.605.132,00	(158.410.864,00)	88,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.330.910.996,00	1.193.650.132,00	(137.260.864,00)	89,68	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.330.910.996,00	1.193.650.132,00	(137.260.864,00)	89,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.330.910.996,00	1.193.650.132,00	(137.260.864,00)	89,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	91.800.000,00	70.650.000,00	(21.150.000,00)	76,96	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	91.800.000,00	70.650.000,00	(21.150.000,00)	76,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.800.000,00	70.650.000,00	(21.150.000,00)	76,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.305.000,00	2.305.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.305.000,00	2.305.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.305.000,00	2.305.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	26.000.000,00	13.820.000,00	(12.180.000,00)	53,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	240.000,00	-	(240.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	240.000,00	-	(240.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000,00	-	(240.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	990.000,00	-	(990.000,00)	-	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	990.000,00	-	(990.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	-	(990.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	23.270.000,00	12.320.000,00	(10.950.000,00)	52,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.270.000,00	12.320.000,00	(10.950.000,00)	52,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.270.000,00	12.320.000,00	(10.950.000,00)	52,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.300.000,00	2.298.000,00	(2.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.300.000,00	2.298.000,00	(2.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.300.000,00	2.298.000,00	(2.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.298.000,00	(2.000,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.676.100,00	6.165.000,00	(2.511.100,00)	71,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	8.676.100,00	6.165.000,00	(2.511.100,00)	71,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.676.100,00	6.165.000,00	(2.511.100,00)	71,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.676.100,00	6.165.000,00	(2.511.100,00)	71,05	
				JUMLAH BELANJA	1.473.188.096,00	1.290.084.132,00	(183.103.964,00)	87,57	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.473.188.096,00)	(1.290.084.132,00)	183.103.964,00	87,57	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.473.188.096,00)	(1.290.084.132,00)	183.103.964,00	87,57	

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Malunda

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000		5	BELANJA DAERAH	3.531.156.367,00	3.302.962.140,00	(228.194.227,00)	93,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.858.361.367,00	2.693.197.240,00	(165.164.127,00)	94,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.310.000,00	3.774.000,00	(3.536.000,00)	51,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.768.000,00	-	(1.768.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.768.000,00	-	(1.768.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.768.000,00	-	(1.768.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.768.000,00	1.768.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.768.000,00	1.768.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.768.000,00	1.768.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.006.000,00	2.006.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.006.000,00	2.006.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.006.000,00	2.006.000,00	-	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.768.000,00	-	(1.768.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.768.000,00	-	(1.768.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.768.000,00	-	(1.768.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.651.621.035,00	2.546.821.740,00	(104.799.295,00)	96,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.573.621.035,00	2.487.421.740,00	(86.199.295,00)	96,65	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.573.621.035,00	2.487.421.740,00	(86.199.295,00)	96,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.573.621.035,00	2.487.421.740,00	(86.199.295,00)	96,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	78.000.000,00	59.400.000,00	(18.600.000,00)	76,15	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.000.000,00	59.400.000,00	(18.600.000,00)	76,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	59.400.000,00	(18.600.000,00)	76,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	36.363.500,00	27.707.000,00	(8.656.500,00)	76,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.441.500,00	4.414.000,00	(27.500,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.441.500,00	4.414.000,00	(27.500,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.441.500,00	4.414.000,00	(27.500,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	7.552.000,00	5.993.000,00	(1.559.000,00)	79,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.552.000,00	5.993.000,00	(1.559.000,00)	79,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.552.000,00	5.993.000,00	(1.559.000,00)	79,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	24.370.000,00	17.300.000,00	(7.070.000,00)	70,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	24.370.000,00	17.300.000,00	(7.070.000,00)	70,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.370.000,00	17.300.000,00	(7.070.000,00)	70,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	157.841.832,00	110.039.500,00	(47.802.332,00)	69,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	13.554.150,00	12.906.500,00	(647.650,00)	95,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.554.150,00	12.906.500,00	(647.650,00)	95,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.554.150,00	12.906.500,00	(647.650,00)	95,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.887.682,00	4.583.000,00	(17.304.682,00)	20,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.887.682,00	4.583.000,00	(17.304.682,00)	20,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.887.682,00	4.583.000,00	(17.304.682,00)	20,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	122.400.000,00	92.550.000,00	(29.850.000,00)	75,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	122.400.000,00	92.550.000,00	(29.850.000,00)	75,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.400.000,00	92.550.000,00	(29.850.000,00)	75,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.225.000,00	4.855.000,00	(370.000,00)	92,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.225.000,00	4.855.000,00	(370.000,00)	92,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.225.000,00	4.855.000,00	(370.000,00)	92,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	4.855.000,00	(370.000,00)	92,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	672.795.000,00	609.764.900,00	(63.030.100,00)	90,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	800.000,00	-	(800.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	800.000,00	-	(800.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	-	(800.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	-	(800.000,00)	-	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	419.995.000,00	400.764.900,00	(19.230.100,00)	95,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.02.0002		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	419.995.000,00	400.764.900,00	(19.230.100,00)	95,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	381.730.000,00	372.994.900,00	(8.735.100,00)	97,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.730.000,00	372.994.900,00	(8.735.100,00)	97,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	38.265.000,00	27.770.000,00	(10.495.000,00)	72,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.265.000,00	27.770.000,00	(10.495.000,00)	72,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.03		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	252.000.000,00	209.000.000,00	(43.000.000,00)	82,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	252.000.000,00	209.000.000,00	(43.000.000,00)	82,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	252.000.000,00	209.000.000,00	(43.000.000,00)	82,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	209.000.000,00	(43.000.000,00)	82,93	
				JUMLAH BELANJA	3.531.156.367,00	3.302.962.140,00	(228.194.227,00)	93,53	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.531.156.367,00)	(3.302.962.140,00)	228.194.227,00	93,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.531.156.367,00)	(3.302.962.140,00)	228.194.227,00	93,53	



PEMERINTAH KAB. MAJENE

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025



Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000		5	BELANJA DAERAH	3.274.170.685,00	2.945.849.676,00	(328.321.009,00)	89,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.736.789.085,00	1.540.113.376,00	(196.675.709,00)	88,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.925.500,00	5.780.000,00	(15.145.500,00)	27,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.316.500,00	3.985.000,00	(5.331.500,00)	42,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.316.500,00	3.985.000,00	(5.331.500,00)	42,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.316.500,00	3.985.000,00	(5.331.500,00)	42,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.232.000,00	-	(2.232.000,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.232.000,00	-	(2.232.000,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.232.000,00	-	(2.232.000,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.512.000,00	970.000,00	(2.542.000,00)	27,61	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.512.000,00	970.000,00	(2.542.000,00)	27,61	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.512.000,00	970.000,00	(2.542.000,00)	27,61	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.865.000,00	825.000,00	(5.040.000,00)	14,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.865.000,00	825.000,00	(5.040.000,00)	14,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.865.000,00	825.000,00	(5.040.000,00)	14,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.591.617.114,00	1.453.498.660,00	(138.118.454,00)	91,32	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.502.161.614,00	1.377.072.660,00	(125.088.954,00)	91,67	PPN0.5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan Belas atas PP No.7 tahun 1997 tetang Peraturan Gaji PNS
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.502.161.614,00	1.377.072.660,00	(125.088.954,00)	91,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.502.161.614,00	1.377.072.660,00	(125.088.954,00)	91,67	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	84.000.000,00	75.600.000,00	(8.400.000,00)	90,00	Peraturan Daerah Kab. Majene No.5 tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kab.Majene TA 2025
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	75.600.000,00	(8.400.000,00)	90,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	75.600.000,00	(8.400.000,00)	90,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	1.995.500,00	640.000,00	(1.355.500,00)	32,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.995.500,00	640.000,00	(1.355.500,00)	32,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.995.500,00	640.000,00	(1.355.500,00)	32,07	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.460.000,00	186.000,00	(3.274.000,00)	5,37	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.460.000,00	186.000,00	(3.274.000,00)	5,37	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	186.000,00	(3.274.000,00)	5,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	35.460.131,00	15.119.000,00	(20.341.131,00)	42,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.471.131,00	-	(4.471.131,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.471.131,00	-	(4.471.131,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.471.131,00	-	(4.471.131,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	26.489.000,00	10.619.000,00	(15.870.000,00)	40,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	26.489.000,00	10.619.000,00	(15.870.000,00)	40,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.489.000,00	10.619.000,00	(15.870.000,00)	40,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.964.500,00	-	(1.964.500,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.964.500,00	-	(1.964.500,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.964.500,00	-	(1.964.500,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.964.500,00	-	(1.964.500,00)	-	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	72.249.680,00	56.791.716,00	(15.457.964,00)	78,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.249.680,00	22.141.716,00	(8.107.964,00)	73,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.249.680,00	22.141.716,00	(8.107.964,00)	73,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.249.680,00	22.141.716,00	(8.107.964,00)	73,19	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	42.000.000,00	34.650.000,00	(7.350.000,00)	82,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	34.650.000,00	(7.350.000,00)	82,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	34.650.000,00	(7.350.000,00)	82,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.572.160,00	8.924.000,00	(5.648.160,00)	61,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	14.572.160,00	8.924.000,00	(5.648.160,00)	61,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.572.160,00	8.924.000,00	(5.648.160,00)	61,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.572.160,00	8.924.000,00	(5.648.160,00)	61,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.1.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	541.397.700,00	428.008.900,00	(113.388.800,00)	79,05	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	541.397.700,00	428.008.900,00	(113.388.800,00)	79,05	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.02.2.01.0008		PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	526.403.200,00	413.014.400,00	(113.388.800,00)	78,45	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	526.403.200,00	413.014.400,00	(113.388.800,00)	78,45	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	526.403.200,00	413.014.400,00	(113.388.800,00)	78,45	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.02.2.01.0009		PEMBINAAN LANJUTAN KEPADA PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA	14.994.500,00	14.994.500,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	14.994.500,00	14.994.500,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.994.500,00	14.994.500,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.1.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	779.346.800,00	768.728.300,00	(10.618.500,00)	98,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	779.346.800,00	768.728.300,00	(10.618.500,00)	98,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.03.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	711.212.000,00	711.212.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	711.212.000,00	711.212.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	711.212.000,00	711.212.000,00	-	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.03.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	68.134.800,00	57.516.300,00	(10.618.500,00)	84,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	68.134.800,00	57.516.300,00	(10.618.500,00)	84,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.134.800,00	57.516.300,00	(10.618.500,00)	84,41	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.1.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	14.171.500,00	8.307.500,00	(5.864.000,00)	58,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.04.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	14.171.500,00	8.307.500,00	(5.864.000,00)	58,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.04.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	14.171.500,00	8.307.500,00	(5.864.000,00)	58,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.171.500,00	8.307.500,00	(5.864.000,00)	58,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.171.500,00	8.307.500,00	(5.864.000,00)	58,62	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.1.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS	202.465.600,00	200.691.600,00	(1.774.000,00)	99,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	202.465.600,00	200.691.600,00	(1.774.000,00)	99,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.06.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	202.465.600,00	200.691.600,00	(1.774.000,00)	99,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	202.465.600,00	200.691.600,00	(1.774.000,00)	99,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.465.600,00	200.691.600,00	(1.774.000,00)	99,12	
				JUMLAH BELANJA	3.274.170.685,00	2.945.849.676,00	(328.321.009,00)	89,97	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.274.170.685,00)	(2.945.849.676,00)	328.321.009,00	89,97	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.274.170.685,00)	(2.945.849.676,00)	328.321.009,00	89,97	



PEMERINTAHAN KAB. MAJENE
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025



Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	579.095.976.951,69	554.811.789.527,78	36.698.168.862,00	31.561.082.397,00	-	-	-	-
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	324.619.746.796,00	313.302.070.290,00	10.519.791.858,00	10.011.226.331,00		-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	324.619.746.796,00	313.302.070.290,00	10.519.791.858,00	10.011.226.331,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	279.822.363.656,00	269.541.144.915,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.205.500,00	33.205.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.089.500,00	9.089.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.716.500,00	7.716.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.393.500,00	7.393.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.006.000,00	9.005.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	279.617.193.121,00	269.339.118.825,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	279.583.976.121,00	269.305.994.825,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.579.000,00	9.549.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.059.000,00	13.999.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.579.000,00	9.576.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.089.500,00	13.089.300,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.496.000,00	3.496.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.593.500,00	2.593.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.499.800,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.743.115,00	121.652.290,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.743.115,00	116.652.290,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.132.420,00	29.079.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.607.420,00	27.554.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.525.000,00	1.525.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	44.539.188.540,00	43.608.302.475,00	10.519.791.858,00	10.011.226.331,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21.261.684.100,00	21.059.382.615,00	6.454.124.386,00	6.131.960.919,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	98.460.000,00	97.997.500,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	189.032.687,00	188.287.187,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	1.039.618.404,00	1.022.327.954,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	-	149.959.400,00	71.035.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	91.918.700,00	90.099.200,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	-	860.404.900,00	799.747.710,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	-	-	282.823.400,00	264.602.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	763.747.000,00	761.517.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	215.198.500,00	214.848.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	90.063.500,00	63.763.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.031.612.000,00	19.018.422.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	571.400.000,00	515.940.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	48.873.500,00	33.123.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.200.000.000,00	1.138.248.515,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	721.332.055,00	678.332.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	66.584.000,00	37.084.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	37.952.600,00	37.952.600,00	1.859.892.840,00	1.761.990.368,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	-	384.935.000,00	384.025.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.195.889.300,00	10.059.983.406,00	4.053.847.092,00	3.867.445.032,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	485.096.435,00	475.273.735,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	99.991.600,00	97.214.000,00	955.176.457,00	920.861.552,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	99.991.600,00	94.727.000,00	498.973.400,00	483.152.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	-	-	624.892.800,00	534.117.200,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	120.011.800,00	113.574.000,00	403.821.800,00	387.745.545,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	300.000.000,00	299.173.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	105.802.000,00	105.802.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	54.522.000,00	54.522.000,00	13.225.000,00	13.225.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.198.270.000,00	8.174.070.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	25.496.000,00	16.271.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	50.628.000,00	31.278.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.200.000.000,00	1.164.845.406,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	56.272.000,00	41.372.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0060	Kapasitas Bidang Pendidikan	14.943.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	69.961.300,00	66.308.000,00	349.861.200,00	331.267.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	-	422.800.000,00	422.630.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.233.730.140,00	8.849.242.454,00	4.814.380,00	4.814.380,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	752.697.525,00	737.259.655,00	4.814.380,00	4.814.380,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	99.155.000,00	98.805.200,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	318.792.000,00	316.696.518,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	222.551.000,00	203.151.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	209.398.000,00	191.989.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.003.896.000,00	4.758.948.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	44.978.250,00	44.978.250,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.200.000.000,00	1.137.052.223,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	728.126.000,00	725.873.554,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	21.858.250,00	18.558.250,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	332.297.845,00	324.686.930,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	299.980.270,00	291.243.874,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.847.885.000,00	3.639.694.000,00	7.006.000,00	7.006.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	315.000.000,00	310.478.100,00	7.006.000,00	7.006.000,00	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.486.640.000,00	3.282.970.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	46.245.000,00	46.245.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	109.162.600,00	47.419.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	109.162.600,00	47.419.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	109.162.600,00	47.419.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	109.321.000,00	105.203.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	109.321.000,00	105.203.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80.447.000,00	76.697.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.874.000,00	28.506.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	39.711.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	39.711.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	39.711.000,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	186.131.789.849,69	176.794.350.808,00	16.304.247.187,00	12.754.637.448,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		DINAS KESEHATAN	129.048.148.463,69	124.822.739.401,00	6.637.421.650,00	5.868.465.187,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.130.543.086,10	83.611.088.355,00	1.287.865.787,00	806.010.298,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.115.000,00	36.114.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.156.500,00	4.156.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.502.000,00	16.502.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.999.500,00	6.999.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.457.000,00	8.457.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.829.582.279,00	64.748.097.795,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64.882.692.279,00	63.855.257.795,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	943.950.000,00	889.900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.940.000,00	2.940.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.020.500,00	50.646.721,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.480.500,00	2.480.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.090.000,00	11.716.721,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.800.000,00	176.072.219,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.200.000,00	175.472.219,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.018.380,00	31.156.779,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.018.380,00	26.452.479,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	4.704.300,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	19.923.006.927,10	18.569.000.341,00	1.287.865.787,00	806.010.298,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	19.923.006.927,10	18.569.000.341,00	1.287.865.787,00	806.010.298,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	39.583.030.715,59	37.958.565.946,00	5.349.555.863,00	5.062.454.889,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.033.056.599,59	3.941.327.424,00	5.349.555.863,00	5.062.454.889,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	78.572.500,00	76.572.500,00	4.656.606.034,00	4.565.658.134,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	130.000.000,00	129.869.100,00	499.909.200,00	303.756.126,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	324.000.000,00	270.000.000,00	72.354.777,00	72.354.777,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	-	87.718.852,00	87.718.852,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	69.999.999,59	69.999.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.430.484.100,00	3.394.886.824,00	32.967.000,00	32.967.000,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.126.102.116,00	33.593.366.522,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.688.518.800,00	1.626.631.020,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	210.033.000,00	209.998.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	503.918.067,00	552.212.550,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.158.931.600,00	1.116.192.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	166.501.450,00	107.340.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	132.348.000,00	127.448.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	51.006.000,00	50.776.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	52.184.000,00	37.157.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	290.094.000,00	277.854.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	264.895.300,00	253.695.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	59.449.300,00	59.689.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.727.046.000,00	3.035.262.540,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	57.710.000,00	56.927.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	274.366.200,00	273.262.038,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	226.589.000,00	226.589.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	810.405.800,00	780.744.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	101.800.000,00	97.360.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0025	Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	816.924.000,00	801.824.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.212.725.500,00	11.212.725.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	7.500.000,00	1.085.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	8.617.583.324,00	8.473.043.039,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	442.964.500,00	300.562.840,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.438.978.000,00	2.217.991.581,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	336.958.275,00	273.878.414,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	49.920.000,00	49.920.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	299.942.000,00	290.692.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	207.910.000,00	207.670.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	357.755.000,00	331.116.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutanusiaan	114.830.000,00	113.330.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	443.115.000,00	427.190.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	423.872.000,00	423.872.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	423.872.000,00	423.872.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.160.712.000,00	2.104.712.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	96.128.000,00	96.128.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	96.128.000,00	96.128.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	1.194.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.200.000.000,00	1.144.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	814.584.000,00	814.584.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	814.584.000,00	814.584.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	354.629.000,00	354.627.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	163.097.600,00	163.096.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	163.097.600,00	163.096.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	191.531.400,00	191.531.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	191.531.400,00	191.531.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	819.233.662,00	793.745.300,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.983.800,00	220.983.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	220.983.800,00	220.983.800,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	598.249.862,00	572.761.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	598.249.862,00	572.761.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	57.083.641.386,00	51.971.611.407,00	9.666.825.537,00	6.886.172.261,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.442.641.386,00	50.522.611.407,00	3.285.670.037,00	533.391.673,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	55.442.641.386,00	50.522.611.407,00	3.285.670.037,00	533.391.673,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	55.442.641.386,00	50.522.611.407,00	3.285.670.037,00	533.391.673,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	6.381.155.500,00	6.352.780.588,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.381.155.500,00	6.352.780.588,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	-	6.381.155.500,00	6.352.780.588,00	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.641.000.000,00	1.449.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.641.000.000,00	1.449.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0001	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.641.000.000,00	1.449.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47.509.980.370,00	45.746.152.605,78	8.310.026.926,00	7.243.944.697,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	47.509.980.370,00	45.746.152.605,78	8.310.026.926,00	7.243.944.697,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.071.585.093,00	4.751.623.013,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.342.000,00	7.296.250,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.420.000,00	1.413.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	930.000,00	930.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.070.500,00	2.032.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.567.000,00	1.567.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	754.500,00	753.250,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.731.239.283,00	4.480.567.072,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.370.345.783,00	4.169.856.380,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	352.698.000,00	302.553.692,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.378.500,00	2.360.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.763.500,00	2.757.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.703.500,00	1.695.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.350.000,00	1.345.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.615.000,00	1.069.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	913.500,00	913.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	701.500,00	156.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.896.000,00	54.420.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	510.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.219.000,00	1.215.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.167.000,00	18.955.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.000.000,00	33.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.881.622,00	67.435.430,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.154.000,00	3.154.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.727.622,00	50.781.430,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.000.000,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.611.188,00	140.834.761,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.254.000,00	16.733.108,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	138.357.188,00	124.101.653,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.467.173.200,00	3.252.234.500,00	2.895.872.380,00	2.743.913.010,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.999.973.200,00	1.924.087.200,00	2.895.872.380,00	2.743.913.010,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	925.000.000,00	901.587.200,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	925.000.000,00	888.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	-	-	499.812.480,00	495.394.394,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	-	-	397.354.140,00	332.373.627,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	-	-	1.998.705.760,00	1.916.144.989,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	149.973.200,00	134.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.467.200.000,00	1.328.147.300,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.067.200.000,00	1.031.950.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	400.000.000,00	296.197.300,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.093.696.184,00	8.663.071.427,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.093.696.184,00	8.663.071.427,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	814.412.640,00	731.389.200,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	574.872.544,00	443.008.200,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.704.411.000,00	7.488.674.027,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	15.158.458.136,00	14.838.029.653,00	1.736.153.559,00	1.722.030.177,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.158.458.136,00	14.838.029.653,00	1.736.153.559,00	1.722.030.177,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	41.565.000,00	40.065.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	864.797.501,00	849.499.702,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	13.760.855.635,00	13.660.024.551,00	1.736.153.559,00	1.722.030.177,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.240.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	490.000.000,00	288.440.400,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.797.490.758,00	2.738.007.237,00	599.076.859,00	460.444.200,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.797.490.758,00	2.738.007.237,00	599.076.859,00	460.444.200,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	-	-	599.076.859,00	460.444.200,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	2.797.490.758,00	2.738.007.237,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6.917.912.001,00	6.679.575.968,00	287.503.200,00	274.480.608,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6.917.912.001,00	6.679.575.968,00	287.503.200,00	274.480.608,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.499.114.401,00	6.326.834.468,00	199.983.200,00	196.056.108,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	399.646.600,00	333.611.500,00	87.520.000,00	78.424.500,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	19.151.000,00	19.130.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.916.651.498,00	4.752.616.707,78	2.791.420.928,00	2.043.076.702,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	4.916.651.498,00	4.752.616.707,78	2.791.420.928,00	2.043.076.702,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	199.933.490,00	142.163.600,00	859.944.595,00	688.569.150,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	215.610.380,00	210.323.280,00	1.290.694.840,00	908.263.550,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	-	470.792.373,00	371.014.062,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	499.624.968,00	489.828.400,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	200.000.000,00	195.015.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	100.000.000,00	97.668.900,00	20.000.000,00	7.829.940,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	102.000.000,00	97.489.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	199.964.380,00	194.535.445,00	149.989.120,00	67.400.000,00	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.399.518.280,00	3.325.592.182,78	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	87.013.500,00	70.994.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	39.600.000,00	29.700.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	39.600.000,00	29.700.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	47.413.500,00	41.294.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	12.892.500,00	12.504.100,00	-	-	-	-	-	-
1.03	1.03.0.00.0.00.03.0000	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	34.521.000,00	28.790.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.468.369.530,00	7.331.391.526,00	785.102.891,00	772.274.891,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7.468.369.530,00	7.331.391.526,00	785.102.891,00	772.274.891,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.675.991.431,00	2.549.216.861,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.270.000,00	8.270.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.470.000,00	4.470.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.507.657.925,00	2.424.647.110,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.243.996.725,00	2.210.377.110,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	261.211.200,00	211.820.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.336.000,00	41.799.035,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.220.000,00	2.011.900,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	777.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.959.000,00	37.907.135,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.960.216,00	49.425.516,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.491.500,00	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.168.716,00	13.725.516,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.300.000,00	33.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.367.290,00	23.675.200,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.483.290,00	19.275.200,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.884.000,00	4.400.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	124.625.000,00	121.505.200,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15.244.000,00	13.764.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	9.387.000,00	7.907.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	5.857.000,00	5.857.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	235.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	235.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	9.146.000,00	7.741.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	9.146.000,00	7.741.200,00	-	-	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.207.140.583,00	1.201.882.449,00	259.421.891,00	259.421.891,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.207.140.583,00	1.201.882.449,00	259.421.891,00	259.421.891,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.207.140.583,00	1.201.882.449,00	259.421.891,00	259.421.891,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.460.612.516,00	3.458.787.016,00	525.681.000,00	512.853.000,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.460.612.516,00	3.458.787.016,00	525.681.000,00	512.853.000,00	-	-	-	-
1.04	1.04.2.10.0.00.03.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.460.612.516,00	3.458.787.016,00	525.681.000,00	512.853.000,00	-	-	-	-
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.614.655.004,00	10.119.808.221,00	779.000.000,00	778.999.030,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.058.520.298,00	4.749.551.938,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.008.885.798,00	4.716.191.938,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.567.000,00	838.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	526.500,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	448.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	390.800,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	540.500,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.902.470.398,00	4.657.483.819,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.414.670.398,00	4.214.983.819,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	487.800.000,00	442.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.819.000,00	26.470.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.380.000,00	380.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.439.000,00	26.090.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.286.000,00	17.489.219,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.340.000,00	1.775.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.946.000,00	15.714.219,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.743.400,00	13.910.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.743.400,00	13.910.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.634.500,00	33.360.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.634.500,00	33.360.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	14.880.000,00	10.560.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.552.000,00	12.960.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4.080.000,00	4.080.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.05.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	15.122.500,00	5.760.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.556.134.706,00	5.370.256.283,00	779.000.000,00	778.999.030,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.485.242.906,00	4.340.767.463,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.384.000,00	6.273.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.866.000,00	1.859.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.658.000,00	2.658.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.860.000,00	760.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	996.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.350.888.254,00	4.217.378.499,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.347.548.254,00	4.214.042.499,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.662.000,00	1.658.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.678.000,00	1.678.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.021.000,00	23.390.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.991.000,00	2.991.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.530.000,00	19.899.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.219.952,00	25.880.464,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.944.500,00	1.944.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.275.452,00	23.935.964,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.729.700,00	67.845.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.729.700,00	67.845.500,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	516.242.800,00	503.325.820,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	486.312.800,00	473.395.820,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	486.312.800,00	473.395.820,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	29.930.000,00	29.930.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	29.930.000,00	29.930.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.554.649.000,00	526.163.000,00	773.000.000,00	772.999.030,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.554.649.000,00	526.163.000,00	773.000.000,00	772.999.030,00	-	-	-	-
1.05	1.05.0.00.0.00.06.0000	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.554.649.000,00	526.163.000,00	773.000.000,00	772.999.030,00	-	-	-	-
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.751.435.402,00	1.518.016.077,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000		DINAS SOSIAL	1.751.435.402,00	1.518.016.077,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.367.757.814,00	1.265.489.997,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.677.500,00	4.317.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	885.000,00	885.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.350.000,00	990.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	864.500,00	864.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	660.000,00	660.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	462.000,00	462.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	456.000,00	456.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.251.699.566,00	1.179.224.406,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.158.938.316,00	1.102.263.156,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.100.000,00	76.300.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	172.500,00	172.500,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	488.750,00	488.750,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.452.000,00	1.452.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.452.000,00	1.452.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.311.650,00	16.549.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	977.650,00	965.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	95.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.989.000,00	1.982.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.100.000,00	12.852.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.072.018,00	54.260.211,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.072.018,00	19.610.211,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000,00	34.650.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.545.080,00	9.686.880,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000,00	6.446.800,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.035.000,00	730.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.510.080,00	2.510.080,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	270.317.588,00	193.486.080,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	50.437.500,00	38.760.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	4.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	4.797.500,00	1.380.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.860.000,00	37.380.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	219.880.088,00	154.726.080,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	38.000.000,00	34.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	97.920.000,00	51.978.800,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	61.960.088,00	46.747.280,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	63.360.000,00	59.040.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	63.360.000,00	59.040.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06	1.06.0.00.0.00.07.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	63.360.000,00	59.040.000,00	-	-	-	-	-	-
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	53.418.029.562,00	50.580.598.673,00	5.057.243.397,00	4.843.382.929,00	-	-	-	-
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.078.578.034,00	2.851.229.351,00	4.900.000,00	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.078.578.034,00	2.851.229.351,00	4.900.000,00	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.468.835.450,00	2.349.980.551,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.542.500,00	4.486.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	964.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.200.000,00	1.035.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	640.000,00	640.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	719.500,00	439.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	483.000,00	408.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.315.085.626,00	2.237.627.115,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.315.085.626,00	2.237.627.115,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.631.980,00	36.452.672,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.241.980,00	1.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.021.500,00	3.020.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.005.500,00	2.005.500,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.670.000,00	4.355.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.693.000,00	25.922.172,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.171.904,00	34.130.524,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.841.904,00	32.285.524,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.830.000,00	1.345.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.403.440,00	37.284.240,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.931.440,00	34.446.240,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.472.000,00	2.838.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	159.779.000,00	124.318.000,00	4.900.000,00	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	159.779.000,00	124.318.000,00	4.900.000,00	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	159.779.000,00	124.318.000,00	4.900.000,00	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	449.963.584,00	376.930.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	449.963.584,00	376.930.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07	2.07.3.32.0.00.08.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	449.963.584,00	376.930.800,00	-	-	-	-	-	-
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.897.958.451,00	2.734.802.863,00	49.834.000,00	49.834.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.897.958.451,00	2.734.802.863,00	49.834.000,00	49.834.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.646.087.191,00	1.563.962.132,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.860.000,00	9.860.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.930.000,00	4.930.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.930.000,00	4.930.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.526.218.856,00	1.453.147.310,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.418.388.856,00	1.360.717.310,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.900.000,00	87.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.930.000,00	4.930.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.700.000,00	25.686.900,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.700.000,00	20.686.900,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.438.935,00	61.040.822,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.495.500,00	2.494.500,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.043.435,00	29.846.322,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.900.000,00	28.700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.869.400,00	14.227.100,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.501.400,00	11.859.100,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.368.000,00	2.368.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	37295	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	848.257.260,00	773.166.731,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	848.257.260,00	773.166.731,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	848.257.260,00	773.166.731,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	37660	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	234.080.000,00	228.860.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	101.500.000,00	101.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.500.000,00	101.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	132.580.000,00	127.360.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	132.580.000,00	127.360.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.954.000,00	2.954.000,00	49.834.000,00	49.834.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.954.000,00	2.954.000,00	49.834.000,00	49.834.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.954.000,00	2.954.000,00	49.834.000,00	49.834.000,00	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	166.580.000,00	165.860.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.560.000,00	96.840.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	97.560.000,00	96.840.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.020.000,00	69.020.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08	2.08.0.00.0.00.09.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	69.020.000,00	69.020.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.937.960.791,00	1.837.549.510,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN	1.937.960.791,00	1.837.549.510,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.603.795.001,00	1.504.579.445,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.964.498,00	9.954.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.009.998,00	3.007.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.737.000,00	2.732.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.969.000,00	1.967.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.498.500,00	1.496.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.495.996.599,00	1.398.089.195,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.494.836.599,00	1.396.984.695,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	555.000,00	525.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	605.000,00	579.500,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.721.135,00	32.717.050,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	213.785,00	213.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.889.000,00	2.887.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	600.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.481.000,00	2.480.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.537.350,00	26.537.050,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.559.719,00	41.508.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.259.719,00	12.258.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.300.000,00	29.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.553.050,00	22.311.200,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.309.050,00	22.067.200,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	244.000,00	244.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	251.409.150,00	250.398.805,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	131.323.900,00	130.832.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	118.385.400,00	117.893.700,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	12.938.500,00	12.938.300,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	56.144.750,00	56.128.805,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	56.144.750,00	56.128.805,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	63.940.500,00	63.438.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	18.985.000,00	18.985.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	44.955.500,00	44.453.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	10.567.280,00	10.382.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.567.280,00	10.382.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.567.280,00	10.382.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	72.189.360,00	72.189.260,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	72.189.360,00	72.189.260,00	-	-	-	-	-	-
2.09	2.09.0.00.0.00.10.0000	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	72.189.360,00	72.189.260,00	-	-	-	-	-	-
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.513.910.049,00	2.196.386.681,00	861.471.700,00	732.371.100,00	-	-	-	-
2.10	1.04.2.10.0.00.03.0000		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.513.910.049,00	2.196.386.681,00	861.471.700,00	732.371.100,00	-	-	-	-
2.10	1.04.2.10.0.00.03.0000		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.513.910.049,00	2.196.386.681,00	861.471.700,00	732.371.100,00	-	-	-	-
2.10	1.04.2.10.0.00.03.0000	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.513.910.049,00	2.196.386.681,00	861.471.700,00	732.371.100,00	-	-	-	-
2.10	1.04.2.10.0.00.03.0000	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.513.910.049,00	2.196.386.681,00	861.471.700,00	732.371.100,00	-	-	-	-
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.617.286.879,00	6.336.685.783,00	180.651.848,00	140.039.100,00	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	6.617.286.879,00	6.336.685.783,00	180.651.848,00	140.039.100,00	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.099.842.833,00	3.983.665.732,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.734.000,00	8.733.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	1.999.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.316.500,00	1.316.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.466.000,00	2.466.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.191.000,00	1.191.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.760.500,00	1.760.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.043.452.529,00	3.929.462.318,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.043.452.529,00	3.929.462.318,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.528.000,00	1.525.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	1.528.000,00	1.525.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.809.124,00	9.492.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	258.000,00	258.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.609.000,00	2.609.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.942.124,00	5.625.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.136.280,00	8.422.014,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.499.000,00	1.498.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.637.280,00	6.923.514,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.182.900,00	26.030.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.182.900,00	26.030.900,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	113.197.900,00	112.093.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	113.197.900,00	112.093.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	25.000.000,00	24.996.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	88.197.900,00	87.097.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.242.686.146,00	2.107.426.751,00	177.795.848,00	137.241.900,00	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.242.686.146,00	2.107.426.751,00	177.795.848,00	137.241.900,00	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2.087.219.946,00	1.951.960.551,00	177.795.848,00	137.241.900,00	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	155.466.200,00	155.466.200,00	-	-	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	161.560.000,00	133.499.800,00	2.856.000,00	2.797.200,00	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	161.560.000,00	133.499.800,00	2.856.000,00	2.797.200,00	-	-	-	-
2.11	2.11.3.28.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	161.560.000,00	133.499.800,00	2.856.000,00	2.797.200,00	-	-	-	-
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.145.374.710,00	2.882.068.305,00	44.300.000,00	44.300.000,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.145.374.710,00	2.882.068.305,00	44.300.000,00	44.300.000,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.857.609.210,00	2.626.331.105,00	44.300.000,00	44.300.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.800.000,00	10.464.900,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.761.000,00	2.727.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.060.000,00	1.991.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.484.500,00	1.484.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	991.250,00	399.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.036.250,00	1.941.200,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.017.000,00	1.922.200,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.424.842.348,00	2.233.603.753,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.263.890.348,00	2.088.148.253,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	159.600.000,00	144.352.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	848.500,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	503.500,00	503.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.617.000,00	164.059.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114.511.000,00	114.510.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.167.000,00	16.547.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.939.000,00	33.002.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	44.300.000,00	44.300.000,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	44.300.000,00	44.300.000,00	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.979.552,00	154.336.552,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.280.000,00	42.280.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.999.552,00	69.906.552,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.700.000,00	42.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.370.310,00	63.866.400,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.720.310,00	31.216.400,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	265.809.000,00	236.980.700,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	265.809.000,00	236.980.700,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4.764.000,00	4.544.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	14.816.000,00	10.836.700,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	241.410.000,00	216.810.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4.819.000,00	4.790.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	10.656.500,00	7.456.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	7.456.500,00	7.456.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4.694.000,00	4.694.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	2.762.500,00	2.762.500,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	3.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	3.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	11.300.000,00	11.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	11.300.000,00	11.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	4.659.000,00	4.659.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6.641.000,00	6.641.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.364.102.338,00	2.087.806.776,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.364.102.338,00	2.087.806.776,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.114.225.258,00	1.936.037.776,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.623.000,00	20.775.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	2.373.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.403.000,00	4.034.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	2.750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.914.000,00	4.145.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.306.000,00	6.723.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.871.694.416,00	1.777.971.570,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.803.108.416,00	1.719.985.570,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.800.000,00	53.900.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.786.000,00	4.086.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.967.920,00	72.096.860,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.561.920,00	9.577.500,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.406.000,00	62.519.360,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.951.922,00	60.063.346,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.676.500,00	6.606.800,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.275.422,00	20.406.546,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.400.000,00	7.700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.600.000,00	25.350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.988.000,00	5.131.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.988.000,00	5.131.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	248.277.080,00	151.769.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	248.277.080,00	151.769.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	248.277.080,00	151.769.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.229.388.401,00	6.971.234.576,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.229.388.401,00	6.971.234.576,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.344.901.501,00	3.279.213.495,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.282.596.754,00	3.221.722.743,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.194.396.754,00	3.140.172.743,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.200.000,00	81.550.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.304.747,00	57.490.752,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.304.747,00	18.990.752,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000,00	38.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	225.600.000,00	225.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	225.600.000,00	225.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	69.600.000,00	69.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.667.486.900,00	2.605.021.081,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	898.528.000,00	898.059.081,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	392.000.000,00	392.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	96.528.000,00	96.059.081,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	656.000.000,00	656.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	656.000.000,00	656.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	493.872.000,00	450.812.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	457.422.000,00	414.362.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.150.000,00	21.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	619.086.900,00	600.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	22.386.900,00	3.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	137.500.000,00	137.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	459.200.000,00	459.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	991.400.000,00	861.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	206.800.000,00	76.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	76.800.000,00	76.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	784.600.000,00	784.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	349.000.000,00	349.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.14.0.00.0.00.14.0000	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	435.600.000,00	435.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.503.317.872,00	3.274.163.177,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		DINAS PERHUBUNGAN	3.501.837.872,00	3.274.163.177,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.478.652.372,00	3.257.018.177,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.115.000,00	5.115.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.115.000,00	5.115.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.305.899.985,00	3.119.012.718,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.024.492.985,00	2.870.905.718,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	276.300.000,00	243.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.107.000,00	5.107.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.480.000,00	2.532.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.920.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.560.000,00	2.532.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.981.000,00	37.839.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.175.000,00	6.130.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.491.000,00	3.490.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.315.000,00	28.219.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.598.587,00	74.309.959,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.998.587,00	12.159.959,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.600.000,00	62.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.577.800,00	18.209.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.061.800,00	16.028.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.516.000,00	2.181.500,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	22.165.500,00	16.145.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.100.000,00	5.085.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.100.000,00	5.085.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.01	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.01	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	740.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.02	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	740.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.346.500,00	3.320.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3.346.500,00	3.320.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.679.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	2.679.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.300.000,00	7.740.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.300.000,00	7.740.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.760.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.08	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1.760.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.08.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1.760.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.241.271.474,00	3.150.332.778,00	41.825.000,00	33.549.170,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	3.241.271.474,00	3.150.332.778,00	41.825.000,00	33.549.170,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.972.828.262,00	1.909.343.446,00	41.825.000,00	33.549.170,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.179.000,00	8.179.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.189.000,00	2.189.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.990.000,00	1.990.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.912.728.262,00	1.849.776.546,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.799.428.262,00	1.745.926.546,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	112.300.000,00	102.850.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.600.500,00	16.600.500,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.600.500,00	16.600.500,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.227.600,00	24.227.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	248.600,00	248.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.000,00	230.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.460.000,00	4.460.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.789.000,00	16.789.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	41.825.000,00	33.549.170,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	41.825.000,00	33.549.170,00	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.092.900,00	10.560.400,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.097.900,00	9.565.400,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	995.000,00	995.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	259.200.000,00	259.193.700,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	259.200.000,00	259.193.700,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	19.200.000,00	19.193.700,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.009.243.212,00	981.795.632,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.009.243.212,00	981.795.632,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	2.249.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	44.955.500,00	35.056.800,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	7.487.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	5.910.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1.000.000,00	960.900,00	-	-	-	-	-	-
2.16	2.16.2.20.2.21.16.0000	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	887.641.712,00	885.777.932,00	-	-	-	-	-	-
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.843.534.558,00	3.645.754.125,00	64.110.000,00	64.110.000,00	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000		DINAS KOPERASI, INDUSTRI KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	3.843.534.558,00	3.645.754.125,00	64.110.000,00	64.110.000,00	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.940.594.378,00	2.746.313.945,00	64.110.000,00	64.110.000,00	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.740.000,00	5.740.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	978.500,00	978.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	490.500,00	490.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	493.000,00	493.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.028.000,00	2.028.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.791.409.805,00	2.617.294.715,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.788.847.305,00	2.614.732.715,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	890.000,00	890.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	696.500,00	696.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	976.000,00	975.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.388.340,00	24.388.340,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.985.700,00	2.985.700,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	735.000,00	735.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.407.640,00	19.407.640,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.874.683,00	69.831.390,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	955.000,00	955.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.623.683,00	25.680.390,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.296.000,00	43.196.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.181.550,00	29.059.500,00	64.110.000,00	64.110.000,00	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.611.700,00	16.447.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.888.350,00	11.931.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	64.110.000,00	64.110.000,00	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	681.500,00	681.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	13.410.000,00	9.910.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	13.410.000,00	9.910.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	13.410.000,00	9.910.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	139.400.000,00	139.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	139.400.000,00	139.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	139.400.000,00	139.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.449.000,00	3.449.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.449.000,00	3.449.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	3.449.000,00	3.449.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	746.681.180,00	746.681.180,00	-	-	-	-	-	-
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	746.681.180,00	746.681.180,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.3.30.3.31.17.0000	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	746.681.180,00	746.681.180,00	-	-	-	-	-	-
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.215.666.967,00	2.114.547.858,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	2.215.666.967,00	2.114.547.858,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.186.604.967,00	2.091.219.858,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.740.000,00	10.375.500,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.240.000,00	3.894.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	1.481.500,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.875.044.757,00	1.801.011.334,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.867.544.757,00	1.796.356.334,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.250.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.250.000,00	655.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.611.500,00	1.611.500,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.611.500,00	1.611.500,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.750.000,00	1.741.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.750.000,00	1.741.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.611.000,00	85.354.900,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.790.000,00	3.790.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	381.000,00	381.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.640.000,00	79.833.900,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.800.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.265.510,00	170.445.824,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.208.500,00	4.737.600,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.457.010,00	10.808.224,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.600.000,00	154.900.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.582.200,00	20.679.800,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.335.000,00	19.032.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.680.000,00	1.080.600,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	567.200,00	567.200,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	18.234.000,00	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18.234.000,00	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	18.234.000,00	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	10.828.000,00	10.828.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	10.828.000,00	10.828.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18	2.18.0.00.0.00.18.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.828.000,00	10.828.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.261.545.320,00	2.259.321.348,00	2.731.332.349,00	2.702.928.154,00	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.261.545.320,00	2.259.321.348,00	2.731.332.349,00	2.702.928.154,00	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	320.949.350,00	320.949.350,00	-	-	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	231.369.350,00	231.369.350,00	-	-	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	231.369.350,00	231.369.350,00	-	-	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.580.000,00	89.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	89.580.000,00	89.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.940.595.970,00	1.938.371.998,00	2.731.332.349,00	2.702.928.154,00	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	611.998.570,00	609.774.598,00	2.731.332.349,00	2.702.928.154,00	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	611.998.570,00	609.774.598,00	2.731.332.349,00	2.702.928.154,00	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	548.740.000,00	548.740.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	548.740.000,00	548.740.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	665.195.000,00	665.195.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	665.195.000,00	665.195.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	114.662.400,00	114.662.400,00	-	-	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	69.872.400,00	69.872.400,00	-	-	-	-	-	-
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	44.790.000,00	44.790.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.577.008.812,00	5.353.830.089,00	1.076.068.500,00	1.073.501.405,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5.577.008.812,00	5.353.830.089,00	1.076.068.500,00	1.073.501.405,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.770.958.321,00	3.549.695.470,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.522.000,00	7.521.500,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.727.500,00	3.727.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.608.000,00	2.608.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.186.500,00	1.186.500,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.304.066.763,00	3.156.338.038,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.300.578.763,00	3.152.850.038,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.488.000,00	3.488.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.720.000,00	21.269.999,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	480.000,00	480.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.690.000,00	16.239.999,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.939.558,00	340.359.933,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.960.000,00	5.958.500,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.679.558,00	30.701.433,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.300.000,00	303.700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.710.000,00	24.206.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.710.000,00	24.206.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	735.433.626,00	735.433.626,00	631.392.000,00	629.829.660,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	606.077.800,00	606.077.800,00	622.542.000,00	620.979.660,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	476.127.800,00	476.127.800,00	622.542.000,00	620.979.660,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	129.950.000,00	129.950.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	129.355.826,00	129.355.826,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	129.355.826,00	129.355.826,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	8.850.000,00	8.850.000,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	-	-	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	561.116.165,00	560.599.293,00	205.777.600,00	205.315.328,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	561.116.165,00	560.599.293,00	205.777.600,00	205.315.328,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	450.008.600,00	449.491.728,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01.0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	111.107.565,00	111.107.565,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	-	-	205.777.600,00	205.315.328,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	17.415.700,00	17.415.700,00	229.963.900,00	229.421.417,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	17.415.700,00	17.415.700,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	17.415.700,00	17.415.700,00	-	-	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	229.963.900,00	229.421.417,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	-	-	229.963.900,00	229.421.417,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	492.085.000,00	490.686.000,00	8.935.000,00	8.935.000,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	492.085.000,00	490.686.000,00	8.935.000,00	8.935.000,00	-	-	-	-
2.22	2.22.3.26.0.00.19.0000	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	492.085.000,00	490.686.000,00	8.935.000,00	8.935.000,00	-	-	-	-
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.987.707.406,00	2.881.485.453,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.987.707.406,00	2.881.485.453,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.366.994.846,00	2.265.689.653,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.835.000,00	8.822.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.826.500,00	4.826.500,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	494.500,00	494.500,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	256.500,00	254.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.198.500,00	1.198.500,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.412.500,00	1.402.500,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	646.500,00	646.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.234.631.734,00	2.164.647.255,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.118.691.734,00	2.052.173.255,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.200.000,00	105.750.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.265.500,00	1.263.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.536.500,00	1.530.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.538.000,00	2.531.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.801.500,00	1.799.900,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.801.500,00	1.799.900,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.210.250,00	21.510.700,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.250,00	999.400,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.710.000,00	18.011.300,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.360.552,00	63.098.798,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.061.000,00	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.999.552,00	38.348.798,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.300.000,00	23.700.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.155.810,00	5.811.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.331.650,00	3.811.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.824.160,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	620.712.560,00	615.795.800,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.218.500,00	84.302.500,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	3.993.000,00	3.993.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.210.000,00	36.394.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	10.075.000,00	9.475.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	8.650.500,00	8.050.500,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	29.290.000,00	26.390.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	531.494.060,00	531.493.300,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.826.760,00	29.826.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	266.090.000,00	266.090.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	235.577.300,00	235.577.300,00	-	-	-	-	-	-
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.417.500,00	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.20.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.417.500,00	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	3.417.500,00	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	3.417.500,00	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24	2.23.2.24.0.00.20.0000	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3.417.500,00	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	21.025.834.065,00	20.092.005.649,00	35.605.624,00	31.465.000,00	-	-	-	-
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.275.600.801,00	6.076.466.993,00	23.435.000,00	23.435.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000		Dinas Kelautan Dan Perikanan	6.275.600.801,00	6.076.466.993,00	23.435.000,00	23.435.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.545.684.986,00	2.391.543.054,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.983.000,00	1.664.500,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	915.000,00	915.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	339.500,00	339.500,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	410.000,00	410.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	318.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.406.497.371,00	2.272.964.619,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.272.024.871,00	2.148.992.619,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	132.900.000,00	122.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.572.500,00	1.572.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	517.000,00	517.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	517.000,00	517.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.473.500,00	860.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.473.500,00	860.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.662.900,00	26.207.485,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.123.400,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.172.500,00	635.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.490.000,00	1.250.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.177.000,00	24.172.485,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.231.815,00	65.791.790,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.471.815,00	24.608.290,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.960.000,00	1.033.500,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.800.000,00	40.150.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.319.400,00	23.537.660,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.815.400,00	23.239.660,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.320.000,00	298.000,00	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.184.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.729.915.815,00	3.684.923.939,00	23.435.000,00	23.435.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.729.915.815,00	3.684.923.939,00	23.435.000,00	23.435.000,00	-	-	-	-
3.25	3.25.0.00.0.00.21.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3.729.915.815,00	3.684.923.939,00	23.435.000,00	23.435.000,00	-	-	-	-
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	195.769.000,00	195.769.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	195.769.000,00	195.769.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	12.619.000,00	12.619.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12.619.000,00	12.619.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5.089.000,00	5.089.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	7.530.000,00	7.530.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	179.750.000,00	179.750.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	179.750.000,00	179.750.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26	2.22.3.26.0.00.19.0000	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	179.750.000,00	179.750.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	13.983.552.764,00	13.345.559.156,00	8.220.624,00	4.080.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000		Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	13.983.552.764,00	13.345.559.156,00	8.220.624,00	4.080.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.879.117.136,00	10.628.439.618,00	8.220.624,00	4.080.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.163.126,00	13.624.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.499.500,00	2.498.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	912.500,00	911.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.072.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	940.000,00	939.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.739.126,00	9.275.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.349.369.086,00	10.147.712.291,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.290.212.586,00	10.094.112.791,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.498.500,00	42.350.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.908.000,00	6.156.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.870.500,00	1.213.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.879.500,00	3.879.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.310.220,00	105.726.570,00	4.080.000,00	4.080.000,00	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	4.080.000,00	4.080.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.250.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.060.220,00	104.976.570,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.140.624,00	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	4.140.624,00	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.891.624,00	318.001.157,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.785.800,00	380.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.720.824,00	69.675.407,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.830.000,00	6.830.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.555.000,00	241.115.750,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.983.080,00	35.975.600,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.282.680,00	27.275.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.700.400,00	8.700.400,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	616.261.000,00	604.444.600,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	347.873.000,00	346.795.600,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.720.000,00	5.720.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	342.153.000,00	341.075.600,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4.645.000,00	4.645.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4.645.000,00	4.645.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	159.905.000,00	149.666.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	7.384.000,00	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	152.521.000,00	147.716.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	103.838.000,00	103.338.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	103.838.000,00	103.338.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	700.890.900,00	606.289.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	7.586.000,00	7.586.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	5.036.000,00	5.036.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	693.304.900,00	598.703.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	577.921.300,00	484.919.600,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	115.383.600,00	113.783.600,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	19.433.000,00	19.433.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	15.229.000,00	15.229.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	15.229.000,00	15.229.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.204.000,00	4.204.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	4.204.000,00	4.204.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.092.813.658,00	848.223.238,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1.092.813.658,00	848.223.238,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	11.018.750,00	11.018.750,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	918.149.908,00	673.923.988,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.840.000,00	1.840.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	161.805.000,00	161.440.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	675.037.070,00	638.729.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	675.037.070,00	638.729.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	566.671.000,00	541.053.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	24.957.570,00	14.268.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27	3.27.0.00.0.00.22.0000	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	83.408.500,00	83.408.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	349.975.500,00	328.274.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000		DINAS KOPERASI, INDUSTRI KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	349.975.500,00	328.274.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	322.238.000,00	301.938.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	322.238.000,00	301.938.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	277.238.000,00	256.938.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	18.633.000,00	17.233.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.593.000,00	1.593.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/ Kota	1.593.000,00	1.593.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	17.040.000,00	15.640.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	17.040.000,00	15.640.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	9.104.500,00	9.103.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	9.104.500,00	9.103.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	6.103.500,00	6.103.500,00	-	-	-	-	-	-
3.30	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	3.001.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	70.936.000,00	70.936.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000		DINAS KOPERASI, INDUSTRI KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	70.936.000,00	70.936.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	70.936.000,00	70.936.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	70.936.000,00	70.936.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	-	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	-	-
3.31	2.17.3.30.3.31.17.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	70.936.000,00	70.936.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	150.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.08.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	150.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.08.0000	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	150.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.08.0000	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.32	2.07.3.32.0.00.08.0000	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	150.000.000,00	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	42.255.132.523,00	39.869.484.426,00	1.114.217.042,00	1.003.282.415,00	-	-	-	-
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	23.707.245.657,00	22.273.036.347,00	870.917.042,00	777.632.415,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000		SEKRETARIAT DAERAH	23.707.245.657,00	22.273.036.347,00	870.917.042,00	777.632.415,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.278.154.357,00	18.029.559.118,00	870.917.042,00	777.632.415,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.846.250,00	44.154.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.451.500,00	11.058.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.043.000,00	3.987.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.343.000,00	4.335.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000,00	14.997.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.999.750,00	3.993.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.006.500,00	2.889.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.002.500,00	2.895.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.000.496.388,00	8.831.257.177,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.958.456.888,00	8.794.999.277,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.180.500,00	8.637.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.220.500,00	9.273.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.407.000,00	4.374.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.647.500,00	3.461.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.584.000,00	10.511.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.963.000,00	86.245.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90.963.000,00	86.245.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	803.663.963,00	766.872.749,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.261.000,00	37.882.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.050.000,00	114.138.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.097.000,00	29.040.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.023.332,00	55.023.332,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	206.214.000,00	198.376.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.018.631,00	332.412.917,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	494.438.000,00	479.520.000,00	44.818.200,00	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	494.438.000,00	479.520.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	44.818.200,00	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.311.538.979,00	1.951.933.422,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.030.000,00	12.025.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	809.917.395,00	664.708.422,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.486.591.584,00	1.275.200.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.670.932.890,00	1.282.408.290,00	4.900.000,00	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	596.503.200,00	522.828.290,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	766.735.690,00	509.850.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.950.000,00	17.800.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	289.744.000,00	231.930.000,00	4.900.000,00	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	789.250.974,00	715.486.574,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	594.250.974,00	594.250.974,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	75.000.000,00	69.412.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120.000.000,00	51.823.100,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.632.678.913,00	3.468.556.041,00	821.198.842,00	777.632.415,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.118.235.380,00	2.062.476.745,00	554.394.730,00	513.988.500,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.040.090.173,00	994.982.382,00	244.504.112,00	241.343.915,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	474.353.360,00	411.096.914,00	22.300.000,00	22.300.000,00	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	91.279.000,00	83.601.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	22.659.000,00	18.912.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	27.336.200,00	24.043.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	41.283.800,00	40.645.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	348.066.000,00	319.523.165,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	147.972.000,00	144.343.165,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	16.109.000,00	12.350.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	183.985.000,00	162.830.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.859.102.600,00	3.793.691.429,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	195.747.000,00	186.503.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	169.593.000,00	167.405.100,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3.490.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	22.664.000,00	19.098.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.335.923.000,00	3.306.122.829,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.335.923.000,00	3.306.122.829,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	296.008.900,00	279.820.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	168.438.000,00	159.776.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	52.373.000,00	51.416.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	75.197.900,00	68.627.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	31.423.700,00	21.244.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15.487.700,00	5.848.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	14.436.000,00	13.896.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	569.988.700,00	449.785.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	78.381.300,00	74.156.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	11.614.300,00	10.579.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	48.349.000,00	46.377.200,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	18.418.000,00	17.199.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	129.582.400,00	118.841.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	13.285.700,00	13.246.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	66.208.000,00	55.507.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	50.088.700,00	50.087.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	257.019.000,00	152.034.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	95.250.000,00	94.816.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	114.649.500,00	30.170.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	47.119.500,00	27.047.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	105.006.000,00	104.752.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	54.573.800,00	54.383.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	10.291.200,00	10.228.400,00	-	-	-	-	-	-
4.01	4.01.0.00.0.00.23.0000	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40.141.000,00	40.141.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02			SEKRETARIAT DPRD	18.547.886.866,00	17.596.448.079,00	243.300.000,00	225.650.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000		Sekretariat DPRD	18.547.886.866,00	17.596.448.079,00	243.300.000,00	225.650.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.965.575.386,00	14.361.823.959,00	243.300.000,00	225.650.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.801.500,00	6.535.700,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.072.500,00	1.072.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.072.500,00	1.072.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	528.000,00	528.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.072.500,00	1.072.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	528.000,00	528.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.528.000,00	2.262.200,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.812.591.507,00	3.721.152.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.390.262.607,00	3.333.126.750,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.482.500,00	376.290.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.426.000,00	1.425.250,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.719.900,00	1.710.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	965.000,00	965.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.885.000,00	4.785.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.425.500,00	1.425.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.072.500,00	1.072.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.072.500,00	1.072.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.882.500,00	102.032.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.922.500,00	1.072.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.960.000,00	99.960.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	755.121.810,00	741.862.010,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.947.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.543.500,00	63.543.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	1.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.200.800,00	61.700.800,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	178.600.000,00	178.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.491.000,00	17.462.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426.839.010,00	418.955.710,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	76.900.000,00	59.700.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	76.900.000,00	59.700.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	408.695.000,00	339.980.212,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	660.000,00	660.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	172.485.212,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.035.000,00	166.835.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.288.000,00	140.706.896,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.842.000,00	72.180.896,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.630.000,00	9.630.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.816.000,00	58.896.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	7.801.959.569,00	7.424.849.141,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.572.959.569,00	7.321.109.141,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	104.000.000,00	103.740.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	125.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.919.163.000,00	1.883.633.000,00	126.400.000,00	125.950.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	84.017.000,00	63.712.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.792.646.000,00	1.779.921.000,00	126.400.000,00	125.950.000,00	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	3.582.311.480,00	3.234.624.120,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	181.750.080,00	139.975.080,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	36.564.080,00	36.555.080,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	21.661.000,00	21.650.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	3.350.000,00	850.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	115.150.000,00	78.415.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	5.025.000,00	2.505.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	11.457.500,00	8.555.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	2.764.000,00	2.764.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	244.000,00	244.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	2.852.500,00	2.520.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	333.000,00	333.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	2.520.000,00	2.450.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2.744.000,00	244.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	11.851.500,00	11.607.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.027.500,00	4.022.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.765.500,00	3.705.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.058.500,00	3.880.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	225.000.000,00	225.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	225.000.000,00	225.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	750.913.000,00	500.913.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	913.000,00	913.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	750.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	19.500.000,00	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	9.500.000,00	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	2.381.839.400,00	2.333.074.040,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.096.526.400,00	2.068.850.097,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3.297.000,00	3.225.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	268.442.500,00	247.431.443,00	-	-	-	-	-	-
4.02	4.02.0.00.0.00.24.0000	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	13.573.500,00	13.567.500,00	-	-	-	-	-	-
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	20.641.595.968,00	19.205.940.653,00	70.520.000,00	65.712.000,00	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	109.508.794.961,00	102.737.016.814,00
5.01			PERENCANAAN	3.504.708.094,00	3.145.582.372,00	30.850.000,00	30.850.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000		BADAN PERENCANAAN DAERAH	3.504.708.094,00	3.145.582.372,00	30.850.000,00	30.850.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.835.809.067,00	2.668.748.234,00	30.850.000,00	30.850.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.081.795,00	20.105.600,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.687.095,00	8.374.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	640.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	640.000,00	638.900,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	817.000,00	796.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.170.000,00	5.169.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.127.700,00	5.127.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.372.763.372,00	2.303.799.833,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.333.042.172,00	2.275.274.633,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.493.200,00	8.368.200,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	632.000,00	626.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.596.000,00	19.531.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.937.700,00	170.050.120,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.795.000,00	1.190.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.802.700,00	159.520.120,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	30.850.000,00	30.850.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	30.850.000,00	30.850.000,00	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.614.900,00	131.022.681,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.795.500,00	3.758.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.019.400,00	29.014.681,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.800.000,00	98.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.411.300,00	43.770.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.775.100,00	31.134.100,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.639.000,00	6.635.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.997.200,00	6.000.900,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	443.059.000,00	298.766.211,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	409.362.000,00	280.502.211,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	58.855.000,00	55.769.200,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	9.301.000,00	9.260.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	9.616.000,00	9.610.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	55.713.000,00	46.635.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	275.877.000,00	159.228.011,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4.920.000,00	2.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.920.000,00	2.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	28.777.000,00	15.514.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	28.777.000,00	15.514.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	225.840.027,00	178.067.927,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	168.929.137,00	146.035.037,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.336.637,00	12.336.637,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1.930.000,00	930.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	8.902.000,00	5.677.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	47.676.600,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2.180.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	59.787.400,00	59.787.400,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	36.116.500,00	32.304.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	26.236.190,00	9.786.190,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.281.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.789.600,00	2.109.600,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1.994.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	7.932.090,00	5.107.590,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.144.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.966.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	4.129.500,00	2.369.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	30.674.700,00	22.246.700,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.268.000,00	398.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	21.415.200,00	19.735.200,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.839.500,00	1.633.500,00	-	-	-	-	-	-
5.01	5.01.0.00.0.00.25.0000	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.152.000,00	480.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02			KEUANGAN	11.695.319.812,00	10.958.314.296,00	39.670.000,00	34.862.000,00	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	109.508.794.961,00	102.737.016.814,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.387.208.987,00	6.986.553.403,00	39.670.000,00	34.862.000,00	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	109.508.794.961,00	102.737.016.814,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.934.857.117,00	4.746.919.923,00	39.670.000,00	34.862.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.273.000,00	83.829.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.871.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.560.000,00	5.530.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.250.000,00	25.109.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.094.000,00	6.054.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	25.250.000,00	25.202.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.119.000,00	1.089.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	970.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.413.317.932,00	4.308.516.419,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.117.667.432,00	4.037.298.669,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.900.000,00	189.750.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24.977.000,00	24.895.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.977.000,00	9.877.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.678.500,00	11.656.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.118.000,00	35.037.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.187.200,00	149.085.004,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.488.000,00	3.471.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.705.000,00	44.850.549,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.994.200,00	100.763.455,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	39.670.000,00	34.862.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	39.670.000,00	34.862.000,00	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.838.985,00	148.289.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.586.000,00	22.129.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.452.985,00	109.360.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.240.000,00	57.200.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.650.000,00	40.613.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.150.000,00	9.150.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.440.000,00	7.437.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.158.474.247,00	2.004.216.600,00	-	-	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	109.508.794.961,00	102.737.016.814,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.513.276.947,00	1.438.651.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	37.000.000,00	36.778.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	36.999.250,00	36.462.150,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	5.764.000,00	5.762.750,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	4.477.500,00	4.394.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.555.500,00	3.102.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.041.160.000,00	973.459.950,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	236.424.697,00	232.880.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	38.280.000,00	38.223.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	75.446.000,00	73.423.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	27.570.000,00	27.565.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	400.119.300,00	372.114.650,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	53.311.000,00	51.574.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60.275.000,00	60.270.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	152.100.500,00	148.534.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	30.898.000,00	30.860.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38.216.000,00	38.188.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	65.318.800,00	42.687.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	245.078.000,00	193.450.350,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	11.929.500,00	11.804.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	41.147.500,00	28.093.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19.457.000,00	18.659.400,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41.368.000,00	28.133.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	82.351.000,00	64.125.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	48.825.000,00	42.633.950,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	109.508.794.961,00	102.737.016.814,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	-	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	109.408.794.961,00	102.637.016.814,00
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	293.877.623,00	235.416.880,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	293.877.623,00	235.416.880,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	54.932.000,00	51.313.300,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12.393.000,00	12.270.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	164.471.500,00	117.593.880,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	24.539.000,00	20.490.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6.717.500,00	4.506.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.26.0000	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30.824.623,00	29.242.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.308.110.825,00	3.971.760.893,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.047.490.325,00	3.777.223.793,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.304.000,00	15.872.050,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.490.000,00	1.790.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.458.000,00	6.986.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.990.000,00	1.445.750,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.990.000,00	1.130.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.462.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.462.000,00	1.251.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.452.000,00	1.268.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.614.759.259,00	3.378.372.304,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.220.182.259,00	3.030.707.704,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	385.300.000,00	344.350.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.160.000,00	1.175.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.695.000,00	2.139.600,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.960.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.462.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.683.800,00	168.047.315,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	143.775.800,00	143.396.315,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.448.000,00	6.726.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.460.000,00	17.924.800,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.929.726,00	167.301.932,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	962.000,00	662.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.997.726,00	124.258.732,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.970.000,00	42.381.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.813.540,00	47.630.192,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.096.600,00	16.043.297,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.544.300,00	23.229.895,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.670.000,00	4.043.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.502.640,00	4.314.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	260.620.500,00	194.537.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	260.620.500,00	194.537.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	7.376.000,00	5.660.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	15.285.000,00	8.995.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	14.550.000,00	6.865.400,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	15.787.500,00	11.497.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	11.847.500,00	882.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	148.921.500,00	134.240.700,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5.190.000,00	2.930.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	10.597.500,00	9.129.200,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	6.578.000,00	5.478.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3.710.000,00	706.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	11.440.000,00	4.540.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02	5.02.0.00.0.00.27.0000	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	9.337.500,00	3.613.700,00	-	-	-	-	-	-
5.03			KEPEGAWAIAN	3.965.372.023,00	3.822.037.903,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.965.372.023,00	3.822.037.903,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.331.936.323,00	3.198.175.604,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.092.000,00	21.055.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.512.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.526.000,00	6.521.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.526.000,00	6.511.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.528.000,00	5.523.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.136.271.637,00	3.014.638.478,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.015.893.637,00	2.904.426.478,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.800.000,00	90.650.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.526.000,00	6.518.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.526.000,00	6.518.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.526.000,00	6.526.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.178.500,00	87.147.811,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.663.500,00	10.640.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.287.000,00	4.283.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.088.000,00	3.050.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.140.000,00	69.174.811,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.199.936,00	60.746.615,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.799.936,00	33.796.615,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.400.000,00	26.950.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.194.250,00	14.587.700,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.974.250,00	13.387.700,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.220.000,00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	633.435.700,00	623.862.299,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	89.623.000,00	86.358.900,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	51.328.000,00	51.181.600,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	19.301.000,00	16.254.600,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	9.146.500,00	9.108.700,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.132.500,00	7.115.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	2.715.000,00	2.699.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	280.044.700,00	279.019.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	9.362.500,00	9.274.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	18.315.200,00	17.423.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	252.367.000,00	252.322.800,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	238.657.000,00	238.630.999,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.357.000,00	1.331.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	237.300.000,00	237.299.999,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	25.111.000,00	19.852.600,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.638.000,00	4.632.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	6.468.000,00	6.274.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	10.057.000,00	5.054.200,00	-	-	-	-	-	-
5.03	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	3.948.000,00	3.892.400,00	-	-	-	-	-	-
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	226.133.000,00	90.079.000,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.03.5.04.0.00.28.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA	226.133.000,00	90.079.000,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	226.133.000,00	90.079.000,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	226.133.000,00	90.079.000,00	-	-	-	-	-	-
5.04	5.03.5.04.0.00.28.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	226.133.000,00	90.079.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.250.063.039,00	1.189.927.082,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000		Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.250.063.039,00	1.189.927.082,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.186.913.039,00	1.127.105.742,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.901.500,00	4.879.500,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.301.000,00	2.301.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	642.000,00	635.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	605.000,00	592.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	728.000,00	726.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	625.500,00	625.500,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.091.117.174,00	1.048.351.712,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.059.319.674,00	1.021.483.212,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29.400.000,00	24.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	912.500,00	897.500,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	746.000,00	739.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	739.000,00	732.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.541.500,00	17.864.100,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.605.500,00	2.605.500,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.744.000,00	2.690.800,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.192.000,00	12.567.800,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.260.165,00	44.412.230,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.537.500,00	2.537.500,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.922.665,00	7.224.730,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.800.000,00	34.650.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.092.700,00	11.598.200,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.870.500,00	7.870.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.233.200,00	739.200,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.989.000,00	2.989.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	63.150.000,00	62.821.340,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	63.150.000,00	62.821.340,00	-	-	-	-	-	-
5.05	5.05.0.00.0.00.29.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	63.150.000,00	62.821.340,00	-	-	-	-	-	-
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.216.338.580,00	5.696.003.643,00	20.175.000,00	20.175.000,00	-	-	-	-
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	6.216.338.580,00	5.696.003.643,00	20.175.000,00	20.175.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000		INSPEKTORAT	6.216.338.580,00	5.696.003.643,00	20.175.000,00	20.175.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.267.610.680,00	4.099.565.443,00	20.175.000,00	20.175.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.200.000,00	11.692.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.700.000,00	11.692.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.868.320.898,00	3.751.681.345,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.778.760.898,00	3.686.849.345,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.700.000,00	47.600.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.870.000,00	9.758.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.490.000,00	7.474.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.842.490,00	79.113.890,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81.842.490,00	79.113.890,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.388.900,00	129.581.250,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.940.000,00	17.477.250,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.927.000,00	13.145.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.221.900,00	98.659.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.675.442,00	84.557.267,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.977.500,00	16.225.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.497.942,00	40.587.267,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.250.000,00	645.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.950.000,00	27.100.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.182.950,00	42.939.691,00	20.175.000,00	20.175.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.457.350,00	41.226.691,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.485.600,00	1.473.000,00	20.175.000,00	20.175.000,00	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.400.577.900,00	1.115.038.200,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.244.777.900,00	1.011.138.200,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	162.350.000,00	136.500.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	111.050.000,00	109.900.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	206.600.000,00	139.100.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	151.650.000,00	132.500.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	239.250.000,00	158.550.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	284.150.900,00	247.261.200,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	89.727.000,00	87.327.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	155.800.000,00	103.900.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	82.900.000,00	78.750.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	72.900.000,00	25.150.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	548.150.000,00	481.400.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	135.150.000,00	127.800.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	90.200.000,00	88.100.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	44.950.000,00	39.700.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	413.000.000,00	353.600.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	111.800.000,00	70.150.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	126.400.000,00	126.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	84.900.000,00	70.550.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01	6.01.0.00.0.00.30.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	89.900.000,00	86.900.000,00	-	-	-	-	-	-
7			UNSUR KEWILAYAHAN	29.013.326.929,00	27.495.997.254,00	217.322.764,00	205.235.900,00	-	-	-	-
7.01			KECAMATAN	29.013.326.929,00	27.495.997.254,00	217.322.764,00	205.235.900,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000		KECAMATAN BANGGAE	6.611.962.907,00	6.454.602.269,00	169.857.764,00	168.265.900,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.150.836.172,00	5.026.439.492,00	21.477.499,00	20.500.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.342.750,00	6.126.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.558.000,00	2.557.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	329.500,00	329.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	440.000,00	360.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	424.750,00	401.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	296.000,00	295.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.060.000,00	957.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.234.500,00	1.227.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.977.307.581,00	4.860.479.202,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.573.157.331,00	4.491.949.302,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400.350.000,00	365.425.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.800.250,00	3.104.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.298.975,00	101.270.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	481.475,00	480.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.798.000,00	26.295.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.370.000,00	11.910.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	33.576.500,00	33.226.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.073.000,00	29.357.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	21.477.499,00	20.500.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	-	-
	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	13.977.499,00	13.000.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.099.266,00	22.367.090,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.423.100,00	3.415.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.676.166,00	18.951.490,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.787.600,00	36.195.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.799.600,00	15.211.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.918.000,00	5.914.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.070.000,00	15.070.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.389.115.735,00	1.362.162.777,00	148.380.265,00	147.765.900,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.496.000,00	549.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.496.000,00	549.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.387.619.735,00	1.361.613.277,00	148.380.265,00	147.765.900,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	904.083.375,00	900.083.277,00	112.380.265,00	111.765.900,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	483.536.360,00	461.530.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0004	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	47.936.360,00	47.930.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0004	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	72.000.000,00	66.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0004	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	72.000.000,00	66.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.31.0004	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	72.000.000,00	66.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000		KECAMATAN BANGGAE TIMUR	7.854.008.117,00	7.507.427.418,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.735.108.117,00	5.478.309.904,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.065.000,00	5.829.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.999.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	1.035.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	799.000,00	796.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.301.000,00	1.999.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	965.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.604.976.789,00	5.383.112.948,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.166.976.789,00	5.033.762.948,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	433.700.000,00	347.350.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.300.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.778.750,00	46.889.924,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.408.750,00	2.304.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.418.000,00	5.330.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.030.000,00	7.463.924,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.642.000,00	4.642.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.280.000,00	27.149.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.927.078,00	31.697.232,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.984.530,00	17.206.584,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.642.048,00	7.478.448,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.300.500,00	7.012.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.360.500,00	9.780.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.270.500,00	8.290.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.610.000,00	610.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.480.000,00	880.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.080.500.000,00	1.999.717.514,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.080.500.000,00	1.999.717.514,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.600.000.000,00	1.577.217.514,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	480.000.000,00	422.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.400.000,00	29.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38.400.000,00	29.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.32.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.400.000,00	29.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000		KECAMATAN PAMBOANG	3.100.721.952,00	2.975.979.305,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.639.499.352,00	2.527.201.205,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.483.645.540,00	2.393.080.165,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.444.729.540,00	2.356.752.165,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.916.000,00	36.328.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.323.000,00	7.310.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.763.000,00	2.970.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.060.000,00	3.840.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.918.712,00	116.764.640,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.669.000,00	30.272.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.799.712,00	12.741.740,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.450.000,00	73.750.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.612.100,00	10.046.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.350.500,00	3.684.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.561.600,00	2.714.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.700.000,00	3.648.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	490.000,00	490.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	490.000,00	490.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait	490.000,00	490.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	451.631.600,00	445.333.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.631.600,00	2.279.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.631.600,00	2.279.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	448.000.000,00	443.054.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	340.000.000,00	339.054.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.01.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	108.000.000,00	104.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.601.000,00	2.955.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.601.000,00	2.955.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.640.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.961.000,00	2.955.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.33.0000	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000		KECAMATAN SENDANA	3.591.631.614,00	3.368.836.061,00	9.200.000,00	9.200.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.974.964.614,00	2.804.146.461,00	9.200.000,00	9.200.000,00	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.898.000,00	8.827.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.483.000,00	1.455.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.483.000,00	1.483.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.483.000,00	1.468.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.483.000,00	1.455.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.966.000,00	2.966.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.833.896.109,00	2.689.476.861,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.734.596.109,00	2.615.976.861,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.300.000,00	73.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0001	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0001	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.157.500,00	27.325.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	741.000,00	697.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.596.000,00	1.587.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.873.000,00	3.806.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.132.500,00	18.420.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0001	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	9.200.000,00	9.200.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0001	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	9.200.000,00	9.200.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.481.005,00	64.435.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.194.000,00	3.194.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.187.005,00	9.041.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.100.000,00	52.200.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.082.000,00	14.082.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.092.000,00	1.092.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.990.000,00	12.990.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	588.625.000,00	541.089.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.680.000,00	7.280.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.680.000,00	7.280.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	580.945.000,00	533.809.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0001	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	945.000,00	945.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0002	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400.000.000,00	397.864.600,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0002	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	180.000.000,00	135.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.042.000,00	23.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	28.042.000,00	23.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.494.000,00	12.940.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.788.000,00	7.780.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.34.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.760.000,00	2.880.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000		KECAMATAN TAMMERO'DO	1.118.245.335,00	1.000.839.035,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.098.812.335,00	981.406.035,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.023.719.735,00	924.434.535,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	939.119.735,00	857.234.535,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.600.000,00	67.200.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.600.000,00	3.680.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	790.000,00	790.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.310.000,00	1.390.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.879.000,00	47.678.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.188.000,00	1.188.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.451.000,00	9.440.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.240.000,00	37.050.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.613.600,00	4.613.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.613.600,00	4.613.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.990.000,00	9.990.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.990.000,00	9.990.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.990.000,00	9.990.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.443.000,00	9.443.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.443.000,00	9.443.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.35.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.443.000,00	9.443.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000		KECAMATAN TUBO SENDANA	1.770.677.541,00	1.623.036.894,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.766.087.541,00	1.623.036.894,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	672.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.703.984.080,00	1.602.085.894,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.596.584.080,00	1.519.345.894,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.000.000,00	82.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.168.500,00	8.320.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.500,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.102.000,00	2.070.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.805.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.987.136,00	12.631.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.987.136,00	12.631.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.275.825,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.375.825,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.010.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.010.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.010.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	560.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	560.000,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.36.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	560.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000		KECAMATAN ULUMANDA	1.473.188.096,00	1.290.084.132,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.473.188.096,00	1.290.084.132,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.196.000,00	1.196.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.196.000,00	1.196.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.425.015.996,00	1.266.605.132,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.330.910.996,00	1.193.650.132,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.800.000,00	70.650.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.305.000,00	2.305.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.000.000,00	13.820.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	240.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	990.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.270.000,00	12.320.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.300.000,00	2.298.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000,00	2.298.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.676.100,00	6.165.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.37.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.676.100,00	6.165.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000		KECAMATAN MALUNDA	3.492.891.367,00	3.275.192.140,00	38.265.000,00	27.770.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.858.361.367,00	2.693.197.240,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.310.000,00	3.774.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.768.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.768.000,00	1.768.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.006.000,00	2.006.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.768.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.651.621.035,00	2.546.821.740,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.573.621.035,00	2.487.421.740,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78.000.000,00	59.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.363.500,00	27.707.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.441.500,00	4.414.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.552.000,00	5.993.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.370.000,00	17.300.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.841.832,00	110.039.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.554.150,00	12.906.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.887.682,00	4.583.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.400.000,00	92.550.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.225.000,00	4.855.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.225.000,00	4.855.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	634.530.000,00	581.994.900,00	38.265.000,00	27.770.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	800.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	381.730.000,00	372.994.900,00	38.265.000,00	27.770.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	381.730.000,00	372.994.900,00	38.265.000,00	27.770.000,00	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	252.000.000,00	209.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01	7.01.0.00.0.00.38.0001	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	252.000.000,00	209.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.274.170.685,00	2.945.849.676,00	-	-	-	-	-	-
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.274.170.685,00	2.945.849.676,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.274.170.685,00	2.945.849.676,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.736.789.085,00	1.540.113.376,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.925.500,00	5.780.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.316.500,00	3.985.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.232.000,00	-	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.512.000,00	970.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.865.000,00	825.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.591.617.114,00	1.453.498.660,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.502.161.614,00	1.377.072.660,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84.000.000,00	75.600.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.995.500,00	640.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.460.000,00	186.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.460.131,00	15.119.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.471.131,00	-	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.489.000,00	10.619.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.964.500,00	-	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.964.500,00	-	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.249.680,00	56.791.716,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.249.680,00	22.141.716,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000,00	34.650.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.572.160,00	8.924.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.572.160,00	8.924.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	541.397.700,00	428.008.900,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	541.397.700,00	428.008.900,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	526.403.200,00	413.014.400,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	14.994.500,00	14.994.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	779.346.800,00	768.728.300,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	779.346.800,00	768.728.300,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	711.212.000,00	711.212.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	68.134.800,00	57.516.300,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	14.171.500,00	8.307.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	14.171.500,00	8.307.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	14.171.500,00	8.307.500,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	202.465.600,00	200.691.600,00	-	-	-	-	-	-
8.01	8.01.0.00.0.00.39.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	202.465.600,00	200.691.600,00	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

U R A I A N	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.835.526.092,69	8.371.132.827,40
Sub Total	(29.396,00)	104.614.021,24
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69
Sub Total	21.686.890.164,50	4.940.110.717,93
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	29.396,00	(104.614.021,24)
Lain - Lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	U R A I A N	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
2	<u>PENDAPATAN</u>				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah	16.953.772.894,25	12.164.320.098,00	4.789.452.796,25	39,37
5	Pendapatan Retribusi Daerah	75.282.747.855,33	75.608.092.284,00	(325.344.428,67)	(0,43)
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00	207.419.889,00	6,23
7	Lain-Lain PAD Yang Sah - LO	6.356.853.301,59	1.882.647.719,55	4.474.205.582,04	237,65
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	102.127.985.123,17	92.982.251.284,55	9.145.733.838,62	9,84
9					
10	PENDAPATAN TRANSFER				
11	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN - LO				
12	1) Dana Bagi hasil - LO	5.605.326.300,00	6.036.371.000,00	(431.044.700,00)	(7,14)
13	Dana Alokasi Umum - LO	544.376.636.960,00	548.935.022.195,00	(4.558.385.235,00)	(0,83)
14	Dana Alokasi Khusus Fisik - LO	24.111.344.842,00	41.802.623.094,00	(17.691.278.252,00)	(42,32)
15	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO	138.273.455.431,00	130.583.017.821,00	7.690.437.610,00	5,89
16	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO	712.366.763.533,00	727.357.034.110,00	(14.990.270.577,00)	(2,06)
17					
18	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LO				
16	Dana Insentif Daerah - LO	-	-	-	-
17	Dana Desa - LO	-	-	-	-
18	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LO	-	-	-	-
19					
20	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LO				
21	Pendapatan Bagi Hasil - LO	15.829.763.036,00	28.841.548.575,00	(13.011.785.539,00)	(45,11)
22	Bantuan Keuangan - LO	-	-	-	-
23	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	15.829.763.036,00	28.841.548.575,00	(13.011.785.539,00)	(45,11)
24	Jumlah Pendapatan Transfer - LO	728.196.526.569,00	756.198.582.685,00	(28.002.056.116,00)	(3,70)

NO	U R A I A N	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
25					
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO				
27	Pendapatan Hibah	17.382.104.139,00	1.233.537.274,00	16.148.566.865,00	1.309,13
28	Pendapatan Dana Darurat - LO	-	-	-	-
29	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	-	-	-	-
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	17.382.104.139,00	1.233.537.274,00	16.148.566.865,00	1.309,13
31	JUMLAH PENDAPATAN - LO	847.706.615.831,17	850.414.371.243,55	(2.707.755.412,38)	(0,32)
32					
33	<u>BEBAN</u>				
34	Beban Pegawai	452.057.328.693,00	430.946.033.222,00	21.111.295.471,00	4,90
35	Beban Barang	65.515.253.582,63	47.358.414.587,79	18.156.838.994,84	38,34
36	Beban Jasa	64.428.117.169,00	67.412.320.035,00	(2.984.202.866,00)	(4,43)
37	Beban Pemeliharaan	16.280.052.167,78	11.198.663.296,00	5.081.388.871,78	45,37
38	Beban Perjalanan Dinas	15.494.004.886,00	21.974.998.320,00	(6.480.993.434,00)	(29,49)
39	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	159.500.000,00	128.450.000,00	31.050.000,00	24,17
40	Beban Barang dan Jasa BOS	24.247.376.270,00	25.397.107.624,00	(1.149.731.354,00)	(4,53)
41	Beban Barang dan Jasa BLUD	68.327.845.830,71	74.780.614.810,57	(6.452.768.979,86)	(8,63)
42	Beban Bunga	-	-	-	-
43	Beban Hibah	11.109.367.000,00	38.293.146.305,00	(27.183.779.305,00)	(70,99)
44	Beban Bantuan Sosial	59.040.000,00	63.360.000,00	(4.320.000,00)	(6,82)
45	Beban Penyusutan dan Amortisasi	114.358.997.167,50	108.864.386.901,29	5.494.610.266,21	5,05
46	Beban Penyisihan Piutang	606.386.783,80	704.124.143,32	(97.737.359,52)	(13,88)
47	Beban Transfer	48.051.945.661,00	55.178.321.370,98	(7.126.375.709,98)	(12,92)
48	Beban Lain-lain	-	-	-	-
49					
50	JUMLAH BEBAN	880.695.215.211,42	882.299.940.615,95	(1.604.725.404,53)	(0,18)
51					
52	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI (33 - 49)	(32.988.599.380,25)	(31.885.569.372,40)	(1.103.030.007,85)	3,46
53					
54	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO				
55	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	2.251.355.225,00	(2.251.355.225,00)	(100,00)
56	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1,00	6.181.110.940,00	(6.181.110.939,00)	(100,00)
58	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	477.222.180,00	4.075.154.045,00	(3.597.931.865,00)	(88,29)
59	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-

NO	U R A I A N	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
60	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.829.344.258,57	564.315.650,93	1.265.028.607,64	224,17
61	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO	(2.306.566.437,57)	3.792.996.469,07	(6.099.562.906,64)	(160,81)
62	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA - LO	(35.295.165.817,82)	(28.092.572.903,33)	(7.202.592.914,49)	25,64
63					
64	<u>POS LUAR BIASA</u>				
65	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
66	Beban Luar Biasa	2.499.579.085,00	518.665.643,00	1.980.913.442,00	381,92
67	POS LUAR BIASA - LO	(2.499.579.085,00)	(518.665.643,00)	(1.980.913.442,00)	381,92
68	SURPLUS / DEFISIT - LO	(37.794.744.902,82)	(28.611.238.546,33)	(9.183.506.356,49)	32,10

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.602.237.782.484,35	1.628.208.973.061,58
SURPLUS/DEFISIT LO	(37.794.744.902,82)	(28.611.238.546,33)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	-	74.096.666,85
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	589.895.296,66	2.565.951.302,25
EKUITAS AKHIR	1.565.032.932.878,19	1.602.237.782.484,35



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

N E R A C A

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO.	U R A I A N	SALDO TAHUN 2025	SALDO TAHUN 2024
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	KAS	21.727.604.509,50	4.849.337.935,69
4	Kas di Kas Daerah	15.999.375.461,40	51.385.522,63
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
7	Kas di BLUD	4.276.865.432,10	4.769.301.860,10
8	Kas di Bendahara FKTP	-	-
9	Kas di Bendahara BOS	-	-
10	Kas Lainnya	40.710.043,00	28.650.552,96
11	Setara Kas	-	-
12	Kas Dana BOSP	374.521.000,00	
13	Kas Dana BOK Puskesmas	1.036.132.573,00	
14	INVESTASI JANGKA PENDEK	-	-
15	PIUTANG	4.374.161.694,40	7.408.588.830,94
16	Piutang Pajak	7.557.256.778,40	7.071.388.398,40
17	Penyisihan Piutang Pajak	(6.439.654.637,17)	(6.002.111.838,80)
18	Piutang Pajak Netto	1.117.602.141,23	1.069.276.559,60
19	Piutang Retribusi	1.134.548.117,00	1.184.109.860,00
20	Penyisihan Piutang Retribusi	(612.423.416,78)	(458.508.815,50)
21	Piutang Retribusi Netto	522.124.700,22	725.601.044,50
22	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		
23	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		
24	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto	-	-
25	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.370.353.184,00	5.641.920.831,00
26	Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	(11.851.765,91)	(28.209.604,16)
27	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Netto	2.358.501.418,09	5.613.711.226,84
28	Piutang Pendapatan Lainnya		580.153.629,44
29	Penyisihan Pendapatan Lainnya		(580.153.629,44)
30	Piutang Pendapatan Lainnya Netto	-	-
31	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.999.299,04	56.999.299,04
32	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(56.999.299,04)	(56.999.299,04)
33	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	-	-
34	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	887.976.878,00	523.154.330,40
35	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(512.043.443,14)	(523.154.330,40)
36	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	375.933.434,86	-
37	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	104.545.912,40	104.545.912,40
38	PERSEDIAAN	24.944.001.132,48	32.108.669.768,82
39	Jumlah Aset Lancar	51.150.313.248,78	44.471.142.447,85
40			
41	INVESTASI JANGKA PANJANG		
42	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
43	- Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-
44	- Investasi Dalam Obligasi	-	-
45	- Investasi Dalam Proyek Pembangunan	-	-
46	- Investasi dalam Dana Bergulir	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00
47	- Investasi Non Permanen Lainnya	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)
48	- Dana Bergulir diragukan tertagih	-	-
49	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
50			
51	Investasi Jangka Panjang Permanen		
52	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67
53	- Investasi Permanen Lainnya	-	-
54	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67
55	Jumlah Investasi Jangka Panjang	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67
56			
57	ASET TETAP	1.475.883.616.947,45	1.547.906.920.646,29
58	Tanah	443.305.977.555,00	454.372.482.897,00
59	Peralatan dan Mesin	373.116.163.248,03	368.063.935.365,38
60	Gedung dan Bangunan	805.789.842.264,28	757.337.493.107,65

NO.	U R A I A N	SALDO TAHUN 2025	SALDO TAHUN 2024
61	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.081.642.931.941,40	1.073.448.390.089,92
62	Aset Tetap Lainnya	13.438.459.764,08	13.110.297.264,08
63	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	1.241.180.088,15	16.220.083.821,60
64	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.242.650.937.913,49)	(1.134.645.761.899,34)
65	Jumlah Aset tetap	1.475.883.616.947,45	1.547.906.920.646,29
66			
67	DANA CADANGAN	-	-
68	Dana Cadangan	-	-
69	Jumlah Dana Cadangan	-	-
70			
71	ASET LAINNYA		
72	Tagihan Jangka Panjang	334.283.791,00	334.283.791,00
73	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
74	Aset Tidak Berwujud	5.502.518.065,00	8.725.895.231,00
75	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.084.883.983,00)	(5.254.689.810,00)
76	Aset Tidak Berwujud Netto	2.417.634.082,00	3.471.205.421,00
77	Aset Lain-lain	61.531.351.073,79	62.428.242.355,45
78	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(54.261.420.435,93)	(55.667.176.781,58)
79	Aset Lain-lain Netto	7.269.930.637,86	6.761.065.573,87
80	Kas yang Dibatasi Penggunaannya		29.242.000,00
81	Jumlah Aset Lainnya	10.021.848.510,86	10.595.796.785,87
80	PROPERTI INVESTASI		
81	Properti Investasi Tanah	10.815.873.221,00	-
82	Jumlah Properti Investasi Tanah	10.815.873.221,00	-
83	JUMLAH ASET	1.615.327.299.951,19	1.671.758.852.161,68
84			
85	KEWAJIBAN		
86	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
87	- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	40.545.392,00	13.841.239,00
88	- Utang Bunga	-	-
89	- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
90	- Pendapatan Diterima Di Muka	82.500.000,00	3.583.333,33
91	- Utang Belanja	50.171.321.681,00	69.503.645.105,00
92	- Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
93	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33
94			
95	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
96	- Utang Dalam Negeri	-	-
97	- Utang Jangka Panjang Lainnya		
98	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
99			
100	JUMLAH KEWAJIBAN	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33
101			
102	EKUITAS		
103	EKUITAS	1.565.032.932.878,19	1.602.237.782.484,35
104	JUMLAH EKUITAS	1.565.032.932.878,19	1.602.237.782.484,35
105			
106	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.615.327.299.951,19	1.671.758.852.161,68



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

U R A I A N		Saldo Tahun 2025	Saldo Tahun 2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	16.467.968.514,25	11.783.885.632,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	75.411.226.265,00	75.254.820.161,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.356.723.874,34	2.096.439.233,07
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	3.519.130.300,00	6.639.074.000,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.607.363.000,00	
	Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	508.075.000,00	
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	544.376.636.960,00	548.935.022.195,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	162.384.800.273,00	172.385.640.915,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		
12	Penerimaan Dana Desa	47.727.678.768,00	55.820.851.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.101.330.683,00	24.527.029.863,00
14	Penerimaan Dana Bantuan Khusus Keuangan		
15	Penerimaan Hibah		
16	Jumlah Arus Masuk Kas	880.995.544.709,59	900.769.954.182,07
17			
18	Arus Keluar Kas		
19	Pembayaran Pegawai	451.753.620.104,00	424.459.751.438,00
20	Pembayaran Barang dan Jasa	259.163.085.597,78	267.189.138.109,60
21	Pembayaran Hibah	9.648.530.900,00	38.275.918.405,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial	59.040.000,00	63.360.000,00
23	Pembayaran Tidak Terduga	2.499.579.085,00	1.330.046.402,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	679.215.030,00	
	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	173.885.312,00	
25	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
	Pembayaran Bantuan Keuangan Umum	100.000.000,00	
26	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	101.783.916.472,00	103.764.358.365,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas	825.860.872.500,78	835.082.572.719,60
28	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	55.134.672.208,81	65.687.381.462,47
29			
30	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
31	Arus Masuk Kas		
32	Penjualan atas Tanah	-	-
33	Penjualan atas Peralatan dan mesin		
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-
35	Penjualan atas Jalan, irigasi dan jaringan		-
36	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-
37	Penjualan Aset Lainnya	20.449.800,00	5.925.000,00
38	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
39	Jumlah Arus Masuk Kas	20.449.800,00	5.925.000,00
40			
41	Arus Keluar Kas		
42	Perolehan Tanah	732.371.100,00	1.053.059.242,00
43	Perolehan Peralatan dan mesin	5.004.809.348,00	11.393.369.748,00
44	Perolehan Gedung dan Bangunan	23.797.538.257,00	33.605.479.353,00
45	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan	7.906.104.836,00	23.121.034.250,18
46	Perolehan Aset Tetap Lainnya	322.905.000,00	56.000.000,00
47	Perolehan Aset Lainnya	40.000.000,00	
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500.000.000,00	
49	Jumlah Arus Keluar Kas	38.303.728.541,00	69.228.942.593,18
50	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(38.283.278.741,00)	(69.223.017.593,18)
51			
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
53	Arus Masuk Kas		
54	Penerimaan Pinjaman dalam Negeri	-	-
55			
56	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-

U R A I A N		Saldo Tahun 2025	Saldo Tahun 2024
57	Arus Keluar Kas		
58	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-
59			
60	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
61	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	-
62			
63	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN		
64	Arus Masuk Kas		
65	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	45.883.045.391,00	50.944.453.833,00
66	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		
67	Uang Masuk atas adanya Pendapatan Bunga pada SMP 10 Ulumanda dan		
68	Uang Masuk atas sisa saldo pada rekening PPTK Bidang PAUD dan PNF		
69	Uang Masuk atas Jasa Giro pada rekening PPTKDinas Pekerjaan Umum dan		
70	Uang Masuk atas Jasa Giro pada rekening PPTK Sekretariat Daerah		
71	Uang Masuk atas Bantuan Sarana Peribadatan yang terlambat di SPJkan pada		
72	Jurnal Koreksi Pendapatan BLUD Pelayanan Kesehatan 2023		
73	Jumlah Arus Masuk Kas	45.883.045.391,00	50.944.453.833,00
74	Arus Keluar Kas		
75	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	45.856.201.681,00	51.039.774.955,00
76	Uang Keluar atas utang jangka pendek pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
77	Uang Keluar atas utang jangka pendek pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
78	Uang Keluar atas Jasa Giro Pada Rekening PPTK Dinas Pekerjaan Umum		
79	Uang Keluar atas Jasa Giro Pada Rekening PPTK Sekretariat Daerah		
80	Uang Keluar atas Kelebihan Pencairan Dana Desa		
81	Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran		
82			
83	Jumlah Arus Keluar Kas	45.856.201.681,00	51.039.774.955,00
84	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran	26.843.710,00	(95.321.122,00)
85	Kenaikan / Penurunan Kas	16.878.237.177,81	(3.630.957.252,71)
86	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	4.849.337.935,69	8.480.304.393,60
87	Koreksi SILPA Tahun lalu	29.396,00	(9.205,20)
88	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah Setelah Koreksi	4.849.367.331,69	8.480.313.598,80
89	Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	21.727.604.509,50	4.849.337.935,69
90	Kas di Kasda	15.999.375.461,40	51.385.522,63
91	Kas di Bendahara Penerimaan		-
92	Kas di Bendahara Pengeluaran		
93	Kas di BLUD	4.276.865.432,10	4.769.301.860,10
94	Kas Dana BOSP	374.521.000,00	-
95	Kas Dana BOK Puskesmas	1.036.132.573,00	
96	Kas Lainnya	40.710.043,00	28.650.552,96
		-	-
	Saldo Akhir Kas	21.727.604.509,50	4.849.337.935,69

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah diarahkan pada terwujudnya pelaporan keuangan yang kredibel dan berorientasi pada kinerja. Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kemampuan keuangan daerah, tingkat realisasi anggaran, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya keuangan. Pemerintah Daerah menempatkan laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja, sehingga penyusunannya harus selaras dengan capaian program dan kegiatan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan yang konsisten dengan perencanaan dan penganggaran, serta mendukung evaluasi kinerja secara menyeluruh.

Kebijakan penyusunan laporan keuangan juga difokuskan pada peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi, serta penguatan kualitas data keuangan. Validitas dan keandalan data menjadi perhatian utama guna meminimalkan kesalahan pencatatan dan potensi temuan pemeriksaan. Selain itu, Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan laporan keuangan sebagai instrumen pengambilan keputusan bagi pimpinan daerah. Dengan penyajian informasi keuangan yang tepat dan mudah dipahami, laporan keuangan diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

b. Manajemen

Membantu pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;

d. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka komponen laporan disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas, dan arus kas. Seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk itu Pemerintah Daerah selaku entitas akuntansi berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan, yang terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Seluruh laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, untuk:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan sejauh mana sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 5);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 Nomor 5);
- n. Peraturan Bupati Majene Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene;
- o. Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024);
- p. Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 7);
- q. Peraturan Bupati Majene Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 Nomor 13);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Gambaran Ekonomi Makro dan Fiskal

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Sesuai SAP
- 4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

VI. Penutup

BAB II

GAMBARAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Kabupaten Majene tahun 2025 merupakan implementasi dari Kerangka ekonomi makro yang meliputi evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan. Selain itu, hasil proyeksi ekonomi tersebut juga digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi global, kondisi ekonomi daerah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan APBD tahun 2025. Selanjutnya, dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Arah kebijakan ekonomi nasional Indonesia tahun 2025 berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab tantangan domestik dan global, mendukung transformasi ekonomi, serta 2025 akan tetap berupaya menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi rendah melalui pengendalian harga pangan, menjaga nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter Bank Indonesia, termasuk penguatan cadangan devisa, serta optimalisasi belanja pemerintah untuk mendukung permintaan domestik.

Dengan kondisi nasional dan global saat ini, maka Arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Majene tentunya harus selaras dengan kebijakan nasional, termasuk juga selaras dengan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025, yakni memfokuskan kepada akselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai penguatan pondasi transformasi. Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2025 memprioritaskan kepada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal menjadi solusi terbaik, tentunya tidak hanya tentang bagaimana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia lokal agar lebih produktif dan kompetitif, namun juga tentang kemampuan menjadikan sumber daya alam lokal yang dimiliki dapat memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat. Asumsi pertumbuhan ekonomi nasional pada semester kedua Tahun 2024 ini, tentunya akan menjadi acuan bagi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Majene pada semester kedua Tahun 2025. Oleh karenanya akan disajikan kondisi ekonomi daerah dan tantangan prospek pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Majene sebagai berikut:

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene secara kumulatif terus tumbuh positif dimana pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,28 persen dan tahun 2024 sebesar 5,3 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dari kondisi nasional dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,05 persen dan turun pada tahun 2024 sebesar 5,03 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat pada tahun 2023 sebesar 5,25 persen dan turun pada tahun 2024 sebesar 4,76 persen. Dengan

demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene juga masih lebih baik dari Provinsi Sulawesi Barat. Namun meskipun tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene lebih baik dari nasional maupun provinsi, akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi masih melambat pada kenaikan hanya sebesar 0,02 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Majene Tahun 2025
Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Regional Provinsi Sulawesi Barat, dan Kabupaten Majene Tahun 2018-2024

Pada tahun 2024, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dalam memberikan kontribusi terhadap angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, yakni pada angka 5,15. Sementara untuk lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi pada angka 6,04. Sementara lapangan usaha jasa perusahaan pada angka 9,23. Lapangan usaha lain, yakni administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi pada angka 1,70. Sementara jasa pendidikan dengan kontribusi pada angka 6,18. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024

No.	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	1,51	1,55	3,20	6,23	5,15
2.	Pertambangan dan Penggalian	(5,39)	5,73	2,32	2,21	6,17
3.	Industri Pengolahan	1,66	5,89	2,10	11,66	6,04
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,14	(3,4)	15,34	8,22	7,78
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,64	0,18	(2,17)	0,55	-4,08
6.	Konstruksi	(11,88)	9,64	(2,75)	5,01	7,63
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(1,55)	3,08	1,29	4,69	7,58
8.	Transportasi dan Pergudangan	(5,34)	3,07	8,97	11,45	5,54
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(6,04)	5,08	8,99	10,76	5,80
10.	Informasi dan Komunikasi	5,36	0,17	2,03	9,88	5,35
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,03	5,92	(1,44)	-0,89	2,14
12.	Real Estate	2,79	(2,70)	3,57	4,53	5,52
13.	Jasa Perusahaan	(4,94)	0,10	4,25	5,11	9,23
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(6,36)	0,11	2,25	0,09	1,70

No.	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
15.	Jasa Pendidikan	(5,68)	(1,68)	2,96	3,68	6,18
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(3,21)	(0,08)	4,14	4,46	8,50
17.	Jasa Lainnya	(3,41)	3,79	6,69	4,74	3,42
	Produk Domestik Regional Bruto	(1,38)	2,16	2,39	5,29	5,30

Sumber: BPS Kabupaten Majene Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas diharapkan Kabupaten Majene pada tahun 2025 dan 2026 dapat melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi dengan melakukan berbagai kebijakan diantaranya:

- Revitalisasi pusat-pusat perdagangan;
- Modernisasi sarana pertanian, kelautan, dan perikanan;
- Modernisasi metode produksi, distribusi, dan pemasaran pengelolaan SDA;
- Peningkatan cadangan pangan daerah; dan
- Penyusunan dan penerbitan regulasi pendukung peningkatan PAD, kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Tabel 2. 2 Perkembangan dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majene Tahun 2015 – 2025

TAHUN	LPE (%)
2016	6,02
2017	6,29
2018	6,06
2019	6,01
2020	-1,38
2021	2,16
2022	2.39
2023	5,28
2024	5,3
2025*	5,68
2026*	6,06

Keterangan : * Angka Proyeksi

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majene

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai alat ukur untuk menghitung pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain, PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Majene (Miliar Rupiah) Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	Tahun 2020	Rasio (%)	Tahun 2021	Rasio (%)	Tahun 2022	Rasio (%)	Tahun 2023	Rasio (%)	Tahun 2024	Rasio (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1248,7	35,4	1256,06	35,15	1305,60	35,43	1.385,30	35,72	1.456,65	35,67
Pertambangan dan Penggalian	89,90	2,5	95,04	2,64	97,25	2,64	99,40	2,56	105,53	2,58

Lapangan Usaha	Tahun 2020	Rasio (%)	Tahun 2021	Rasio (%)	Tahun 2022	Rasio (%)	Tahun 2023	Rasio (%)	Tahun 2024	Rasio (%)
Industri Pengolahan	199,9	5,7	211,64	5,88	216,10	5,86	241,11	6,22	255,67	6,26
Pengadaan Listrik dan Gas	4,6	0,1	4,46	0,12	5,15	0,14	5,57	0,01	6,00	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,1	0,1	5,16	0,14	5,27	0,14	5,35	0,01	5,13	0,01
Konstruksi	244,4	6,9	268,01	7,45	260,64	7,07	273,71	7,05	294,59	7,21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	335,4	9,5	345,72	9,61	350,19	9,50	366,60	9,45	394,39	9,65
Transportasi dan Pergudangan	57,3	1,66	59,11	1,64	64,41	1,75	71,78	1,85	75,76	1,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,1	0,3	10,71	0,30	11,67	0,32	12,92	0,33	13,67	0,33
Informasi dan Komunikasi	218,9	6,2	219,25	6,09	223,71	6,07	245,82	6,33	258,97	6,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	126,6	3,6	134,12	3,73	132,20	3,59	131,02	3,38	133,82	3,28
Real Estate	123,4	3,5	120,02	3,33	124,30	3,37	129,94	3,35	137,11	3,35
Jasa Perusahaan	1,7	0,0	1,74	0,05	1,81	0,05	1,91	0,04	2,08	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	370,3	10,5	369,77	10,27	378,10	10,26	378,44	9,76	384,86	9,42
Jasa Pendidikan	320,5	9,1	315,12	8,76	324,44	8,80	336,37	8,67	357,17	8,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53,4	1,5	53,36	1,48	55,57	1,51	58,05	1,49	62,99	1,54
Jasa lainnya	116,3	3,3	120,67	3,35	128,74	3,34	134,85	3,48	139,46	3,41
Total	3.526,8	100,0	3598,96	100,0	3685,15	100,0	3.878,13	100,0	4.083,86	100,0

Sumber Data : BPS Kabupaten Majene, 2025

Tabel 2. 4 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Majene (Miliar Rupiah) Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha	Tahun 2020	Rasio (%)	Tahun 2021	Rasio (%)	Tahun 2022	Rasio (%)	Tahun 2023	Rasio (%)	Tahun 2024	Rasio (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.894,7	37,9	1963,83	37,74	2.124,60	38,4	2.351,344	39,40	2.601,67	40,05
Pertambangan dan Penggalian	128,2	2,6	137,21	2,64	145,30	2,62	154,28	2,58	163,79	2,52
Industri Pengolahan	261,5	5,2	288,80	5,55	310,02	5,60	340,54	5,71	373,13	5,74
Pengadaan Listrik dan Gas	3,4	0,1	3,27	0,06	3,79	0,07	4,22	0,07	4,55	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,4	0,1	5,38	0,10	5,50	0,10	5,59	0,09	5,50	0,08
Konstruksi	313,3	6,3	357,62	6,87	365,69	6,61	396,21	6,64	435,96	6,71
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	547,0	11,0	579,27	11,13	617,20	11,16	668,30	11,20	730,09	11,23
Transportasi dan Pergudangan	76,0	1,5	78,85	1,52	91,80	1,17	111,20	1,86	119,05	1,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,8	0,3	14,72	0,28	16,34	0,30	18,38	0,03	19,93	0,31
Informasi dan Komunikasi	274,3	5,5	274,77	5,28	280,77	5,1	309,98	5,19	326,85	5,03
Jasa Keuangan dan Asuransi	182,0	3,6	203,60	3,91	218,43	3,95	219,39	3,68	227,39	3,50
Real Estate	167,2	3,3	163,44	3,14	173,96	3,1	187,45	3,14	201,24	3,10
Jasa Perusahaan	2,1	0,0	2,14	0,04	2,29	0,04	2,47	0,04	2,76	0,04

Lapangan Usaha	Tahun 2020	Rasio (%)	Tahun 2021	Rasio (%)	Tahun 2022	Rasio (%)	Tahun 2023	Rasio (%)	Tahun 2024	Rasio (%)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	485,6	9,7	482,37	9,27	496,12	8,97	484,51	8,12	504,90	7,77
Jasa Pendidikan	429,6	8,6	432,14	8,30	445,71	8,06	462,01	7,74	509,50	7,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	67,3	1,3	67,45	1,30	70,97	1,3	77,35	1,30	86,00	1,32
Jasa lainnya	142,1	2,8	149,17	2,87	163,24	2,95	175,21	2,94	183,51	2,82
Total	4.993,5	100,0	5.204,02	100,0	5.531,73	100,0	5.968,43	100,00	6.495,83	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Majene, 2025

Berdasarkan data tabel di atas, terkait perkembangan 17 sektor PDRB Kabupaten Majene dalam periode 2020 – 2025 baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten Majene dominan bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan dominasi lebih dari sepertiganya dan juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan kedua dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Majene, dimana pada tahun 2025 untuk harga konstan kontribusinya pada angka 9,65 dan untuk harga berlaku kontribusinya pada angka 11,23.

2.1.3. Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Majene

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Inflasi dihitung pada 98 kota pada 38 Provinsi se-Indonesia. Tingkat inflasi suatu daerah ditentukan berdasarkan kota terdekat yang dilakukan perhitungan oleh BPS. Untuk Kabupaten Majene maka nilai inflasi diambil berdasarkan nilai inflasi daerah terdekat yang dilakukan perhitungan inflasi oleh BPS, yaitu Kabupaten Mamuju. Inflasi dihitung berdasarkan pemantauan harga eceran berbagai komoditas barang dan jasa yang dilakukan oleh BPS dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/ jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

a. Perkembangan Inflasi Tahun Kalender

Selama semester II tahun 2024, Kabupaten Majene mengalami inflasi bulanan sebanyak tiga kali dan mengalami deflasi sebanyak tiga kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 0,70 persen.

Peningkatan harga yang terjadi pada Desember tersebut disebabkan kenaikan harga pada empat kelompok pengeluaran, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,83 persen, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen, dan kelompok transportasi sebesar 0,10 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 0,37 persen. Deflasi ini disebabkan penurunan indeks harga pada satu kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,02 persen. Sementara untuk inflasi tahun kalender menurut kelompok pengeluaran Kabupaten Majene (2022=100) (persen), semester II tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

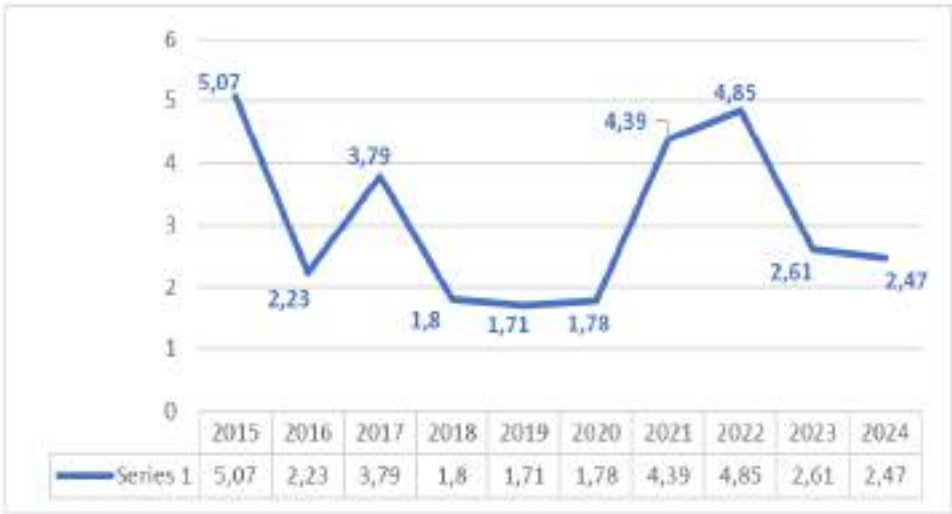
Tabel 2. 5 Tingkat Inflasi Umum Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2024

No.	Rincian	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2024
	Inflasi Umum	0,87
	Menurut Kelompok Pengeluaran	
1.	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,49
2.	Pakaian dan Alas Kaki	0,77
3.	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,57
4.	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,64
5.	Kesehatan	0,64
6.	Transportasi	0,51
7.	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,57
8.	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,39
9.	Pendidikan	0,71
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,03
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,78

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2025

b. Perkembangan Inflasi Tahun ke Tahun (Year on Year)

Inflasi Tahun ke Tahun (YoY) adalah perbandingan IHK bulan n tahun y dibanding bulan n tahun y-1. Selama kurun waktu tahun 2015-2022 inflasi tertinggi tercatat di Tahun 2015 yakni sebesar 5,07 persen dan pada tahun 2016 laju inflasi dapat ditekan, namun kembali meningkat pada tahun 2017, kemudian stagnan di tahun 2018-2020 dan kembali meningkat di tahun 2021 yakni sebesar 4,39 persen kemudian meningkat lagi di tahun 2022 yakni sebesar 4,85 persen. Namun tingkat inflasi kemudian mengalami penurunan masing-masing pada Tahun 2023 diangka 2,61 dan 2024 diangka 2,47. Untuk lebih jelasnya tingkat inflasi dari Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber data: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2025
Grafik 2. 2 Tingkat Inflasi Regional Tahun 2015-2024

2.1.4. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur menurut **Garis Kemiskinan (makanan & bukan makanan)**.

- Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kalori per kapita per hari).
- Garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lainnya.

Berdasarkan data kemiskinan Kabupaten Majene, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2015 sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan turun lagi pada tahun 2016-2019. Sedangkan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan sebesar 0,01 persen atau sebesar 13,73 persen dan kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 0,61 persen atau sebesar 14,34 persen. Angka kemiskinan Kabupaten Majene terus meningkat di tahun 2022 sebesar 15,13 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen dibandingkan tahun 2021. Namun pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan masing-masing pada angka 14,54 persen dan 13,64 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Majene Tahun 2014-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Ribuk)	Persentase
2014	278.049	24,74	15,05
2015	290.568	25,79	15,57
2016	320.728	24,69	14,89
2017	335.248	23,48	13,94
2018	349.522	23,53	13,79
2019	360.362	23,76	13,72
2020	384.344	24,12	13,73
2021	399.350	25,01	14,34
2022	433.111	26,62	15,13
2023	461.255	25,80	14,54
2024	482.173	24,41	13,64

Sumber data: BPS Kabupaten Majene, Tahun 2025

2.1.4.1. Persentase Penduduk Miskin

Selama periode 2020 – 2024, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene mengalami fluktuatif, kondisi tersebut setiap tahunnya seiring dengan penurunan angka kemiskinan skala Provinsi Sulbar dan Nasional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene mengalami penurunan selama empat tahun terakhir (2020- 2024) hingga mencapai angka 13,64 persen pada tahun 2024 dari 14,54 persen di tahun 2023. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, persentase penduduk miskin tertinggi adalah tahun 2022 (15,13 persen), sedangkan persentase penduduk miskin tahun 2021 dan 2020 yaitu 14,34 persen dan 13,73 persen. Lebih jelasnya jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Majene Tahun 2025

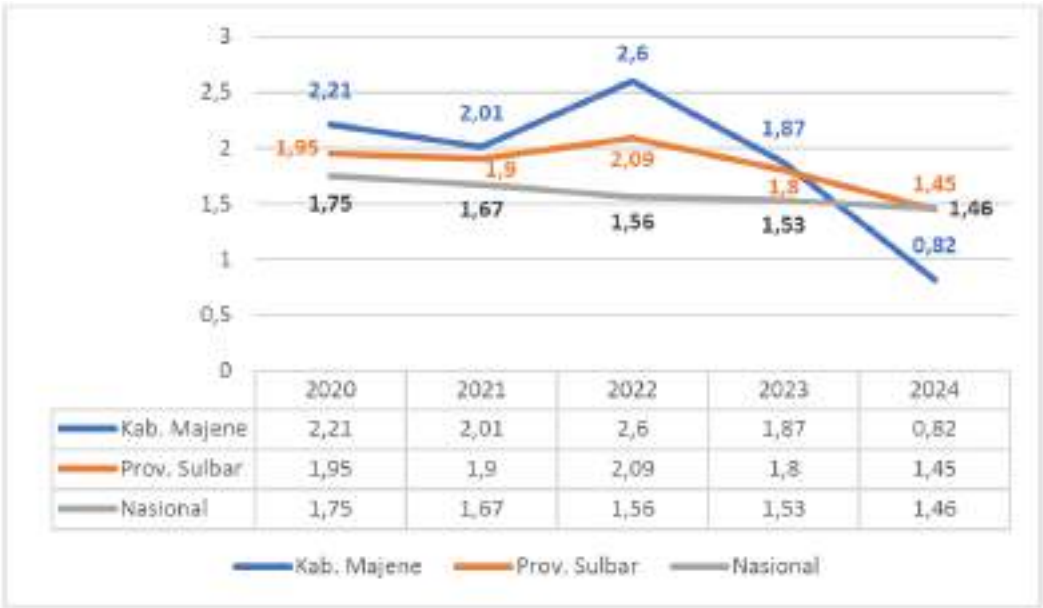
Grafik 2. 3 Grafik Penduduk Miskin Kabupaten Majene Periode 2020-2024

Persentase penduduk miskin merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, Kabupaten Majene menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Majene berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,93 persen. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan kinerja penurunan kemiskinan di tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai angka sebesar 0,71 persen, serta melampaui capaian penurunan kemiskinan secara nasional yang hanya sebesar 0,33 persen. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Majene masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat, dengan selisih sebesar 2,86 persen. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berprinsip keberpihakan terhadap masyarakat miskin dengan harapan angka kemiskinan di Kabupaten Majene dapat terus ditekan hingga setidaknya berada di bawah angka kemiskinan rata-rata di Provinsi Sulawesi Barat maupun Nasional.

2.1.4.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Majene

Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Persoalan kemiskinan bukan hanya mengacu pada jumlah dan persentase penduduk miskin. Tingkat Kedalaman dan Tingkat Keparahan Kemiskinan merupakan dimensi lain yang ikut menjadi parameter kemiskinan suatu wilayah. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Majene dibandingkan dengan kabupaten lain dalam provinsi dan perbandingannya dengan capaian provinsi dan nasional. Dari grafik di bawah terlihat bahwa selama periode 2020–2024 terjadi fluktuasi pada indeks kedalaman kemiskinan, dimana terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perlambatan ekonomi se-Sulbar yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperoleh komoditi makanan dan non makanan.



Sumber: BPS Kabupaten Majene Tahun 2025
Grafik 2. 4 Grafik Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Majene, Provinsi dan Nasional Periode 2020-2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Majene tahun 2020- 2024 cenderung fluktuatif. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,82 dibanding tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Majene semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

Secara nasional, indeks kedalaman kemiskinan stabil di angka 1,46 poin sementara di Kabupaten Majene meningkat sebesar 0,22 poin, lebih tinggi dibanding kenaikan skala provinsi yang juga mengalami kenaikan sebesar 1,45 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga komoditi di Kabupaten Majene masih sangat rentan terhadap instabilitas perekonomian. Oleh sebab itu, kebijakan pemerataan pembangunan menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga agar kesenjangan antar warga miskin tidak semakin melebar.

2.1.4.3. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) atau *Poverty Severity Index* memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) selama tahun 2022 – 2023 cenderung menurun. Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2022 naik 0,13 poin dibanding tahun 2021, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Begitu juga dengan tahun 2024, dimana indeks kedalaman kemiskinan naik 0,06 dibanding tahun sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Majene Tahun 2025

Grafik 2. 5 Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Majene, Provinsi dan Nasional Periode 2020-2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2020 – 2024 terjadi fluktuasi pada indeks keparahan kemiskinan, khususnya pada periode 2022 – 2023 dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan seiring dengan perlambatan ekonomi se-Sulbar yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dalam memperoleh komoditi makanan dan non makanan. Secara nasional, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan di angka 0,03 poin sementara skala Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami

Penurunan seiring penurunan ditingkat nasional sebesar 0,13 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Majene menghadapi kondisi yang lebih pelik dari rata-rata penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh sebab itu, kebijakan bantuan dan jaminan sosial tepat sasaran menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk

menjaga agar warga miskin di Kabupaten Majene tidak semakin terpuruk dalam kemiskinan yang akan semakin mempersulit perwujudan komitmen Pemkab. Majene dalam pengentasan kemiskinan.

2.1.4.4. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling esensial untuk kelangsungan hidup. Ini melampaui sekadar kemiskinan biasa, karena mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrem menghadapi kekurangan yang parah dalam berbagai aspek. Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

No.	Nama Daerah	Jumlah Kemiskinan Ekstrem (Ribuan Jiwa)				Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)			
		2021*	2022*	2023**	2024**	2021*	2022*	2023**	2024**
1	Sulawesi Barat	34,07	41,41	10,68	n/a	2,45	2,94	0,75	1,46
2	Majene	4,94	5,04	0,66	n/a	2,83	2,87	0,37	0,78
3	Polewali Mandar	16,07	27,90	8,24	n/a	3,64	6,27	1,84	0,94
4	Mamasa	5,23	3,76	0,63	n/a	3,23	2,30	0,38	0,66
5	Mamuju	4,87	1,79	0,39	n/a	1,63	0,59	0,12	2,06
6	Pasangkayu	0,96	2,10	0,00	n/a	0,53	1,15	0,00	2,82
7	Mamuju Tengah	2,01	0,82	0,77	n/a	1,47	0,59	0,54	1,75

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Tahun 2025, Keterangan:

- * : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
- ** : Estimasi dihitung oleh Satgas Data P3KE

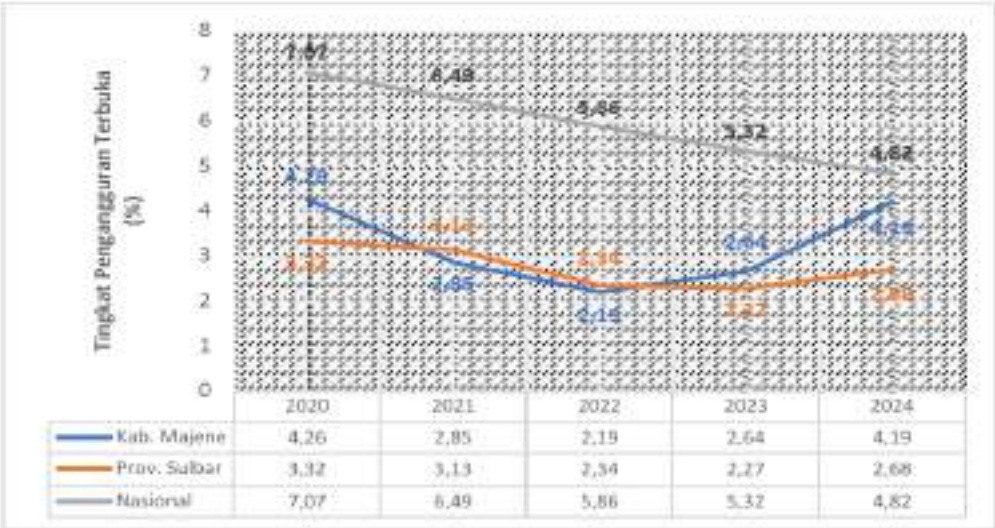
Berdasarkan pada tabel di atas, jumlah dan tingkat kemiskinan ekstrem di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2021- 2024, memperlihatkan bahwa pada data 2023 Provinsi Sulawesi Barat, jumlah kemiskinan ekstrem sebanyak 10,68 ribu jiwa dengan Tingkat persentase sebesar 0,78 persen dan mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 dan 2022, Penurunan ini bisa jadi merupakan keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Barat, Sedangkan pada wilayah Kabupaten Majene sedikit meningkat dari 4,94 ribu jiwa (2021) menjadi 5,04 ribu jiwa (2022) dan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 0,66 ribu jiwa dengan Tingkat persentase 0,37 persen, meskipun data capaian untuk tahun 2024 belum tersedia,

2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Majene

Secara umum, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi saling terkait erat, Tenaga kerja adalah tulang punggung produksi barang dan jasa, sehingga jumlah dan kualitas pekerja memengaruhi seberapa besar output ekonomi yang dihasilkan, Pekerja yang terampil dan produktif mendorong inovasi dan efisiensi, yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang kuat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memacu konsumsi, yang kembali menggerakkan roda ekonomi, Hubungan ini seperti lingkaran: tenaga kerja yang berkualitas mendukung ekonomi yang sehat, dan ekonomi yang berkembang memberikan peluang kerja serta kesejahteraan bagi tenaga kerja, Namun, jika tenaga kerja kurang terampil atau pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi bisa terhambat, begitu pula sebaliknya jika ekonomi stagnan, peluang kerja menurun,

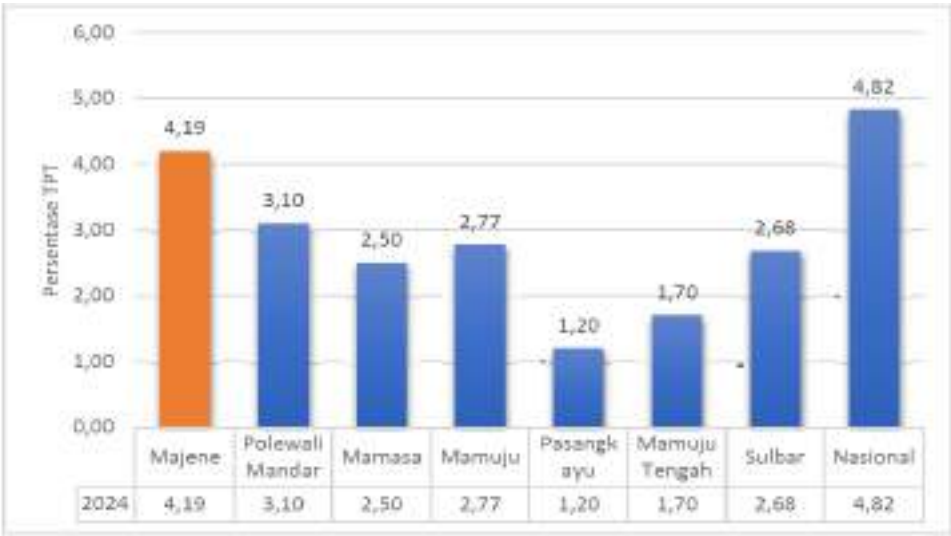
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas), Nilai TPT mencerminkan seberapa besar jumlah tenaga kerja yang belum dimanfaatkan, Menurut BPS Kabupaten Majene, pengangguran mencakup penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja,

Perkembangan TPT di Kabupaten Majene antara tahun 2020-2024 menunjukkan tren meningkat di periode dua tahun terakhir, Di tahun 2020 TPT Kabupaten Majene sebesar 4,26 persen menurun menjadi 2,85 persen di tahun 2021 dan 2,19 persen di tahun 2022, Mulai tahun 2023 TPT Kabupaten Majene meningkat di angka 2,64 persen dan tahun 2024 sebesar 4,19 persen Kabupaten Majene pada tahun 2024, TPT lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat yang berada di angka 2,68 persen dan lebih rendah dibandingkan Tingkat nasional yang mencapai 4,82 persen Sedangkan pada lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene menduduki peringkat pertama dengan Tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, Secara rinci dapat Tingkat Pengangguran Terbuka dijelaskan pada gambar sebagai berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2025

Grafik 2. 6 Perkembangan TPT Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2025

Grafik 2. 7 Posisi Relatif TPT Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

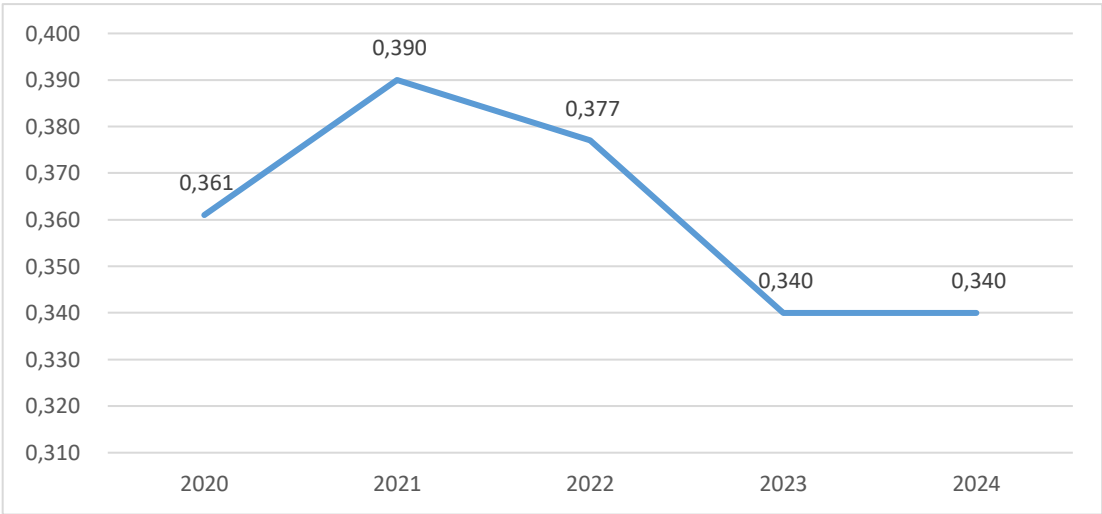
2.1.6. Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kabupaten Majene

Indeks gini atau *gini ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Indikator ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang

membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Indeks gini/kofisien gini merupakan salah satu indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan atau dengan kata lain indikator pengukur ketimpangan pendapatan. Kofisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok penduduk. Angka kofisien gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna), Angka kofisien gini yang semakin mendekati nol berarti dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila angka kofisien semakin mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

Gini Ratio Kabupaten Majene mengalami fluktuasi tiap Tahunnya dari 0,361 pada Tahun 2020 naik 0,02 poin menjadi 0,390 pada Tahun 2021 dan terus menurun 0,377 pada Tahun 2022 dan 0,340 Tahun 2023. Fluktuasi yang sama terjadi pada skala provinsi dan nasional di mana per Tahun 2023, Provinsi mencapai 0,35 dan pada skala nasional mencapai 0,380. Adapun perbandingan Indeks Gini Kabupaten Majene, dalam periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut,

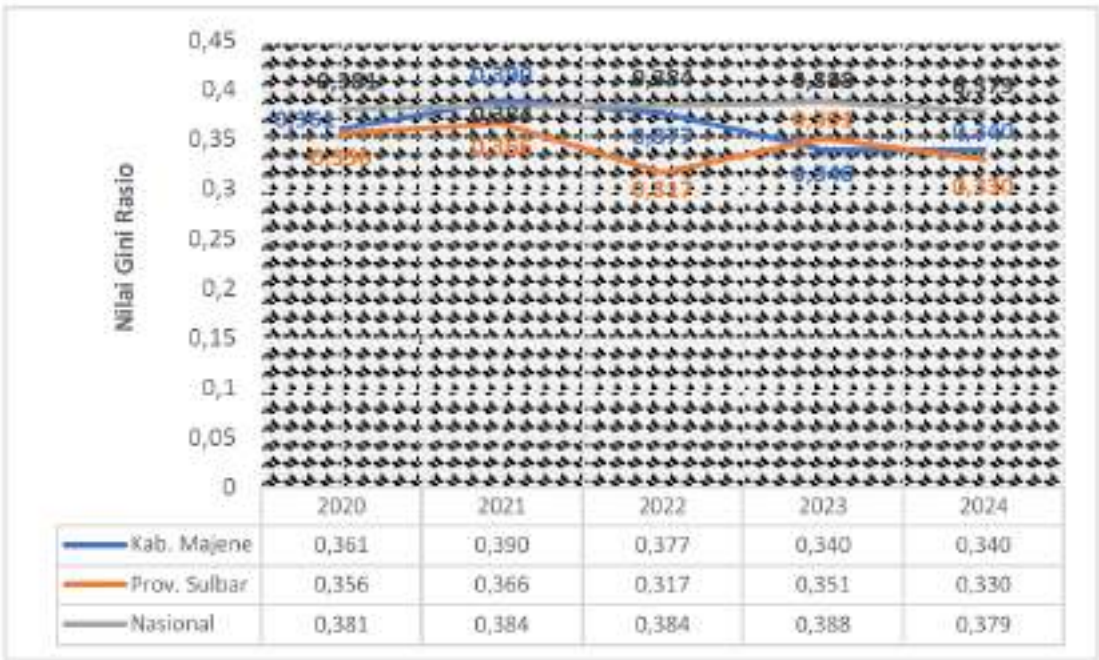


Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2025

Grafik 2. 8 Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kabupaten Majene Tahun 2020-2024

Kofisien semakin mendekati nol maka pendapatan semakin merata, Nilai 0,5-0,7 menggambarkan ketidakmerataan tinggi; 0,36-0,49 ketidakmerataan sedang; dan 0,20-0,35 mengalami ketidakmerataan rendah. Selama periode 2019-2023, pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 *gini ratio* Kabupaten Majene belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene sehingga masih menggunakan indeks gini tahun 2023.

Secara umum, Indeks Gini Kabupaten Majene masih berada di bawah Indeks Gini Nasional dan lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Barat, Dari tahun 2020 sampai 2024 indeks gini Kabupaten Majene fluktuatif, cenderung menurun. Untuk Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 sebesar 0,356 dan menurun pada tahun 2024 sebesar 0,330. Sedangkan pada Tingkat Nasional, tahun 2020 sebesar 0,381 dan menurun di tahun 2024 menjadi 0,379.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2025

Grafik 2. 9 Perbandingan Indeks Gini antara Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024

2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majene

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran gabungan yang digunakan untuk menilai tingkat pembangunan manusia suatu wilayah atau negara. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (diukur dari harapan hidup saat lahir), pendidikan (diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup (diukur dari pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli). Indeks ini dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sebagai indikator yang memberikan gambaran secara lebih komprehensif mengenai kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga sosial. Nilai IPM berkisar antara 0 hingga 1, dengan kategori rendah (<0,550), sedang (0,550–0,699), tinggi (0,700–0,799), dan sangat tinggi (≥0,800). Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut. IPM membantu pemerintah dan organisasi merancang kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Angka Indeks Pembangunan Manusia untuk berbagai kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Se-Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Uraian	Kabupaten						Provinsi Sulawesi Barat
		Majene	Polewali Mandar	Mamasa	Mamuju	Pasang-kayu	Mamuju Tengah	
2020	IPM	70,71	67,47	66,36	69,64	69,12	65,92	68,40
	Peringkat	1	4	5	2	3	6	
2021	IPM	71,10	67,85	66,97	69,80	69,37	66,38	68,64
	Peringkat	1	4	5	2	3	6	
2022	IPM	71,64	68,42	67,53	70,35	69,94	67,07	69,19
	Peringkat	1	4	5	2	3	6	
2023	IPM	72,44	69,24	68,14	71,07	70,42	67,63	69,80
	Peringkat	1	4	5	2	3	6	
2024	IPM	73,25	69,88	68,68	71,86	71,04	68,53	70,46
	Peringkat	1	4	5	2	3	6	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada Tahun 2024 Kabupaten Majene masih menempati peringkat pertama dengan nilai IPM sebesar 73,25. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat yang hanya mencapai 70,46.

Selain itu, sejak perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan Umur Harapan Hidup (UHH) hasil *long form* SP2020, Kabupaten Majene secara konsisten berada pada peringkat pertama pencapaian angka IPM tertinggi di antara seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia melalui berbagai program pembangunan. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk, yang tercermin dalam bentuk kontribusi komponen utama IPM. Komponen tersebut meliputi dimensi kesehatan yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH); dimensi pendidikan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS), serta dimensi ekonomi yang diukur melalui pengeluaran per kapita.

2.2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD dan memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun anggaran. Dalam penyusunan anggaran yang akan termuat dalam APBD harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
- b. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal; dan
- c. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga tetap memperhatikan kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026. Selain itu, arah kebijakan keuangan daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

- a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada;
- b. Disiplin Anggaran, adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Keadilan Anggaran, pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan; dan
- d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Majene antara lain sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi;
- c. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM;
- d. Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan kewajibannya;
- e. Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak;
- f. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh Daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
- g. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah;
- h. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan Retribusi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki;
- i. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), kerja sama Pemanfaatan (KSP) dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah;
- j. Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan pemerintah provinsi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
- k. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

Adanya kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya, berdampak pada berkurangnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola penggunaan DAU. Pada awalnya, DAU merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah yang tidak ditentukan penggunaannya, sehingga daerah dapat dengan leluasa mengalokasikan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah.

Di Kabupaten Majene dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut, berimbas pada terbatasnya anggaran pada perangkat daerah untuk operasional kantor dan pelaksanaan program

kegiatan yang tidak bisa menggunakan DAU, dan mau tidak mau harus menggunakan dana PAD. Sampai saat ini PAD di Kabupaten Majene belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Dalam tiga tahun terakhir kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan rata-rata hanya sekitar 8 persen. Selain itu, realisasi PAD di Kabupaten Majene khususnya penerimaan pajak dan retribusi daerah masih belum mencapai target. Dalam 2 tahun terakhir realisasi pajak dan retribusi daerah hanya sekitar 49,28 persen - 88,61 persen.

Untuk itu diperlukan usaha yang lebih keras lagi dalam pengelolaan PAD, agar realisasinya dapat mencapai target dan juga akan meningkatkan kemandirian daerah. Jika realisasi PAD dapat mencapai target, tentunya anggaran untuk operasional kantor/program kegiatan yang tidak dapat menggunakan DAU dapat ditingkatkan. Namun demikian, koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus tetap dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selain berpedoman pada arah kebijakan pendapatan daerah, dalam penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025, perencanaan pendapatan daerah juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan target pendapatan tahun 2025 dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan juga melihat potensi dari masing-masing jenis pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer (DAU dan DBH) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dihitung dengan memperhatikan realisasi dari sumber-sumber pendapatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. Kebijakan fiskal yang turut memengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM.

Berikut adalah tabel realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 – 2024, target pendapatan daerah Tahun 2025 dan proyeksi pendapatan daerah Tahun 2026:

Tabel 2. 9 Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022-2026

Uraian	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Target pada Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi pada Tahun 2026 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.563.315.736,67	87.794.782.521,37	92.468.261.209,07	116.958.226.043,00	102.912.043.269,00
Pajak Daerah	9.461.193.553,39	10.740.841.614,61	11.783.885.632,00	24.265.113.570,00	13.116.090.514,00
Retribusi Daerah	5.803.175.060,00	3.559.947.334,00	75.254.820.161,00	82.889.435.754,00	83.760.496.210,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.333.308.081,00	3.298.690.028,00	3.327.191.183,00	3.534.611.072,00	3.703.246.966,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51.965.639.042,28	70.195.303.544,76	2.102.364.233,07	6.269.065.647,00	2.332.209.579,00
PENDAPATAN TRANSFER	761.573.409.624,00	798.281.176.782,00	808.307.617.973,00	789.268.730.174,00	899.666.586.494,00
Transfer Pemerintah Pusat	737.695.311.296,00	773.902.149.240,00	783.780.588.110,00	768.344.427.000,00	810.237.386.397,00
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	10.784.967.445,00	8.064.980.017,00	6.639.074.000,00	5.826.710.000,00	7.389.455.339,00
Dana Alokasi Umum	485.848.952.931,00	508.603.740.400,00	548.935.022.195,00	535.243.742.000,00	610.978.403.079,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	74.119.888.581,00	78.097.585.458,00	41.802.623.094,00	24.453.962.000,00	46.527.364.569,00

Uraian	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Target pada Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi pada Tahun 2026 (Rp)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	109.054.956.339,00	123.320.564.365,00	130.583.017.821,00	150.164.160.000,00	145.342.163.410,00
Dana Insentif Daerah	2.301.731.000,00	0,00	0,00	0,00	-
Dana Desa	55.584.815.000,00	55.815.279.000,00	55.820.851.000,00	52.655.853.000,00	62.130.002.684,00
Transfer Antar Daerah	23.878.098.328,00	24.379.027.542,00	24.527.029.863,00	20.924.303.174,00	27.299.197.413,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	833.363.725.360,67	887.077.959.303,37	900.775.879.182,07	906.226.956.217,00	1.002.578.629.763,00

Untuk dapat merealisasikan target penerimaan pendapatan daerah untuk Tahun 2025 tersebut di atas, maka diperlukan strategi pencapaian sebagai berikut:

- a. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - 2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru;
 - 3) Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
 - 6) Penyuluhan secara aktif kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi untuk membangun *awareness* bahwa dengan membayar pajak/retribusi berarti masyarakat telah berkontribusi dalam peningkatan pembangunan daerah;
 - 7) Pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan; dan
 - 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Strategi pencapaian target dana transfer, dilakukan melalui:
 - 1) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
 - 2) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
- c. Strategi pencapaian target lain-lain pendapatan yang sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi terkait.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Majene dalam perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, sebagaimana yang termuat dalam asta cita nasional, meliputi:

- a. Kemandirian ekonomi berbasis sumber daya dan inovasi teknologi
- b. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan
- c. Kedaulatan pangan energi dan air
- d. Transformasi digital dan ekonomi kreatif
- e. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
- f. Kedaulatan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemberantasan korupsi
- g. Harmonisasi sosial dan toleransi beragama
- h. Kedaulatan kepemimpinan nasional di kancah global

Dan secara spesifik disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa perubahan arah kebijakan pembangunan daerah agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem
- d. Pengendalian inflasi daerah
- e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
- f. Dukungan swasembada pangan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kebijakan pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Majene yang termuat dalam Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2025-2029 antara lain adalah:

- a. Berperan serta dalam pelaksanaan program/kegiatan strategis yang mendukung agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar dilakukan dengan memperhatikan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tersebut di atas disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari *output* kegiatan untuk mendukung prioritas nasional;
- c. Penyusunan program dan kegiatan urusan non wajib pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang disusun untuk dapat mendukung prioritas nasional;
- d. Penyelarasan sasaran program yang sesuai dengan urusan dan kewenangan terkait secara tepat kegiatan dan tepat anggaran, sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing perangkat daerah;
- e. Proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar lebih diutamakan;
- f. Mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Majene;
- g. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- h. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji murni dan

tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan THR serta memperhitungkan *acress* gaji, Selain itu, alokasi anggaran untuk belanja tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan berdasarkan beban kerja dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah;

- i. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa; dan
- k. Belanja Tak Terduga digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan dana darurat seperti penanganan bencana alam.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut di atas, penyusunan anggaran belanja daerah dalam perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025 juga memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang pada tahun lalu menetapkan PMK Nomor 102 tahun 2024 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025. Perangkat Daerah yang memiliki sub kegiatan yang bisa didanai dari DAU diarahkan untuk memprioritaskan dalam Renja sub kegiatan yang ditunjuk oleh PMK Nomor 102 Tahun 2024.

Adapun realisasi belanja daerah Kabupaten Majene Tahun 2022–2023, target Tahun 2024 dan proyeksi belanja daerah di Kabupaten Majene Tahun 2025-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Realisasi Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 - 2026

Uraian	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Target Belanja Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)
BELANJA OPERASI	663.261.505.807,25	667.164.512.064,80	729.988.167.952,60	754.940.405.263,69	812.495.080.635,00
Belanja Pegawai	406.980.998.990,00	372.584.721.002,00	424.459.751.438,00	467.875.356.954,00	472.434.314.844,00
Belanja Barang dan Jasa	218.629.512.958,25	283.016.566.756,80	267.189.138.109,60	276.845.340.309,69	297.388.190.444,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	36.875.447.859,00	11.505.624.306,00	38.275.918.405,00	10.156.348.000,00	42.602.054.083,00
Belanja Bantuan Sosial	775.546.000,00	57.600.000,00	63.360.000,00	63.360.000,00	70.521.264,00
BELANJA MODAL	89.753.902.940,00	103.848.841.602,00	69.228.942.593,18	43.213.252.689,00	77.053.543.830,00
Belanja Modal Tanah	1.025.276.300,00	723.073.962,00	1.053.059.242,00	861.471.700,00	1.172.081.263,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.710.223.053,00	18.297.386.946,00	11.393.369.748,00	8.383.182.681,00	12.681.105.364,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.183.777.725,00	53.184.829.425,00	33.605.479.353,00	24.642.236.887,00	37.403.738.657,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.784.625.862,00	31.464.043.269,00	23.121.034.250,18	8.963.076.421,00	25.734.289.146,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	179.508.000,00	56.000.000,00	323.285.000,00	62.329.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	2.633.036.163,00	1.977.663.278,00	1.330.046.402,00	2.900.000.000,00	1.480.374.897,00

Uraian	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Target Belanja Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)
Belanja Tak Terduga	2.633.036.163,00	1.977.663.278,00	1.330.046.402,00	2.900.000.000,00	1.480.374.897,00
BELANJA TRANSFER	102.225.932.872,00	112.024.733.374,00	103.764.358.365,00	109.508.794.961,00	115.492.324.969,00
Belanja Bagi Hasil	1.237.099.872,00	1.216.354.374,00	0,00	2.696.704.257,00	-
Belanja Bantuan Keuangan	100.988.833.000,00	110.808.379.000,00	103.764.358.365,00	106.812.090.704,00	115.492.324.969,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	857.874.377.782,25	885.015.750.318,80	904.311.515.312,78	910.562.452.913,69	1.006.521.324.969,00

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan mengalami surplus, kelebihan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dengan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan mengalami defisit, kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi melalui penerimaan pembiayaan daerah yang juga ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah tabel realisasi pembiayaan daerah Tahun 2022 – 2024, target pembiayaan daerah Tahun 2025 dan proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2026 untuk Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Tabel 2. 11 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2022 - 2026

Uraian	JUMLAH				
	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Target Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi pada Tahun 2026 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	37.256.510.407,94	8.138.537.864,07	8.371.132.827,40	4.335.496.696,69	9.317.280.115,00
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	37.256.510.407,94	8.138.537.864,07	8.371.132.827,40	4.835.496.696,69	9.317.280.115,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.620.000.000,00	1.725.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	4.620.000.000,00	1.725.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETO	32.636.712.081,94	6.413.537.864,07	8.371.132.827,40	4.335.496.696,69	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun SiLPA Berkenaan	8.126.059.660,36	8.475.746.848,64	4.835.496.696,69	0,00	9.317.280.115,00

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK). Kedua jenis indikator ini berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

Indikator dan target kinerja harus dinyatakan secara jelas pada tahap perencanaan serta dievaluasi pada akhir pelaksanaan. Hal ini dilakukan untuk menjamin terpenuhinya aspek akuntabilitas dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Majene yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Adapun Visinya adalah Majene **Unggul, Mandiri, Religius**, Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

Majene Unggul: Bermakna bahwa Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,

Majene Mandiri: Bermakna bahwa Terwujudnya kemandirian ekonomi Kabupaten Majene yang berbasis potensi sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal untuk menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri,

Majene Religius: Bermakna bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Majene yang mengamalkan nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, budaya dan kearifan lokal yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Dengan demikian visi Kabupaten Majene yang Unggul, Mandiri dan Religius bermakna layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya, kemudian memfasilitasi kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang berbasis pada kemandirian yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut akan mendorong terwujudnya masyarakat religius sebagai perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat yang aman, tenteram dan nyaman.

Dalam rangka merealisasikan visi pembangunan tersebut, terdapat 4 (empat) misi pembangunan yang dicanangkan yaitu:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Majene yang unggul dan kompetitif;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel;
- c. Mewujudkan kemandirian perekonomian daerah berbasis sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan; dan
- d. Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal, dan agamis,

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene dan pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 12 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RKPD Kabupaten Majene Tahun 2025
Visi: Majene Unggul, Mandiri, Religius

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2025
1,	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Majene yang unggul dan kompetitif	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	69,56
			Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,56
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54
			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	62,67
				Prevalensi Stunting	%	16,00
			Terwujudnya Pembangunan Daerah yang responsif gender dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	96,70
				Indeks Perlindungan Anak	Nilai	71,26
			Meningkatnya standar hidup masyarakat yang merata hingga pedesaan	Persentase Penduduk Miskin	%	11,17
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,82
				Gini Ratio	Poin	0,321
2,	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang modern dan akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bermutu dan berbasis Teknologi informasi		Indeks Reformasi Birokrasi	poin	71 (BB)
			Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	Poin Predikat SAKIP	Predikat	BB
				Opini BPK	Predikat	WTP
				Nilai LPPD	Nilai	3,60
			Meningkatnya Kualitas dan ketepatan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86 (baik)
			Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan daerah	Tingkat maturitas SPBE	Poin Predikat	3,0 (Baik)
			Terciptanya upaya pembangunan daerah yang inovatif pada segala sektor	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	%	90,00
3,	Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Berbasis Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan lingkungan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis Pembangunan berkelanjutan		Pendapatan Perkapita	Rp	29,33 (Juta)
			Meningkatnya kontribusi pengelolaan SDA dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,46
				Laju Inflasi (yoy)	Poin	1,79
			Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan permukiman masyarakat	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	78,15
			Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	71
3,	Mewujudkan masyarakat Majene yang berbudaya, berkearifan lokal dan Agamis	Meningkatkan kesalihan sosial masyarakat		Indeks Kesalihan Sosial	%	78,00
			Meningkatnya kepedulian sosial, lingkungan dan bernegara	Angka Kriminalitas	%	190

Prioritas Daerah Kabupaten Majene dalam RKPD Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Oleh karena itu, perumusan prioritas daerah perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga tercipta sinergi dan kesinambungan dari

tingkat pusat hingga daerah. Dengan adanya keterpaduan tersebut, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majene dapat berjalan secara efektif dan selaras dengan arah pembangunan nasional, guna mendukung terwujudnya Indonesia Maju.

Tema Pembangunan Kabupaten Majene tahun 2025 adalah “**Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dalam Menunjang Kemandirian Daerah**”, Adapun dari penjabaran tema tersebut, dapat disusun prioritas daerah sebagai berikut:

a. Penguatan reformasi birokrasi, inklusifitas pelayanan publik dan supremasi hukum, Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi;
- 2) Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 3) Peningkatan profesionalitas ASN;
- 4) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- 5) Optimalisasi pengawasan internal pemerintah;
- 6) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik; dan
- 7) Implementasi *Smart City*.

Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:

- 1) Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 7) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 8) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 9) Program Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- 10) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

b. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
- 2) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Implementasi perda literasi;
- 4) Penurunan angka prevalensi stunting;
- 5) Penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- 6) Penurunan angka putus sekolah;
- 7) Penguatan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat;
- 8) Penurunan angka kemiskinan ekstrem melalui penguatan kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat miskin seperti:
 - a) Penguatan pendataan dan verifikasi data penduduk miskin
 - b) Penguatan program PKH
 - c) Bantuan sosial tepat sasaran
 - d) Pemrioritasan lokus pembangunan infrastruktur dasar di pusat- pusat kemiskinan;
- 9) Penguatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial);
- 10) Pelayanan Jaminan Sosial bagi Masyarakat berpenghasilan rendah Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:
 - a) Program Pengelolaan Pendidikan;
 - b) Program Pengembangan Kurikulum;
 - c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - f) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

- g) Program Pengendalian Penduduk;
 - h) Program Rehabilitasi Sosial;
 - i) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - j) Program Peningkatan Kapasitas Pemuda;
 - k) Program Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - l) Program Pengendalian Pembangunan Daerah,
- c. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak
Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- 1) Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) Penguatan kabupaten Layak anak,
- Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah
- 1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2) Program Perlindungan Perempuan;
 - 3) Program Perlindungan Khusus Anak;
 - 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - 5) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha); dan
 - 6) Program Perlindungan Khusus Anak,
- d. Penguatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal
Untuk mendukung prioritas daerah tersebut dijabarkan terhadap sasaran pembangunan sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan Sumber Daya Alam unggulan;
 - 2) Peningkatan kualitas produk Unggulan;
 - 3) Penguatan Kapasitas dan Produktivitas IKM, UMKM;
 - 4) Penguatan BUMD Desa dalam meningkatkan perekonomian;
 - 5) Optimalisasi bantuan usaha pelaku IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif;
 - 6) Penguatan pemasaran produk IKM dan UMKM serta ekonomi kreatif;
 - 7) Penguatan promosi destinasi pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat;
 - 8) Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan;
 - 9) Penguatan agrobisnis dan agroteknologi; dan
 - 10) Revitalisasi industrialisasi daerah,
- Program prioritas yang mendukung sasaran pembangunan tersebut adalah:
- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
 - 2) Program Pengembangan UMKM;
 - 3) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
 - 5) Program Penyuluhan Pertanian;
 - 6) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 8) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - 9) Program Pemasaran Pariwisata;
 - 10) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
 - 11) Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
 - 12) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - 13) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - 14) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 15) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 - 16) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - 17) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan
 - 18) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Tabel 2. 13 Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tahun 2025

Indikator makro	Target Kabupaten Majene	Target Provinsi Sulawesi Barat	Target Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	6,46 %	5,8 %	5,3% – 5,6%
Tingkat Kemiskinan	11,17 %	9,73 %	7,0% – 8,0%
Indeks Pembangunan Manusia	69,56	70,36	74,27
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,82 %	2,45 %	4,5% – 5,0%
Indeks Gini Rasio	0,321	0,338	0,379 – 0,382

Sumber: RKPD Kabupaten Majene, 2025

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2026. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan,

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan.

Kesesuaian capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan parameter keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang dapat menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja juga diperlukan oleh masyarakat sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan daerah terdiri dari Indikator Tujuan, Indikator Sasaran Daerah, Indikator Kinerja sasaran OPD dan Indikator Kinerja Program.

2.3.1. Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi, Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tahun 2025

No	Indikator	Target
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	69,56
2	Indeks Reformasi Birokrasi	71 (BB)
3	Pendapatan Perkapita	30,03 (Juta)
4	Indeks Kesalihan Sosial	78%
5	Rata-rata Lama Sekolah	9,56 Tahun
6	Harapan Lama Sekolah	14,54 Tahun

No	Indikator	Target
7	Angka Harapan Hidup	62,67 Tahun
8	Prevalensi Stunting	16,00%
9	Indeks Pembangunan Gender	96,70 Poin
10	Indeks Perlindungan Anak	72,6 Poin
11	Persentase Penduduk Miskin	11,17%
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,82%
13	Gini Ratio	0,321 Poin
14	Poin Predikat SAKIP	BB
15	Opini BPK	WTP
16	Nilai LPPD	3,60 Poin
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 (Baik)
18	Tingkat maturitas SPBE	3 Poin (Baik)
19	Persentase Inovasi Daerah yang terimplementasikan berkesinambungan	90%
20	Pertumbuhan Ekonomi	6,46%
21	Laju Inflasi (yoy)	1,79 Poin
22	Indeks Infrastruktur Wilayah	78,15%
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71%
24	Angka Kriminalitas	190 Kasus
25	Laju Inflasi (yoy)	1,79 Poin

2.3.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Majene, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 15 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Nilai IPM (Index Pembangunan Manusia)	Nilai	69,56
2	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	71 (BB)
3	Pendapatan Perkapita	Rp	30,03 (Juta)
4	Indeks Kesalihan Sosial	%	78
5	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,56
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,54
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	62,67
8	Prevalensi Stunting	%	16,00
9	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	96,70
10	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	72,6
11	Persentase Penduduk Miskin	%	11,17
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,82
13	Gini Ratio	Poin	0,321
14	Poin Predikat SAKIP	Predikat	BB
15	Opini BPK	Predikat	WTP
16	Nilai LPPD	Nilai	3,60
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86 (baik)
18	Tingkat Maturitas SPBE	Poin (predikat)	3,6 (Baik)
19	Persentase Inovasi Daerah yang Terimplementasikan	%	90

No	Indikator	Satuan	Target
	Berkesinambungan		
20	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,46
21	Laju Inflasi (yoy)	Poin	1,79
22	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	78,15
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	71,20
24	Angka Kriminalitas	%	190
Aspek Pelayanan Umum			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	Angka Partisipasi Kasar SD	%	105,91
2	Angka Partisipasi Kasar SMP	%	98,23
3	Angka Partisipasi Murni SD	%	99,50
4	Angka Partisipasi Murni SMP	%	99,00
5	Angka Partisipasi Sekolah SD	%	99,50
6	Angka Partisipasi Sekolah SMP	%	99,00
7	Persentase Sarpras Sekolah Dalam Kondisi Baik	%	90,00
8	Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi B	%	87,00
9	Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi B	%	70,00
10	Persentase Satuan Pendidikan dan Pendidikan Non Formal yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	100,00
11	Persentase Guru PAUD, SD, SMP yang Bersertifikasi	%	90,00
12	Persentase Izin yang Diterbitkan	%	70
13	Persentase Bahasa dan Sastra yang di Kembangkan	%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,90
2	% Fasyankes yang Memiliki Dokumen Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien	%	73,00
3	Prevalensi Penyakit Menular	%	31,39
4	% Fasyankes yang Terpenuhi Kebutuhan ASPAK Sesuai Standar	%	90,91
5	Proporsi Anggaran yang Dialokasikan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	41,00
6	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	100,00
7	% Ketersediaan Apotek, Toko Obat, Alkes dan Optikal UMOT dan PIRT Sesuai Standar	%	95,00
8	Persentase Desa/ Kelurahan Sehat	%	60,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Persentase Bangunan Perkuatan Tebing (talud) dan Pengamanan Pantai (Tanggul) Dalam Kondisi Baik	%	89,62
2	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	96,75
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM / Jaringan Perpipaan Terhadap Jumlah Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten	%	65,82
4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (Non Perpipaan)	%	34,18
5	Persentase Sarana Persampahan Regional	%	100
6	Persentase Akses Sanitasi	%	85,00
7	Proporsi Drainase Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	96,22
8	Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	%	100,00
9	Persentase Kondisi Gedung Pemerintah Baik	%	100,00
10	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diawasi Atas Perizinan Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan	%	100,00
11	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	56,33

No	Indikator	Satuan	Target
12	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	98,50
13	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	100,00
14	Persentase Permohonan LUJK yang Terlayani	%	100,00
15	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dan RDTR	%	100,00
16	Ketersediaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	Ada/Tidak Ada	Ada
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Persentase Perbaikan Rumah Akibat Bencana	%	80,00
2	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten	%	75,00
3	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	%	85,00
4	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha di Kabupaten yang Ditangani Terhadap Total Luas Permukiman Kumuh Seluruh Kabupaten	%	85,00
5	Persentase Kawasan Permukiman di Kabupaten yang Ditangani	%	80,00
6	Persentase Kondisi PSU dalam Kondisi Baik	%	80,00
7	Persentase Perumahan yang Dilengkapi Dengan PSU	%	80,00
8	Persentase Sertifikat yang Diterbitkan	%	80,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diselesaikan	%	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100,00
3	Rasio PPNS Terhadap Jumlah Pegawai	%	75,00
4	Persentase PNS Satpol yang mengikuti Diklat/ Pendidikan	%	75,00
5	Persentase Anggota Linmas yang Bersertifikasi	%	75,00
6	Persentase Peningkatan Pelayanan, Responsifitas dalam Penanganan Bencana	%	100,00
7	Persentase Peningkatan Responsifitas dalam Penanganan Kebakaran	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	Persentase KAT yang Ditangani	%	100,00
2	Cakupan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100,00
3	Persentase PMKS yang Tertangani	%	75,00
4	Persentase Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	%	100,00
5	Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100,00
6	Persentase Kampung Siaga yang Terbentuk	%	35,00
7	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100,00
8	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
1	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga kerja	Ada/ Tidak ada	ada
2	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	100,00
3	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	100,00
4	Persentase Penempatan Pencari Kerja	%	100,00
5	Persentase Konflik Ketenagakerjaan yang Ditangani	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase Lembaga PUG yang Aktif	%	65,00

No	Indikator	Satuan	Target
2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	48,00
3	Persentase Perangkat Daerah yang Responsif Gender	%	80,00
4	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100,00
5	Persentase Keluarga dan Anak yang Terlayani	%	100,00
6	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	55,00
7	Persentase Data Gender dan Anak yang Tersedia dan Disajikan Sesuai Standar	%	70,00
8	Persentase Pemenuhan Hak Anak	%	90,00
9	Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	%	50,00
10	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang di Tangani	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
1	Persentase Lumbung Pangan Masyarakat yang Aktif	%	100,00
2	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	nilai	82,10
3	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	89,95
4	Persentase Desa Rawan Pangan	%	4,88
5	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN PERTANAHAN			
1	Persentase Pengajuan Izin Lokasi yang Disetujui	%	65,00
2	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Terfasilitasi	%	80,00
3	Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	80,00
4	Persentase Tanah Milik Masyarakat yang Terfasilitasi Untuk Mendapatkan Sertifikat	%	90,00
5	Persentase pengelolaan Tanah Kosong yang Dimanfaatkan	%	85,00
6	Persentase Luas Lahan yang Bersertifikat	%	65,00
7	Ketersediaan Dokumen Rencana Penggunaan Tanah	%	75,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100,00
2	Indeks Kualitas Air	%	59,15
3	Indeks Kualitas Udara	%	84,71
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	67,42
5	Luas RTH yang Tersedia	%	77,85
6	Persentase Perizinan Pengelolaan Limbah B3 yang Diterbitkan	%	100,00
7	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin PPLH yang Diterbitkan	%	90,00
8	Presentasi Data MHA yang Tersedia	%	25,00
9	Persentase Masyarakat / Komunitas Peduli Lingkungan Hidup yang Mendapatkan Edukasi Lingkungan Hidup	%	100,00
10	Persentase Pelatihan, Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	%	100,00
11	Klasifikasi Adipura	Peringkat	Kelas III
12	Persentase Aduan Lingkungan Hidup yang Ditangani	%	100,00
13	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	22,00
14	Persentase TP3SR Di Desa dan Kelurahan	%	20,73
15	Persentase Cakupan Area Penanganan Persampahan	%	64,75
16	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	66,35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Persentase Kepemilikan KTP	%	100,00

No	Indikator	Satuan	Target
2	Persentase Kepemilikan KK	%	100,00
3	Persentase Kepemilikan KIA	%	40,00
4	Persentase Kepemilikan Akte	%	100,00
5	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran	%	100,00
6	Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	%	100,00
7	Persentase OPD / Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data (MOU) Kependudukan	%	55,00
8	Persentase Ketersediaan <i>Database</i> Kependudukan	%	100,00
9	Persentase Jenis Informasi yang Dimutakhirkan dalam Data Profil Kependudukan	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	100,00
2	Persentase Jumlah Kerja Sama Desa	%	82,10
3	Cakupan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	%	100,00
4	Persentase Desa Berkembang; Mandiri; Maju	%	30,00
5	Persentase Bumdesa yang Aktif	%	35,00
6	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Dibina	%	4,00
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	%	80,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	TFR (<i>Total Fertility Rate</i>)	Nilai	2,52
2	Persentase <i>Contraceptive Prevalance Rate</i> (CPR)	%	75,93
3	Persentase peserta KB Aktif MKJP	%	42,00
4	Persentase Kampung KB	%	36,00
5	<i>Unmet Need</i>	%	9,12
6	Persentase PUS Kelompok Ketahanan Keluarga yang Ber-KB	%	83,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	%	80,50
2	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	89,00
3	Cakupan Pengelolaan Pelayaran	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Persentase PPID yang Aktif	%	100,00
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dan Terintegrasi	%	80,00
3	Jumlah Sistem Informasi yang Sudah Terintegrasi	SIM	6,00
4	Jumlah Layanan yang Sudah Berbasis Digital	Layanan	2
5	Indeks SPBE	Poin	3,0
6	Persentase Perangkat Daerah Sudah Tersambung Jaringan Internet	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
1	Persentase KSP yang Difasilitasi Perizinannya	%	25,00
2	Persentase Koperasi yang Aktif	%	36,70
3	Persentase KSP/USP Koperasi yang Sesuai Dengan Kriteria Penilaian	%	57,50
4	Persentase SDM Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	0,92
5	Persentase Pengelola Koperasi yang Bersertifikat	%	4,88
6	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	5,05
7	Persentase UMKM Yang Diberdayakan	%	5,43
8	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	%	4,33

No	Indikator	Satuan	Target
9	Persentase Usaha Mikro yang Melakukan Kemitraan	%	0,20
10	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Menjadi Usaha Kecil	%	0,16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
1	Dokumen Pengembangan iklim Penanaman Modal	Dok	2
2	Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	60
3	Jumlah Nilai Investasi	Milyar Rp	160,00
4	Dokumen Strategi Penanaman Modal	ada/tidak ada	ada
5	Nilai IKM (Penilaian Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan/Non Perizinan)	Point	85,00
6	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%	100,00
7	Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	%	95,00
8	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	%	75,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	100
2	Cakupan Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	%	100
3	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
1	Persentase Data Statistik Sektorial yang Terpenuhi	%	35
2	Persentase OPD yang Menyediakan Data Statistik Sektorial	%	35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
1	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Milik Pemerintah	%	55
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
1	Persentase Event Kesenian Skala Nasional/Regional yang Dilaksanakan	%	87,50
2	Persentase Lembaga Adat yang Dibina	%	100,00
3	Persentase Kelompok Kesenian yang Dibina	%	20,00
4	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	81,82
5	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	%	94,74
6	Persentase Sarana dan Prasarana Museum dalam Kondisi Baik	%	60,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
1	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	40,00
2	Persentase Perpustakaan yang Dibina	%	100,00
3	Persentase Kelompok Literasi yang Dibina	%	100,00
4	Persentase Naskah Kuno yang Diakuisisi/ Dialih Media (digitalisasi)/ Terdaftar Dalam Wilayahnya	%	26,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	%	92,50
2	Persentase Arsip yang Didokumentasikan (Scan)	%	26,00
3	Persentase Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup yang Dikelola	%	90,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	%	100,00
2	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	100,00
3	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	100,00

No	Indikator	Satuan	Target
4	Persentase Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	122,302
2	Jumlah Objek Wisata Super Prioritas yang Dikembangkan	Objek	5
3	Persentase Sarana dan Prasarana di Objek Wisata Prioritas dalam Kondisi Baik	%	75
4	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	0,80
5	Persentase Promosi Pariwisata	%	100
6	Persentase Ruang Berekspresi Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibangun	%	87,5
7	Persentase Peserta Pelatihan yang Memahami Materi Pelatihan	%	90,00
8	Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kompetensi (Terlatih)	%	93,33
9	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikasi (Uji Kompetensi)	%	93,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	5,00
2	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	%	5,00
3	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	%	5,00
4	Persentase Peningkatan Produk Komoditas Peternakan	%	5,00
5	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	%	75,00
6	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Ternak	%	100,00
7	Persentase Hama Penyakit yang Ditangani	%	80,00
8	Persentase Luas Serangan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan yang Tertangani	%	75,00
9	Persentase Pemberian Rekomendasi Pada Kelompok Tani Berkelanjutan yang Ditindaklanjuti	%	100,00
10	Persentase Penyuluh yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	100,00
11	Persentase Kelembagaan Petani yang Dibina	%	90,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
1	Persentase Permohonan Ijin Usaha Perdagangan yang Memperoleh Rekomendasi	%	77,00
2	Persentase Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	%	68,18
3	Persentase Kecukupan <i>Stock</i> Barang Kebutuhan Pokok Daerah	%	100,00
4	Persentase Usaha Komoditi Ekspor yang Mendapat Fasilitas Pengembangan	%	40,00
5	Persentase UTP yang Bertanda Tera Sah	%	100,00
6	Persentase Usaha Mikro yang Mendapat Fasilitas Pemasaran	%	20,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
1	Persentase Sentra Industri Aktif	%	100,00
2	Persentase IKM yang Menempati Sentra Industri	%	100,00
3	Persentase IKM yang Memiliki Rekomendasi Penerbitan Izin	%	83,33
4	Persentase IKM yang Terdaftar di SIINas	%	83,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Transmigrasi	Dokumen	1
2	Persentase Transmigrasi Umum	%	100
3	Persentase Kawasan Transmigrasi yang di Kembangkan	%	100
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH			

No	Indikator	Satuan	Target
1	Persentase Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang di Fasilitasi dan Terdokumentasi Dengan Baik	%	100,00
2	Persentase OPD Dengan Nilai IKM yang Kategori Baik	%	90,00
3	Persentase Tingkat Pemenuhan Data Indikator dalam Dokumen LPPD	%	100,00
4	Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan/ Diterbitkan	%	100,00
5	Persentase Fasilitasi Layanan Kesra	%	100,00
6	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah	%	100,00
7	Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian	%	100,00
8	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Pembangunan	%	100,00
9	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	%	100,00
10	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemantauan SDA	%	100,00
SEKRETARIAT DPRD			
1	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Untuk Anggota DPRD	%	100
2	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang di Fasilitasi	%	100
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
PERENCANAAN			
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu Penyusunannya Berdasarkan Regulasi	%	100
2	Persentase Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu Penyusunannya Berdasarkan Regulasi	%	100
3	Persentase Indikator Sasaran Dalam RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Tingkat Capaiannya di atas 90%	%	55,00
4	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang Tingkat Capaiannya di atas 90%	%	85,00
5	Persentase Indikator Sasaran dalam RPJMD Bidang Ekonomi dan SDA yang Tingkat Capaiannya di atas 90%	%	55,00
KEUANGAN			
1	Opini BPK		WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	1,20
3	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah daerah	%	100,00
4	Ketepatan waktu penyusunan Ranperda pertanggungjawaban APBD		Tepat Waktu
5	Ketepatan Waktu Pengesahan APBD		Tepat Waktu
6	Persentase OPD yang Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	90,00
7	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	%	5,44
8	Persentase peningkatan Pendapatan	%	5,23
KEPEGAWAIAN			
1	Persentase Data Kepegawaian yang <i>Up To Date</i>	%	100
2	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	25
3	Indeks kepuasan ASN Terhadap Pelayanan BKPSDM	%	90
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Persentase Pengembangan kompetensi ASN Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi	%	17
2	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural	%	39
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Persentase Rekomendasi Penelitian dan	%	100

No	Indikator	Satuan	Target
	pengembangan inovasi yang Ditindaklanjuti		
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Terdiseminasi	%	100
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
INSPEKTORAT DAERAH			
1	Persentase Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	%	100
2	Persentase catatan/Saran Hasil Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditindaklanjuti	%	100
3	Jumlah OPD yang Dievaluasi SAKIPnya Minimal B	OPD	18
4	Jumlah OPD yang Mendapatkan Pendampingan Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	OPD	12
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
1	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik	nilai	85,00
2	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi	%	98,00
3	Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda Sesuai Kewenangan Kecamatan	%	58,00
4	Persentase Rekomendasi FKUB Kecamatan yang Ditindaklanjuti	%	98,00
5	Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa dan Melaksanakan Siklus Tahunan Desa Tepat Waktu	%	58,00
Aspek Daya Saing Daerah			
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Rp	910.000
2	Nilai Tukar Petani	Poin	115,25
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	49,29
4	Produktivitas Total Daerah Berdasarkan PDRB ADBH	Poin	61,3
5	Indeks Desa Membangun (Desa kategori "Maju")	Desa	7
6	Rasio Ekspor Terhadap Impor	Rasio	0,65
7	Total Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank Umum dan BPR	Juta Rupiah	1.410.000
8	Jumlah Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Skala Usaha	Juta Rupiah	490.000
9	Rasio Ketersediaan Listrik	Rasio	99,95
10	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Kasus	190
11	Rasio Ketergantungan	Rasio	0,5

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan adalah laporan yang menyajikan ringkasan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dengan membandingkan target dengan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ikhtisar ini menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen APBD dan dapat memuat informasi persentase tingkat pencapaian program dan kegiatan, efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dapat digunakan untuk mengetahui kinerja suatu entitas akuntansi dalam mengelola anggaran. Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100 persen, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100 persen, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Realisasi kinerja keuangan instansi pemerintah Kabupaten Majene pada periode pelaporan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dari total pagu anggaran senilai Rp910.562.452.913,69 realisasi anggaran mencapai senilai Rp864.014.832.041,78 atau 94,88 persen, yang mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang optimal serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan sesuai rencana.

Realisasi pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Majene secara persentase menunjukkan tren positif dari target pendapatan senilai Rp906.226.956.217,00 mampu merealisasikan senilai Rp881.015.994.509,59 atau 97,21 persen. Jika ditelisik lebih jauh pendapatan utama pemerintah kabupaten Majene bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan senilai Rp789.268.730.174,00 terealisasi senilai Rp779.225.014.984,00 atau 98,72 persen dan Pendapatan Asli Daerah ditargetkan senilai Rp116.958.226.043,00 terealisasi Rp101.790.979.525,59 atau 87,03 persen.

Adapun beberapa faktor yang memengaruhi realisasi anggaran antara lain penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, dinamika kebijakan, serta kondisi eksternal maupun internal, yang berdampak pada belum optimalnya realisasi pada sebagian kegiatan. Namun demikian, instansi telah melakukan langkah-langkah pengendalian dan evaluasi secara berkala guna meminimalkan deviasi antara perencanaan dan realisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Untuk itu pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), terdapat beberapa peraturan lain yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5887);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7);

- l. Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene ((Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 5);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 Nomor 5);
- o. Peraturan Bupati Majene Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene;
- p. Peraturan Bupati Majene Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 7); dan
- q. Peraturan Bupati Majene Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 Nomor 13).

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan bagian strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan ini dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Optimalisasi PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, penguatan sistem pemungutan berbasis digital, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian. Pemerintah daerah juga terus melakukan pembenahan regulasi dan basis data objek pajak guna meningkatkan akurasi dan potensi penerimaan daerah.

Dalam hal pendapatan transfer, pemerintah daerah berpedoman pada kebijakan fiskal nasional serta melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat guna memastikan penyaluran dana transfer berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sementara itu, pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kemandirian keuangan, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang optimal, diharapkan pendapatan daerah mampu menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapat asli daerah, harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan agar dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

3.1.1.1.1 Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah, adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (Badan Pendapatan Daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain. Dengan berlakunya sistem dan prosedur tersebut, organisasi Badan Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sektor atau bidang pungutan tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional, sehingga:
 - 1) Dengan orientasi pada kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah; dan
 - 2) Sistem pengawasan menjadi lebih baik.
- b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:
 - 1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
 - 2) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi;
 - 3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya; dan
 - 4) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
- c. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
 - 1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan;
 - 2) Penyesuaian tarif; dan
 - 3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.
- d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi:
 - 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis
Dalam hal ini perlu diteliti apakah pungutan PAD telah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
 - 2) Pengawasan dan pengendalian teknis
Menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran.
 - 3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan
Menitikberatkan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.
- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD;
Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparaturnya pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.

3.1.1.1.2 Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya intensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan

retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional. Secara eksplisit kemungkinan ekstensifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa jenis pajak yang memenuhi kriteria adalah yang bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Objek pajak terletak di wilayah daerah yang bersangkutan;
- b. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- c. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi/pusat;
- d. Potensinya memadai;
- e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- g. Menjaga kelestarian lingkungan.

3.1.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri atas tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat memengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Untuk Tahun Anggaran 2025 jumlah pendapatan dalam APBD Pokok Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Majene Peraturan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 ditargetkan senilai Rp906.226.956.217,00. Dari jumlah tersebut yang terealisasi senilai Rp881.015.994.509,59 atau mencapai 97,21 persen. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci pada tabel berikut.

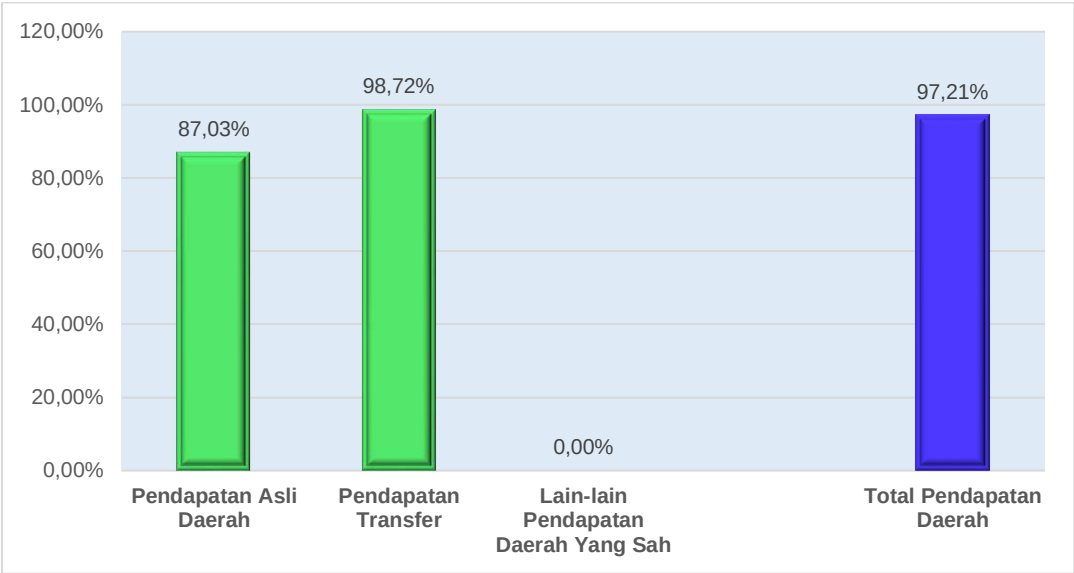
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Kelompok Pendapatan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah	116.958.226.043,00	101.790.979.525,59	87,03
Pendapatan Transfer	789.268.730.174,00	779.225.014.984,00	98,72
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
Total	906.226.956.217,00	881.015.994.509,59	97,21

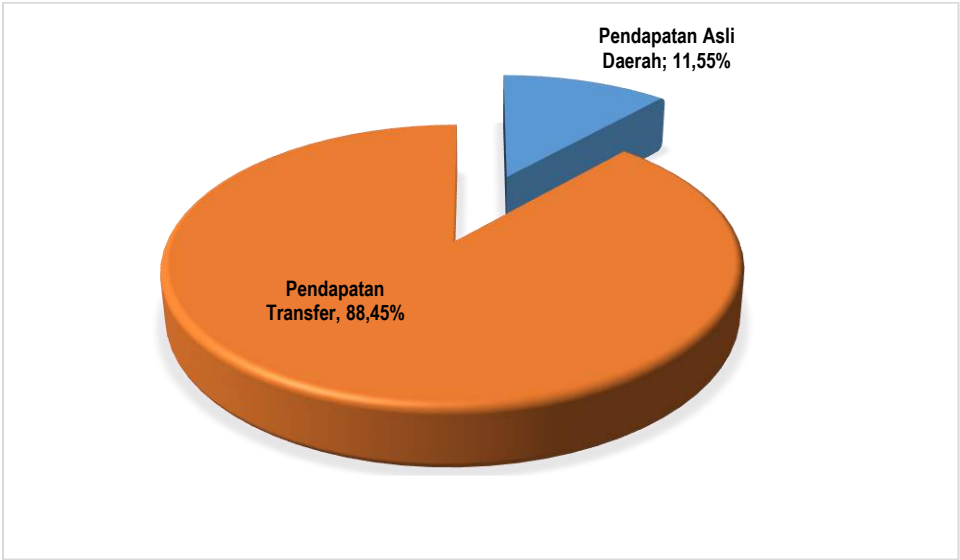
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk Pendapatan Asli Daerah senilai 87,03 persen, Pendapatan Transfer mencapai 98,72 persen dan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai 0,00 persen, sehingga secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan daerah Kabupaten Majene senilai Rp881.015.994.509,59 atau 97,21 persen dari target senilai

Rp906.226.956.217,00. Gambaran tingkat capaian target dan komposisi realisasi dari ketiga jenis pendapatan daerah tersebut pada Tahun 2025 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Grafik 3. 1 Capaian Target dan Realisasi Pendapatan



Grafik 3. 2 Komposisi Capaian Realisasi Tiap Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Dari diagram komposisi realisasi pendapatan daerah di atas untuk Tahun 2025 ini terlihat bahwa sektor Pendapatan Asli Daerah menyumbang senilai 11,55 persen dari total realisasi, sektor Pendapatan Transfer memberikan kontribusi senilai 88,45 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak memberikan kontribusi, yaitu senilai 0,00 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024 terdapat peningkatan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah di mana pada Tahun sebelumnya senilai 10,27 persen dan mengalami penurunan pada sektor Pendapatan Transfer Daerah yang sebelumnya mencatat senilai 89,73 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih mencatat senilai 0,00 persen terhadap total realisasi keseluruhan pendapatan. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat terus meningkat agar dapat memberikan kontribusi.

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing komponen penerimaan pendapatan daerah:

3.1.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

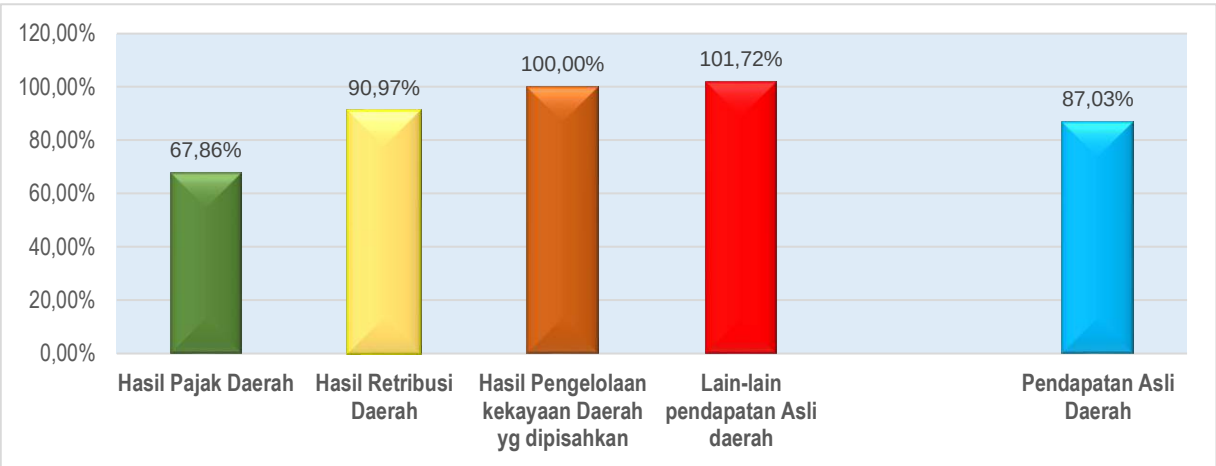
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan pendapatan asli daerah dapat memengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat akan semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan senilai Rp116.958.226.043,00 dan terealisasi senilai Rp101.790.979.525,59 atau mencapai 87,03 persen dari target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gambaran tingkat capaian target dari komponen pendapatan asli daerah pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Hasil Pajak Daerah	24.265.113.570,00	16.467.904.514,25	67,86
Hasil Retribusi Daerah	82.889.435.754,00	75.411.226.265,00	90,97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.534.611.072,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli daerah	6.269.065.647,00	6.377.237.674,34	101,72
Pendapatan Asli Daerah	116.958.226.043,00	101.790.979.525,59	87,03

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025



Grafik 3. 3 Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Dari tabel dan diagram di atas terlihat bahwa penerimaan pajak daerah belum dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan di mana tingkat penerimaan realisasi pajak daerah tersebut senilai 67,86 persen, sedangkan untuk hasil retribusi daerah senilai 90,97 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai 100,00 persen dan untuk lain-lain pendapatan asli daerah senilai 101,72 persen. Dari keempat komponen pendapatan asli daerah ada dua jenis pendapatan asli daerah yang memenuhi target 100 persen yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan senilai 100 persen dan lain-lain pendapatan asli daerah senilai 101,72 persen dan untuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah kurang 9,03 persen lagi untuk mencapai realisasi senilai 100 persen.

3.1.1.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik transfer tersebut bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah lainnya.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Salah satu kelompok dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah Dana Perimbangan, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang diberikan ke daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

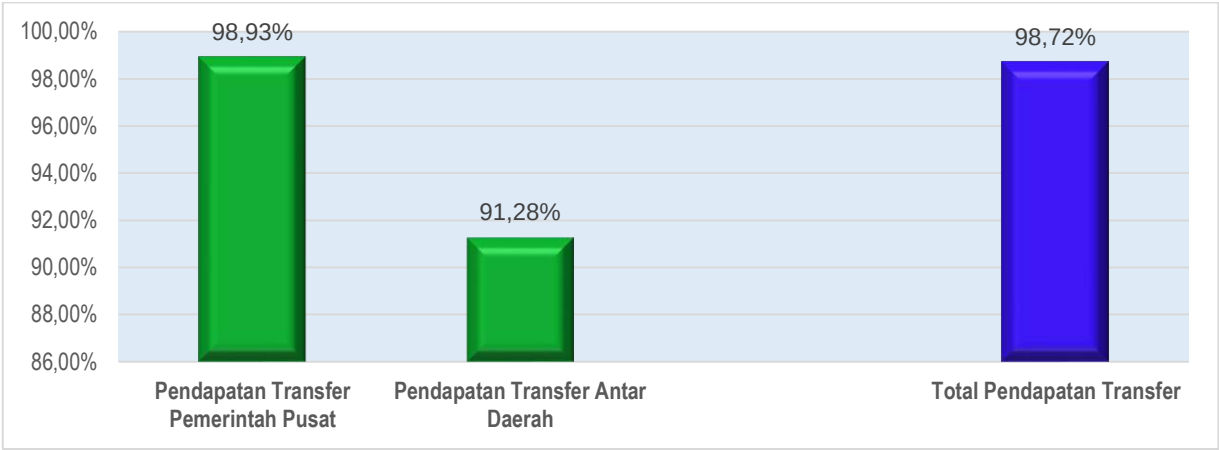
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Nonfisik. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut Dana Alokasi Umum merupakan penyumbang terbesar setiap Tahunnya dalam APBD Kabupaten Majene.

Untuk Tahun 2025 secara keseluruhan Pendapatan Transfer ditargetkan senilai Rp789.268.730.174,00 dan terealisasi senilai Rp779.225.014.984,00 atau mencapai 98,72 persen dari target. Gambaran tingkat capaian target dari komponen dana perimbangan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	768.344.427.000,00	760.123.684.301,00	98,93
Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	91,28
Total Pendapatan Transfer	789.268.730.174,00	779.225.014.984,00	98,72

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025



Grafik 3. 4 Persentase Capaian Target Pendapatan Transfer Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Dari tabel dan diagram di atas terlihat bahwa dari dua komponen penerimaan yang bersumber dari transfer, capaian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi tidak mencapai target yang ditentukan, Adapun kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat hanya terealisasi senilai 98,93 persen dan Pendapatan Transfer Antar Daerah hanya terealisasi senilai 91,28 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

3.1.1.2.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat merupakan penerimaan daerah yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan sumber pendapatan yang paling material memengaruhi kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Majene dalam menjalankan fungsi otonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Kelompok Transfer Pemerintah Pusat yang diperoleh Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa. Dana Perimbangan sendiri jenis pendapatan yang paling besar di antara semua kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di mana dalam rinciannya terdapat Dana Bagi Hasil Pajak maupun Non Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Capaian realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan pada Tahun 2025 Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Dana Perimbangan	715.688.574.000,00	712.396.005.533,00	99,53
Dana Bagi Hasil	5.826.710.000,00	5.634.568.300,00	96,70
Dana Alokasi Umum	535.243.742.000,00	544.376.636.960,00	101,70
Dana Alokasi Khusus Fisik	24.453.962.000,00	24.111.344.842,00	98,59
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	150.164.160.000,00	138.273.455.431,00	92,08
Dana Desa	52.655.853.000,00	47.727.678.768,00	90,64
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	768.344.427.000,00	760.123.684.301,00	98,93
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah,Tahun 2025			

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa persentase tertinggi capaian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2025 adalah Dana Alokasi Umum dengan persentase 101,70 persen. Jenis pendapatan yang tidak terealisasi sesuai target adalah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana Desa. Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2025 yang tertinggi berasal dari DBH

Pajak Bumi dan Bangunan, PPh Pasal 21, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent, DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Sumber Daya Alam Perikanan, dan DBH Sawit. Dana Bagi Hasil dalam perkembangan realisasinya bersifat tidak menetap, bergantung pada jumlah barang dan jasa yang dihasilkan daerah pada sektor-sektor perekonomiannya. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta keselarasan program Pemerintah Pusat dan daerah. Pada Tahun 2025 Dana Alokasi Umum telah melampaui target senilai Rp535.243.742.000,00 dan terealisasi senilai Rp544.376.636.960,00 atau senilai 101,70 persen. Adapun Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2025 hanya mampu mencapai target realisasi 92,99 persen di mana Dana Alokasi Khusus Fisik mencapai 98,59 persen dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik mencapai 92,08 persen.

3.1.1.2.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, atau Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 adalah Dana Bagi Hasil bersumber dari transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dana Bagi Hasil terdiri Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, BBN Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Bantuan Keuangan Khusus adalah transfer dari Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pendanaan program kegiatan prioritas Kabupaten Majene. Realisasi pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Rekapitulasi Target Dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	91,28
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.049.872.846,00	1.429.672.684,00	136,17
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	870.189.112,00	896.638.937,00	103,03
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.071.919.900,00	6.165.862.899,00	76,38
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	20.513.316,00	11.497.971,00	56,05
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.911.808.000,00	10.597.658.192,00	97,12
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	91,28
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025			

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat penerimaan daerah dari kelompok Pendapatan Transfer Antar Daerah persentase realisasinya mencapai 91,28 persen. Realisasi pendapatan transfer dari provinsi sangat bergantung dengan kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk merealisasikan objek pendapatan yang akan dibagi hasilkan ke pemerintah kabupaten/kota. Pada Tahun 2025 Pendapatan Transfer Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 senilai Rp19.101.330.683,00 mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya Tahun 2024 di mana Tahun 2024 mampu merealisasikan senilai Rp24.527.029.863,00 atau turun senilai Rp5.425.699.180,00. Hampir seluruh komponen dari Transfer Antar Daerah Pendapatan Bagi Hasil mengalami penurunan drastis kecuali pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok yang mengalami peningkatan dari Rp9.573.132.367,00 di Tahun 2024 menjadi Rp10.597.658.192,00 atau senilai 10,70 persen, dan untuk 2025 Pemerintah Kabupaten Majene kembali tidak mendapatkan Bantuan Keuangan seperti Tahun sebelumnya.

3.1.1.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh penerimaan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Untuk Tahun 2025 penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan atau ditargetkan. Sama dengan tahun sebelumnya Tahun 2024.

Tabel 3. 6 Rekapitulasi Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Hibah	0.00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai UU	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025			

3.1.2 Pengelolaan Belanja dan Transfer Daerah

3.1.2.1. Kebijakan Umum Belanja dan Transfer Daerah

Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Majene Tahun 2025 telah disusun berdasarkan Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Sesuai Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian di dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Untuk itu penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Total belanja dan transfer daerah Kabupaten Majene untuk Tahun 2025 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 dan ditargetkan senilai Rp910.562.452.913,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Rekapitulasi Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Majene Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja	801.053.657.952,69	760.927.584.227,78	94,99
- Belanja Operasi	754.940.405.263,69	720.624.276.601,78	95,45
- Belanja Modal	43.213.252.689,00	37.803.728.541,00	87,48
- Belanja Tak Terduga	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	86,19
Transfer	109.508.794.961,00	102.737.016.814,00	93,81
- Transfer Bagi Hasil	2.696.704.257,00	853.100.342,00	31,63
- Transfer Bantuan Keuangan	106.812.090.704,00	101.883.916.472,00	95,38
Total Belanja dan Transfer	910.562.452.913,69	863.664.601.041,78	94,84

3.1.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp801.053.657.952,69 terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp754.940.405.263,69, Belanja Modal senilai Rp43.213.252.689,00 dan Belanja Tak Terduga senilai Rp2.900.000.000,00. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025 total belanja daerah yang dapat terealisasi senilai Rp760.927.584.227,78 atau 94,99 persen dari anggaran. Anggaran dan realisasi dari masing-masing kelompok tersebut dirinci pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
- Belanja Operasi	754.940.405.263,69	720.624.276.601,78	95,45
- Belanja Modal	43.213.252.689,00	37.803.728.541,00	87,48
- Belanja Tak Terduga	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	86,19
Total Belanja	801.053.657.952,69	760.927.584.227,78	94,99
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025			

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk Belanja Operasi senilai 95,45 persen, Belanja Modal senilai 87,48 persen, dan Belanja Tak Terduga senilai 86,19 persen.

3.1.2.2.1. Belanja Operasi

Kelompok Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk mendanai operasional Pemerintah Kabupaten Majene dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangan dalam pemerintahan. Belanja Operasi digunakan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Pelaksanaan Belanja Operasi pada Tahun 2025 mencatatkan Belanja Pegawai sebagai komponen belanja dengan realisasi tertinggi dengan persentase senilai 96,55 persen. Di tempat kedua tercatat Belanja Hibah dengan tingkat realisasi senilai 95,00 persen. Selanjutnya Belanja Barang dan Jasa dengan tingkat realisasi senilai 93,61 persen. Realisasi terendah terdapat pada Belanja Bantuan Sosial yaitu senilai 93,18 persen. Secara keseluruhan Belanja Operasi yang ditargetkan senilai Rp754.940.405.263,69 dapat terealisasi senilai Rp720.624.276.601,78 atau senilai 95,45 persen. Gambaran tingkat capaian target dari komponen Belanja Operasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Pegawai	467.875.356.954,00	451.753.620.104,00	96,55
Belanja Barang dan Jasa	276.845.340.309,69	259.163.085.597,78	93,61
Belanja Hibah	10.156.348.000,00	9.648.530.900,00	95,00
Belanja Bantuan Sosial	63.360.000,00	59.040.000,00	93,18
Total Belanja Operasi	754.940.405.263,69	720.624.276.601,78	95,45
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025			

3.1.2.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya. Lima komponen Belanja Modal dari keenam komponen Belanja Modal tersebut rata-rata terealisasi di atas 85,00 persen, kecuali untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin hanya terealisasi 59,70 persen. Secara keseluruhan Belanja Modal yang ditargetkan senilai Rp43.213.252.689,00 dapat terealisasi senilai Rp37.803.728.541,00 atau senilai 87,48 persen.

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari komponen Belanja Modal tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 3. 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Modal Tanah	861.471.700,00	732.371.100,00	85,01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.383.182.681,00	5.004.809.348,00	59,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.642.236.887,00	23.797.538.257,00	96,57
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.963.076.421,00	7.906.104.836,00	88,20
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	323.285.000,00	322.905.000,00	99,88
Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
Total Belanja Modal	43.213.252.689,00	37.803.728.541,00	87,48

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

3.1.2.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tak terduga pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp2.900.000.000,00 dan terealisasi 86,19 persen yaitu senilai Rp2.499.579.085,00. Sama dengan tahun sebelumnya, Belanja Tak Terduga dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Pengeluaran atas pos Belanja Tak Terduga digunakan untuk bantuan perbaikan jalan poros Limboro Paminggalan Kecamatan Sendana; bantuan pembangunan bronjong dan normalisasi sungai Desa Seppong dan Mayamba Kecamatan Sendana; pembangunan talud Salobose Kecamatan Banggae; penanganan bahu jalan yang berpotensi ambles dilingkungan Baruga Barat; penanganan pembersihan longsor Jalan Poros Paminggalan; pembangunan talud Sungai Camba Camba Kecamatan Tammerodo Sendana; rehabilitasi jembatan Kelurahan Galung- Banggae; percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan; rehabilitasi gedung dan bangunan Kesehatan; pembayaran kekeliruan setoran pajak; pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah; perbaikan Tanggul pada Dusun Karondongan Tammeroddo dan

Lingkungan Parappe kelurahan Sirindu; operasional pengamanan aksi demonstrasi di Kabupaten Majene; dan dalam rangka darurat bencana Hidrometeorologi basah dan cuaca *Ekstrem* di Kabupaten Majene.

3.1.2.3. Target dan Realisasi Transfer Daerah

Transfer adalah pengeluaran uang oleh Pemerintah Kabupaten Majene sebagai entitas pelaporan ke entitas lain sebagai kewajiban atas perintah peraturan perundang-undangan. Transfer Daerah terdiri atas Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil merupakan bagi hasil atas sejumlah Pendapatan Asli Daerah kepada Desa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sementara Transfer Bantuan Keuangan merupakan transfer ke pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa sebanyak 10 persen dari Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Majene serta Dana Desa yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.

Transfer Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp109.508.794.961,00 dan realisasinya mencapai 93,81 persen yaitu senilai Rp102.737.016.814,00. Berikut gambaran tingkat capaian realisasi Transfer Daerah pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3. 11 Anggaran dan Realisasi Transfer Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Transfer Bagi Hasil	2.696.704.257,00	853.100.342,00	31,63
Transfer Bantuan Keuangan	106.812.090.704,00	101.883.916.472,00	95,38
Total Transfer	109.508.794.961,00	102.737.016.814,00	93,81

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

3.1.2.3.1. Transfer Bagi Hasil

Transfer Bagi Hasil merupakan transfer Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan bagi hasil atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah senilai 10 persen kepada seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Majene.

Transfer Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp2.696.704.257,00 dengan rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan senilai Rp2.048.029.357,00 dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah senilai Rp648.674.900,00. Pada Tahun 2025 realisasi atas transfer bagi hasil senilai Rp853.100.342,00 atau 31,63 persen. Berikut gambaran tingkat capaian realisasi Transfer Bagi Hasil pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Tabel 3. 12 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Bagi Hasil Pajak	2.048.029.357,00	679.215.030,00	33,16
Bagi Hasil Retribusi	648.674.900,00	173.885.312,00	26,80
Total Transfer Bagi Hasil	2.696.704.257,00	853.100.342,00	31,63

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

3.1.2.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran daerah dalam rangka peningkatan pemerataan kemampuan keuangan dan atau tujuan tertentu lainnya.

Pada APBD TA 2025 Pemerintah Kabupaten menganggarkan Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa lingkup Kabupaten Majene dalam bentuk Bantuan Keuangan khusus Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dianggarkan senilai Rp106.812.090.704,00 dan terealisasi senilai Rp101.883.916.472,00 atau terealisasi senilai 95,38 persen.

Berikut gambaran realisasi Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3. 13 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Bantuan Keuangan Umum	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Khusus	106.712.090.704,00	101.783.916.472,00	95,38
Total Bantuan Keuangan	106.812.090.704,00	101.883.916.472,00	95,38
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025			

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

3.1.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah meliputi Selisih Lebih Perhitungan Tahun Lalu, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pengembalian bantuan modal. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Majene untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dari penerimaan Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut di atas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) Pemerintah Daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Majene APBD Tahun Anggaran 2025 telah menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal bagi BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majene berupa penyertaan modal kepada Perumda Tirta Air Minum Mandar senilai Rp500.000.000,00.

3.1.3.2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Besaran Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp4.835.526.092,69 yang terdiri atas Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya senilai Rp4.835.496.696,69 dan Sisa Belanja Lainnya berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD senilai Rp29.396,00. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dengan anggaran senilai Rp500.000.000,00 dapat terealisasi mencapai 100,00 persen atau senilai Rp500.000.000,00. Berdasarkan realisasi tersebut maka terdapat surplus pada pembiayaan daerah senilai Rp4.335.526.092,69.

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 14 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Penerimaan Pembiayaan			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	100,00
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	0,00	29.396,00	0,00
Total	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	100,00
Pengeluaran Pembiayaan			
Penyertaan Modal	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
Total	4.335.496.696,69	4.335.526.092,69	100,00
Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025			

3.1.4 Mandatory Spending

Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara merata dan berkeadilan, pemerintah menetapkan kebijakan penganggaran yang mengutamakan sektor-sektor strategis melalui mekanisme *Mandatory spending*. *Mandatory spending* daerah adalah belanja atau pengeluaran negara maupun daerah yang pengalokasiannya telah ditetapkan dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja tersebut dengan persentase tertentu dan tidak dapat dikurangi atau dialihkan untuk keperluan lain. Pengaturan tersebut antara lain berupa batas minimal atau maksimal anggaran belanja/pengeluaran yang masuk dalam *mandatory spending* yang harus dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD.)

Mandatory spending merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk memastikan daerah mengalokasikan sumber dayanya demi pembangunan yang optimal. Agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pembangunan sektor prioritas maka dibuat ketentuan dalam peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan sebagian APBD-nya untuk keperluan belanja dalam fungsi tertentu. Kewajiban alokasi anggaran tersebut dilakukan mengingat sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan, alokasi belanja di daerah untuk sektor tertentu relatif lebih rendah. Namun evaluasi atas dampak peningkatan anggaran pada bidang tersebut pada kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu untuk dilakukan.

Mandatory spending bertujuan untuk mengarahkan pengelolaan keuangan pemerintah agar pengeluaran pada sektor-sektor prioritas dapat dipenuhi secara wajib dan berkelanjutan. Tujuan ini memastikan bahwa anggaran pemerintah digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, berdasarkan praktik pengelolaan keuangan pemerintah, tujuan penerapan *mandatory spending* adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat;
Mandatory spending berperan penting dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat karena mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya *mandatory spending*, pemerintah tidak dapat mengurangi anggaran pada sektor pelayanan dasar meskipun terjadi keterbatasan keuangan daerah. Hal ini memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan
- b. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antardaerah;
Mandatory spending berperan sebagai instrumen pemerintah dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antardaerah dengan mewajibkan pengalokasian anggaran pada sektor-sektor prioritas. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap daerah, termasuk daerah tertinggal, tetap mengalokasikan anggaran minimal untuk pendidikan, infrastruktur, dan pembangunan desa. Melalui alokasi anggaran yang terarah dan merata, *mandatory spending* mendorong pemerataan pembangunan sehingga daerah dengan kapasitas fiskal rendah tetap mampu menyediakan pelayanan publik yang memadai
- c. Mendorong pemerataan pembangunan nasional dan daerah;
Mandatory spending berperan penting dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional dan daerah dengan menetapkan kewajiban pengalokasian anggaran pada sektor-sektor prioritas. Kebijakan ini memastikan bahwa setiap daerah, tanpa memandang kemampuan fiskalnya, tetap mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan desa. Melalui *mandatory spending*, pemerintah pusat dan daerah dapat mengarahkan pembangunan agar tidak terpusat hanya di wilayah tertentu, melainkan menyebar secara merata ke seluruh daerah.
- d. Menjaga kesinambungan program pembangunan pada sektor prioritas.
Mandatory spending berperan dalam menjaga kesinambungan program pembangunan dengan mewajibkan pemerintah untuk tetap mengalokasikan anggaran pada sektor prioritas setiap tahun anggaran. Dengan adanya ketentuan ini, program pembangunan tidak mudah terhenti atau terganggu akibat perubahan kebijakan, pergantian pimpinan, maupun keterbatasan anggaran daerah. *Mandatory spending* memberikan kepastian pendanaan sehingga perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terarah

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran bidang pendidikan senilai 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Pemda wajib mengalokasikan belanja pendidikan (di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) minimal 20 persen, untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, yaitu untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan;
- b. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. *Mandatory* bidang kesehatan adalah kewajiban alokasi anggaran minimal untuk sektor kesehatan yang sebelumnya diatur dalam UU Kesehatan 2009 (5 persen APBN, 10 persen APBD) tetapi telah dihapus dalam Undang-Undang Kesehatan baru (UU No. 17 Tahun 2023), menggantinya dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang lebih fleksibel

namun menimbulkan kekhawatiran akan penurunan komitmen anggaran kesehatan dan potensi dampak negatif pada hak pelayanan kesehatan masyarakat

3.1.4.1 Bidang Pendidikan

Mandatory spending di bidang pendidikan adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran minimal bagi sektor pendidikan, sesuai amanat konstitusi dan undang-undang. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bicara mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Dengan semangat tersebut selanjutnya pada Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Adapun tujuannya adalah menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, tanpa terkendala perbedaan kondisi fiskal antar daerah.

Alokasi anggaran yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025 pada bidang pendidikan senilai Rp362.648.449.251,00 dengan realisasi senilai Rp266.442.341.122,00 atau 73,47 persen. Jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp910.562.452.913,69, maka anggaran pendidikan tersebut mencapai 29,26 persen dari Belanja Daerah atau memenuhi syarat berdasarkan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Pemda wajib mengalokasikan belanja pendidikan (di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) minimal 20 persen.

Alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Majene tiga tahun terakhir untuk bidang pendidikan Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 15 Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Total Belanja Daerah (Rp)	885.015.750.318,80	346.031.376.274,00	910.562.452.913,69
2.	Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan (Rp)	310.176.829.454,00	125.915.321.698,00	362.648.449.251,00
3	Persentase <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan (%)	35,05	36,39	29.26
4	Ketentuan <i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastruktur (%)	20,00	20,00	20,00
5	Kesimpulan	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi *mandatory spending* bidang pendidikan Tahun 2023-2025 telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu minimal 20 persen.

3.1.4.2 Pembangunan Infrastruktur Publik

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana serta prasarana yang mendukung layanan publik. Infrastruktur ini mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, energi, air bersih, dan telekomunikasi dasar. Tujuan utamanya adalah mempercepat akses masyarakat terhadap layanan publik, meningkatkan kualitas hidup, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pemerataan pembangunan antar daerah, khususnya daerah tertinggal, menciptakan kesempatan kerja melalui proyek pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan mempermudah distribusi barang dan jasa;

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40,00 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40,00 persen, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama lima tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Pengalokasian belanja untuk pembangunan infrastruktur publik oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 senilai Rp183.826.186.707,78 jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp801.053.657.952,69 maka anggaran pembangunan infrastruktur publik tersebut mencapai 20,19 persen dari Belanja dan Transfer Daerah.

Pengalokasian Dana Transfer Umum (DTU) untuk kegiatan pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Majene tiga tahun terakhir Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 16 Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Total Belanja Daerah di luar belanja Transfer (Rp)	772.991.016.944,80	300.612.271.289,00	801.053.657.952,69
2.	Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastruktur (Rp)	234.575.965.911,00	10.750.000.000,00	183.826.186.707,78
3	Persentase realisasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastruktur (%)	30,35	3,58	22,95
4	Ketentuan <i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastruktur (%)	40,00	40,00	40,00
5	Kesimpulan	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi *mandatory spending* bidang infrastruktur tahun 2023-2025 belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu paling rendah 40 persen. tidak terpenuhinya realisasi *mandatory spending* bidang infrastruktur hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan fiskal Kabupaten Majene yang hampir setengahnya digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja masih digunakan pembayaran utang tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Majene kedepannya mampu memanfaatkan semua potensi daerah untuk menambah kemampuan fiskalnya.

3.1.4.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari *mandatory spending* pemerintah daerah yang dialokasikan secara khusus untuk pembangunan dan pemberdayaan desa. Dana ini digunakan untuk: pembangunan infrastruktur dasar di desa (jalan, jembatan, irigasi dan sanitasi), peningkatan pelayanan publik di tingkat desa (pendidikan, kesehatan dan air bersih) dan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antardaerah, dan memperkuat kapasitas desa dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pelayanan publik di desa-desa, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dua program penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Kedua program tersebut adalah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa; dan

g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana 10 persen (sepuluh) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), wajib dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di desa. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Majene mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp54.056.237.704,00.

Pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Kabupaten Majene 3 tahun terakhir Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 17 Realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Dana Perimbangan (Rp)	712.982.069.240,00	718.338.290.000,00	712.396.005.533,00
2.	Dana Alokasi Khusus (Rp)	201.418.149.823,00	167.724.954.000,00	162.384.800.273,00
3	Bagi Hasil Sawit (Rp)	1.794.766.000,00	1.585.391.000,00	508.075.000,00
4.	Dana Perimbangan yang diperhitungkan (4=1-2-3) (Rp)	509.769.153.417,00	549.027.945.000,00	549.503.130.260,00
5.	Anggaran ADD (Rp)	50.866.289.200,00	54.902.794.500,00	54.056.237.704,00
6.	Persentase (5/3*100%) (%)	9,98	10,00	9,84
7	Kesimpulan	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Sesuai

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2023 telah menganggarkan Alokasi Dana Desa sebesar 9,98 persen dan pada Tahun 2024 sebesar 10,00 persen dari kewajiban penganggaran yang ditetapkan, yaitu paling sedikit 10 persen. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Majene hanya mampu mengalokasikan 9,84 persen dari ketentuan minimal 10 persen. Kekurangan penganggaran pada Tahun 2025 tersebut disebabkan oleh penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang dilakukan pada awal tahun dengan mengacu pada anggaran pokok. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang lebih cermat dan akurat dalam penyusunan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.4.4 Bidang Kesehatan

Kewajiban alokasi anggaran minimal untuk *mandatory spending* bidang kesehatan yang sebelumnya diatur dalam UU Kesehatan 2009 yakni 5 persen untuk APBN dan 10 persen untuk APBD telah dihapus dalam Undang-Undang Kesehatan baru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantinya dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang lebih fleksibel. Dengan Undang-Undang Kesehatan yang memberikan fleksibilitas melalui anggaran berbasis kinerja, maka pemerintah daerah tetap menjaga komitmen agar anggaran kesehatan sebagai pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu, secara formal mungkin telah dihapus, tetapi prinsip perlindungan hak masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap menjadi prioritas.

Sebagai bentuk komitmen pada bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 mengalokasikan anggaran untuk pada bidang kesehatan senilai Rp202.436.037.036,69, dalam bentuk Belanja Operasi senilai Rp186.131.789.849,69 dan dalam bentuk belanja modal senilai Rp16.304.247.187,00, jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan maka anggaran kesehatan tersebut mencapai 22,23 persen dari Belanja Daerah atau memenuhi syarat dialokasikan minimal 10,00 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Realisasi bidang kesehatan tiga tahun terakhir untuk bidang kesehatan Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 18 Realisasi Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2023-2025

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Total Belanja Daerah (Rp)	885.015.750.318,80	346.031.376.274,00	910.562.452.913,69
2.	Bidang Kesehatan (Rp)	185.036.416.902,00	64.152.217.435,00	202.436.037.036,69
3.	Persentase realisasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Kesehatan (%)	30,85	36,38	22,23
4.	Ketentuan <i>Mandatory Spending</i> Bidang Kesehatan (%)	10,00	10,00	10,00
5.	Kesimpulan	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa komitmen dalam bidang kesehatan tahun 2023-2025 masih di atas minimal 10,00 persen walaupun pendekatan anggaran telah berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang lebih fleksibel.

3.1.5 Pengawasan

Mandatory bidang pengawasan pada Pemerintah Daerah merupakan bidang pengawasan yang wajib dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Penetapan *mandatory* bidang pengawasan ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan *Mandatory* bidang pengawasan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pengawasan nasional dan daerah, serta hasil penilaian risiko atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. *Mandatory* ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah agar kegiatan pengawasan lebih terarah, fokus pada area berisiko tinggi, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah, pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, pengadaan barang dan jasa, tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan eksternal dan internal, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko. Pengawasan pada bidang-bidang tersebut diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kepatuhan, serta memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program daerah.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya guna memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Selain itu, Bidang Pengawasan berperan dalam pelaksanaan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, antara lain RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, serta RKA dan DPA perangkat daerah, untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pengawasan juga diarahkan pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah melalui reviu LKPD dan LkjIP.

Melalui pelaksanaan *Mandatory* bidang pengawasan yang efektif dan berkesinambungan, Inspektorat Daerah diharapkan mampu berperan sebagai *early warning system*, pemberi *assurance* dan *consulting*, serta mitra strategis kepala daerah dan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan guna mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. Kegiatan pengawasan, yaitu:
 - 1) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
 - 2) reuiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
 - 3) pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - 4) reuiu laporan keuangan;
 - 5) kegiatan pengawasan lainnya meliputi *probit*y audit, reuiu laporan kinerja, reuiu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - 6) penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan antara lain seperti, laptop, dan alat pengukur beton.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 untuk biaya operasional pengawasan Inspektorat senilai Rp2.475.752.682,00 jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp910.562.452.913,69 atau 0,27 persen dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi ini belum memenuhi kriteria yang diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar daerah dengan besaran APBD sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit senilai 1,00 persen dari total Belanja Daerah namun atas keterbatasan fiskal yang ada dengan target program prioritas visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Majene harus dipenuhi dalam rentang waktu efektif yang tergolong singkat, maka Pemerintah Kabupaten Majene hanya dapat mengalokasikan kegiatan pengawasan yang bersifat prioritas.

Alokasi anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada SKPD Inspektorat Kabupaten Majene 3 tahun terakhir 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 19 Alokasi Anggaran Bidang Pengawasan Kabupaten Majene Tahun 2023-2025

No.	Tahun	Anggaran (Rp)		Rasio (%)
		Belanja Daerah	Pengawasan	
1.	2023	942.811.788.997,00	676.495.855,00	0,07
2.	2024	939.791.525.077,00	1.137.210.208,00	0,12
3.	2025	910.562.452.913,69	2.475.752.682,00	0,27

Berdasarkan tabel di atas, bahwa anggaran yang digunakan untuk menjalankan bidang pengawasan masih di bawah ketentuan, yaitu 1 persen. Hal tersebut dikarenakan penggunaan DAU Umum diprioritaskan untuk Belanja Pegawai dan Belanja ADD, sedangkan untuk DAK dan DAU *Specific Grant* tidak dapat digunakan sebagai sumber dana anggaran bidang pengawasan. Adapun langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene agar dapat memenuhi batasan minimal 1 persen dengan memaksimalkan seluruh potensi PAD.

Dengan keterbatasan anggaran dalam bidang pengawasan Pemerintah Kabupaten Majene mampu menunjukkan kinerja terbaik terkait penyelesaian atas temuan. Berdasarkan hasil tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, hingga Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Majene telah menyelesaikan tindak lanjut atas temuan sebanyak 67,03 persen dari total rekomendasi sebanyak 1.283 dengan jumlah status telah sesuai rekomendasi sebanyak 860 walaupun secara persentase turun tapi dari jumlah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya .

3.1.6 Penanganan Dampak Inflasi

Mandatory Pengendalian Inflasi Daerah merupakan bagian dari kebijakan pengawasan dan pengendalian yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengendalian inflasi daerah menjadi prioritas nasional yang harus diimplementasikan secara konsisten melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Indeks tersebut adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Selain itu, inflasi terjadi pada saat permintaan (*demand*) lebih besar daripada penawaran (*supply*). Menurut Wikipedia, teori penawaran dan permintaan adalah penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar, antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi makro terhadap perilaku serta interaksi para pembeli dan penjual. Model ini memperkirakan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kualitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas. Model ini mengakomodasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mengubah keseimbangan, yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk terjadinya pergeseran dari permintaan dan penawaran. Definisi penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang memengaruhi penawaran:

- a. Harga barang itu sendiri;
- b. Harga sumber produksi;
- c. Tingkat produksi; dan
- d. Ekspektasi/perkiraan.

Sedangkan definisi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen, pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang memengaruhi permintaan:

- a. Harga barang itu sendiri;
- b. Harga barang lain yang berkaitan;
- c. Tingkat pendapatan;

- d. Selera konsumen; dan
- e. Ekspektasi/perkiraan.

Inflasi menyebabkan turunnya daya beli terhadap barang dan jasa, besar kecil turunnya daya beli ditentukan oleh penawaran barang dan jasa. Faktor lain yang menentukan fluktuasi harga diantaranya kebijakan pemerintah mengenai tingkat harga, yaitu dengan mengadakan kontrol harga, pemberian subsidi, dan lain-lain

Dampak inflasi dapat bervariasi tergantung pada tingkat dan stabilitas inflasi itu sendiri. Inflasi yang rendah dan stabil dapat memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban utang, dan mendorong investasi. Namun, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, dan mengganggu perencanaan keuangan individu dan bisnis.

Mandatory Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Majene merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Majene dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian inflasi serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah sebagai wilayah pesisir dengan keterbatasan produksi pangan tertentu serta ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut menjadikan stabilitas harga komoditas pangan strategis, terutama beras, cabai, bawang merah, ikan, dan bahan pangan lainnya, sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi, kondisi cuaca, serta ketersediaan sarana transportasi dan logistik.

Pelaksanaan *mandatory* pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Majene dilakukan melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas strategis, serta pelaksanaan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi sesuai karakteristik wilayah. Kebijakan ini diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, menjamin kelancaran distribusi, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait yang terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga di tingkat lokal, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Mengantisipasi dampak inflasi Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Majene mengalokasikan senilai Rp12.359.999.736,00 yang terdiri dari kegiatan: (1) Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana dalam rangka kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga pada Dinas PUPR senilai Rp1.992.200.000,00; (2) Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga senilai Rp63.360.000,00; (3) Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota senilai Rp56.144.750,00; (4) Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal senilai Rp44.955.500,00; (5) Penyusunan neraca bahan makanan (NBM) senilai Rp12.938.500,00; (6) Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun Rp18.985.000,00; (7) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan senilai Rp17.040.000,00; (8) Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi senilai Rp5.720.000,00; (9) Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian senilai Rp342.153.000,00; (10) Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak senilai Rp152.521.000,00; (11) Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain senilai Rp103.838.000,00; (12) Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya senilai Rp2.550.000,00; (13) Penyusunan peta kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten/kota senilai Rp5.036.000,00; (14) Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani senilai Rp115.383.600,00; (15) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan senilai Rp11.018.750,00; (16) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan senilai Rp918.149.908,00; (17) Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan senilai Rp1.840.000,00; (19) penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan senilai Rp161.805.000,00; (20) Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa senilai

Rp566.671.000,00; (21) Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa senilai Rp24.957.570,00; (22) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani senilai Rp577.921.300,00; (23) Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan senilai Rp54.573.800,00; dan (24) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian senilai Rp3.789.600,00.

Alokasi anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan mengantisipasi dampak inflasi yang merupakan belanja wajib perlindungan sosial 3 tahun terakhir 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 20 Alokasi Anggaran Mengantisipasi Dampak Inflasi Kabupaten Majene Tahun 2023-2025

No.	Tahun	Anggaran Mengantisipasi dampak Inflasi (Rp)
1.	2023	3.249.208.150,00
2.	2024	4.407.665.950,00
3	2025	12.359.999.736,00

Dari tabel di atas terdapat kenaikan pengalokasian anggaran pada Tahun 2025 untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan mengantisipasi dampak inflasi yang merupakan belanja wajib perlindungan sosial senilai Rp12.359.999.736,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp4.407.665.950,00 atau meningkat senilai Rp7.952.333.786,00 atau 180,42 persen.

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian

Kebijakan nasional mengenai pengendalian dan peningkatan kualitas belanja negara/daerah, pemerintah daerah melaksanakan penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut mengamanatkan dilakukannya rasionalisasi terhadap belanja yang bersifat kurang prioritas, antara lain belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat-rapat di luar kantor, belanja pendukung administrasi, serta belanja lain yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan ini di daerah dilakukan melalui penyesuaian pagu anggaran pada perangkat daerah, realokasi belanja, serta penajaman kembali program dan kegiatan agar lebih fokus pada prioritas pembangunan.

Pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut membawa sejumlah konsekuensi, antara lain penundaan atau pengurangan volume kegiatan tertentu, penyesuaian target kinerja, serta perlunya perubahan dokumen pelaksanaan anggaran. Di sisi lain, kebijakan ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dan berbasis kinerja dalam merencanakan belanja, sehingga setiap rupiah anggaran yang digunakan memiliki manfaat yang terukur. Melalui langkah efisiensi ini, diharapkan struktur belanja daerah menjadi lebih sehat, proporsional, dan berorientasi pada hasil (*outcome oriented*), dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik serta keberlanjutan program prioritas daerah.

3.2.1 Permasalahan dan Solusi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima uang yang menambah kekayaan bersih daerah. Pendapatan daerah diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah. Sumber pendapatan daerah:

- a. PAD berupa Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Pendapatan Transfer berupa dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dan transfer dari Pemerintah Provinsi; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

PAD merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan PAD dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

PAD merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan. PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Peningkatan PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi daerah dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah antara lain:

- a. Peran PAD yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat;
- b. Penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan;
- c. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
- d. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;
- e. Masih lemahnya sanksi hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya;
- f. Masih belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana operasional yang diperlukan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
- g. Masih belum meratanya tingkat profesionalisme kompetensi aparatur pengelola pendapatan daerah yang tersebar pada berbagai instansi pengelola pendapatan.

Untuk dapat merealisasikan target penerimaan pendapatan daerah tersebut di atas diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

- a. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
 - 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - 2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru;
 - 3) Pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

- 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
 - 6) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - 7) Pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan; dan
 - 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. Strategi pencapaian target pendapatan transfer, dilakukan melalui:
- 1) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
 - 2) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - 3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
 - 4) Mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti WTP, SAKIP dan lainnya;
 - 5) Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan yang sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, provinsi dan instansi terkait.
- c. Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dilakukan dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait.

3.2.2 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan instrumen strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Majene, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor unggulan daerah. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi efektivitas dan optimalisasi realisasi belanja daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam persoalan belanja daerah adalah belum optimalnya realisasi belanja pada awal tahun anggaran. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterlambatan penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, penyesuaian terhadap kebijakan nasional, serta proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu. Akibatnya, penyerapan anggaran cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran. Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran anggaran pada saat perubahan APBD serta munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup signifikan. Kondisi

tersebut menunjukkan perlunya penguatan perencanaan berbasis data serta sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

Kebijakan nasional mengenai pengendalian dan peningkatan kualitas belanja negara/daerah, pemerintah daerah harus melaksanakan penyesuaian anggaran sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut mengamanatkan dilakukannya rasionalisasi terhadap belanja yang bersifat kurang prioritas, antara lain belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat-rapat di luar kantor, belanja pendukung administrasi, serta belanja lain yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan ini di daerah dilakukan melalui penyesuaian pagu anggaran pada perangkat daerah, realokasi belanja, serta penajaman kembali program dan kegiatan agar lebih fokus pada prioritas pembangunan.

Pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut membawa sejumlah konsekuensi, antara lain penundaan atau pengurangan volume kegiatan tertentu, penyesuaian target kinerja, serta perlunya perubahan dokumen pelaksanaan anggaran. Di sisi lain, kebijakan ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dan berbasis kinerja dalam merencanakan belanja, sehingga setiap rupiah anggaran yang digunakan memiliki manfaat yang terukur. Melalui langkah efisiensi ini, diharapkan struktur belanja daerah menjadi lebih sehat, proporsional, dan berorientasi pada hasil (*outcome oriented*), dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik serta keberlanjutan program prioritas daerah.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan pada perangkat daerah. Dinamika regulasi dari pemerintah pusat, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa, menuntut aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi agar pelaksanaan belanja tetap sesuai ketentuan dan terhindar dari temuan pemeriksaan. Dari sisi pengendalian internal, masih diperlukan penguatan sistem pengawasan agar belanja daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi kunci dalam memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Majene.

Dengan demikian, perbaikan tata kelola belanja daerah di Kabupaten Majene perlu diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, percepatan proses pelaksanaan anggaran, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem pengendalian internal guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

Adapun strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021- 2026, sebagai berikut:

- a. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa :
 - 1) Belanja Operasi, terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Bunga;
 - d) Belanja Subsidi;
 - e) Belanja Hibah; dan
 - f) Belanja Bantuan Sosial;
 - 2) Belanja Modal, terdiri dari :
 - a) Belanja Modal Tanah;

- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- 3) Belanja Tidak Terduga;
- 4) Belanja Transfer
- a) Belanja Bagi Hasil; dan
 - b) Belanja Bantuan Keuangan

yang disusun menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah.

- b. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan pencapaian sasaran pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025, yaitu: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, serta Memudahkan Akses Lapangan Kerja; Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berwawasan Lingkungan serta Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman; Pengendalian Harga-Harga Kebutuhan Pokok; Penguatan dan Preservasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal; Penguatan Ketahanan Pangan dan Kebencanaan; Penguatan Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik Berbasis Digital dan Supremasi Hukum; Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Perlindungan Anak dan Perempuan; dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berbasis Potensi Lokal.
- c. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Majene yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan, termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ditunjuk sebagai entitas akuntansi yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi dalam sejarah implementasi akuntansi pemerintahan di Indonesia baik pada instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dimulai dengan akuntansi berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual, dan terakhir sejak Tahun 2015 diwajibkan bagi seluruh entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual.

a. Akuntansi Berbasis Kas (*Cash Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP Nomor 1 Paragraf 8). Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Ruang lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan sistem akuntansi berbasis kas adalah terbatasnya informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban.

b. Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Based Accounting*)

Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Regulasi yang mengatur penerapan basis kas menuju akrual adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

c. Akuntansi Berbasis Akrua (*Accrual Based Accounting*)

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (PSAP Nomor 1 Paragraf 8). Fokus sistem akuntansi ini ada pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan daya pada suatu entitas. Sistem akuntansi dianggap sistem yang paling *modest*. Keberhasilan beberapa negara seperti Selandia Baru dalam menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang lebih dulu terbit, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah mewajibkan Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual secara penuh.

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah diatur bahwa seluruh entitas pelaporan baik instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya pada periode pelaporan Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Majene sebagai entitas pelaporan berdasarkan amanat dari peraturan tersebut mulai pada Tahun 2015 telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah juga menyajikan laporan keuangan dengan basis kas pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana pendapatan serta penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran dan analisis akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

4.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat

menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

4.3.1.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- a. Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - 1) Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - 2) Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD;
 - 3) Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
 - 4) Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - 5) Pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- b. Pengukuran Pendapatan LRA
 - 1) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 - 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
 - 3) Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut

- berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat; dan
- 4) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- c. Penyajian dan Pengungkapan
- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
- 1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

a. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

- 1) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 2) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
- 3) Pengakuan belanja yang berasal dari dana BOS dan dana JKN diakui pada saat disahkan oleh BUD.

b. Pengukuran Belanja

- 1) Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- 3) Belanja yang berasal dari dana BOS dan dana JKN diukur sebesar belanja yang disahkan oleh BUD;
- 4) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-Lain-LRA; dan
- 5) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja Operasi;
- 2) Belanja Modal; dan
- 3) Belanja Tak Terduga.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- 3) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- 4) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

4.3.1.3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

a. Pengukuran Transfer

Akuntansi transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen penerimaan atau pengeluaran yang sah.

- 1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
- 2) Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
 - b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku/Keputusan Gubernur.

b. Penilaian Transfer

- 1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan;
 - b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.
- 2) Transfer Keluar dan Beban Transfer
- Pengukuran transfer Keluar dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah.
- c. Pengungkapan transfer
- 1) Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
 - 2) Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
 - c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2. Neraca

4.3.2.1. Aset

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) atau Uang Persediaan (UP) yang belum

dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

b. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Majene dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Majene yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari :

- 1) Piutang Pajak;
- 2) Piutang Retribusi;
- 3) Piutang Dana Perimbangan/Bagi Hasil termasuk DAU dan DAK;
- 4) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- 5) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi;
- 6) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- 7) Piutang Lain-Lain PAD yang sah.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Majene, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Majene;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 4) Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

1) Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan pupuk di Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan.

2) Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Metode perpetual digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

d. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi non permanen dapat berupa:

- a) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Investasi non permanen lainnya; dan
- d) Modal kerja yang digulirkan ke masyarakat/keompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir.

Investasi Non Permanen Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- (1) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- (2) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- (3) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (4) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/keompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
- (5) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.

Penyajian Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV) dari Dana Bergulir bertujuan agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan; dan
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam penyertaan ini.

3) Metode Pengakuan Investasi Penyertaan Modal

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode yaitu:

a) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

e. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Majene atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Majene harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Masa Manfaat Aset Tetap		
No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	-

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.01	Alat Besar	8
2.02	Alat Angkutan	8
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.04	Alat Pertanian	5
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	5
2.08	Alat Laboratorium	8
2.09	Alat Persenjataan	5
2.10	Komputer	5
2.11	Alat Eksplorasi	8
2.12	Alat Pengeboran	8
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	8
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	8
2.15	Alat Keselamatan Kerja	5
2.16	Alat Peraga	5
2.17	Peralatan Proses/Produksi	5
2.18	Rambu – Rambu	5
2.19	Peralatan Olahraga	4
3	Gedung dan Bangunan , yg terdiri atas:	
3.01	Bangunan Gedung	20
3.02	Monumen	20
3.03	Bangunan Menara	20
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.01	Jalan dan Jembatan	20
4.02	Bangunan Air	20
4.03	Instalasi	20
4.04	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.01	Bahan Perpustakaan	-
5.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
5.03	Hewan	-
5.04	Biota Perairan	-
5.05	Tanaman	-
5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-

Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

Penyusutan per periode =

Nilai yang dapat disusutkan

Masa manfaat

Penyusutan dilakukan per bulan tetapi pencatatan atas penyusutan aset tetap dilakukan pada akhir tahun.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- 3) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- 7) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset, jika memenuhi semua *kriteria a dan b* sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisiensi;
 - b) Bertambah umur ekonomis;
 - c) Bertambah volume;
 - d) Bertambah kapasitas produksi;
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi atas aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan, adapun batas kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Batas Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Batasan Minimal Kapitalisasi *)
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.01	Alat Besar	2 %
2.02	Alat Angkutan	2 %
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2 %
2.04	Alat Pertanian	2 %
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2 %
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2 %
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2 %
2.08	Alat Laboratorium	2 %
2.09	Alat Persenjataan	2 %
2.10	Komputer	2 %

No.	Uraian	Batasan Minimal Kapitalisasi *)
2.11	Alat Eksplorasi	2 %
2.12	Alat Pengeboran	2 %
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	2 %
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	2 %
2.15	Alat Keselamatan Kerja	2 %
2.16	Alat Peraga	2 %
2.17	Peralatan Proses/Produksi	2 %
2.18	Rambu – Rambu	2 %
2.19	Peralatan Olahraga	2 %
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.01	Bangunan Gedung	2 %
3.02	Monumen	2 %
3.03	Bangunan Menara	2 %
3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2 %
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yang terdiri atas:	
4.01	Jalan dan Jembatan	2 %
4.02	Bangunan Air	2 %
4.03	Instalasi	2 %
4.04	Jaringan	2 %
5	Aset Tetap Lainnya	-

*) Nilai persentase disesuaikan dengan nilai rupiah.

f. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri atas:

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa:

- a) Bangun Kelola/Guna Serah adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Kelola/Guna Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Kelola/Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
- b) Bangun Serah Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun Serah Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
- c) Kerja Sama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun

g. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Contoh: hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

- 1) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
 - 2) Lisensi dan *franchise*;
 - 3) Hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya;
 - 4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
- h. Aset Lain-Lain Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset tak berwujud tersebut. Apabila masa manfaat aset tak berwujud sulit diestimasi, perhitungan masa manfaat amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Masa Manfaat Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Tahun
	ASET TAK BERWUJUD	
1.	Software Komputer	4
2.	Lisensi	10
3.	Hak Cipta /Paten	50
4.	Hasil kajian/penelitian	4
5.	Warisan Budaya/Sejarah	Tidak Terbatas

i. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai Aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Pemerintah Daerah dapat memiliki Aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka Aset tersebut termasuk dalam definisi Properti Investasi.

Properti Investasi diakui sebagai aset pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai Properti Investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:

- 1) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari Aset Properti Investasi; dan
- 2) biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu Properti Investasi memenuhi kriteria pertama Pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu Pengakuan awal.

Kriteria kedua Pengakuan Properti Investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan Aset Properti Investasi tersebut. Apabila suatu Properti Investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya Properti Investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip Pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan Properti Investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan Properti Investasi.

Berdasarkan prinsip Pengakuan Properti Investasi, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat Properti Investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi atas biaya

penggantian bagian Properti Investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian Pengakuan pada Kebijakan Akuntansi ini.

4.3.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah kabupaten.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), terdiri dari: Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya

2) Utang Bunga;

Utang Bunga, terdiri dari Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya dan Utang Bunga Luar Negeri.

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang terdiri dari Utang Bank, Utang Obligasi, Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Pemerintah Provinsi, Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kabupaten lain.

4) Pendapatan Diterima Dimuka;

Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III, Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III dan Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

5) Utang Belanja;

Utang belanja diakui sebesar belanja yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

6) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2) Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. Kewajiban jangka panjang terdiri utang kepada Pemerintah Pusat, utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan utang kepada masyarakat.

4.3.2.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majene yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal laporan. Komponen ekuitas terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- a. Ekuitas, yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Majene yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas;
- b. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit – LRA;
- c. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

4.3.3. Laporan Operasional

4.3.3.1. Pendapatan

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- b. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal;
- c. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar;
- d. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;

- g. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Selain pendapatan pajak tersebut di atas, PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Komponen Pendapatan-LO

Pendapatan- LO adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Pendapatan-LO terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah-LO merupakan pendapatan yang berasal dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah otonom bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. pajak daerah provinsi terdiri dari pajak

kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

- 2) Retribusi Daerah-LO merupakan pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO merupakan penerimaan daerah otonom atas hasil penyertaan modal daerah; dan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan Transfer LO terdiri dari:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO merupakan pendapatan yang berasal dari APBN berupa dana perimbangan, dana intensif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa; dan
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah lain berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah-LO merupakan pendapatan hibah termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- 2) Dana Darurat-LO; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

d. Surplus Non Operasional-LO

Surplus Non Operasional-LO terdiri dari:

- 1) Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO;
- 2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO; dan
- 3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

- e. Pendapatan Luar Biasa-LO merupakan pendapatan yang diakui pemerintah sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) yang tidak terikat pada kegiatan operasional sehari-hari. Pendapatan ini biasanya berasal dari kejadian atau transaksi yang tidak biasa, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada di luar kendali entitas pemerintah.

4.3.3.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban terdiri dari:

- a. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
 - 1) Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
 - 2) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi;
 - 3) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda;
 - 4) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;
 - 5) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - 6) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
 - 7) Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu; dan
 - 8) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ke tertagihan piutang.
- b. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Defisit Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional;
- d. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah, beban luar biasa terdiri dari beban tak terduga dan beban luar biasa lainnya.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar. Pengakuan beban pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- d. Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- e. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, di mana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas;
- f. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- g. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, di mana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap, dan Aset Lainnya;
- h. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian;
- i. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi; dan
- j. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir Tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
- c. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir Tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas;
- g. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, di mana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban, pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca) komponen Aset Lancar dengan perhitungan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal transaksi.

Pengukuran Beban pada saat:

- a. Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak).
- b. Beban diukur berdasarkan:
 - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
 - 2) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- c. Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai SAP

Akuntabilitas sektor publik saat ini telah mendapatkan banyak perhatian seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan campur tangan dari Pemerintah Pusat serta memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan sumber- sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengalami banyak pembaharuan, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang diakui adalah pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam pelaporan, serta pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran diakui berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terbit pada tanggal 22 Oktober 2010. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Berdasarkan pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Entitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebelum adanya peraturan pemerintah mengenai sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual (*basis accrual*), sistem yang digunakan adalah sistem akuntansi tata buku tunggal (*single entry accounting system*) berbasis kas (*cash basis*). Sistem pencatatan *single entry* ini sangat sederhana yaitu hanya mencatat satu kali setiap terjadi transaksi. Transaksi yang menyebabkan kas bertambah akan dicatat di sisi penerimaan dan yang menyebabkan kas berkurang akan dicatat di sisi pengeluaran. Sistem pencatatan *single entry* sangat sederhana dan mudah dipahami, namun di samping itu juga mempunyai banyak kelemahan. Sistem akuntansi yang berbasis kas memiliki kelemahan sebagai berikut:

- a. Informasi yang lebih kompleks yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan tidak dapat disediakan oleh sistem akuntansi berbasis kas;
- b. Relevansi laporan keuangan bagi para pengambil keputusan sangat kurang, karena basis kas hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lain; dan
- c. Pertanggungjawaban ke publik terbatas pada penggunaan kas saja, tidak dicantumkan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset lainnya dan utang atau kewajiban.

Banyaknya kekurangan dari *single step* berbasis kas tersebut menuntut pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Maka sistem yang lama dikembangkan menjadi sistem baru yang dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan daerah berupa Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Laporan Keuangan (*financial reports*) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Karakter dalam sistem yang baru adalah *double entry* dan basis akrual (*accrual basis*). Sistem tersebut dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan tidak hanya dari transaksi masa lalu yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi juga kewajiban kas yang timbul di masa depan serta peramalan kas yang akan diterima di masa mendatang.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan SAP, di antaranya:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai. Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan PNS yang bersifat terbatas. Padahal ketersediaan SDM aparatur yang memahami teknis di bidang akuntansi pemerintahan merupakan unsur paling dominan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ini. Pemerintah Kabupaten Majene hingga saat ini belum termasuk daerah dengan SDM akuntansi yang memadai;
- b. Dinamika regulasi yang sering mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Inkonsistensi dalam penerbitan peraturan perundangan terkait penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan akuntansi secara maksimal;
- c. Efektivitas tata laksana dan keorganisasian dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur pemerintah daerah. Dalam implementasi pengelolaan keuangan, masih

banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan di tingkat SKPD yang belum memahami tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan di SKPD. Adapun pada ranah pelaporan, masih banyak PPK-SKPD yang tidak terlibat secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Masih banyak PPK-SKPD masih bergantung terhadap bendahara maupun operator dalam menyusun laporan keuangan. Walaupun Pemerintah Kabupaten Majene telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri, namun sebagian besar PPK-SKPD belum memanfaatkan sistem informasi secara efektif. Pekerjaan teknis tersebut lebih sering dilakukan oleh bendahara ataupun operator.

Namun dalam pelaksanaan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual ini, Pemerintah Kabupaten Majene telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Majene telah menggunakan SIPD Kemendagri dalam proses pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.;
- b. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sistem akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Daerah telah menyusun perangkat regulasi yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan standar akuntansi pemerintah daerah. Pada Tahun 2014, Bupati Majene telah menerbitkan tiga peraturan kepala daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan di daerah, yaitu Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur, dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene.;
- c. Pemerintah Kabupaten Majene dalam berbagai kesempatan senantiasa melakukan pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pengelola keuangan daerah. Setiap Tahun anggaran, pemerintah melalui SKPD yang mempunyai fungsi pembinaan pengelolaan keuangan daerah melaksanakan program bimbingan teknis dan pelatihan secara periodik. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar memperkuat sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah utamanya yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi maupun di SKPD selaku penyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada akhirnya Pemerintah Daerah telah melakukan segala upaya maksimal dalam menjalankan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun Pemerintah Kabupaten Majene telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak sebelas kali berturut-turut, namun hal tersebut bukan menjadi jaminan bahwa praktik pengelolaan keuangan utamanya pada ranah pelaporan tidak meninggalkan permasalahan. Masih cukup banyak pekerjaan rumah yang tersisa bagi Pemerintah Daerah dalam dunia pengelolaan keuangan daerah. Namun dengan strategi yang tepat, pemerintah berharap dapat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual dengan baik dan efektif agar mewujudkan aspek akuntabilitas dan transparansi yang baik demi terciptanya lingkungan *good governance* di Kabupaten Majene.

4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

4.5.1. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas dan tidak memengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada PSAP 10 paragraf 19, 20, 21 dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada PSAP 10 paragraf 21, 22, dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak memengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contoh kesalahan yang tidak memengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada PSAP 10 paragraf 20 adalah:

- a. Belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebit pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap;
- b. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas Tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula Basis Kas Menuju Akrual menjadi Basis Akrual penuh, dilakukan:

- a. Penyajian kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode; dan
- b. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

4.5.3. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset, dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO Tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4.5.4. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tugas, pokok, dan fungsi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban Tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu Tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- b. Fungsi tersebut tetap ada; dan
- c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. Menutup suatu fasilitas yang bermanfaat amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.5.5. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50 persen atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa

lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar. Anggaran belanja tak terduga yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang terakhir diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan. Teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan antara Laporan Keuangan PPKD selaku entitas pelaporan dengan Laporan Keuangan seluruh SKPD lingkup Kabupaten Majene selaku entitas akuntansi.

Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan daerah.

5.1.1. Pendapatan – LRA

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan – LRA	881.015.994.509,59	900.775.879.182,07	(19.759.884.672,48)	(2,19)
Jumlah	881.015.994.509,59	900.775.879.182,07	(19.759.884.672,48)	(2,19)

Realisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten
Majene pada Tahun
Anggaran (TA) 2025 tercatat
sebesar
Rp881.015.994.509,59 atau
mencapai 97,21 persen dari
target.

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Majene sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp881.015.994.509,59 atau mencapai 97,21 persen dari target APBD TA 2025 senilai Rp906.226.956.217,00. Realisasi pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp101.790.979.525,59, Pendapatan Transfer senilai Rp779.225.014.984,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp0,00, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan Rp19.759.884.672,48 atau 2,19 persen jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp900.775.879.182,07.

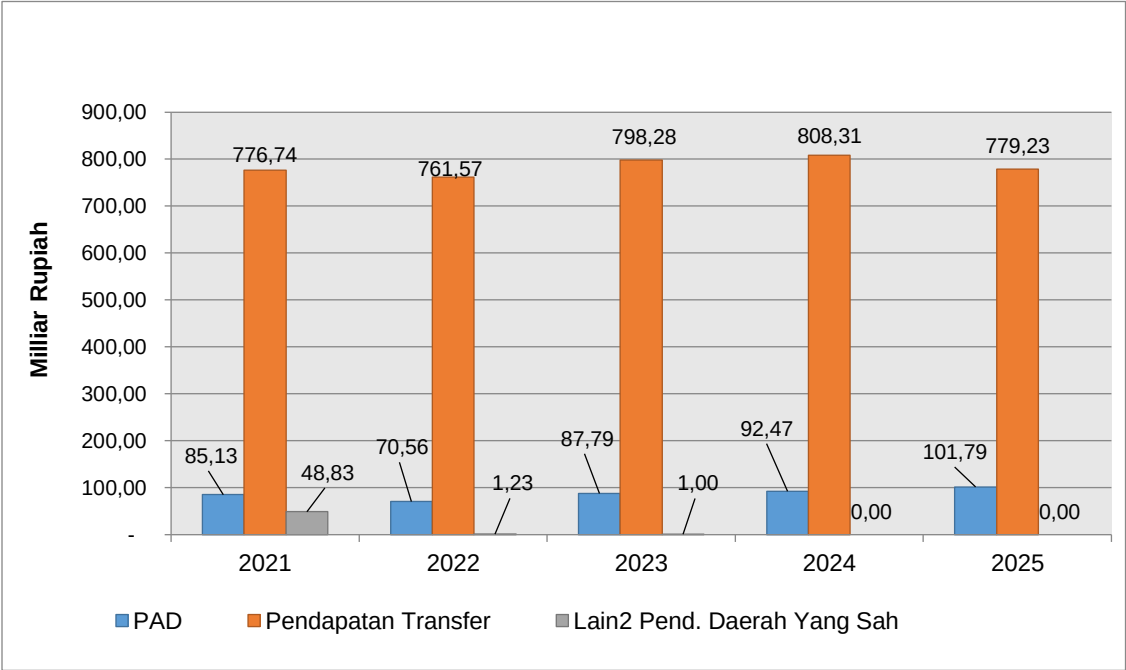
Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan - LRA TA 2024 dan 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
PENDAPATAN	906.226.956.217,00	881.015.994.509,59	97,21	900.775.879.182,07
Pendapatan Asli Daerah	116.958.226.043,00	101.790.979.525,59	87,03	92.468.261.209,07
Pendapatan Transfer	789.268.730.174,00	779.225.014.984,00	98,72	808.307.617.973,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan

intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan. potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam struktur APBD.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan kelompok pendapatan pada periode 2021-2025 dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Dibandingkan dengan realisasi di Tahun Anggaran 2024, realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan yang terjadi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah dan penurunan pada kelompok Pendapatan Transfer. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan senilai Rp9.322.718.316,52 dan kelompok Pendapatan Transfer mengalami hal sebaliknya yakni penurunan senilai Rp29.082.602.989,00.

Rincian realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2 Pendapatan – LRA

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN	906.226.956.217,00	881.015.994.509,59	97,21	900.775.879.182,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH	116.958.226.043,00	101.790.979.525,59	87,03	92.468.261.209,07
Pendapatan Pajak Daerah	24.265.113.570,00	16.467.904.514,25	67,86	11.783.885.632,00
Pendapatan Retribusi Daerah	82.889.435.754,00	75.411.226.265,00	90,97	75.254.820.161,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.534.611.072,00	100,00	3.327.191.183,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.269.065.647,00	6.377.237.674,34	101,72	2.102.364.233,07
PENDAPATAN TRANSFER	789.268.730.174,00	779.225.014.984,00	98,72	808.307.617.973,00
Transfer Pemerintah Pusat	768.344.427.000,00	760.123.684.301,00	98,93	783.780.588.110,00
Dana Perimbangan	715.688.574.000,00	712.396.005.533,00	99,53	727.959.737.110,00
- Dana Bagi Hasil (DBH)	5.826.710.000,00	5.634.568.300,00	96,70	6.639.074.000,00
- Dana Alokasi Umum	535.243.742.000,00	544.376.636.960,00	101,70	548.935.022.195,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
- Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik	24.453.962.000,00	24.111.344.842,00	98,59	41.802.623.094,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	150.164.160.000,00	138.273.455.431,00	92,08	130.583.017.821,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	52.655.853.000,00	47.727.678.768,00	90,64	55.820.851.000,00
- Dana Desa	52.655.853.000,00	47.727.678.768,00	90,64	55.820.851.000,00
Transfer Antar Daerah	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	91,28	24.527.029.863,00
Pendapatan Bagi Hasil	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	91,28	24.527.029.863,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa realisasi total pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Majene mencapai 97,21 persen dari target yang dianggarkan, di mana capaian ini lebih tinggi dari capaian di Tahun Anggaran 2024 di mana realisasi pendapatan daerah seluruhnya berada di angka 95,32 persen. Jika dilihat pada tabel 5.2 di atas terlihat bahwa persentase capaian realisasi paling rendah terdapat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah yaitu di angka 87,03 persen. Capaian yang rendah ini disebabkan oleh kontribusi persentase capaian pada jenis Pendapatan Pajak Daerah dengan persentase 67,86 persen. Adapun Pendapatan Transfer secara anggaran dan realisasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dengan realisasi yaitu mencapai 98,72 persen sedangkan pada Tahun 2024 capaian realisasi senilai 99,04 persen. Penurunan terjadi pada semua jenis pendapatan transfer untuk Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan senilai Rp4.558.385.235,00 dari Tahun 2024 senilai Rp548.935.022.195,00 akan tetapi disisi lain realisasi di Tahun 2025 mampu melampaui dari target Tahun 2025 senilai Rp535.243.742.000,00 realisasi senilai 101,70 persen; Dana Bagi Hasil (DBH) menurun senilai Rp1.004.505.700,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp10.000.840.642,00 termasuk Dana Desa juga mengalami penurunan senilai Rp8.093.172.232,00 yang Tahun 2024 tercatat senilai Rp55.820.851.000,00.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LRA

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah	101.790.979.525,59	92.468.261.209,07	9.322.718.316,52	10,08
Jumlah	101.790.979.525,59	92.468.261.209,07	9.322.718.316,52	10,08

Pendapatan Asli Daerah sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp101.790.979.525,59 atau 87,03 persen dari anggaran sebesar Rp116.958.226.043,00.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp101.790.979.525,59 atau 87,03 persen dari anggaran senilai Rp116.958.226.043,00. Realisasi tersebut naik senilai Rp9.322.718.316,52 atau 10,08 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2024 di mana realisasi Pendapatan Asli Daerah tercatat senilai Rp92.468.261.209,07.

Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pasar pada kelompok Retribusi Daerah serta PBJT - Tenaga Listrik dan Opsen PKB pada kelompok Pajak Daerah merupakan jenis pendapatan yang paling tinggi kontribusinya terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025.

a. Analisis Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan keuangan
Pemerintah Kabupaten
Majene tergolong ke
kategori sangat rendah
dengan rasio
kemandirian berkisar di
antara 9-13 persen

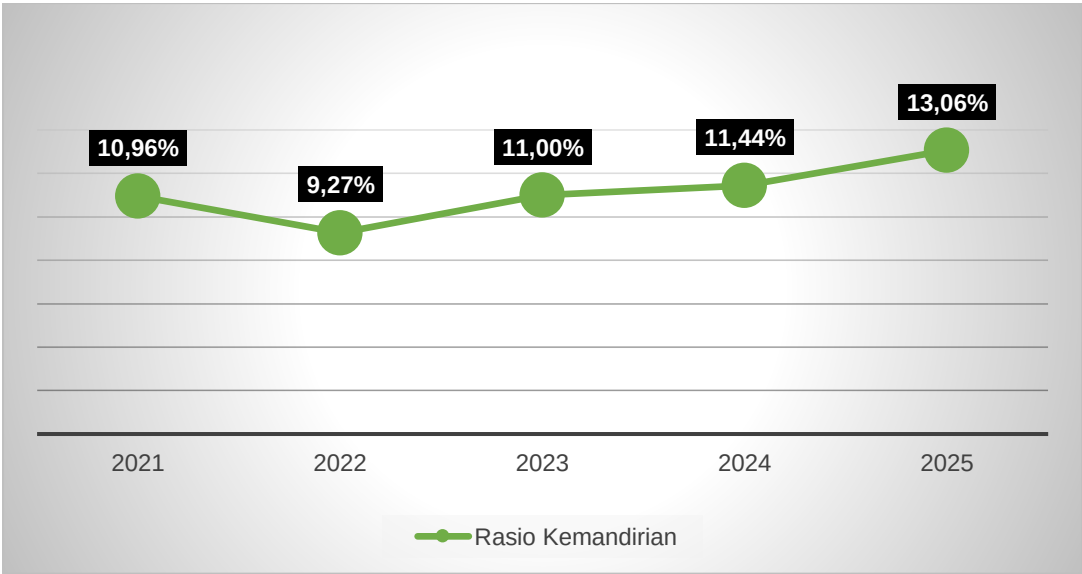
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD dilakukan dengan membandingkan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi Sulawesi Barat dan pinjaman daerah.

Tabel 5. 3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola hubungan
Sangat Rendah	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah);
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang. mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah; dan
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Berikut dapat kami gambarkan tren rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir.



Grafik 5. 2 Tren Rasio Kemandirian Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene berada di persentase 13,06 persen tergolong ke kategori sangat rendah dengan rasio kemandirian berkisar di antara 9 -14 persen. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Majene dengan Pemerintah Pusat dalam hubungan keuangannya memiliki pola hubungan instruktif di mana peranan

Pemerintah Pusat lebih dominan dan kecenderungan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan karakteristik lokal daerah termasuk rendah. Rasio kemandirian tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2025. sedangkan rasio kemandirian terendah terjadi di Tahun 2022.

b. Analisis Rasio Efektivitas Daerah

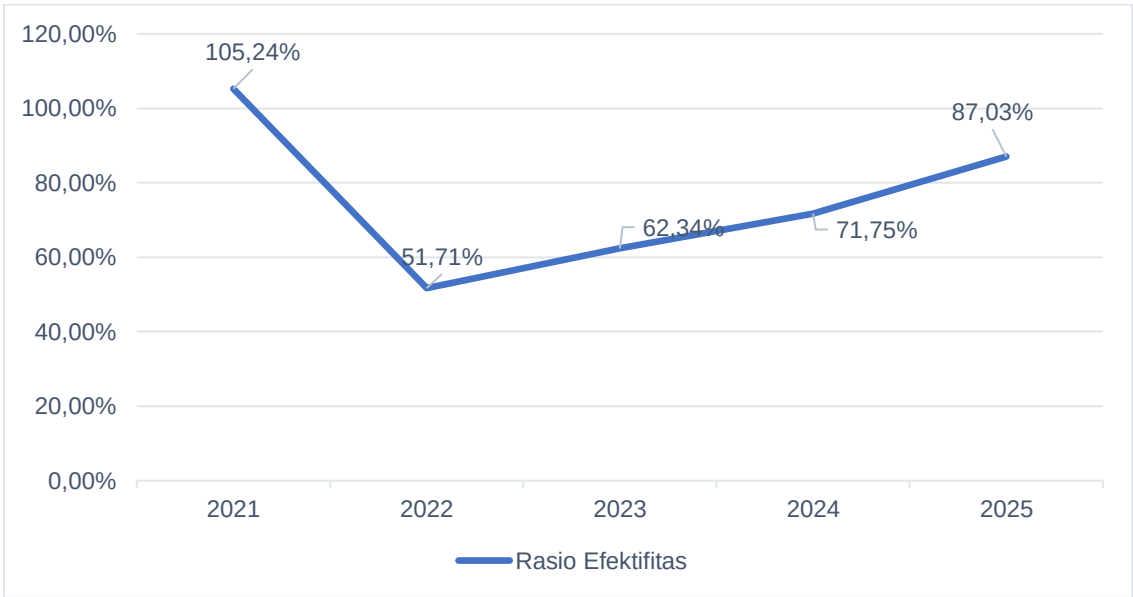
Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang lima tahun terakhir tergolong tidak efektif, dan pada Tahun Anggaran 2025 mencatat rasio efektivitas yang meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 87,03%.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Kriteria rasio efektivitas daerah dapat dikelompokkan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 5. 4 Kriteria Rasio Efektivitas Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
Tidak Efektif	X < 100 persen
Efektif Berimbang	X = 100 persen
Efektif	X > 100 persen

Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. 3 Tren Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Berdasarkan Grafik 5.3 tersebut rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang 5 tahun terakhir mengalami penurunan namun naik secara bertahap di mana rasio efektivitas berada di atas 100 persen. Rasio efektivitas tertinggi terjadi pada periode sebelumnya di Tahun Anggaran 2021 di mana efektivitas pemenuhan target pendapatan mencapai 105,24 persen. Sedangkan rasio efektivitas terendah terjadi di Tahun Anggaran 2022 di mana efektivitas pemenuhan target pendapatan hanya di persentase 51,71 persen. Pada periode tersebut rasio efektivitas Kabupaten Majene termasuk dalam kriteria tidak efektif karena capaian rasionya berada di bawah 100 persen.

Tahun Anggaran 2025 mencatat rasio efektivitas yang termasuk rendah, di mana tingkat efektivitas Pemerintah Kabupaten Majene hanya mencapai 87,03 persen. Capaian di tahun ini terkoreksi cukup dalam dari Tahun 2021 yang merupakan tren tertinggi selama 5 tahun terakhir, namun mengalami sedikit peningkatan dari Tahun 2023. Secara kuantitas, realisasi Pendapatan Asli Daerah pada seluruh jenis PAD pada periode ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun

sebelumnya. Kondisi ini diakibatkan beberapa objek pendapatan yang menetapkan target yang cukup tinggi, dan dapat direalisasikan secara optimal, seperti Retribusi Daerah mencatat realisasi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan capaian 90,97 persen. Serta didukung dengan realisasi 100,00 persen bahkan lebih oleh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi senilai 100,00 persen dan Lain-lain PAD yang Sah senilai 101,72 persen.

c. Analisis Rasio Efisiensi Daerah

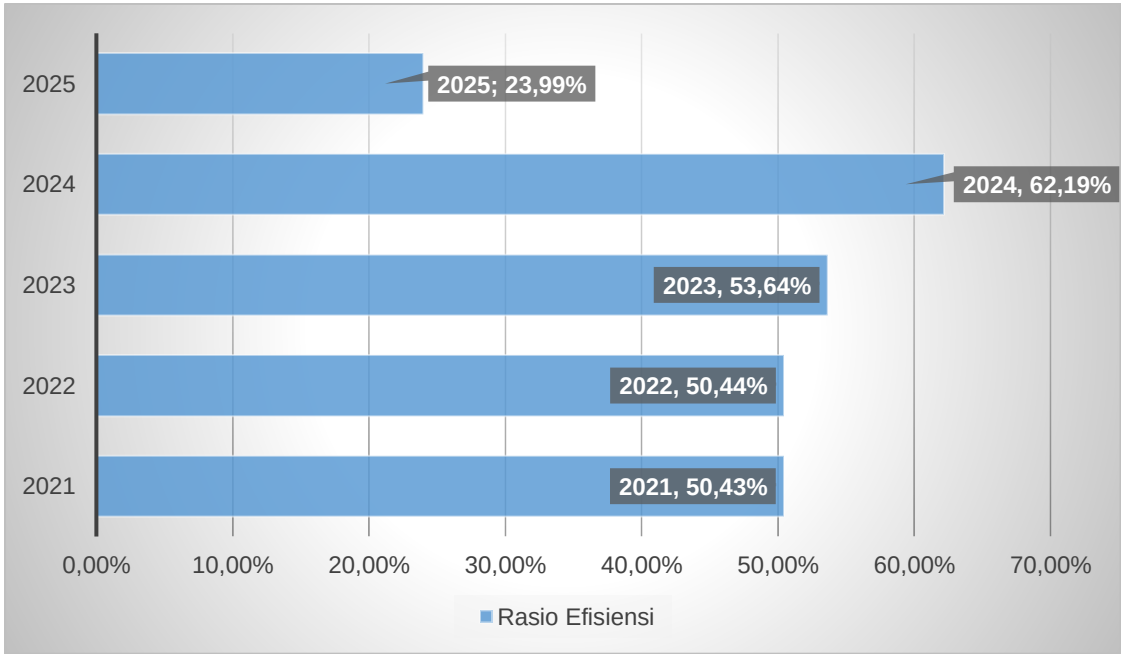
Kabupaten Majene masih termasuk efisien selama lima tahun. Rasio efisiensi tertinggi Kabupaten Majene terjadi pada tahun anggaran 2024

Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 persen.

Tabel 5. 5 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi
Tidak efisien	X > 100 persen
Kurang Efisien	X = 90 persen-100 persen
Cukup Efisien	X = 80 persen-90 persen
Efisien	X = 60 persen-80 persen
Sangat Efisien	X = < 60 persen

Penilaian rasio efisiensi Kabupaten Majene dilakukan dengan menggunakan pendekatan realisasi pajak dan retribusi sebagai kapasitas riil keuangan daerah. Realisasi pajak dan retribusi yang diperoleh oleh Bapenda tersebut kemudian dibandingkan anggaran operasional Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 Tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. 4 Tren Rasio Efisiensi Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Berdasarkan Grafik 5.4 di atas tergambar bahwa untuk Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 secara umum Kabupaten Majene masih termasuk pada kriteria rasio sangat efisien dan di Tahun 2024 mengalami Rasio menurun menjadi efisien karena efisiensi keuangan daerah mencapai lebih besar dari 60 persen dimana rasio 62,19 persen, untuk Pendapatan Pajak dan Retribusi yang dihasilkan senilai Rp11.882.374.632,00 dengan Belanja Operasi Rp7.389.069.497,00. Adapun pada Tahun 2025

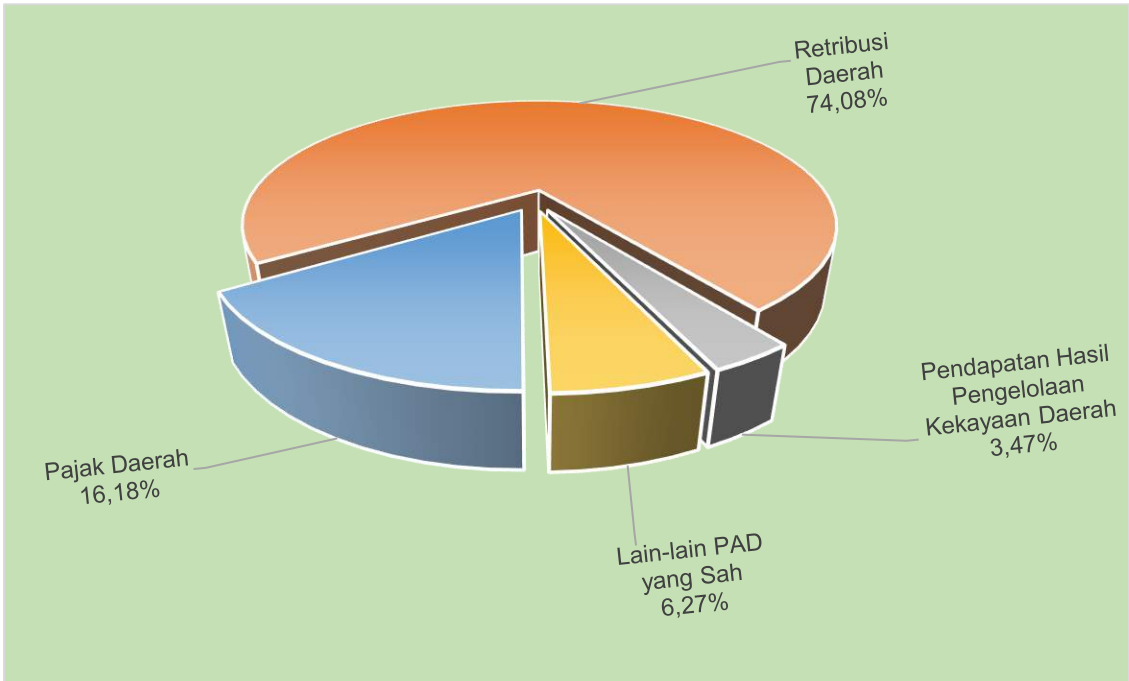
mengalami tren positif dengan efisiensi keuangan sangat efisien dengan capaian 23,99 persen. Rasio efisiensi Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dikelola Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2025 sangat efisien dalam mengumpulkan penerimaan daerah di kelompok Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	116.958.226.043,00	101.790.979.525,59	87,03	92.468.261.209,07
Pendapatan Pajak Daerah	24.265.113.570,00	16.467.904.514,25	67,86	11.783.885.632,00
Pendapatan Retribusi Daerah	82.889.435.754,00	75.411.226.265,00	90,97	75.254.820.161,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.534.611.072,00	100,00	3.327.191.183,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.269.065.647,00	6.377.237.674,34	101,72	2.102.364.233,07

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan realisasinya pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 5 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Majene TA 2025

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Pajak Daerah	16.467.904.514,25	11.783.885.632,00	4.684.018.882,25	39,75
Jumlah	16.467.904.514,25	11.783.885.632,00	4.684.018.882,25	39,75

Pendapatan pajak daerah pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp24.265.113.570,00, terealisasi sebesar 16.467.904.514,25.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 dianggarkan senilai Rp24.265.113.570,00 sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp16.467.904.514,25 atau 67,86 persen. Dibanding dengan Tahun Anggaran

2024. Realisasi TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp4.684.018.882,25 atau 39,75 persen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 7 Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	24.265.113.570,00	16.467.904.514,25	67,86	11.783.885.632,00
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	199.018.358,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.850.545.569,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	102.257.000,00
Pajak Reklame	375.221.250,00	250.161.000,00	66,67	229.072.250,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	6.343.360.258,00
Pajak Air Tanah	20.256.000,00	5.717.423,08	28,22	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	30.800.000,00	1.900.000,00	6,16	3.080.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.600.200.000,00	274.642.345,17	17,16	192.802.275,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.619.759.320,00	1.090.998.925,00	19,41	1.117.911.819,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	574.497.730,00	621.498.100,00	108,18	1.745.838.103,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	9.896.514.420,00	8.116.027.193,00	82,00	0,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.083.752.450,00	3.509.694.628,00	69,03	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.064.112.400,00	2.597.264.900,00	244,07	0,00

Dari tabel di atas sebagian besar jenis pajak daerah belum mencapai target penerimaan yang ditetapkan. Kelompok pajak yang melampaui target anggaran yaitu Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 108,18 persen dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 244,07 persen. Capaian realisasi terendah terdapat pada Pajak Sarang Burung Walet sebesar 6,16 persen, disusul Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 17,16 persen, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 19,41 persen, Pajak Air Tanah sebesar 28,22 persen, Pajak Reklame 66,67 persen, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 69,03 persen, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebesar 82,00 persen. Adapun penyebab dan atau kendala tidak tercapainya target perolehan pajak pada komponen-komponen tersebut:

- 1) Pajak hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan target dan realisasi senilai Rp0,00 ini karena adanya perubahan klasifikasi pajak menjadi bagian dari PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasal 50 dijelaskan bahwa objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi: (a) Makanan dan Minuman; (b) Tenaga Listrik; (c) Jasa Perhotelan; (d) Jasa Parkir dan (e) Jasa Kesenian dan Hiburan sehingga . Pada PBJT ada dua objek pajak yakni Pajak Hiburan dan Pajak Hotel pada periode berjalan belum dapat direalisasikan dengan optimal. Hal ini dipengaruhi kurangnya kegiatan-kegiatan hiburan yang dilaksanakan di kabupaten Majene yang berdampak pula pada tingkat hunian pada hotel berkurang. Dan sampai saat ini di Kabupaten Majene untuk penarikan pajak pada sektor pajak hiburan hanya memungut 2 objek pajak. Adapun hambatan pada sektor pajak hotel juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kejujuran oleh pihak hotel
- 2) Pajak Air tanah untuk periode tahun ini belum mampu memenuhi target disebabkan karena di tahun 2025 baru diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati sehingga prosesnya masih dalam tahap sosialisasi ke wajib pajak terkait air tanah yang mereka gunakan, dan baru beberapa wajib pajak yang mengerti dan melakukan pembayaran pajak

- 3) Pajak Sarang Burung walet tidak optimalisasi penerimaannya disebabkan karena pada saat kolektor melakukan penagihan atas wajib pajak tersebut para petani mengeluhkan kurangnya hasil panen atas burung walet.
- 4) Capaian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2025 bisa dikatakan masih sangat rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan hanya mampu mencapai Rp274.642.345,17 atau terealisasi 17,16 persen. Salah satu titik permasalahannya adalah pemungutan atas pajak ini hanya dapat dilakukan secara efektif pada pelaku usaha swasta atau Pihak Ketiga yang mengerjakan proyek fisik APBD baik yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat maupun APBD Kabupaten Majene. Adapun pada objek lain seperti pemilik usaha tambang maupun penyelenggara proyek fisik yang bersumber dari pembiayaan APBN tidak dapat dilakukan secara optimal dikarenakan kewenangan izin tambang berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta penyelenggara program APBN lebih sering tidak melaporkan proyek yang dikerjakan pada Pemerintah Daerah setempat;
- 5) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Perkotaan dan Pedesaan tidak mencapai target disebabkan data wajib pajak yang tidak andal akibat belum di-*update*. Keadaan ini menyebabkan penetapan pajak oleh Pemerintah Daerah sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Akibatnya sering terdapat penetapan yang ganda, nilai penetapan yang tidak relevan. dan penetapan atas objek tanah yang tidak dapat diidentifikasi keberadaannya, belum lagi kendala teknis petugas lapangan karena kesulitan melakukan penagihan disebabkan karena biaya operasional yang terbatas.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Retribusi Daerah	75.411.226.265,00	75.254.820.161,00	156.406.104,00	0,21
Jumlah	75.411.226.265,00	75.254.820.161,00	156.406.104,00	0,21

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp82.889.435.754,00 terealisasi sebesar Rp75.411.226.265,00

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp82.889.435.754,00. Jumlah retribusi yang diterima Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp75.411.226.265,00 atau 90,97 persen. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan senilai Rp156.406.104,00 atau 0,21 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 8 Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	82.889.435.754,00	75.411.226.265,00	90,97	75.254.820.161,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	76.741.114.754,00	71.509.780.372,00	93,18	71.833.922.198,00
Retribusi Pelayanan Persampahan	575.000.000,00	352.819.000,00	61,35	361.698.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	889.440.000,00	730.355.000,00	82,11	538.710.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.574.301.000,00	943.520.000,00	59,93	817.707.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00	15.150.000,00	25,25	8.850.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	638.660.000,00	497.162.000,00	77,84	398.630.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	81.360.000,00	111.215.000,00	136,69	95.160.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	310.560.000,00	219.829.000,00	70,78	209.477.100,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	800.000.000,00	404.129.900,00	50,51	221.871.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	19.000.000,00	19.008.000,00	100,04	19.008.000,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00	608.257.993,00	50,68	749.786.863,00

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Penerimaan Retribusi Daerah Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah mencapai 90,97 persen dari target yang ditetapkan. Presentasi realisasi paling tinggi terdapat pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar 136,69 persen, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 100,04 persen, Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 93,18 persen, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 82,11 persen, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 77,84 persen, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 70,78 persen, Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar 61,35 persen, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 59,93 persen, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar 50,68 persen dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 50,51 persen. Sementara realisasi paling rendah terdapat pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar 25,25 persen.

- 1) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mencatat persentase capaian tertinggi dari seluruh pendapatan retribusi daerah yang ditargetkan untuk senilai 136,69 persen atau melebihi Rp29.855.000,00 dari target yang telah ditetapkan. Kemudian jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya, penerimaan ini mengalami kenaikan senilai Rp16.055.000,00 dari tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp95.160.000,00;
- 2) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Tahun anggaran 2025 mencatat capaian yang positif di mana target yang ditetapkan Rp19.000.000,00 mampu merealisasikan pendapatan 100,04 persen senilai Rp19.008.000,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, dengan capaian nilai yang sama dengan Tahun 2024 yaitu Rp19.008.000,00.
- 3) Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu penerimaan yang memiliki persentase capaian realisasi yang tinggi sampai Rp76.741.114.754,00 dengan realisasi senilai Rp71.509.780.372,00 atau 93,18 persen. Retribusi ini merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Secara umum pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan telah berjalan cukup baik. namun masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan mengalami fluktuasi yang cukup beragam dari Tahun ke Tahun sehingga sering terjadi penetapan target yang terlalu optimistis;
- 4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah yang mempunyai tren realisasi tahunan yang selalu rendah. Namun tahun ini mengalami kenaikan signifikan dengan realisasi mencapai 82,11 persen, yaitu senilai Rp730.355.000,00 terealisasi dari target anggaran Rp889.440.000,00. Selain target yang ditetapkan tiap tahunnya terlalu tinggi dibanding objek pungutnya. Pengendalian atas pengelolaan retribusi pada Dinas Perhubungan masih menjadi perhatian dalam evaluasi pengelolaan pendapatan daerah, baik di internal Pemerintah Kabupaten Majene maupun di pihak DPRD Kabupaten Majene ketika melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Potensi perolehan atas retribusi parkir cukup tinggi mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan penambahan pengguna kendaraan bermotor di kawasan Majene diakibatkan rutinitas sebagai kawasan pengembangan pendidikan tinggi. Objek parkir dengan kontribusi paling tinggi terhadap objek pendapatan ini adalah retribusi parkir tepi jalan umum. Sedangkan objek retribusi parkir yang masih kurang kontribusinya adalah terminal, pasar, RSUD Majene dan tempat-tempat umum lainnya;
- 5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2025 mencatat peningkatan realisasi sebesar 77,84 persen atau senilai Rp497.162.000,00 dari target yang telah ditentukan senilai Rp638.660.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi mengalami kenaikan sebesar 24,72 persen atau senilai Rp98.532.000,00 dari realisasi senilai Rp398.630.000,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari terdiri dari: (1) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan merupakan objek pendapatan pada Sekretariat Daerah yang mencatat realisasi 106,85

persen atau senilai Rp183.900.000,00 dari target senilai Rp172.100.000,00 penyewaan tanah ini biasa disewa oleh pihak perbankan untuk digunakan sebagai lokasi ATM sedangkan untuk bangunan berupa pemakaian ruangan Gedung Assamalewuang yang digunakan untuk kegiatan pesta pernikahan dan kegiatan indoor lainnya; (2) Retribusi Pemakaian Ruangan yang mencatat realisasi 38,76 persen atau senilai Rp87.820.000,00 dari target Rp226.560.000,00, untuk retribusi pemakaian ruangan ini berupa sewa atas penggunaan rumah dinas; (3) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor yang mencatat realisasi 93,93 persen atau senilai Rp225.442.000,00 dari target Rp240.000.000,00; retribusi ini ditarik atas penggunaan kendaraan angkut, alat berat pada Dinas PUPR.

- 6) Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Tahun 2025 menargetkan senilai Rp310.560.000,00 dan mampu merealisasikan sebesar 70,78 persen atau senilai Rp219.829.000,00. Kelompok retribusi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencatat realisasi senilai Rp209.477.100,00. Retribusi ini menarik parkir di tempat yang telah ditentukan. Untuk titik parkir khusus ini masih dominan berada di pelataran parkir untuk pasar di tiap kecamatan;
- 7) Retribusi Pelayanan Persampahan mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya. Realisasi yang tercatat per 31 Desember 2025 senilai Rp352.819.000,00 atau 61,35 persen, dari target capaian realisasi 575.000.000,00, sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat realisasi senilai Rp361.698.000,00;
- 8) Retribusi Pelayanan Pasar merupakan penerimaan atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha. Pelayanan pasar mengalami peningkatan senilai Rp125.813.000,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp943.520.000,00 atau senilai 59,93 persen dari target capaian realisasi sebesar Rp1.574.301.000,00, sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat realisasi senilai Rp817.707.000,00;
- 9) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dulunya disebut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan salah satu komponen PAD yang hanya mampu merealisasikan senilai Rp608.257.993,00 atau sebesar 50,68 persen dari target senilai Rp1.200.000.000,00. sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat realisasi senilai Rp749.786.863,00. Hal ini juga dipengaruhi untuk izin Persetujuan Bangunan Gedung masih terkendala kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang melibatkan pihak desa dan kelurahan serta Satuan Polisi Pamong Praja yang berdampak pada kebutuhan anggaran operasional.
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tahun 2025 menargetkan Rp800.000.000,00 hanya mampu merealisasikan 50,51 persen atau senilai Rp404.129.900,00. Walaupun masih tergolong rendah, capaian realisasi ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang hanya terealisasi sebesar Rp221.871.000,00.
- 11) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercatat sebagai objek pendapatan dengan capaian realisasi terendah pada Tahun Anggaran 2025, yaitu Rp15.150.000,00 atau 25,25 persen dari Rp60.000.000,00. Sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat realisasi senilai 8.850.000,00. Objek pendapatan ini dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Majene di mana terdapat fasilitas berupa mobil operasional penyedotan kakus serta fasilitas daur ulang limbah. Kendala tidak tercapainya realisasi pada objek retribusi ini adalah dikarenakan belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya proses sanitasi pada kakus dan telah tersedianya fasilitas penyedotan dan daur ulang limbah rumah tangga pada pemerintah daerah;

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00	207.419.889,00	6,23
Jumlah	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00	207.419.889,00	6,23

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp3.534.611.072,00, merupakan dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Bank Sulselbar.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut merupakan dividen yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah yaitu Bank Sulselbar. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp3.534.611.072,00 dan terealisasi senilai Rp3.534.611.072,00 atau 100,00 persen. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut mengalami kenaikan senilai Rp207.419.889,00 atau 6,23 persen dibandingkan dengan TA 2024.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Lain-lain PAD yang Sah	6.377.237.674,34	2.102.364.233,07	4.274.873.441,27	203,34
Jumlah	6.377.237.674,34	2.102.364.233,07	4.274.873.441,27	203,34

Lain-lain PAD yang Sah tercatat terealisasi mencapai Rp6.377.237.674,34 naik signifikan 203,34 persen dari tahun TA. 2024

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp6.269.065.647,00, dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp6.377.237.674,34 atau 101,72 persen. Capaian ini cukup signifikan perbedaannya bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.102.364.233,07.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada TA 2025 mengalami kenaikan signifikan senilai Rp4.274.873.441,27 atau 203,34 persen dari periode sebelumnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 9 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	6.269.065.647,00	6.377.237.674,34	101,72	2.102.364.233,07
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.080.000,00	30.449.800,00	30,42	7.925.000,00
Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.003.826.886,00	100,38	945.170.520,00
Pendapatan Bunga	100.000.000,00	285.582.324,00	285,58	329.035.900,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.340.000.000,00	1.343.039.732,34	100,22	806.537.889,07
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	500.000,00	35.853.285,00	7.170,65	13.694.924,00
Pendapatan dari Pengembalian	3.678.485.647,00	3.678.485.647,00	100,00	0,00
Jumlah	6.269.065.647,00	6.377.237.674,34	101,72	2.102.364.233,07

Dari tabel di atas dapat kita lihat sebagian besar jenis pendapatan melampaui target yang ditetapkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mencatat surplus pendapatan dari target penerimaan yaitu Jasa Giro senilai 100,38 persen, Pendapatan Bunga yang mencapai 285,58 persen, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah senilai 100,22 persen, Pendapatan dari

Pengembalian senilai 100,00 persen dan yang tertinggi ada pada Pendapatan Denda Pajak Daerah senilai 7.170,65 persen.

Objek pendapatan yang mencatat realisasi paling rendah adalah Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan sebesar 30,42 persen, Permasalahan yang melatar belakangi tercapai dan tidaknya target pendapatan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan penjualan atas Barang Milik Daerah yang sudah ditetapkan sebagai barang rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk kegiatan operasional. Pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan penjualan pada sebagian barang milik daerah dalam bentuk hasil bongkaran bangunan;
- 2) Penerimaan Jasa Giro merupakan penerimaan yang sumbernya berasal dari penempatan uang pada bank. Penerimaan jasa giro tahun anggaran 2025 mencatat realisasi sebesar 100,38 persen senilai Rp1.003.826.886,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan giro mengalami peningkatan sebesar 6,21 persen di mana pada tahun 2024 tercatat realisasi jasa giro senilai Rp945.170.520,00;
- 3) Pendapatan Bunga tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu 13,21 persen atau senilai Rp43.453.576,00, namun persentase capaian lebih tinggi dibanding diantara target penerimaan lainnya karena mampu mencatat 285,58 persen atau senilai Rp285.582.324,00 dari target senilai Rp100.000.000,00;
- 4) Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah mengalami peningkatan realisasi yang signifikan yaitu terealisasi senilai Rp1.343.039.732,34. Rasio kenaikan mencapai 66,52 persen dari realisasi tahun sebelumnya, di mana pada Tahun hanya 2024 tercatat realisasi senilai Rp806.537.889,07;
- 5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan yang diterima akibat terlambatnya penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Tahun ini tidak mencatatkan realisasi dari target yang direncanakan senilai Rp50.000.000,00;
- 6) Pendapatan Denda Pajak Daerah pada Tahun 2025 mencatat realisasi paling tinggi yaitu sebesar 7.170,65 persen atau senilai Rp35.853.285,00 dari target pendapatan senilai Rp500.000,00. Diantara rincian objek pendapatan yang lain dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi ini merupakan realisasi Pendapatan Denda Pajak atas Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- 7) Pendapatan dari Pengembalian merupakan setoran pengembalian atas gaji dan tunjangan tahun sebelumnya. Realisasi yang tercatat sampai 31 Desember 2025 senilai Rp3.678.485.647,00 atau sebesar 100,00 persen. Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp0,00.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	760.123.684.301,00	783.780.588.110,00	(23.656.903.809,00)	(3,02)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	19.101.330.683,00	24.527.029.863,00	(5.425.699.180,00)	(22,12)
Jumlah	779.225.014.984,00	808.307.617.973,00	(29.082.602.989,00)	(3,60)

Pendapatan Transfer pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp789.268.730.174,00 sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp779.225.014.984,00 atau 98,72 persen

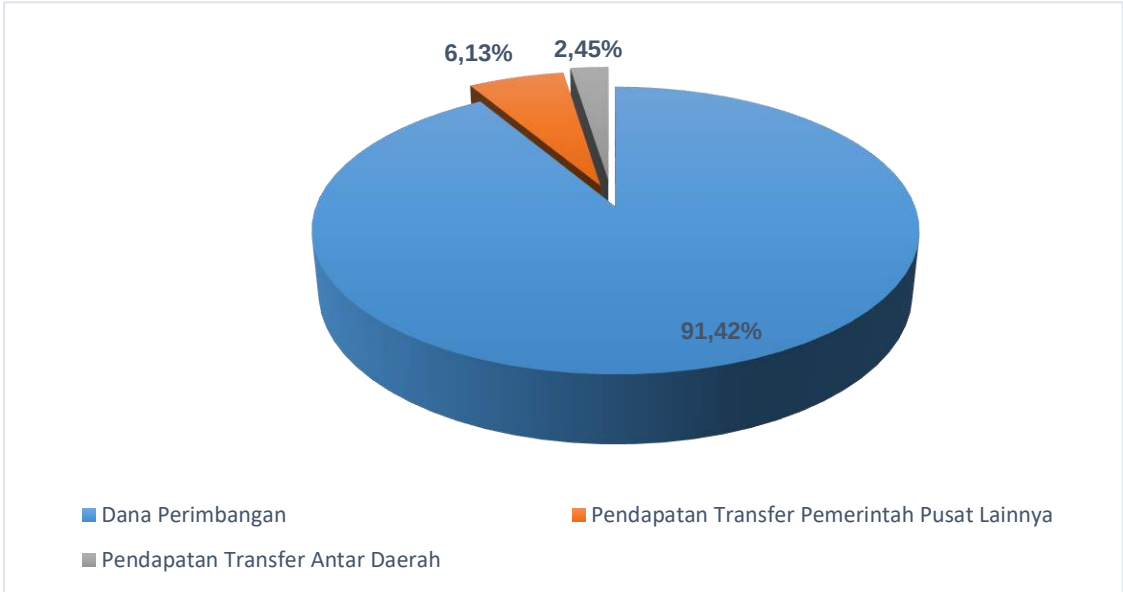
Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan. Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa serta transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp789.268.730.174,00 sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp779.225.014.984,00 atau 98,72 persen. Bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp808.307.617.973,00, realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp29.082.602.989,00 atau 3,60 persen atau dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 10 Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	768.344.427.000,00	760.123.684.301,00	98,93	783.780.588.110,00
Dana Perimbangan	715.688.574.000,00	712.396.005.533,00	99,53	727.959.737.110,00
Dana Bagi Hasil	5.826.710.000,00	5.634.568.300,00	96,70	6.639.074.000,00
Dana Alokasi Umum	535.243.742.000,00	544.376.636.960,00	101,70	548.935.022.195,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	24.453.962.000,00	24.111.344.842,00	98,59	41.802.623.094,00
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	150.164.160.000,00	138.273.455.431,00	92,08	130.583.017.821,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	52.655.853.000,00	47.727.678.768,00	90,64	55.820.851.000,00
Dana Desa	52.655.853.000,00	47.727.678.768,00	90,64	55.820.851.000,00
Transfer Antar Daerah	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	91,28	24.527.029.863,00
Pendapatan Bagi Hasil	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	91,28	24.527.029.863,00
Jumlah Pendapatan Transfer	789.268.730.174,00	779.225.014.984,00	98,72	808.307.617.973,00

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer sebagaimana dicantumkan pada tabel di atas dapat diperhatikan bahwa jenis pendapatan transfer yang paling berkontribusi terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Majene masih didominasi oleh pendapatan transfer yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat pada jenis Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Berikut komposisi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah berdasarkan persentase per jenisnya disajikan dalam grafik di bawah ini.



Grafik 5. 6 Komposisi Pendapatan Transfer

Berdasarkan grafik di atas tergambar bahwa pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai sektor pendapatan yang paling dominan dalam APBD Kabupaten Majene, transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil masih merupakan komponen terbesar yang mencapai 91,42 persen dari total pendapatan transfer. Dana Perimbangan merupakan kelompok transfer yang sejatinya dialokasikan dalam rangka mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Komponen dana perimbangan tidak banyak dipengaruhi kinerja pemerintah daerah, namun lebih banyak mempertimbangkan aspek tipologi daerah berdasarkan karakteristik seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan semacamnya. Adapun sektor transfer lainnya seperti Dana Insentif Daerah (DID), bagi hasil pajak, serta dana desa merupakan kelompok transfer yang bergantung kepada indikator yang lebih mengarah ke kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Majene masih tergolong daerah yang belum memiliki kemandirian fiskal untuk membiayai kebutuhannya sehingga masih sangat bergantung pada kelompok pendapatan transfer.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa.

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Perimbangan	712.396.005.533,00	727.959.737.110,00	(15.563.731.577,00)	(2,14)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	47.727.678.768,00	55.820.851.000,00	(8.093.172.232,00)	(14,50)
Jumlah	760.123.684.301,00	783.780.588.110,00	(23.656.903.809,00)	(3,02)

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	5.634.568.300,00	6.639.074.000,00	(1.004.505.700,00)	(15,13)
Jumlah	5.634.568.300,00	6.639.074.000,00	(1.004.505.700,00)	(15,13)

Kelompok Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp5.826.710.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp5.634.568.300,00 atau 96,70 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 11 Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Tahun 2025			Realisasi 2024 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.826.710.000,00	5.634.568.300,00	96,70	6.639.074.000,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	852.913.000,00	815.066.700,00	95,56	646.085.000,00
DBH PPh Pasal 21	3.000.994.000,00	2.665.743.300,00	88,82	2.565.796.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	153.631.000,00	296.265.000,00	192,84	2.809.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	0,00	38.320.300,00	0,00	66.645.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.223.000,00	14.224.000,00	100,00	29.566.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.296.874.000,00	1.296.874.000,00	100,00	1.742.782.000,00
DBH Sawit	508.075.000,00	508.075.000,00	100,00	1.585.391.000,00

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Alokasi Umum (DAU)	544.376.636.960,00	548.935.022.195,00	(4.558.385.235,00)	(0,83)
Jumlah	544.376.636.960,00	548.935.022.195,00	(4.558.385.235,00)	(0,83)

Kelompok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp535.243.742.000,00 dan sampai pada akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp544.376.636.960,00 atau 101,71 persen. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp4.558.385.235,00 atau 0,83 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2024.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Alokasi Khusus Fisik	24.111.344.842,00	41.802.623.094,00	(17.691.278.252,00)	(42,32)
Dana Alokasi Khusus-Nonfisik	138.273.455.431,00	130.583.017.821,00	7.690.437.610,00	5,89
Jumlah	162.384.800.273,00	172.385.640.915,00	(10.000.840.642,00)	(5,80)

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp162.384.800.273,00 dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp174.618.122.000,00 atau 92,99 persen. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp10.000.840.642,00 atau 5,80 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari:

a. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan senilai Rp24.453.962.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp24.111.344.842,00 atau 98,59 persen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 12 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2025

Uraian	2025		Rasio (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	24.453.962.000,00	24.111.344.842,00	98,59
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	728.126.000,00	725.873.554,00	99,69
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	384.935.000,00	384.025.000,00	99,76
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	422.800.000,00	422.630.000,00	99,95
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	322.006.000,00	317.484.100,00	98,59
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.704.411.000,00	7.488.971.000,00	97,20
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.873.861.000,00	3.873.861.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	6.929.803.099,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	11.017.823.000,00	3.968.697.089,00	36,02

b. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan senilai Rp150.164.160.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp138.273.455.431,00 atau 92,08 persen dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 5. 13 Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik TA 2025

Uraian	2025		Rasio (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	150.164.160.000,00	138.273.455.431,00	92,08
DAK Nonfisik-BOS Reguler	25.656.882.000,00	25.632.682.000,00	99,90
DAK Nonfisik-BOS Kinerja	1.573.000.000,00	1.573.000.000,00	100,00
DAK Nonfisik-TPG PNSD	81.400.707.000,00	72.896.784.618,00	89,55
DAK Nonfisik-Tamsil Guru PNSD	1.114.250.000,00	765.810.000,00	68,72
DAK Nonfisik-TKG PNSD	10.051.326.000,00	9.105.344.845,00	90,58
DAK Nonfisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	492.085.000,00	491.398.280,00	99,86
DAK Nonfisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	354.629.000,00	354.629.000,00	100,00
DAK Nonfisik-Dana Bantuan BLPS	499.994.000,00	499.994.000,00	100,00
DAK Nonfisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	358.818.600,00	89,55
DAK Nonfisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	483.018.000,00	483.018.000,00	100,00
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.868.896.000,00	4.819.839.000,00	98,99
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.351.640.000,00	3.313.410.900,00	98,85
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00
DAK Nonfisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.787.007.000,00	4.421.693.927,00	92,36
DAK Nonfisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	10.997.966.000,00	9.426.852.261,00	85,71
DAK Nonfisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.862.100.000,00	3.860.180.000,00	99,95

5.1.1.2.1.4 Dana Insentif Daerah (DID)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan Dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang Tata Kelola Keuangan Daerah, Pelayanan Umum Pemerintahan, dan Pelayanan Dasar Publik sampai dengan per 31 Desember 2025 tidak mengangarkan Dana Insentif Daerah.

5.1.1.2.1.5 Dana Desa

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Dana Desa	47.727.678.768,00	55.820.851.000,00	(8.093.172.232,00)	(14,50)
Jumlah	47.727.678.768,00	55.820.851.000,00	(8.093.172.232,00)	(14,50)

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer langsung ke rekening desa namun tetap dilaporkan dalam APBD Kabupaten Majene serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, Dana desa per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp47.727.678.768,00 dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp52.655.853.000,00 atau 90,64 persen. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun 2024 senilai Rp8.093.172.232,00 atau 14,50 persen.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	19.101.330.683,00	24.527.029.863,00	(5.425.699.180,00)	(22,12)
Jumlah	19.101.330.683,00	24.527.029.863,00	(5.425.699.180,00)	(22,12)

Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan senilai Rp20.924.303.174,00 sampai pada akhir Tahun Anggaran 2025 dapat direalisasikan senilai Rp19.101.330.683,00 atau 91,28 persen. Hal ini mengalami penurunan dari tahun lalu senilai Rp5.425.699.180,00 dengan persentase sebesar 22,12 persen.

Penurunan pendapatan transfer antar daerah tersebut mengalami penurunan cukup signifikan disebabkan karena Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air permukaan mengalami penundaan pencairan triwulan III berdasarkan:

- a. SK Gubernur Nomor 758 Tahun 2025 Tanggal 4 November 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Triwulan III dengan nilai Rp2.313.838.150,00;
- b. SK Gubernur Nomor 769 Tahun 2025 Tanggal 9 November 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Triwulan III senilai Rp52.251.589,00; dan
- c. SK Gubernur Nomor 819 Tahun 2025 Tanggal 8 Desember 2025 tentang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Triwulan III dengan nilai Rp4.217.004,00.

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Bagi Hasil	19.101.330.683,00	24.527.029.863,00	(5.425.699.180,00)	(22,12)
Jumlah	19.101.330.683,00	24.527.029.863,00	(5.425.699.180,00)	(22,12)

Pendapatan Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp20.924.303.174,00. Sampai pada akhir Tahun Anggaran 2025, dapat direalisasikan senilai Rp19.101.330.683,00 atau 91,28 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 14 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Bagi Hasil	20.924.303.174,00	19.101.330.683,00	91,28
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.049.872.846,00	1.429.672.684,00	136,17
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	870.189.112,00	896.638.937,00	103,03
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.071.919.900,00	6.165.862.899,00	76,38
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	20.513.316,00	11.497.971,00	56,05
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.911.808.000,00	10.597.658.192,00	97,12

5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada entitas/daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah atau desa penerima. Contohnya adalah bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota serta desa dan bantuan keuangan dari kabupaten/kota ke desa. Tahun 2025 tidak terdapat anggaran Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan begitupun yang terjadi pada Tahun 2024.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan per 31 Desember 2025 target dan realisasi Rp0,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp0,00 dari jumlah yang telah dianggarkan senilai Rp0,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah kelompok pendapatan APBD selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 tidak terdapat anggaran maupun realisasi pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA, demikian pula pada Tahun 2024. Berikut perkembangan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2025 disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 5. 7 Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021-2025

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Hibah yang bersumber dari pemerintah pusat cenderung menurun sejak tahun 2021 dan tidak ada realisasi di tahun 2024 dan 2025. Pada tahun anggaran 2021, pendapatan hibah terealisasi cukup tinggi dengan nilai Rp48.827.690.000,00 lalu ditahun 2022 turun drastis senilai Rp1.227.000.000,00 selanjutnya ditahun 2023 kembali turun menjadi Rp1.002.000.000,00 dan tahun 2024 serta 2025 senilai Rp0,00, disebabkan karena perubahan kebijakan terkait penganggaran dan pelaporan dana Biaya Operasional Sekolah di mana sebelumnya dianggarkan pada pos Pendapatan Asli Daerah dan sejak tahun 2020 dianggarkan dan dilaporkan pada pos Pendapatan Hibah pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Tidak terdapat realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

Tabel 5. 15 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Uraian	2025			2024
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Hibah merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dari Pemerintah Daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Majene tidak memperoleh hibah baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

5.1.2. Belanja dan Transfer

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Belanja dan Transfer	863.664.601.041,78	904.311.515.312,78	(40.646.914.271,00)	(4,49)
Jumlah	863.664.601.041,78	904.311.515.312,78	(40.646.914.271,00)	(4,49)

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2025 sebesar Rp863.664.601.041,78 atau 94,85 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp910.562.452.913,69

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Performance-Based Budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Rincian belanja menurut jenis disajikan secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 16 Rincian Belanja Menurut Jenis

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
BELANJA OPERASI	754.940.405.263,69	720.624.276.601,78	95,45	729.988.167.952,60
Belanja Pegawai	467.875.356.954,00	451.753.620.104,00	96,55	424.459.751.438,00
Belanja Barang dan Jasa	276.845.340.309,69	259.163.085.597,78	93,61	267.189.138.109,60
Belanja Hibah	10.156.348.000,00	9.648.530.900,00	95,00	38.275.918.405,00
Belanja Bantuan Sosial	63.360.000,00	59.040.000,00	93,18	63.360.000,00
BELANJA MODAL	43.213.252.689,00	37.803.728.541,00	87,48	69.228.942.593,18
Belanja Tanah	861.471.700,00	732.371.100,00	85,01	1.053.059.242,00
Belanja Peralatan dan Mesin	8.383.182.681,00	5.004.809.348,00	59,70	11.393.369.748,00
Belanja Gedung dan Bangunan	24.642.236.887,00	23.797.538.257,00	96,57	33.605.479.353,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.963.076.421,00	7.906.104.836,00	88,21	23.121.034.250,18
Belanja Aset Tetap Lainnya	323.285.000,00	322.905.000,00	99,88	56.000.000,00
Belanja Aset Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	2.900.000.000,00	2.499.579.085,00	86,19	1.330.046.402,00
BELANJA TRANSFER	109.508.794.961,00	102.737.016.814,00	93,81	103.764.358.365,00
Transfer Bagi Hasil	2.696.704.257,00	853.100.342,00	31,63	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	106.812.090.704,00	101.883.916.472,00	95,38	103.764.358.365,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	910.562.452.913,69	863.664.601.041,78	94,85	904.311.515.312,78

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 direalisasikan senilai Rp863.664.601.041,78 atau menurun 4,49 persen dari saldo tahun sebelumnya di Tahun 2024 yang tercatat senilai Rp904.311.515.312,78. Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri

dari realisasi Belanja Operasi senilai Rp720.624.276.601,78, Belanja Modal senilai Rp37.803.728.541,00, Belanja Tak Terduga senilai Rp2.499.579.085,00 dan Transfer senilai Rp102.737.016.814,00. Berikut perkembangan realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Kabupaten Majene disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 5. 8 Perkembangan Belanja dan Transfer Tahun 2021-2025

Dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja. Khusus dalam kelompok belanja, sesuai dengan Paragraf 18 PSAP Nomor 02 yang menyebutkan bahwa entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK.

a. **Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Organisasi**

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 terdiri atas belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Belanja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini PPKD. Berikut disajikan dalam tabel ringkasan realisasi belanja menurut organisasi secara berurutan berdasarkan besaran realisasi belanja.

Tabel 5. 17 Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Organisasi

No.	Organisasi	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	340.132.416.323,00	328.275.546.123,00	96,51
2.	Dinas Kesehatan	135.685.570.113,69	130.691.204.588,00	96,32
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	66.750.466.923,00	58.857.783.668,00	88,18
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.820.007.296,00	52.990.097.302,78	94,93
5.	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	11.628.854.170,00	11.032.424.198,00	94,87
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	5.058.520.298,00	4.749.551.938,00	93,89
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.335.134.706,00	6.149.255.313,00	83,83
8.	Dinas Sosial	1.751.435.402,00	1.518.016.077,00	86,67
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.233.478.034,00	2.926.229.351,00	90,50
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.947.792.451,00	2.784.636.863,00	94,47

No.	Organisasi	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
11.	Dinas Ketahanan Pangan	1.937.960.791,00	1.837.549.510,00	94,82
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.797.938.727,00	6.476.724.883,00	95,27
13.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.189.674.710,00	2.926.368.305,00	91,75
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.364.102.338,00	2.087.806.776,00	88,31
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.229.388.401,00	6.971.234.576,00	96,43
16.	Dinas Perhubungan	3.503.317.872,00	3.274.163.177,00	93,46
17.	Dinas Komunikasi Informatika. Statistik dan Persandian	3.283.096.474,00	3.183.881.948,00	96,98
18.	Dinas Koperasi UKM. Perindustrian dan Perdagangan	4.332.506.058,00	4.113.024.625,00	94,93
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.215.666.967,00	2.114.547.858,00	95,44
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.848.846.312,00	6.623.100.494,00	96,70
21.	Dinas Perpustakaan	2.993.874.906,00	2.887.635.453,00	96,45
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.299.035.801,00	6.099.901.993,00	96,84
23.	Dinas Pertanian. Peternakan dan Perkebunan	13.991.773.388,00	13.349.639.156,00	95,41
24.	Sekretariat Daerah	24.578.162.699,00	23.050.668.762,00	93,79
25.	Sekretariat DPRD	18.791.186.866,00	17.822.098.079,00	94,84
26.	Badan Perencanaan Daerah	3.535.558.094,00	3.176.432.372,00	89,84
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	119.835.673.948,00	112.258.011.302,00	93,68
28.	Badan Pendapatan Daerah	4.308.110.825,00	3.971.760.893,00	92,19
29.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	4.191.505.023,00	3.912.116.903,00	93,33
30.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.250.063.039,00	1.189.927.082,00	95,19
31.	Inspektorat Daerah	6.236.513.580,00	5.716.178.643,00	91,66
32.	Kecamatan Banggae	6.781.820.671,00	6.622.868.169,00	97,66
33.	Kecamatan Banggae Timur	7.854.008.117,00	7.507.427.418,00	95,59
34.	Kecamatan Pamboang	3.100.721.952,00	2.975.979.305,00	95,98
35.	Kecamatan Sendana	3.600.831.614,00	3.378.036.061,00	93,81
36.	Kecamatan Tammerodo	1.118.245.335,00	1.000.839.035,00	89,50
37.	Kecamatan Tubo Sendana	1.770.677.541,00	1.623.036.894,00	91,66
38.	Kecamatan Ulumanda	1.473.188.096,00	1.290.084.132,00	87,57
39.	Kecamatan Malunda	3.531.156.367,00	3.302.962.140,00	93,54
40.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.274.170.685,00	2.945.849.676,00	89,97
JUMLAH		910.562.452.913,69	863.664.601.041,78	94,85

Dapat dilihat bahwa SKPD dengan urutan 5 (lima) teratas dengan anggaran belanja yang paling tinggi adalah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga dengan jumlah anggaran senilai Rp340.132.416.323,00, Dinas Kesehatan senilai Rp135.685.570.113,00, Badan Keuangan dan Aset Daerah Rp119.835.673.948,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp55.820.007.296,00, serta Sekretariat Daerah Rp24.578.162.699,00. Postur belanja yang dominan pada kelompok satuan kerja tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Majene untuk memprioritaskan bidang Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam arah pembangunan daerah.

b. Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Urusan Pemerintahan

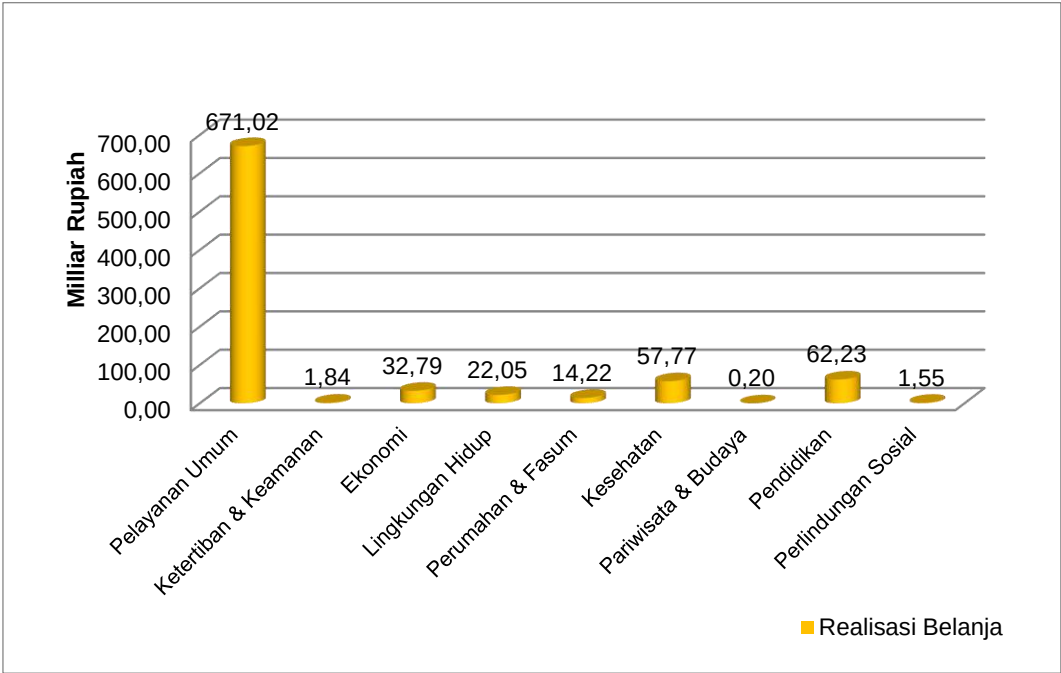
Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene juga dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan fungsi. Fungsi merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi terbagi dalam 9 (sembilan) fungsi. yaitu fungsi pelayanan

umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Majene per fungsi pada tahun anggaran 2025 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 18 Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Fungsi

No.	Uraian Fungsi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
1.	Pelayanan Umum	708.786.388.862,10	671.021.791.613,00	94,67
2.	Ketertiban dan Keamanan	2.899.526.300,00	1.841.847.850,00	63,52
3.	Ekonomi	35.129.668.033,00	32.788.109.286,78	93,33
4.	Lingkungan Hidup	23.055.102.838,00	22.052.870.862,00	95,65
5.	Perumahan dan Fasilitas Umum	14.671.177.174,00	14.217.520.983,00	96,91
6.	Kesehatan	60.173.803.640,59	57.767.907.604,00	96
7.	Pariwisata dan Budaya	195.769.000,00	195.769.000,00	100
8.	Pendidikan	63.815.634.218,00	62.230.583.032,00	97,52
9.	Perlindungan Sosial	1.835.382.848,00	1.548.200.811,00	84,35
Jumlah		910.562.452.913,69	863.664.601.041,78	94,85

Komposisi realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene menurut fungsi tahun anggaran 2025 terlihat pada grafik berikut:



Grafik 5. 9 Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi Tahun 2025

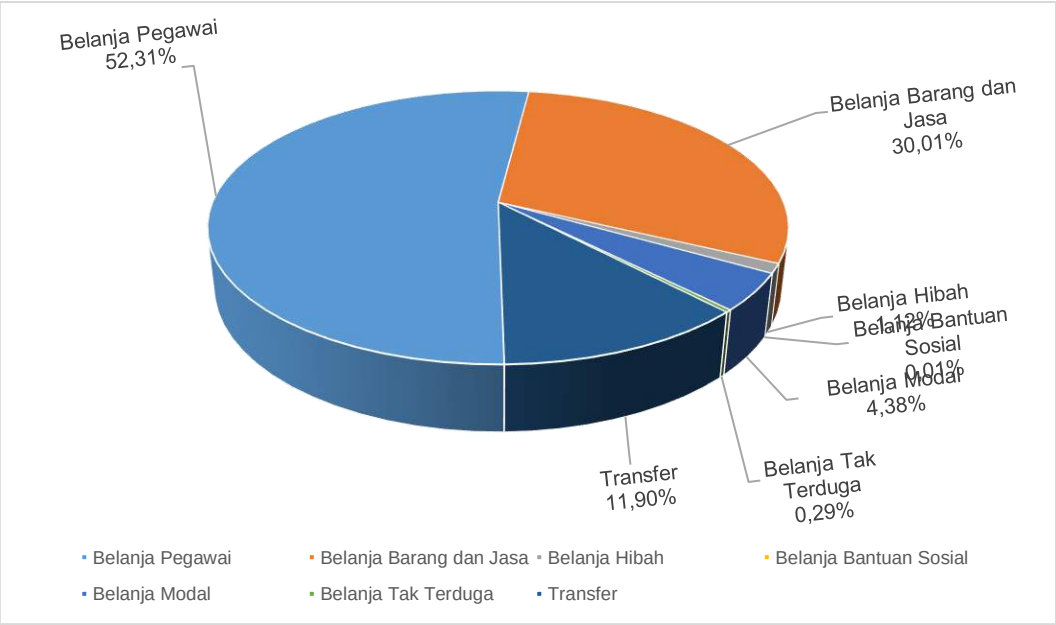
Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2025, bidang penyelenggaraan pemerintahan atau fungsi yang memiliki alokasi anggaran belanja yang paling dominan adalah pelayanan umum, pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

c. Belanja Pemerintah Kabupaten Majene Menurut Jenis

Berdasarkan PSAP Nomor 02, Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk

Pemerintah Pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan klasifikasinya terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp720.624.276.601,78, Belanja Modal senilai Rp37.803.728.541,00, Belanja Tak Terduga senilai Rp2.499.579.085,00, dan Transfer senilai Rp102.737.016.814,00. Komposisi belanja Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 berdasarkan klasifikasi ekonomi disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 5. 10 Komposisi Belanja Menurut Jenis TA 2025

d. Belanja Wajib Dana Transfer Umum dan Perlindungan Sosial

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 50 diatur bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, maka daerah berpotensi menerima sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini kemudian dipertegas lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Belanja Wajib. Berikut ringkasan laporan realisasi belanja wajib dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5. 19 Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Wajib

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Pemenuhan Mandatory Spending (%)
1.	Pendidikan	362.648.449.251,00	266.442.341.122,00	73,47	29,26
2.	Infrastruktur Publik	199.972.717.787,69	183.826.186.707,78	91,93	22,95
3.	Anggaran Dana Desa	54.056.237.704,00	54.056.237.704,00	100,00	9,84
4.	Pengawasan	2.475.752.682,00	2.029.329.298,00	81,97	0,27
Jumlah		619.153.157.424,69	506.354.094.831,78	81,78	

Belanja wajib yang dimaksud terdiri atas belanja pendidikan paling sedikit sebesar 20 persen dari dana transfer umum dan untuk di Kabupaten Majene atas belanja tersebut pemerintah telah merealisasikan sebesar 266.442.341.122,00 atau 73,47 persen atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40,00 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40,00 persen, Pengalokasian belanja untuk pembangunan infrastruktur publik oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 senilai Rp183.826.186.707,78 jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp801.053.657.952,69 maka anggaran pembangunan infrastruktur publik tersebut mencapai 22,95 persen dari Belanja Daerah dan belum memenuhi, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan fiskal Kabupaten Majene yang hampir setengahnya digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja masih digunakan melakukan pembayaran utang tahun sebelumnya. Sehingga Pemerintah Kabupaten Majene mampu kedepannya mampu memanfaatkan semua potensi daerah untuk menambah kemampuan fiskalnya.

Alokasi Dana Desa 10 persen. Kewajiban alokasi anggaran minimal untuk *mandatory spending* Tahun 2025 menganggarkan senilai Rp54.056.237.704,00 dengan realisasi 100,00 persen berdasarkan perhitungan pemerintah Kabupaten hanya mampu mengalokasikan 9,84 persen, kekurangan penganggaran pada Tahun 2025 tersebut disebabkan oleh penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang dilakukan pada awal tahun dengan mengacu pada anggaran pokok. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang lebih cermat dan akurat dalam penyusunan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Bidang Pengawasan Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 untuk biaya operasional pengawasan Inspektorat senilai Rp2.475.752.682,00 jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan senilai Rp910.562.452.913,69 atau 0,27 persen dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi ini belum memenuhi kriteria yang diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar daerah dengan besaran APBD sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit senilai 1,00 persen dari total Belanja Daerah namun atas keterbatasan fiskal yang ada dengan target program prioritas visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Majene harus dipenuhi dalam rentang waktu efektif yang tergolong singkat, maka Pemerintah Kabupaten Majene hanya dapat mengalokasikan kegiatan pengawasan yang bersifat prioritas.

Kewajiban alokasi anggaran minimal untuk *mandatory spending* bidang kesehatan yang sebelumnya diatur dalam UU Kesehatan 2009 yakni 5 persen untuk APBN dan 10 persen untuk APBD telah dihapus dalam Undang-Undang Kesehatan baru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantinya dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang lebih fleksibel. Sebagai bentuk komitmen pada Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 mengalokasikan anggaran untuk pada bidang kesehatan senilai Rp202.436.037.036,69, dalam bentuk Belanja operasi senilai Rp186.131.789.849,69 dan dalam bentuk belanja modal senilai Rp16.304.247.187,00, jika dihitung persentase dari besaran Belanja Daerah yang dianggarkan maka anggaran kesehatan tersebut mencapai 22,23 persen dari Belanja Daerah atau memenuhi syarat dialokasikan minimal 10,00 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5.1.2.1. Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Operasi	720.624.276.601,78	729.988.167.952,60	(9.363.891.350,82)	(1,28)
Jumlah	720.624.276.601,78	729.988.167.952,60	(9.363.891.350,82)	(1,28)

Pengeluaran Belanja Operasi pada tahun 2025 realisasi sebesar Rp720.624.276.601,78 dengan capaian realisasi 95,45 persen

Pengeluaran Belanja Operasi pada Tahun 2025 dianggarkan senilai Rp754.940.405.263,69 dengan realisasi senilai Rp720.624.276.601,78 atau 95,45 persen. Belanja Operasi pada periode APBD Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp9.363.891.350,82 dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 20 Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi
Belanja Pegawai	467.875.356.954,00	451.753.620.104,00	96,55	424.459.751.438,00
Belanja Barang dan Jasa	276.845.340.309,69	259.163.085.597,78	93,61	267.189.138.109,60
Belanja Hibah	10.156.348.000,00	9.648.530.900,00	95,00	38.275.918.405,00
Belanja Bantuan Sosial	63.360.000,00	59.040.000,00	93,18	63.360.000,00
Jumlah	754.940.405.263,69	720.624.276.601,78	95,45	729.988.167.952,60

Kalau dilihat pada Tabel di atas, belanja hibah berdasarkan realisasi berkurang secara signifikan senilai Rp28.627.387.505,00 atau 74,79 persen, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 merupakan masa pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, oleh karena itu di tahun tersebut jumlah belanja hibah yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan tahun lainnya, belanja hibah yang dikeluarkan berupa bantuan keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres Majene dan Kodim 1401/Majene.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Pegawai	451.753.620.104,00	424.459.751.438,00	27.293.868.666,00	6,43
Jumlah	451.753.620.104,00	424.459.751.438,00	27.293.868.666,00	6,43

Realisasi belanja pegawai pada TA 2025 rata-rata komponen belanja gaji terealisasi 96,55 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp467.875.356.954,00

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp467.875.356.954,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp451.753.620.104,00 atau 96,55 persen. Adapun rincian realisasi belanja pegawai dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5. 21 Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	364.304.387.563,00	353.779.593.860,00	97,11	321.163.492.076,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	94.802.623.500,00	89.842.202.049,00	94,77	7.257.126.357,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	0,00	0,00		87.886.106.914,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.462.079.569,00	7.210.229.141,00	96,62	7.495.943.775,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.250.974,00	194.250.974,00	100,00	178.542.316,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	100,00	478.540.000,00
Belanja Pegawai BLUD	601.135.348,00	216.464.080,00	36,00	0,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Jumlah	467.875.356.954,00	451.753.620.104,00	96,55	424.459.751.438,00

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada Tahun 2025 direalisasikan senilai Rp353.779.593.860,00 atau 97,11 persen dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp364.304.387.563,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 22 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Gaji Pokok ASN	282.312.275.059,60	274.733.770.573,00	97,31
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.819.421.512,40	23.703.987.796,00	95,50
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.271.010.358,00	4.987.840.000,00	94,62
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.412.886.060,00	15.156.361.000,00	98,33
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.729.764.874,00	6.558.795.000,00	97,45
Belanja Tunjangan Beras ASN	15.100.589.017,00	14.462.460.860,00	95,77
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	646.400.867,00	598.998.053,00	92,66
Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.394.670,00	4.008.275,00	91,20
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	11.585.255.953,00	11.285.693.160,00	97,41
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	613.389.191,00	571.922.513,00	93,23
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.809.000.001,00	1.715.756.630,00	94,84
Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00	0,00
Jumlah	364.304.387.563,00	353.779.593.860,00	97,11

Realisasi belanja pegawai pada TA 2025 menunjukkan capaian realisasi yang baik di mana rata-rata komponen belanja gaji terealisasi di atas 90,00 persen.

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN pada Tahun 2025 direalisasikan senilai Rp89.842.202.049,00 atau 94,77 persen dari jumlah anggaran senilai Rp94.802.623.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 23 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.641.000.000,00	1.449.000.000,00	88,29
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	93.161.623.500,00	88.393.202.049,00	94,88
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	0,00	0,00	0,00
Jumlah	94.802.623.500,00	89.842.202.049,00	94,77

c. **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya**

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp88.393.202.049,00 atau 94,88 persen dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp93.161.623.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 24 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	35.000.000,00	28.724.886,00	82,07
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	241.003.050,00	142.367.600,00	59,07
Belanja Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	44.472.000,00	6.949.500,00	15,62
Belanja Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	78.715.050,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	48.854.400,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.068.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	15.528.000,00	2.450.600,00	15,78
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olah Raga	35.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	950.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	60.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah – Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	28.750.000,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	81.400.707.000,00	78.341.554.618,00	96,24
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	10.051.326.000,00	9.105.344.845,00	90,58
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.114.250.000,00	765.810.000,00	68,72
Jumlah	93.161.623.500,00	88.393.202.049,00	94,88

d. **Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp7.210.229.141,00 atau 96,62 persen dari jumlah anggaran pokok senilai Rp7.462.079.569,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 25 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	43.570.800,00	43.570.800,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	65.902.200,00	65.902.200,00	100,00
Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	48.132.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.223.000,00	814.233.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	86.051.700,00	86.051.700,00	100,00

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	26.856.900,00	15.666.525,00	58,33
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	331.660,00	331.660,00	100,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	17.421,00	17.368,00	99,69
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	809.283.888,00	809.283.888,00	100,00
Belanja Tunjangan transportasi DPRD	2.403.000.000,00	2.403.000.000,00	100,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00	0,00	0,00
Jumlah	7.462.079.569,00	7.210.229.141,00	96,62

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp194.250.974,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggaran pokok senilai Rp194.250.974,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 26 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Uraian	2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Gaji Pokok KDH / WKDH	70.800.000,00	70.800.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH / WKDH	5.532.000,00	5.532.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH / WKDH	104.760.000,00	104.760.000,00	100,00
Belanja Tunjangan Beras KDH / WKDH	5.431.500,00	5.431.500,00	100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH / WKDH	873.354,00	873.354,00	100,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH / WKDH	2.600,00	2.600,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH / WKDH	6.264.000,00	6.264.000,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH / WKDH	146.880,00	146.880,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH / WKDH	440.640,00	440.640,00	100,00
Jumlah	194.250.974,00	194.250.974,00	100,00

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp510.880.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp510.880.000,00 terdiri dari:

- 1) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direalisasikan senilai Rp110.880.000,00 atau 100,00 persen dari Anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp110.880.00,00; dan
- 2) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH pada TA 2025 direalisasikan senilai Rp400.000.000,00 atau 100,00 persen dari Anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp400.000.000,00.

g. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD pada Tahun Anggaran 2025 direalisasikan senilai Rp216.464.080,00 atau 36,00 persen dari jumlah anggaran setelah perubahan senilai Rp601.135.348,00.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Barang dan Jasa	259.163.085.597,78	267.189.138.109,60	(8.026.052.511,82)	(3,00)
Jumlah	259.163.085.597,78	267.189.138.109,60	(8.026.052.511,82)	(3,00)

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan per 31 Desember 2025 telah direalisasikan sebesar Rp259.163.085.597,78 atau 93,61 persen

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan senilai Rp276.845.340.309,69 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 telah direalisasikan senilai Rp259.163.085.597,78 atau 93,61 persen. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 27 Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
BELANJA BARANG				
Belanja Barang Pakai Habis	63.326.694.994,59	60.175.010.391,00	95,02	62.049.133.862,50
Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.100.000,00	5.085.000,00	99,70	0,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.300.500,00	2.300.000,00	99,97	219.091.269,00
BELANJA JASA				
Belanja Jasa Kantor	37.320.975.294,00	33.302.226.306,00	89,23	33.661.530.886,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.261.293.192,00	20.005.099.831,00	98,73	15.540.770.218,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.132.056.200,00	1.092.416.990,00	96,49	717.627.997,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.434.352.500,00	1.174.563.000,00	81,88	929.150.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	14.200.000,00	14.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	10.921.655.325,00	9.283.619.266,00	85,00	2.979.429.385,00
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	4.875.134.820,00	4.673.062.660,00	95,85	17.171.895.156,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	237.300.000,00	237.299.999,00	99,99	127.500.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	153.000.000,00	17.000.000,00	11,11	348.545.800,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Pajak Daerah	125.000.000,00	112.307.000,00	89,84	0,00
BELANJA PEMELIHARAAN				
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.728.919.054,00	2.441.774.366,00	89,47	3.168.076.291,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.002.645.480,00	912.716.377,00	91,03	1.043.718.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.508.495.725,00	13.162.916.538,78	97,44	8.243.048.979,00
BELANJA PERJALANAN DINAS				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.326.922.260,00	16.959.748.205,00	92,54	21.102.270.741,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	100	100.000.000,00
BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT				
Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	169.500.000,00	159.500.000,00	94,10	130.700.000,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
BELANJA BARANG DAN JASA BOSP				
Belanja Barang dan Jasa BOSP	26.535.282.000,00	26.557.092.000,00	100,08	26.924.610.500,00
BELANJA BARANG DAN JASA BLUD				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	74.764.512.965,10	68.875.147.668,00	92,12	72.732.039.025,10
Jumlah	276.845.340.309,69	259.163.085.597,78	93,61	267.189.138.109,60

Pada tabel di atas terdapat Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS atas kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan yang realisasinya hanya mencapai 11,11 persen hal ini disebabkan karena pengajuan untuk pembayaran pada akhir tahun dan kapasitas fiskal tidak mungkin dilakukan pembayaran akhirnya menjadi utang senilai Rp136.000.000,00 di Dinas Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelampauan atas belanja BOSP disebabkan adanya kesalahan perhitungan penganggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS dengan tidak mempertimbangkan besaran pendapatan DAK Nonfisik-BOS Reguler 2025, termasuk tidak mengakomodir penambahan satu Entitas sekolah pada tingkatan menengah dimana tahun 2024 jumlah sekolah menengah sebanyak tiga puluh delapan (38) sekolah dan di tahun 2025 menjadi tiga puluh sembilan (39) sekolah

Terjadinya kenaikan yang signifikan pada Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa proyek nasional membutuhkan biaya konsultasi perencanaan seperti pada Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga untuk pembangunan sekolah dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan Jalan dan Irigasi sehingga berdampak juga pada penurunan Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi dibandingkan dengan Tahun 2024.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Hibah	9.648.530.900,00	38.275.918.405,00	(28.627.387.505,00)	(74,79)
Jumlah	9.648.530.900,00	38.275.918.405,00	(28.627.387.505,00)	(74,79)

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp10.156.348.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.648.530.900,00 atau 95,00 persen.

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp10.156.348.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp9.648.530.900,00 atau 95,00 persen, jika dibandingkan dengan Tahun 2024 berkurang secara signifikan senilai Rp28.627.387.505,00 atau 74,79 persen, hal ini disebabkan karena di Tahun 2024 belanja hibah tersebut dipergunakan untuk bantuan keuangan dalam rangka mensukseskan pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres Majene, Kodim 1401/Majene. aktivitas tersebut tidak ada lagi di tahun 2025. Adapun rincian belanja hibah di Tahun 2025 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 28 Belanja Hibah Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	29.440.000.000,00

Uraian	Tahun 2025		Rasio (%)	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Hibah Dana BOS	694.600.000,00	635.400.000,00	91,47	8.141.953.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	711.212.000,00	711.212.000,00	100,00	693.965.405,00
Belanja Hibah Dana BOSP	8.490.536.000,00	8.041.918.900,00	94,71	0,00
Jumlah	10.156.348.000,00	9.648.530.900,00	95,00	38.275.918.405,00

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional. Pemerintah Pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat perubahan mendasar terhadap mekanisme pengelolaan hibah pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelola belanja hibah mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPKD. Namun dengan ketentuan yang terakhir, belanja hibah dapat dikelola di tingkat SKPD. Realisasi belanja hibah berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 29 Daftar Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan SKPD

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Total Realisasi (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	9.185.136.000,00	8.677.318.900,00
	Belanja Hibah Dana BOS yang Diterima Satdikdas	694.600.000,00	635.400.000,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.003.896.000,00	4.758.948.000,00
	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.486.640.000,00	3.282.970.900,00
2.	Sekretariat Daerah	260.000.000,00	260.000.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	260.000.000,00	260.000.000,00
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	711.212.000,00	711.212.000,00
	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	711.212.000,00	711.212.000,00
TOTAL		10.156.348.000,00	9.648.530.900,00

Hibah pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga merupakan hibah berbentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Satuan Pendidikan Dasar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta hibah ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP TK dan PAUD), Hibah tersebut bersumber dari Dana Alokasi Nonfisik Bidang Pendidikan. Selain itu terdapat hibah bagi organisasi sosial kemasyarakatan seperti Pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga, BKMT, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene dan Belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan hibah yang berbentuk bantuan keuangan Partai Politik.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Bantuan Sosial	59.040.000,00	63.360.000,00	(4.320.000,00)	(6,82)
Jumlah	59.040.000,00	63.360.000,00	(4.320.000,00)	(6,82)

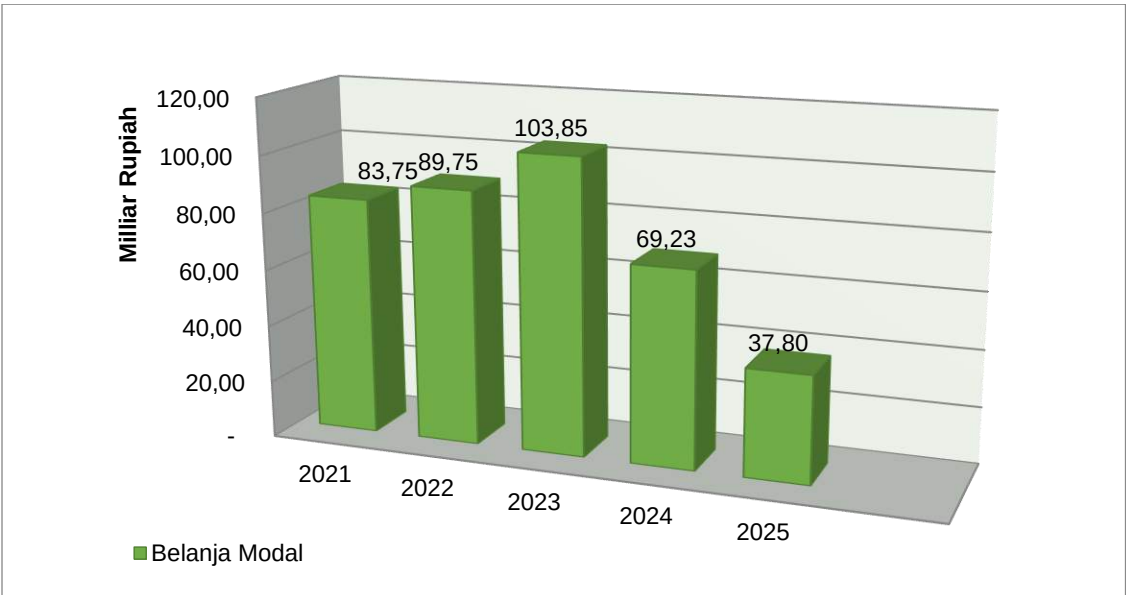
Selain mekanisme hibah, mekanisme belanja bantuan sosial juga mengalami perubahan pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja. Sebagaimana belanja hibah, belanja bantuan sosial sebelumnya mulai dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPKD. Namun dengan ketentuan yang terakhir, belanja bantuan sosial dapat dikelola di tingkat SKPD. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat memengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan pada satu SKPD yaitu Dinas Sosial berupa Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga yang dianggarkan senilai Rp63.360.000,00. Sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp59.040.000,00 atau 93,18 persen. Bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat eks penyandang penyakit kusta dengan penerima manfaat sebanyak 13 orang/keluarga yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Majene Nomor 100.3.32/820/XI/TAHUN 2025 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Eks Penyandang Penyakit Kusta Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025.

5.1.2.2. Belanja Modal

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Modal	37.803.728.541,00	69.228.942.593,18	(31.425.214.052,18)	(45,39)
Jumlah	37.803.728.541,00	69.228.942.593,18	(31.425.214.052,18)	(45,39)

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp37.803.728.541,00

Belanja modal pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp43.213.252.689,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp37.803.728.541,00 atau 87,48 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya, realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp31.425.214.052,18 atau 45,39 persen hal ini disebabkan karena salah satu sumber pendapatan yakni pendapatan atas DAK Fisik juga mengalami penurunan sehingga berdampak pada belanja modal infrastruktur selain itu penggunaan Dana DAK Fisik digunakan untuk membiayai belanja barang yang akan diserahkan. Berikut kami gambarkan perbandingan belanja modal Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025.

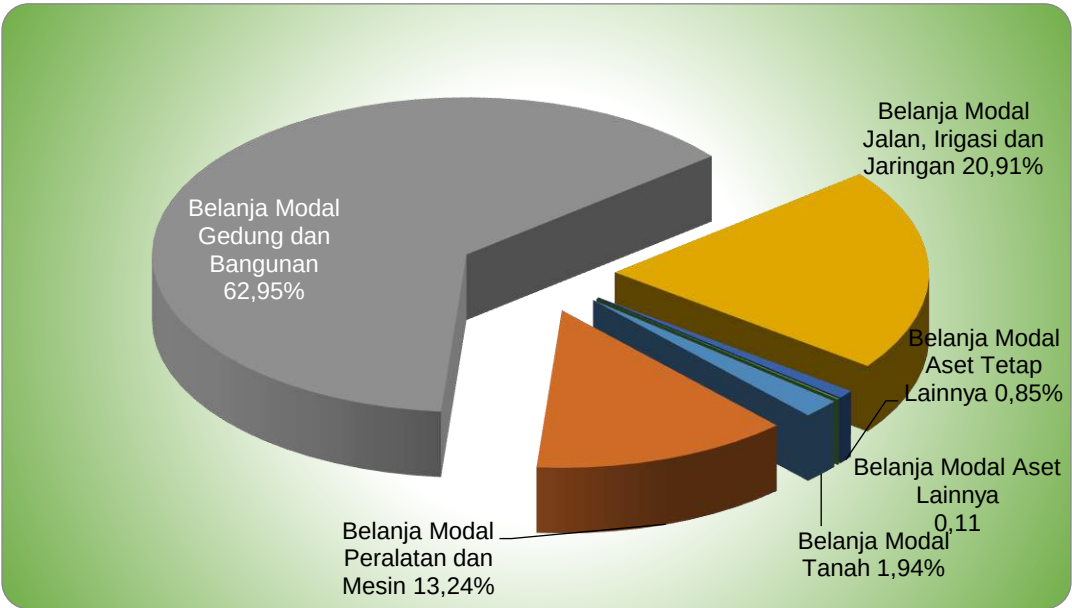


Grafik 5. 11 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2021-2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja modal dalam kurun lima tahun terakhir mencapai nilai tertinggi pada Tahun Anggaran 2023, yaitu senilai Rp103.848.841.602,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi senilai Rp83.749.169.412,51, pada Tahun 2022

realisasi mengalami kenaikan menjadi senilai Rp89.753.902.940,00. Selanjutnya, pada Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan senilai Rp103.848.841.602,00. Pada tahun 2024, realisasi belanja modal mengalami penurunan menjadi senilai Rp69.228.942.593,18, dan hingga akhir tahun 2025 kembali menurun menjadi senilai Rp37.803.728.541,00.

Komposisi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Majene TA 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5. 12 Komposisi Belanja Modal per Jenis TA 2025

Grafik komposisi belanja modal berdasarkan jenisnya pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa belanja modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja modal dengan persentase tertinggi yaitu 62,95 persen. Kemudian pada posisi kedua adalah belanja modal jenis Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan Persentase 20,91 persen. Kemudian disusul oleh Peralatan dan Mesin dengan persentase 13,24 persen, lalu belanja modal jenis Tanah dengan komposisi 1,94 persen, selanjutnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan persentase 0,85 persen dan Belanja Modal Aset Lainnya 0,11 persen terakhir persen. Realisasi belanja modal berdasarkan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 30 Belanja Modal

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah	861.471.700,00	732.371.100,00	85,01	1.053.059.242,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.383.182.681,00	5.004.809.348,00	59,70	11.393.369.748,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.642.236.887,00	23.797.538.257,00	96,57	33.605.479.353,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.963.076.421,00	7.906.104.836,00	88,20	23.121.034.250,18
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	323.285.000,00	322.905.000,00	99,88	56.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	43.213.252.689,00	37.803.728.541,00	87,48	69.228.942.593,18

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan senilai Rp861.471.700,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 telah terealisasi senilai Rp732.371.100,00 atau 85,01 persen. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp320.688.142,00 atau 30,45 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Tanah sebagai berikut.

Tabel 5. 31 Belanja Modal Tanah

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)
Belanja Modal Tanah			
Pengadaan tanah untuk Sport Center Desa Adolang Dhua	206.772.000,00	206.772.000,00	100,00
Pengadaan tanah untuk TK IDHATA Camba Kelurahan Baru Kecamatan Banggae.	200.534.000,00	200.534.000,00	100,00
Pengadaan tanah untuk Relokasi Korban Banjir pada Desa Salutambung Kec. Ulumanda	161.424.000,00	161.424.000,00	100,00
Biaya Pengelolaan	185.000.000,00	74.402.400,00	40,22
Biaya Sertifikat Tanah	50.000.000,00	37.453.700,00	74,91
Ganti Rugi Pembebasan Tanah Pelebaran Jalan & Jembatan Desa Tubo Poang [Utang TA. 2022]	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Biaya Pengelolaan Pengadaan Tanah [Utang TA. 2022]	5.956.700,00	0,00	0,00
Penilaian Biaya Pembebasan Lahan/Tanah-Relokasi Korban Banjir Desa Salutambung Kec.Ulumanda Kab, Majene [Utang TA. 2023]	49.395.000,00	49.395.000,00	100,00
Perluasan Bak Penampungan Air PDAM di Kec. Banggae Timur [Utang TA. 2022]	625.000,00	625.000,00	100,00
Perluasan Sport Center [Utang TA. 2022]	765.000,00	765.000,00	100,00
Jumlah	861.471.700,00	732.371.100,00	85,01

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp8.383.182.681,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp5.004.809.348,00 atau 59,70 persen. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp6.388.560.400,00 atau 56,07 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 5. 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	8.625.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	938.450.000,00	938.140.930,00	99,96	4.964.859.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.948.300.931,00	1.882.309.400,00	96,61	1.492.702.500,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	60.434.000,00	35.434.000,00	58,63	24.000.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	32.967.000,00	32.967.000,00	100,00	2.172.679.450,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	276.450.000,00	276.390.000,00	99,97	7.138.842,00
Belanja Modal Komputer	589.083.499,00	536.458.170,00	91,06	799.310.250,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	125.338.500,00	125.084.950,00	99,79	0,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.412.158.751,00	1.178.024.898,00	26,69	1.924.054.706,00
Jumlah	8.383.182.681,00	5.004.809.348,00	59,70	11.393.369.748,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp24.642.236.887,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp23.797.538.257,00 atau 96,57 persen. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp9.807.941.096,00 atau 29,19 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya senilai Rp33.605.479.353,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 33 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.710.436.148,00	21.895.384.388,00	96,41	30.991.481.222,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	89.188.273,00	89.188.273,00	100,00	106.256.000,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	3.354.465,00	3.354.465,00	100,00	744.829.600,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.677.880.928,00	1.648.234.058,00	98,23	660.700.080,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	161.377.073,00	161.377.073,00	100,00	1.102.212.451,00
Jumlah	24.642.236.887,00	23.797.538.257,00	96,57	33.605.479.353,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp8.963.076.421,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp7.906.104.836,00 atau 88,20 persen dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. 34 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan	3.187.876.696,00	2.501.197.430,00	78,45	18.448.248.613,18
Belanja Modal Jembatan	20.000.000,00	7.829.940,00	39,14	614.578.730,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	116.405.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	4.996.452.877,00	4.691.737.466,00	93,90	3.899.701.907,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	195.000.000,00	194.667.000,00	99,82	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	40.245.848,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	387.501.000,00	374.673.000,00	96,68	42.100.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	136.000.000,00	136.000.000,00	100,00	0,00

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Jumlah	8.963.076.421,00	7.906.104.836,00	88,20	23.121.034.250,18

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp323.285.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp322.905.000,00 atau 99,88 persen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 35 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Pokok (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	323.285.000,00	322.905.000,00	99,88	56.000.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	323.285.000,00	322.905.000,00	99,88	56.000.000,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

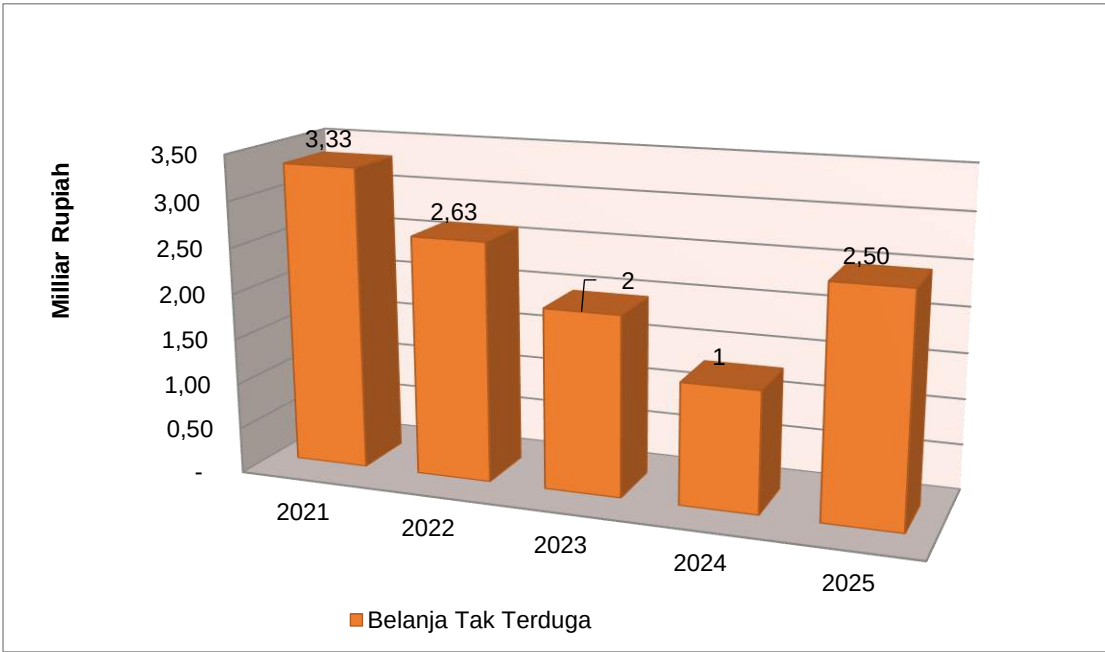
Belanja Modal Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp40.000.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp40.000.000,00 atau 100,00 persen.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Belanja Tak Terduga	2.499.579.085,00	1.330.046.402,00	1.169.532.683,00	87,93
Jumlah	2.499.579.085,00	1.330.046.402,00	1.169.532.683,00	87,93

Belanja Tak Terduga tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.499.579.085,00 atau 86,19 persen

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa, dan untuk keperluan yang mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp2.900.000.000,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp2.499.579.085,00 atau 86,19 persen. Tren perkembangan realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Majene selama kurun 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 13 Tren Perkembangan Belanja Tak terduga Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Belanja Tak Terduga pada Tahun 2025 digunakan pada beberapa jenis pengeluaran mulai dari Pembentukan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Perbaikan Jalan Poros Limboro Paminggalang, Pembangunan Talud sungai Dusun Camba-Camba, Pembangunan Bronjong dan Normalisasi sungai, pembangunan talud, gerakan Pangan murah, darurat bencana hidrometeorologi basah dan cuaca ekstrem dan beberapa kegiatan lainnya. Rincian Belanja Tak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 36 Belanja Tak Terduga

No.	Uraian	Dasar Penetapan	Nilai (Rp)	Kepemilikan Aset
A	Belanja Tak Terduga untuk Penanggulangan Bencana			
1.	Perbaikan Jalan Poros Limboro Paminggalan	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/147/III/ Tahun 2025	150.000.000,00	Milik Pemda
2.	Bantuan Alat Berat Pembersihan Longsor Jalan Poros Puttada	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/292/IV/ Tahun 2025	150.000.000,00	Milik Pemda
3.	Pembangunan Talud Sungai Dusun Camba-Camba	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/293/IV/ Tahun 2025	270.000.000,00	Milik Pemda
4.	Penanganan Bahu Jalan yang Berpotensi Amblas	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/294/IV/ Tahun 2025	41.575.000,00	Milik Pemda
5.	Pembangunan Bronjong dan Normalisasi Sungai	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/313/V/ Tahun 2025	296.364.000,00	Milik Pemda
6.	Pembangunan Talud Salabose	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/334/V/ Tahun 2025	150.000.000,00	Milik Pemda
7.	Bantuan Rehabilitasi Jembatan Kelurahan Galung	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/358/V/ Tahun 2025	200.000.000,00	Milik Pemda
8.	Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah dan Cuaca Ekstrem	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/920/XII/ Tahun 2025	50.000.000,00	Milik Pemda
9.	Perbaikan Tanggul Lingkungan Parappe Kel. Sirindu	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/752/X/ Tahun 2025	200.000.000,00	Milik Pemda
10.	Perbaikan Tanggul Pada Dusun Karondongan	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/753/X/ Tahun 2025	250.000.000,00	Milik Pemda
11.	Bantuan Kegiatan dan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Kesehatan	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/404/VI/ Tahun 2025	530.000.000,00	Milik Pemda
B	Belanja Tak Terduga untuk Kebutuhan Mendesak			
1.	Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/403/VI/Tahun 2025	130.906.000,00	

No.	Uraian	Dasar Penetapan	Nilai (Rp)	Kepemilikan Aset
2.	Gerakan Pangan Murah	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/573/VII/ Tahun 2025	30.000.000,00	
3.	Biaya Operasional Pengamanan Aksi Demonstrasi	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/803/X/ Tahun 2025	50.000.000,00	
4.	Pembayaran Kekeliruan Setoran Pajak	SK Bupati Nomor 100.3.3.2/492/IV/ Tahun 2025	734.085,00	
Jumlah			2.499.579.085,00	

Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga untuk keperluan mendesak TA 2025 yang dianggarkan sebagai Belanja Tak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atas kementerian Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang merupakan wujud Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam Pembangunan dari Desa untuk Upaya Pemerataan Ekonomi maka diperlukan dukungan untuk menunjang Program Nasional tersebut menyediakan Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan percepatan pembentukan koperasi desa/Kelurahan merah putih dan digunakan untuk pemberian

Program pangan Murah termasuk bagian dari Belanja Tak Terduga karena adanya Perkembangan data harga Pangan strategis yang menunjukkan adanya kenaikan harga yang signifikan pada Komoditas beras,baik beras medium maupun beras premium dan bahan pangan lainnya keadaan ini berpotensi menjadi salah satu penyebab kenaikan inflasi dan ini merupakan kegiatan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang bertujuan memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan distribusi pangan merata dan menekan tingkat inflasi di Kabupaten Majene.

Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga untuk keperluan mendesak TA 2025 untuk membiayai Operasional Pengamanan Aksi Demonstrasi di Kabupaten Majene Tahun 2025, Hal ini membutuhkan pengamanan ekstra agar situasi Kabupaten Majene tetap Kondusif, jika tidak disiapkan sesegera mungkin berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Keamanan merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dipenuhi pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat.

Pembayaran Kekeliruan Setoran Pajak termasuk dari belanja Tak terduga untuk keperluan mendesak karena kewajiban atas kekeliruan setoran pajak merupakan hak pihak penyctor yang harus dipenuhi segera sesuai dengan ketentuan dan bersifat insidental yang sifatnya tidak dapat diprediksi saat penyusunan APBD, tidak direncanakan, mendesak dan harus diselesaikan untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada Pihak terkait.

5.1.2.4. Transfer

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Transfer	102.737.016.814,00	103.764.358.365,00	(1.027.341.551,00)	(0,99)
Jumlah	102.737.016.814,00	103.764.358.365,00	(1.027.341.551,00)	(0,99)

Transfer Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp102.737.016.814,00 atau 93,82 persen

Belanja Transfer adalah pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendanai desentralisasi, termasuk DBH, DAU dan DAK yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Transfer pada Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan senilai Rp109.508.794.961,00 dan sampai dengan per 31 Desember 2025 telah direalisasikan senilai Rp102.737.016.814,00 atau 93,81 persen yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 37 Belanja Transfer

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Transfer Bagi Hasil	2.696.704.257,00	853.100.342,00	31,63	0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	2.048.029.357,00	679.215.030,00	33,16	0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	648.674.900,00	173.885.312,00	26,80	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	106.812.090.704,00	101.883.916.472,00	95,39	103.764.358.365,00
Belanja bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (Dana Desa)	106.712.090.704,00	101.783.916.472,00	95,38	103.764.358.365,00
Jumlah	109.508.794.961,00	102.737.016.814,00	93,81	103.764.358.365,00

Rincian realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Majene yang bersumber dari Dana Transfer Umum kepada Pemerintah Desa dan Dana Desa kepada seluruh desa lingkup Kabupaten Majene dapat dilihat lebih jelas pada **lampiran 1** dan **lampiran 2** dari catatan atas laporan keuangan ini.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan senilai Rp2.048.029.357,00 namun realisasi pada tahun 2025 senilai Rp679.215.030,00 atau 33,16 persen. Sedangkan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa Rp648.674.900,00 namun realisasi pada tahun 2025 senilai Rp173.885.312,00 atau 26,80 persen. Nilai ini merupakan realisasi belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa bulan Januari sampai bulan Juni Tahun 2025. Sehingga masih tersisa enam bulan belanja bagi hasil yang belum dibayarkan pada Pemerintah Desa di Tahun 2025. Hal ini disebabkan adanya penurunan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah

5.1.3. Pembiayaan

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 sampai dengan per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp4.835.526.092,69 atau 100,00 persen.

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai Rp3.535.606.734,71.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp500.000.000,00 atau 100,00 persen

Pengeluaran Pembiayaan merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang dianggarkan senilai Rp500.000.000,00 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp500.000.000,00 atau 100,00 persen.

5.1.3.3. **Pembiayaan Neto**

Pembiayaan Neto adalah selisih antara Realisasi Penerimaan Pembiayaan senilai Rp4.335.526.092,69 dan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp500.000.000,00. Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.371.132.827,40 sedangkan Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 senilai Rp4.335.526.092,69. Rincian dan perhitungan Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 38 Perhitungan Pembiayaan Neto

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Realisasi (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	100,00	8.371.132.827,40
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	100,00	8.371.132.827,40
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00
Pembiayaan Netto	4.335.496.696,69	4.335.526.092,69	100,00	8.371.132.827,40

5.1.3.4. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan**

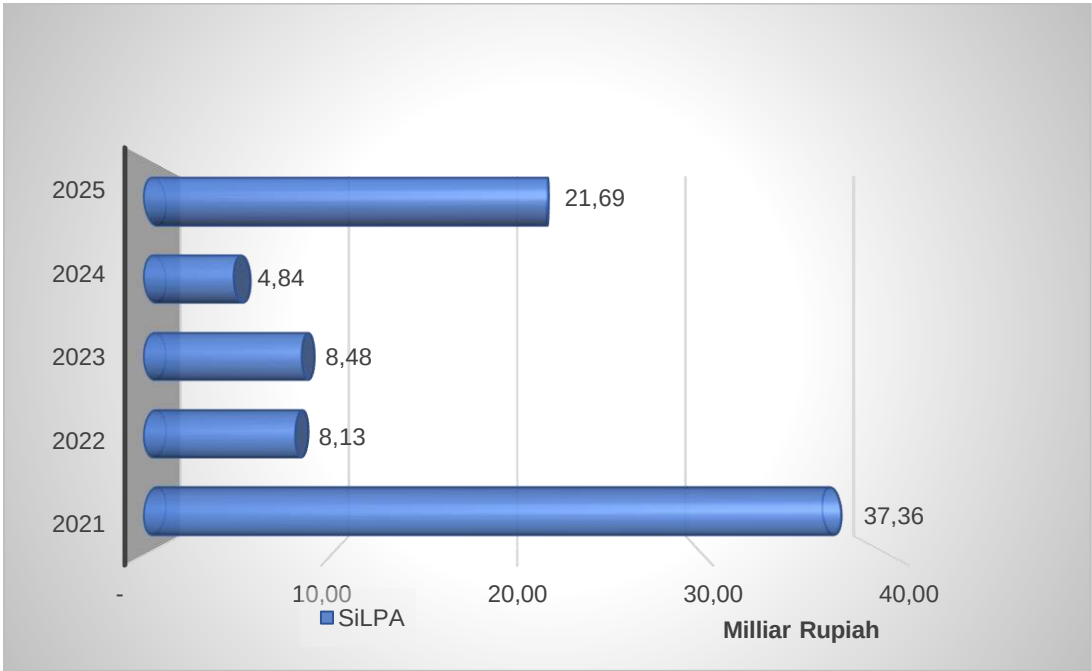
Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69	16.851.422.863,81	348,49
Jumlah	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69	16.851.422.863,81	348,49

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Meskipun keberadaan SiLPA masih bisa digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah, namun secara umum SiLPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi Pembiayaan Neto positif, atau Pembiayaan Neto lebih besar dari defisit APBD. Dengan adanya surplus anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SiLPA, maka defisit APBD di tahun berikutnya bisa tertutupi.

SiLPA pada Tahun 2025 terbentuk dari saldo kas di kas yang terdiri atas saldo kas pada rekening BNI senilai Rp11.709.536,00; saldo rekening BRI senilai Rp997.819,00; sisa kas di kas daerah (KASDA) senilai Rp95.287.219,18 yang terdiri atas senilai Rp31.687.219,18 dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan senilai Rp63.600.000,00 dari kelebihan pembayaran; Kas di RKUD (2779-2) senilai Rp72.887,22; dan Kas Dana Alokasi Umum Tambahan sebesar Rp15.891.308.000,00 untuk TPG dan TKG Gaji 13 dan 14; Saldo Kas di BLUD terdiri atas saldo pada BLUD RSUD senilai Rp3.249.948.356,00 dan saldo BLUD Puskesmas senilai Rp1.026.917.076,10. Selain itu, terdapat saldo kas Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas senilai Rp1.036.132.573,00; saldo kas Dana BOS senilai Rp374.521.000,00 dan Saldo Kas Lainnya senilai Rp25.094,00. serta terdapat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Kas di KASDA	15.999.375.461,40
	1) BNI (No. Rekening 0183493358)	11.709.536,00
	2) BRI (No. Rekening 004701000225305)	997.819,00
	3) Rekening KASDA (No. Rekening 0720010000000011)	95.287.219,18
	4) RKUD (No. Rekening 0720010000027792)	72.887,22
	5) DAU Tambahan TPG dan TKG (No. Rekening 0720010000032249)	15.891.308.000,00
B	Kas di BLUD	4.276.865.432,10
	1) BLUD RSUD	3.249.948.356,00
	2) BLUD Puskesmas	1.026.917.076,10
C	Kas BOK Puskesmas	1.036.132.573,00
D	Kas Dana BOS	374.521.000,00
E	Kas Lainnya	25.094,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		21.686.919.560,50

Berikut tren perkembangan SiLPA Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021 hingga 2025 disajikan dalam grafik.



Grafik 5. 14 Tren Perkembangan SiLPA Kabupaten Majene 2020-2025

SiLPA pada Tahun Anggaran 2025 tercatat senilai Rp21.686.919.560,50 di mana nilai tersebut mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya di Tahun 2024 senilai Rp4.835.496.696,69 atau sebesar 348,49 persen, berdasarkan data yang ditunjukkan pada grafik di atas dapat dilihat bahwa SiLPA pada Tahun 2021 merupakan SiLPA tertinggi yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam lima tahun terakhir yaitu Rp37.362.520.716,94. Tingginya SiLPA pada periode tersebut disebabkan karena terdapat penerimaan kas yang merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana yang diterima menjelang akhir periode pelaporan di tahun tersebut. Kondisi ini menyebabkan pendapatan tersebut tidak dapat langsung digunakan di tahun berjalan sehingga menjadi SiLPA di akhir tahun. Tahun 2022 SiLPA tercatat senilai Rp8.126.059.660,36 atau mengalami penurunan drastis 78,25 persen atau senilai Rp29.236.461.056,58. Selanjutnya pada Tahun 2023 mencatat SiLPA senilai Rp8.475.746.848,64 atau mengalami kenaikan 4,30 persen atau senilai Rp349.687.188,28. Pada Tahun 2024 SiLPA

tercatat senilai Rp4.835.496.696,69 kembali terjadi penurunan SiLPA senilai Rp3.640.250.151,95 atau sekitar 42,95 persen. Tahun 2025 mencatat SiLPA tertinggi kedua pada kurun waktu lima tahun dan mengalami kenaikan senilai Rp16.851.422.863,81 atau 348,49 persen. SiLPA Tahun Berkenaan senilai Rp21.686.919.560,50 adalah hasil dari penjumlahan antara Surplus/Defisit Pendapatan dan Belanja Daerah senilai Rp17.351.393.467,81 dengan Pembiayaan Neto senilai Rp4.335.526.092,69. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 40 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Uraian	Anggaran (Rp)	Tahun 2025 Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
Pendapatan	906.226.956.217,00	881.015.994.509,59	97,21	900.775.879.182,07
Belanja dan Transfer	910.562.452.913,69	863.664.601.041,78	94,84	904.311.515.312,78
Surplus/(Defisit)	(4.335.496.696,69)	17.351.393.467,81	(400,21)	(3.535.636.130,71)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	4.835.496.696,69	4.835.526.092,69	100,00	8.371.132.827,40
Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0.00
Pembiayaan Neto	4.335.496.696,69	4.335.526.092,69	100,00	8.371.132.827,40
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	21.686.919.560,50	0.00	4.835.496.696,69

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasi

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Entitas yang menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih awalnya hanya ditujukan pada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Sejalan dengan pemberlakuan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Laporan Perubahan SAL yang sebelumnya hanya dibuat oleh PPKD sebagai konsolidator LKPD, saat ini juga harus dibuat oleh entitas Badan Layanan Umum Daerah. Berikut kami uraikan pos-pos akun yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025.

SAL identik dengan aset kas yang berasal dari perhitungan realisasi pendapatan-LRA, belanja serta pembiayaan yang menghasilkan SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran. SAL bukan dihasilkan dari LAK, karena di dalam LAK juga mencantumkan transaksi transitoris, di mana transaksi transitoris bukan merupakan transaksi realisasi anggaran. SAL merupakan bagian dari ekuitas, karena di dalam suatu ekuitas juga terdapat aset kas.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2025 direalisasikan senilai Rp21.686.919.560,50. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp16.851.422.863,81 atau 348,49

persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2024 dimana Saldo Anggaran Lebih Akhir tercatat senilai Rp4.835.496.696,69. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2025 dapat dilihat dengan rincian mutasi sebagaimana dalam laporan berikut ini.

Tabel 5. 41 Laporan Perubahan Saldo Anggaran

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.835.526.092,69	8.371.132.827,40
3.	Sub Total	(29.396,00)	104.614.021,24
4.	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69
5.	Sub Total	21.686.890.164,50	4.940.110.717,93
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	29.396,00	(104.614.021,24)
7.	Lain-Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		21.686.919.560,50	4.835.496.696,69

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal senilai Rp4.835.496.696,69 merupakan SiLPA tahun 2024 berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Majene TA 2024. Saldo SiLPA tersebut digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada periode APBD Perubahan TA 2025. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir adalah saldo akhir yang dimiliki pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai SiLPA pada periode anggaran berikutnya. Tercatat Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 senilai Rp21.686.919.560,50.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Saldo Anggaran Lebih Awal	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64	(3.640.250.151,95)	(42,95)
Jumlah	4.835.496.696,69	8.475.746.848,64	(3.640.250.151,95)	(42,95)

SAL Awal Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp4.835.496.696,69 atau turun sebesar 42,95 persen dari SAL Awal tahun 2024 sebesar Rp8.475.746.848,64

Saldo Anggaran Lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp4.835.496.696,69 atau turun 42,95 persen dari SAL Awal Tahun 2024 senilai Rp8.475.746.848,64. SAL awal Tahun 2025 merupakan SAL Akhir Tahun 2024 atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Uraian	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	4.835.526.092,69	8.371.132.827,40	(3.535.606.734,71)	(42,24)
Jumlah	4.835.526.092,69	8.371.132.827,40	(3.535.606.734,71)	(42,24)

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun berjalan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp4.835.526.092,69 atau turun sekitar 42,24 persen dari penggunaan SAL Awal Tahun 2024 senilai Rp8.371.132.827,40.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
SiLPA/SIKPA	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69	16.851.422.863,81	348,49
Jumlah	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69	16.851.422.863,81	348,49

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan tabel di atas per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Majene mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp21.686.919.560,50. Saldo SiLPA tersebut mengalami kenaikan senilai Rp16.851.422.863,81 atau 348,49 persen dari Tahun 2024 senilai Rp4.835.496.696,69.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	29.396,00	(104.614.021,24)	104.643.417,24	100,03
Jumlah	29.396,00	(104.614.021,24)	104.643.417,24	100,03

Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 terdapat koreksi sebesar Rp29.396,00 atau naik sekitar 100,03 persen dari tahun sebelumnya yang menyebabkan perubahan pada Laporan LP-SAL

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan pos yang menjelaskan koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang memengaruhi posisi kas. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmetika, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 mencatat koreksi SiLPA atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang menyebabkan perubahan pada akun kas. Transaksi ini terjadi pada Puskesmas Totoli. Berdasarkan PSAP 10 dinyatakan bahwa koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Untuk lebih jelasnya koreksi yang dilakukan atas kesalahan pembukuan di tahun sebelumnya yang memengaruhi Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 42 Rincian Koreksi Saldo Kas atas Kesalahan Pembukuan di Tahun Sebelumnya

No.	Nama SKPD/Unit Kerja	Nilai Koreksi (Rp)	Keterangan
1.	Puskesmas Totoli	29.396,00	Koreksi kas atas utang pfk pada puskesmas totoli
JUMLAH		29.396,00	

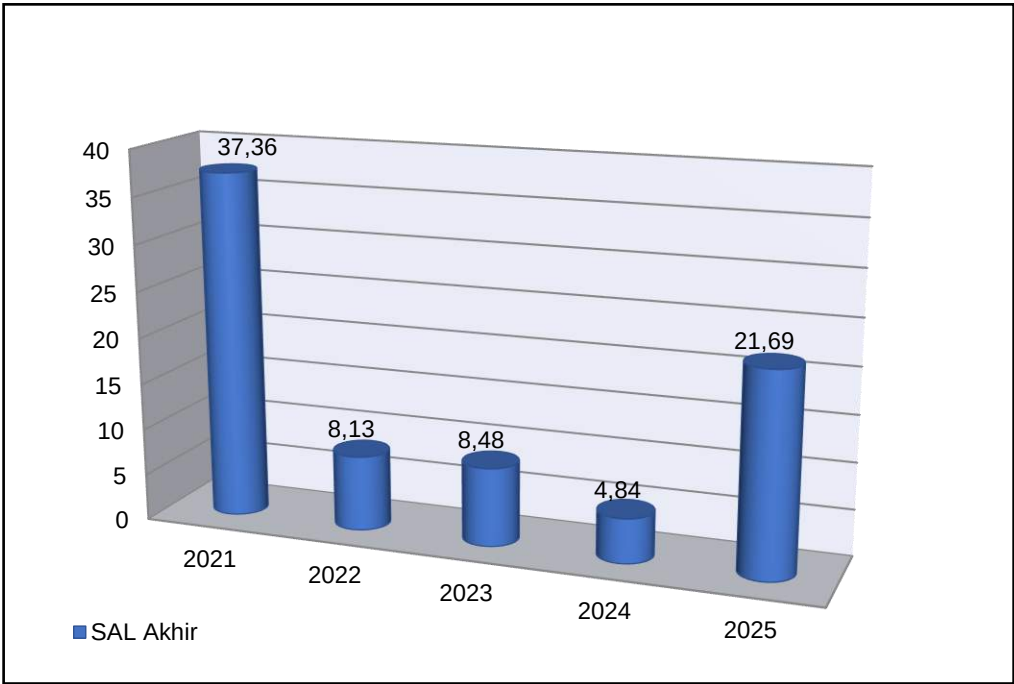
5.2.5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69	16.851.422.863,81	348,49
Jumlah	21.686.919.560,50	4.835.496.696,69	16.851.422.863,81	348,49

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir adalah saldo akhir kas yang dimiliki pemerintah daerah pada saat tutup buku di akhir periode pelaporan. Tercatat sampai dengan 31 Desember 2025 Saldo Anggaran

Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp21.686.919.560,50. Saldo tersebut tercatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang akan dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2026.

Pada grafik di bawah ini disajikan tren Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Majene kurun 2021-2025 (dalam miliar rupiah).



Grafik 5. 15 Tren Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

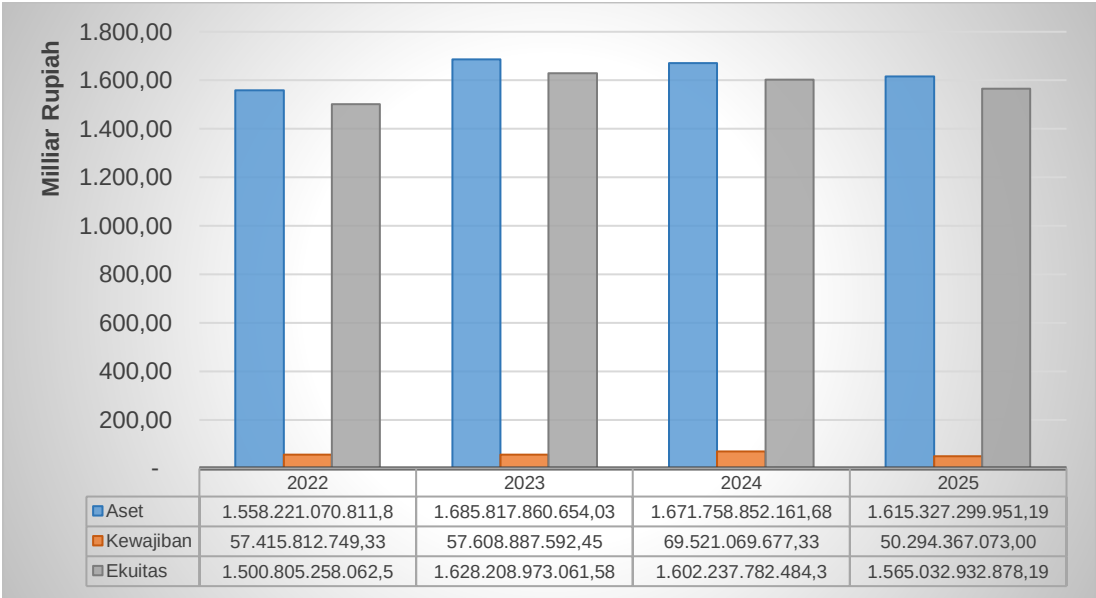
Neraca merupakan salah satu komponen dari laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah sebagai entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 43 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2025 dan 2024

Posisi Neraca	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset Lancar	51.150.313.248,78	44.471.142.447,85
Investasi Jangka Panjang	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67
Aset Tetap	1.475.883.616.947,45	1.547.906.920.646,29
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	10.021.848.510,86	10.595.796.785,87
Properti Investasi	10.815.873.221,00	0,00
Jumlah Aset	1.615.327.299.951,19	1.671.758.852.161,68
Kewajiban Jangka Pendek	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33
Kewajiban Jangka Panjang	00,00	00,00

Posisi Neraca	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Kewajiban	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33
Ekuitas	1.565.032.932.878,19	1.602.237.782.484,35
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.615.327.299.951,19	1.671.758.852.161,68

Perkembangan nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene selama empat tahun terakhir disajikan pada grafik di bawah ini.

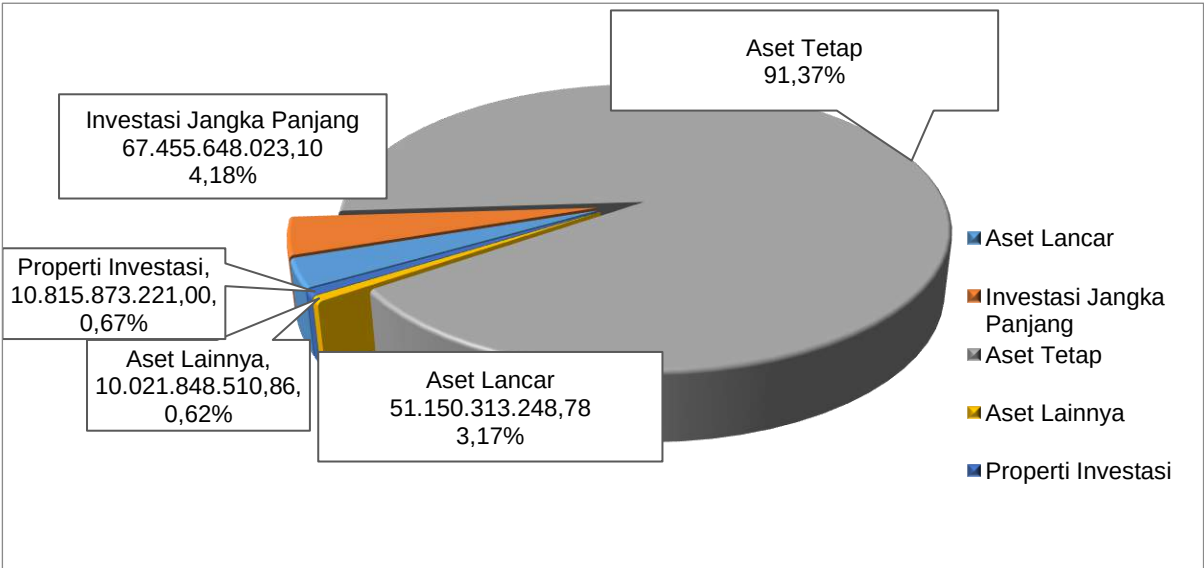


Grafik 5. 16 Perkembangan Nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Tahun 2021-2025

5.3.1. ASET

Aset pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan dapat diukur dalam satuan uang. Aset juga dapat diartikan sebagai sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Berikut komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025



Grafik 5. 17 Komposisi Aset Kabupaten Majene Tahun 2025

5.3.1.1. Aset Lancar

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Lancar	51.150.313.248,78	44.471.142.447,85	6.679.170.800,93	15,02
Jumlah	51.150.313.248,78	44.471.142.447,85	6.679.170.800,93	15,02

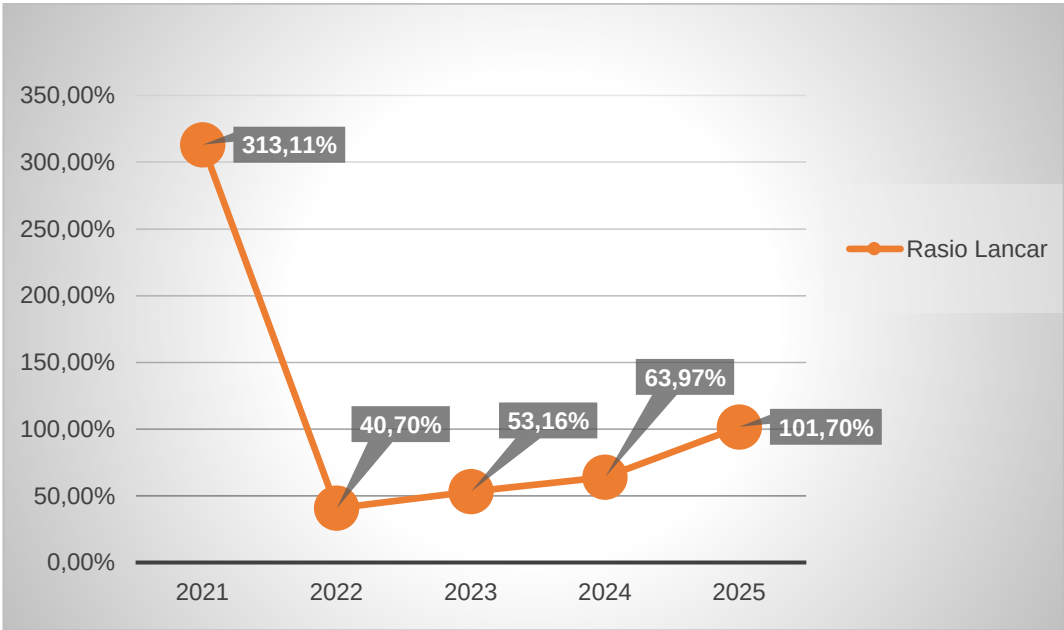
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
- b. Berupa kas dan setara kas;
- c. Semua aset selain yang termasuk dalam a dan b, diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer bagi hasil daerah, piutang pendapatan lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor dan barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Aset lancar merupakan indikator likuiditas Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang menyebabkan beban atas pengeluaran APBD. Berikut ini kami uraikan analisis rasio likuiditas Pemerintah Daerah dengan pendekatan rasio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio kas (*cash ratio*).

a. Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau untuk melihat kemampuan pemerintah untuk mendanai kebutuhan. Walaupun Pemerintah Daerah sudah menyusun anggaran kas. Tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas. Analisis likuiditas dapat dilihat dari rasio lancar. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi. Rasio lancar menggambarkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk melunasi utangnya. Rasio ini membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar. Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir berdasarkan perkembangan aset lancar dan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar, rasio tersebut dapat dilihat grafik berikut.

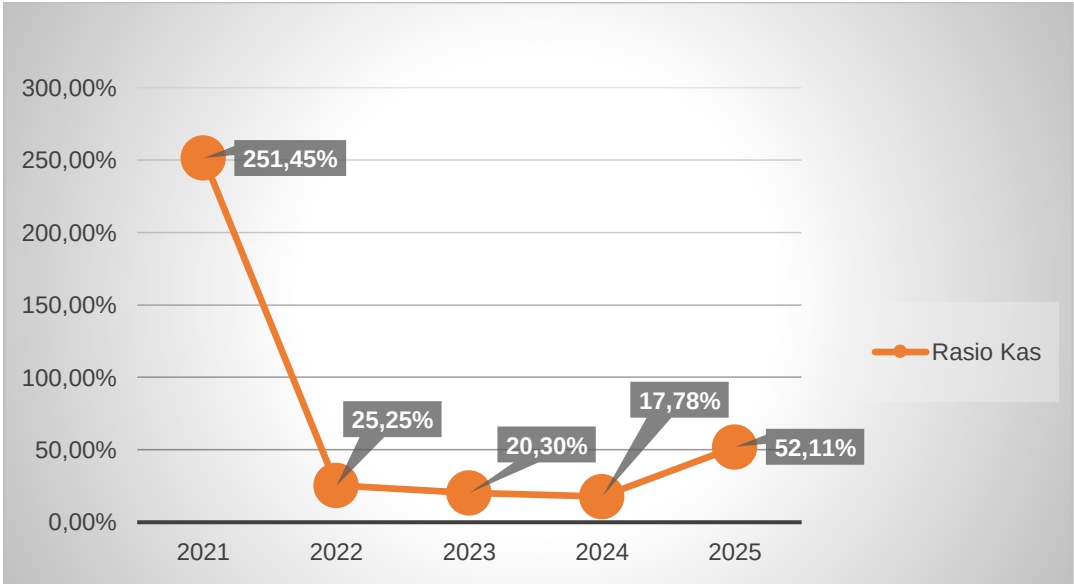


Grafik 5. 18 Perkembangan Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 berada pada 101,70 persen. Rasio ini mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 di mana hanya 63,97 persen.

b. Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) merupakan penjelasan lebih lanjut dari Rasio Lancar (*Current Ratio*). Penghitungan Rasio Cepat hanya menggunakan aset yang paling likuid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Persediaan tidak termasuk dalam kelompok aset lancar yang diperbandingkan dengan kewajiban lancar dikarenakan tidak dapat ditukar dengan kas. Rasio Cepat menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan perhitungan yang lebih ketat. Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 Tahun terakhir berdasarkan perbandingan antara perkembangan aset lancar dikurang persediaan dan perkembangan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar dapat dilihat grafik berikut.



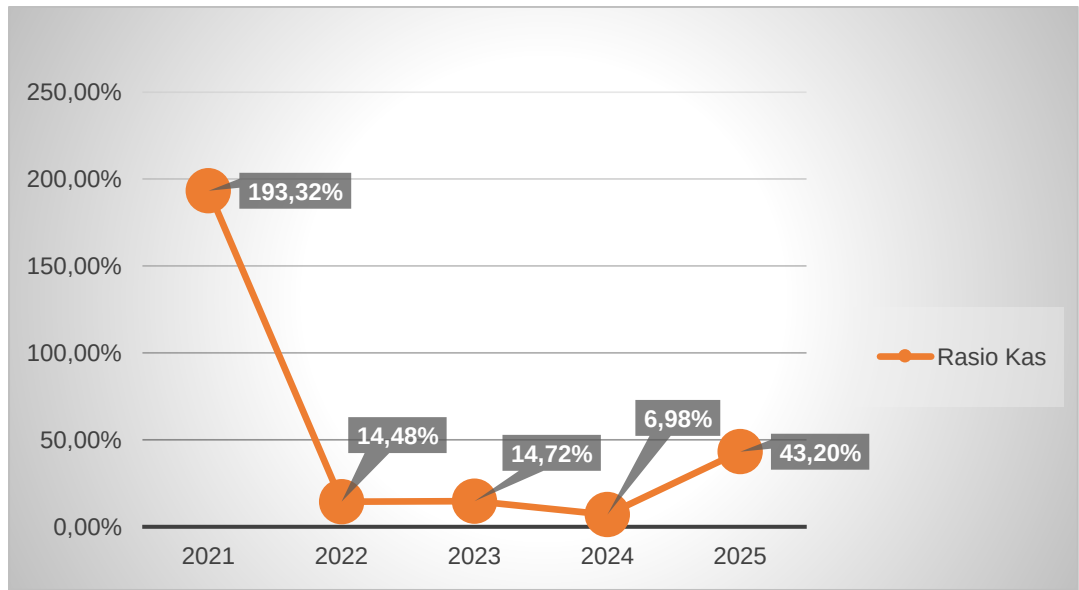
Grafik 5. 19 Perkembangan Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Berdasarkan grafik tersebut di atas terlihat bahwa Rasio Cepat (*Quick Ratio*) pada Tahun Anggaran 2025 berada pada 52,11 persen. Sebagaimana pada analisis Rasio Lancar, analisis Rasio Cepat juga menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Majene untuk dapat menyelesaikan kewajiban dengan aset lancar yang dimiliki dan dapat secara cepat dikonversi menjadi kas tergolong sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan analisis Rasio Cepat, maka perhitungan kemampuan penyelesaian kewajiban oleh Pemerintah Kabupaten Majene cenderung meningkat daripada Tahun 2022 sampai 2025.

Berdasarkan data pada grafik juga dapat disimpulkan bahwa Rasio Cepat (*Quick Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2021. Sebelumnya pada pendekatan Rasio Lancar (*Current Ratio*) juga menunjukkan rasio likuiditas tertinggi terjadi pada Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perhitungan Rasio Likuiditas melalui pendekatan rasio cepat yang lebih ketat. Likuiditas tertinggi tetap tercatat di Tahun 2021.

c. Analisis Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas (*Cash Ratio*) adalah cara menghitung likuiditas Pemerintah Daerah yang melibatkan posisi saldo kas Pemerintah Daerah. Penghitungan Rasio Kas hanya menggunakan kas sebagai acuan untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Piutang pendapatan dan persediaan tidak termasuk dalam kelompok aset lancar yang diperbandingkan dengan kewajiban lancar dikarenakan sulit ditukar dengan kas. Rasio Kas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan perhitungan yang paling realistis dan efisien. Rasio Kas (*Cash Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 tahun terakhir berdasarkan perbandingan antara perkembangan aset lancar berupa kas dan setara kas dan perkembangan kewajiban jangka pendek sebagai utang lancar dapat dilihat grafik berikut.



Grafik 5. 20 Perkembangan Rasio Kas (*Cash Ratio*) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan rincian yang diuraikan berikut ini.

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas dan Setara Kas	21.727.604.509,50	4.849.337.935,69	16.878.266.573,81	348,05
Jumlah	21.727.604.509,50	4.849.337.935,69	16.878.266.573,81	348,05

Kas dan setara kas adalah uang tunai di tangan Bendahara Penerimaan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Tidak termasuk Kas adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pajak pemerintah pusat seperti PPN dan PPh Pasal 21, 22, 23, dan Pasal 4 ayat (2), iuran Tapera, dan iuran wajib pegawai lainnya yang harus disetorkan ke kas negara atau pihak lainnya yang berhak (diklasifikasikan dalam Kewajiban Jangka Pendek).

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab BUD/Kuasa BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, kas di BLUD, dan kas lainnya. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD/Kuasa BUD terdiri dari:

- a. Saldo akun kas daerah, yaitu saldo akun-akun pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

5.3.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di Kas Daerah	15.999.375.461,40	51.385.522,63	15.947.989.938,77	31.035,96
Jumlah	15.999.375.461,40	51.385.522,63	15.947.989.938,77	31.035,96

Saldo Kas di Kas Daerah (Kasda) adalah saldo kas yang terdapat pada Rekening Umum Kas Daerah sesuai dengan Buku Kas Umum Kasda dan rekening koran per 31 Desember 2025 senilai Rp15.935.775.461,40 Terdapat selisih senilai Rp63.600.000,00. Hal ini disebabkan adanya SP2D yang *double* cair dan lebih bayar oleh pihak bank Sulselbar pada tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 44 Selisih Kas di Kas Daerah

No.	SKPD	Uraian	Nilai	Keterangan
1.	Kecamatan Banggae	LS- Belanja Jasa Tenaga Babinsa dan Babinkantibnas, bulan Oktober - November Tahun 2025, Dengan SK NO. 100.3.3.2/350/V/2025, dan No SPD. 800/8146/LP-SPD/BKAD/2025, Sumber Dana DBH Pusat	400.000,00	Double Cair
2.	Sekretariat Daerah	Belanja LS Biaya Jasa Tenaga Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sesuai BAPP No. 26/BAPP/HK/XII/2025 dan SPD No. 800/7986/LP-SPD/BKAD/2025. Bulan Oktober s.d November 2025. PAD.	1.500.000,00	Double Cair
3.	Inspektorat Daerah	LS Jasa Tenaga Administrasi Sub. Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DBH PROV) Bulan Oktober-November 2025 Sesuai SK No : 100.3.3.2/886/XI/2025 & SPD No : 800/8079/LP-SPD/BKAD/2025 Inspektorat Kabupaten Majene TA 2025	7.700.000,00	Double Cair
4.	Dinas Perkimtan	Pemb Ganti Rugi Pengadaan Tanah Sekolah MAN IC Kalasa' Kab Majene Pemby Tahap I Terletak di Lingk Kalasa' Luas Tanah Kurang Lebih 16.410 M2 Sesuai SPD No:800/7889/LP-SPD/BKAD/2025 Tgl 22/12/2025 & BAKH No:B-900.1.3.6/1083/XII/2025 Tgl 22/12/2025 (DAU UMUM) senilai 539.076.782,00 Namun yang cair senilai Rp593.076.782,00	54.000.000,00	Lebih bayar
Jumlah			63.600.000,00	

Atas selisih kas berdasarkan tabel di atas bahwa pada Kecamatan Banggae terjadi *double* cair senilai Rp400.000,00 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 12 Februari 2026, pada Sekretariat Daerah terjadi *double* cair senilai Rp1.500.000,00 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 06 Januari 2026; pada Inspektorat Daerah terjadi *double* cair senilai Rp7.700.000,00 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 12 Februari 2026 dan pada Dinas Perkimtan terjadi lebih cair senilai Rp54.000.000,00. Atas selisih kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 02 Januari 2026.

Saldo Tahun 2025 senilai Rp15.999.375.461,40 mengalami kenaikan dibandingkan saldo Kas di Kasda tahun sebelumnya senilai Rp51.385.522,63. Rincian saldo kas di Kasda pada rekening giro Kasda adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 45 Saldo Kas di Kas Daerah di Rekening Giro Kasda

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Pemilik	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
1.	Bank Sulselbar Cab. Majene	072-001-0001-1	Rek. Kas Umum Daerah – PAD/lain-lain pendapatan	31.687.219,18
2.	Bank Sulselbar Cab. Majene	072-001-2779-2	Rek. Kas Umum Daerah – DAU/DBH	72.887,22
3.	Bank Sulselbar Cab. Majene	072-001-3224-9	Rek. Kas Umum Daerah – DAK	15.891.308.000,00
4.	BRI Cabang Majene	0047-01-0225-30-5	Bupati Majene	997.819,00
5.	BNi Cabang Majene	18349335-8	Pemda Kabupaten Majene	11.709.536,00
Jumlah				15.935.775.461,40

Atas penggunaan rekening tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Bank Sulselbar Cabang Majene 072-001-0001-1 digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Untuk transaksi yang sifatnya penerimaan daerah, rekening ini digunakan untuk menerima dan menyimpan sumber-sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah, dana bagi hasil provinsi, pemindahbukuan realisasi PBB dari rekening BRI, jasa giro dan deposito, adapun untuk transaksi yang sifatnya pengeluaran daerah rekening tersebut diperuntukkan untuk melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa, serta pengeluaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD baik melalui mekanisme uang persediaan, ganti uang persediaan, tambahan uang persediaan maupun pembayaran langsung;
- 2) Bank Sulselbar Cabang Majene 072-001-2779-2 digunakan untuk menyelenggarakan transaksi atas penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan yang meliputi transfer atas Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus. Adapun transaksi pengeluaran pada rekening ini digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran untuk pembiayaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikerjasamakan ke pihak ketiga, serta penyaluran belanja transfer Alokasi Dana Desa kepada Desa, pembayaran hibah kepada partai politik, dan Pembayaran gaji ASN;
- 3) Bank Sulselbar Cabang Majene 072-001-3224-9 digunakan untuk menyimpan dan menyalurkan pembayaran atas pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dari Pemerintah Pusat khusus pada kelompok Dana Alokasi Khusus. Rekening ini digunakan dengan tujuan untuk memisahkan dana transfer yang sifat dan peruntukannya secara khusus telah diatur. Hal ini bertujuan untuk kepentingan kemudahan rekonsiliasi dan laporan penyerapan yang secara berkala harus dilaporkan ke Pemerintah Pusat;
- 4) BRI Cabang Majene 0047-01-0225-30-5 digunakan untuk menampung penerimaan jasa giro serta pendapatan atas deposito Pemerintah Daerah di BRI. Rekening ini tidak melakukan transaksi penerimaan dari sumber pendapatan daerah. Aktivitas yang dilakukan kebanyakan hanya berupa pemindahbukuan pasca pendapatan atas deposito maupun jasa giro tersebut; dan

5) BNI Cabang Majene 18349335-8 digunakan untuk menampung dana yang akan didepositokan, sehingga Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan bunga dari deposito tersebut untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 tercatat nihil.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan SKPD yang bersumber dari pungutan maupun setoran atas pendapatan daerah yang per 31 Desember 2025 belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Kas Daerah senilai Rp0,00. Nilai ini sama dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00. Terdapat saldo pada rekening bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025, yang merupakan transaksi Tahun 2025 yang ditarik pada tanggal 2 Januari 2026. Berikut daftar saldo pada rekening bank bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 46 Daftar Saldo Rekening

No	Uraian	No. Rekening	Saldo Bank
1.	Dinas Kesehatan	0720020000000042	113.000.000,00
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0720020000121737	50.000.000,00
3.	Kelurahan Baruga	0720020000077665	1.250,00
JUMLAH			163.001.250,00

5.3.1.1.1.4. Kas di BLUD

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas di BLUD	4.276.865.432,10	4.769.301.860,10	(492.436.428,00)	(10,33)
Jumlah	4.276.865.432,10	4.769.301.860,10	(492.436.428,00)	(10,33)

Saldo Kas di Bendahara BLUD merupakan saldo kas di Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Diketahui bahwa terdapat saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 senilai Rp4.276.865.432,10. Jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya senilai Rp4.769.301.860,10, terjadi penurunan senilai Rp492.436.428,00 atau 10,33 persen. Laporan Keuangan BLUD RSUD dan 12 BLUD Puskesmas di Kabupaten Majene telah melalui proses audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik, laporan tersebut terbit pada bulan April 2026. Rincian saldo Kas di Bendahara BLUD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 47 Kas di Bendahara BLUD

No	Uraian	Nama Bank	No. Rekening	Saldo Tunai	Saldo Bank	Total
1.	RSUD	BANK SULSELBAR	720020000169390	736.630,00	3.249.211.726,00	3.249.948.356,00
2.	Puskesmas Banggae I	BNI	339834578	0,00	83.099.316,00	83.099.316,00
3.	Puskesmas Banggae II	BNI	339840037	0,00	20.699.357,00	20.699.357,00
4.	Puskesmas Totoli	BNI	339867945	0,00	66.393.097,00	66.393.097,00
5.	Puskesmas Lembang	BNI	339989544	0,00	144.916.309,00	144.916.309,00
6.	Puskesmas Pamboang	BNI	287544704	0,00	153.383.452,00	153.383.452,00
7.	Puskesmas Sendana I	BRI	4701001077307	0,00	343.590.317,00	343.590.317,00
8.	Puskesmas Tammerodo	BRI	4701001078303	0,00	66.869.597,20	66.869.597,20
9.	Puskesmas Sendana II	BRI	4701001080300	0,00	140.771.805,00	140.771.805,00
10.	Puskesmas Salutambung	BRI	4701001081306	0,00	2.032.239,00	2.032.239,00
11.	Puskesmas Ulumanda	BRI	4701001076301	0,00	68.416,90	68.416,90
12.	Puskesmas Malunda	BRI	4701001079309	0,00	5.093.170,00	5.093.170,00
JUMLAH					4.276.128.802,10	4.276.865.432,10

PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa Kas dan Setara Kas pada Neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Dalam rangka perhitungan saldo Kas dengan catatan SAL pada BLU. BLU harus dapat mengidentifikasi kas pada BLU yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD

5.3.1.1.1.5. Kas Dana BOSP

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas Dana BOSP	374.521.000,00	0,00	374.521.000,00	0,00
Jumlah	374.521.000,00	0,00	374.521.000,00	0,00

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 senilai Rp374.521.000,00 pada Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan lingkup Kabupaten Majene. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 bersaldo nihil, terjadi kenaikan senilai Rp374.521.000,00. Saldo ini adalah sisa belanja yang belum dipertanggungjawabkan dan pajak yang belum disetorkan per 31 Desember 2025. Berikut rincian saldo kas di bendahara BOS :

- Sisa Dana BOSP Kinerja senilai Rp13.190.000,00
- Sisa Dana BOP Kinerja senilai Rp75.000.000,00
- Sisa Dana BOP Reguler senilai Rp286.331.000,00

5.3.1.1.1.6. Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas Lainnya	40.710.043,00	28.650.552,96	12.059.490,04	42,09
Jumlah	40.710.043,00	28.650.552,96	12.059.490,04	42,09

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp40.710.043,00, nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2024 yaitu senilai Rp28.650.552,96 atau 42,09 persen. Saldo kas lainnya tahun ini merupakan saldo pada rekening tabungan PPTK dan rekening sekolah yang belum

tersetor ke kasda per 31 Desember 2025 dan Pajak yang telah dipungut oleh bendahara namun belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 48 Daftar Rincian Kas Lainnya atas Pajak Belum Setor

No.	SKPD	Nama Rekening/Nasabah	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Pajak Belum Setor- Bendahara Pengeluaran	26.006.421,00
2.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pajak Belum Setor Dana BOSP	3.163.650,00
3.	Puskesmas Lembang	Pajak Belum Setor - Bendahara BLUD	1.813.245,00
4.	Puskesmas Totoli	Pajak Belum Setor - Bendahara BLUD	1.494.154,00
5.	Puskesmas Sendana I	Pajak Belum Setor - Bendahara BLUD	706.761,00
6.	Puskesmas Malunda	Pajak Belum Setor - Bendahara BLUD	7.361.161,00
Jumlah			40.545.392,00

Selain itu, terdapat Jasa Giro pada rekening PPTK dan rekening sekolah per 31 Desember 2025 yang belum disetor ke Kas Daerah. Berikut daftar rincian Jasa Giro pada rekening PPTK dan rekening sekolah per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 49 Daftar Rincian Jasa Giro pada Rekening PPTK dan Sekolah

No.	SKPD	Nama Pemilik Rekening	No. Rekening	Saldo (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	PPTK Bagian Kesra Setda	072 202 000006439 5	25.094,00
2	Dinas Kesehatan	PPTK BID Pelayanan dan SDK	072-002-000018011-3	2.993,00
3	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	PPTK Diklat BKPSDM Kabupaten Majene	072 002 000018062 8	444,00
4.	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	PPTK Diklat BKPSDM Kabupaten Majene	072 002 000018062 8	30.150,00
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	072-002-000016994-2	452,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PPTK Bidang Bina Marga Dinas PUPR Majene	072-002-000017000-2	5.289,00
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PPTK Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Majene	082-002-000016997-7	13.493,00
8.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	PPTK Kegiatan DAK Nonfisik	072-002-000016991-8	2,00
9.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PPTK Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	072-002-000018003-2	88,00
10.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PPTK Bidang Pemuda Olahraga	072-002-000018000-8	2.578,00
11.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	Yayasan TK AL Mardiah Tg. Batu Barat	072-002-000018012-1	3.527,00
12.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PKBM Ifra Naraya	072-002-000018016-4	22.444,00
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PPTK Bidang Perpustakaan	072-002-000018021-1	56.817,00
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PPTK Bid. PHP PKA dan PUBA	072-002-000016987-0	1.264,00
15.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	PPTK Bidang Penyuluhan	072-002-000018013-0	16,00
Jumlah				164.651,00

5.3.1.1.1.7. Setara Kas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Setara Kas	00,00	00,00	00,00	00,00
Jumlah	00,00	00,00	00,00	00,00

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas. Investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Deposito berjangka Pemerintah Kabupaten Majene selama Tahun 2025 terdiri dari:

- a. Deposito Nomor B062937 senilai Rp5.000.000.000,00, dengan jangka waktu 1 bulan terhitung tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 30 Juli 2025, dan telah dilakukan pencairan pada tanggal 30 Desember 2025;
- b. Deposito Nomor B062939 senilai Rp5.000.000.000,00 dengan jangka 1 bulan terhitung tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 30 Juli 2025, dan telah dilakukan pencairan tanggal 30 Desember 2025; dan
- c. Deposito Nomor B062938 senilai Rp5.000.000.000,00 dengan jangka 1 bulan terhitung tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 30 Juli 2025, dan telah dilakukan pencairan tanggal 30 Desember 2025.

Berdasarkan uraian di atas maka Setara Kas per 31 Desember 2025 adalah nihil.

5.3.1.1.1.8. Kas Dana BOK Puskesmas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas Dana BOK Puskesmas	1.036.132.573,00	00,00	1.036.132.573,00	00,00
Jumlah	1.036.132.573,00	00,00	1.036.132.573,00	00,00

Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dana BOK Puskesmas adalah Dana BOK yang diperuntukkan bagi Puskesmas sebagai pelaksana program kesehatan. Dana BOK Puskesmas merupakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang bersumber dari Transferan Pusat Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dikelola langsung oleh Puskesmas. Berdasarkan hal tersebut, TA 2023 BOK tersaji sebagai bagian dari Kas di BLUD dikarenakan perubahan struktur organisasi dari FKTP menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 1053/HK/KEP/BUP/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2022.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 senilai Rp1.036.132.573,00 pada masing-masing Bendahara BLUD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 50 Daftar Saldo Kas BOK Puskesmas Per 31 Desember 2025

NO	Uraian	NAMA PEMILIK REKENING	REKENING BANK	SALDO PER 31 DES 2025	KREDIT SISTEM JASA GIRO	SALDO BOK
1	Puskesmas Banggae I	76050200001 BOK PKM BANGGAEI	BNI 1590076524	29.111.023,00	64.212,00	29.046.811,00
2	Puskesmas Banggae II	76050200003 BOK PKM BANGGAEII	BNI 1590076477	119.008.506,00	100.111,00	118.908.395,00
3	Puskesmas Totoli	76050200002 BOK PKM TOTOLI	BNI 1590076499	199.659.424,00	262.836,00	199.396.588,00
4	Puskesmas Lembang	76050200004 BOK PKM LEMBANG	BNI 1590076513	34.950.502,00	41.776,00	34.908.726,00
5	Puskesmas Pamboang	76050200005 BOK PKM PAMBOANG	BNI 1590076568	113.964.067,00	240.207,00	113.723.860,00
6	Puskesmas Sendana I	76050200006 BOK PKM SENDANAI	BNI 1590076557	97.718.736,00	218.238,00	97.500.498,00
7	Puskesmas Tammerodo	76050200008 BOK PKM TAMMERODDO	BNI 1590076535	80.978.038,09	137.956,09	80.840.082,00

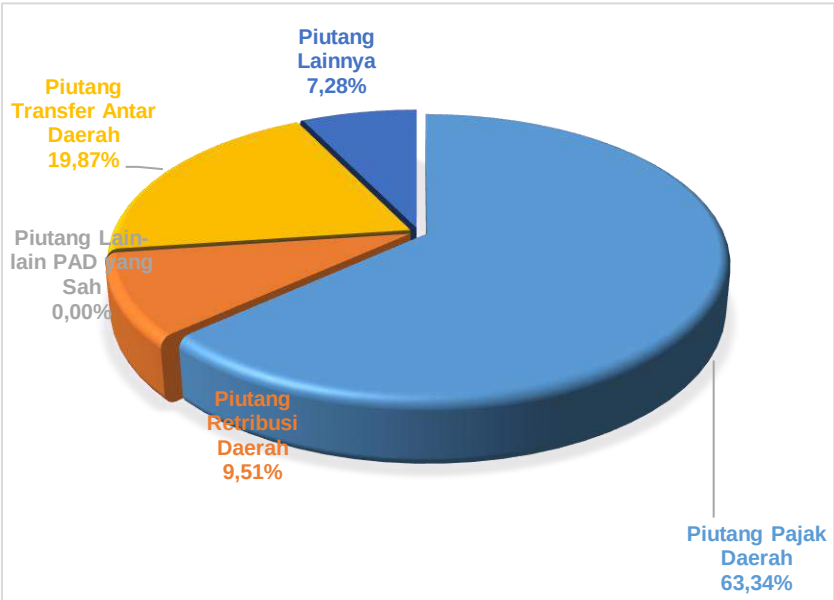
NO	Uraian	NAMA PEMILIK REKENING	REKENING BANK		SALDO PER 31 DES 2025	KREDIT SISTEM JASA GIRO	SALDO BOK
8	Puskesmas Sendana II	76050200007 BOK PKM SENDANAII	BNI	1590076502	76.793.588,00	69.430,00	76.724.158,00
9	Puskesmas Salutabung	76050200011 BOK PKM SALUTAMBUNG	BNI	1590076466	77.469.723,00	103.768,00	77.365.955,00
10	Puskesmas Ulumanda	76050200010 BOK PKM ULUMANDA	BNI	1590076488	81.480.671,00	169.671,00	81.311.000,00
11	Puskesmas Malunda	76050200009 BOK PKM MALUNDA	BNI	1590076546	126.619.658,00	213.158,00	126.406.500,00
JUMLAH					1.037.753.936,09	1.621.363,09	1.036.132.573,00

Berdasarkan Surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), TBK Nomor: INS1/6/3, Tanggal 2 Januari 2026 yang menyatakan bahwa transaksi pada Tanggal 29 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 bukan merupakan transaksi Jasa Giro yang diproses, posisi saldo Giro BOK Puskesmas pada Tanggal 31 Desember 2025 adalah *Ending Balance* (Posisi saldo Giro) per 31 Desember 2025 dikurangi dengan transaksi kredit sistem yang masuk ke rekening Giro BOK Puskesmas pada tanggal 31 Desember 2025.

5.3.1.1.2. PIUTANG

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang	4.374.161.694,40	7.408.588.830,94	(3.034.427.136,54)	(40,96)
Jumlah	4.374.161.694,40	7.408.588.830,94	(3.034.427.136,54)	(40,96)

Piutang daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Timbulnya piutang karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih. Piutang Tahun 2025 senilai Rp4.374.161.694,40 merupakan piutang netto atas piutang pendapatan senilai Rp12.007.134.256,44 dan penyisihan piutang senilai Rp7.632.972.562,04. Piutang tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.034.427.136,54 dari tahun sebelumnya senilai Rp7.408.588.830,94. Komposisi piutang daerah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 21 Komposisi Piutang TA 2025

Secara keseluruhan piutang daerah yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Majene dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 51 Piutang Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

SKPD	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Daerah	7.557.256.778,40	7.071.388.398,40
	Piutang Retribusi Daerah	1.134.548.117,00	1.184.109.860,00
Dinas Kesehatan	- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	176.691.357,00	237.701.100,00
Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	- Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	501.830.060,00	489.897.060,00
	- Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	233.774.200,00	213.639.200,00
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	- Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.352.500,00	38.352.500,00
Sekretariat Daerah	- Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	87.500.000,00	120.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	- Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan	95.800.000,00	82.720.000,00
Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	- Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	600.000,00	1.800.000,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	- Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00
	- Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa- Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	- Piutang Pendapatan BLUD	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	- Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00
	Piutang Transfer Antar Daerah	2.370.353.184,00	5.641.920.831,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	- Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	52.251.589,00	1.204.910.221,00
	- Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	858.799.412,00
	- Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.313.838.150,00	2.102.291.055,00
	- Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.263.445,00	3.562.343,00
	- Piutang Bagi Hasil Bea Pajak Rokok	0,00	1.472.357.800,00
	Piutang Lainnya	944.976.177,04	580.153.629,44
Badan Keuangan dan Aset Daerah	- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	887.976.878,00	523.154.330,40
	- Bagian Lancar Tagihan Penjualan	56.999.299,04	56.999.299,04
Jumlah		12.007.134.256,44	14.477.572.718,84

5.3.1.1.2.1. Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio %
Piutang Pajak Daerah	7.557.256.778,40	7.071.388.398,40	485.868.380,00	6,87
Jumlah	7.557.256.778,40	7.071.388.398,40	485.868.380,00	6,87

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp7.557.256.778,40 sedangkan pada Tahun 2024 senilai Rp7.071.388.398,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 52 Daftar Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PBB P2	6.185.084.921,00	5.747.665.991,00
Pajak BPHTB	186.132.996,50	186.132.996,50
Pajak Hotel	20.620.000,00	20.620.000,00
Pajak tempat Hiburan	2.250.000,00	2.250.000,00
Pajak Restoran	507.833.341,00	458.080.891,00
Pajak Reklame	68.569.200,00	68.569.200,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	586.766.319,90	588.069.319,90
Jumlah	7.557.256.778,40	7.071.388.398,40

5.3.1.1.2.2. Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Piutang Retribusi Daerah	1.134.548.117,00	1.184.109.860,00	(49.561.743,00)	(4,19)
Jumlah	1.134.548.117,00	1.184.109.860,00	(49.561.743,00)	(4,19)

Piutang Retribusi Daerah pada Tahun 2025 senilai Rp1.134.548.117,00 sedangkan pada Tahun 2024 senilai Rp1.184.109.860,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 53 Daftar Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	176.691.357,00	237.701.100,00
Retribusi Pelayanan Pasar	501.830.060,00	489.897.060,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.352.500,00	38.352.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	183.300.000,00	202.720.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	233.774.200,00	213.639.200,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	600.000,00	1.800.000,00
Jumlah	1.134.548.117,00	1.184.109.860,00

5.3.1.1.2.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 nihil. Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 Rp0,00.

5.3.1.1.2.4. Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang Transfer Antar Daerah	2.370.353.184,00	5.641.920.831,00	(3.271.567.647,00)	(57,99)
Jumlah	2.370.353.184,00	5.641.920.831,00	(3.271.567.647,00)	(57,99)

Piutang Transfer Antar Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan bagi hasil dari Provinsi Sulawesi Barat periode Triwulan IV Tahun 2025 yang belum diterima daerah sampai dengan 31 Desember 2025. Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp2.370.353.184,00 dan Rp5.641.920.831,00. Berikut rincian Piutang Transfer Antar Daerah dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 54 Daftar Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
- Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	52.251.589,00	1.204.910.221,00
- Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	858.799.412,00
- Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.313.838.150,00	2.102.291.055,00
- Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.263.445,00	3.562.343,00
- Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	1.472.357.800,00
Jumlah	2.370.353.184,00	5.641.920.831,00

5.3.1.1.2.5. Piutang Lainnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Piutang Lainnya	944.976.177,04	580.153.629,44	364.822.547,60	62,88
Jumlah	944.976.177,04	580.153.629,44	364.822.547,60	62,88

Piutang Lainnya adalah piutang yang berasal dari pungutan kepada pihak lain yang tidak termasuk dalam piutang pendapatan per 31 Desember 2025. Piutang Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 senilai Rp944.976.177,04 dan 31 Desember 2024 senilai Rp580.153.629,44, dengan rincian berikut.

Tabel 5. 55 Daftar Piutang Lainnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Setoran Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.999.299,04	0,00	56.999.299,04
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	887.976.878,00	0,00	523.154.330,40
Tunjangan Komunikasi Insentif dan Biaya Operasional DPRD Tahun 2006 yang Belum Dikembalikan ke Kas Daerah sampai 31 Desember 2019	466.851.500,00	0,00	466.851.500,00
Tunggakan Penjualan Kendaraan Dinas dan Operasional Sesuai SK Bupati Nomor 307 Tahun 2006	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
Denda Keterlambatan atas Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2015	2.845.630,40	0,00	2.845.630,40
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	413.599.747,60	0,00	48.777.200,00
Jumlah	944.976.177,04	0,00	580.153.629,44

Pada tahun 2025 telah diadakan sidang MPTGR atas pihak tertuntut dan telah menandatangani SKTJM sehingga menyebabkan penambahan piutang pada bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp301.315.481,60 . Selain itu terdapat koreksi atas *double* catat pengakuan piutang TGR an. Amran, S, Sos senilai Rp13.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum.

Dari Piutang lainnya senilai Rp944.976.177,04 masih terdapat Piutang Lainnya senilai Rp170.927.672,00 yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dan Jaminan atas:

- a. Kelebihan Tunjangan gaji yang tidak masuk kantor lebih dari 10 hari berturut turut pada Sekretariat Daerah senilai Rp50.418.608,00;

- b. Kelebihan Tunjangan gaji yang tidak masuk kantor lebih dari 10 hari berturut turut pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga senilai Rp66.793.184,00;
- c. Kelebihan Tunjangan gaji yang tidak masuk kantor lebih dari 10 hari berturut turut pada Kecamatan Tubo Sendana senilai Rp53.715.880,00;

5.3.1.1.2.6. Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Penyisihan Piutang	(7.632.972.562,04)	(7.068.983.887,90)	(563.988.674,14)	(7,98)
Jumlah	(7.632.972.562,04)	(7.068.983.887,90)	(563.988.674,14)	(7,98)

Penyisihan Piutang pada Tahun 2025 senilai Rp7.632.972.562,04 dan pada Tahun 2024 senilai Rp7.068.983.887,90. Rincian piutang dan penyisihannya dapat dilihat lebih jelas pada **lampiran 3** dalam catatan atas Laporan Keuangan ini. Adapun rincian penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 56 Daftar Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(6.439.654.637,17)	(6.002.111.838,80)
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(612.423.416,78)	(458.508.815,50)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(11.851.765,91)	(28.209.604,16)
Penyisihan Piutang Lainnya:		
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(56.999.299,04)	(56.999.299,04)
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(512.043.443,14)	(523.154.330,40)
Jumlah	(7.632.972.562,04)	(7.068.983.887,90)

5.3.1.1.3. Beban Dibayar di Muka

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban Dibayar di Muka	104.545.912,40	104.545.912,40	0,00	0,00
Jumlah	104.545.912,40	104.545.912,40	0,00	0,00

Saldo Beban dibayar di Muka per 31 Desember 2025 senilai Rp104.545.912,40 atau sama dengan saldo tahun sebelumnya. Beban dibayar di muka merupakan kegiatan rehabilitasi pagar SDN 14 Bambang. Hal ini sesuai dengan perhitungan realisasi keuangan pada kegiatan tersebut yang telah mencapai 75,00 persen sementara realisasi fisik sebesar 26,53 persen. Oleh karena itu, selisih dari perhitungan tersebut diakui sebagai beban dibayar di muka pada Dinas Pendidikan Dan Pemuda Olahraga.

5.3.1.1.4. Persediaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Persediaan	24.944.001.132,48	32.108.669.768,82	(7.164.668.636,34)	(22,31)
Jumlah	24.944.001.132,48	32.108.669.768,82	(7.164.668.636,34)	(22,31)

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 senilai Rp24.944.001.132,48 atau mengalami penurunan sebesar 22,31 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp32.108.669.768,82, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 57 Daftar Rincian Persediaan			
No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Bahan	821.960.322,35	1.524.700,00
2.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	233.990.819,00	774.888.035,99
3.	Obat-obatan	10.057.000.241,13	9.655.969.113,84
4.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	13.818.748.600,00	21.662.383.250,99
5.	Natura dan Pakan	12.301.150,00	13.904.668,00
Total		24.944.001.132,48	32.108.669.768,82

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat kenaikan signifikan pada rekening Bahan yang disebabkan oleh perubahan pengklasifikasian persediaan pada tahun 2025, yaitu Persediaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) yang sebelumnya dicatat pada rekening Obat-obatan lainnya direklasifikasi ke rekening Bahan lainnya karena tidak lagi mengandung unsur obat. Namun demikian, secara keseluruhan persediaan mengalami penurunan sebesar Rp7.164.668.636,34 atau 22,31 persen, yaitu dari Rp32.108.669.768,82 per 31 Desember 2024 menjadi Rp24.944.001.132,48 per 31 Desember 2025. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pemakaian persediaan obat-obatan dan instalasi farmasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas se-Kabupaten Majene, serta berkurangnya persediaan barang yang belum diserahkan kepada masyarakat.

Dalam daftar persediaan di atas khususnya pada jenis persediaan obat-obatan masih mencatat obat dalam kondisi kedaluwarsa senilai Rp2.069.850,00 pada: (1) Puskesmas Sendana I jenis obat IV Chateter No. 16 G sebanyak 40 Pcs senilai Rp408.480,00; (2) Puskesmas Totoli jenis Alat Suntik 0.5 sebanyak 1.402 pcs dengan nilai Rp1.661.370,00. Rincian persediaan dapat dilihat lebih jelas pada **lampiran 4**. Adapun rincian persediaan pada SKPD pada tabel berikut.

Tabel 5. 58 Rincian Persediaan per SKPD Tahun 2025		
No.	SKPD	Persediaan
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	82.000,00
2.	Dinas Kesehatan (Unit)	5.901.931.344,83
3.	PKM Banggae I	205.813.649,95
4.	PKM Banggae II	217.766.033,77
5.	PKM Lembang	245.654.556,67
6.	PKM Totoli	200.707.893,00
7.	PKM Pamboang	204.324.704,72
8.	PKM Sendana I	327.769.305,19
9.	PKM Tammeroddo	123.570.021,00
10.	PKM Sendana II	144.724.775,64
11.	PKM Salutambung	150.357.560,00
12.	PKM Ulumanda	144.479.392,65
13.	PKM Malunda	109.604.221,00
14.	Rumah Sakit Umum Daerah	2.825.030.439,06
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.691.448.604,00
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	201.526.938,00
17.	Badan Perencanaan Daerah	371.000,00
18.	Badan Pendapatan Daerah	23.980.881,00
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	224.857.812,00
Total		24.944.001.132,48

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Investasi Jangka Panjang	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67	(1.329.344.258,57)	(1,93)
Jumlah	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67	(1.329.344.258,57)	(1,93)

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 senilai Rp67.455.648.023,10 dan pada Tahun 2024 senilai Rp68.784.992.281,67 mengalami penurunan sebesar 1,93 persen, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 59 Daftar Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00
2.	Investasi Non Permanen Lainnya	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)
3.	Investasi Permanen – Penyertaan modal	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67
	Jumlah	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67

5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Investasi Non Permanen- Dana Bergulir	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00	0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir sebesar Rp2.958.167.671,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir. Dana bergulir merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat seperti kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Usaha yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya, rincian atas penerima Dana Bergulir dapat dilihat pada Lampiran 5 . Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir per 31 Desember 2025 senilai Rp2.958.167.671,00, tidak mengalami perubahan tahun lalu. Adapun rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 60 Daftar Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2025

Nama SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00	0,00	0,00

5.3.1.2.2. Penyisihan Investasi Non Permanen

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Investasi Non Permanen	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)	0,00	0,00
Jumlah	(2.958.167.671,00)	(2.958.167.671,00)	0,00	0,00

Penyisihan Investasi Non Permanen merupakan penyisihan atas Dana Bergulir yang diragukan tertagih atau dikategorikan macet sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Saldo Penyisihan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025 senilai (Rp2.958.167.671,00).

5.3.1.2.3. Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67	(1.329.344.258,57)	(1,93)
Jumlah	67.455.648.023,10	68.784.992.281,67	(1.329.344.258,57)	(1,93)

Investasi Permanen –
Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Per 31 Desember 2025
adalah sebesar
Rp67.455.648.023,10 atau
turun 1,93 persen
dibandingkan dengan saldo per
31 Desember 2024 sebesar
Rp68.784.992.281,67

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene berupa Penyertaan Modal pada Bank Sulselbar, Perumda Air Minum Tirta Mandar dan Perusda Aneka Usaha.

Rincian atas kepemilikan modal milik Pemerintah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 61 Rincian Kepemilikan Modal Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025

No.	Perusahaan	Persentase Kepemilikan Modal (%)
1.	Perusda Aneka Usaha	100
2.	Perumda Air Minum Tirta Mandar	100
3.	Bank Sulselbar	0,82

Untuk Jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah sepenuhnya dicatat dengan menggunakan metode ekuitas yaitu Perusda Aneka Usaha dan Perumda Air Minum Tirta Mandar. Bank Sulselbar dicatat dengan menggunakan metode *cost* (biaya).

Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp67.455.648.023,10 atau mengalami penurunan sebesar 1,93 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp68.784.992.281,67. Penurunan saldo investasi permanen terjadi pada tahun 2025 disebabkan atas kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Mandar sebesar Rp347.368.707,00 dan Perusda Aneka Usaha sebesar Rp1.481.975.551,57.

Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mandar dikeluarkan berdasarkan SK Bupati Nomor: 100.3.3.2/754/X/ Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025, penyertaan modal digunakan untuk biaya seleksi Direktur dan biaya pengadaan lahan di daerah Renggeang Polewali Mandar (relokasi *intake* Intalasi Pengelolaan Air Galung Lombok).

Nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Majene pada Perumda Air Minum Tirta Mandar dan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene mengalami penurunan akibat kerugian yang dialami berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Suparman Bambang Ghanis dengan Nomor 00083/2.1081/AU.8/11/1224-1/1/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 terhadap laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene mengalami kerugian senilai Rp347.368.707,00 pada laporan laba rugi, sedangkan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian dalam laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kuncara Budi Santosa & Rekan dengan Nomor 00001/3.0543/AU.8/05/1712-1/1/IV/2026 tanggal 30 April 2026 terhadap laporan Keuangan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene juga mengalami kerugian senilai Rp1.481.975.551,57 pada laporan laba rugi. Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26

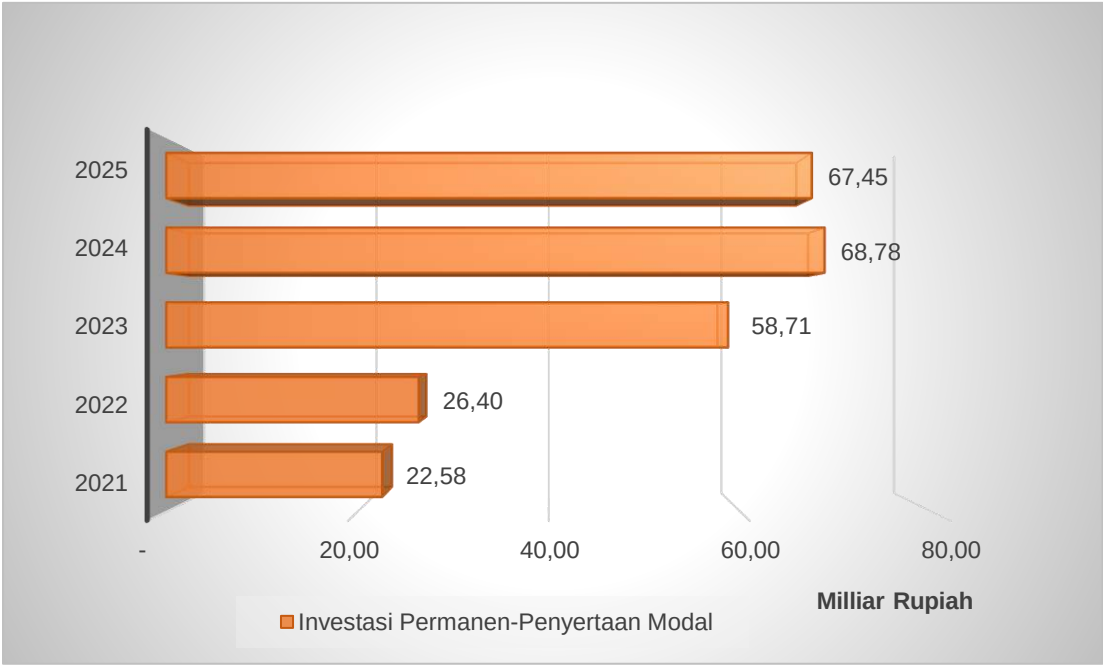
Tahun 2017, Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene dan Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene merupakan BUMD yang kepemilikan modalnya 100 persen milik pemerintah daerah atas komposisi kepemilikan modal tersebut, maka metode pencatatan investasi dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas. Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Oleh karena itu kerugian Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene tersebut diakui dan dicatat sebagai beban penurunan nilai investasi pemerintah daerah yang mengurangi nilai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Majene hanya melakukan Penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene sehingga memperoleh Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 senilai Rp67.455.648.023,10. Nilai ini mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 62 Mutasi Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Tahun 2025

No .	Perusahaan	Tahun 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
1.	Perusda Aneka Usaha	41.228.586.071,00	0,00	1.481.975.551,57	39.746.610.519,43
2.	Perumda Air Minum Tirta Mandar	9.320.406.210,67	500.000.000,00	347.368.707,00	9.473.037.503,67
3.	Bank Sulselbar	18.236.000.000,00	0,00	0,00	18.236.000.000,00
Jumlah		68.784.992.281,67	500.000.000,00	1.829.344.258,57	67.455.648.023,10

Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene dari Tahun 2021-2025. Dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 22 Perkembangan Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2021-2025

5.3.1.3. Aset Tetap

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Tetap	1.475.883.616.947,45	1.547.906.920.646,29	(72.023.303.698,84)	(4,65)
Jumlah	1.475.883.616.947,45	1.547.906.920.646,29	(72.023.303.698,84)	(4,65)

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Perubahan nilai aset tetap merupakan indikator kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi operasional penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai penopang peningkatan ekonomi wilayah Kabupaten Majene.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD. Melalui pembelian. Pembangunan. Hibah atau donasi. Pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap antara lain terdiri dari :

- a. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
- b. Peralatan dan Mesin, meliputi mesin dan peralatan alat besar, alat angkutan bermotor, alat angkutan tak bermotor, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga alat studio, alat besar, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu – rambu, dan peralatan olahraga;
- c. Gedung dan Bangunan, meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung, monumen, bangunan menara, tugu titik kontrol/ pasti, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi, instalasi;
- e. Aset Tetap Lainnya, meliputi bahan perpustakaan, bahan perpustakaan tercetak, bahan perpustakaan lainnya, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, biota perairan, tanaman dan barang koleksi, dan aset renovasi; dan
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat sebesar seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Selain itu, pada Tahun Anggaran 2024 terdapat Aset Tetap yang memenuhi klasifikasi sebagai Aset Properti Investasi, namun Pemerintah Kabupaten Majene belum menyajikan Aset Properti Investasi dikarenakan pada Tahun 2024 belum terdapat peraturan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Properti Investasi. Kebijakan akuntansi tentang Properti Investasi baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah pada tanggal 15 April 2025.

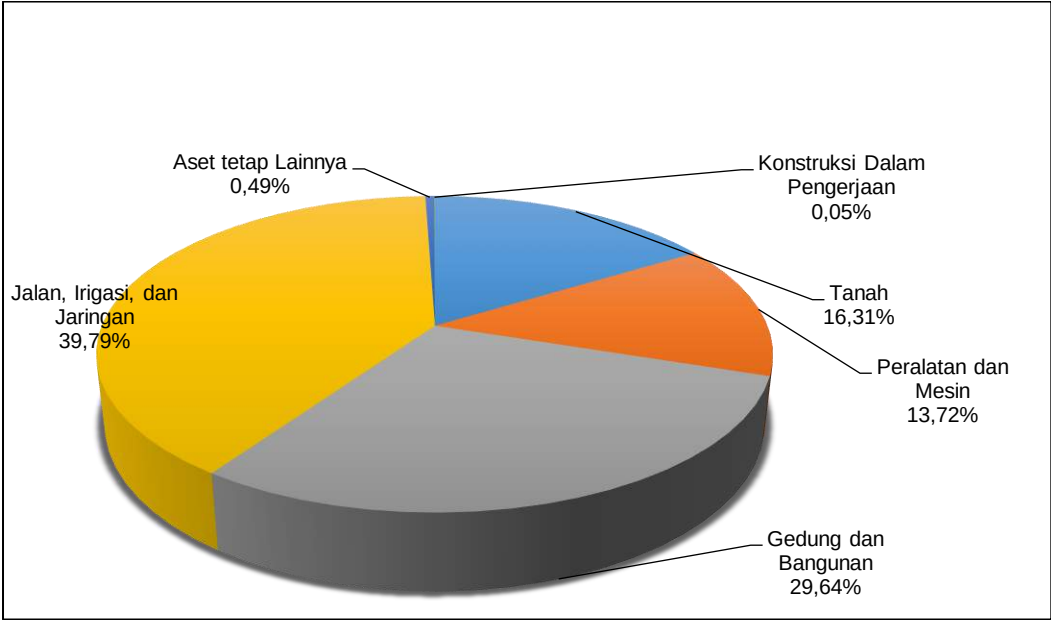
Saldo aset tetap pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.475.883.616.947,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 63 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah	443.305.977.555,00
2.	Peralatan dan Mesin	373.116.163.248,03
3.	Gedung dan Bangunan	805.789.842.264,28
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.081.642.931.941,40
5.	Aset Tetap Lainnya	13.438.459.764,08

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	1.241.180.088,15
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.242.650.937.913,49)
	Jumlah	1.475.883.616.947,45

Komposisi aset tetap berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 5. 23 Komposisi Aset Tetap berdasarkan Jenisnya

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa kelompok aset paling material yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majene adalah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Sedangkan kelompok aset yang paling rendah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah aset tetap lainnya. Laporan saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 berdasarkan Tabel di atas merupakan akibat dari Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap dan sebagai gambarnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 64 Tabel Penambahan dan Pengurangan Aset tetap TA 2025

No .	Uraian	Saldo Aset Tetap Tahun 2024 (Rp)	Mutasi Aset		Saldo Aset Tetap Tahun 2025 (Rp)
			Penambahan Aset Tahun 2025 (Rp)	Pengurangan Aset Tahun 2025 (Rp)	
1.	Tanah	454.372.482.897,00	1.367.688.179,00	12.434.193.521,00	443.305.977.555,00
2.	Peralatan dan Mesin	368.063.935.365,38	12.658.186.543,00	7.605.958.660,35	373.116.163.248,03
3.	Gedung dan Bangunan	757.337.493.107,65	55.576.918.672,00	7.124.569.515,37	805.789.842.264,28
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.073.448.390.089,92	10.854.805.012,00	2.660.263.160,52	1.081.642.931.941,40
5.	Aset Tetap Lainnya	13.110.297.264,08	328.162.500,00	0,00	13.438.459.764,08
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.220.083.821,60	130.637.811,55	15.109.541.545,00	1.241.180.088,15
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.134.645.761.899,34)	(108.005.176.014,15)		(1.242.650.937.913,49)
Jumlah		1.547.906.920.646,29			1.475.883.616.947,45

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkenaan dengan mutasi akun aset tetap selama Tahun 2025 yaitu:

5.3.1.3.1. Tanah

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Tanah	443.305.977.555,00	454.372.482.897,00	(11.066.505.342,00)	(2,44)
Jumlah	443.305.977.555,00	454.372.482.897,00	(11.066.505.342,00)	(2,44)

Aset Tetap Tanah Tahun 2025 sebesar Rp443.305.977.555,00 atau terjadi penurunan sebesar 2,44 persen dari Tahun 2024

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Jumlah bidang tanah yang telah memiliki sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Majene sejumlah 209 bidang tanah dengan total luas tanah sebesar 859.646 m². Saldo tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp443.305.977.555,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.066.505.342,00 atau sebesar 2,44 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp454.372.482.897,00. Adapun tabel mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 5. 65 Tabel Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Tanah

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2025		454.372.482.897,00
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	732.371.100,00
2)	Mutasi Masuk	635.317.079,00
Jumlah		1.367.688.179,00
b. Pengurangan		
1)	Mutasi Keluar	12.254.988.221,00
2)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset	179.205.300,00
Jumlah		12.434.193.521,00
Saldo per 31 Desember 2025		443.305.977.555,00

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah selama TA 2025 adalah sebagai berikut.

- a. **Penambahan** Aset Tetap Tanah senilai Rp1.367.688.179,00 yang terdiri dari:
- 1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp732.371.100,00;
 - 2) Mutasi masuk sebesar Rp635.317.079,00 yang terdiri dari:
 - a) Penerimaan hibah barang sebesar Rp290.000.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - b) Kurang Pencatatan/Pengakuan sebesar Rp345.317.079,00 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan
- b. **Pengurangan** Aset Tetap Tanah sebesar Rp12.434.193.521,00 yakni
- 1) Mutasi Keluar sebesar Rp12.254.988.221,00 terdiri dari:
 - a) Mutasi keluar aset tetap tanah karena dialihkan ke properti investasi sebesar Rp10.815.873.221,00, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/442/VII/TAHUN 2025 tentang Penetapan Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp13.680.815.924,00 namun berdasarkan hasil koreksi terdapat aset yang tidak memenuhi syarat sebagai Properti Investasi senilai Rp2.864.942.703,00 pada Sekretariat Daerah sehingga Aset Properti Investasi pada Sekretariat Daerah senilai Rp10.749.317.900,00 dan Aset Properti terdapat pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp66.555.321,00.

- b) Mutasi keluar aset tetap tanah karena pemberian hibah sebesar Rp1.387.330.000,00 yang terdiri dari:
- (1) senilai Rp695.200.000,00 pada Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/847/XI/TAHUN 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Majene Karena D hibahkan Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene Tahun Anggaran 2025;
 - (2) senilai Rp692.130.000,00 pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/788/X/TAHUN 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dari Daftar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Majene Karena D hibahkan Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025;
- c) Penghapusan aset tetap tanah karena pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp51.785.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
- 2) Reklasifikasi dan Koreksi aset sebesar Rp179.205.300,00 yang terdiri dari:
- a) Koreksi aset tetap tanah karena salah pos belanja modal sebesar Rp72.805.300,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; dan
 - b) Koreksi pencatatan aset tetap tanah atas pencatatan tahun sebelumnya sebesar Rp106.400.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Tahun 2025 terdapat delapan bidang tanah yang akan digunakan untuk Objek Lokasi Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan luas 53.354 M² harga Rp3.206.501.988,00 hal sesuai tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4911/SJ tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Aset Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, adapun rincian Objek Lokasi Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 66 Daftar Objek Lokasi Pembangunan Gerai KDMP

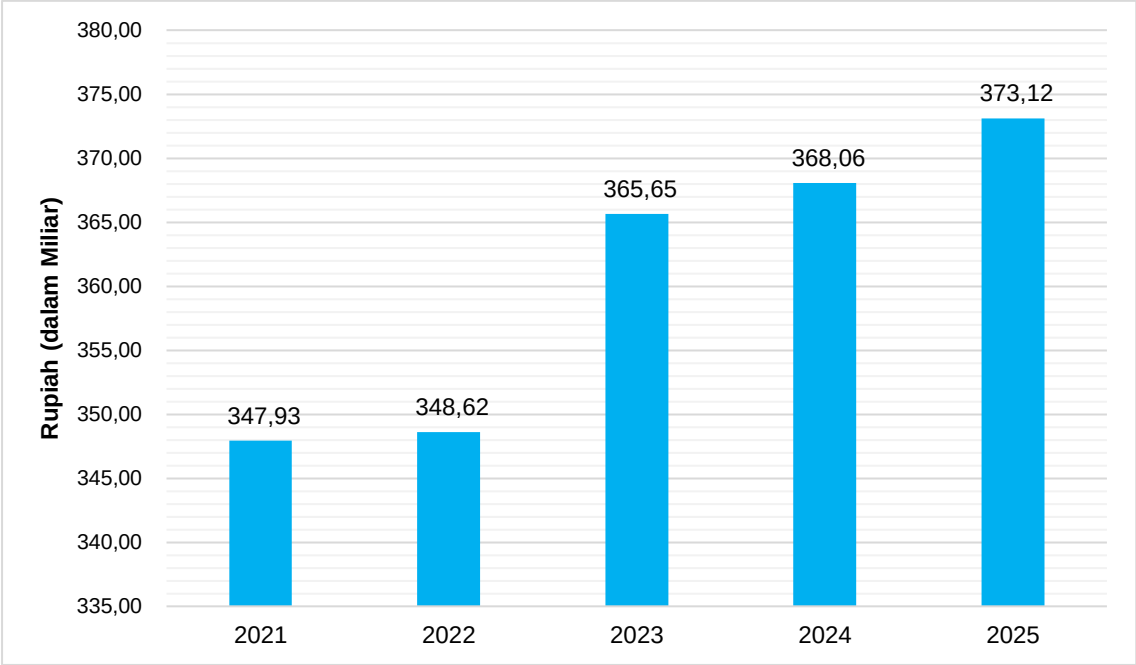
No.	Objek Lokasi	Luas (M²)	Harga Perolehan (Rp)	Alamat
1.	Lokasi Pemb. Rumah Nelayan	19.666	1.275.744.031	Desa Limbua Kecamatan Sendana
2.	Eks Lokasi TPA Lembang	13.000	130.000.000	Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur
3.	Lokasi Pasar Malunda	1.057	162.165.267	Desa Lamungan Batu Kecamatan Malunda
4.	Lokasi Eks Pasar Palipi	782	16.794.300	Desa Palipi Kecamatan Sendana
5.	Lokasi Komp. Sport Centre	3.430	551.339.500	Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae
6.	Lokasi Pasar Parabaya	3.059	195.240.318	Desa Parabaya Onang Kecamatan Sendana
7.	Lokasi Pembangunan Rumah Nelayan	10.014	850.484.272	Pa'ga Mekkata Selatan Kecamatan Malunda
8.	Lokasi Pasar Salutambung	2.346	24.734.300	Salutambung Sambabo Kecamatan Ulumanda
Jumlah		53.354	3.206.501.988	

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Peralatan dan Mesin	373.116.163.248,03	368.063.935.365,38	5.052.227.882,65	1,37
Jumlah	373.116.163.248,03	368.063.935.365,38	5.052.227.882,65	1,37

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp373.116.163.248,03 atau terjadi Kenaikan sebesar 1,37 persen dari Tahun 2024

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp373.116.163.248,03 Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.052.227.882,65 atau sebesar 1,37 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp368.063.935.365,38. Berikut grafik perkembangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir



Grafik 5. 24 Grafik Perkembangan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: alat besar, alat angkutan bermotor, alat angkutan tak bermotor, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga alat studio, alat besar, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pengeboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, peralatan proses/produksi, rambu-rambu, peralatan olahraga dan lain sebagainya. Adapun rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 67 Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Alat Besar	17.744.450.168,00	14.898.867.000,00
2.	Alat Angkutan	72.652.846.067,84	72.816.201.496,84
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.306.371.840,98	2.377.557.232,98
4.	Alat Pertanian	2.882.047.565,25	3.293.346.465,25
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	83.329.402.836,72	79.989.219.459,07
6.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.525.958.785,44	8.773.737.285,44
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	85.588.260.667,40	85.564.781.456,40
8.	Alat Laboratorium	28.745.216.816,75	28.656.872.816,75
9.	Alat Persenjataan	300.459.243,00	282.009.243,00
10.	Komputer	64.155.351.093,68	64.621.949.746,68
11.	Alat Keselamatan Kerja	3.152.622.532,00	3.083.107.532,00
12.	Peralatan Proses/Produksi	49.527.000,00	49.527.000,00
13.	Rambu-Rambu	2.088.333.474,97	2.088.333.474,97
14.	Peralatan Olah Raga	1.595.315.156,00	1.568.425.156,00
Jumlah		373.116.163.248,03	368.063.935.365,38

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Adapun mutasi tambah kurang Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 68 Tabel Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per : 1 Januari 2025		368.063.935.365,38
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	7.522.346.378,00
2)	Mutasi Masuk	2.124.939.400,00
3)	Reklasifikasi dan Koreksi masuk	3.010.900.765,00
Jumlah		12.658.186.543,00
b. Pengurangan		
1)	Mutasi Keluar	7.531.555.232,05
2)	Reklasifikasi Koreksi Keluar	156.067.051,35
3)	Tambah/Kurang Aset Ekstrakomptabel	(81.663.623,05)
Jumlah		7.605.958.660,35
Saldo per 31 Desember 2025		373.116.163.248,03

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2025 adalah sebagai berikut.

- a. **Penambahan** Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp12.658.186.543,00 yang terdiri dari:
 - 1) Penambahan bersumber dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 Rp7.522.346.378,00 yang terdiri dari:
 - a) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.826.784.450,00;
 - b) Belanja modal yang dipisahkan sebesar Rp2.517.537.030,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
 - c) Belanja Modal sebesar Rp1.178.024.898,00 yang bersumber dari dana JKN pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari: (1) Puskesmas Banggae I sebesar Rp86.413.683,00; (2) Puskesmas Banggae II sebesar Rp40.065.000,00; (3) Puskesmas Lembang sebesar Rp45.600.000,00; (4) Puskesmas Malunda sebesar Rp94.392.082,00; (5) Puskesmas pamboang sebesar Rp146.200.000,00; (6) Puskesmas Salutambung sebesar Rp50.333.500,00; (7) Puskesmas Sendana I sebesar Rp98.871.760,00; (8) Puskesmas Sendana II sebesar Rp57.365.000,00; (9) Puskesmas Tammeroddo sebesar Rp114.929.273,00; (10) Puskesmas Totoli sebesar Rp54.024.000,00; (11) Puskesmas Ulumanda sebesar Rp17.816.000,00; (12) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp372.014.600,00;
 - 2) Penambahan Mutasi Masuk sebesar Rp2.124.939.400,00 yang terdiri dari:
 - a) Mutasi masuk disebabkan karena ada hibah peralatan dan mesin sebesar Rp1.319.392.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/846/XI/TAHUN 2025 Tanggal 25 November 2025 Tentang Pencatatan Aset Berupa Alat Berat ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Majene Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun Anggaran 2025;
 - b) Mutasi masuk disebabkan karena perolehan aset Peralatan Mesin yang bersumber dari utang sebesar Rp698.687.400,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp17.094.000,00 pada Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp681.593.400,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c) Mutasi tambah/masuk disebabkan karena berpindahnya aset peralatan dan mesin dari SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Rp106.860.000,00

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/848/XI/TAHUN 2025 Tanggal 25 November 2025 tentang Mutasi Pencatatan Barang Milik Daerah Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025:

Mutasi masuk Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 69 Mutasi Masuk Peralatan Akibat Mutasi antar SKPD

No.	Penambahan pada SKPD	SKPD Asal	Nilai (Rupiah)
1.	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	35.700.000,00
2	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan	71.160.000,00
Jumlah			106.860.000,00

- 3) Penambahan akibat Reklasifikasi dan Koreksi masuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.010.900.765,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi/Kapitalisasi Aset (non Belanja Modal) berasal dari belanja barang dan jasa sebesar Rp211.432.168,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp204.009.168,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; (2) senilai Rp7.423.000,00 pada Kecamatan Malunda;
 - b) Reklasifikasi Antar Akun Belanja Rp383.923.997,00 terdiri dari:
 - (1) Reklasifikasi dari belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp339.423.997,00 terdiri dari: (1) senilai Rp119.333.000,00 Pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp41.105.000,00 Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp178.985.997,00 pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; dan
 - (2) Reklasifikasi dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp44.500.000,00 pada Dinas Kesehatan.
 - c) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp2.415.544.600,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- b. **Pengurangan** Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp7.605.958.660,35 yang terdiri dari:
- 1) Pengurangan yang bersumber dari mutasi keluar sebesar Rp7.531.555.232,05 terdiri dari:
- a) Penghapusan Barang milik Daerah berupa peralatan dan mesin dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Majene sebesar Rp7.424.695.232,05 terdiri dari:
 - (1) Penghapusan/Pemusnahan BMD sebesar Rp2.850.076.790,05 terdiri dari:
 - (a) Pemberian hibah berupa peralatan mesin sebesar Rp7.006.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - (b) Pemberian hibah berupa peralatan mesin sebesar Rp59.551.500,00 pada Kecamatan Banggae Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/767/X/TAHUN 2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Majene Berupa Hibah Peralatan Dan Mesin Kepada Pemerintah Kelurahan Baruga Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025;
 - (c) Mutasi Kurang karena Penghapusan Peralatan dan Mesin karena kategori pakai habis (BPH) sebesar Rp23.486.790,05 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/765/X/TAHUN 2025 Tanggal 23 Oktober 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Kategori Barang Habis Pakai Dari Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025;
 - (d) Mutasi Kurang karena Penghapusan Peralatan dan Mesin karena pemusnahan sebesar Rp302.087.900,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/766/X/TAHUN 2025 Tanggal 23 Oktober 2025 Tentang Penghapusan

Barang Milik Daerah Karena Pemusnahan Dari Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025 terdiri dari: (1) senilai Rp299.717.900,00 pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp73.000,00 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan; (3) senilai Rp2.148.000,00 pada Kecamatan Banggae Timur; (4) senilai Rp149.000,00 pada Kecamatan Pamboang;

- (e) Mutasi kurang karena penghapusan Peralatan dan Mesin karena tercatat ganda sebesar Rp42.400.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah; dan
- (f) Mutasi Kurang karena direklasifikasi sebesar Rp2.415.544.600,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

(2) Penghapusan BMD Karena Telah Beralih Kepemilikan Melalui Penjualan Langsung sebesar Rp4.574.618.442,00 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene SK Nomor: 100.3.3.2/764/TAHUN 2025 Tanggal 23 Oktober 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Inventaris Pemerintah Kabupaten Majene Karena Telah Dilakukan Penjualan Langsung terdiri dari: (1) senilai Rp3.136.181.100,00 pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp30.117.629,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (3) senilai Rp21.487.340,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (4) senilai Rp8.149.840,00 pada Dinas Perhubungan; (5) senilai Rp213.310.998,00 pada Dinas Kesehatan; (6) senilai Rp20.234.969,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (7) senilai Rp200.234.969,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (8) senilai Rp104.130.000,00 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan; (9) senilai Rp104.911.000,00 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah; (10) senilai Rp368.677.593,00 pada Badan Pendapatan Daerah; (11) senilai Rp83.478.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; (12) senilai Rp103.697.390,00 pada Badan Perencana Daerah; (13) senilai Rp4.944.000,00 pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah; (14) senilai Rp52.000.000,00 pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; (15) senilai Rp19.210.000,00 pada Badan Kepegawaian dan PSDM; (16) senilai Rp6.800.000,00 pada Kecamatan Banggae; (17) senilai Rp48.592.083,00 pada Kecamatan Banggae Timur; (18) senilai Rp28.527.500,00 pada Kecamatan Pamboang; (19) senilai Rp19.935.000,00 pada Kecamatan Sendana;

- b) Pengurangan yang bersumber dari mutasi keluar sebesar Rp106.860.000,00 disebabkan karena berpindahnya aset Peralatan dan Mesin SKPD ke SKPD lain dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/848/XI/TAHUN 2025 Tanggal 25 November 2025 tentang Mutasi Pencatatan Barang Milik Daerah Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025

Tabel 5. 70 Mutasi Keluar Peralatan Mesin Akibat Mutasi antar SKPD

No.	Mutasi Keluar	SKPD Penerima	Nilai (Rupiah)
1.	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan	35.700.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	71.160.000,00
Jumlah			106.860.000,00

- 2) Pengurangan karena reklasifikasi dan koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp156.067.051,35 terdiri dari:
- a) Koreksi atas belanja modal peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi definisi aset tetap karena kesalahan belanja sebesar Rp565.246.015,00 terdiri dari: (1) senilai Rp25.415.318,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai 213.078.800,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp178.985.997,00 pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; (4) senilai Rp147.765.900,00 pada Kecamatan Banggae;

- b) Koreksi atas belanja modal peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi definisi aset tetap karena merupakan belanja utang barang jasa yang terealisasi di Belanja Modal senilai Rp64.800.000,00 pada Sekretariat DPRD;
- c) Pengurangan karena pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp864.118.000,00 terdiri dari: (1) senilai Rp9.900.000,00 pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp59.200.000,00 pada Sekretariat Daerah; (3) senilai Rp9.100.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) senilai Rp32.967.000,00 pada Dinas Kesehatan; (5) senilai Rp254.730.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (6) senilai Rp287.122.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (7) senilai Rp49.834.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (8) senilai Rp44.300.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (9) senilai Rp4.080.000,00 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan; (10) senilai Rp23.435.000,00 pada Dinas Kelautan Dan Perikanan; (11) senilai Rp30.850.000,00 pada Badan Perencanaan Daerah; (12) senilai Rp19.400.000,00 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian; (13) senilai Rp20.500.000,00 pada Kecamatan Banggae; (14) senilai Rp9.200.000,00 pada Kecamatan Sendana; (15) senilai Rp9.500.000,00 pada Kecamatan Malunda;
- d) Reklasifikasi penambahan aset lainnya sebesar Rp5.880.176.545,35 terdiri dari: (1) senilai Rp878.282.500,00 pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp808.330.733,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (3) senilai Rp77.500.540,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (4) senilai Rp42.598.562,00 pada Dinas Kesehatan; (5) senilai Rp240.782.165,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (6) senilai Rp17.943.494,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; (7) senilai Rp174.552.782,00 pada Dinas Sosial; (8) senilai Rp7.822.448,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (9) senilai Rp10.850.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan; (10) senilai Rp236.488.170,35 pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan; (11) senilai Rp202.513.050,00 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah; (12) senilai Rp624.522.254,00 pada Badan Pendapatan Daerah; (13) senilai Rp71.000.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; (14) senilai Rp796.200.900,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; (15) senilai Rp828.832.000,00 pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; (16) senilai Rp78.725.000,00 pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; (17) senilai 54.700.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (18) senilai Rp27.355.000,00 pada Badan Kepegawaian Dan PSDM; (19) senilai Rp193.643.728,00 pada Kecamatan Banggae; (20) senilai Rp5.100.000,00 pada Kecamatan Banggae Timur; (21) senilai Rp199.596.219,00 pada Kecamatan Pamboang; (22) senilai Rp69.630.000,00 pada Kecamatan Sendana; (23) senilai Rp175.206.000,00 pada Kecamatan Tammeroddo; (24) senilai Rp38.445.000,00 pada Kecamatan Tubo Sendana; (25) senilai Rp19.556.000,00 pada Kecamatan Malunda;
- e) Reklasifikasi pengurangan aset lainnya peralatan dan mesin dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Majene sebesar Rp(7.250.974.109,00) terdiri dari: (1) senilai Rp(3.385.265.000,00) pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp(30.117.629,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (3) senilai Rp(21.487.340,00) pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (4) senilai Rp(8.149.840,00) pada Dinas Perhubungan; (5) senilai Rp(210.355.000,00) pada Dinas Kesehatan; (6) senilai Rp(20.234.000,00) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (7) senilai Rp(199.253.634,00) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (8) senilai Rp(110.180.000,00) pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan; (9) senilai Rp(104.911.000,00) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; (10) senilai Rp(384.002.593,00) pada Badan Pendapatan Daerah; (11) senilai Rp(83.478.000,00) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; (12) senilai Rp(103.697.390,00) pada Badan Perencanaan Daerah; (13) senilai Rp(4.944.000,00) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah; (14) senilai Rp(2.415.544.600,00) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; (15) senilai Rp(52.000.000,00) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; (16) senilai

- Rp(19.210.000,00) pada Badan Kepegawaian dan PSDM; (17) senilai Rp(6.800.000,00) pada Kecamatan Banggae; (18) senilai Rp(43.279.083,00) pada Kecamatan Banggae Timur; (19) senilai Rp(27.950.000,00) pada Kecamatan Pamboang; (20) senilai Rp(19.935.000,00) pada Kecamatan Sendana;
- f) Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi antar akun belanja modal ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp32.700.600,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- 3) Tambah/Kurang Aset Ekstrakomptabel Rp(81.663.623,05) terdiri dari: (1) senilai Rp(50.563.000,00) pada Sekretariat DPRD; (2) senilai Rp(2.775.998,00) pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp(981.335,00) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (4) senilai Rp(17.509.790,05) pada Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan; (5) senilai Rp(1.575.000,00) pada Badan Pendapatan Daerah; (6) senilai Rp(7.461.000,00) pada Kecamatan Banggae Timur; (7) senilai Rp(726.500,00) pada Kecamatan Pamboang.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Gedung dan Bangunan	805.789.842.264,28	757.337.493.107,65	48.452.349.156,63	6,40
Jumlah	805.789.842.264,28	757.337.493.107,65	48.452.349.156,63	6,40

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp805.789.842.264,28 atau terjadi Kenaikan sebesar 6,40% dari Tahun 2024

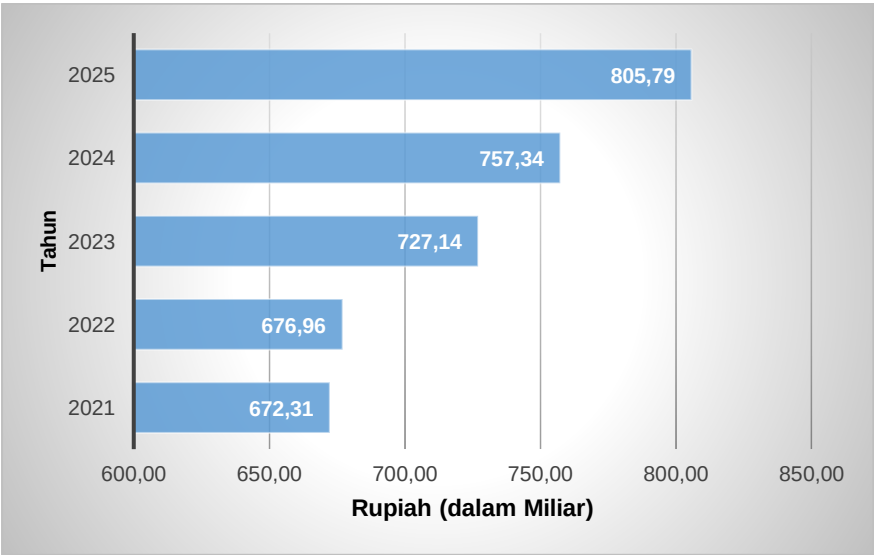
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp805.789.842.264,28. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp48.452.349.156,63 atau sebesar 6,40 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp757.337.493.107,65

Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Tugu Titik Kontrol/ Pasti.

Tabel 5. 71 Rincian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Bangunan Gedung	789.146.763.293,05	741.635.493.026,99
2.	Bangunan Monumen	2.722.175.999,57	2.732.533.046,00
3.	Bangunan Menara	664.331.983,00	664.331.983,00
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.256.570.988,66	12.305.135.051,66
Jumlah		805.789.842.264,28	757.337.493.107,65

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tren perkembangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Majene sampai dengan per 31 Desember 2025 dalam grafik berikut.



Grafik 5. 25 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 72 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2025		757.337.493.107,65
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	23.797.538.257,00
2)	Mutasi Masuk	16.501.955.428,00
3.)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Masuk	15.277.424.987,00
Jumlah		55.576.918.672,00
b. Pengurangan		
1)	Mutasi Keluar	2.493.196.258,00
2)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Keluar	4.631.373.257,37
3)	Tambah/(Kurang) Aset Ekstrakomptabel	0.00
Jumlah		7.124.569.515,37
Saldo per 31 Desember 2025		805.789.842.264,28

Adapun rincian penambahan/pengurangan Aset Gedung dan Bangunan selama TA 2025 adalah sebagai berikut.

- a. **Penambahan** Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp55.576.918.672,00 yang terdiri dari:
- 1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp23.797.538.257,00 yang terdiri dari:
 - a) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.636.161.184,00;
 - b) Belanja modal yang dipisahkan sebesar Rp161.377.073,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersumber dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
 - 2) Penambahan mutasi masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp16.501.955.428,00 yang terdiri dari:
 - a) Mutasi masuk Gedung dan Bangunan disebabkan adanya hibah senilai Rp15.485.644.139,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/698/X/TAHUN 2025 Tanggal; 3 Oktober 2025 Tentang Pencatatan Barang Milik Daerah Atas Perolehan Hibah Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025;

- b) Penambahan mutasi masuk atas perolehan aset dari utang belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp533.851.050,00 yang terdiri: (1) senilai Rp179.423.615,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp354.427.435,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Tabel 5. 73 Mutasi Masuk atas Pengakuan Hutang Belanja Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Nilai (Rupiah)
1.	Dinas Kesehatan	179.423.615,00
2.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	354.427.435,00
Jumlah		533.851.050,00

- c) Mutasi masuk/bertambah Gedung dan Bangunan disebabkan perpindahan antar SKPD sebesar Rp482.460.239,00 terdiri dari: (1) senilai Rp282.970.608,00 pada Sekretariat Daerah mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp199.489.631,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mutasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Untuk Jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5. 74 Mutasi Masuk Gedung dan Bangunan Akibat Mutasi antar SKPD

No.	Penambahan pada SKPD	SKPD Asal	Nilai (Rupiah)
1.	Sekretariat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	282.970.608,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	199.489.631,00
Jumlah			482.460.239,00

- 3) Penambahan akibat Reklasifikasi dan Koreksi masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp15.277.424.987,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi/Kapitalisasi Aset (non Belanja Modal) sebesar Rp159.393.442,00 berasal dari belanja barang dan jasa yang terdiri dari: (1) senilai Rp21.393.442,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp138.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b) Penambahan Gedung dan Bangunan yang bersumber dari reklasifikasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.490.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c) Penambahan Gedung dan Bangunan yang bersumber dari aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp15.109.541.545,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp15.025.570.450,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah berupa Gedung IBS Lantai 2 Bagian dari Gedung B dan Ruangan Bersalin Lantai 3 dan 4 Bagian dari Gedung B; (2) senilai Rp83.971.095,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Taman Semi Permanen.
- b. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp7.124.569.515,37 yang terdiri dari:
- 1) Pengurangan/ Mutasi Keluar Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.493.196.258,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pemberian hibah BMD berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.948.600,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - b) Pengurangan karena pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp2.003.787.419,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp83.551.044,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp249.729.663,00 pada Dinas Kesehatan; (3) senilai Rp161.377,073,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah; (4) senilai Rp1.369.829.639,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (5)senilai Rp68.060.000,00 pada Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian; (6) senilai Rp20.175.000,00 pada Inspektorat Daerah; (7) senilai Rp48.315.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; (8) senilai Rp2.750.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- c) Mutasi kurang/keluar disebabkan karena berpindahnya aset Gedung dan Bangunan dari SKPD ke SKPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene sebanyak Rp482.460.239,00 terdiri dari: (1) senilai Rp282.970.608,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mutasi ke Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp199.489.631,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mutasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan untuk mutasi keluar dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5. 75 Mutasi Keluar Gedung dan Bangunan Akibat Mutasi antar SKPD

No.	Mutasi Keluar	SKPD Penerima	Nilai (Rupiah)
1.	Dinas PUPR	Sekretariat Daerah	282.970.608,00
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas PUPR	199.489.631,00
Jumlah			482.460.239,00

- 2) Pengurangan/Mutasi Keluar Aset tetap Gedung dan Bangunan disebabkan karena reklasifikasi/koreksi senilai Rp4.631.373.257,37 terdiri dari:
- a) Koreksi atas belanja modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi definisi aset tetap karena kesalahan belanja yang seharusnya menjadi belanja barang diserahkan sebesar Rp42.557.625,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - b) Koreksi kesalahan pengakuan atas utang belanja modal senilai Rp2.241.150,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - c) Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi antar akun belanja modal ke sebesar Rp2.117.315.551,00 terdiri dari:
 - (1) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp339.423.997,00 terdiri dari: (1) senilai Rp119.333.000,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp41.105.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp178.985.997,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - (2) Pengurangan yang bersumber dari reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke belanja Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.777.891.554,00 terdiri dari: (1) senilai Rp1.239.843.002,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp210.872.780,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp327.175.772,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d) Koreksi atas kurang volume belanja modal Gedung dan Bangunan yang berasal dari temuan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Nomor: 10.B/LHP/XIX.MAM/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025 senilai Rp471.358.931,37 yang terdiri dari: (1) senilai Rp10.357.046,43 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp459.734.546,52 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp1.267.338,42 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - e) Koreksi atas aset tetap Gedung dan Bangunan yang tercatat ganda berdasarkan hasil pemeriksaan dan koreksi BPK senilai Rp1.997.900.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.081.642.931.941,40	1.073.448.390.089,92	8.194.541.851,48	0,76
Jumlah	1.081.642.931.941,40	1.073.448.390.089,92	8.194.541.851,48	0,76

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp1.081.642.931.941,40 atau terjadi Kenaikan sebesar 0,76 persen dari Tahun 2024

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.081.642.931.941,40 Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.194.541.851,48 atau sebesar 0,76 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.073.448.390.089,92. Termasuk dalam klasifikasi Jalan, Irigasi, Dan Jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Adapun rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 76 Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Jalan dan Jembatan	685.188.993.614,93	682.922.520.957,77
2.	Bangunan Air (Irigasi)	370.000.304.486,82	365.770.467.894,50
3.	Instalasi	17.207.764.433,00	15.509.531.831,00
4.	Jaringan	9.245.869.406,65	9.245.869.406,65
Jumlah		1.081.642.931.941,40	1.073.448.390.089,92

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 77 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2025		1.073.448.390.089,92
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	7.906.104.836,00
2)	Mutasi Masuk	1.138.108.022,00
3)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset	1.810.592.154,00
Jumlah		10.854.805.012,00
b. Pengurangan		
1)	Mutasi keluar	1.676.246.043,00
2)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset	984.017.117,52
3.	Tambah / (Kurang) Aset Ekstrakomptabel	0,00
Jumlah		2.660.263.160,52
Saldo per 31 Desember 2025		1.081.642.931.941,40

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2025 adalah sebagai berikut.

- a. **Penambahan** Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp10.854.805.012,00 yang terdiri dari:
- 1) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp7.906.104.836,00;
 - 2) Penambahan Mutasi Masuk aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp1.138.108.022,00 terdiri dari
 - a) Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan bersumber dari hibah sebesar Rp287.068.000 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor: 100.3.3.2/698/X/TAHUN 2025 Tanggal; 3 Oktober 2025 Tentang Pencatatan Barang Milik Daerah Atas Perolehan Hibah Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025; dan

- b) Penambahan mutasi masuk atas perolehan aset dari utang belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp851.040.022,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp844.515.522,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp5.192.500,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (3) senilai Rp1.332.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- 3) Penambahan akibat Reklasifikasi dan Koreksi masuk Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.810.592.154,00 terdiri dari:
 - a) Penambahan Jalan Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari Reklasifikasi dan koreksi aset dari belanja modal Peralatan Mesin sebesar Rp32.700.600,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b) Penambahan Jalan Jaringan dan Irigasi yang bersumber dari Reklasifikasi dan koreksi aset dari belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.777.891.554,00 terdiri dari: (1) senilai Rp1.239.843.002,00 pada Dinas Kesehatan; (2) senilai Rp210.872.780,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (3) senilai Rp327.175.772,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Pengurangan** Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp2.660.263.160,52 yang terdiri dari:
 - 1) Pengurangan/ Mutasi Keluar Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan karena pembayaran utang tahun sebelumnya sebesar Rp1.676.246.043,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp1.356.222.867,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp269.245.391,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (3) senilai Rp6.855.000,00 pada Dinas Kesehatan; (4) senilai Rp37.922.785,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (5) senilai Rp6.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2) Reklasifikasi/Koreksi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp984.017.117,52 yang terdiri dari:
 - a) Koreksi atas kurang volume belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari temuan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene Nomor: 10.B/LHP/XIX.MAM/05/2025 Tanggal 26 Mei 2025 senilai Rp315.857.039,94 yang terdiri dari: (1) senilai Rp298.176.604,26 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp17.680.435,68 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - b) Koreksi atas belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak memenuhi definisi aset tetap sebesar Rp284.715.538,00 karena kesalahan belanja yang semestinya masuk pada kategori belanja barang dan jasa yang terdiri dari: (1) senilai Rp148.715.538,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp136.000.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - c) Koreksi atas belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan belanja utang barang jasa sebesar Rp106.950.000,00 yang terdiri dari: (1) senilai Rp10.250.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (2) senilai Rp96.700.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - d) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke belanja Peralatan Mesin sebesar Rp44.500.000,00 pada Dinas Kesehatan;
 - e) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.490.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke belanja Aset Tak Berwujud sebesar Rp7.829.940,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- g) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp130.637.811,55 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp65.898.688,45 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- i) Mutasi Kurang karena bersumber dari Reklasifikasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp19.138.099,58 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Tetap Lainnya	13.438.459.764,08	13.110.297.264,08	328.162.500,00	2,50
Jumlah	13.438.459.764,08	13.110.297.264,08	328.162.500,00	2,50

Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp13.438.459.764,08 atau terjadi kenaikan sebesar 2,50persen dari Tahun 2024

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.438.459.764,08. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp328.162.500,00 atau sebesar 2,50 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.110.297.264,08.

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman dan termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Adapun rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 78 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Bahan Perpustakaan	5.674.805.415,08	5.346.642.915,08
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.111.080.453,00	3.111.080.453,00
3.	Tanaman	112.647.000,00	112.647.000,00
4.	Aset Tetap Renovasi	4.539.926.896,00	4.539.926.896,00
Jumlah		13.438.459.764,08	13.110.297.264,08

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Kelompok aset tetap lainnya terdiri dari bahan perpustakaan, Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, Tanaman dan Aset Tetap Renovasi.

Aset Tetap Renovasi adalah aset yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik Satker, namun memenuhi persyaratan kapitalisasi aset.

Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 79 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang atas Aset Tetap Lainnya

No.	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2025		13.110.297.264,08
a. Penambahan		
1)	Realisasi Belanja Modal	328.162.500,00
2)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	0,00
Jumlah		328.162.500,00
b. Pengurangan		
1)	Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	0,00
2)	Tambah / (Kurang) Aset Ekstrakomptabel	0,00
Jumlah		0,00
Saldo per 31 Desember 2025		13.438.459.764,08

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya selama TA 2025 adalah sebagai berikut.

- a. **Penambahan** Aset Tetap Lainnya senilai Rp328.162.500,00 yang terdiri dari:
- 1) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 senilai Rp328.162.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Realisasi belanja modal non BOS sebesar Rp322.905.000,00 Tahun Anggaran 2025;
 - b) Realisasi belanja modal BOS sebesar Rp5.257.500,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga.

5.3.1.3.6. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.241.180.088,15	16.220.083.821,60	(14.978.903.733,45)	(92,35)
Jumlah	1.241.180.088,15	16.220.083.821,60	(14.978.903.733,45)	(92,35)

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025 sebesar Rp1.241.180.088,15 atau terjadi penurunan sebesar 92,35 persen dari Tahun 2024

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.241.180.088,15. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.978.903.733,45 atau sebesar 92,35 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.220.083.821,60. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5. 80 Tabel Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per 1 Januari 2025	16.220.083.821,60
Penambahan	
Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap	130.637.811,55
Jumlah	130.637.811,55
Pengurangan	
Reklasifikasi Aset Tetap	15.109.541.545,00
Jumlah	15.109.541.545,00
Saldo per 31 Desember 2025	1.241.180.088,15

Konstruksi Dalam Pengerjaan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Penjelasan penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

- a. **Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan** sebesar Rp130.637.811,55 yang terdiri dari:

- 1) Penambahan akibat Reklasifikasi dan Koreksi masuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp130.637.811,55 terdiri dari Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bersumber dari Reklasifikasi dan koreksi aset dari belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp130.637.811,55 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. **Pengurangan** Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp15.109.541.545,00 yakni pengurangan akibat reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.109.541.545,00 terdiri dari: (1) senilai Rp15.025.570.450,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah berupa Gedung IBS Lantai 2 Bagian dari Gedung B dan Ruang Bersalin Lantai 3 dan 4 Bagian dari Gedung B; dan (2) senilai Rp83.971.095,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Taman Semi Permanen.

Adapun rincian barang Konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama SKPD	Tahun Perolehan	Jenis barang	Letak/Lokasi	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2020	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Lurah Labuang Kelurahan Labuang	86.695.657,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2021	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	Kel. Baru Desa Teppo	103.298.916,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2022	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	Kelurahan Galung Kec. Banggae	230.150.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2021	Jembatan Pada Jalan Desa	Dusun Siiyang	155.006.084,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2021	Jembatan Pada Jalan Desa	Dusun Siiyang Desa Adolang Dhua	149.180.000,00
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2025	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Dusun Leppangan Timur Desa Leppangan	130.637.811,55
7.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	2018	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	Bonde Bonde Kec. Tubo Sendana	94.126.000,00
8.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	2018	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	Desa Tubo Poang Kec. Sendana	94.126.000,00
9.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	2024	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	SDN 15 Ulumanda, Kec. Ulumanda	119.140.032,00
10.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	2024	Pagar Permanen	Kantor Lurah Labuang Kelurahan Labuang	78.819.587,60
Jumlah					1.241.180.088,15

Pada Simda BMD tidak ada akun yang memuat Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, namun untuk mengakomodir pencatatannya maka dicatat pada Akun Kartu Inventaris Barang (KIB) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp85.036.788,03 yakni:

- a) Pekerjaan Bangunan Penguat Tebing/Pantai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp65.898.688,45;
- b) Pekerjaan Jalan Kabupaten Arteri Kaida-Ratte Lambe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp19.138.099,58.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Akumulasi Penyusutan	1.242.650.937.913,49	1.134.645.761.899,34	108.005.176.014,15	9,52
Jumlah	1.242.650.937.913,49	1.134.645.761.899,34	108.005.176.014,15	9,52

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp1.242.650.937.913,49 atau terjadi Kenaikan sebesar 9,52 dari Tahun 2024

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.242.650.937.913,49. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp108.005.176.014,15 atau 9,52 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.134.645.761.899,34. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan per 31 Desember 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 82 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan TA 2025 (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	443.305.977.555,00	0,00	443.305.977.555,00
2.	Peralatan dan Mesin	373.116.163.248,03	323.782.595.920,03	49.333.567.328,00
3.	Gedung dan Bangunan	805.789.842.264,28	394.353.313.662,46	411.436.528.601,82
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.081.642.931.941,40	522.032.222.469,00	559.610.709.472,40
5.	Aset Tetap Lainnya	13.438.459.764,08	2.482.805.862,00	10.955.653.902,08
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.241.180.088,15	0,00	1.241.180.088,15
	Jumlah	2.718.534.554.860,94	1.242.650.937.913,49	1.475.883.616.947,45

5.3.1.4. Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Lainnya	10.021.848.510,86	10.595.796.785,87	(573.948.275,01)	(5,42)
Jumlah	10.021.848.510,86	10.595.796.785,87	(573.948.275,01)	(5,42)

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.021.848.510,86 atau terjadi penurunan sebesar Rp573.948.275,01 atau 5,42% dari Tahun 2024

Mengacu pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Selain itu, terdapat juga Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Sementara Aset Lain-Lain merupakan aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan dikategorikan rusak berat.

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Tagihan Jangka Panjang	334.283.791,00	334.283.791,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	5.502.518.065,00	8.725.895.231,00	(3.223.377.166,00)	(36,94)
Aset Lain-Lain	61.531.351.073,79	62.428.242.355,45	(896.891.281,66)	(1,44)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.084.883.983,00)	(5.254.689.810,00)	2.169.805.827,00	(41,29)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(54.261.420.435,93)	(55.667.176.781,58)	1.405.756.345,65	2,52
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	29.242.000,00	(29.242.000,00)	(100,00)
Jumlah	10.021.848.510,86	10.595.796.785,87	(573.948.275,01)	(5,42)

Aset tetap yang dikelompokkan sebagai Aset Lainnya merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain yang disebabkan karena kondisi

rusak berat. Tidak diketahui keberadaannya serta kondisi lain yang menyebabkan aset tetap tidak bisa dimanfaatkan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp10.021.848.510,86. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp573.948.275,01 dari saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp10.595.796.785,87.

5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Tagihan Jangka Panjang	334.283.791,00	334.283.791,00	0,00	0,00
Jumlah	334.283.791,00	334.283.791,00	0,00	0,00

Tagihan Jangka Panjang merupakan tagihan atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara atas sisa kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2005 s.d 2009 yang belum dikembalikan. Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp334.283.791,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan sebagaimana periode pembukuan sebelumnya per 31 Desember 2024 dikarenakan tidak terdapat realisasi pembayaran atas pengembalian saldo kas tersebut sepanjang periode Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian Tagihan Jangka Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 83 Rincian Tagihan Jangka Panjang Tahun 2025

No.	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)
A	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Pemuda Olahraga an.Hj.Rukiah Fattah	61.613.763,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang an. Alimuddin, S.Sos	12.772.078,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja an.Muhammad Ihsan	10.500.000,00
4.	Dinas Kelautan dan Perikanan an. Akhyar, S.Kel	7.500.000,00
5.	Sekretariat DPRD an.Kaimuddin,S.Sos	195.003.950,00
6.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	34.834.000,00
	Sub Total	322.223.791,00
B	Tuntutan Ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	
1.	Badan Keuangan Dan Aset Daerah an.Ramli Puloo	12.060.000,00
	Sub Total	12.060.000,00
TOTAL		334.283.791,00

5.3.1.4.2. Aset Tak Berwujud

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Tak Berwujud	5.502.518.065,00	8.725.895.231,00	(3.223.377.166,00)	(36,94)
Amortisasi	(3.084.883.983,00)	(5.254.689.810,00)	2.169.805.827,00	(41,29)
Neto	2.417.634.082,00	3.471.205.421,00	(1.053.571.339,00)	(30,35)

Nilai Netto Aset Tak Berwujud Tahun 2025 sebesar Rp2.417.634.082,00 atau terjadi penurunan sebesar 30,35 persen dari Tahun 2024

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah berdasarkan nilai bruto senilai Rp5.502.518.065,00 nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.223.377.166,00 atau sebesar 36,94 persen dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp8.725.895.231,00. Sedangkan jika dilihat dari nilai Neto pada Tahun 2025 Aset Tak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp2.417.634.082,00 juga mengalami penurunan

senilai Rp1.053.571.339,00 dari nilai 3.471.205.421,00 di Tahun 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 84 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud

No	Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rupiah)
Saldo Awal per : 1 Januari 2025		8.725.895.231,00
Penambahan		
1)	Mutasi Masuk	40.000.000,00
2)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (ATB)	7.829.940,00
J u m l a h		47.829.940,00
Pengurangan		
3)	Mutasi Keluar	3.271.207.106,00
J u m l a h		3.271.207.106,00
Saldo per 31 Desember 2025		5.502.518.065,00

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

- Penambahan** Aset Tak Berwujud senilai **Rp47.829.940,00** bersumber dari penambahan dari:
- 1) Penambahan dari Realisasi belanja modal Aset Tak Berwujud sebesar Rp40.000.000,00;
 - 2) Penambahan yang bersumber dari Reklasifikasi belanja Gedung dan Bangunan ke Belanja Modal Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp7.829.940,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Pengurangan** Aset Tak Berwujud sebesar **Rp3.271.207.106,00** bersumber dari:
- 1) Mutasi keluar Aset Tak Berwujud dikarenakan pembayaran utang sebesar Rp40.000.000,00 pada Sekretariat DPRD;
 - 2) Penghapusan Aset Tak Berwujud senilai Rp3.231.207.106,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor:100.3.3.2/768/X/TAHUN 2025 Tanggal: 23 Oktober 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Dari Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025 yang terdiri dari: (1) senilai Rp110.800.000,00 pada Sekretariat Daerah; (2) senilai Rp91.194.477,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (3) senilai Rp49.800.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; (4) senilai Rp1.185.232.500,00 pada Dinas Kesehatan; (5) senilai Rp753.972.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (6) senilai Rp14.077.320,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; (7) senilai Rp3.120.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (8) senilai Rp4.870.372,00 pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan; (9) senilai Rp4.870.372,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan; (10) senilai Rp49.900.000,00 pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian; (11) senilai Rp731.500.657,00 pada Badan Pendapatan Daerah; (12) senilai Rp54.870.372,00 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP; (13) senilai Rp31.999.036,00 pada Badan Perencanaan Daerah; (14) senilai Rp145.000.000,00 pada Badan Kepegawaian dan PSDM.

Untuk mengetahui lebih jelas penyajian nilai Aset Tak Berwujud dengan nilai neto dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 85 Aset Tak Berwujud dan Amortisasi

No.	Nama SKPD	Harga Perolehan 2025 (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku/Neto (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	40.000.000,00	30.833.333,00	9.166.667,00
2.	Dinas PUPR	4.950.029.127,00	2.719.770.043,00	2.230.259.084,00
3.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	49.395.000,00	25.726.563,00	23.668.437,00

No.	Nama SKPD	Harga Perolehan 2025 (Rp)	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku/Neto (Rp)
4.	Dinas Perhubungan	29.431.438,00	9.197.325,00	20.234.113,00
5.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	182.432.500,00	151.312.761,00	31.119.739,00
6.	Badan Pendapatan Daerah	84.600.000,00	84.600.000,00	-
7.	Badan Perencanaan Daerah	130.000.000,00	35.208.333,00	94.791.667,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan	36.630.000,00	28.235.625,00	8.394.375,00
Jumlah Nilai Perolehan		5.502.518.065,00	3.084.883.983,00	2.417.634.082,00

Bahwa untuk nilai Aset Tak Berwujud (ATB) saldo per 31 Desember 2025 dengan nilai perolehan senilai Rp5.502.518.065,00 dan Amortisasi sebesar Rp3.084.883.983,00. Berikut rincian jenis barang aset tak berwujud pada masing-masing SKPD:

Tabel 5. 86 Rincian Jenis Barang Aset Tak Berwujud

No.	Nama SKPD	Jenis Barang	Jumlah barang (Buah)	Harga Perolehan 2025 (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	Software Lainnya	1	40.000.000,00
2.	Dinas PUPR	Kajian	40	4.950.029.127,00
3.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kajian Lainnya	1	49.395.000,00
4.	Dinas Perhubungan	Software	1	29.431.438,00
5.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	Kajian	4	42.678.500,00
6.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	Software	18	139.754.000,00
7.	Badan Pendapatan Daerah	Software	18	84.600.000,00
8.	Badan Perencanaan Daerah	Software	1	130.000.000,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan	Software	1	36.630.000,00
Jumlah			68	5.502.518.065,00

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Aset Lain-lain	61.531.351.073,79	62.428.242.355,45	(896.891.281,66)	(1,44)
Aset Rusak Berat/Usang	59.891.516.938,76	61.262.314.502,41	(1.370.797.563,65)	(2,24)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(54.261.420.435,93)	(55.667.176.781,58)	1.405.756.345,65	(2,53)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.639.834.135,03	1.165.927.853,04	473.906.281,99	40,65
Jumlah (Neto)	7.269.930.637,86	6.761.065.573,87	508.865.063,99	7,53

Aset lain (Aset Rusak Berat/Usang) tahun 2025 sebesar Rp59.891.516.938,76 nilai Netto Rp7.269.930.637,86 mengalami kenaikan sebesar 7,53 persen dari tahun 2024 dengan nilai sebesar Rp62.428.242.355,45 nilai Netto Rp6.761.065.573,87

Aset Lain-lain Tahun 2025 dengan nilai bruto senilai Rp61.531.351.073,79 yang terdiri dari: (1) Aset rusak berat/usang senilai Rp59.891.516.938,76 dan (2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp1.639.834.135,03 atau mengalami penurunan senilai Rp896.891.281,66 atau 1,44 persen daripada saldo bruto pada Tahun 2024 yang mencatat senilai Rp62.428.242.355,45.

Aset Lain-lain pada Tahun 2025 dengan nilai Neto senilai Rp7.269.930.637,86 yang terdiri dari: (1) nilai Neto Aset rusak berat/usang senilai Rp5.630.096.502,83 dan (2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

senilai Rp1.639.834.135,03 atau mengalami kenaikan senilai Rp473.906.281,99 atau 40,65 persen dari nilai Aset Lain-lain pada Tahun 2024 senilai Rp1.165.927.853,04.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional merupakan nilai aset hasil koreksi atas kekurangan volume, adapun rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 87 Rincian Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

No.	Uraian	Tahun	Harga Perolehan (Rp)
1.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Peralatan dan Mesin	2022	244.200.000,00
2.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Gedung dan Bangunan	2022	36.632.630,12
3.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2022	101.017.242,51
4.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Gedung dan Bangunan	2023	361.814.382,84
5.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2023	377.731.636,12
6.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Gedung dan Bangunan	2024	359.039.458,04
7.	Kekurangan Volume atas Belanja pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2024	159.398.785,40
Jumlah			1.639.834.135,03

Pemerintah Kabupaten Majene belum sepenuhnya melakukan penghapusan barang/aset rusak berat disebabkan karena beberapa aset rusak berat berupa kendaraan dinas memerlukan proses penilaian dari penilai pemerintah dalam hal ini KPKNL dan selanjutnya dilakukan lelang secara terbuka dan itu membutuhkan anggaran, sedangkan anggaran tidak tersedia, adapun sebab lain pada saat akan dilakukan proses pengecekan fisik atas barang yang diusulkan untuk dihapus SKPD (bendahara barang) tidak memperlihatkan fisik barang rusak berat tersebut.

Tabel 5. 88 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	0,00	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	49.433.785.042,33	47.313.466.978,03	2.120.318.064,30
3.	Gedung dan Bangunan	3.502.155.685,03	2.469.730.416,00	1.032.425.269,03
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.531.912.849,50	3.528.663.410,00	2.003.249.439,50
5.	Aset Tetap Lainnya	1.423.663.361,90	949.559.631,90	474.103.730,00
Jumlah		59.891.516.938,76	54.261.420.435,93	5.630.096.502,83

5.3.1.4.4. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	29.242.000,00	(29.242.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	29.242.000,00	(29.242.000,00)	(100,00)

Kas yang Dibatasi Penggunaannya berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp29.242.000,00 atau 100,00 persen dari nilai Kas yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2024 senilai Rp29.242.000,00.

5.3.1.5. Properti Investasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Properti Investasi	10.815.873.221,00	0,00	10.815.873.221,00	0,00
Jumlah	10.815.873.221,00	0,00	10.815.873.221,00	0,00

Properti investasi adalah aset berupa tanah, bangunan, atau keduanya yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai aset (*capital gain*), atau keduanya, bukan untuk digunakan sendiri, produksi, atau dijual dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Properti ini sering dianggap sebagai instrumen jangka panjang karena nilainya cenderung stabil dan meningkat seiring waktu. Properti investasi melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 17 (PSAP 17) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021. Kebijakan ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti yang bertujuan menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai aset, atau keduanya, terpisah dari aset tetap operasional.

Properti Investasi Tanah pada tahun 2025 senilai Rp10.815.873.221,00 terdapat pada Sekretariat Daerah senilai Rp10.749.317.900,00 dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian senilai Rp66.555.321,00. Dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 89 Rincian Properti Investasi

SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.136.800.000,00	Pusat Pertokoan IV
Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	3.370.380.000,00	Pusat Pertokoan I
Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	981.000.000,00	Pusat Pertokoan II
Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	564.750.000,00	Pusat Pertokoan III
Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Gudang	1.126.387.900,00	Gedung Assamalewuang
Sekretariat Daerah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.570.000.000,00	Perwakilan Pemda Majene
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	51.387.400,00	Tanah Milik Dinas Koperasi/Tempat Pengisian Galon
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	15.167.921,00	Tanah Milik Dinas Koperasi
Jumlah		10.815.873.221,00	

Tanah dan Bangunan Pusat pertokoan adalah tempat yang digunakan untuk aktivitas jual beli dan setiap penggunaan Ruko tersebut dikenakan retribusi atas pemanfaatan aset daerah, Gedung Assamalewuang difungsi untuk kegiatan-kegiatan bersifat seremonial yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dan ditarik sewa atas penggunaan gedung berdasarkan acara apa yang dilaksanakan di gedung tersebut seperti acara pernikahan, wisuda atau pertemuan lainnya, dan dua tanah Milik Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam kondisi idle belum ada penentuan penggunaannya.

5.3.2. KEWAJIBAN

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Kewajiban	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33	(19.226.702.604,33)	(27,66)
Jumlah	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33	(19.226.702.604,33)	(27,66)

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.294.367.073,00 yang mengalami penurunan sebesar (Rp19.226.702.604,33) atau sebesar 27,66 persen .
persen dari tahun sebelumnya

Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp50.294.367.073,00 sedangkan pada periode sebelumnya pada Tahun 2024 senilai Rp69.521.069.677,33. Saldo kewajiban tersebut mengalami penurunan senilai Rp19.226.702.604,33 atau sebesar 27,66 persen dari tahun sebelumnya. Kewajiban terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp50.294.367.073,00 dan Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp0,00. Kewajiban Jangka Pendek yang mengalami Kenaikan yaitu Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan pendapatan diterima dimuka dan Kewajiban Jangka Pendek yang mengalami Penurunan yaitu Utang Belanja.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Kewajiban Jangka Pendek	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33	(19.226.702.604,33)	(27,66)
Jumlah	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33	(19.226.702.604,33)	(27,66)

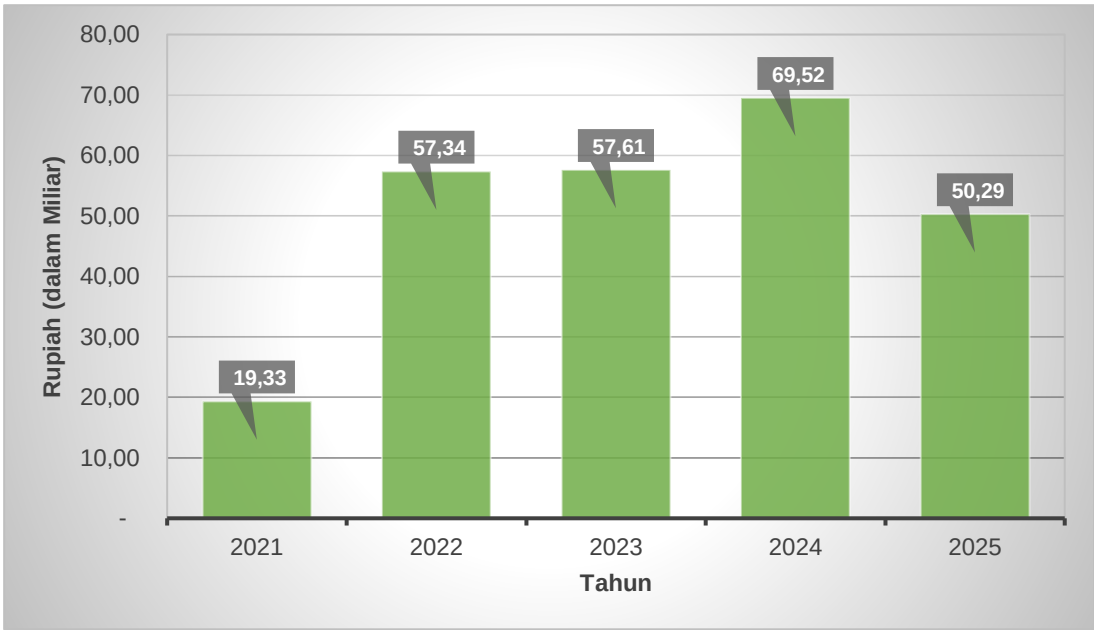
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.294.367.073,00 yang mengalami penurunan sebesar (Rp19.226.702.604,33) atau sebesar 27,66 persen dari tahun sebelumnya

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp50.294.367.073,00 yang terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga senilai Rp40.545.392, Pendapatan diterima dimuka senilai Rp82.500.000 dan Utang belanja senilai Rp50.171.321.681,00 dan Tahun 2024 senilai Rp69.521.069.677,33. Saldo tersebut mengalami penurunan senilai Rp19.226.702.604,33 atau sebesar 27,66 persen. Berikut tabel rincian kewajiban jangka pendek tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 90 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Kewajiban Jangka Pendek					
1	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	40.545.392,00	13.841.239,00	26.704.153,00	192,93
2	Pendapatan Diterima Dimuka	82.500.000,00	3.583.333,33	78.916.666,67	2202,32
3	Utang Belanja	50.171.321.681,00	69.503.645.105,00	(19.332.323.424,00)	(27,81)
	Jumlah	50.294.367.073,00	69.521.069.677,33	(19.226.702.604,33)	(27,66)

Tren Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 5. 26 Komposisi Kewajiban Jangka Pendek 2025

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar. Dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman dalam negeri (obligasi). Pinjaman lembaga internasional, Pinjaman dari pemerintah lain, atau pinjaman lembaga keuangan dalam negeri. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Karakteristik kewajiban jangka pendek yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang relatif cepat. Maka kewajiban jangka pendek menjadi salah satu indikator dalam analisis laporan keuangan pada aspek solvabilitas.

1) Analisis Rasio Solvabilitas – Debt to Equity

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah. Baik kewajiban jangka panjang ataupun jangka pendek. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset pemerintah dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung pemerintah dibandingkan dengan asetnya. Rasio solvabilitas – Debt to Equity dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan total ekuitas. Rasio solvabilitas – Debt to Equity Pemerintah Kabupaten Majene selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 91 Tren Rasio Solvabilitas – Debt to Equity Kabupaten Majene 2021-2025

Tahun	Utang (Rp)	Ekuitas (Rp)	Debt to Equity Ratio
2021	19.331.177.833,82	1.591.813.548.616,05	0,0121
2022	57.415.812.749,33	1.500.805.258.062,52	0,0382
2023	57.608.887.592,45	1.628.208.973.061,58	0,0354
2024	69.521.069.677,33	1.602.237.782.484,35	0,0434
2025	50.294.367.073,00	1.565.032.932.878,19	0,0321

Rasio solvabilitas Debt to Equity Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 0,0321 dan jika dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,0434 maka diketahui bahwa terdapat penurunan rasio solvabilitas Debt to Equity sebesar

0,0113. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan utang Tahun 2025 yang bersumber dari pembayaran kewajiban jangka pendek Tahun 2025. Adapun rasio solvabilitas *Debt to Equity* paling rendah terjadi pada Tahun Anggaran 2021. Namun secara umum rasio solvabilitas *Debt to Equity* Pemerintah Kabupaten Majene masih relatif sangat kecil atau dapat dikatakan dalam batas aman.

2) Analisis Rasio Solvabilitas – *Debt to Assets*

Rasio solvabilitas *Debt to Assets* dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan total aset pemerintah daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang Pemerintah Daerah yang berpengaruh terhadap pembiayaan dari aset. Semakin tinggi rasio ini semakin besar risiko yang dihadapi. Sehingga dengan demikian, rasio ini merupakan indikator sejauh mana utang Pemerintah Daerah dapat ditutupi dengan aset yang dimilikinya. Tabel di bawah ini merupakan daftar rasio solvabilitas – *Debt to Assets* Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020-2025.

Tabel 5. 92 Tren Rasio Solvabilitas – *Debt to Assets* Kabupaten Majene 2021-2025

Tahun	Utang (Rp)	Aset (Rp)	<i>Debt to Assets Ratio</i>
2021	19.331.177.833,82	1.611.222.196.425,87	0,0120
2022	57.415.812.749,33	1.558.221.070.811,85	0,0368
2023	57.608.887.592,45	1.685.817.860.654,03	0,0342
2024	69.521.069.677,33	1.671.758.852.161,68	0,0415
2025	50.294.367.073,00	1.615.327.299.951,19	0,0311

Dalam kurun waktu lima Tahun, rasio solvabilitas *Debt to Assets* Pemerintah Kabupaten Majene mengalami peningkatan tajam Tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 0,0248 poin hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah utang yang cukup signifikan. Antara Tahun 2021 hingga 2022 dan terjadi penurunan pada Tahun 2023 sebesar 0,0026, dan selanjutnya kenaikan rasio solvabilitas *Debt to Assets* kembali terjadi Tahun 2024, dan pada Tahun 2025 mengalami Penurunan sebesar 0,0104, Adapun rasio paling rendah terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 0,0120 dan tertinggi Tahun 2024 yaitu sebesar 0,0415. Berdasarkan rasio tersebut diketahui bahwa aset Pemerintah Kabupaten Majene dapat menjamin utang yang dimiliki.

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	40.545.392,00	13.841.239,00	26.704.153,00	192,93
Jumlah	40.545.392,00	13.841.239,00	26.704.153,00	192,93

Utang PFK menurut PSAP 09 paragraf 5 adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum. Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp40.545.392,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersebut terdapat pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga yakni SMP Negeri 6 Majene, SD 7 Taukong, SD 39 Manyamba dan SD 26 Adolang Adapun Rincian utang Perhitungan Pihak ketiga untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran 6** dalam catatan laporan keuangan ini. Berikut daftar utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 93 Daftar Utang PFK per 31 Desember 2025		
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26.366.684,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21)	10.507.326,00
3	Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH 22)	2.450.551,00
4	Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23)	18.000,00
5	Iuran Jaminan Kesehatan	1.202.831,00
Jumlah		40.545.392,00

Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 5. 94 Rincian utang perhitungan pihak ketiga							
No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Utang Iuran jaminan kesehatan	Utang PPh21 (Rp)	Utang PPh 22 (Rp)	Utang PPh 23 (Rp)	Utang PPN (Rp)	Total Utang PFK (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	0,00	1.030.050,00	0,00	18.000,00	2.115.600,00	3.163.650,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	5.089.970,00	1.657.034,00	0,00	19.259.417,00	26.006.421,00
3.	Puskesmas Lembang	518.070,00	1.295.175,00	0,00	0,00	0,00	1.813.245,00
4.	Puskesmas Totoli	684.761,00	809.393,00	0,00	0,00	0,00	1.494.154,00
5.	Puskesmas Sendana I	0,00	0,00	184.107,00	0,00	522.654,00	706.761,00
6.	Puskesmas Malunda	0,00	2.282.738,00	609.410,00	0,00	4.469.013,00	7.361.161,00
Jumlah		1.202.831,00	10.507.326,00	2.450.551,00	18.000,00	26.366.684,00	40.545.392,00

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Diterima Dimuka				
- Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi	82.500.000,00	3.583.333,33	78.916.666,67	2202,32
Jumlah	82.500.000,00	3.583.333,33	78.916.666,67	2202,32

Pendapatan Diterima Dimuka atas retribusi penyewaan kekayaan sebesar Rp82.500.000,00 tercatat pada Sekretariat Daerah.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di kas daerah tetapi belum menjadi hak Pemerintah Daerah karena masih terdapat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di kas daerah tersebut.

Dalam pengelolaan dan pencatatan pendapatan daerah yang berlangsung di Kabupaten Majene, transaksi penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka diberlakukan pada 2 (dua) sumber pendapatan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pendapatan Diterima Dimuka Pajak, wajib pajak menyetorkan beban pajak kepada Pemerintah Daerah atas suatu hak yang dapat dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah. Begitu juga dengan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi di mana masyarakat membayarkan retribusi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh suatu hak atas barang/jasa yang dimiliki pemerintah. Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun 2025 hanya terdapat pada satu SKPD pada Sekretariat Daerah yaitu penyewaan sebagian tanah dari untuk fasilitas ATM kepada Bank Sulselbar Cabang Majene dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Diketahui terdapat Pendapatan Diterima Dimuka dari Retribusi Daerah tercatat pada Sekretariat Daerah atas sewa lahan dan bangunan, per 31 Desember 2025 terdapat saldo senilai Rp82.500.000,00. Saldo tersebut dicatat dan diakui atas Pendapatan Diterima Dimuka yang timbul pada TA 2025. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 95 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
1.	Sekretariat Daerah	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Atas Sewa Tanah Dan Gedung	82.500.000,00	3.583.333,33	78.916.666,67	2202,32
Jumlah			82.500.000,00	3.583.333,33	78.916.666,67	2202,32

Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan perjanjian sewa lahan yang dikelola tercatat pada Sekretariat Daerah terdiri atas PT. Bank Sulselbar Cabang Majene dengan Kontrak Nomor 134.4/08/Ks-Lembaga/V/2025 Tanggal 05 Mei 2025 menghasilkan pendapatan diterima dimuka senilai Rp80.000.000,00 sampai per 31 Desember 2025. Begitu pun pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Kontrak Nomor 134.4/04/Ks-Lembaga/II/2025 Tanggal 19 Februari 2025 juga menghasilkan pendapatan diterima dimuka senilai Rp2.500.000,00 per 31 Desember 2025. Sehingga total Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp82.500.000,00.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan perjanjian sewa lahan yang dikelola dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 96 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Perjanjian Sewa Lahan

No.	Nama Penyewa	Waktu Perjanjian	Sewa/Tahun (Rp)	Jumlah/Total (Rp)	Pendapatan Diterima Muka (Rp)
1	PT Bank Rakyat Indonesia a. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Halaman Kantor Bupati Majene b. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan Tanah Ex. Kantor Dispenda Jl. Sultan Hasanuddin, Lembang c. Sewa Menyewa Lahan Pembangunan ATM Pada Lahan RSUD Majene Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Baru Kec. Banggae	19/02/2025 1 Tahun (19 Februari 2025 s/d 19 Februari 2026)	30.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000,00
2	PT Bank SulSelbar Cab,Majene a.Sewa Menyewa lahan Pembangunan ATM pada lahan Tanah Halaman Depan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga. b. Sewa menyewa Lahan Pembangunan ATM pada lahan tanah Halaman kantor Satpol PP Kab.Majene	05/05/2026 5 Tahun (1 Januari 2025 s/d 1 Januari 2030)	20.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00
Jumlah			50.000.000,00	130.000.000,00	82.500.000,00

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Utang Belanja	50.171.321.681,00	69.503.645.105,00	(19.332.323.424,00)	(27,81)
Jumlah	50.171.321.681,00	69.503.645.105,00	(19.332.323.424,00)	(27,81)

Utang Belanja per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp50.171.321.681,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 senilai Rp50.171.321.681,00 per 31 Desember 2024 senilai Rp69.503.645.105,00 di mana terjadi penurunan senilai Rp19.332.323.424,00 atau 27,81 persen. Utang senilai Rp50.171.321.681,00 merupakan sisa utang Tahun 2020 hingga 2024 serta penambahan utang baru pada Tahun 2025 yang hingga akhir periode belum terbayarkan, berikut rincian utang per jenis belanja Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025:

Tabel 5. 97 Rincian Utang Perjenis Belanja Tahun 2020 s.d. 2025

No	Utang Perjenis Belanja	Tahun						Total
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00	3.396.795.472,00	3.746.346.206,00	4.340.068.856,00	304.917.988,00	11.788.128.522,00
2	Utang Belanja Barang Jasa	0,00	0,00	2.023.878.411,00	57.123.600,00	9.087.703.686,00	20.444.055.196,00	31.612.760.893,00
3	Utang Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227.900,00	0,00	17.227.900,00
4.	Utang Belanja Modal	2.000.000,00	0,00	52.186.700,00	17.710.555,00	4.340.578.639,00	2.080.728.472,00	6.493.204.366,00
5.	Utang Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	260.000.000,00	0	0	0	260.000.000,00
Total		2.000.000,00	0,00	5.732.860.583,00	3.821.180.361,00	17.785.579.081,00	22.829.701.656,00	50.171.321.681,00

Rekapitulasi Utang Perjenis Belanja Masing-Masing SKPD Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 7** , Adapun rincian utang belanja berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 98 Utang Belanja Menurut Jenisnya s.d. 31 Desember 2025

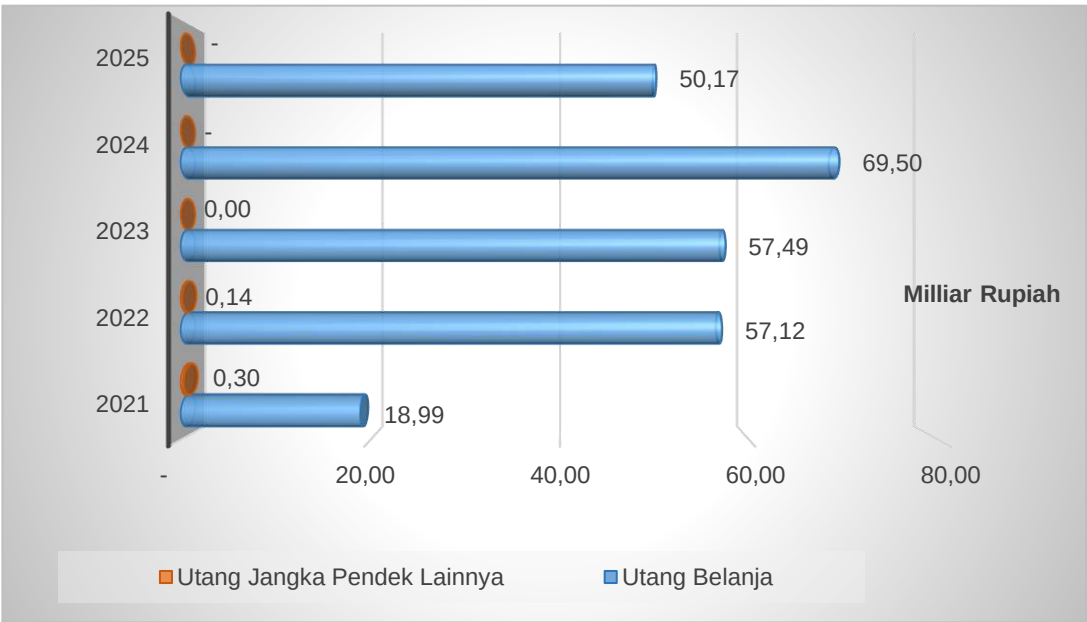
No.	Jenis	Total Utang s.d 2025 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	11.788.128.522,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	31.612.760.893,00
3	Utang Belanja Hibah	17.227.900,00
4	Utang Belanja Modal Tanah	5.956.700,00
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.509.220.870,00
6	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.748.863.551,00
7	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.099.163.245,00
8	Utang Belanja Tak Terduga	260.000.000,00
9	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	130.000.000,00
Jumlah		50.171.321.681,00

Untuk Lampiran Daftar Jenis Utang, Tahun, dan SKPD per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 8**

Kewajiban jangka pendek tersebut berdasarkan kriterianya disajikan pada jenis Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang Belanja senilai Rp50.171.321.681,00 merupakan sisa utang tahun 2020 hingga tahun 2025. Dalam Utang Belanja terdapat sisa Utang Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp1,00 hal ini dikarenakan saldo Utang Bantuan Keuangan tahun lalu senilai Rp6.957.392.386,00 dilakukan permintaan pencairan SP2D Senilai Rp6.957.392.385,00 berdasarkan SP2D No. 76.05/04.0/000002/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/ M/2/2025 tanggal 15 Januari 2025 dan utang yang diakui pada Tahun 2025 berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Nomor 700.07/3/2026 tanggal 02 Maret 2026, LHR Nomor 700.08/3/2026 tanggal 02 Maret 2026, dan LHR Nomor: 700.06/III/2025 tanggal 02 Maret 2025.

Dan adapun Rincian jumlah utang belanja per SKPD dan pembayarannya sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Berikut perkembangan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2022 sampai Tahun 2025 yang disajikan pada grafik berikut:



Grafik 5. 27 Perkembangan Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya 2021-2025

5.3.3. EKUITAS

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Ekuitas	1.565.032.932.878,19	1.602.237.782.484,35	(37.204.849.606,16)	(2,32)
Jumlah	1.565.032.932.878,19	1.602.237.782.484,35	(37.204.849.606,16)	(2,32)

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Posisi ekuitas Pemerintah Daerah pada setiap periodenya dapat dijadikan indikator penilaian kinerja keuangan maupun operasional Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Utamanya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp1.565.032.932.878,19 atau turun sebesar 2,32 persen dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2024 yang tercatat senilai Rp1.602.237.782.484,35. Ekuitas tersebut merupakan Ekuitas Awal yang ditambah/dikurang Surplus/Defisit LO. Kemudian ditambah/dikurang Koreksi Ekuitas serta Perubahan Kebijakan Mendasar Lainnya. Rincian saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 99 Saldo Ekuitas 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Ekuitas Awal	1.602.237.782.484,35
Surplus / Defisit-LO	(37.794.744.902,82)
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	589.895.296,66
Ekuitas Akhir	1.565.032.932.878,19

Pada periode Tahun 2025, terdapat perubahan-perubahan yang menambah dan mengurangi ekuitas pemerintah daerah. Perubahan tersebut yaitu karena adanya Defisit-LO dan terdapat koreksi-koreksi ekuitas SKPD yang disajikan pada akun Koreksi Ekuitas Lainnya. Koreksi Ekuitas disebabkan oleh perubahan nilai aset tetap akibat reklas dan mutasi antar SKPD, perubahan nilai piutang, perubahan nilai utang. Penjelasan atas Koreksi Ekuitas Lainnya dapat dilihat pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.

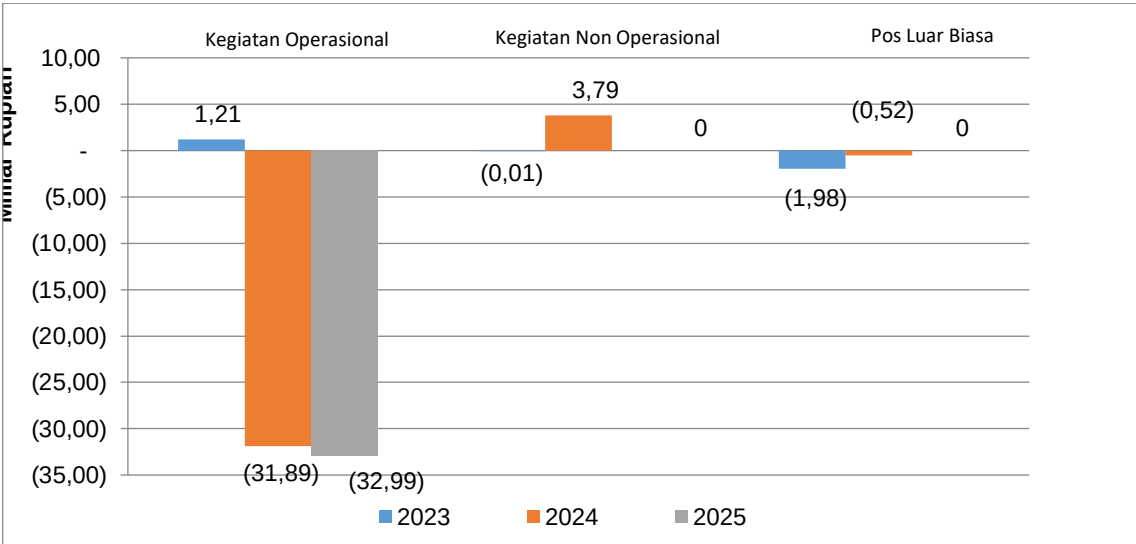
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2025 tercatat sebesar (Rp37.794.744.902,82)

Laporan operasional adalah salah satu unsur dalam laporan keuangan yang menggambarkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO.

Penyelenggaraan operasional Pemerintah Kabupaten Majene selama Tahun pelaporan 2025 mencatatkan Defisit-LO senilai (Rp37.794.744.902,82) dimana nilai ini mengalami kenaikan senilai (Rp9.183.506.356,49) atau sebesar 32,10 persen dibandingkan Defisit-LO pada Tahun 2024 senilai (Rp28.611.238.546,33). Surplus/(Defisit) LO Tahun 2025 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp32.988.599.380,25) dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai (Rp2.306.566.437,57) kemudian Pos Luar Biasa tercatat senilai (Rp2.499.579.085,00).

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 diperoleh dari Pendapatan Operasional senilai Rp847.706.615.831,17 dan Beban Operasional senilai Rp880.695.215.211,42. Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2025 tercatat senilai (Rp2.306.566.437,57) yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencatatkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional senilai Rp3.792.996.469,07. Laporan Operasional Tahun 2025 menyajikan angka Tahun 2024 sebagai pembandingan. Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2023 (dalam miliar) dapat dilihat pada grafik berikut.



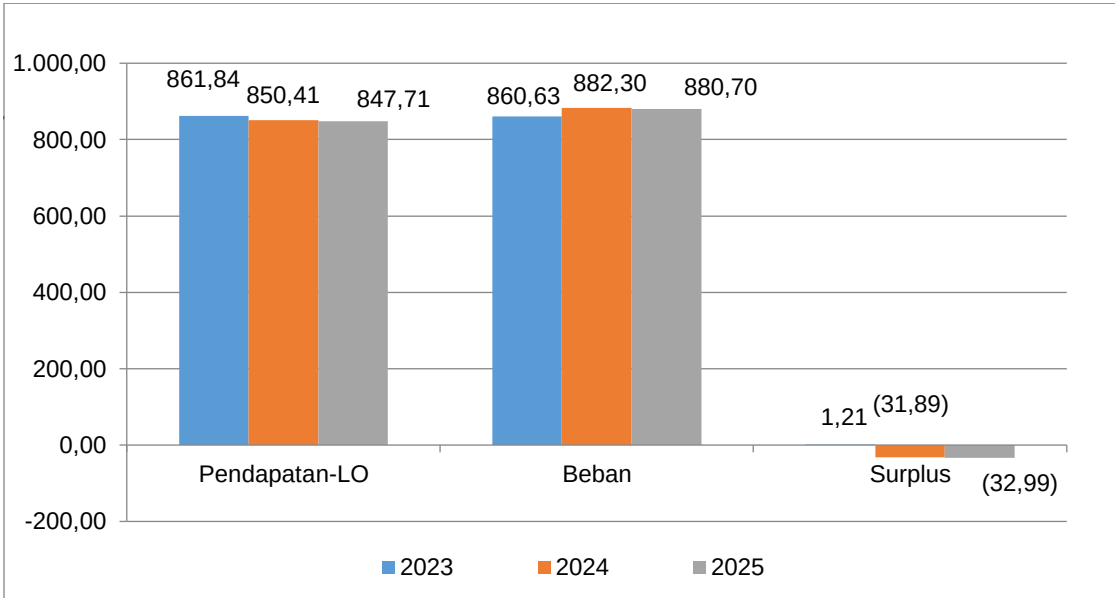
Grafik 5. 28 Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2023-2025

5.4.1. Kegiatan Operasional

Defisit dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Majene tercatat sebesar (Rp32.988.599.380,25) dari Pendapatan Operasional sebesar Rp847.706.615.831,17 dan Beban Operasional sebesar Rp880.695.215.211,42

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah tercermin dalam Pendapatan – LO, Beban – LO, dan Surplus/Defisit Operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Operasional secara keseluruhan merupakan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO, Pendapatan Transfer – LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO. Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BLUD, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain.

Selama periode Tahun 2025, nilai defisit dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Majene tercatat senilai (Rp32.988.599.380,25) yang diperoleh dari Pendapatan Operasional senilai Rp847.706.615.831,17 dan Beban Operasional senilai Rp880.695.215.211,42. Perbandingan pendapatan, beban, dan surplus dari kegiatan operasional Tahun 2023-2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 29 Kegiatan Operasional 2023-2025

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2023-2025, Beban Operasional pada Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data Tahun 2024, dan Pendapatan-LO 2025 juga mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional, Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 sudah optimal dalam merealisasikan pendapatan daerah. Dari perbandingan data tersebut bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene masih perlu mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang menimbulkan beban di periode berjalan. Pendapatan-LO Tahun 2025 mengalami penurunan pada kelompok Pendapatan Transfer tetapi mengalami kenaikan signifikan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

5.4.1.1. Pendapatan – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan – LO	847.706.615.831,17	850.414.371.243,55	(2.707.755.412,38)	(0,32)
Jumlah	847.706.615.831,17	850.414.371.243,55	(2.707.755.412,38)	(0,32)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp847.706.615.831,17

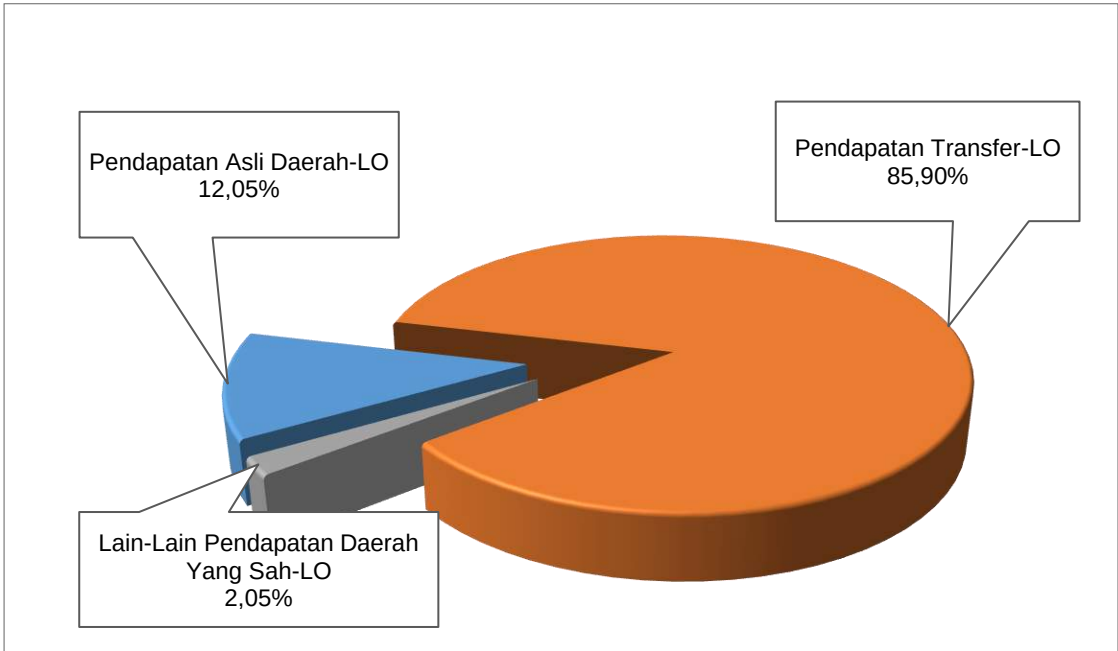
Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah. Yang dihasilkan oleh transaksi operasional yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2025 senilai Rp847.706.615.831,17 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO senilai Rp102.127.985.123,17, Pendapatan Transfer – LO senilai Rp728.196.526.569,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sampai dengan akhir TA 2025 senilai Rp17.382.104.139,00. Rincian Pendapatan – LO TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 100 Rincian Pendapatan LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	102.127.985.123,17	92.982.251.284,55
Pendapatan Pajak Daerah – LO	16.953.772.894,25	12.164.320.098,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	75.282.747.855,33	75.608.092.284,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	6.356.853.301,59	1.882.647.719,55
PENDAPATAN TRANSFER – LO	728.196.526.569,00	756.198.582.685,00
Pendapatan Transfer Pem. Pusat – Dana Perimbangan –LO	712.366.763.533,00	727.357.034.110,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	15.829.763.036,00	28.841.548.575,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	17.382.104.139,00	1.233.537.274,00
Pendapatan Hibah – LO	17.382.104.139,00	1.233.537.274,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO	0,00	0,00
Jumlah	847.706.615.831,17	850.414.371.243,55

Komposisi Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Majene pada TA 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5. 30 Komposisi Pendapatan – LO TA 2025

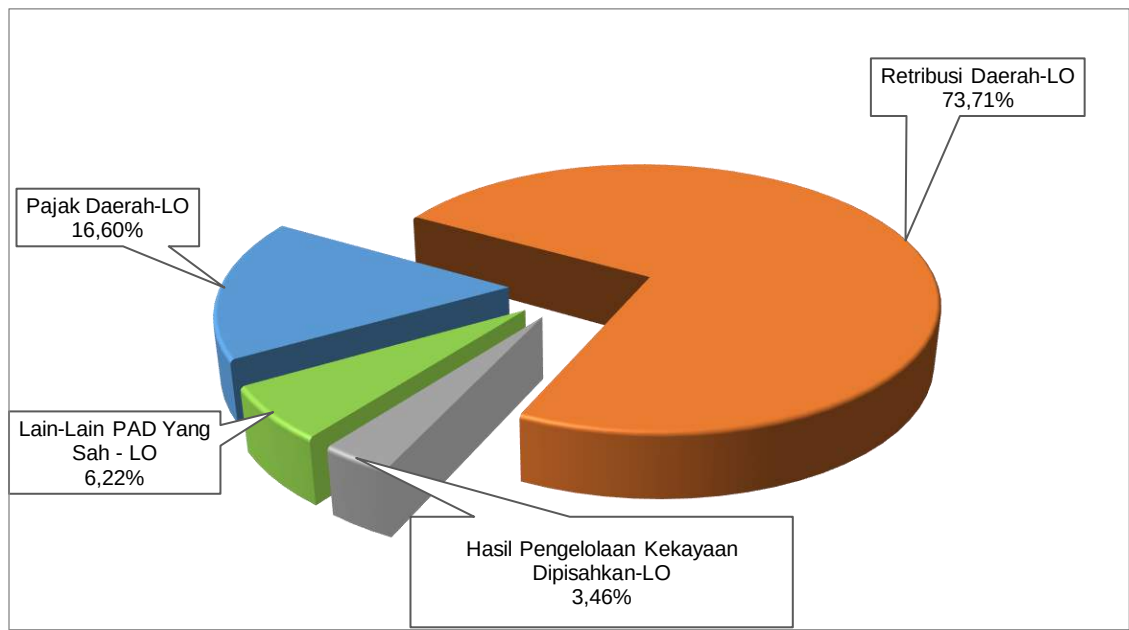
5.4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional pada TA 2025 senilai Rp102.127.985.123,17. Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp9.145.733.838,62 atau sebesar 9,84 persen dibanding Tahun 2024 di mana tercatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO terealisasi senilai Rp92.982.251.284,55. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5. 101 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	16.953.772.894,25	12.164.320.098,00
Pendapatan Retribusi Daerah	75.282.747.855,33	75.608.092.284,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.356.853.301,59	1.882.647.719,55
Jumlah	102.127.985.123,17	92.982.251.284,55

Komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada TA 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 31 Komponen Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Majene TA 2025

Secara rinci tentang Pendapatan Asli Daerah – LO dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak Daerah – LO	16.953.772.894,25
Pajak Reklame – LO	250.161.000,00
Pajak Air Tanah	5.717.423,08
Pajak Sarang Burung Walet – LO	1.900.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	273.339.345,17
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	1.528.417.855,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	621.498.100,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	8.165.779.643,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	3.509.694.628,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	2.597.264.900,00
Retribusi – LO	75.282.747.855,33
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	71.448.770.629,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	352.819.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	730.355.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	955.453.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	15.150.000,00

Uraian	Jumlah (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	398.825.333,33
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	131.350.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	219.829.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	402.929.900,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	19.008.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	608.257.993,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	3.534.611.072,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO	3.534.611.072,00
Lain-Lain PAD yang Sah – LO	6.356.853.301,59
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya – LO	10.000.000,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain – LO	20.449.800,00
Jasa Giro pada Kas Daerah – LO	1.003.966.443,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah – LO	285.582.324,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – LO	1.322.515.802,59
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran – LO	40.000,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) – LO	1.597.444,00
Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	1.509.686,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	32.509.029,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	197.126,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	3.678.485.647,00
Jumlah	102.127.985.123,17

5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Pendapatan Transfer	728.196.526.569,00	756.198.582.685,00	(28.002.056.116,00)	(3,70)
Jumlah	728.196.526.569,00	756.198.582.685,00	(28.002.056.116,00)	(3,70)

Pendapatan Transfer – LO per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp728.196.526.569,00 Pendapatan jenis ini mengalami penurunan senilai Rp28.002.056.116,00 atau 3,70 persen dari tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan Transfer – LO dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 102 Rincian Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Jumlah (Rp)
a) Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO	712.366.763.533,00
1) DBH Pajak-LO	3.519.130.300,00
2) DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	1.578.121.000,00
3) DBH Lainnya-LO	508.075.000,00
4) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	415.300.422.500,00
5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	129.076.214.460,00
6) DAK Fisik-LO	24.111.344.842,00
7) DAK Nonfisik-LO	138.273.455.431,00

Uraian	Jumlah (Rp)
b) Transfer Antar Daerah – LO	15.829.763.036,00
1) Pendapatan Bagi Hasil – LO	15.829.763.036,00
Jumlah	728.196.526.569,00

5.4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	17.382.104.139,00	1.233.537.274,00	16.148.566.865,00	1.309,13
Jumlah	17.382.104.139,00	1.233.537.274,00	16.148.566.865,00	1.309,13

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp17.382.104.139,00 sedangkan pada Tahun 2024 tercatat senilai Rp1.233.537.274,00. Pendapatan ini mengalami kenaikan signifikan senilai Rp16.148.566.865,00 atau 1.309,13 persen dari tahun sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari penambahan hibah aset yang berasal dari beberapa SKPD, yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menerima hibah senilai Rp15.772.712.139,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan senilai Rp744.392.000,00 dan Rp575.000.000,00 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga senilai Rp290.000.000,00. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 103 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

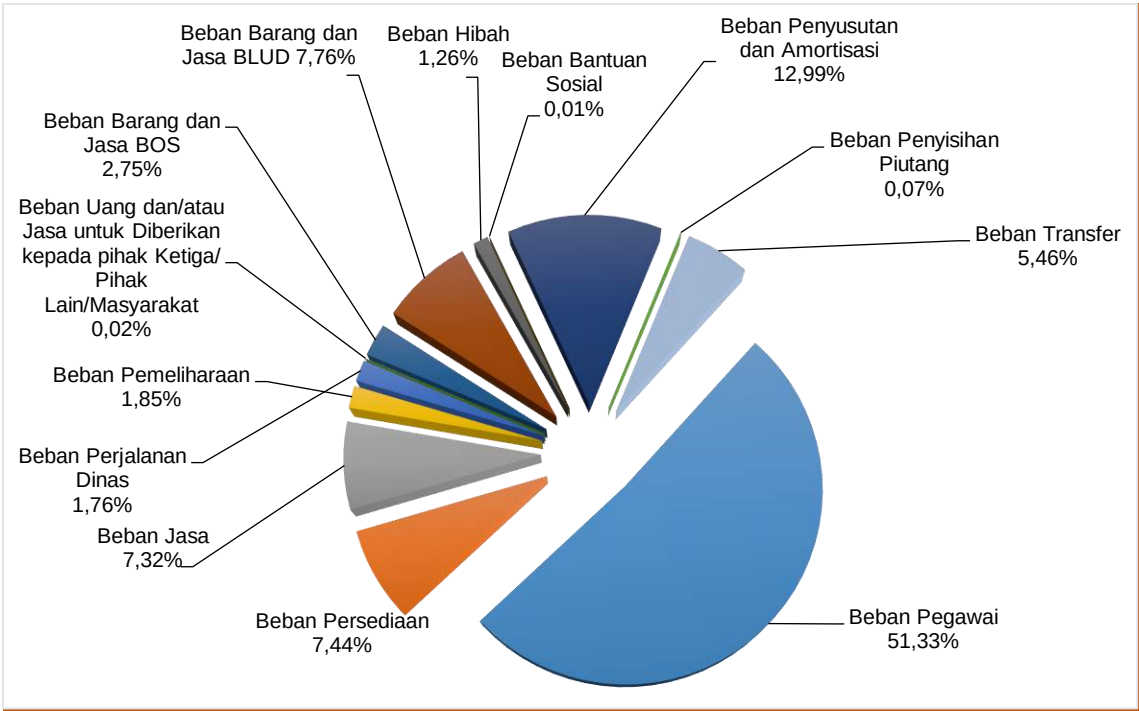
Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	15.772.712.139,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	744.392.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	290.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO	575.000.000,00
Jumlah	17.382.104.139,00

5.4.1.2. Beban – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban – LO	880.695.215.211,42	882.299.940.615,95	(1.604.725.404,53)	(0,18)
Jumlah	880.695.215.211,42	882.299.940.615,95	(1.604.725.404,53)	(0,18)

Beban-LO Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2025 adalah sebesar Rp880.695.215.211,42

Beban – LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional Tahun 2025 adalah senilai Rp880.695.215.211,42. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.604.725.404,53 atau 0,18 persen dibandingkan Tahun 2024 senilai Rp882.299.940.615,95. Perbandingan besaran Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Majene pada TA 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 32 Perbandingan Beban Operasi TA 2025

Beban untuk Laporan Operasional per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 senilai Rp880.695.215.211,42 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 104 Rincian Beban Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban – LO		
Beban Pegawai – LO	452.057.328.693,00	430.946.033.222,00
Beban Barang – LO	65.515.253.582,63	46.374.026.348,79
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	984.388.239,00
Beban Jasa – LO	64.428.117.169,00	67.412.320.035,00
Beban Pemeliharaan – LO	16.280.052.167,78	11.198.663.296,00
Beban Perjalanan Dinas – LO	15.494.004.886,00	21.974.998.320,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat – LO	159.500.000,00	128.450.000,00
Beban Hibah – LO	11.109.367.000,00	38.293.146.305,00
Beban Bantuan Sosial – LO	59.040.000,00	63.360.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	114.358.997.167,50	108.864.386.901,29
Beban penyisihan Piutang – LO	606.386.783,80	704.124.143,32
Beban Transfer – LO	48.051.945.661,00	55.178.321.370,98
Beban Barang dan Jasa BOS	24.247.376.270,00	25.397.107.624,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	68.327.845.830,71	74.780.614.810,57
Jumlah	880.695.215.211,42	882.299.940.615,95

5.4.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp452.057.328.693,00. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5. 105 Beban Pegawai

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Gaji Pokok ASN	274.732.694.773,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	23.703.946.762,00
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.987.840.000,00
4.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	15.156.361.000,00
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.558.795.000,00
6.	Beban Tunjangan Beras ASN	14.462.460.860,00
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	598.960.868,00
8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	4.007.888,00
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.285.648.487,00
10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	571.919.936,00
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.715.748.887,00
12.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.449.000.000,00
13.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.393.202.049,00
14.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00
15.	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00
16.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00
17.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	304.917.988,00
18.	Beban Honorarium	0,00
19.	Beban Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
20.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	43.570.800,00
21.	Beban Tunjangan Beras DPRD	65.902.200,00
22.	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00
23.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
24.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	86.051.700,00
25.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.666.525,00
26.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
27.	Beban Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00
28.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	331.660,00
29.	Beban Pembulatan Gaji DPRD	17.368,00
30.	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	809.283.888,00
31.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.403.000.000,00
32.	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00
33.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	70.800.000,00
34.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.532.000,00
35.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.760.000,00
36.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.431.500,00
37.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	873.354,00
38.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.600,00
39.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	6.264.000,00
40.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	146.880,00
41.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	440.640,00

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
42.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00
43.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
44.	Beban Pegawai BLUD	216.464.080,00
	Jumlah	452.057.328.693,00

5.4.1.2.2. **Beban Barang**

Beban barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang pakai habis. Barang periode 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten Majene adalah senilai Rp65.515.253.582,63 Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp18.156.838.994,84 dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp47.358.414.587,79.

Barang-barang yang pada akhir tahun tidak habis digunakan berdasarkan PSAP Nomor 05 pada akhir periode pencatatan dicatat sebagai persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen-komponen rambu-rambu, dan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi seperti Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang. Pada tabel berikut rincian Beban Barang pada akhir TA 2025 Pemerintah Kabupaten Majene.

Tabel 5. 106 Beban Barang

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	249.017.300,00
2.	Beban Bahan-Bahan Kimia	8.200.000,00
3.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	692.766.390,00
4.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.018.667.786,00
5.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	275.065.629,00
6.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.039.642.054,00
7.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.510.000,00
8.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00
9.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	178.975.200,00
10.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	179.529.397,00
11.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00
12.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00
13.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.386.189.596,00
14.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	297.055.400,00
15.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.172.485.543,00
16.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00
17.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	221.138.450,00
18.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	263.872.000,00
19.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	389.557.600,00
20.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	385.042.500,00
21.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	94.600.000,00
22.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	150.030.000,00
23.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.820.000,00
24.	Beban Obat-Obatan-Obat	1.501.768.292,62

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
25.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.490.545.503,02
26.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	36.284.926.503,99
27.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.729.844.140,00
28.	Beban Natura dan Pakan-Natura	3.669.990.105,00
29.	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	14.430.000,00
30.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.969.924.344,00
31.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.612.448.949,00
32.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.480.000,00
33.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00
34.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	39.240.000,00
35.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00
36.	Beban Pakaian Olahraga	15.000.000,00
37.	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu (beban tak pakai habis)	5.085.000,00
38.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	148.405.900,00
Jumlah		65.515.253.582,63

Penjelasan sebelumnya atas pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada jenis Belanja Barang dan Jasa mencatat realisasi senilai Rp259.163.085.597,78 per 31 Desember 2025. Di antara komponen Belanja Barang dan Jasa tersebut, terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan senilai Rp65.515.253.582,63 . Dibandingkan dengan saldo beban barang Tahun Anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp46.374.026.348,79 maka dapat dikatakan terdapat beberapa transaksi yang memengaruhi saldo beban persediaan selain dari pembelian persediaan. Penjelasan transaksi yang memengaruhi beban persediaan di tahun berjalan dapat diuraikan secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. 107 Transaksi Memengaruhi Saldo Beban Persediaan di Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Menambah beban persediaan di Tahun berjalan	30.507.961.705,46
	a. Penambahan beban persediaan atas jurnal balik persediaan untuk penghapusan persediaan Tahun sebelumnya	28.900.810.511,46
	b. Beban persediaan akibat reklas dari aset tetap ke Beban Barang (Persediaan)	642.914.822,00
	c. Penambahan beban atas utang persediaan yang timbul di Tahun berjalan	964.236.372,00
2.	Mengurangi beban persediaan di Tahun berjalan	(25.199.001.513,83)
	a. Pengurangan beban persediaan karena adanya reklas belanja barjas ke aset tetap	(31.321.000,00)
	b. Pengurangan beban persediaan atas utang Tahun sebelumnya yang terbayar di Tahun 2025	(5.255.207.614,00)
	c. Pengurangan beban persediaan karena jurnal penyesuaian atas pengakuan persediaan baru	(19.912.472.899,83)
Akumulasi Penambahan (Pengurangan) Tahun 2025		5.308.960.191,63

5.4.1.2.3. Beban Jasa-LO

Beban Jasa dalam Laporan Operasional adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi dalam periode pelaporan yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban terkait jasa yang diterima atau digunakan.

Beban Jasa - LO pada per 31 Desember 2025 senilai Rp64.428.117.169,00. Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp2.984.202.866,00 atau sebesar 4,43 persen dibanding Tahun 2024 dimana

tercatat Beban Jasa terealisasi senilai Rp67.412.320.035,00. Beban Jasa – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 108 Rincian Beban Jasa Per SKPD

No.	Unit Organisasi	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	6.356.364.834,00
2.	Dinas Kesehatan	20.903.516.693,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.585.190.091,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	3.368.910.732,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	450.977.419,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	967.013.774,00
7.	Dinas Sosial	290.020.035,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	675.748.824,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	293.207.922,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	49.223.200,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.162.717.802,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	261.374.952,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	130.287.546,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.540.248.752,00
15.	Dinas Perhubungan	330.063.959,00
16.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	1.226.698.720,00
17.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	316.342.990,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	167.358.224,00
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	932.370.433,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	329.677.798,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	861.210.990,00
22.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	849.646.107,00
23.	Sekretariat Daerah	5.568.327.813,00
24.	Sekretariat DPRD	1.825.537.912,00
25.	Badan Perencanaan Daerah	224.023.781,00
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.868.162.200,00
27.	Badan Pendapatan Daerah	631.610.432,00
28.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	870.745.314,00
29.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	72.708.730,00
30.	Inspektorat	1.903.333.267,00
31.	Kecamatan Banggae	889.474.690,00
32.	Kecamatan Banggae Timur	897.106.868,00
33.	Kecamatan Pamboang	255.141.740,00
34.	Kecamatan Sendana	333.374.000,00
35.	Kecamatan Tammerodo	139.940.500,00
36.	Kecamatan Tubo Sendana	112.111.000,00
37.	Kecamatan Ulumanda	84.750.000,00
38.	Kecamatan Malunda	394.592.000,00
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	309.005.125,00
Jumlah		64.428.117.169,00

Beban Jasa per 31 Desember 2025 senilai Rp64.428.117.169,00, dengan rincian per Jenis sebagai berikut.

Tabel 5. 109 Beban Jasa Per Jenis

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Jasa Kantor	33.563.115.905,00
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	15.370.021.703,00
3.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.829.491,00
4.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.155.044.558,00
5.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	14.200.000,00
6.	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	9.433.310.113,00
7.	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	3.388.988.400,00
8.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	237.299.999,00
9.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	153.000.000,00
10.	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	112.307.000,00
	Jumlah	64.428.117.169,00

5.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan – LO

Beban Pemeliharaan dalam Laporan Operasional merupakan pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya dalam kondisi normal. Ini adalah komponen yang menyusun Laporan Operasional Pemerintah Daerah dan mencerminkan kegiatan operasional keuangan daerah.

Beban Pemeliharaan - LO pada per 31 Desember 2025 senilai Rp16.280.052.167,78. Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp5.081.388.871,78 atau sebesar 45,37 persen dibanding Tahun 2024 dimana tercatat Beban Pemeliharaan terealisasi senilai Rp11.198.663.296,00. Beban Pemeliharaan – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 110 Rincian Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.062.821.228,00
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	871.419.527,00
3.	Beban Pemeliharaan jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.345.811.412,78
	Jumlah	16.280.052.167,78

5.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas – LO

Beban Perjalanan Dinas – LO merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas pegawai dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan jabatan. Beban ini biasanya mencakup biaya transportasi, akomodasi, makan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan perjalanan dinas tersebut.

Beban Perjalanan Dinas - LO pada per 31 Desember 2025 senilai Rp15.494.004.886,00. Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp6.480.993.434,00 atau sebesar 29,49 persen dibanding Tahun 2024 dimana tercatat Beban Perjalanan Dinas terealisasi senilai Rp21.974.998.320,00. Beban Perjalanan Dinas – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 111 Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6.565.361.206,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Tetap	130.305.080,00
3.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.792.578.600,00
4.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.760.000,00

No.	Uraian	Jumlah
5.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00
6.	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00
JUMLAH		15.494.004.886,00

Berikut rincian Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025 jika diurai menurut SKPD.

Tabel 5. 112 Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025 per SKPD

No.	UNIT ORGANISASI	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	349.353.418,00
2.	Dinas Kesehatan	6.478.719.021,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73.751.700,00
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	53.618.335,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	55.370.100,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.885.000,00
7.	Dinas Sosial	37.560.800,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.190.172,00
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	658.406.671,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	83.113.550,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	77.783.210,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.609.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98.242.240,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.306.170.000,00
15.	Dinas Perhubungan	15.925.000,00
16.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	50.344.000,00
17.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	96.795.640,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	21.954.800,00
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	132.957.564,00
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	184.981.300,00
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	128.172.485,00
22.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	207.839.070,00
23.	Sekretariat Daerah	2.038.647.542,00
24.	Sekretariat DPRD	2.084.956.876,00
25.	Badan Perencanaan Daerah	147.402.646,00
26.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	420.091.485,00
27.	Badan Pendapatan Daerah	58.097.000,00
28.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	182.664.111,00
29.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	49.035.800,00
30.	Inspektorat	168.239.150,00
31.	Kecamatan Banggae	16.299.600,00
32.	Kecamatan Banggae Timur	27.149.000,00
33.	Kecamatan Pamboang	7.200.000,00
34.	Kecamatan Sendana	5.440.000,00

No.	UNIT ORGANISASI	Jumlah
35.	Kecamatan Tammerodo	5.710.000,00
36.	Kecamatan Tubo Sendana	4.000.000,00
37.	Kecamatan Ulumanda	0,00
38.	Kecamatan Malunda	10.540.000,00
39.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41.788.600,00
	TOTAL	15.494.004.886,00

5.4.1.2.6. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	159.500.000,00	128.450.000,00	31.050.000,00	24,17
Jumlah	159.500.000,00	128.450.000,00	31.050.000,00	24,17

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun 2025 senilai Rp159.500.000,00 dengan rincian Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga senilai Rp6.000.000,00, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp37.000.000,00, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp16.500.000,00, dan Sekretariat Daerah senilai Rp100.000.000,00.

5.4.1.2.7. Beban Barang dan Jasa BOS – LO

Saldo Beban Barang dan Jasa BOS pada Pemerintah Kabupaten Majene sampai 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp24.247.376.270,00 pada unit kerja Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 4,53 persen jika dibandingkan dengan saldo Beban Barang dan Jasa BOS pada tahun 2024 senilai Rp25.397.107.624,00.

5.4.1.2.8. Beban Barang dan Jasa BLUD – LO

Saldo Beban Barang dan Jasa BLUD-LO pada Pemerintah Kabupaten Majene sampai 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp68.327.845.830,71 pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 8,63 persen jika dibandingkan dengan saldo Beban Barang dan Jasa BLUD pada tahun 2024 senilai Rp74.780.614.810,57.

Beban Barang dan Jasa BLUD merupakan Beban Barang Dan Jasa yang tercatat pada satuan kerja yang melaksanakan prinsip Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Majene hingga saat ini telah menetapkan 12 satuan kerja yang menyelenggarakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan berbentuk BLUD. Satuan kerja tersebut yaitu Rumah Sakit Umum Daerah dan sebelas Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Majene. Saldo Beban Barang dan Jasa BLUD pada Pemerintah Kabupaten Majene sampai 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp68.327.845.830,71. Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD masing-masing unit kerja yang menyelenggarakan sistem Badan Layanan Umum Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 113 Beban Barang dan Jasa BLUD

No.	Unit Organisasi	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	(4.425.684,00)
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	49.392.422.631,80
3.	Puskesmas Banggae I	1.892.426.941,04
4.	Puskesmas Banggae II	881.662.771,02

No.	Unit Organisasi	Jumlah (Rp)
5.	Puskesmas Lembang	2.015.187.831,28
6.	Puskesmas Malunda	2.734.170.767,00
7.	Puskesmas Pamboang	3.082.373.796,54
8.	Puskesmas Salutambung	628.834.054,00
9.	Puskesmas Sendana I	2.684.734.264,81
10.	Puskesmas Sendana II	1.305.479.964,92
11.	Puskesmas Tammerodo	1.398.439.143,00
12.	Puskesmas Totoli	1.597.073.234,95
13.	Puskesmas Ulumanda	719.466.114,35
Jumlah		68.327.845.830,71

Beban Barang dan Jasa BLUD senilai Rp68.327.845.830,71 merupakan beban yang timbul atas persediaan, obat-obatan dan realisasi belanja barang dan jasa BLUD yang bersumber dari inputan transaksi non anggaran di seluruh puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, serta bersumber dari jurnal penyesuaian utang, aset dan persediaan pada seluruh puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Adanya koreksi senilai Rp4.425.684,00 pada beban persediaan Dinas Kesehatan disebabkan adanya koreksi tambah atas persediaan yang ada di Rumah Sakit Pratama.

5.4.1.2.9. **Beban Hibah – LO**

Beban Hibah – LO per 31 Desember 2025 senilai Rp11.109.367.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 114 Beban Hibah – LO Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	695.200.000,00
	Sekretariat Daerah	695.200.000,00
2.	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.011.681.500,00
	a). Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	692.130.000,00
	b). Sekretariat Daerah	260.000.000,00
	c). Kecamatan Banggae Timur	59.551.500,00
3.	Beban Hibah Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri dan Satdikmen Swasta	635.400.000,00
	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	635.400.000,00
4.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	711.212.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	711.212.000,00
5.	Beban Hibah Dana BOSP	8.055.873.500,00
	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	8.055.873.500,00
Jumlah		11.109.367.000,00

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Hibah diakui berdasarkan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban Hibah diakui ketika timbul penurunan manfaat ekonomi yang memengaruhi ekuitas pemerintah daerah. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya tercatat senilai Rp695.200.000,00, Beban Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia tercatat senilai Rp1.011.681.500,00. Beban Hibah Dana BOS tercatat realisasi senilai Rp635.400.000,00, Beban Hibah Kepada Partai Politik tercatat realisasi senilai Rp711.212.000,00, dan Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD dan Kesetaraan senilai Rp8.055.873.500,00.

5.4.1.2.10. **Beban Bantuan Sosial – LO**

Beban Bantuan Sosial – LO per 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten Majene adalah Rp59.040.000,00. Nilai ini mengalami penurunan 6,82 persen jika dibandingkan dengan saldo Beban Bantuan Sosial pada tahun 2024 senilai Rp63.360.000,00. Beban Sosial – LO yang disajikan pada Tahun Anggaran 2025 tercatat pada Dinas Sosial di mana beban tersebut digunakan untuk membantu fakir miskin dalam upaya bantuan sosial kesejahteraan keluarga di wilayah Kabupaten Majene.

5.4.1.2.11. **Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO**

Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berdasarkan PSAP Nomor 07 ditetapkan bahwa nilai penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset tak berwujud untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dalam neraca pada akun Akumulasi Penyusutan, Akumulasi Amortisasi, dan akun Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam Laporan Operasional. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 senilai Rp114.358.997.167,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 115 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	23.390.238.641,50
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.997.247.913,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	49.861.643.630,00
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	226.996.342,00
5.	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0
6.	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	882.870.641,00
Jumlah		114.358.997.167,50

5.4.1.2.12. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang – LO merupakan beban yang diakui dalam Laporan Operasional untuk mencerminkan potensi piutang yang tidak dapat dikoleksi. Beban ini mewakili Cadangan yang dibentuk untuk memperkirakan kemungkinan piutang yang tidak akan dapat dibayar oleh debitur.

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 senilai Rp606.386.783,80. Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp97.737.359,52 atau sebesar 13,88 persen dibanding tahun 2024 dimana tercatat Beban Penyisihan Piutang terealisasi senilai Rp704.124.143,32. Beban Penyisihan Piutang – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 116 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	437.542.798,37
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	155.103.106,78
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0,00
4.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	11.851.765,91
5.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1.889.112,74
Jumlah		606.386.783,80

5.4.1.2.13. **Beban Transfer – LO**

Beban Transfer – LO per 31 Desember 2025 senilai Rp48.051.945.661,00 berupa beban atas Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya. Beban Transfer – LO mengalami penurunan senilai Rp7.126.375.709,98 atau sebesar 12,92 persen dibanding Tahun 2024 dimana tercatat Beban Transfer – LO terealisasi senilai Rp55.178.321.370,98. Beban Transfer – LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 117 Beban Transfer - LO

No.	Uraian	Jumlah
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	679.215.030,00
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	173.885.312,00
3.	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	100.000.000,00
4.	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	47.098.845.319,00
Jumlah		48.051.945.661,00

5.4.2. **Kegiatan Non Operasional**

5.4.2.1. **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO**

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam Kegiatan Non Operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari Kegiatan Non Operasional antara lain Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2025 tercatat Defisit senilai Rp2.306.566.437,57.

Rincian atas peristiwa surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 118 Rincian atas Peristiwa Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO					
A	Surplus dari Kegiatan Non Operasional-LO				
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	2.251.355.225,00	(2.251.355.225,00)	(100,00)
2	Surplus Non Operasional-Kenaikan Nilai Investasi-LO	0,00	6.181.110.940,00	(6.181.110.940,00)	(100,00)
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1,00		1	(100,00)
	Sub Total	1,00	8.432.466.165,00	(8.432.466.164,00)	(100,00)
B	Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO				
1	Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	1.126.216.885,00	(1.126.216.885,00)	(100,00)
2	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	2.948.594.994,00	(2.948.594.994,00)	(100,00)
3	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud	178.530.638,00	0,00	178.530.638,00	100,00
4	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	298.691.542,00	342.166,00	298.349.376,00	87.194,34
5	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	1.829.344.258,57	564.315.650,93	1.265.028.607,64	224,17
	Sub Total	2.306.566.438,57	4.639.469.695,93	(2.332.903.257,36)	(50,28)
TOTAL		(2.306.566.437,57)	3.792.996.469,07	(6.099.562.906,64)	(160,81)

5.4.2.2. **Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa senilai (Rp35.295.165.817,82) merupakan jumlah antara Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp32.988.599.380,25 dan Defisit dari Kegiatan Non

Operasional senilai Rp2.306.566.437,57. Ini Menunjukkan Bahwa Beban Untuk Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Rutin Organisasi Lebih Besar Daripada Pendapatan Operasional Yang Diterima, Dimana Pemerintah Kabupaten Majene Telah Mengeluarkan Sumber Daya Ekonomi Yang Besar Untuk beberapa kegiatan seperti Beban Pelayanan Publik, Beban Bantuan Sosial ,Beban Gaji Pegawai, dan Beban Belanja Barang/Jasa Atau Biaya Penyusutan Aset.

Tabel 5. 119 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(32.988.599.380,25)	(31.885.569.372,40)
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.306.566.437,57)	3.792.996.469,07
Jumlah	(Rp35.295.165.817,82)	(28.092.572.903,33)

5.4.3. Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp2.499.579.085,00. Nilai ini mengalami kenaikan 381,92 persen atau sebesar Rp1.980.913.442,00 dibanding Tahun 2024 dimana saldo Pos Luar Biasa tercatat senilai Rp518.665.643,00.

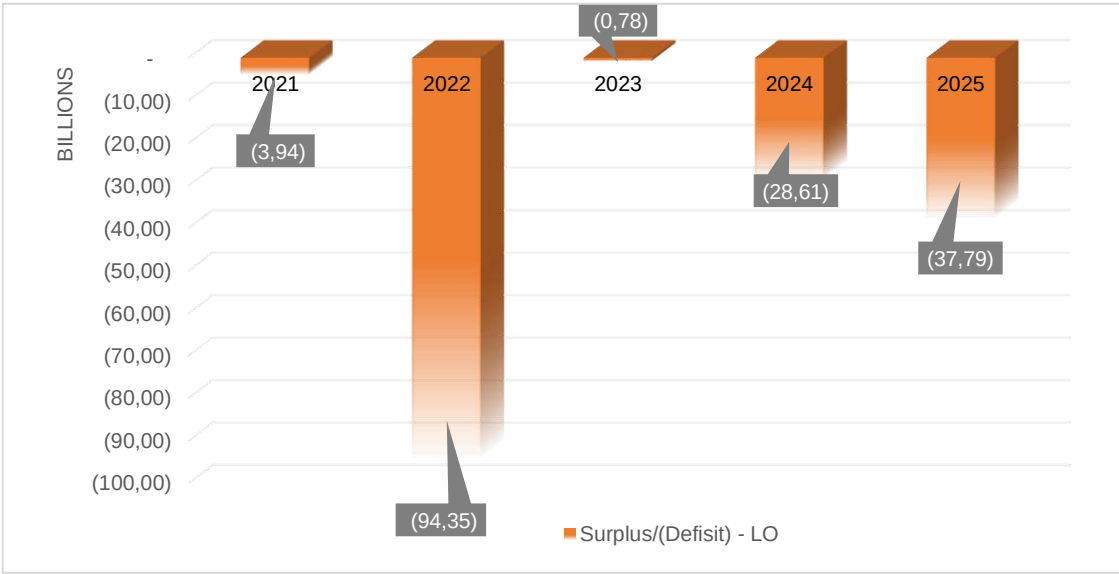
5.4.3.1. Beban Luar Biasa/Beban Tak Terduga - LO

Beban Luar Biasa pada Pemerintah Kabupaten Majene pada tahun 2025 tercatat senilai Rp2.499.579.085,00 Beban Luar Biasa – LO mengalami kenaikan senilai Rp1.980.913.442,00 atau sebesar 381,92 persen dibanding tahun 2024 dimana tercatat Beban Luar Biasa – LO terealisasi senilai Rp518.665.643,00.

Beban Luar Biasa merupakan reklas dari Beban Tak Terduga yang sebelumnya tercatat senilai Rp2.499.579.085,00. Nilai Beban Luar biasa Tahun 2025 merupakan Beban Tak Terduga yang diakibatkan oleh alam rangka bantuan perbaikan jalan poros Limboro Paminggalan Kec Sendana dengan nilai Rp150.000.000,00; bantuan pembangunan Bronjong dan Normalisasi Sungai Desa Seppong dan Mayamba Kecamatan Sendana senilai Rp296.364.000,00; bantuan pembangunan Talud Salobose Kecamatan Banggae senilai Rp150.000.000,00; bantuan penanganan Bahu jalan yang berpotensi amblas di lingkungan Baruga Barat senilai Rp41.575.000,00; penanganan alat berat Pembersihan Longsor Jalan Poros Paminggalan senilai Rp150.000.000,00; rangka pembangunan Talud Sungai Camba-Camba Kecamatan Tammerodo Sendana senilai Rp270.000.000,00; Rehabilitasi Jembatan Kelurahan Galung- Banggae senilai Rp200.000.000,00; Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan senilai Rp130.906.000,00; Rehabilitasi gedung dan Bangunan Kesehatan senilai Rp530.000.000,00; Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah senilai Rp30.000.000,00; Perbaikan Tanggul pada dusun karondongan Tammeroddo dan Lingkungan Parappe Kelurahan Sirindu senilai Rp450.000.000,00, Operasi Pengamanan Aksi Demonstrasi senilai Rp50.000.000,00; dalam Rangka Darurat Bencana Hidrometeorologi basah dan cuaca Ekstrem di Kabupaten Majene senilai Rp50.000.000,00.

5.4.4. Surplus/(Defisit) - LO

Defisit LO senilai (Rp37.794.744.902,82) berasal dari Defisit Sebelum Pos Luar Biasa senilai (Rp35.295.165.817,82) ditambah Pos Luar Biasa senilai (Rp2.499.579.085,00). Nilai tersebut mengalami Kenaikan nilai Defisit senilai Rp9.183.506.356,49 atau 32,10 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut perkembangan Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Majene 5 (lima) tahun terakhir dalam grafik di bawah ini.



Grafik 5. 33 Tren Perkembangan Surplus/Defisit-LO Kabupaten Majene 2021-2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Majene mencatatkan Kenaikan Defisit signifikan yaitu senilai Rp9.183.506.356,49 atau senilai 32,10 persen. Defisit pada Pemerintah Daerah merupakan konteks operasional yang positif. Artinya Pemerintah Kabupaten Majene mencatatkan aktivitas operasional yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Defisit-LO yang terjadi menunjukkan bahwa beban Operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih lebih besar dibandingkan pendapatan operasional yang diterima. Selama Tahun Anggaran 2021 hingga 2025 belum pernah terjadi Surplus. Surplus/Defisit-LO pada Tahun 2023 tercatat sebagai defisit dengan nilai defisit paling rendah selama lima tahun terakhir

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

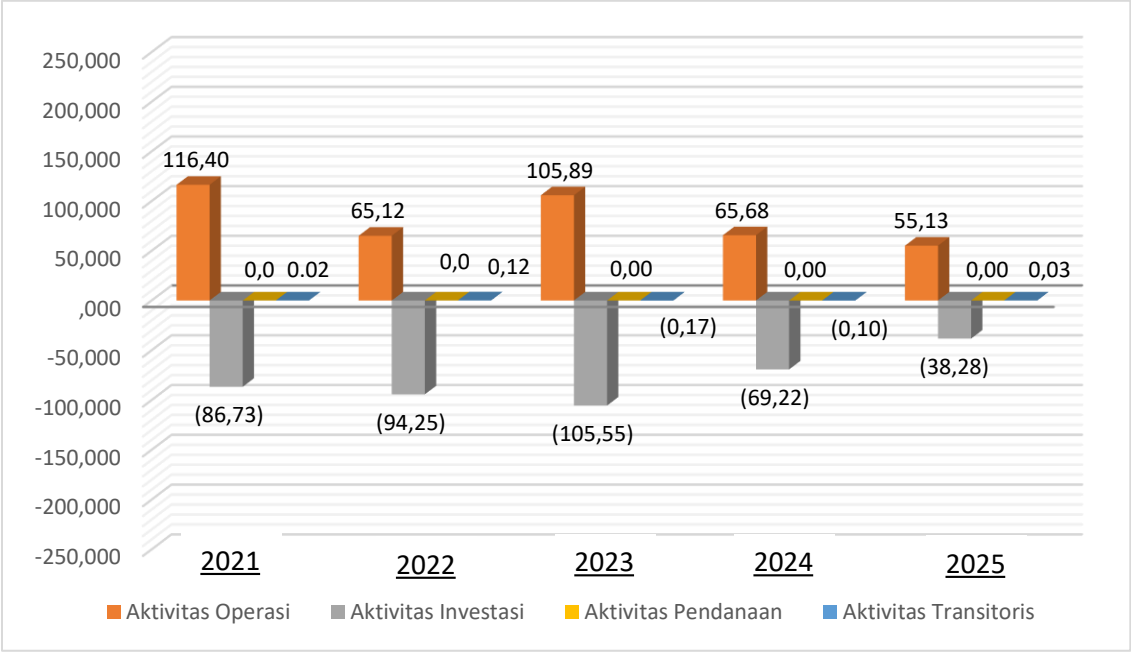
Laporan Arus Kas merupakan informasi keuangan yang sangat penting baik bagi manajemen pengguna laporan eksternal, para pemangku kepentingan, dan masyarakat. Laporan Arus Kas tersebut mencerminkan kondisi objektif kas, perubahan selama satu periode, arus masuk, dan keluar kas yang sangat jelas yang dapat diuji kebenarannya dengan melihat Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai saldo awal kas, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2025. Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas Kabupaten Majene periode 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Komposisi Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 berdasarkan aktivitas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 120 Posisi Arus Kas Bersih Berdasarkan Aktivitas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	55.134.672.208,81	65.687.381.462,47
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(38.283.278.741,00)	(69.223.017.593,18)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	26.843.710,00	(95.321.122,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	16.878.237.177,81	(3.630.957.252,71)

Tren arus kas bersih Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan aktivitas selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 5. 34 Komposisi Arus Kas Bersih Tahun 2021 s.d. 2025

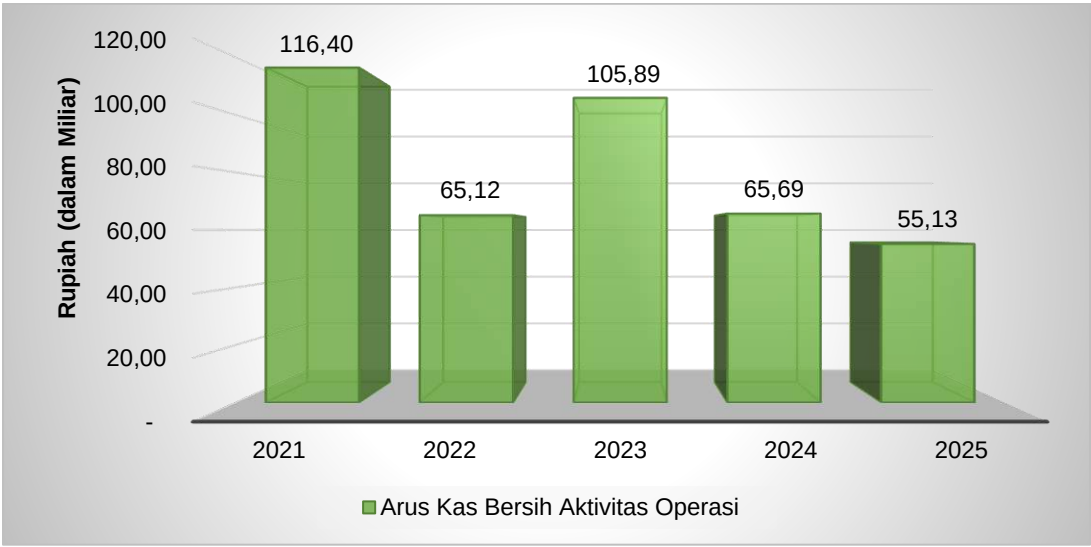
Penjelasan mengenai arus kas bersih dari masing-masing aktivitas di atas adalah sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	55.134.672.208,81	65.687.381.462,47	(10.552.709.253,66)	(16,06)
Jumlah	55.134.672.208,81	65.687.381.462,47	(10.552.709.253,66)	(16,06)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 sebesar Rp55.134.672.208,81 atau terjadi Penurunan sebesar 16,06 persen dari Tahun 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Berikut tren perkembangan arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Majene selama lima Tahun terakhir dalam grafik di bawah ini.



Grafik 5. 35 Tren Perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Kabupaten Majene 2021-2025

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah akibat aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi menunjukkan efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam mengelola penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan operasional Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Arus Kas Operasi yang baik adalah arus kas yang bersaldo positif dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari data di atas dapat dilihat bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Majene bersaldo positif dari tahun 2021-2025. Walaupun di Tahun 2022 mengalami penurunan, namun di Tahun 2023 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mengalami peningkatan sebesar 105,89 persen. Tetapi di Tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 37,97 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Majene kembali menurun. Arus kas positif dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan daerah dalam rangka mengembalikan pinjaman jangka pendek, menambah investasi daerah, atau memberikan subsidi kepada masyarakat. Dari grafik di atas dapat dilihat Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi tertinggi Pemerintah Kabupaten Majene tercatat pada Tahun 2021, sedangkan terendah terjadi pada Tahun 2025.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2025 adalah senilai Rp55.134.672.208,81 dimana terjadi penurunan sebesar 16,06 persen dari aktivitas operasi pada Tahun 2024 yang tercatat senilai Rp65.687.381.462,47. Penurunan tersebut disebabkan pada beberapa *item* arus kas masuk mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Penerimaan Pendapatan Hibah. Pada tahun 2025 ada beberapa Arus Kas Masuk mengalami sedikit kenaikan namun beberapa Arus Kas Keluar yang mengalami kenaikan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut rincian arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas operasi sepanjang Tahun 2025.

Tabel 5. 121 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah – LRA	16.467.968.514,25	11.783.885.632,00
Penerimaan Retribusi Daerah – LRA	75.411.226.265,00	75.254.820.161,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	3.534.611.072,00	3.327.191.183,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	6.356.723.874,34	2.096.439.233,07
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	3.519.130.300,00	6.639.074.000,00

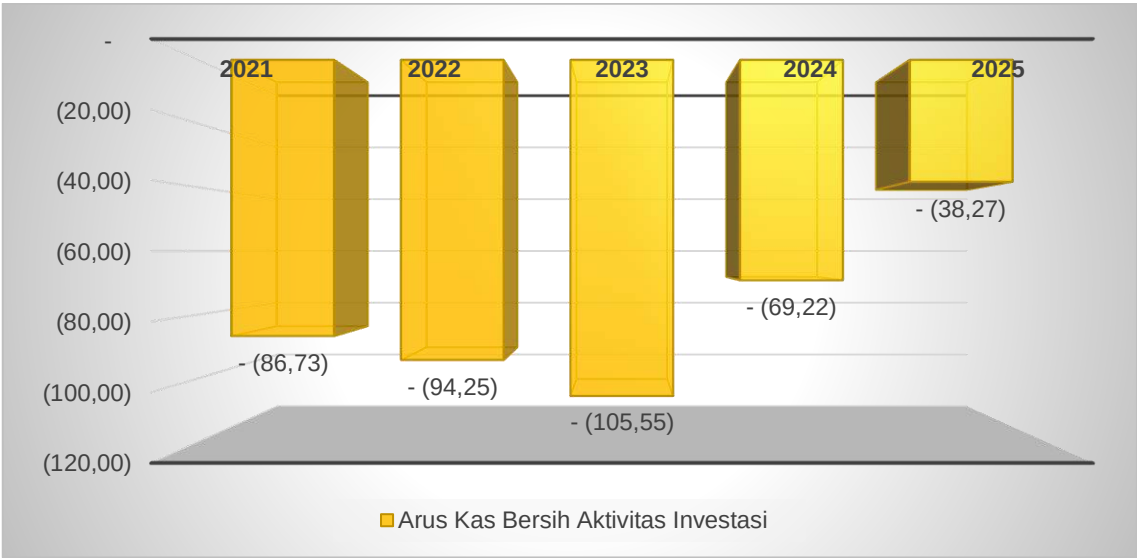
Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.607.363.000,00	0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	508.075.000,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	544.376.636.960,00	548.935.022.195,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	162.384.800.273,00	172.385.640.915,00
Penerimaan Dana Desa	47.727.678.768,00	55.820.851.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.101.330.683,00	24.527.029.863,00
Jumlah Arus Masuk Kas	880.995.544.709,59	900.769.954.182,07
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	451.753.620.104,00	424.459.751.438,00
Pembayaran Barang dan Jasa	259.163.085.597,78	267.189.138.109,60
Pembayaran Hibah	9.648.530.900,00	38.275.918.405,00
Pembayaran Bantuan Sosial	59.040.000,00	63.360.000,00
Pembayaran Tak Terduga	2.499.579.085,00	1.330.046.402,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	679.215.030,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	173.885.312,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	101.883.916.472,00	103.764.358.365,00
Jumlah Arus Keluar Kas	825.860.872.500,78	835.082.572.719,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	55.134.672.208,81	65.687.381.462,47

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(38.283.278.741,00)	(69.223.017.593,18)	30.939.738.852,18	44,70
Jumlah	(38.283.278.741,00)	(69.223.017.593,18)	30.939.738.852,18	44,70

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 sebesar (Rp38.283.278.741,00) atau sebesar 44,70 persen dari Tahun 2024.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi terkait dengan pengeluaran kas untuk memperoleh aset tetap baru atau penambahan kapasitas aset tetap lama serta penerimaan kas dari penjualan aset tetap lama. Arus kas dari aktivitas investasi yang bersaldo negatif menunjukkan pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap yang nilainya lebih besar dibanding dengan kas yang diperoleh dari penghentian atau penjualan aset tetap. Sebaliknya jika arus kas dari aktivitas investasi bersaldo positif, maka hal itu mengindikasikan pemerintah daerah tidak melakukan investasi pelepasan aset tetap. Oleh karena itu, saldo negatif (defisit) atas arus kas dari aktivitas investasi lebih disukai. Sedangkan saldo positif diupayakan untuk dihindari karena jika bersaldo positif maka pertumbuhan aset tetapnya akan bernilai negatif padahal pemerintah daerah diharapkan memiliki pertumbuhan aset tetap yang positif. Tren perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Majene selama lima Tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 5. 36 Tren Perkembangan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Kabupaten Majene 2021-2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa saldo kas bersih dari aktivitas investasi bersaldo negatif, sehingga ini menunjukkan adanya pertumbuhan aset yang positif yang berarti di Pemerintah Kabupaten Majene terjadi pembangunan fisik berupa pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, belanja tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan. Arus kas bersih aktivitas investasi tertinggi tercatat terjadi pada Tahun Anggaran 2023. Sedangkan arus kas bersih aktivitas investasi terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2025. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2025 adalah senilai (Rp38.283.278.741,00) atau turun sebesar 44,70 persen dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2024 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5. 122 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	20.449.800,00	5.925.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	20.449.800,00	5.925.000,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	732.371.100,00	1.053.059.242,00
Perolehan Peralatan dan mesin	5.004.809.348,00	11.393.369.748,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	23.797.538.257,00	33.605.479.353,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.906.104.836,00	23.121.034.250,18
Perolehan Aset Tetap Lainnya	322.905.000,00	56.000.000,00
Perolehan Aset Lainnya	40.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	500.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	38.303.728.541,00	69.228.942.593,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(38.283.278.741,00)	(69.223.017.593,18)

Sepanjang Tahun 2025 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi bersumber dari Penjualan Penjualan Aset Lainnya Senilai Rp20.449.800,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan senilai Rp14.524.800,00 jika dibandingkan tahun 2024. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2025 tercatat senilai Rp38.303.728.541,00. Nilai ini mengalami penurunan senilai (Rp30.925.214.052,18) atau 44,70 persen dibanding Arus Keluar Kas tahun sebelumnya senilai Rp69.228.942.593,18.

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Pada Tahun 2025 tidak terdapat Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan atau nihil. Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Majene dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan surplus/defisit anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Majene tidak mencatat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan baik yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank maupun pihak lainnya.

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	26.843.710,00	(95.321.122,00)	122.164.832,00	128,16
Jumlah	26.843.710,00	(95.321.122,00)	122.164.832,00	128,16

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 sebesar Rp26.843.710,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp122.164.832,00 atau 128,16 persen dari Tahun 2024 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yaitu transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Majene pada Tahun 2025 tercatat senilai Rp26.843.710,00 dimana terjadi kenaikan senilai Rp122.164.832,00 atau 128,16 persen dari Tahun 2024 senilai (Rp95.321.122,00). Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 123 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	45.883.045.391,00	50.944.453.833,00
Jumlah Arus Masuk Kas	45.883.045.391,00	50.944.453.833,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	45.856.201.681,00	51.039.774.955,00
Jumlah Arus Keluar Kas	45.856.201.681,00	51.039.774.955,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	26.843.710,00	(95.321.122,00)

Arus kas masuk dan keluar dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2025 bersumber dari penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sampai akhir Tahun 2025. Tercatat terdapat Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2025 senilai Rp45.883.045.391,00. Adapun pada sisi arus keluar kas tercatat pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2025 senilai Rp45.856.201.681,00.

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	Rasio (%)
Saldo Akhir Kas	21.727.604.509,50	4.849.337.935,69	16.878.266.573,81	348,05
Jumlah	21.727.604.509,50	4.849.337.935,69	16.878.266.573,81	348,05

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 sebesar Rp21.727.604.509,50 atau terjadi peningkatan sebesar 348,05 persen dari Tahun 2024

Saldo Akhir Kas sampai dengan per 31 Desember 2025 senilai Rp21.727.604.509,50, dibandingkan dengan sebelumnya di Tahun 2024 senilai Rp4.849.337.935,69. Maka dapat dilihat terjadi kenaikan senilai Rp16.878.266.573,81 atau 348,05 persen. Berikut rincian pembentuk Saldo Akhir Kas berdasarkan Arus Kas sepanjang Tahun Anggaran 2025 dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris, serta Kenaikan/Penurunan Kas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 124 Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	55.134.672.208,81	65.687.381.462,47
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(38.283.278.741,00)	(69.223.017.593,18)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	26.843.710,00	(95.321.122,00)
Kenaikan / Penurunan Kas	16.878.237.177,81	(3.630.957.252,71)
Saldo Awal Kas	4.849.337.935,69	8.480.304.393,60
Koreksi SiLPA Tahun Lalu	29.396,00	(9.205,20)
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah Setelah Koreksi	4.849.367.331,69	8.480.295.188,40
Saldo Akhir Kas	21.727.604.509,50	4.849.337.935,69
Kas di Kas Daerah	15.999.375.461,40	51.385.522,63
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	4.276.865.432,10	4.769.301.860,10
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	374.521.000,00	0,00
Kas Lainnya/ Kas Dana BOK	1.036.132.573,00	28.650.552,96
Kas Lainnya	40.710.043,00	0,00
Saldo Akhir Kas	21.727.604.509,50	4.849.337.935,69

Penjelasan nilai kas bersih dari masing-masing aktivitas dalam Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sampai dengan per 31 Desember 2025 senilai Rp55.134.672.208,81 merupakan selisih antara Arus Masuk Kas Penerimaan senilai Rp880.995.544.709,59 dan Arus Keluar Kas Pembayaran senilai Rp825.860.872.500,78;
- b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sampai dengan per 31 Desember 2025 senilai (Rp38.283.278.741,00) merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Hasil Penjualan Aset Lainnya senilai Rp20.449.800,00 dan Arus Keluar Kas Perolehan Aset Tetap senilai Rp38.303.728.541,00;
- c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
Aktivitas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun 2025 senilai Rp0,00. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aktivitas arus kas masuk maupun keluar dari aktivitas pendanaan
- d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan per 31 Desember 2025 senilai Rp26.843.710,00 merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran senilai Rp45.883.045.391,00 dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran senilai Rp45.856.201.681,00;

- e. Saldo Akhir Kas
Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2025 senilai Rp21.727.604.509,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 125 Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Unit Kerja	Jumlah (Rp)
1.	Kas di Kasda	15.999.375.461,40
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
4.	Kas di BLUD	4.276.865.432,10
5.	Kas Dana BOS	374.521.000,00
6.	Kas Dana BOK Puskesmas	1.036.132.573,00
7.	Kas Lainnya	40.710.043,00
8.	Setara Kas	0,00
Jumlah		21.727.604.509,50

5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Ekuitas, dan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya sepanjang periode Tahun 2025. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 adalah senilai Rp1.565.032.932.878,19.

5.6.1. Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio persen (%)
Ekuitas Awal	1.602.237.782.484,35	1.628.208.973.061,58	(25.971.190.577,23)	(1,60)
Jumlah	1.602.237.782.484,35	1.628.208.973.061,58	(25.971.190.577,23)	(1,60)

Ekuitas awal merupakan posisi kekayaan bersih Pemerintah Daerah di awal tahun yang akan diperhitungkan untuk membiayai operasional Pemerintah Kabupaten Majene sepanjang Tahun Anggaran 2025. Ekuitas awal pada Tahun 2025 senilai Rp1.602.237.782.484,35 yang merupakan saldo ekuitas akhir pada Tahun 2024. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 1,60 persen atau senilai Rp25.971.190.577,23 dibandingkan di Tahun 2024 di mana Ekuitas Awal tercatat senilai Rp1.628.208.973.061,58.

5.6.2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan – LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit-LO merupakan pengurangan Pendapatan - LO senilai Rp847.706.615.831,17 terhadap Beban-LO senilai Rp880.695.215.211,42 dan Jumlah defisit dari kegiatan non operasional Senilai Rp2.306.566.437,57 serta beban luar biasa Rp2.499.579.085,00.

Pada Tahun 2025 tercatat Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Majene senilai Rp37.794.744.902,82. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp9.183.506.356,49

dibandingkan tahun 2024 tercatat Defisit-LO senilai Rp28.611.238.546,33. Rincian Surplus/Defisit-LO per SKPD disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 126 Surplus/Defisit LO per SKPD

No.	Surplus/Defisit-LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	(335.020.561.115,00)	(322.619.497.607,67)
2.	Dinas Kesehatan	(120.348.314.846,13)	(119.115.266.754,86)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(95.072.080.167,77)	(60.137.194.262,76)
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(5.672.361.238,00)	(9.839.861.444,00)
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.757.642.138,00)	(6.219.960.808,00)
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.804.125.348,00)	(32.118.293.196,00)
7.	Dinas Sosial	(1.574.682.564,00)	(1.945.482.864,00)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(7.808.825.716,00)	(5.564.794.571,00)
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(3.628.742.048,00)	(3.924.030.046,00)
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.717.541.363,00)	(3.516.499.260,00)
11.	Dinas Ketahanan Pangan	(1.792.696.050,00)	(1.645.956.712,00)
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(4.939.608.555,00)	(6.049.747.939,00)
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.782.984.545,00)	(2.707.257.900,00)
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(2.132.652.782,00)	(2.092.729.975,00)
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(7.850.553.210,00)	(12.766.273.102,00)
16.	Dinas Perhubungan	(2.527.959.975,00)	(2.902.157.931,00)
17.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	(3.175.600.787,00)	(3.625.623.134,50)
18.	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	(4.084.208.446,00)	(4.441.565.771,00)
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(2.128.288.723,00)	(2.745.965.616,00)
20.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(6.154.655.692,00)	(8.350.332.298,00)
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(3.078.200.829,00)	(2.633.286.714,00)
22.	Badan Perencanaan Daerah	(2.958.476.729,00)	(3.232.524.646,00)
23.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	678.477.296.339,37	704.758.373.081,01
24.	Badan Pendapatan Daerah	12.308.202.689,88	3.796.212.962,40
25.	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	(4.144.791.020,00)	(4.842.863.427,00)
26.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(1.176.442.430,00)	(2.003.236.362,00)
27.	Sekretariat Daerah	(25.680.653.553,67)	(28.798.254.534,00)
28.	Sekretariat DPRD	(17.038.544.371,00)	(17.147.195.349,00)
29.	Inspektorat Daerah	(6.000.609.776,00)	(5.040.694.848,00)
30.	Kecamatan Banggae	(6.905.605.271,00)	(6.903.558.760,00)
31.	Kecamatan Banggae Timur	(8.052.703.271,00)	(7.702.364.757,00)
32.	Kecamatan Pamboang	(3.148.548.215,00)	(3.149.262.663,00)
33.	Kecamatan Sendana	(3.600.492.151,00)	(3.485.793.785,00)
34.	Kecamatan Tammerodo Sendana	(1.064.537.759,00)	(1.185.673.669,00)
35.	Kecamatan Tubo Sendana	(1.716.590.917,00)	(1.603.659.520,00)
36.	Kecamatan Ulumanda	(1.395.155.240,00)	(1.324.380.275,00)
37.	Kecamatan Malunda	(3.505.152.178,00)	(3.320.586.322,00)
38.	Dinas Kelautan dan Perikanan	(6.471.523.366,00)	(16.666.817.750,50)
39.	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	(15.668.131.546,00)	(15.797.180.015,45)
Jumlah		(37.794.744.902,82)	(28.611.238.546,33)

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan/atau kesalahan mendasar seperti Koreksi Ekuitas awal atas Kas, Piutang, Beban Dibayar Dimuka, Persediaan, Investasi, Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Lainnya. Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah senilai Rp589.895.296,66. Saldo Koreksi Ekuitas tersebut merupakan akumulasi dari koreksi-koreksi yang secara langsung menambah atau mengurangi ekuitas di Tahun berjalan. Koreksi-koreksi yang langsung menambah ekuitas tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. 127 Koreksi yang Langsung Menambah Ekuitas

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Koreksi SiLPA atas kas BLUD tahun sebelumnya pada Puskesmas Totoli	29.396,00
2.	Koreksi atas mutasi tambah aset tanah Tahun 2025	345.317.079,00
3.	Koreksi penyusutan atas mutasi kurang aset tetap	71.160.000,00
4.	Penghapusan utang Tahun 2022, dobel catat	4.981.821,00
5.	Koreksi atas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap	297.684.696,00
6.	Koreksi atas penyesihan piutang tahun berjalan	29.398.109,66
Jumlah		748.571.101,66

Selain koreksi yang secara langsung menambah ekuitas, pada Tahun Anggaran 2025 juga terdapat koreksi-koreksi yang langsung mengurangi ekuitas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 128 Koreksi yang Langsung Mengurangi Ekuitas

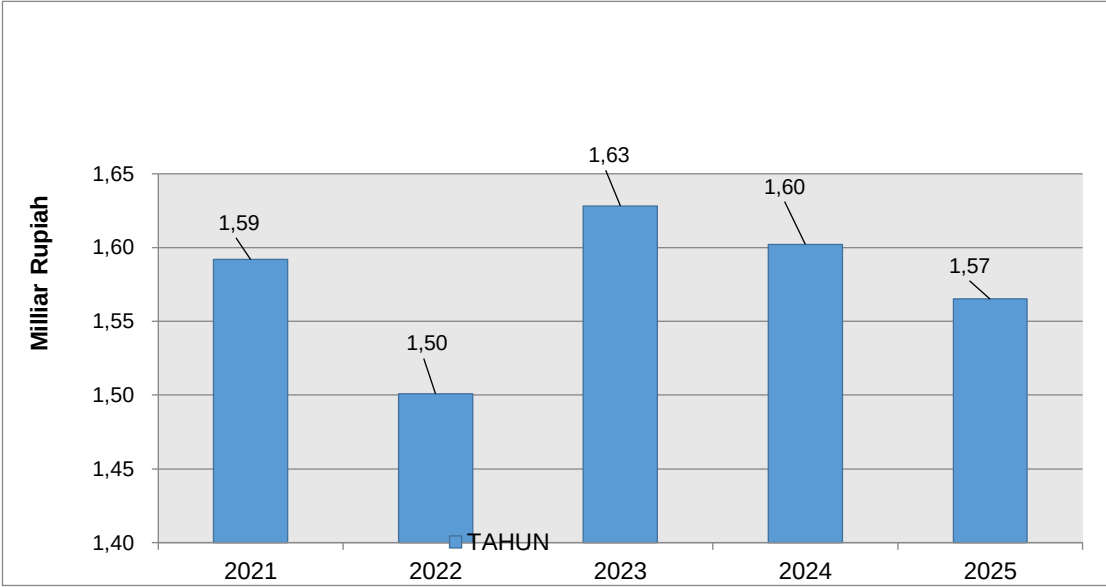
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi penyusutan atas mutasi tambah aset tetap	35.700.000,00
2	Koreksi penyusutan saldo awal dan koreksi tahun berjalan	14.512.016,00
3	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan bangunan dan gedung	2.063.789,00
4	Koreksi atas penghapusan aset tanah tahun sebelumnya karena dobel catat	106.400.000,00
Jumlah		158.675.805,00

5.6.4. Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
Ekuitas Akhir	1.565.032.932.878,19	1.602.237.782.484,35	(37.204.849.606,16)	(2,32)
Jumlah	1.565.032.932.878,19	1.602.237.782.484,35	(37.204.849.606,16)	(2,32)

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas mencerminkan kondisi sumber daya ekonomi yang dimiliki Pemerintah Daerah pada suatu periode tertentu dalam menyelenggarakan operasionalisasi fungsi dan kewenangannya.

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp1.565.032.932.878,19 Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp37.204.849.606,16 atau menurun sebesar 2,32 persen dari Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024. Perubahan tersebut diakibatkan adanya pengurangan oleh Defisit-LO senilai Rp37.794.744.902,82 dan penambahan dari akumulasi Koreksi Ekuitas senilai Rp589.895.296,66. Berikut analisis tren ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene sejak lima tahun terakhir.



Grafik 5. 37 Tren Ekuitas Pemerintah Kabupaten Majene 2021-2025

BAB VI

KEWAJIBAN KONTIJENSI

Berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor: 1/Pdt.G/2026/PN Mjn, bahwa pada Hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 atas nama Wahyuni Masrin, SE Jurusita pada Pengadilan Negeri Majene, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor: 1/Pdt.G/2026/PN Mjn Tanggal 20 Januari 2026, Telah Memanggil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Bupati Majene (Pemerintah Kabupaten Majene), Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene sebagai Tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 03 Februari 2026 dalam perkara perdata antara Darman Mahmud sebagai Penggugat. Adapun perkara yang diajukan oleh Penggugat mengenai sebidang Tanah Perkarangan, yang terletak di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan luas $\pm 12,59 \times 29$ m atau ± 365 m² yang di atasnya telah berdiri Bangunan Permanen PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) Milik Pemerintah Kabupaten Majene.

Menurut Penggugat Objek Sengketa adalah milik penggugat yang diperoleh secara sah melalui Jual-beli pada Tanggal 12 Juli 1995, atas penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat (Pemerintah Kabupaten Majene) telah melakukan Pembangunan Bangunan Permanen berupa PUSKESMAS PEMBANTU di atas objek sengketa, Tanpa Hak dan Tanpa seizin Penggugat, kemudian tidak mengakui kepemilikan Penggugat, serta tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat.

Relas Pemberitahuan Putusan *Verstek* Kepada Tergugat Nomor: 1/Pdt.G/2026/PN Mjn, tanggal 29 April 2026 menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan *verstek*, menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan luas $\pm 12,59 \times 29$ m atau ± 365 m² adalah milik penggugat.

Pemerintah Kabupaten Majene berdasarkan putusan tersebut akan melakukan upaya hukum untuk membuktikan kepemilikan atas barang milik daerah tersebut.

BAB VII

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 yaitu:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah - LRA senilai Rp101.790.979.525,59 atau 87,03 persen dari anggaran senilai Rp116.958.226.043,00;
 - 2) Pendapatan Transfer - LRA senilai Rp779,225,014,984,00 atau 98,72 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp789.268.730.174,00; dan
 - 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA untuk tahun 2025 adalah Nihil.
- b. Realisasi Belanja Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 yaitu:
 - 1) Belanja Operasi senilai Rp720.624.276.601,78 atau 95,45 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp754.940.405.263,69;
 - 2) Belanja Modal senilai Rp 37.803.728.541.00 atau 87,48 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp43.213.252.689,00; dan
 - 3) Belanja Tak Terduga senilai Rp2.499.579.085,00 atau 86,19 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp2.900.000.000,00.
- c. Realisasi Transfer Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 yaitu:.
 - 1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan senilai Rp853.100.342,00 atau 31,63 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp2.696.704.257,00;
 - 2) Transfer Bantuan Keuangan senilai Rp101.883.916.472,00 atau 95,38 persen dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp106.812.090.704,00; dan
 - 3) Terdapat Surplus/(Defisit) Belanja dan Transfer senilai Rp17.351.393.467,81
- d. Neraca Pemerintah Kabupaten Majene per 31 Desember 2025 menunjukkan:
 - 1) Aset
 - a) Aset Lancar : Rp 51.150.313.248,78
 - b) Investasi Jangka Panjang : Rp 67.455.648.023,10
 - c) Aset Tetap : Rp 1.475.883.616.947,45
 - d) Aset Lainnya : Rp 10.021.848.510,86
 - e) Properti Investasi : Rp 10.815.873.221,00
 - 2) Kewajiban
 - a) Kewajiban Jangka Pendek : Rp 50.294.367.073,00
 - b) Kewajiban Jangka Panjang : Rp 0,00
 - 3) Ekuitas : Rp 1.565.032.932.878,19
- e. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Majene untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 menunjukkan:
 - 1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi : Rp 55.134.672.208,81
 - 2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi : Rp (38.283.278.741,00)
 - 3) Arus Kas Bersih dari Pembiayaan : Rp 0,00
 - 4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris : Rp 26.843.710,00
 - 5) Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2025 : Rp 21.727.604.509,50

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Majene per31 Desember 2025.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	S K P D	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	Badan Pendapatan Daerah	Hotel	20.620.000,00	-	-	20.620.000,00
		Restoran dan Sejenisnya	458.080.891,00	55.003.450,00	(5.251.000,00)	507.833.341,00
		Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	2.250.000,00	-	-	2.250.000,00
		Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	68.569.200,00	-	-	68.569.200,00
		Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	588.069.319,90	-	(1.303.000,00)	586.766.319,90
		PBBP2	5.747.665.991,00	460.885.724,00	(23.466.794,00)	6.185.084.921,00
		BPHTB-Pemindahan Hak	186.132.996,50	-	-	186.132.996,50
		Pemakaian Rumah Dinas	82.720.000,00	21.040.000,00	(7.960.000,00)	95.800.000,00
2	Dinas Pendidikan	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.800.000,00	-	(1.200.000,00)	600.000,00
3	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.352.500,00	-	-	38.352.500,00
4	Sekretariat Daerah	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	120.000.000,00	-	(32.500.000,00)	87.500.000,00
5	Dinas Koperasi, Industri Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Piutang Retribusi Pelataran	489.897.060,00	76.355.000,00	(64.422.000,00)	501.830.060,00
		Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	213.639.200,00	22.835.000,00	(2.700.000,00)	233.774.200,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	65.062.600,00	143.707.357,00	(65.062.600,00)	143.707.357,00
7	Puskesmas Banggae I	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.952.000,00	2.952.000,00	(2.952.000,00)	2.952.000,00
8	Puskesmas Banggae II	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.730.000,00	3.775.000,00	(3.730.000,00)	3.775.000,00
9	Puskesmas Totoli	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.984.000,00	2.497.000,00	(1.984.000,00)	2.497.000,00
10	Puskesmas Lembang	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	43.447.000,00	10.182.000,00	(43.447.000,00)	10.182.000,00
11	Puskesmas Pamboang	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.443.000,00	7.258.000,00	(6.443.000,00)	7.258.000,00
12	Puskesmas Sendana I	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	69.700.000,00	2.890.000,00	(69.700.000,00)	2.890.000,00
13	Puskesmas Malunda	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	190.000,00	-	(190.000,00)	-

No.	S K P D	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
14	Puskesmas Ulumanda	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.107.500,00	600.000,00	(17.107.500,00)	600.000,00
15	Puskesmas Salutambung	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	27.085.000,00	250.000,00	(27.085.000,00)	250.000,00
16	Puskesmas Tammerodo	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	2.580.000,00	-	2.580.000,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.204.910.221,00	52.251.589,00	(1.204.910.221,00)	52.251.589,00
		Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	858.799.412,00	-	(858.799.412,00)	-
		Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.102.291.055,00	2.313.838.150,00	(2.102.291.055,00)	2.313.838.150,00
		Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.562.343,00	4.263.445,00	(3.562.343,00)	4.263.445,00
18	Sekretariat DPRD	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	466.851.500,00	-	-	466.851.500,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	30.302.830,40	377.822.547,60	-	408.125.378,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	13.000.000,00	-	-	13.000.000,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.999.299,04	-	-	56.999.299,04
	TOTAL		12.992.214.918,84	3.560.986.262,60	(4.546.066.925,00)	12.007.134.256,44

KABUPATEN MAJENE

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah piutang Bersih
1	PAJAK	7.557.256.778,40	6.439.654.637,17	1.117.602.141,23
	Hotel	20.620.000,00	20.620.000,00	-
	Restoran dan Sejenisnya	507.833.341,00	430.846.888,25	76.986.452,75
	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	2.250.000,00	2.250.000,00	-
	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	68.569.200,00	68.569.200,00	-
	Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	586.766.319,90	586.766.319,90	-
	PBBP2	6.185.084.921,00	5.144.469.232,52	1.040.615.688,48
	BPHTB-Pemindahan Hak	186.132.996,50	186.132.996,50	-
2	RETRIBUSI	1.134.548.117,00	612.423.416,78	522.124.700,22
	Piutang Retribusi Pemakaian Rumah Dinas	95.800.000,00	51.417.200,00	44.382.800,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	600.000,00	60.000,00	540.000,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	38.352.500,00	26.421.250,00	11.931.250,00
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	87.500.000,00	87.500.000,00	-
	Piutang Retribusi Pelataran	501.830.060,00	287.165.135,00	214.664.925,00
	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	233.774.200,00	158.976.375,00	74.797.825,00
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	176.691.357,00	883.456,78	175.807.900,22
3	PIUTANG PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH	-	-	-
	Pendapatan BLUD	-	-	-
4	PIUTANG PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	2.370.353.184,00	11.851.765,91	2.358.501.418,09
	Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Provinsi	2.370.353.184,00	11.851.765,91	2.358.501.418,09
5	PIUTANG LAINNYA	944.976.177,04	569.042.742,18	375.933.434,86
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	887.976.878,00	512.043.443,14	375.933.434,86
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	56.999.299,04	56.999.299,04	-
JUMLAH		12.007.134.256,44	7.632.972.562,04	4.374.161.694,40

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025

KABUPATEN MAJENE
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	S K P D	Jumlah Dana Bergulir	Jumlah Penyisihan Dana Bergulir	Jumlah piutang Bersih
1	SEKRETARIAT DAERAH			
	Bidang Ekbang Sekretariat Daerah	330.000.000,00	330.000.000,00	-
2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	Bidang Kelautan dan Perikanan	1.627.233.775,00	1.627.233.775,00	-
3	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG			
	Bidang Perindagtamben	65.782.200,00	65.782.200,00	-
	Bidang Koperasi, UKM	188.075.000,00	188.075.000,00	-
4	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERHUBUNGAN			
	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	376.155.000,00	376.155.000,00	-
	Bidang Pertanian	116.073.800,00	116.073.800,00	-
	Bidang Peternakan	254.847.896,00	254.847.896,00	-
	JUMLAH	2.958.167.671,00	2.958.167.671,00	-

KABUPATEN MAJENE

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun ini	Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2021	Bank Sulselbar		Saham	18.236.000.000,00	18.236.000.000,00	-	18.236.000.000,00	-	-	-	18.236.000.000,00
2	2022	Perusda Aneka Usaha		Saham	41.228.586.071,00	41.228.586.071,00		41.228.586.071,00	-			41.228.586.071,00
3	2025	Perumda Tirta Mandar	Perda No.12 Tahun 2019	Saham	9.320.406.210,67	9.320.406.210,67	500.000.000,00	9.820.406.210,67	(500.000.000,00)			9.820.406.210,67
					68.784.992.281,67	68.784.992.281,67	500.000.000,00	69.284.992.281,67	(500.000.000,00)	-	-	69.284.992.281,67

KABUPATEN MAJENE
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	DPRD KAB. MAJENE	9.725.863.515,00	225.650.000,00	992.982.500,00	8.958.531.015,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	177.589.805.132,55	1.077.697.023,00	11.503.717.900,00	167.163.784.255,55
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.162.059.285.885,87	8.484.402.501,55	3.247.498.920,27	1.167.296.189.467,15
4	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	104.508.361.286,89	17.282.550.630,00	721.716.666,68	121.069.195.250,21
5	DINAS PERHUBUNGAN	12.873.112.643,32	-	(0,00)	12.873.112.643,32
6	DINAS KESEHATAN	196.260.572.815,88	7.472.958.246,00	1.761.241.545,00	201.972.289.516,88
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	144.577.838.943,28	22.764.036.711,00	15.474.378.123,00	151.867.497.531,28
8	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	539.196.663.832,78	16.158.584.230,00	5.222.990.721,52	550.132.257.341,26
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.279.988.558,63	-	17.943.494,00	2.262.045.064,63
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.280.809.328,00	49.834.000,00	49.834.000,00	2.280.809.328,00
11	DINAS SOSIAL	1.217.718.893,00	-	174.552.782,00	1.043.166.111,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	14.559.296.425,00	-	-	14.559.296.425,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.112.395.357,00	44.300.000,00	44.300.000,00	3.112.395.357,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (BP2KB)	15.296.895.950,00	-	9.089.786,42	15.287.806.163,58
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.807.323.572,29	23.435.000,00	23.435.000,00	16.807.323.572,29
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	767.544.000,00	35.700.000,00	82.010.000,00	721.234.000,00
17	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	56.450.178.586,64	420.557.079,00	968.398.170,35	55.902.337.495,29
18	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	45.026.524.599,64	68.060.000,00	134.615.321,00	44.959.969.278,64
19	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.252.901.141,60	34.862.000,00	202.513.050,00	7.085.250.091,60
20	BADAN PENDAPATAN DAERAH	23.744.054.716,00	-	650.022.254,00	23.094.032.462,00
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.319.372.112,00	-	71.000.000,00	2.248.372.112,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	2.780.319.861,00	20.175.000,00	20.175.000,00	2.780.319.861,00
23	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	407.140.499,00	-	-	407.140.499,00
24	BADAN PERENCANAAN DAERAH	4.435.880.725,00	30.850.000,00	30.850.000,00	4.435.880.725,00
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	9.366.703.392,00	4.078.984.868,00	796.200.900,00	12.649.487.360,00
26	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	25.932.501.966,00	1.663.634.269,00	1.646.265.861,00	25.949.870.374,00
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.179.138.847,00	-	-	2.179.138.847,00
28	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH	45.192.717.884,08	778.999.030,00	60.700.000,00	45.911.016.914,08

29	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.332.110.300,00	-	78.725.000,00	2.253.385.300,00
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.825.201.440,00	-	27.355.000,00	2.797.846.440,00
31	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.642.088.348,00	33.549.170,00	19.400.000,00	1.656.237.518,00
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.555.774.977,00	2.750.000,00	2.750.000,00	5.555.774.977,00
33	KECAMATAN BANGGAE	8.525.913.640,18	168.265.900,00	361.909.628,00	8.332.269.912,18
34	KECAMATAN BANGGAE TIMUR	10.684.812.874,00	-	64.651.500,00	10.620.161.374,00
35	KECAMATAN PAMBOANG	5.185.956.752,00	-	199.596.219,00	4.986.360.533,00
36	KECAMATAN SENDANA	5.638.626.575,00	9.200.000,00	78.830.000,00	5.568.996.575,00
37	KECAMATAN TAMMERODDO	1.306.948.498,00	-	175.206.000,00	1.131.742.498,00
38	KECAMATAN TUBO SENDANA	2.139.356.856,00	-	38.445.000,00	2.100.911.856,00
39	KECAMATAN ULUMANDA	2.678.016.308,00	-	-	2.678.016.308,00
40	KECAMATAN MALUNDA	5.836.965.508,00	35.193.000,00	29.056.000,00	5.843.102.508,00
		2.682.552.682.545,63	80.964.228.657,55	44.982.356.342,24	2.718.534.554.860,94
					(1.242.650.937.913,49)
					1.475.883.616.947,45

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025

KABUPATEN MAJENE
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
1	DPRD KAB. MAJENE	9.725.863.515,00	225.650.000,00	992.982.500,00	8.958.531.015,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	177.589.805.132,55	1.077.697.023,00	11.503.717.900,00	167.163.784.255,55
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.162.059.285.885,87	8.484.402.501,55	3.247.498.920,27	1.167.296.189.467,15
4	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	104.508.361.286,89	17.282.550.630,00	721.716.666,68	121.069.195.250,21
5	DINAS PERHUBUNGAN	12.873.112.643,32	-	(0,00)	12.873.112.643,32
6	DINAS KESEHATAN	196.260.572.815,88	7.472.958.246,00	1.761.241.545,00	201.972.289.516,88
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	144.577.838.943,28	22.764.036.711,00	15.474.378.123,00	151.867.497.531,28
8	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	539.196.663.832,78	16.158.584.230,00	5.222.990.721,52	550.132.257.341,26
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.279.988.558,63	-	17.943.494,00	2.262.045.064,63
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.280.809.328,00	49.834.000,00	49.834.000,00	2.280.809.328,00
11	DINAS SOSIAL	1.217.718.893,00	-	174.552.782,00	1.043.166.111,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	14.559.296.425,00	-	-	14.559.296.425,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.112.395.357,00	44.300.000,00	44.300.000,00	3.112.395.357,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (BP2KB)	15.296.895.950,00	-	9.089.786,42	15.287.806.163,58
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.807.323.572,29	23.435.000,00	23.435.000,00	16.807.323.572,29
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	767.544.000,00	35.700.000,00	82.010.000,00	721.234.000,00
17	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	56.450.178.586,64	420.557.079,00	968.398.170,35	55.902.337.495,29
18	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	45.026.524.599,64	68.060.000,00	134.615.321,00	44.959.969.278,64
19	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.252.901.141,60	34.862.000,00	202.513.050,00	7.085.250.091,60
20	BADAN PENDAPATAN DAERAH	23.744.054.716,00	-	650.022.254,00	23.094.032.462,00
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.319.372.112,00	-	71.000.000,00	2.248.372.112,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	2.780.319.861,00	20.175.000,00	20.175.000,00	2.780.319.861,00
23	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	407.140.499,00	-	-	407.140.499,00
24	BADAN PERENCANAAN DAERAH	4.435.880.725,00	30.850.000,00	30.850.000,00	4.435.880.725,00
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	9.366.703.392,00	4.078.984.868,00	796.200.900,00	12.649.487.360,00

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024	Mutasi		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025
			Tambah	Kurang	
26	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	25.932.501.966,00	1.663.634.269,00	1.646.265.861,00	25.949.870.374,00
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.179.138.847,00	-	-	2.179.138.847,00
28	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH	45.192.717.884,08	778.999.030,00	60.700.000,00	45.911.016.914,08
29	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.332.110.300,00	-	78.725.000,00	2.253.385.300,00
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.825.201.440,00	-	27.355.000,00	2.797.846.440,00
31	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.642.088.348,00	33.549.170,00	19.400.000,00	1.656.237.518,00
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.555.774.977,00	2.750.000,00	2.750.000,00	5.555.774.977,00
33	KECAMATAN BANGGAE	8.525.913.640,18	168.265.900,00	361.909.628,00	8.332.269.912,18
34	KECAMATAN BANGGAE TIMUR	10.684.812.874,00	-	64.651.500,00	10.620.161.374,00
35	KECAMATAN PAMBOANG	5.185.956.752,00	-	199.596.219,00	4.986.360.533,00
36	KECAMATAN SENDANA	5.638.626.575,00	9.200.000,00	78.830.000,00	5.568.996.575,00
37	KECAMATAN TAMMERODDO	1.306.948.498,00	-	175.206.000,00	1.131.742.498,00
38	KECAMATAN TUBO SENDANA	2.139.356.856,00	-	38.445.000,00	2.100.911.856,00
39	KECAMATAN ULUMANDA	2.678.016.308,00	-	-	2.678.016.308,00
40	KECAMATAN MALUNDA	5.836.965.508,00	35.193.000,00	29.056.000,00	5.843.102.508,00

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025

KABUPATEN MAJENE
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2025

No	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	DPRD KAB. MAJENE											-
2	SEKRETARIAT DAERAH											-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	724.330.657			130.637.812							854.968.468,55
4	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN											-
5	DINAS PERHUBUNGAN											-
6	DINAS KESEHATAN											-
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	15.025.570.450						15.025.570.450				-
8	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	386.211.620										386.211.619,60
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											-
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											-
11	DINAS SOSIAL											-
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											-
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											-
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (BP2KB)											-
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN											-
16	DINAS KETAHANAN PANGAN											-
17	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN											-
18	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN											-
19	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH											-
20	BADAN PENDAPATAN DAERAH											-
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											-
22	INSPEKTORAT DAERAH											-
23	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											-
24	BADAN PERENCANAAN DAERAH											-
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN											-
26	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	83.971.095						83.971.095,00				-

[illegible]

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025

KABUPATEN MAJENE
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2025

[illegible]

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025

KABUPATEN MAJENE
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

NO	S K P D	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	DPRD KAB. MAJENE	4.152.415.000,00	878.282.500,00	3.385.265.000,00	1.645.432.500,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	3.280.686.517,00	-	-	3.280.686.517,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.917.008.251,50	816.160.673,00	37.947.569,00	4.695.221.355,50
4	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	207.225.390,00	77.500.540,00	21.487.340,00	263.238.590,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	1.176.952.992,68	-	8.149.840,00	1.168.803.152,68
6	DINAS KESEHATAN	4.879.234.762,00	42.598.562,00	210.535.000,00	4.711.298.324,00
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	6.931.540.539,00	-	-	6.931.540.539,00
8	DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA	15.790.838.989,68	240.782.165,00	-	16.031.621.154,68
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	208.957.861,33	17.943.494,00	-	226.901.355,33
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	216.803.131,00	-	20.234.000,00	196.569.131,00
11	DINAS SOSIAL	25.004.000,00	174.552.782,00	-	199.556.782,00
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12.750.000,00	-	-	12.750.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	99.161.000,00	-	-	99.161.000,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (BP2KB)	1.300.396.414,00	7.822.448,00	199.253.634,00	1.108.965.228,00
15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	104.657.000,00	-	-	104.657.000,00
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	24.930.000,00	10.850.000,00	-	35.780.000,00
17	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	271.341.197,71	236.488.170,35	110.180.000,00	397.649.368,06
18	DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	149.055.039,00	-	-	149.055.039,00
19	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.304.822.580,00	202.513.050,00	104.911.000,00	1.402.424.630,00
20	BADAN PENDAPATAN DAERAH	941.445.635,00	624.522.254,00	384.002.593,00	1.181.965.296,00
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	246.175.746,00	71.000.000,00	83.478.000,00	233.697.746,00
22	INSPEKTORAT DAERAH	12.600.000,00	-	-	12.600.000,00
23	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	27.713.230,00	-	4.944.000,00	22.769.230,00
24	BADAN PERENCANAAN DAERAH	451.473.814,00	-	103.697.390,00	347.776.424,00

NO	S K P D	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	9.404.528.920,00	796.200.900,00	2.415.544.600,00	7.785.185.220,00
26	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.530.540.125,00	828.832.000,00	52.000.000,00	2.307.372.125,00
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	69.299.700,00	-	-	69.299.700,00
28	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH	833.803.667,00	54.700.000,00	-	888.503.667,00
29	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	217.346.250,00	78.725.000,00	-	296.071.250,00
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA	94.850.000,00	27.355.000,00	19.210.000,00	102.995.000,00
31	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	63.080.240,00	-	-	63.080.240,00
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	187.689.750,00	-	-	187.689.750,00
33	KECAMATAN BANGGAE	198.088.518,00	193.643.728,00	6.800.000,00	384.932.246,00
34	KECAMATAN BANGGAE TIMUR	731.914.044,51	5.100.000,00	43.279.083,00	693.734.961,51
35	KECAMATAN PAMBOANG	206.560.000,00	199.596.219,00	27.950.000,00	378.206.219,00
36	KECAMATAN SENDANA	154.540.198,00	69.630.000,00	19.935.000,00	204.235.198,00
37	KECAMATAN TAMMERODDO	89.942.000,00	175.206.000,00	-	265.148.000,00
38	KECAMATAN TUBO SENDANA	1.564.755.500,00	38.445.000,00	-	1.603.200.500,00
39	KECAMATAN ULUMANDA	67.284.000,00	-	-	67.284.000,00
40	KECAMATAN MALUNDA	114.902.500,00	19.556.000,00	-	134.458.500,00

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA

KABUPATEN MAJENE
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

[illegible]

LAMPIRAN XVII
Nomor
Tanggal
Tentang

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
:
:
: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KABUPATEN MAJENE
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	.2	3	4	5	6
	Utang Pihak Ketiga	-	-	-	-
	Utang PFK	13.841.239,00	40.545.392,00	13.841.239,00	40.545.392,00
	Pendapatan diterima dimuka	3.583.333,33	82.500.000,00	3.583.333,33	82.500.000,00
	Utang Belanja	69.503.645.105,00	22.829.701.656,00	42.162.025.080,00	50.171.321.681,00
JUMLAH		69.521.069.677,33	22.952.747.048,00	42.179.449.652,33	50.294.367.073,00

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025

KABUPATEN MAJENE
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2025

[illegible]

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan

KABUPATEN MAJENE
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TA 2025 DAN DIANGGARKAN
KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

0

[illegible]

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 & 2024

No.	BUMD / Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11 (9+10)	12	13	14	15	16	17	18	19 (17x18)
1	Bidang Jasa Lainnya																	
2	Perusahaan Daerah Air Minum			9.577.797.269,00	25.024.969.160,00	334.056.276,00	34.936.822.705,00	-	93.111.110	93.111.110,00	13.993.520.409,00	-	36.378.322.777,00	-	(15.528.131.591,00)	34.843.711.595,00	100	34.843.711.595,00
3	Perusahaan Daerah Aneka Usaha			28.378.860.042,15	11.363.426.023,59	500.000.000,00	40.242.286.065,74	12.134.831,00	-	12.134.831,00	4.112.000.000,00	-	-	-	36.118.151.234,74	40.230.151.234,74	100	40.230.151.234,74
JUMLAH				37.956.657.311,15	36.388.395.183,59	834.056.276,00	75.179.108.770,74	12.134.831,00	93.111.110,00	105.245.941,00	18.105.520.409,00	-	36.378.322.777,00	-	20.590.019.643,74	75.073.862.829,74		75.073.862.829,74

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 & 2024

No.	BUMD / Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan Diluar Usaha	Beban Diluar Usaha	Laba (Rugi) sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Jasa Lainnya								
	Perusahaan Daerah Air Minum			4.917.697.055,00	5.416.288.600,00	(498.591.545,00)	58.111.727	20.484.444	(419.995.374,00)
	Perusahaan Daerah Aneka Usaha			208.915.328,00	3.199.220.139,11	(2.990.304.811,11)	1.547.356.038,80	39.026.779,26	(1.481.975.551,57)
JUMLAH				5.126.612.383,00	8.615.508.739,11	(3.488.896.356,11)	1.605.467.765,80	59.511.223,26	(1.901.970.925,57)